

JEJAK PARA PEMIMPIN



Hanta Yuda AR & Tim Poltracking

JEJAK PARA PEMIMPIN

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1. 000. 000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5. 000. 000. 000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).

JEJAK PARA PEMIMPIN

Disusun Oleh:
Tim Riset dan Penulis
POL-TRACKING INSTITUTE



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



JEJAK PARA PEMIMPIN

Hanta Yuda AR & Tim Poltracking

Tim Riset Poltracking: Agung Baskoro, Ahmad T. W. Wibowo,
Ali Rif'an, Arya Budi, Danis T Saputra W, Faisal A. Kamil,
Maykel Ivan Situmorang, Agung Budiono

Copyright © 2014 Hanta Yuda AR & Tim Poltracking

GM 20701140006

Copyright © 2014 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building, Blok I Lantai 5
Jl. Palmerah Barat 29–37, Jakarta 10270
Anggota IKAPI, Jakarta, 2014

Perancang Sampul & Penata Letak: Mulyono

www.gramediapustakautama.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN 978-602-03-0548-6

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
PENGANTAR PENULIS	1
PROLOG.....	3
 ABURIZAL BAKRIE	 15
Jatuh Bangun Membesarkan Bisnis Keluarga	19
Masuk ke Rimba Politik	22
Tersandung Lumpur Panas.....	23
Ketum Golkar dan Capres Partai Golkar 2014	26
Visi Indonesia: Negara Kesejahteraan 2045.....	27
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	31
 AHMAD HERYAWAN	 35
Da'i Politisi	38
Sahabat Keluarga.....	40
Memimpin Bumi Parahyangan	42
Moderat dan Inklusif: Aher dan PKS	45
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	48
 AKBAR TANDJUNG	 53
HMI Sebagai Basis Persemaian Pemikiran.....	56
Golkar: Rumah Ideologi dan Idealismenya	60
Pengalaman di Pemerintahan dan Parlemen	64

Gagasan di Masa Transisi Demokrasi	65
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	69
ALI MASYKUR MUSA.....	73
Demokrasi dalam Keluarga.....	75
Mengantar PKB Kembali ke Parlemen	77
Memimpin PKB Gus Dur	80
Menjadi Anggota BPK	82
Memiliki Basis Sosial Islam	83
Ayo Bergerak! Sebuah Gagasan Kebangsaan.....	84
Ikut Konvensi Partai Demokrat.....	86
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	88
ANIES BASWEDAN.....	91
Masa Kecil dan Pendidikan	94
Mengabdikan untuk Ibu Pertiwi	98
Yayasan Indonesia Mengajar, Mendidik Kewajiban Orang Terdidik	99
Melunasi Janji Kemerdekaan	101
Konvensi dan Ide Baru Volunterisme Politik.....	102
Peluang dan Tantangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014	104
ANIS MATTALATTA	107
Agama adalah Solusi	110
Bukan Politikus Karbitan	111
Gelombang Ketiga: Konsep Kepemimpinan Anis.....	114
Integrasi Kekuatan Politik: Menegakkan Benang Basah	116
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014: Persaingan Internal PKS	119
BASUKI TJAHAJA PURNAMA.....	123
Besar di Jakarta	126
Ahok sang Pengusaha	128
Terjun ke Politik	130
Bupati di Kampung Sendiri	131
Loncat ke Senayan.....	132
Cinta yang Sederhana	135

Pendamping Jokowi.....	136
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	137
DAHLAN ISKAN	141
Sang Jurnalis Sejati	143
Filosofi Sarung dan Filosofi Air	144
Total Kekayaan dan Tidak Ambil Gaji	147
Dahlan yang Kontroversi	149
Dahlan dan Terobosan Birokrasi	151
Inovasi Dahlan	152
Menunggu Restu Demokrat.....	155
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	157
DINO PATTI DJALAL	159
Menjadi Ayah dan Seorang Muslim.....	164
Indonesia Unggul.....	167
Pemimpin 2014	169
ENDRIARTONO SUTARTO	173
Pilih Dokter atau Militer?	174
Berkarier di Militer.....	177
Cita-Cita Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	182
Birokrasi yang Netral	184
Toleransi dan Profesionalitas TNI	186
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	188
GITA WIRJAWAN	191
Bukan dari Keluarga Biasa.....	193
Jazz dan Golf	194
Karier dan Bisnis	197
Menjadi Menteri Perdagangan	200
Terjun ke Politik	201
Serius di Konvensi Demokrat	203
Gita Berani untuk Lebih Baik.....	206
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	208

HARY TANOESOEDIBJO	211
Memulai dari Nol	213
Sepakbola dan Tinju	216
Menembus Dunia Politik	217
Bukan Cawapres Injury Time	220
Persatuan Indonesia untuk Perubahan	222
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	224
 HATTA RAJASA.....	 229
Dongeng Hatta	232
Hattanomics.....	234
Hatta: Berkerja Nyata	237
Hatta dan 2014	241
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014.....	244
 HAYONO ISMAN	 247
Putra Kosgoro.....	249
Berprestasi di Saat Krisis	250
Tak Bergantung pada Kharisma.....	253
Konflik di Kosgoro.....	256
Untuk Rakyat Sampai Akhir Hayat	258
Butuh Kerja Keras Lebih Tapi Ada Peluang	260
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	261
 HIDAYAT NUR WAHID.....	 263
Ustad Hidayat	265
Hidayat dan PKS	268
Menjadi Ketua MPR	272
Islam dalam Bingkai Demokrasi	274
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	275
 IRMAN GUSMAN	 279
Keluarga Saudagar Emas.....	280
Pengusaha Muda	282
Masuk Gelanggang Politik	284

Memperjuangkan Daerah	287
SBY Pun Hadir di Sidang DPD.....	290
Konvensi Partai Demokrat	292
Indonesia Bukan Hanya Jakarta!.....	294
Melokal Sekaligus Mengglobal	296
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	297
ISRAN NOOR.....	301
Jejak Sang Bupati.....	304
Sang Visionaris.....	306
Mendunia Karena Gugatan Churchill Mining	307
Lawan Rezim UU Minerba.....	309
Konvensi Rakyat dan Mukernas PPP	310
Peluang dan Tantangan Jelang Pemilihan Presiden 2014	312
JOKO WIDODO.....	317
Bersahabat dengan Nestapa.....	318
Cinta dan Bisnis.....	320
Mengayuh Idealisme di Jagat Politik	326
“Ngewongke” Para PKL	329
Jokowi dan Nalar Esemka.....	332
Melenggang ke DKI Jaya.....	333
Gagasan: Blusukan, Tegas dan Baru	334
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	337
JUSUF KALLA	341
Pewaris Mahkota.....	345
Karier Politik.....	347
Menuju Istana	348
Wapres Gaya Saudagar.....	350
Tangani Konflik dengan Manajemen Bisnis.....	352
Menjadi Capres	353
Terus Beraktivitas.....	354
Kallanomics.....	355
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	357

MAHFUD MD.....	361
Berbaju NU, Berbadan Muhammadiyah.....	365
Menjadi Pejabat Tanpa Sepeser Uang	368
Tiga Amalan Mahfud MD.....	370
Dari Akademisi, Menteri, Poltisi, hingga Penjaga Konstitusi	372
Gagasan Politik: Penegakan Hukum dan Keadilan menjadi Agenda Utama	375
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	378
 MARZUKI ALIE	 383
Bos BUMN yang Religius	384
Pengalaman Pahit yang Berharga	387
Amanah Sebagai Ketua DPR.....	388
Loyalis Demokrat	392
Kemandirian Inovasi dan Iptek	393
Marzuki dan Konvensi	395
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	399
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI	 403
Bukan Istri Biasa.....	406
Korban Politik.....	408
Menjadi Presiden	410
Ibu Presiden ‘Diam Itu Emas’	412
Megawati-SBY	414
Pemimpin Kharismatik: Mimpi Indonesia Raya	418
Maju Kembali atau Permissi	421
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	423
 MUHAJMIN ISKANDAR	 425
Akrab Dipanggil Cak Imin	427
Karier Politik.....	428
Santri Gus Dur	430
Menakertrans	433
Pejuang Demokrasi	436
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	439

PRABOWO SUBIANTO	443
Tentara sebagai Pilihan Hidup.....	445
Komandan Baret Merah	448
Misteri Mei 1998	450
Soeharto Undur Diri.....	453
Tragedi Pemecatan	454
Menjadi Pengusaha Sukses	455
Berjuang di Kancah Politik	456
Prabowo dan 6 Program Aksi Gerindra	458
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	462
 PRAMONO EDHIE WIBOWO.....	 465
Meniti Karier Kemiliteran	467
Pemikiran untuk Bangsa	471
Tiket Menuju RI 1	474
Jenderal Bintang Empat di Konvensi Demokrat	476
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	479
 PUAN MAHARANI	 481
Secuplik Kenangan dari Masa Kecil	483
Masuk Gelanggang	487
Pemikiran Kepemudaan	489
Puan: Teruskan Perjuangan!	492
Menunggu Keputusan	496
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	498
 RHOMA IRAMA.....	 501
Mendandang Bangsa.....	507
Merapat ke Dunia Politik.....	510
Rhoma Irama: Nasionalis dan Religius	512
Rhoma for President: Bukan Sekedar Popularitas	515
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	519
 SINYO HARRY SARUNDAJANG	 521
Sarundajang Si Anak Minahasa	522

Khalifah dan Duta Perdamaian	524
Blue Economy	528
Gubernur Sekaligus Ilmuwan Otonomi Daerah	531
Sarundajang dalam Konvensi Demokrat	533
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	536
SURYA PALOH	539
Dari Katering hingga Media	540
Terjun ke Politik	543
Pidato dan Orasi ala Bung Karno	546
Restorasi, Sebuah Gagasan Nasional.....	549
Tantangan dan Peluang di Pilpres 2014	553
SURYADHARMA ALI.....	557
Surya dari Ciputat	559
Menata Partai Ka'bah.....	559
Menapak ke Pemerintahan	562
Amirul Haj	563
Antara Pendidikan, Islam, dan Pancasila	565
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	569
SUTIYOSO	573
Sutiyoso Muda	574
Karier Kemiliteran.....	577
Dari Pemimpin Militer ke Pemimpin Sipil	580
Persembahan untuk Megapolitan Jakarta	583
Indonesia: Garapan Pengabdian Berikutnya.....	587
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	589
SYAHRUL YASIN LIMPO	593
Bertumbuh Sebagai Anak Nakal.....	595
Karier Pemerintahan	599
Mendorong Inovasi Daerah.....	605
Kepala Daerah Berkualitas Kepala Negara	608
Peluang dan Tantangan Jelang Pemilu	610

TRI RISMAHARINI.....	615
Walikota Taman	616
Terkenal hingga Mancanegara.....	619
Memanusiakan Manusia	621
Batu Sandungan	623
Gagasan Politik: Pemimpin Progresif dan Humanis	627
Pembuktian Risma	628
 WIRANTO	 633
Wiranto Kecil di Solo	634
Berkarier di Militer.....	637
Menapak Jejak The Smiling General.....	639
Menimba Pelajaran dari Tiga Presiden	642
Mengayuh Idealisme di Kancah Politik	645
Wiranto dan Hanura.....	647
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	650
 YUSRIL IHZA MAHENDRA	 653
Akademis dan Organisatoris.....	656
Trah Masyumi.....	658
Menyiapkan Pak Harto Lengser	661
Menteri di Tiga Presiden.....	663
‘Pemberontakan Yusril’	664
Menata Negara: Mewujudkan Keadilan dan Negara Hukum	666
Tantangan untuk Yusril	669
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014	670
 EPILOG	 673
DAFTAR PUSTAKA	677

PENGANTAR PENULIS

Lahirnya buku ini berawal dari gagasan yang paling pokok, bahwa dalam memilih pemimpin diperlukan sejenak membuka kembali rekam jejak (*track record*) dan visi-misi pemikiran seorang kandidat. Tidak cukup hanya dalil popularitas dan elektabilitas yang kini menghegemoni persepsi publik sebagai alasan utama dalam menyeleksi dan memilih pemimpin. Karena itu, rekam jejak harus dijadikan landasan penting bagi publik dalam menyeleksi dan memilih pemimpin. Di tengah kondisi kebangsaan yang pekat dengan aroma oligarki dan pragmatisme, Indonesia memerlukan dan kepemimpinan yang mampu “bernafas panjang”, yakni sudah melampaui tempaan dan mengarungi turbulensi kepemimpinan, serta telah selesai dengan dirinya.

Sejatinya rakyat membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan paripurna, yang tak hanya memenuhi prasyarat minimal—mampu mensinergikan antara kata dan perbuatan (berintegritas)—tetapi juga cermat mendiagnosa, tepat menawarkan solusi sekaligus piawai menggerakkan rakyat untuk bekerja bersama menyelesaikan segala problem kebangsaan. Tentu mereka telah melalui serangkaian proses seleksi (formal atau informal), berinteraksi dengan masalah, konsistensi terhadap tanggung jawab, serta kematangan dalam mengambil keputusan. Karena itu, diperlukan kemampuan dan pengalaman kepemimpinan yang memadai dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan, serta selalu siap berkeringat bekerja untuk rakyat.

Jika hari ini sebagian dari kita merasa “galau”—atau bahkan pesimis melihat masa depan Indonesia—maka kegalauan dan pesimisme itu mungkin terobati dengan sejenak menyimak cerita sukses kepemimpinan dari salah satu, dua, atau beberapa figur dari 35 tokoh—yang terdiri dari tokoh senior, tokoh muda, dan tokoh daerah— dalam buku ini. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang memiliki segudang pengalaman dalam berbagai bidang, tak lahir dan tumbuh dalam ruang kosong, tapi melalui tempaan yang amat luar biasa. Selain sebagai ikhtiar untuk memberikan tambahan referensi (sumbangan informasi) dan mengirim pesan kepada publik bahwa masih banyak stok pemimpin berkualitas, kehadiran buku ini diharapkan bisa menjadi jembatan bagi tokoh-tokoh potensial di republik ini agar jejak kepemimpinan dan gagasan mereka kian dikenal masyarakat.

Harapannya, siapapun yang terpilih dan dipercaya adalah para bibit unggul yang memiliki integritas, kualitas, dan kapabilitas terbaik yang siap bekerja untuk rakyat, sehingga mimpi berjalannya sebuah pemerintahan presidensial yang efektif, bersih, dan bertanggungjawab dapat segera terwujud. Terakhir, Pemilu Presiden 2014 adalah panggung yang membuka kesempatan sekaligus banyak kemungkinan bagi siapapun pemimpin yang ditulis dalam buku ini. Skema tokoh-tokoh dalam buku ini tak harus disempitkan hanya untuk posisi Capres-Cawapres 2014 semata, mengingat begitu luasnya medan kontribusi kepemimpinan yang bisa disumbangkan bagi perbaikan negeri. Di atas semua itu, ada begitu banyak pelajaran hidup dan kisah sukses (*success story*) inspiratif para pemimpin yang bias dipetik dan layak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat membaca !

Jakarta, 8 April 2014

Hanta Yuda AR

Direktur Eksekutif Poltracking

PROLOG

Pilpres 2014, Kursi Panas Para Kandidat

Terkait dengan pemilu 2014, kandidasi kursi eksekutif barang kali lebih menarik karena dua alasan, pertama, panggung pilpres 2014 adalah panggung terbuka karena secara konstitusional *incumbent* kini absen. Kedua, nalar presidensial mengakibatkan jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus menjadi sangat kuat dan sekaligus 'nikmat' untuk diperebutkan. Di titik inilah, proses politik intra-partai yang terjadi beberapa bulan ke depan menjadi sangat krusial. Karena hanya institusi partai-lah yang absah mencalonkan presiden (UUD 1945 pasal 6A) dengan kualifikasi perolehan suara atau kursi tertentu (UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden).

Di sisi lain, saat ini dalam perilaku memilih publik, *figure id* jauh lebih besar dibandingkan dengan *party id*. Hasil survei Pol-Tracking Institute baik pada Oktober 2013 maupun Desember 2013 dengan responden masing-masing 2010 dan 1200 responden dengan hak pilih, menunjukkan bahwa tak lebih dari 20% publik yang menyatakan dekat dengan partai politik tertentu. Terjadi ketidakpercayaan publik terhadap partai, sehingga publik pemilih menaruh harapan politiknya pada Figur. Publik akan jauh lebih tertarik untuk menyebut dirinya sebagai relawan atau fans SBY atau Jokowi dibandingkan jika menyebut dirinya sebagai relawan atau simpatisan Partai Demokrat atau PDIP. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pimpinan partai adalah patron partai yang sudah teruji kepemimpinannya.

Menurut Susan Stokes dan Luis Fernando Media (2002) dalam *Clientelism as Political Monopoly*, prasyarat menjadi seorang patron di dalam partai sebenarnya sederhana, tiga hal yang harus dia miliki: *skills*, *links*, dan *resource*. Tatapi pengalaman politik kepartaian di Indonesia menunjukkan ada dua sumber lain: 1) genetika politik atau keturunan, dan 2) tingkat penerimaan publik atau elektabilitas yang tinggi. Namun, hasil survei *assessment* atau uji kelayakan figur oleh 100 *public opinion makers* dan pakar selama sejak Agustus 2012 sampai awal Oktober 2012 setelah metode meta-analisis dan FGD, menunjukkan bahwa ada banyak figur muda dan kalangan profesional yang mempunyai potensial dan kepantasan dalam kandidasi 2014. Ada tiga belas aspek yang dinilai terhadap masing-masing figur seperti integritas, kapabilitas, visioner, kepemimpinan, pengalaman prestatif, keberanian memutuskan, empati/aspiratif, kematangan emosi, kewibawaan/charisma, komunikasi publik, komunikasi elit, akseptabilitas publik, dan terakhir adalah askeptabilitas partai. Jika semua nilai masing-masing figur dibuat rerata, maka secara keseluruhan rerata skor terendah figur yang terseleksi ada pada aspek akseptabilitas publik (53,7), dan rerata tertinggi pada aspek kapabilitas (62,2). Kalkulasi *assessment* ini menunjukkan fenomena politik yang sejauh ini menjadi asumsi publik. Artinya, berdasarkan haris riset ini (dengan standar ketercukupan adalah 60,0), banyak figur muda baik sebagai kader partai maupun di luar kelembagaan partai dalam kepemimpinan professional atau komunitas yang mempunyai kapasitas dan kepantasan sebagai kandidat alternatif. Namun, hanya beberapa saja yang dapat diterima publik.

Kuatnya potensi dan kapasitas beberapa figur muda dalam internal partai namun lemah dalam penerimaan publik (53,7) sangat kontras dengan fakta kepartaian di Indonesia era perjuangan kemerdekaan. Sebut saja, jabatan eksekutif seperti presiden diperoleh oleh para figur muda dengan umum yang jauh lebih muda dari era saat ini. Dalam satu era tata pemerintahan parlementer, jabatan perdana menteri dipegang oleh para figur muda: Soetan Sjahrir (36), Amir Sjarifoeddin Harahap (46), Mohammad Hatta (46), Soesanto (49), Abdul Halim (38), Mohammad Natsir (42), Wilopo (42), Ali Sastroamidjojo (53), Burhanudin Harahap (38), dan terakhir adalah Djuanda Kartawidjaja (46). Berdasarkan survei nasional Pol-Tracking Institute pada Oktober 2013, capres dari kalangan

generasi muda (36%) cenderung disukai dibandingkan generasi tua (17%). Namun demikian, ada 42% pemilih menyatakan usia capres bukan sebuah pertimbangan memilih. Artinya, publik-pemilih yang menginginkan hadirnya capres dari generasi baru dalam Pemilu Presiden 2014 cukup besar, kendatipun mayoritas tidak mempersoalkan usia capres.

Di sisi lain, jika merujuk temuan *Pol-Tracking Institute* terhadap riset *assessment* kepala daerah yang berpotensi sepanjang Januari-April 2013, ada banyak kepala daerah yang secara kapasitas siap dan terkualifikasi. Melalui tiga metode secara bertingkat: meta-analisis, *focus group discussion*, dan penilaian oleh 100 juri *public opinion maker* dan expert, riset ini menemukan beberapa nama kepala daerah terkualifikasi. Jika menggunakan standar nilai ketercukupan 70,00, maka paling tidak ada enam kepala daerah yang potensial sebagai alternatif sirkulasi kepemimpinan nasional pada pilpres 2014. Berdasarkan riset *assessment* ini, mereka adalah Joko Widodo (82,54), Tri Rismaharini (76,33), Syahrul Yasin Limpo (70,31), dan Isran Noor (70,14), yang juga secara kebetulan pada masa pencalonannya diusung oleh tiga partai besar atau kini menjadi kadernya: PDIP, Golkar, dan Demokrat. Pelacakan ini didasarkan pada pelaksanaan ide otonomi daerah—sejak 2001 (UU Pemerintahan Daerah 1999—sehingga kepala daerah hampir sama sebagai ‘presiden lokal’ karena otoritasnya atas kebijakan dan inovasi kepemimpinan dengan campur tangan pusat yang minor. Sehingga, kepala daerah pada dasarnya berpotensi namun sayangnya sulit berpeluang dalam kandidasi persiden.

Ada beberapa hal penting mengapa kepala daerah berpotensi dalam sirkulasi kepemimpinan Indonesia saat ini. Pertama, era otonomi yang dimulai sejak 2001 menempatkan kepala daerah sebagai ‘presiden’ di tingkat lokal karena kapasitasnya dalam melahirkan inovasi dan terobosan kebijakan. Kedua, hasil riset *Pol-Tracking Institute* menunjukkan bahwa ada banyak kepala daerah mempunyai kapasitas dan kualitas dalam memimpin. Ketiga, konteks liberalisasi politik yang massif pasca reformasi menciptakan ruang bagi siapapun untuk mengakses jabatan publik secara pantas dan berkapasitas.

Banyak beberapa negara di dunia dengan sistem politik sama sebagai negara presidensial yang mempunyai pengalaman *presidential candidacy* dari daerah. Sebagai misal, Iran dengan Mahmoud Ahmadinejad (walikota

Teheran), Uruguay era kepemimpinan Tabaré Vázquez (2005-2010) yang juga seorang walikota Montevideo (1990-1995), atau Nigeria di bawah Umaru Yar'Adua (2007-2010) yang awalnya adalah gubernur Katsina di Nigeria. Pun demikian masih lebih banyak contoh dari sejarah kepresidenan di Amerika Serikat yang berangkat dari Gubernur negara bagian seperti George Walker Bush (gubernur Texas 1995-2000), Bill Clinton (Gubernur Arkansas selama 12 tahun), Jimmy Carter (mantan Gubernur Georgia), atau Franklin D. Roosevelt yang merupakan mantan Gubernur New York. Orang-orang ini adalah contoh sederhana untuk menjelaskan bahwa Indonesia dengan *democratic environment* seperti saat ini juga berpotensi untuk melahirkan kepemimpinan dari daerah. Poin pentingnya bukan pada 'dari daerah' namun pada kapasitasnya sebagai eksekutor yang berpengalaman, prestatif, dan bervisi kebangsaan.

Selain kedua riset tersebut, buku ini ditulis sebagai kelanjutan dari Survei Nasional Opini Publik elektabilitas *top of mind* pada survei Oktober 2013 dan Desember 2013. Kemudian ditambah data hasil Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. Dan untuk memperkuatnya hal ini secara keseluruhan, temuan survei nasional Pol-Tracking Institute secara spesifik menunjukkan beberapa kriteria penting Capres 2014 ke depan, berturut-turut hasil tertingginya, kemampuan menyelesaikan masalah (45.95%) serta karakter dan kualitas personal (32.61%), sedangkan, informasi apa yang harus dimiliki seorang Capres, berturut-turut hasilnya, visi, misi, dan program (37.61%) dan rekam jejak dan latar belakang pengalaman (31.03%).

Akhirnya nama-nama yang masuk dalam keempat kategori riset/survei tersebut selain diseleksi melalui meta-analisis pemberitaan media, juga memperhatikan dinamika proses kandidasi/pencalonan di parpol-parpol. Mengingat persyaratan pengusungan capres-cawapres menurut konstitusi harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Untuk pendalaman dilakukan *focus group discussion* (FGD) dalam rangka menganalisis lebih jauh nama-nama yang terseleksi, dan memastikan kandidat tidak menyandang status tersangka/ terdakwa/ terpidana, yang menjadi identifikasi penting terkait soal integritas.

Dari serangkaian tahapan proses penarikan kandidat, dihasilkan sebanyak 35 nama yang layak dinilai kompetensi dan kualitas personalnya, yaitu

11 Ketua Umum (Figur Utama) Partai (selain Demokrat), 11 Peserta Konvensi Partai Demokrat, 7 Kepala Daerah yang juga kader partai, serta 6 Tokoh Partai (Non-Ketum). Berikut penjelasannya:

No.	Nama Kandidat	Jabatan Terakhir	Masuk Survei/Riset Pol-Tracking & Kandidasi Partai
1	Aburizal Bakrie	Ketua Umum Golkar	<ul style="list-style-type: none"> Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 Masuk Radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, dan Capres Partai Golkar berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar 2012
2.	Ahmad Heryawan	Gubernur Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. Namanya pernah masuk Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober & Desember 2013, Salah satu bakal Capres hasil Pemira Internal PKS 2014
3.	Ali Masykur Musa	Anggota BPK	<ul style="list-style-type: none"> Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Desember 2013, serta Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
4.	Akbar Tandjung	Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 Salah satu tokoh Golkar yang diperhitungkan di internal Golkar

5.	Anies Baswedan	Rektor Paramdina	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Muda/ Profesional Potensial pada Oktober 2012. Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
6.	Anis Matta	Presiden Partai Keadilan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Muda/ Profesional Potensial pada Oktober 2012. • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Salah satu bakal Capres hasil Pemira Internal PKS 2014
7.	Basuki T Purnama	Wakil Gubernur DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres/Cawapres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013
8.	Dahlan Iskan	Menteri BUMN KIB II	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
9.	Dino Patti Djalal	Dubes Indonesia untuk AS periode 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014

10.	Endiartono Sutarto	Panglima TNI Periode 2002-2006	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
11.	Gita Wirjawan	Menteri Perdagangan KIB II	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, dan Desember 2013. • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
12.	Hary Tanoesoedibyo	Ketua Bappilu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Muda/ Profesional Potensial pada Oktober 2012. • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Cawapres resmi Partai Hanura berpasangan dengan Wiranto hasil Keputusan Partai 2013
13	Hayono Isman	Anggota DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
14	Hatta Rajasa	Ketua Umum Partai Amanat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, serta • Capres resmi Partai Amanat Nasional hasil Rakernas 2011

15	Hidayat Nurwahid	Ketua Fraksi PKS DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, • Salah satu bakal Capres hasil Pemira Internal PKS 2014
16	Irman Gusman	Ketua DPD RI	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset Assessment Public Opinion Maker (POM) Kandidat Muda/ Profesional Potensial pada Oktober 2012. Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013. Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, • serta salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
17.	Isran Noor	Bupati Kutai Timur Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Daerah Potensial pada Mei 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, • Satu dari tujuh nama yang direkomendasikan sebagai Capres hasil Mukernas PPP 2014
18.	Joko Widodo	Gubernur DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Muda/ Profesional Potensial pada Oktober 2012. • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Daerah Potensial pada Mei 2013. Masuk dalam Riset • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Kandidat Capres PDI Perjuangan 2014

19.	Jusuf Kalla	Wakil Presiden Periode 2004- 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Satu dari tujuh nama yang direkomendasikan sebagai Capres hasil Mukernas PPP 2014. dan satu dari 3 nama yang direkomendasikan sebagai Capres PKB 2014
20.	Mahfud MD	Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008- 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober & Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013 • Satu dari tiga nama yang direkomendasikan sebagai Capres PKB 2014
21.	Marzuki Alie	Ketua DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013 serta • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
22.	Megawati Sukarnoputri	Presiden RI Periode 2001- 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013.

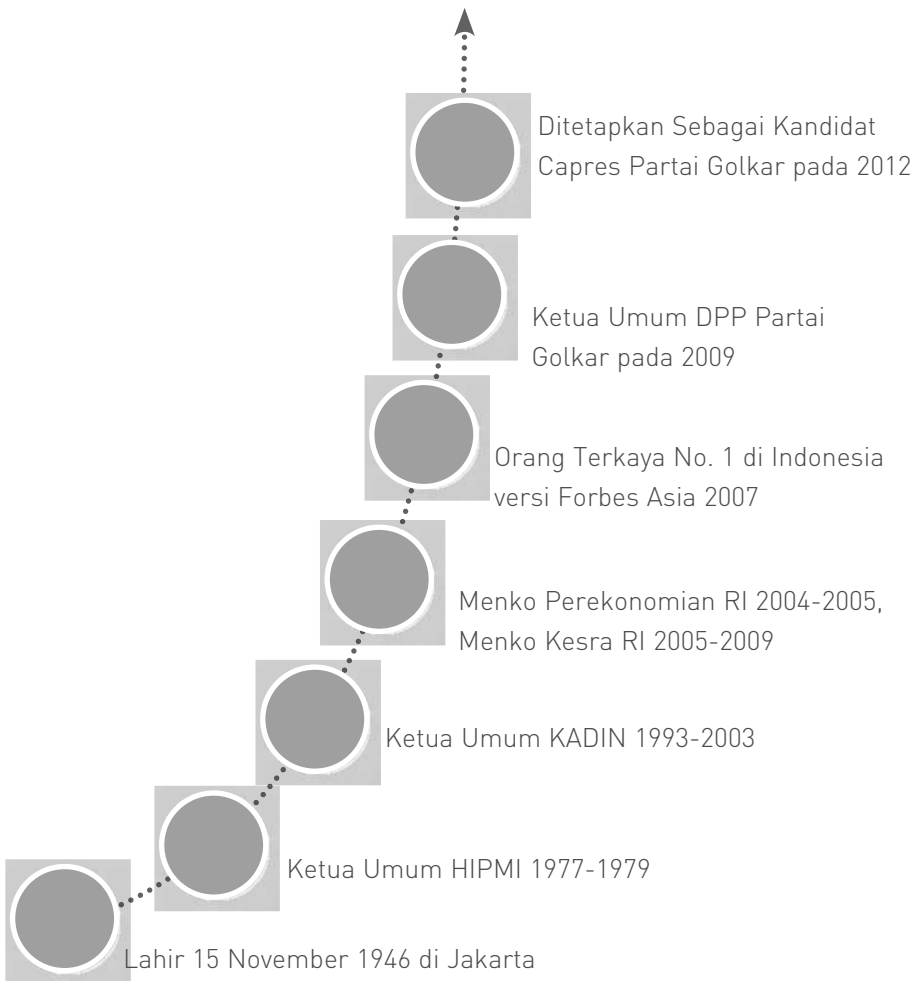
23.	Muhaimin Iskandar	Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Muda/ Profesional Potensial pada Oktober 2012. • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober & Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013
24.	P r a b o w o Subianto	Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Capres resmi Partai Gerindra
25.	Pramono Edhie Wibowo	Kepala Staf TNI Angkatan Darat Periode 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober & Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
26.	Puan Maharani	Ketua Bappilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Muda Potensial pada Mei 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013.
27.	Rhoma Irama	Ketua Umum Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Satu dari tiga nama yang direkomendasikan sebagai Capres PKB 2014

28.	Sinyo Harry Sarundajang	Gubernur Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Daerah Potensial pada Mei 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat 2014
29.	Surya Paloh	Ketua Umum Nasional Demokrat (NasDem)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober & Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013.
30.	Suryadharma Ali	Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober & Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • satu dari tujuh nama yang direkomendasikan sebagai Capres hasil Mukernas PPP 2014.
31.	Sutiyoso	Gubernur DKI Jakarta Periode 2002-2007 dan 2007-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Capres resmi yang diusung PKPI dalam Mukernas 2013

32.	Syahrul Yasin Limpo	Gubernur Sulawesi Selatan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Daerah Potensial pada Mei 2013. • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober dan Desember 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013, • Pernah disebut sebagai salah satu alternatif Cawapres ARB pada Rapimnas Golkar 2012.
33.	Tri Rismaharani	Walikota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Riset <i>Assessment Public Opinion Maker</i> (POM) Kandidat Daerah Potensial pada Mei 2013 • Masuk dalam Riset Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Desember 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013.
34.	Wiranto	Ketua Umum Hanura	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013 • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Capres resmi Partai Hanura berpasangan dengan Hary Tanoesoedibyo hasil Keputusan Partai 2013
35.	Yusril Ihza Mahendra	Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk dalam Survei Nasional Opini Publik elektabilitas <i>top of mind</i> pada survei Oktober 2013, Desember 2013 dan Maret 2013. • Masuk dalam radar opini publik sebagai Capres melalui Riset Media Monitoring Sepanjang Tahun 2013. • Capres Resmi yang diusung Partai Bulan Bintang hasil keputusan partai 2013

ABURIZAL BAKRIE

Pemimpin Potensial





icalbakrie.com

Aburizal Bakrie telah digadang sebagai calon presiden dari Partai Golkar sejak Juli 2012 lalu, jauh mendahului pesaingnya. Meski awalnya mendapat tentangan keras dari keluarganya, ARB, begitu ia akrab disapa, akhirnya memantapkan tekad untuk ikut meramaikan bursa calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

Hingar bingar politik memang tidak mengakar di keluarga ARB. Ayahnya, Achmad Bakrie, adalah seorang pengusaha pribumi sukses yang merintis usahanya dari nol. Achmad Bakrie lahir di Kalianda, Lampung, 11 Juni 1916. Setelah tamat dari Hollandsche Inlandsche School (HIS), Atuk demikian panggilan akrab Achmad Bakrie, bekerja sebagai penjaja keliling di NV Van Gorkom, sebuah perusahaan dagang Belanda. Meski hanya dua tahun di perusahaan tersebut, Atuk mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran berharga tentang pengaturan dalam organisasi modern.

Pada tahun 1940, Atuk bersama Abunyamin, kakaknya, mendirikan perusahaan dagang Bakrie & Brothers di Lampung. Perusahaan ini menjual komoditas pasar seperti kopi, gula dan beras. Pada saat merintis usahanya inilah, Atuk menikah dengan Roosniah Nasution. Roosniah lahir pada 17 Juni 1926 di Pangkalan Berandan, Sumatra Utara. Roosniah lahir dari pasangan H. Achmad Nasution dan H. Halimatusa'diah. Mereka menikah pada 17 November 1945.

ARB adalah si sulung dari empat bersaudara. Lahir 15 November 1946

di Jakarta. ARB lahir tak lama setelah keluarganya hijrah ke Jakarta untuk membesarkan usahanya. Pada awal hijrah ke Jakarta, Bakrie & Brothers merintis kembali usahanya dari bawah. Keluarga ARB bahkan harus mengontrak rumah sebelum akhirnya bisa membeli rumah sendiri. (Pohan, 2011)

Menjalani masa sekolah dasar, ARB dikenal sebagai anak yang baik dan rendah hati. Dia juga terkenal pintar karena sering menjadi juara kelas. Dewi Arkowati, seorang sahabat ARB sewaktu sekolah di SD Perwari Jakarta, pernah menuturkan, ARB merupakan salah satu sang juara di kelas. Setiap ada pertandingan atau lomba, ARB selalu menang. ARB dianggap orang yang selalu beruntung.

ARB beranjak remaja ketika perusahaan ayahnya sedang berkembang. Meski demikian, Achmad Bakrie tidak memanjakan ARB dan adik-adiknya dengan harta yang berlimpah. ARB malah dididik oleh kedua orangtuanya untuk hidup hemat, menghargai uang dan rendah hati kepada semua orang.

ARB menghabiskan masa putih abu-abu di SMA 3 Teladan B Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut sahabat ARB semasa SMA, Azkarmin Zaini, ARB adalah salah satu bintang kelas. Azkarmin sempat mengingat kebiasaan ARB saat sekolah dulu. Menurut Azkarmin, ARB sangatlah serius dalam belajar. Kalau ARB punya pekerjaan rumah, apalagi kalau besok ada ulangan, jangan harap ARB mau diajak bepergian. Andaikata kurang puas dengan hasil ulangan, dia terlihat kesal. Tapi kekesalan itu dilampiaskannya dengan lebih keras lagi belajar mata pelajaran itu. Azkarmin, yang saat ini dikenal sebagai wartawan senior, juga mengatakan pada masa SMA, ARB merupakan seorang pribadi yang luwes bergaul. Temannya banyak, dari kalangan mana saja.

Bersama Azkarmin dan beberapa teman lain, ARB pernah membentuk band musik untuk mengisi pagelaran pada perpisahan sekolahnya. Nama bandnya The BE's, singkatan dari "Basket Eyes". ARB memegang *lead guitar*. Hingga kini, ARB masih menjalin tali persahabatan dengan teman-teman masa kecilnya. Bahkan, Azkarmin dipercaya ARB untuk membangun stasiun televisi milik ARB, ANTV hingga kini. Achmad Bakrie memang mengajarkan ARB dan adik-adiknya untuk mau bergaul dengan semua orang. ARB juga dididik untuk menghargai uang, walaupun hidup serba

berkecukupan. Pernah pada suatu waktu, ARB bermaksud meminjam uang kepada ayahnya sebagai modal usaha. Achmad Bakrie lantas memberinya uang tunai sebesar Rp 16 juta yang ditaruhnya dalam karung. ARB sempat keheranan, mengapa ayahnya menaruh uang itu dalam karung hingga dia sampai susah untuk membawanya. Saat ditanya alasan kepada orang tuanya. Dijawab oleh ayahnya, agar ARB tahu sebanyak apa uang Rp 16 juta itu, selain itu agar dirinya juga berhati-hati menggunakannya. Pengalaman itu membekas dalam diri ARB, hingga kini.

Setamat sekolah menengah, ARB melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia mengambil jurusan Teknik Elektro. Pada masa kuliah ini, ARB banyak berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan. Ia sempat bergabung dalam dewan mahasiswa, serta ikut berbagai demonstrasi pada masa transisi kepemimpinan tahun 1960.

Selain aktif berorganisasi, ARB juga gemar berdagang. Darah bisnis yang diturunkan ayahnya, membuat ARB tak malu berjualan apa saja. Mulai kaos, tas ransel, hingga meja gambar. Sukses berbisnis kecil-kecilan, ARB mencoba peruntungannya sebagai kontraktor rumah dan jembatan. Namun, belum sempat mengecap manis usahanya, ARB dilanda krisis. Salah satu jembatan yang dibangun perusahaannya ambruk akibat diterjang banjir bandang. Ia mengalami kerugian yang cukup besar.





<https://twitter.com/aburizalbakrie/media>

Dalam menghadapi kegagalan, ada satu pelajaran penting yang diajarkan Achmad Bakrie kepadanya. Suatu waktu ARB datang kepada ayahnya. Mengaku kalau dia gagal berbisnis dan mengalami kerugian. Pada saat itu, sang ayah hanya tertawa dan mengatakan jika dirinya senang. ARB kembali terheran dengan sikap ayahnya, kala anaknya gagal berbisnis, dia malah senang. Belakangan ARB tahu bahwa sikap ayahnya itu ditujukan untuk memberikan pelajaran yaitu orang yang tidak pernah gagal, tidak akan pernah berhasil.

Pada tahun 1973, ARB berhasil meraih gelar insinyur. Tak lama setelah lulus, ARB juga menyunting Tatty Murnitriati, adik kelas di kampusnya, untuk menjadi istrinya. Setelah menikah, ARB dikaruniai tiga anak, Anindya Novyan Bakrie, Anindhita Anestya Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie.

Jatuh Bangun Membesarkan Bisnis Keluarga

Selepas kuliah, ARB membantu menjalankan bisnis keluarganya. Awalnya, Achmad Bakrie memperkerjakan ARB di Bakrie & Brothers sebagai karyawan biasa. Setelah dianggap mampu, ARB kemudian diangkat menjadi wakil presiden direktur. Pada tahun 1988, Achmad Bakrie meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, ARB mengambil alih pimpinan Bakrie

& Brothers. Pada masa kepemimpinan ARB, perusahaan ini merambah berbagai bidang baru, seperti industri manufaktur, industri pipa besi, media dan telekomunikasi dan bidang usaha lainnya. Saat itulah, dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil di awal 1990-an, Bakrie & Brothers tumbuh menjadi kelompok usaha yang maju dengan karyawan mencapai lebih dari 50 ribu orang.

Selain sibuk membesarkan usahanya, Aburizal Bakrie juga dikenal sebagai pengusaha yang aktif berorganisasi. ARB tercatat sebagai salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan menjadi ketua umum pada periode 1977-1979. Dia juga sempat menjabat sebagai ketua umum Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII) periode 1989-1994. Selain itu, ARB dipercaya menjadi ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) selama dua periode tahun 1994-2004. (icalbakrie.com, 2014)

Pencalonan diri ARB menjadi ketua umum KADIN pada tahun 1994 tergolong berani. Karena, selain ARB, calon-calon ketua umum KADIN lainnya adalah pengusaha yang didukung penuh presiden kala itu, Soeharto. Benar saja, ketika ARB terpilih, Presiden Soeharto tidak penuh mendukung dirinya sebagai ketua. Bahkan ketika pengurus baru yang dipimpin ARB berkunjung ke istana, Pak Harto menerima 'sekedarnya' dan enggan berfoto bersama. Namun, ARB mampu menjawab keraguan berbagai pihak dengan menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan, dirinya terpilih menjadi Presiden KADIN ASEAN tahun 1996-1998. Di tahun 1997-1998, badai krisis finansial melanda Asia. Indonesia pun terkena dampaknya. Rakyat resah karena harga kebutuhan melonjak tajam. Puncaknya terjadi aksi kerusuhan massa serta demonstrasi mahasiswa yang menurunkan kekuasaan Soeharto yang telah 32 tahun berkuasa.

Bagi pengusaha Indonesia, masa-masa itu merupakan periode kelam. Nilai tukar rupiah yang melemah amat parah, membuat pengusaha papan atas kelimpungan dalam tumpukan utang. Dalam sekejap, perusahaan-perusahaan besar, terancam gulung tikar. Tak terkecuali Bakrie & Brothers. Bagi Aburizal Bakrie dan banyak pengusaha lainnya, saat-saat demikian merupakan *'the days of reckoning'*. Langit seperti runtuh, hasil kerja keras puluhan tahun terasa rapuh. Para pengusaha bukan hanya perlu memikirkan nasib mereka sendiri, namun juga nasib puluhan ribu karyawannya dan keluarga mereka.

ARB menghadapi masa ini dengan tetap bertahan dan menghadapi semua persoalan yang ada. Untuk membayar utang-utang Bakrie & Brothers, ARB tak segan menjual saham keluarga Bakrie sebesar 55 persen. Sisa yang dimiliki keluarga Bakrie hanya 2,5 persen saja. ARB sendiri menjelaskan bahwa dalam tahun-tahun sulit itu, dia dan keluarganya seperti pengemis, sebab walau aset masih tersisa sedikit, namun utang yang harus ditanggung jumlahnya jauh lebih besar.

Keluarga Bakrie harus menghadapi krisis kurang lebih tiga tahun lamanya. Perlahan namun pasti, mereka mulai bangkit dan melunasi utang-utangnya. Pada pertengahan tahun 2001, Aburizal Bakrie bersama adiknya mulai merambah bisnis baru yaitu bisnis energi khususnya batu bara. Waktu itu, bisnis batu bara bukan merupakan primadona. Namun, ARB dan keluarga harus mengambil resiko untuk memulai bisnis ini.

Tanpa modal, dengan hanya berbekal kepercayaan dan relasi, ARB mulai mengakuisisi beberapa perusahaan batubara. Pada saat yang hampir bersamaan, harga batubara di pasar dunia mulai merangkak naik. Perusahaan ARB mulai mendapatkan keuntungan. ARB kemudian merambah usaha baru lainnya seperti bisnis properti, perkebunan dan infrastruktur. Inilah periode kebangkitan kembali Bakrie & Brothers. ARB dapat membangun lagi usaha yang didirikan ayahnya, bahkan semakin lebih besar. Demikian pula ketika krisis ekonomi global tahun 2008 lalu menghantam Indonesia. Kelompok usaha Bakrie masih terus bertahan meskipun tidak juga sedikit masalah yang dihadapinya.

Kesuksesan Aburizal Bakrie bangkit dari keterpurukan krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008 serta usahanya membesarkan Bakrie & Brothers menjadikan dirinya salah satu orang terkaya di Indonesia. ARB masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah ekonomi *Forbes* Asia pertama kali pada tahun 2007. Dia menduduki peringkat pertama pengusaha terkaya di Indonesia, ARB ditaksir memiliki kekayaan US\$ 5,4 miliar atau Rp 50,22 triliun dengan kurs Rp 9.300 (*Detik.com*, 2012). Tahun berikutnya, ARB tercatat memiliki kekayaan US\$ 2,3 miliar dan duduk di posisi ke-10. Namun pada tahun 2011, ARB hanya berada di peringkat 30 dan tahun berikutnya keluar dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia.

Masuk ke Rimba Politik

Pada tahun 2004, ARB membuat keputusan penting bagi karir politiknya. Dia memutuskan meninggalkan bisnisnya untuk serius terjun ke dunia politik, meskipun sebenarnya ARB telah menjadi anggota resmi Golkar sejak 1984. Pada tahun yang sama, ARB menjabat sebagai Dewan Penasehat DPP Partai Golkar untuk masa jabatan hingga tahun 2009. ARB sendiri telah bergabung kedalam partai berlambang beringin ini sejak tahun 1984. Di tahun yang sama, tepatnya Oktober 2004, ARB dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dalam Kabinet SBY-JK. Menjelang pelantikannya, ia mengumpulkan sejumlah anak muda, hampir seluruhnya bergelar Doktor dan Master untuk menjadi tim ahli dan staf khusus Menko Perekonomian.

Selama menjadi Menko Perekonomian, ARB berusaha mendorong percepatan infrastruktur, salah satunya dengan menyelenggarakan *Infrastructure Summit* di 2005. Selain itu, salah satu kinerja ARB selama menjabat sebagai Menteri Perekonomian adalah berhasil melakukan renegosiasi Blok Cepu, antara Exxon USA dengan PT Pertamina yang sudah terkatung-katung nasibnya selama 15 tahun.

Selama enam bulan, negosiasi berjalan alot. Namun, usaha pemerintah melalui ARB, tidak sia-sia. Lewat formula bagi hasil yang berjenjang, proporsi bagi Exxon berkurang drastis. Dari 20 persen menjadi 6,7 persen pada harga minyak dunia tahun 2012. Exxon bersedia menerima pengurangan bagi hasil tersebut dengan catatan mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan sikap pemerintah yang dibutuhkan untuk iklim usaha dan investasi yang positif di Indonesia.

Suksesnya renegosiasi ini adalah prestasi tersendiri bagi pemerintah, khususnya Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, formula bagi hasil yang berjenjang diperkenalkan dalam pengelolaan investasi minyak dan gas. Ini juga tercatat dalam sejarah karena untuk pertamakalinya, renegosiasi berjalan baik dan dapat diterima kedua belah pihak serta menguntungkan Indonesia.

ARB menjabat Menko Perekonomian hanya satu tahun. Dalam perombakan kabinet tahun 2005, posisi ARB digeser Boediono. ARB kemudian dipercaya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko

Kesra). Di posisi barunya, ARB banyak menemukan permasalahan sosial yang sebelumnya jauh dari bidang yang digelutinya.

Baru beberapa hari dilantik sebagai Menko Kesra, ARB dihadapkan pada bencana kelaparan di Yahukimo, Papua. Tercatat, 55 orang warga tewas akibat kelaparan di daerah yang terletak di tengah-tengah pegunungan Jayawijaya. Wilayah Yahukimo sebagian besar berada di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. ARB menjawab bencana kelaparan masal di daerah terpencil ini dengan mengirim Tim Interdep.

Bukan hanya bahan makanan saja yang dikirim ke daerah bencana tersebut, namun sejumlah tim dokter, ahli gizi, penyuluh pertanian, insinyur sipil, alat komunikasi radio, alat pertanian hingga kuda tunggangan ikut dikirim. Setelah tujuh bulan, dengan lebih dari 1.300 kali penerbangan ke Yahukimo, bencana kelaparan masal ini berhasil diatasi (viva.co.id, 2014).

Selain memberikan perhatian bagi kesejahteraan masyarakat Papua, ARB sebagai Menko Kesra juga mendorong diberikannya Kredit untuk Rakyat (KUR) bagi masyarakat kurang mampu. Ia juga mendorong lahirnya kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Tersandung Lumpur Panas

Tanggal 29 Mei 2006 menjadi hari yang tak terlupakan bagi sejarah Indonesia terlebih bagi ARB. Hari itu adalah kali pertamanya terjadi semburan lumpur panas di Sidoarjo, tepatnya di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya. Dan mengganggu aktivitas perekonomian.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas PT Lapindo Brantas, anak perusahaan milik Group Bakrie, sebagai operator blok Brantas (*Tempo.co*, 2008). Semburan lumpur panas ini diduga kuat berkaitan erat dengan aktifitas pengeboran di sumur eksplorasi tersebut. Dugaannya, kesalahan prosedur dalam pengeboran mengakibatkan terjadinya semburan lumpur panas hingga berbulan-bulan lamanya.

Efek kerusakan yang ditimbulkan bencana lumpur ini sangat luar biasa. Berdasarkan laporan resmi pemerintah pada Maret 2007, luapan lumpur panas menghancurkan hampir 10.500 rumah penduduk, 413 hektar sawah, 33 bangunan sekolah dan 65 rumah ibadah. Selain itu 7.762 hektar tambak rusak berat dan sekitar 1.650 ternak mati. Bencana itu juga merusak infrastruktur penting seperti jalan tol, rel kereta api, jaringan listrik, jaringan telepon, saluran irigasi, sistem drainase. Akibat luapan lumpur panas, lebih dari 31 perusahaan yang berada di sekitar lokasi terpaksa tutup dan 2.441 buruh kehilangan pekerjaan (*Indonesia-2014.com*, 2013).

Siapa yang bertanggung jawab? Timbul pro dan kontra mengenai penyebab terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo ini. Namun, banyak pihak menyatakan, kesalahan prosedur pengeboran sebagai penyebabnya. Misalnya dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 29 Mei 2007 menyebutkan ditemukan adanya kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pengeboran.

Di lain pihak, sebagian besar ahli geologi yang berkumpul dalam Konferensi Internasional American Association of Petroleum Geologists (AAPG) bulan Oktober 2008, menyebutkan bahwa penyebab terjadinya semburan lumpur panas ini juga akibat kesalahan prosedur pengeboran PT Lapindo Brantas. Perdebatan penyebab terjadinya luapan lumpur panas ini mengakibatkan terkatung-katungnya proses pemberian ganti rugi korban luapan lumpur.

Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, kasus ini dibawa ke ranah hukum. Sejak 2006, dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah melakukan gugatan di berbagai tingkat pengadilan. Mereka menginginkan PT Lapindo Brantas bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diakibatkan semburan lumpur ini.

Setelah menjalani proses yang panjang, akhirnya hukum menetapkan PT Lapindo Brantas tidak bersalah. Sejak putusan Pengadilan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat di tahun 2007, Pengadilan Tinggi Jakarta di tahun 2008, serta akhirnya keputusan Mahkamah Agung di tahun 2009 menyatakan bahwa semburan lumpur merupakan fenomena alam dan

bukan kesalahan PT Lapindo Brantas. Pengadilan merujuk pada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa semburan itu mungkin diakibatkan oleh bencana alam di Yogyakarta.

Bencana alam yang dimaksud adalah gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi pada 27 Mei 2006, yaitu dua hari sebelum semburan lumpur terjadi. Menurut para ahli yang mendampingi WALHI dan LBH, teori bencana alam ini sebenarnya mengandung banyak kelemahan. Misalnya, gempa Yogya tersebut memiliki kekuatan yang tidak besar untuk dapat menyebabkan semburan lumpur. Gempa itu sudah berlangsung dua hari, berjarak 300 km, tidak ada laporan tentang semburan lumpur di tempat lain dan tidak ada laporan tentang adanya *'kick'* selama gempa berlangsung. Namun pengadilan tetap dengan keputusannya. PT Lapindo Brantas dinyatakan tidak bersalah. Berdasarkan rangkaian keputusan itu, Kepolisian daerah Jawa Timur menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) atas sejumlah kasus tersangka Lapindo. Keputusan itu, pada gilirannya, menyebabkan DPR, pada sidang paripurna terakhir DPR 2004-2009, memutuskan bahwa kasus Sidoarjo itu sebagai bencana alam.

Setelah adanya putusan pengadilan, Presiden SBY lalu mengeluarkan berbagai peraturan mengenai ganti rugi korban lumpur. Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer 14 tahun 2007 yang menyatakan bahwa PT Lapindo Brantas bertanggung jawab melakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah terdampak, secara mencicil dalam beberapa tahun. Adapun seluruh kerugian sosial, lingkungan, ekonomi akan ditanggung pemerintah melalui APBN.

Dengan merujuk pada peraturan presiden itu, PT Lapindo Brantas menerapkan skema pembelian tanah dan bangunan warga. Sebagian dikenakan pola *cash and resettlement*, yaitu warga memperoleh uang dan pemukiman yang dibangun oleh Lapindo, sebagian lagi memperoleh uang tunai dalam pola *cash and carry*.

Karena adanya keputusan hukum itu, Grup Bakrie sebagai salah satu pemegang saham PT Lapindo Brantas berargumen bahwa pembelian tanah warga Sidoarjo sebenarnya bukan merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan mereka, melainkan sekadar wujud tanggung jawab moral keluarga Bakrie.

Dalam berbagai kesempatan, ARB sering mengemukakan, alasan kenapa keluarga Bakrie tetap membeli tanah korban lumpur, meskipun telah ditetapkan sebagai bencana alam. Menurutnya, adalah titah sang ibunda, Roosniah Bakrie yang meminta kepada ARB untuk tetap membantu korban lumpur, walaupun secara hukum tidak terbukti bersalah.

Hingga kini, keluarga Bakrie diklaim telah mengeluarkan 9 triliun rupiah untuk membeli tanah dan bangunan milik korban yang berada di dalam peta terdampak. Namun, itu belum cukup. Masih tersisa tanggungan 800 miliar rupiah lagi yang belum dibayar.

Ketum Golkar dan Capres Partai Golkar 2014

Di tengah merebaknya isu lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie terus memantapkan posisinya di Partai Golkar. Menjelang masa baktinya di Kabinet Indonesia Bersatu I pada Oktober 2004, ARB ikut meramaikan pemilihan ketua umum Partai Golkar. Bersaing ketat dengan Surya Paloh, ia akhirnya terpilih menjadi ketua umum menggantikan Jusuf Kalla dalam Musyawarah Nasional di Pekanbaru, Riau.

Sebagai ketua umum, ARB berusaha memperkenalkan metode organisasi organisasi baru dan metode politik modern di tubuh partai beringin ini. Ia memperkenalkan gaya kepemimpinan terbuka serta penggunaan media massa khususnya televisi dan internet untuk memantapkan posisi Partai Golkar.

Selain itu, ARB menyatukan langkah di seluruh elemen organisasi tanpa mematikan peluang dan gaya individual masing-masing pengurus. ARB juga sering melakukan kunjungan berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia. Dia juga mendorong agar Partai Golkar membangun koalisi yang sehat dan terhormat dengan partai-partai lainnya, terutama partai pendukung SBY-Boediono. Sikap ini sering diutarakan ARB dalam berbagai pidato politiknya. ARB ditetapkan sebagai kandidat presiden dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ketiga Partai Golkar, Juni 2012.

Visi Indonesia: Negara Kesejahteraan 2045

Perjalanan politik sebagai ketua umum menjadi babak baru kehidupan ARB. Kini, dia tidak lagi mengurus bisnisnya semata tetapi justru lebih banyak mengisi waktu-waktunya dengan aktivitas kepartaian. Pascaterpilih kembali pada Pilpres 2009, SBY kembali menduduki jabatan presiden untuk kedua kalinya. Kondisi ini mendorong ARB agar Partai Golkar membangun koalisi yang sehat dengan partai-partai lainnya. Jadilah Golkar menjadi salah satu partai yang tergabung dalam Setgab, pendukung pemerintah.

Dengan sikap seperti ini, ARB ingin mendorong agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, tanpa gejolak yang terlalu tajam. Di-harapkan dengan terbentuknya Setgab tersebut, para partai koalisi akan menjadi partner bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakannya nanti, sehingga pemikiran-pemikiran partai lain pun bisa terserap menjadi bahan masukan pemerintah.

ARB ditetapkan menjadi kandidat presiden dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-3 Partai Golkar, Juni 2012. Hal ini adalah bab baru lagi dalam perjalanan kehidupannya. Ia harus mempersiapkan diri dalam Pilpres 2014, serta memimpin partainya bertarung dalam pileg nanti. ARB pun optimis dengan peluangnya menjadi capres.

Memang pada awalnya, kondisi ini tidak pernah diduga oleh keluarganya. Namun, apa daya, jika kapal sudah berlabuh, nahkoda harus siap mengarungi lautan. Pascaterpilih menjadi capres dari partai berlambang pohon beringin tersebut, ARB lantas menyampaikan pidato politiknya. Dalam pidato politik tersebut, ARB memaparkan akan menggunakan prinsip-prinsip yang diadaptasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara jika terpilih menjadi presiden.

Baginya, seorang pemimpin harus mampu *ing madya mangun karso*, berdiri di tengah, merangkul semua pihak, memberi inspirasi, menengahi perbedaan, serta membangun kerjasama dari segenap potensi yang ada. Selain itu, pemimpin juga harus *ing ngarso sung tulodho*, yaitu memberi di depan, berada di garis terdepan, berwibawa serta berani bertindak tegas untuk membela kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya, ARB menawarkan konsep Trilogi Pembangunan yang dilengkapi dengan gagasan baru nasionalisme Indonesia, sehingga menjadi

sebuah formulasi yang dinamakan Catur Sukses Pembangunan Nasional. Formula ini terdiri dari empat elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, stabilitas sosial-politik, dan paham kebangsaan yang disesuaikan dengan konteks globalisasi (*Bakrie*, 2012).

**Menetapkan Fondasi Menuju
Negara Maju (2015-22025)**



**Mempercepat Pembangunan di
Segala Bidang (2025-2035)**



**Memantapkan Indonesia Sebagai
Negara Maju (2035-2045)**



Negara Kesejahteraan 2045



Dalam pertumbuhan ekonomi, ARB menawarkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan daya saing di sektor manufaktur dan sektor industri lainnya, termasuk industri jasa dan pertanian, penyehatan iklim, stabilitas ekonomi makro, penataan sektor finansial dan efisiensi BUMN.

Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akan melahirkan ketimpangan sosial serta ketidakadilan. Hal ini yang menjadi pijakan ARB dalam pembangunan ekonomi. Prinsip ini mungkin didapatkannya saat menjadi Menko Kesra, karena ARB melihat secara langsung masih banyak persoalan terkait pemerataan pembangunan.

Menurutnya, berbagai program sosial, seperti PNPM, Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, jaminan pensiun harus tetap dilaksanakan.

Dengan demikian, program pemerintah bisa langsung dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

Konsep ketiga adalah stabilitas sosial-politik. Dalam aspek ini, ARB ingin menekankan perlunya kondisi demokrasi yang terkelola dengan baik. Tentu saja, didukung dengan pemerintahan yang kuat, tegas, bersih dan berwibawa. Dengan demikian, cita-cita bangsa juga akan terlaksana dengan optimal.

Kemudian, konsep nasionalisme baru. Menurutnya, Indonesia yang percaya diri adalah Indonesia yang tidak takut pada keterbukaan era global seperti sekarang ini, tetapi justru menyambutnya sebagai peluang untuk lebih mendorong kemajuan bangsa. Dengan paham ini, ARB berharap dapat menempatkan filosofi dasar Indonesia, yaitu Pancasila bukan sebagai sebuah pemikiran statis melainkan dinamis.

Sebagai kandidat yang telah diusung sejak awal dibandingkan partai-partai lainnya, ARB dengan berbagai pengalaman dan hasil kunjungannya di berbagai daerah akhirnya menetapkan visi Indonesia, menjadi Negara Kesejahteraan 2045. Visi ini menjadi gagasan penting dalam pembangunan Indonesia ke depan. Dengan dilahirkan gagasan ini, menunjukkan pemikiran ARB yang visioner sekaligus kapasitas ARB sebagai sosok yang sangat serius dalam menghadapi pilpres nanti.

Secara umum, Visi 2045 menekankan prioritas pembangunan pada sektor reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, UMKM dan Koperasi. Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi melalui Catur Sukses Pembangunan Nasional, yakni pertumbuhan, pemerataan, stabilitas sosial-politik dan nasionalisme baru, seperti disampaikan ARB dalam pidato deklarasi capresnya.

Pokok-pokok strategi yang dikembangkan dalam Visi 2045 antara lain: membangun Indonesia dari desa, penguatan peranan Negara, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pendapatan di antara masyarakat, pemerataan pembangunan antardaerah, antarwilayah, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan komunitas dalam kerangka program pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan yang berbasis *blue-economy* dan *green-economy*, penegakkan hukum dan HAM,

pengembangan industri berbasis IPTEK dan inovasi berdaya saing tinggi serta revitalisasi pertanian pangan dan niaga.

Pembangunan Visi 2045 tersebut, memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: Dasawarsa Pertama, 2015-2025 adalah menetapkan fondasi menuju negara maju. Dalam Dasawarsa Kedua, 2025-2035, mempercepat pembangunan di segala bidang memasuki negara maju. Dasawarsa Ketiga, 2035-2045, memantapkan Indonesia sebagai negara maju. Setiap dasawarsa memiliki skenario program dan target masing-masing, namun tetap merupakan suatu kesinambungan dari tahapan pertama hingga tahapan-tahapan selanjutnya.

Dari penjabaran visi misi tersebut, terlihat sekali bagaimana ARB telah merancang gagasan visioner untuk pembangunan Indonesia. Pemikiran yang detail dan terperinci tersebut ternyata diserap ARB berdasarkan pemikiran para akademisi kampus dan diskusi dengan para tokoh profesional di bidangnya. Dalam berbagai kesempatan, ARB menegaskan bahwa Visi 2045 tersebut bukan hanya milik Partai Golkar. Namun untuk negeri ini, maka membutuhkan keterlibatan dari para akademisi dan ahli dari berbagai kalangan untuk penyempurnaannya.

Berbagai ahli dari kalangan kampus seperti, Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, dan universitas lainnya di Indonesia menjadi penyumbang gagasan tersebut. Diskusi juga dilakukan dengan pihak lainnya, seperti dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama jajarannya di Fraksi Partai Golkar DPR.

Berkaitan dengan hal tersebut, Partai Golkar mengenalkan tradisi baru, yaitu partai politik tidak hanya menawarkan calon presiden saja, tapi juga menyiapkan *blue print* pembangunan nasional, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan salah satu bukti dari komitmen Partai Golkar yang menyatakan diri sebagai *The Party of Ideas*, untuk memberikan sumbangsih secara konseptual bagi terselenggaranya pembangunan nasional di segenap bidang kehidupan.

Dengan elektabilitasnya sekarang ini, didukung dengan kesiapan ide,

materi dan finansial setidaknya ARB menjadi salah satu kandidat yang berpeluang tinggi meraih kursi presiden RI.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Sebagai ketua umum, ARB saat ini telah didukung oleh 33 DPD Golkar se-Indonesia. Dengan modalitas dukungan tersebut, peluang memenangkan pilpres cukup besar. Apalagi, mengingat partai berlambang pohon beringin itu juga mempunyai basis massa yang kuat di Indonesia.

Berbagai strategi marketing politik telah melakukan untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Salah satunya, melalui media massa. Tentu iklan dan sosok ARB sering wira-wiri menghiasi televisi nasional. Secara finansial, ARB dinilai cukup kuat mengingat dia adalah salah satu pengusaha yang masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia.

Dari sisi peluang, ARB memiliki peluang amat besar untuk berlaga dalam Pilpres 2014. *Pertama*, ARB telah ditetapkan oleh Rapimnas Golkar sebagai capres. Tentu penetapan ARB sebagai capres tidaklah tiba-tiba. Sebagai partai senior dan memiliki rekam jejak sangat panjang, penetapan ARB sebagai capres tentu berdasarkan perhitungan yang matang.

Kedua, ARB didukung oleh bisnis keluarga yang menggurita sehingga jika dibandingkan capres lain, bisa dipastikan, logistik politik ARB jauh lebih kuat. *Ketiga*, ARB memiliki jaringan media—baik elektronik maupun *online*—yang tidak bisa diremehkan di negeri ini. Tentu dengan kekuatan media yang dimiliki, jelas ini akan menjadi peluang besar bagi ARB untuk melakukan publisitas ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang pencapresannya ataupun program yang dicanangkan Golkar pada Pemilu 2014 nanti. Terbukti, dari hasil riset Media Monitoring Pol-Tracking Institute periode Februari-Desember 2013, pemberitaan ARB terkait isu capres terus mengalami peningkatan.

Keempat, elektabilitas yang terus meningkat. Meski masalah elektabilitas ini pernah menjadi isu yang menganjal pencapresan ARB, tapi isu tersebut ternyata dapat dihalau. Dalam berbagai lembaga survei nasional, posisi elektabilitas ARB sudah masuk dalam tiga besar. Hal itu juga terekam dalam survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013,

elektabilitas ARB berada pada posisi ke-3 dengan skor (11. 67%). Meskipun begitu, ARB masih memiliki beberapa tantangan yang jika tidak disikapi dengan baik akan menjadi blunder bagi pencapresannya. Ada tiga isu yang bisa menjadi serangan bagi ARB terkait pencapresannya.

Pertama, kasus lumpur Lapindo. Meski isu ini sudah berkali-kali di-klarifikasi oleh ARB dalam berbagai kesempatan, tetap saja ingatan publik (ingatan negatif) terkait isu Lapindo susah dihilangkan. Oleh karena itu, ARB perlu publisitas yang lebih masif tentang apa yang sudah dilakukannya untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena dengan penjelasan yang lebih intensif kepada masyarakat justru akan meyakinkan publik bahwa ARB telah memberikan solusi terbaik bagi isu-isu yang menyimpannya.

Kedua, isu terkait kasus pajak perusahaannya yang selama ini dikaitkan dengan Gayus Tambunan. Meski tidak seserius kasus lumpur Lapindo, tapi citra ARB yang dikaitkan dengan pajak ini juga menjadi batu sandungan jika tidak segera diatasi dengan serius. Tantangan ini, karakteristiknya sama dengan tantangan sebelumnya. Oleh karena itu, ARB dapat mengintensifkan publikasi terkait fakta rekam jejaknya dalam pajak, sehingga dapat menepis anggapan tersebut, serta mengembalikan *trust public* kepadanya.

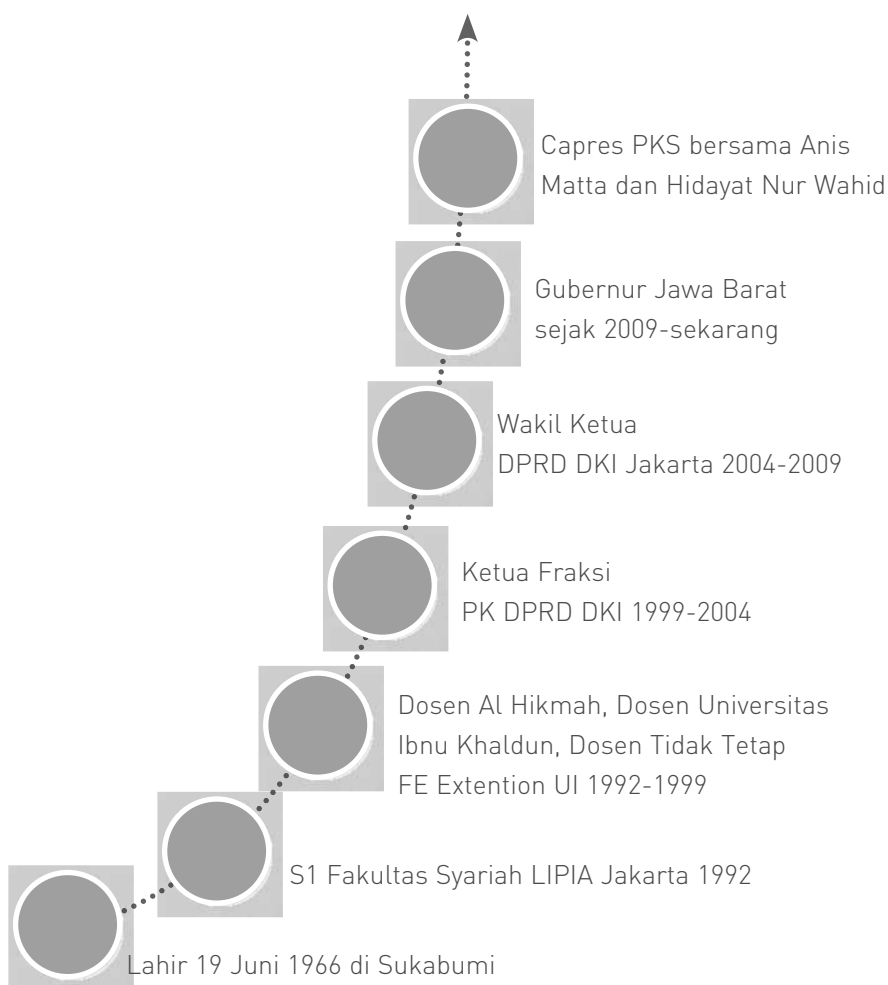
Ketiga, faksionalisasi di internal Partai Golkar sendiri. Meski ARB adalah ketua umum dan memiliki kans paling besar untuk jadi capres, tapi tak bisa dinafikan bahwa masih terdapat riak-riak perbedaan pandangan terkait pencapresan ARB, khususnya perbedaan pandangan yang terus digelindingkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.

Tak hanya itu, di Golkar juga terdapat tokoh-tokoh senior seperti Jusuf Kalla, Agung Laksono dan bahkan Priyo Budi Santoso. Tokoh-tokoh ini penting untuk merapatkan barisan, menentukan satu pandangan agar pencapresan ARB di Pilpres 2014 bisa berjalan dengan mulus. Sebab, isu faksionalisasi di internal Golkar kalau tak bisa dikelola dengan baik bisa mendatangkan blunder yang kemudian dapat menjadi sumber pemberitaan negatif oleh media. Inilah yang menjadi kendala Golkar dalam beberapa pemilu. Oleh karena itu, ARB sebagai Capres yang sudah ditetapkan sejak lama, harusnya mampu menciptakan soliditas partai dengan harmonisasi hubungan antar tokoh-tokoh partai tersebut.

Genderang Pilpres 2014 memang belum secara resmi ditabuh. Namun, peperangan sudah dimulai oleh para kandidat Capres. Namun, belum semua Capres menunjukkan gagasan secara detail tentang pemikirannya untuk membangun negeri. Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan menjadi bukti bahwa ARB telah siap dan berkomitmen penuh dalam menghadapi pertarungan. Tinggal menunggu seberapa besar gagasan tersebut menjadi daya pikat ARB meraih kepercayaan publik.

AHMAD HERYAWAN

Pemimpin Potensial





javanews.co

Namanya berkibar setelah dipercaya kembali untuk memimpin Gubernur Jawa Barat (Jabar) kedua kalinya bersama Deddy Mizwar pada periode 2013-2018. Selama menjadi gubernur, Jabar mendapatkan 111 penghargaan dari berbagai bidang. Beberapa di antaranya mulai peningkatan dari berbagai sektor seperti inflasi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE), penduduk miskin menurun, infrastruktur dengan kemandirian jalan provinsi 97 persen serta meningkatnya angka partisipasi sekolah dari SD, SMP, SMA. Sebelum menjadi pejabat publik, ia lebih dikenal sebagai dosen, pendakwah, dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk yang terakhir, ini, ia meretasnya secara konsisten sejak awal pendirian partai. Aher begitu sapaannya, berturut-turut sebagai Ketua Fraksi periode 1999-2004 dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009.

Kiprah publik dan politiknya yang cukup cemerlang, membuatnya kini termasuk salah satu kandidat kuat calon presiden hasil Pemira PKS bersama Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid. Ia lahir di Sukabumi, 19 Juni 1966Menghabiskanmasakecil di kampung Warudorong, Desa Margaluyu, Kecamatan Suka raja, Kota Sukabumi. Sejak kecil, Asep, begitu dulu ia disapa, mendapat tempaan dari kakek dan neneknya. Dia pun tinggal di rumah kakek dan neneknya itu. Sejak usia 5 tahun, Asep bahkan sudah biasa menunaikan ibadah puasa. Hebatnya, ia tidak pernah bocor. Walaupun sering bandel khas anak-anak, Asep tak pernah tergoda untuk

membatalkan puasa. Dia selalu ingin jujur pada dirinya sendiri, kakek dan neneknya, terutama agama. Namun ada alasan khusus kenapa Asep kecil ibadah puasanya tidak batal. Menurutny, tidak puasa ketika umur sudah 5 tahun itu aib. Dengan dibentuk lingkungan, Asep kecil bersemangat untuk berpuasa (*inilah.com*, 2013).

Asep menjalani pendidikan SD sampai SMA juga di Sukabumi. Dia menjalani masa SD di SD Negeri Salaawi 1 Sukabumi dan lulus pada 1980. Asep lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Sukaraja, Sukabumi. Bakat kepemimpinan Asep saat duduk di bangku SMP mulai terlihat. Dia pun sudah dia manahi untuk memegang jabatan sebagai Ketua Rohis dan Ketua OSIS. Saat melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Sukabumi, Asep kembali duduk sebagai Ketua Rohis (*ahmadheryawan.com*, 2011)

Di luarwaktusekolah, Asep mengisi waktu luangnya dengan belajar. Ia terkenal kutu buku. Sering sekali ia membaca buku dengan semangat di atas pohon, padahal di bawah dekat pohon itu ada kuburan. Saat suasana mulai gelap, barulah ia turun dari pohon tersebut. Ia juga sering mengaji Alqur'an di masjid. Selain ilmu umum di sekolah, ia pun senang belajar ilmu-ilmu agama Islam.

Ekonomi keluarga Asep yang pas-pasan membuatnya harus memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan agar bisa membayar biaya sekolah. Untuk mendapatkan tambahan, Asep rela berjualan gorengan tetangganya ke sekolah. Hasilnya dia sisihkan untuk membantu membayar uang SPP. Kebiasaannya menjual gorengan tak hanya dilakukan saat duduk di bangku SD. Bisnisnya ini dijalani hingga Asep meneruskan sekolah ke SMP hingga SMA, bahkan saat dia menjadi Ketua Rohis dan Ketua OSIS.

Meski dikenal sebagai tukang gorengan, keilmuan Asep di bidang agama ternyata tak sembarangan. Dia mulai diakui oleh masyarakat sebagai da'i. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah sering menjadi ustadz yang diminta berceramah dari satu kampung ke kampung lainnya. Suatu ketika, Asep sedang menyampaikan ceramahnya dengan bahasa yang sistematis dan jelas. Para hadirin terpesona, dan mudah dipahami. Ada seorang wanita yang matanya sembap, air mata pun mengalir. Ia bersyukur kepada Allah karena diberi karunia ilmu agama dan dipercaya oleh masyarakat. Ternyata, wanita tersebut adalah ibunda Asep yang ikut hadir (*aher undercover*, 2013).

Setelah SMA, di Universitas Muhammad Ibnu Sa'ud Saudi Arabia cabang Asia Tenggara. Saat ini, kampus tersebut bernama Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Asep mendaftar dan lulus dengan beasiswa penuh untuk belajar bahasa Arab dan ilmu syariah di universitas tersebut. Setelah lulus, Asep terus aktif dalam dunia dakwah.

Da'i Politisi

Aktivitasnya di dunia dakwah ini, yang pada akhirnya mengantarkan ia membidari lahirnya PKS. Ia mendapatkan pengalaman politik saat menjabat Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta periode 2003-2006 dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta periode 2006-2010. Pria yang akrab dipanggil Aher ini juga pernah menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009 (merdeka.com, 2012)

Selama meniti karier sebagai legislator, Aher dikenal sebagai politikus bersih. Sikap Aher terlihat pada kekukuhan kader partai berasas Islam itu yang menolak tawaran gratifikasi dari parlemen. Pernah, Fraksi Partai Keadilan DKI Jakarta memastikan anggotanya tidak akan mau menerima uang pesangon selama menjadi anggota dewan di Jakarta. Keputusan itu didasarkan terbitnya surat edaran dari Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, yang melarang anggota dewan dari PKS menerima uang pesangon dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tak hanya itu, Aher yang ketika itu menjabat sebagai ketua fraksi mengungkapkan, pihaknya bakal mengembalikan mobil dinas ke Pemprov DKI Jakarta yang selama ini digunakan untuk operasional. Pernyataan Aher disampaikan menyusul keinginan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta uang pesangon. Nilai uang pesangon disebut-sebut sebesar Rp 25 juta yang diberikan pemda kepada setiap anggota dewan. Para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta juga meminta agar kendaraan dinas yang selama ini digunakan dijadikan sebagai milik pribadi. Kendaraan dinas untuk anggota dewan, yaitu jenis sedan Hyundai Effcent, sementara untuk wakil dan ketua jenis sedan Toyota Corona.



www.facebook.com/AherDeddyMizwar/photos_stream

Berkarir di politik tak membuat Aher lupa dunia dakwah. Dia pun mengurus berbagai organisasi keislaman seperti Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (2004-2009), Ketua Majelis Syuro Persatuan Umat Islam (2009-2014), dan Ketua Pengawas DKI Jakarta. Ia juga aktif membina beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan. Sementara sebagai akademisi, Aher tercatat pernah mengajar di berbagai universitas, seperti Lembaga Dakwah Islam Al Hikmah, Universitas Ibnu Khaldun, Ekstension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (dosen tidak tetap), dan Pusat Studi Islam al Manar. Aher pun menjadi pembimbing haji Ummul Quro.

Tak hanya itu, Aher juga masih aktif memberikan ceramah ke daerah-daerah. Saat berceramah ini, ada cerita menarik tentang amplop yang terungkap di antologi *Bukan Negeri Dongeng* karangan Helvy Tiana Rosa. Biasanya, warga mengenal amplop yang diselipkan ke tangan penceramah seusai acara. Untuk sekadar basa-basi, panitia juga biasanya menambahkan pesan untuk penceramah, “Sekedar buat ongkos, Ustadz” atau “Buat uang rokok aja”. Karena Aher tak merokok, dia dipesan bahwa uang dalam amplop tersebut untuk ongkos. Aher pun merasa harus menjaga amanah sang panitia. Maka, semua uang dalam amplop itu ia habiskan untuk ongkos pulang. Tanpa sisa.

Sahabat Keluarga

Ahmad Heryawan menemukan cinta sejatinya juga di Jakarta. Aher menikah dengan Netty Prasetyani pada 13 Januari 1991. Saat itu, keduanya masih sama-sama kuliah. Aher tengah menyusun skripsi dan Netty baru semester 7. Keduanya bertemu pada November 1990. Dua puluh tahun membina rumah tangga, mereka dikaruniai enam orang anak. Disela kesibukannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Alasannya sederhana. Buat Aher, istri dan anak-anak adalah amanat dari Allah.

Aher dikenal sebagai ayah dan suami yang baik. Ia sering membantu istrinya mengurus rumah tangga. Mulai memandikan anak, menyiapkan makanan, atau sekadar berbelanja ke pasar. Tak jarang, untuk membantu sang istri, Aher tak malu antre bersama ibu-ibu membeli kebutuhan pokok di pasar. Makanan kesukaannya adalah sayur asem, tempe, dan lalap.

Aher mengaku, untuk urusan keluarga tetap nomor satu, walaupun waktu untuk itu sedikit sekali. Kualitas pendekatan dan pertemuan dengan keluarga menjadi catatan penting bagi Aher. Artinya, walau waktu sedikit, bertemu dengan keluarga itu dimunculkan dengan suatu kondisi yang sangat hangat.

Aher memiliki enam anak, yakni Khobbab, Salman, Khodijah, Abdul Halim, Shofia, dan Abdul Hadi. Dia bercerita, kesibukannya sebagai seorang aktivis politik sudah dilakoninya sejak mahasiswa di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab hingga menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dan Gubernur Jabar. Oleh karena itu, sang istri, semenjak masih mahasiswa, sudah paham betul sepak terjangnya. Ia merasa bersyukur sang istri tak keberatan, malah merasa senang dan bahagia. Dalam membina keluarganya, Aher mengaku mengembangkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan edukatif, demokratis, dan otoritatif. Pendekatan edukatif dengan membimbing langsung istri dan anak-anak dengan bukti nyata. Contohnya, memberikan pendidikan agama dengan langsung memberi contoh. Di rumahnya, wajib setiap harinya melakukan Shalat Subuh berjamaah, membaca, dan menafsirkan Alquran bersama-sama.

Sementara, Aher berusaha menciptakan keterbukaan dengan istri dan anak-anak dengan pendekatan demokratis. Semua anggota keluarga selalu dilibatkan dalam masalah-masalah keluarga. Istri dan anak mendapat

kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya sehingga dengan demikian semuanya merasa nyaman. Di sisi lain, Aher juga menerapkan pendekatan otoritatif. Dia mengungkapkan, keluarga harus mempunyai aturan yang disepakati dan ditaati bersama. Dia mengaku selalu berupaya memberi contoh langsung pada istri dan anak-anaknya bahwa kehidupan harus dengan kesadaran tanpa rasa tertekan, harus saling menghormati terutama kepada yang lebih tua. Lewat pendekatan itu, istri dan anak-anaknya bisa menerima kesibukan itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga.



Aher sadar betul, di dalam hidupnya, ada berbagai macam hak yang harus dipenuhi. Mulai hak keluarga, ada hak untuk partai, hak untuk kantor di Gedung Sate, dan ada hak untuk bertemu dengan masyarakat. Lebih jauh, Aher mengaku tak ada waktu khusus untuk melakukan rekreasi keluarga. Rekreasi bisa dilakukan kapan saja jika ada kesepakatan dan keputusan bersama. Setiap hari, Aher menghabiskan banyak waktu bercengkerama dengan keluarga di rumah nonton VCD film-film bermutu, dan film ilmu pengetahuan usai Shalat Isya. Dia juga kerap mengajak anak laki-laki ke setiap acara-acara pengajian di masjid-masjid.

Selain memberi pendidikan agama, Aher selalu menanamkan petingnya ilmu pengetahuan umum. Untuk itu ia menganjurkan kepada anak-anaknya membaca surat kabar. Dengan membaca koran, dia berharap anak-anaknya dapat memahami politik, meskipun tidak jadi politisi. Hasilnya, anak-anaknya pun bisa mengetahui mana sosok dan sifat seorang pemimpin yang baik. Mengerti apa yang dimaksud politisi busuk atau apa itu KKN. Untuk hal ini, tidak jarang, Aher melakukan diskusi dengan anak-anaknya.

Aher mengungkapkan bahwa walaupun sesibuk apapun, ia masih sempat meluangkan waktu untuk memandikan dan menyuapi anak-anaknya yang masih kecil. Ia juga mendampingi anak-anaknya mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru dan mengontrol persiapan anak-anak pergi sekolah.

Memimpin Bumi Parahyangan

Ahmad Heryawan memimpin Jawa Barat untuk periode 2008-2013. Dia berpasangan dengan bekas aktor yang menjadi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf. Dengan jargon Hade yang dalam bahasa sunda berarti baik, duet ini pun berhasil mengalahkan pasangan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (Aman) ataupun Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Da'i).

Meski sudah dilantik sebagai gubernur, Aher tak lantas melepaskan kegiatan dakwah. Tak kurang, usai dilantik pada Kamis 13 Juni 2008, dia pun memberi khotbah Jumat di Masjid Raya Bandung, keesokan harinya. Aher

mengaku, menjadi gubernur tidak lain hanya kerja keras dan tanggung jawab. Kursi Gubernur Jabar bukan merupakan ajang untuk mencari kenikmatan.

Menjadi Gubernur Jabar dibebani tanggung jawab untuk menyejahterakan 41 juta warga. Kondisi ini tidak ringan. Dengan kapasitas APBD yang hanya Rp 5 triliun, Aher dituntut untuk menjalankan roda pembangunan. Meski demikian, sebagai Muslim, Aher mengaku harus optimistis untuk melakukan perbaikan.

Aher pun harus mendapat masalah minimalnya data penduduk. Menurutny, program pemerintah terdahulu kurang optimal karena data kependudukan yang tidak akurat. Optimalisasi program kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada akurasi data penduduk. Salah satu kegagalan program kesejahteraan rakyat, menurutny, adanya fakta yang salah sasaran.

Dengan akurasi data penduduk yang baik, Aher mengungkapkan, program kesejahteraan rakyat menjadi tepat sasaran. Sehingga, dana APBD Jabar yang minimal bisa diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan tidak mengalir ke orang kaya. Dia pun memenuhi anggaran pendidikan hingga 20%. Dalam rangka merealisasikan target Jawa Barat Bebas Putus Sekolah, anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan gratis bagi pelajar SD-SMP-MI-MTs sejak Januari 2009.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi pelajar dan keluarga tidak mampu, pencetakan buku pelajaran gratis, pembangunan 6.000 Ruang Kelas Baru (RKB) pertahun, hingga pemenuhan target renovasi 20.000 ruang kelas dilakukan. Selanjutnya, Aher sudah merencanakan untuk menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SMA dan beasiswa kuliah bagi putra daerah yang membutuhkan (yogajustice313.wordpress.com, 2013).

Anggaran kesehatan juga meningkat, dari 1,5% menjadi 10%. Layanan kesehatan dasar menjadi perhatian utama. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak didukung oleh realisasi pembangunan 200 Puskesmas Mampu PONED (Penanganan Kegawat Daruratan yang Terjadi pada Ibu Hamil, Malahirkan, dan Nifas), dan beasiswa bagi 1000 bidan desa. Sebagai anak kampung, perhatian Aher pada pembangunan desa menjadi fokus utama. Dia pun membuat Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa

Peradaban di Jawa Barat. Bantuan sebesar Rp 100 miliar rupiah sudah didistribusikan kepada 100 desa terpilih pada tahun 2010. Selanjutnya, bantuan sebesar Rp 150 miliar rupiah didistribusikan bagi 150 desa terpilih lainnya pada 2012.

Tak heran, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberikan apresiasi berupa Kompak Award 2013. Penghargaan tersebut diberikan karena Jabar berhasil dalam mengembangkan aspek kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan PNPM Mandiri. Aher pun menyabet penghargaan untuk dua kategori sekaligus, yakni sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Aspek Kemitraan & Kerja Sama, dan Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Aspek Partisipasi Masyarakat (kompasiana, 2013)

Karakter Aher sebagai da'i tak dapat terlepas meski sudah disibukkan dengan urusan pemerintahan. Aher sering mengajak staf atau pejabatnya untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah. Baik di kantornya, Gedung Sate, maupun rumah dinas. Dia pun rutin mengadakan pengajian bersama satu bulan sekali. Tak hanya untuk dakwah, momen itu dipergunakan kang Aher untuk lebih mendekatkan diri pada bawahannya atau masyarakat. Banyak ide-ide tentang pemerintahan dijabarkan dalam pengajian bersama itu.

Saat Jabar dilanda kekeringan, Aher tak ragu memimpin pelaksanaan Shalat Istisqa untuk meminta hujan bersama anak buahnya di halaman Gedung Sate Bandung. Kegiatan yang berlangsung selepas Shalat Zuhur tersebut dilakukan dalam rangka ikhtiar memutus kekeringan di wilayah tersebut. Terlebih, saat Oktober, Jabar mencanangkan masa tanam serentak. Luas lahan yang mengalami kekeringan di wilayah Jabar mencapai 30 ribu hektare. Dua tahun sebelumnya, kekeringan tak terjadi (catatansikecil.blogdetik.com, 2013).

Tanpa air, Aher menyatakan, pelaksanaan masa tanam itu terancam gagal. Dalam kaitan itu, pihaknya berharap komponen masyarakat bisa menggalakan Shalat Istisqa di lingkungannya. Dia menyatakan, selain upaya lahiriah termasuk dengan metode hujan buatan dan langkah penanganan lainnya, ikhtiar transendental tak bisa dikesampingkan.

Aher kemudian naik mimbar memberikan khotbah. Bersama kepala dinas dan PNS di lingkungan Gedung Sate, dia kemudian memanjatkan doa

terutama permintaan hujan diturunkan. Selang dua jam kemudian, hujan deras mengguyur sebagian wilayah Kota Bandung. Hujan cukup lebat turun sekitar 15.30 WIB membasahi wilayah Ujungberung dan sepanjang Jalan Soekarno Hatta.

Pada Pemilu 2013, Aher maju kembali sebagai gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar. Lagi-lagi, Aher menggandeng sosok selebriti kawakan yang telah melahirkan banyak karya. Aher kali ini bersaing dengan wakilnya sendiri, Dede Yusuf yang memilih maju sebagai calon gubernur dan diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mendapatkan nomor urut 4. Dia harus bersaing dengan calon pasangan Irianto Mahfudz Sidik Syafuiddin-Tatang Farhanul Hakim, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, dan Dede Yusuf-Lex Laksamana. Di tengah kampanye, badai melanda kendaraan politik Ahmad Heryawan, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Presiden partai dakwah itu, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan suap impor daging sapi.

Serangkaian nama pun turut terkena berita miring seputar penangkapan LHI. Tak kurang, Aher yang sedang mengikuti Pemilu juga disebut-sebut berperilaku korup. Aher pun dilaporkan ke KPK karena disebut menyelewengkan dana bantuan sosial. Hanya, tuduhan tersebut tak berlanjut. KPK pun emoh menanggapi laporan beberapa LSM tersebut.

Beruntung, meski didera kampanye hitam, Aher berhasil memenangkan Pemilu dengan hanya satu kali putaran. Kemenangan ini kemudian digugat pasangan Rieke-Teten ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya, nasib baik kembali menaungi Aher. MK mengetuk palu kemenangan untuknya.

Moderat dan Inklusif: Aher dan PKS

Dalam kampanye politik, baik atribut suara maupun perspektif tidak menentukan pilihan para pemilih. Akan tetapi, para pemberi suara secara selektif mempersepsi partai, kandidat, isu, dan peristiwa dalam kampanye, memberi makna kepada mereka, dan berdasarkan itu menentukan pemberian suara. Melalui proses interpretatif, mereka tidak hanya memperhitungkan atribut dan perkembangan mereka, yaitu citra jangka panjang, tetapi juga menyusun citra jangka pendek tentang obyek kampa-

nye. Itulah sebuah teori yang mengatakan bahwa pemilih saat ini menggunakan representasi jangka pendek, dan PKS mempercayai itu sebagai strategi politik dalam pemilu.

Citra partai merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan pemberian suara. Citra partai terdiri atas apa yang dipercaya dan diharapkan rakyat tentang apa yang dilakukan oleh partai. Citra partai berbeda dari citra diri partisan dalam hal mempersepsi bagaimana masing-masing partai bertindak dalam kampanye tertentu. Jadi, seseorang bisa jadi mengidentifikasi dirinya dengan partai tertentu, namun tidak menyukai apa yang dilakukan oleh partai tersebut.

Sebagaimana citra diri partisan yang telah berkurang pengaruhnya, menurut beberapa penelitian terdahulu di Amerika Serikat tentang perilaku pemilih, maka pemberian suara lebih dikarenakan faktor jangka pendek, yaitu isu, kebijakan publik, dan kondisi partai politik bersangkutan, apakah sudah dinilai mampu atau belum menjadi penghubung kepentingan mereka dengan kebijakan publik.

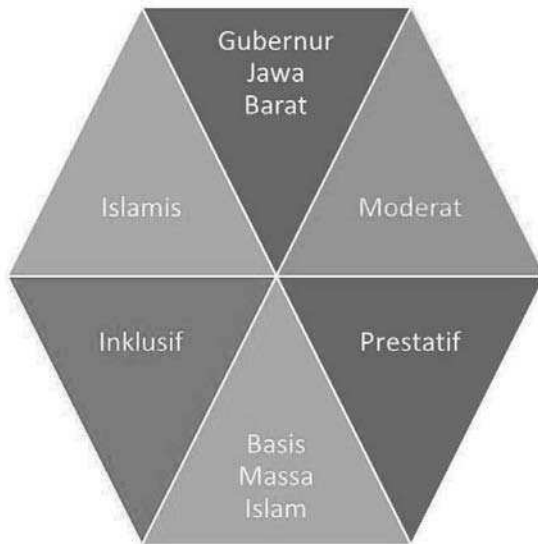
PKS sejak 2008 sudah menjadi partai yang moderat. Berbasis pada ideologi Islam, tetapi ingin merangkul semua segmen pemilih. Fokus kampanye PKS sebagai sebuah partai memiliki satu tujuan, yaitu bagaimana segmen pemilih di luar basis inti PKS memiliki identifikasi dengan PKS sebagai partai yang mampu menjadi perwakilan dari semua elemen.

Kebijakan dan perilaku PKS beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa partai ini menjadi lebih berintegrasi ke budaya politik arus utama, dan pada tingkatan tertentu, PKS 'dinormalkan' melalui proses mengejar kesuksesan politik. Pada hakikatnya, menurut penelitian yang dilakukan Bubbalo, Fealy, dan Mason (2012) dan juga Muhtadi (2012), politik PKS yang cenderung moderat menjadikannya mengikuti 'gaya politik' kebanyakan. Hal ini memang menjadi strategi politik 'partai terbuka' yang mulai digaungkannya dalam perpolitikan nasional. Dapat dikatakan bahwa demokrasi dan kondisi politik Indonesia membuat PKS beradaptasi untuk menggapai apa yang menjadi cita-citanya.

Sejak Pemilu 2009, PKS sudah fokus pada isu-isu yang tidak lagi berbau keislaman secara harfiah, tetapi masuk dalam kerangka universal. Tidak lagi melulu berfokus "merubah menjadi negara Islam", tetapi bagaimana "orang-orang baik duduk dalam negara". Bersama dengan Hidayat Nur

Wahid dan Anis Matta, Aher dikenal sebagai tokoh yang membawa PKS kian ke tengah. Dimatanya, PKS tidak hanya diisi oleh sekelompok muslim saja (eksklusif), tetapi juga harus aspiratif dan afirmatif terhadap kalangan di luar muslim (inklusif). Menjadi benar ketika PKS dan Aher akhirnya berbicara pada tataran universal dan humanisme.

Strategi yang dilakukan PKS pun juga diadopsi oleh Aher dalam kampanye Pemilukada Jabar. Pemikiran Aher-Deddy Mizwar tentang Jabar yang bersih, sejahtera, dan maju merupakan inti politik moderasi yang menjadi frame dalam politik PKS. Aher menggunakan isu-isu yang lebih universal dalam kampanye, ditambah lagi dengan menggandeng calon wakil gubernur yang berasal dari kalangan artis yang populer.



Aher pun memiliki gagasan yang sama dengan PKS. Ibarat saling menguatkan, Aher dan PKS adalah “dua sisi mata uang”. Aher memiliki mimpi untuk mengusung metode megapolitan di Indonesia. Dia mengatakan, “salah satu konsep Megapolitan yang diusung Bang Yos adalah baik bagi kota-kota besar di Indonesia”. Hal tersebut dimatinya sangat penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang sejahtera.

Di bidang ekonomi, Aher akan melanjutkan “Program Gres” yang diusungnya di Jawa Barat. Gres adalah singkatan dari gerakan ekonomi

syariah. Di tengah arus perekonomian global yang seringkali dilanda krisis, menurut Aher ekonomi syariah adalah jawabanya. Program yang diusungnya ini terindikasi akan dilanjutkannya apabila terpilih sebagai presiden. Mengingat pendekatan ekonomi syariah yang mulai marak diterapkan, bahkan di Inggris pun juga menerapkan pendekatan syariah dalam sistem perekonomian dan perbankan.

Aher mengharapkan masyarakat dapat memahami dan mengetahui bahwa ekonomi syariah lebih baik dan pilihan yang menguntungkan. Aher yakin apabila masyarakat Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, turut menabung di Bank Syariah, maka capaian tersebut akan melebihi capaian nasional. Tujuan yang dilakukan ini untuk mendorong kesadaran kolektif seluruh stakeholder ekonomi syariah untuk bersinergi membangun sistem ekonomi syariah nasional untuk lebih berkembang dan maju. Dimulai dari Jawa Barat, untuk Indonesia.

Menurut Anis Matta, Presiden PKS, Gubernur Ahmad Heryawan dalam waktu 4 tahun telah menyelesaikan pembangunan 18.000 sekolah dan menyediakan 1,8 juta lapangan kerja. Otoritasnya sebagai Gubernur Jawa Barat menyebabkan ia mampu melakukan kerja dalam skala besar. Anis Matta sangat percaya pada Aher sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia. Walaupun Anis Matta merupakan salah satu dari tiga calon presiden yang diusung PKS pada 2014 ini, tetapi pengalaman kegubernuran Aher membuatnya juga mendukung Aher dalam pencalonannya sebagai calon presiden. Aher adalah gubernur yang berpengalaman memimpin Jawa Barat, yang tentunya memiliki pengalaman yang luas dalam memimpin pemerintahan nasional kedepannya.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Aher adalah satu-satunya gubernur dari PKS yang namanya mulai dikenal public secara luas. Fakta politik di atas adalah bukti kuat bahwa Aher memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Perlu diketahui, Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki massa terbesar, basis partai yang berhaluan Islam (PKS), dan menyumbang pendapatan riil di sektor industri, perdagangan, manufaktur, dan pertanian yang paling signifikan di Indonesia.

Segala kekayaan Jawa Barat yang dipimpin Aher, mampu memaksimalkan pernah pemerintah (negara) dalam menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Aher pun terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan menggandeng Dedy Mizwar yang populer di mata masyarakat, Aher kembali menyatakan bahwa ia siap memimpin kembali Jawa Barat beserta prestasi-prestasi yang sudah ditorehkannya.

Dari sisi modalitas personal, Aher merupakan seorang pemimpin Islami yang bersih dan membuktikan prestasinya dalam memimpin Jawa Barat. Tokoh-tokoh dari daerah ini diperhitungkan dalam konstelasi perpolitikan nasional. Oleh sebab itu, kemunculan Aher dalam gelanggang politik nasional saat ini menjadi tepat.

Aher adalah politisi tulen PKS, dimana PKS adalah partai politik dengan tingkat militansi yang mengakar di setiap kadernya. Apabila PDIP memiliki nilai tambah militansi di basis massa nasionalis, maka PKS memiliki nilai tambah di basis massa religius. Fakta membuktikan, kemenangan Aher pada Pemilu 2014 adalah kemenangan basis massa religius di Jawa Barat atas basis massa nasionalis. Modalitas personal religius yang ada pada Aher menjadikannya modal untuk memberikan makna sendiri bagi seluruh basis massa religius (Islam politik) di Indonesia. Kekuatan Islam politik, walau terpecah-pecah, masih sangat kuat di dalam mempertimbangkan personalitas calon presiden. Hal ini sesungguhnya dapat dimanfaatkan Aher dan PKS untuk memperkuat akseptabilitasnya dalam Pemilu 2014 ini.

Dari sisi modalitas material, Aher dan PKS memiliki model pembiayaan kampanye “patungan”, dimana setiap kader akan menyumbang. Militansi yang dimiliki PKS menguntungkan model pembiayaan politik seperti ini, sehingga tidak sulit dalam soal biaya kampanye untuk mesin politik. Sisi modalitas sumber daya massa yang dimiliki Aher pun sangat besar. Apabila seluruh massa PKS memiliki Aher di Pemilu 2014, maka hitung-hitungan politik sebesar 8% suara nasional yang dimiliki PKS pada Pemilu 2009 akan menentukan komposisi peta politik di Indonesia, dan itu baru sebatas pemilih PKS, apabila semuanya memilih Aher.

Aher pun sejak dari sekolah dan universitas aktif dalam berorganisasi, baik organisasi politik maupun dakwah, serta selama menjabat sebagai Gubernur, membuatnya memiliki kekuatan massa yang tidak bisa diremehkan. Modalitas jejaring yang dimiliki Aher pun sudah terbangun

lewat posisinya saat ini, dan juga jejaring PKS yang ada disekeliling Aher. Pada hakikatnya, personal Aher dan PKS sebagai kendaraan politik tidak bisa dilepaskan. Mereka adalah sebuah dua “sisi mata uang”. PKS memiliki tingkat kesolidan kader yang sangat kuat, sehingga bisa dipastikan apa yang menjadi harapan PKS maka juga adalah harapan Aher sebagai kader yang loyalitasnya tidak bisa diragukan lagi.

Jelang Pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera melakukan pemilihan raya (Pemira) internal. Dalam Pemira tersebut, muncul lima nama yang paling populer di kalangan kader PKS. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Muhammad Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, dan Nur Mahmudi Ismail.

Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan pemira yang digelar 29-30 November 2013 menempatkan HNW sebagai pemenang dengan 18,34 persen atau 50.567 suara. Kedua Anis Matta 48.152 suara atau 17,46 %, kemudian di posisi ketiga, yaitu Ahmad Heryawan dengan perolehan suara 46.014 suara atau 16,69 %. Sementara di peringkat keempat dan kelima diduduki oleh Tifatul Sembiring dan disusul di posisi kelima, yaitu Nur Mahmudi Ismail (republika.co.id, 2013)

Hasil Pemira PKS dekat dengan hasil survei dari Pol-Tracking Institute 2013. Saat survei dilakukan Pol-Tracking Institute pada responden secara luas, elektabilitas Hidayat Nur Wahid mencapai 6,62 persen, dan Anis Matta 4,27 persen. Tokoh PKS lainnya adalah Ahmad Heryawan dengan elektabilitas 2,52 persen, Tifatul Sembiring 1,93 persen, dan Nur Mahmudi Ismail 0,99 persen (kompas.com, 2013).

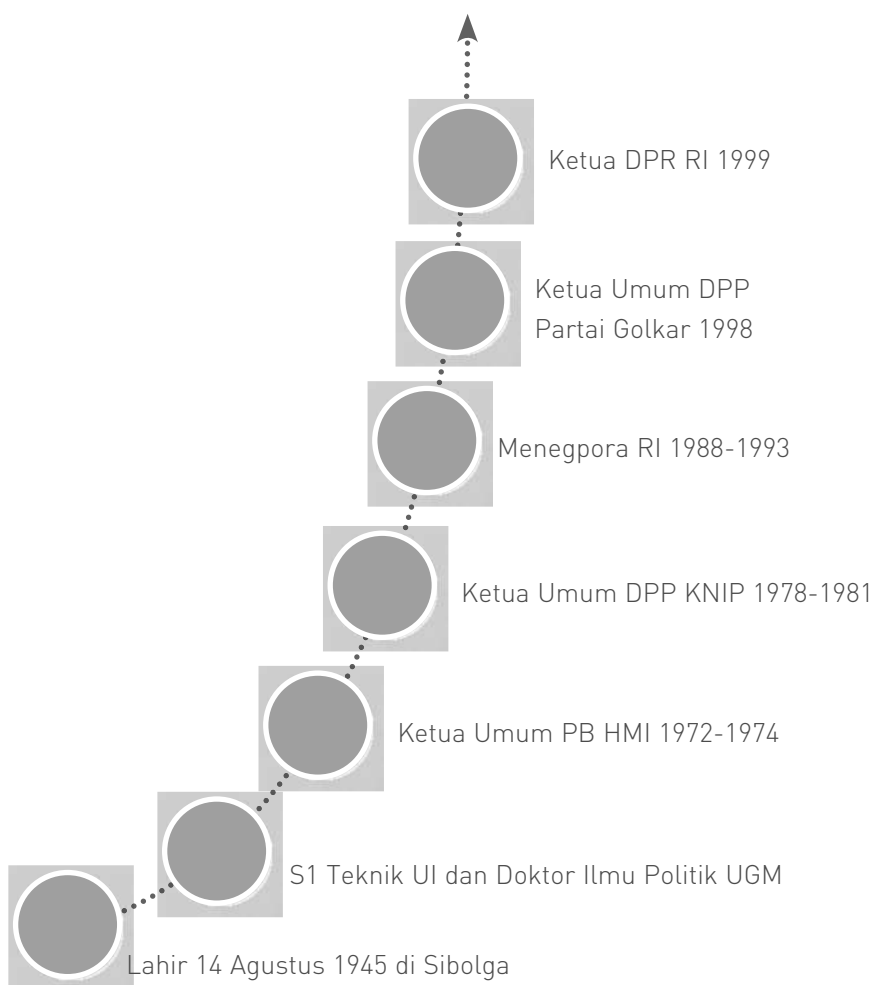
Angka elektabilitas itu berubah saat survei hanya menasar responden yang akan memilih PKS di Pemilu 2014 nanti. Posisi teratas ditempati Anis Matta dengan elektabilitas 27,12 persen, diikuti Hidayat Nur Wahid dengan 22,03 persen, dan Tifatul Sembiring 5,08 persen. Tokoh PKS lainnya hanya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen. Baik dalam Pemira maupun survei, nama Aher masuk dalam tiga besar nama yang akan dipilih dalam pemilu presiden nanti. Kapasitas Aher sebagai ‘Ustadz-Gubernur’ dinilai akan turut mendongkrak perolehan suara PKS pada pemilu nanti.

Meski demikian, Aher juga memiliki tantangan. *Pertama*, dari sisi ketokohan, Aher selama ini masih dianggap tokoh lokal. Bagi publik luas, Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta lebih dulu dikenal ketimbang Aher.

Kedua, dari sisi elektabilitas, posisi Aher masih jauh tertinggal dengan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi Aher jika ke depan benar-benar mencalonkan sebagai presiden. Sebab dalam demokrasi elektoral, elektabilitas menjadi bagian penting yang harus dimiliki setiap kandidat.

AKBAR TANDJUNG

Pemimpin Potensial





fajar-aryanto. blogspot.com

Akbar Tandjung merupakan guru besar para politisi negeri ini. Ke-piawaiannya berpolitik hadir karena pengalaman panjangnya dalam berorganisasi. Pria yang lahir pada 14 Agustus 1945 silam di Desa Sorkam, Sibolga, Tapanuli Tengah ini dikenal sebagai pribadi yang luwes, mudah berkompromi dan akomodatif. Basis sosio-kultural keluarga dan lingkungannya rupanya telah memberikan pengaruh kental dalam membentuk karakter dan kepribadian Akbar.

Ayahnya bernama Zahiruddin Tandjung, berkegiatan sebagai pedagang kain, getah dan rempah-rempah. Aktivitas perniagaannya bernaung dalam sebuah perusahaan bernama Marison. Zahiruddin merupakan pribadi yang piawai dalam jalur niaga karena itu membuatnya banyak disegani bukan hanya di Sibolga, melainkan di seantero Medan.

Di luar aktivitas berdagang, Zahiruddin juga aktif sebagai pengurus Muhammadiyah di Sorkam. Dia termasuk tokoh Muhammadiyah lokal yang memiliki pengaruh. Asas-asas ke-Muhammadiyah-an begitu erat dipegang. Aspek religiusitas dan rasionalitas, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Muhammadiyah, telah mendarah daging dalam tubuhnya. Dua nilai itu pula yang lantas membentuk pola pemikiran Akbar kelak ketika tampil menjadi pemimpin di level nasional (Ridwan dan M. Muhadjirin, 2003)

Akbar merupakan anak ke-13 dari 16 bersaudara. Keluarga Akbar sangat “pelangi” dari sisi pemikiran dan sikap ideologis. Misalnya, saudaranya yang bernama Usman Zahiruddin Tandjung merupakan nasionalis dan aktivis Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Bahkan Usman Zahiruddin pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari partainya tersebut. Sementara saudara lainnya, M Yanis Zahiruddin, merupakan representasi dari nasionalisme religius dan menjadi aktivis Nahdlatul Ulama (NU). Yanis Zahiruddin juga pernah menjadi pentolan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika partai berlambang kabah tersebut bersatu dengan NU. Bahkan ia pernah menjadi anggota DPR/ MPR selama dua periode (1987-1992 dan 1992-1997).

Keberadaan dua kutub politik yang saling bertentangan dalam satu keluarga tentu menjadi hal yang menarik dalam keluarga Akbar. Sebab, bukan hanya dalam soal sikap politik, keluarga Akbar mengimplementasikan sistem demokratis, tapi dalam hal mencari pasangan juga sama. Kedua orang tuanya mengizinkan setiap anaknya bergaul dan berpasangan dengan siapapun yang berbeda budaya, bahasa bahkan sekat berbangsa. Maka, karena doktrin keterbukaan yang sedemikian itu, tak heran kalau anak-anak trah Zahiruddin memiliki pasangan yang multi-etnik seperti Sunda, Aceh, Jawa, bahkan ada kakak Akbar yang menikah dengan seorang perempuan berkebangsaan Jerman.

Menginjak usia 7 tahun, ia harus kehilangan sang ayah, seorang teladan dan gantungan keluarganya untuk selamanya. Zahiruddin Tandjung tutup usia dengan meninggalkan prasasti ajaran-ajaran moral nan luhung: demokrasi, toleran, berbudi, dan menjauhi fanatisme. Ajaran yang tentunya menjadi semacam hikayat bertuah jika diamalkan dalam kehidupannya.

Bukan hanya di internal keluarganya saja, Akbar harus membiasakan diri dengan perbedaan, namun juga di lingkungan sosialnya. Pendidikan dasar dan menengahnya memiliki dimensi yang tak sewarna. Selain belajar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah (SR Muhammadiyah), Akbar juga menuntut ilmu di Sekolah Dasar Nasrani di Jalan Seram, Medan. Begitu juga dengan sekolah menengah atasnya yang ditempuh di sekolah Nasrani di SMA Kolose Kanisius, Jakarta. Setamat sekolah menengah pertamanya, Akbar memang hijrah ke ibukota negara.

Tentu saja, pasca ayahnya meninggal, tak hanya psikologi Akbar yang terguncang, tapi juga soal ekonomi. Tak ada lagi tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab untuk mencukupi biaya hidup keseharian. Akbar dan keluarganya kemudian terpaksa hidup dalam kondisi pas-pasan. Beruntung keadaan tersebut tak berlangsung lama. Saudaranya yang lain mulai beranjak dewasa dan memiliki pekerjaan. Usman Zahiruddin, kakak sulung Akbar berinisiatif untuk meneruskan usaha ayahnya sebagai saudagar. Secara perlahan kehidupan keluarganya pun berangsur membaik dari hidup prihatin dalam kenestapaan ekonomi.

Sebetulnya Akbar bukanlah anak yang menonjol dalam suatu bidang tertentu, terlebih ia pendiam. Cita-cita masa kecilnya ingin menjadi TNI Angkatan Laut yang selalu diidentikkan dengan kegagahan dan perjuangan. Namun, karena ia menggunakan kacamata minus iapun harus rela mengubur mimpinya tersebut. Untungnya Akbar tak lekas berputus asa dan hidup membatu karena asanya kandas.

HMI Sebagai Basis Persemaian Pemikiran

Selepas menamatkan pendidikannya di SMA Kanisius Jakarta, Akbar kemudian mendaftar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ia berhasil diterima sebagai salah satu mahasiswa. Masa peralihan pun dimulai. Semasa kuliah, yang dikerjakannya tak hanya aktif di bangku kelas namun juga berorganisasi. Pengalaman masa kecilnya yang tak berjauhan dari geliat organisasi, bahkan ia harus menyaksikan sendiri “pertentangan” politik di antara saudaranya, rupanya telah mempengaruhi jalan hidupnya.

Ia memulai aktivitas politiknya—di level kampus—ketika bergabung dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia (KAMI-UI). Ketika itu, ia pernah terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa untuk mengganyang laskar-laskar PKI. Tak lama berselang, Akbar bergabung dengan organisasi yang begitu melekat di hatinya dan sekaligus membesarkan namanya. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi kemahasiswaan terbesar sekaligus pluralis yang ada di Indonesia ketika itu. Akbar akhirnya tertarik untuk mengisi formulir tanda keanggotaannya.

Alasannya masuk HMI kala itu, sederhana. Sebagai mahasiswa yang

masih tergolong baru, tentu belum terlalu dalam mengenal organisasi yang mewadahi para aktivis kampus dari lintas kultur tersebut. Karena teman-temannya banyak yang masuk HMI, maka ikutlah ia dengan mereka. Sejurus kemudian, Akbar merasa cocok berada di dalam wadah yang begitu luas dan mengakomodasi berbagai anggota dari beragam latar belakang. Akbar begitu terkesan dengan konsep organisasi HMI yang dipandangnya majemuk serta merepresentasikan Indonesia Raya.

Di sisi lain, di dalam tubuh HMI sendiri, ada banyak anggotanya yang berasal dari NU, Muhammadiyah atau organisasi keislaman di luar keduanya. HMI ibarat sebuah panggung besar tempat bernaungnya beragam orang dengan pakaian, gaya dan karakter yang berbeda-beda. HMI bukan organisasi eksklusif yang mewadahi satu golongan tertentu. Tapi HMI berupa organ kemahasiswaan yang inklusif dan tidak fanatik.

Adapun ekspresi keislaman HMI tidaklah bersifat picik, tapi harus dipandang dalam kesebangunan dengan nilai-nilai nasionalisme yang berpijak pada formasi pluralitas. Adalah berbahaya ketika suatu organisasi mapan dan dikagumi kemudian menegasikan kelompok-kelompok lain yang kebetulan berbeda pandang ideologi atau falsafah. Dalam nalar kebangsaan, organisasi apapun, termasuk HMI harus mau bekerja bersama untuk mewujudkan visi kebangsaan yang berkemajemukan.

Menurut Akbar, HMI memandang bahwa keislaman dan keindonesiaan saling terintegrasi, tidak saling menegasi. Posisi Islam dan Indonesia ialah saling melengkapi. Ibarat *puzzle* yang dalam setiap sudutnya memiliki kunci kesatuan, Islam dan Indonesia merupakan *puzzle-puzzle* dengan sudut-sudut yang saling bersinergi bukannya saling bertentangan. Kehadiran HMI bukan semata untuk kebaikan dan kemajuan umat Islam, namun juga membangun keindonesiaan

Dua tahun pasca menjabat Ketua HMI Cabang Jakarta, Akbar dan beberapa rekannya mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas (GMNI, HMI, PMII, GMKI, PMKRI) yang kemudian akrab disebut Kelompok Cipayung. Motivasi kelahiran kelompok ini karena dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan gerakan mahasiswa dalam menghadapi situasi sosial yang jauh dari nilai keadilan. Indikasi semakin kuatnya rezim waktu itu, hendak memperkokoh kekuasaannya tanpa

mempertimbangkan praktik-praktik demokratik telah menimbulkan keresahan para mahasiswa aktivis sehingga lahir Kelompok Cipayung.

Adapun hasil kesepakatan dari pertemuan Kelompok Cipayung yang diselenggarakan pada 19-22 Januari 1972 di Cipayung, Jawa Barat, berhasil menelurkan 7 butir yang kemudian disebut dengan Kesepakatan Cipayung. Ke-7 butir kesepakatan tersebut isinya sebagai berikut (Ridwan dan M. Muhadjirin, 2003).

1. Bahwa Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang digambarkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila.
2. Bahwa Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang kuat bersatu, Indonesia yang cerdas dan modern, Indonesia yang demokratis dan adil, Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia dan wibawa hukum, Indonesia yang sehat dan makmur, Indonesia yang bebas dari ketakutan dan penindasan, Indonesia yang berperan dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia yang layak bagi tempat dan kehidupan manusia selaku makhluk Tuhan.
3. Bahwa Indonesia yang kita cita-citakan hanya mungkin dicapai dari pembangunan ke pembangunan dengan bekerja keras, jujur, hemat, yang dilandasi semangat pioner melalui pengorbanan.
4. Indonesia yang kita cita-citakan hanya dapat dibangun atas pikiran dan tekad bersama, yang erat dan terarah dari generasi ke generasi bangsa Indonesia dengan tidak mengenal perbedaan agama, suku, daerah, umur, dan golongan, karena tekad pikiran yang demikian inilah yang mencetuskan Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945 dan Orde Baru kita sekarang ini.
5. Dalam rangka membangun masa depan dalam Indonesia yang kita cita-citakan, maka pembentukan dan pembinaan generasi pembangunan selaku generasi penerus adalah mutlak. Kita bercita-cita membangun masa depan yang lebih baik dari masa kini dan masa kemarin, karena itu generasi pembangun memerlukan keberanian melihat dan menilai dasar-dasar pembangunan masa depan dan meninggalkan pola-pola lama, ikatan-ikatan lama, yang menghalangi usaha pembangunan masa depan yang baru. Generasi pembangun itu mempunyai ciri-ciri khas, yaitu bebas dan terbuka, positif, kritis, dinamis, jujur, berdedikasi,

dan radikal. Ciri-ciri khas itu merupakan unsur dalam melihat masa depan, serta menilai masa kini dan masa lampau.

6. Generasi pembangun mutlak turut menentukan isi, bentuk, corak, dan watak dari Indonesia yang kita cita-citakan, dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat dan tenaga melalui kebebasan yang bertanggung jawab, yang dijamin atas dasar hukum, dan untuk itu pembinaan generasi pembangun menjadi kewajiban bersama.
7. Generasi pembangun ini, akan mempunyai peranan bila dalam generasi pembangun itu sendiri ada inisiatif untuk mengubah dan mempersiapkan diri menerima dan memikul tanggung jawab masa depan dalam mencapai Indonesia yang kita cita-citakan itu. Inisiatif itu berbentuk usaha membuka diri dalam memahami pada artinya anugerah Tuhan untuk kita hidup di Indonesia, mempergunakan ilmu dan teknologi dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, menerima pikiran-pikiran yang beraneka ragam dari berbagai golongan generasi muda dalam masyarakat, dan kesediaan mempersiapkan diri mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kiprah Akbar di HMI kemudian mencapai puncaknya ketika berhasil menjadi Ketua Umum PB HMI dalam kongres ke-X, 3-12 Oktober 1971 di *Sport Hall* Palembang. Keterpilihan Akbar menggantikan pendahulunya, Nurcholis Madjid (Cak Nur). Nama besar Cak Nur yang telah begitu identik dengan HMI dengan segala kiprah intelektual-sosialnya jelas menjadi tanggungjawab besar yang harus dipikul Akbar. Ia harus sekuat tenaga melanjutkan kiprah Cak Nur dalam membesarkan rumah kebangsaan HMI, serta menghindarkannya dari anasir-anasir kepicikan dan eksklusivitas pemikiran anggota-anggotanya. (Hafidz, dkk (Ed), 1997)

Keterpilihan Akbar sebagai ketua umum juga sekaligus menjadi penanda kian aktifnya ia masuk ke ranah politik praktis. Pun menjadi tonggak keaktifan seorang Akbar Tandjung dalam politik praktis diluar partai yang berbasiskan Islam. Persoalan-persoalan yang dihadapi Akbar kala itu, dimana sejalan dengan masa-masa awal Orde Baru, tidaklah sederhana. Dia dihadapkan dengan konsepsi-konsepsi politik yang tentu

saja ditawarkan oleh rezim seperti pembatasan partai politik dan melarang keformalan ideologi-formalistik Islam.

Akbar juga yang turut dalam membidani lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973. Tujuan didirikannya KNPI ialah menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di awal kemunculannya, KNPI dianggap dekat dengan pemerintahan Orde Baru dan pernah diminta untuk dibubarkan karena tidak sesuai dengan *khittah*-nya.

Banyak anggota KNPI yang pada akhirnya bergabung dengan Golkar sehingga makin jelaslah relasi antara Golkar-KNPI. Baru kemudian di masa kepemimpinan Idrus Marham—Sekjen Partai Golkar sekarang—diadakan transformasi KNPI sehingga jadilah KNPI yang sekarang, menjadi mitra kritis pemerintahan bukan bersikap melawan. Akbar Tandjung sendiri menjadi Ketua Umum DPP KNPI dari periode 1978-1981. Di sela-sela kesibukannya di HMI dan KNPI, Akbar Tandjung juga berperan aktif dalam mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) pada tahun 1978 (*merdeka.com*, 2013).

Golkar: Rumah Ideologi dan Idealismenya

Pertanyaan mendasar: mengapa Akbar lebih memilih berkiprah di politik praktis bersama kapal besar Golkar yang berideologi nasionalis, bukan di partai yang berhaluan

islamistik mengingat latar belakangnya dari HMI yang notabene wadah bagi aktivis mahasiswa Islam?

Tentu saja jiwanya yang akomodatif dan sudah terbiasa sebagai “jembatan penghubung” mengharuskannya berpikir untuk tidak berada dalam satu sisi, dengan masuk ke partai Islam misalnya, yang menyulitkan dirinya untuk berperan sebagai penengah. Ia ingin mempersatukan antara Islamis dengan kaum nasionalis yang ketika itu agak frontal berseberangan. Dengan keberadaannya di Golkar, maka harapannya, dapat menjadi solusi relasi diantara keduanya.

Tak kalah penting, setelah merumuskan kegagalan para intelektual

dan aktivis Islam yang menginginkan tampilnya Islam dalam bentuk formalistiknya, disimpulkan bahwa format politik Islam sebaiknya lebih ditekankan pada sisi substansialnya. Bukan pada bentuk atau bajunya, melainkan pada kesadaran jiwa untuk menerapkan sistem dan ajaran Islam secara komprehensif dalam berperilaku politik. Hal tersebut karena sesuai dengan fakta sosiokultural bangsa yang heterogen. Khawatir jika akomodasi hanya diberlakukan kepada salah satu kelompok atau organ, akan menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa saja berakhir destruktif.

Selepas menjabat Ketua Umum PB HMI, Akbar semakin intens terlibat dalam percaturan politik nasional. Ia merapat ke Golkar dan menjadikannya sebagai pijakan politik berikutnya. Tak perlu lama untuk meraih jabatan teras. Kemahirannya dalam berorganisasi ia tunjukkan di Golkar. Tahun 1983 ia sudah dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Jabatan yang tentu saja sangat sulit untuk diraih bagi orang yang tak memiliki kecakapan berpolitik seperti yang ditunjukkan Akbar.



Basis politiknya yang kuat dan luas tersebar paling tidak di tiga organisasi yang turut membesarkan namanya—HMI, KNPI, dan AMPI—membuat jalannya seolah terbuka lebar untuk meraih jabatan struktural.

Selama 5 tahun dari 1983 sampai 1988 ia menduduki kursi Wasekjen DPP Golkar, kemudian pada 1988-1993 posisinya menjadi anggota Dewan Pembina Partai Golkar. periode selanjutnya, 1993-1998 ia tampil menjadi Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar (*pemiluindonesia.com*, 2008).

Ikatan batin Akbar dengan partai berlambang pohon beringin tersebut sangatlah kuat. Jatuh bangun telah ia rasakan bersama Golkar. Baginya, Golkar bukan sebatas rumah politiknya namun tempat mengasah gagasan dan mewujudkan ide-ide kebangsaannya. Golkar merupakan gerbong baginya dalam menyumbangkan pemikiran-pemikiran bernas soal kebangsaan yang tak mungkin diaktualisasikan jika dirinya tak memiliki kekuasaan politik. Golkar ialah rumah berfikirnya yang dinamis dan tak termakan zaman.

Kecerdikan dan ketangkasan Akbar dalam berpolitik bukan isapan jempol. Karier politiknya terus menanjak sekalipun rintangan tak pernah putus. Akbar seolah ingin menahbiskan diri sebagai politisi segala zaman yang berhenti ketika uzur. Terbukti pasca kejatuhan mantan atasannya, Akbar diangkat menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 1998-2003. Di masa kepemimpinan Akbar, Golkar harus segera mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan partai yang tercerai-berai akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim. Karena saat itu, masyarakat sulit untuk tidak mengaitkan hubungan Golkar dan rezim yang begitu mesra selama berkuasa. Akbar sangat paham bahwa posisi Golkar saat itu tengah diujung tanduk. Tugasnya maha berat untuk mempertahankan eksistensi Golkar di kancah perpolitikan

nasional. Kerja kerasnya ini terbayar lunas. Pada Pemilu 1999 yang berlangsung relatif aman, jujur dan demokratis, Golkar berhasil menduduki peringkat kedua dibawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dibawah komando Megawati. Lagi-lagi, fakta itu mengkonfirmasi kepiawaian Akbar dalam kancah politik. Ia ibarat kancil yang pandai meloloskan diri dari musuh sekalipun sudah dikepung dikelilinginya. Fakta itu berhasil menjungkalkan hitung-hitungan matematis politik sejumlah orang bahwa Golkar akan terpuruk di posisi buncit.

Namun tentu eksistensi Golkar yang moderat tersebut tidak lantas jalan politik ke depannya lempang tanpa onak-duri. Berbagai hambatan fundamental telah siap menghadang dan apabila tidak dikelola dengan konstruktif maka akan menimbulkan kemerosotan bagi partai. Hambatan itu ialah cap Golkar yang masih dianggap terkontaminasi rezim bahkan sesaat setelah kehancurannya. Golkar masih diidentikkan dengan rezim yang apabila berkuasa, maka jejak otoriternya kembali terjadi. Fakta politik yang tak bisa dibantah dan harus segera dilakukan langkah-langkah strategis.

Akbarpun berupaya sekuat tenaga melakukan reformasi di tubuh Golkar untuk mencitrakan kembali dirinya sebagai bukan bagian dari rezim terdahulu yang dibenci. Golkar di era Akbar merupakan Golkar baru yang membongkar habis kebiasaan-kebiasaan lama yang berkelindan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akbarpun bersikap dengan kesantunan dan ketulusannya. Gaya berpolitiknya mirip Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menekankan akomodatif terhadap semua kalangan, lawan atau kawannya.

Wajah Golkar di era kepemimpinan Akbar bukan memberangus tapi memperbanyak*teman*. Akbar lebih mengutamakan berkompromi ketimbang “berperang” secara diametral. Ego politiknya dikesampingkan demi terciptanya sebuah konsensus diatas pijakan kepentingan orang banyak. Ia tak masalah sekalipun dicap sebagai oportunist sebagai implikasi dari sikapnya itu, karena baginya, yang terpenting bisa menyatukan perbedaan-perbedaan. Ia lebih memercayai permufakatan daripada persilangan pendapat yang sifatnya destruktif.

Jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar kemudian digantikan M. Jusuf Kalla di tahun 2004 yang lantas menjadi wakil presiden mendampingi SBY. Sejak saat itu, nama Akbar Tandjung yang notabene sudah malang-melintang di percaturan politik praktis sejak awal Orde Baru sampai kejatuhannya, seolah menghilang ditelan bumi.



www.sayangi.com

Pengalaman di Pemerintahan dan Parlemen

Saking sibuknya menjadi aktivis, Akbar terlambat dalam meraih gelar insinyurnya di UI. Bahkan ia baru menikah dalam usianya yang menginjak 36 tahun, pada 1981. Ia menikahi seorang gadis dari keturunan Kesunanan Solo, Krisnina Maharani. Dari pernikahannya yang terlambat itu, Akbar memiliki empat orang anak yakni Fitri Krisnawati, Karnia Krissanty, Triana Krisandiri dan Sekar Krisnauli. Ia begitu menyayangi keluarganya dengan sepenuh jiwa.

Karier organisasi dan berpolitiknya memang moncer. Kiprahnya untuk maju seakan tak pernah bisa dibendung. Jabatan-jabatan pucuk di organisasi, partai maupun jabatan struktural pemerintahan telah digapainya. Pengaruh dan cengkraman politiknya bak gurita yang tangan-tangannya ada dimana-mana.

Berbeda dengan kebanyakan politisi lainnya yang harus meniti jabatan dari bawah dulu sebelum akhirnya tampil di panggung nasional, Akbar langsung melesat bak roket. Tahun 1977 sampai 1988 ia sudah menjadi

anggota DPR RI dari fraksi Golkar mewakili Provinsi Jawa Timur. Bahkan dalam periode 1982-1983 Akbar sempat mengecap posisi Wakil Sekretaris FKP DPR RI (*merdeka.com*, 2012).

Jabatan demi jabatan terus diraihinya. Beranjak ke periode 1988-1993 ia dipercaya sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan V. Sejak itu, beberapa posisi menteri lainnya seperti Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Menteri Sekretaris Negara, dilakoninya. Tentunya menjadi kemewahan tersendiri ketika begitu banyak berkah jabatan yang mampir di pundaknya. Tak semua anak bangsa mampu meraih pencapaian politik yang secemerlang itu, terlebih Akbar juga berhasil “lolos” dari jerat kelam masa lalu partainya.

Gagasan di Masa Transisi Demokrasi

Tidaklah mudah memikirkan dan mewujudkan gagasan politik pada masa peralihan, yakni dari otoritarian dibawah rezim Soeharto menuju demokratis era reformasi. Terlebih gagasan itu lahir dari partai penguasa rezim tersebut yakni Golkar. Ini semacam koreksi total atau otokritik bagi setiap kader yang ada didalamnya dan sudah tentu akan mendapat respon negatif dari lawan politik.

Dalam kondisi seperti ini, Akbar Tandjung terpilih menjadi Ketua Umum partai periode 1998-2004. Berkat komitmen dan dedikasinya yang tinggi terhadap demokrasi dan reformasi, ia dapat mengubah wajah Golkar. Prediksi kekalahan Golkar oleh banyak pihak pada pemilu pertama masa reformasi di tahun 1999 tidak terbukti. Namun, yang terjadi justru kebalikannya, Akbar Tandjung sukses membawa partai tersebut sebagai pemenang kedua dibawah PDIP. Sekaligus menyingkirkan banyak partai pendatang baru dengan total jumlah partai peserta pemilu sebanyak 48 partai.

Gagasan yang dibawa Akbar Tandjung yang dimulai dari dalam Golkar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama kali disampaikan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 1998 dan diterbitkan dalam sebuah buku kecil yang berjudul “*Menuju Kelahiran Partai Golkar: Pokok-Pokok Paradigma Baru (1998)*”. Paradigma baru yang digagas

Akbar ini membahas gagasan praktik demokratisasi terhadap dua hal, yaitu negara modern dan kemandirian partai politik.

Akbar menilai praktik kehidupan bernegara pada masa otoritarian Soeharto adalah sentralistik. Dimana semua kekuasaan lembaga politik berada dibawah satu orang, yakni “Sang Presiden”. Tidak ada pembagian kekuasaan antara, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Maka dari itu menurut Akbar untuk mewujudkan demokratisasi yang dibutuhkan adalah adanya wujud negara modern. Gagasan Akbar tentang negara modern berangkat dari teori Trias Politica-nya Montesquie yang berarti pembagian kekuasaan atau *checks and balances* antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan menurut Akbar, dari pembagian kekuasaan tersebut, juga mesti didasari dengan sistem kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintahnya melalui pemilu yang jujur dan demokratis.

Akbar menginginkan legislatif bukanlah sekedar lembaga “stempel” seperti yang sudah-sudah. Legislatif tidak boleh melepaskan peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas, pengontrol dan pendanaan untuk eksekutif. Bukan juga sebagai pelaksana dari apa yang diperintahkan eksekutif.

Untuk eksekutif, terutama presiden, Akbar meminta untuk tidak mengintervensi partai. Ini akan menyebabkan peran dan fungsi partai tidak berjalan. Demokratisasi partai tak terlaksana. Karena hanya menjalankan apa yang diperintahkan Presiden. Pada saat itu, Akbar pun menjadi pendukung perubahan Undang-undang partai politik yang mengedepankan nilai dan prinsip demokrasi.

Yudikatif pun diinginkan Akbar untuk tidak menjadi alat penghukum bagi penyeimbang atau oposisi rezim. Yudikatif harus menegakan HAM dan Hukum. Berani memanggil yang bersalah dan menegakkan kebenaran, sekali-pun itu yang berkuasa.

Menurut Akbar juga, perwujudan *checks and balances* ketiga lembaga ini dapat diwujudkan melalui perekrutan personilnya dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mewujudkan pemilu seperti itu, maka dibutuhkan juga partai modern yang mempunyai sifat kemandirian.

Satu indikator partai modern yang ditekankan Akbar adalah adanya

transparansi dalam partai politik. Transparansi disini, bukan hanya terkait masalah pendanaan partai. Lebih dari itu, juga perihal seperti perekrutan, kaderisasi, penempatan jabatan publik dan lain-lain.

Dengan transparansi parpol kepada publik diharapkan akan meningkatkan kualitas dari parpol itu sendiri. Peran dan fungsinya yang selama ini tidak berjalan, misalnya sebagai sarana rekrutmen, kaderisasi dan komunikasi politik dapat terwujud secara maksimal. Maka dari itu, Akbar mengatakan “Golkar akan menjalankan fungsi-fungsi politik-nya secara lebih transparan, yaitu *pertama*, sebagai wadah artikulasi dan agresivitas kepentingan rakyat, *kedua*, sebagai alat rekrutmen kader politik dan kader bangsa, dan *ketiga*, sebagai sarana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat.” Selain itu, Akbar juga menambahkan bahwa partai harus *solid, mandiri, responsif, mengakar* dan *demokratis*.

Akbar juga menambahkan, peran parpol untuk mewujudkan Negara modern juga harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil atau *civil society*. *Interest group* atau *pressure group* seperti ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), gerakan mahasiswa dan pers juga harus dapat melakukan hal yang sama dalam pematangan demokrasi. Misalnya, gerakan mahasiswa yang mengutamakan kekuatan moralnya, pers yang melakukan kontrol secara bebas dan profesional serta kelompok-kelompok politik yang beretika demi menjaga solidaritas dan integrasi nasional.

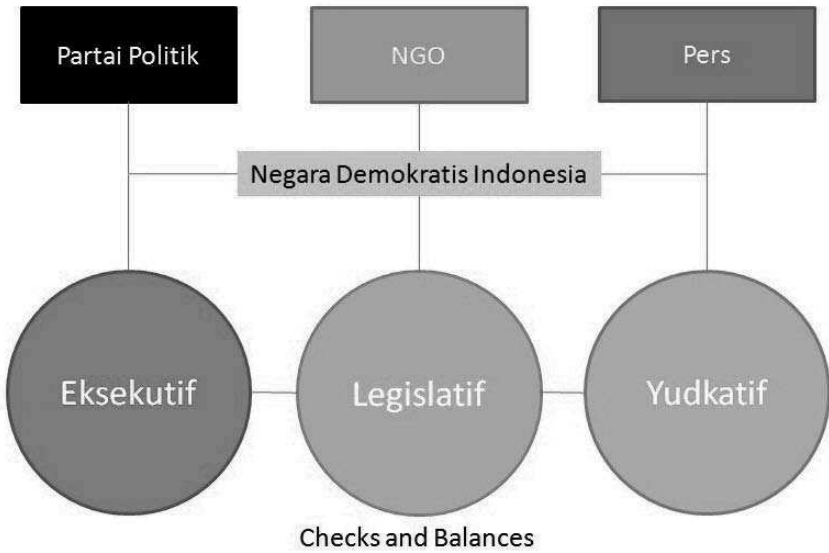
Untuk gerakan mahasiswa, menurut Akbar tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa yang lahir dari kancah perjuangan mahasiswa dan kaum muda pada umumnya. Mahasiswa dapat memainkan perannya sebagai oposisi dalam politik untuk mengimbangi pemerintah. Akbar meminta mahasiswa tetap konsisten pada posisinya sebagai kekuatan moral, seperti yang pernah disampaikannya pada Kongres I Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMISPI) pada 17 April 2000, “... dalam menjalankan semuanya itu para mahasiswa harus sadar bahwa dirinya merupakan kekuatan moral, dan bukan kekuatan politik... Kekuatan gerakan mahasiswa pada sejatinya terletak pada konsistensinya sebagai gerakan moral. Sekali gerakan mahasiswa masuk kedalam gerakan politik, maka bukan hanya mereka akan terlibat terus menerus dalam pusaran politik sehingga kehilangan objektivitas dan orisinalitasnya, melainkan juga akan

kehilangan ruh perjuangannya karena telah menjadi partisan. Setiap sikap partisan akan melahirkan sikap tidak obyektif dalam memandang persoalan, dan akibatnya akan kehilangan dukungan masyarakat.”

Bagi Akbar, pers juga mempunyai peran yang signifikan dalam membangun demokrasi. Akbar mengatakan, kultur pers pada orde baru mesti berubah. Apabila pers pada saat itu partisan, seperti ada istilah *yellow paper* atau Koran Kuning yang dimiliki Golkar, dan partai yang lain pun juga mempunyai surat kabar atau tabloid seperti, tabloid Amanat (PAN), tabloid Demokrat (PDIP), harian Duta Masyarakat (PKB), harian Mimbar Ummat (PPP), tabloid Abadi (PBB) ini dapat mengaburkan makna pers yang bebas dan profesional. Maka itu, Akbar mengharapkan pers di masa demokrasi adalah sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislative dan yudikatif.

Ketika kran demokrasi dibuka, Akbar melihat euforia baik mobilisasi politik atau partisipasi politik sangat-lah besar. Disatu sisi, Akbar menilai ini adalah hal yang positif. Namun di sisi lain ini dapat mempunyai potensi ancaman mengingat Indonesia adalah sebagai suatu Negara yang sangat heterogen latar belakang budaya, agama, keadaan geografis dan ikatan emosional warga lainnya. Dengan begitu Akbar mengingatkan kepada semua kelompok politik harus tetap menjalankan demokratisasi dengan mengedepankan integrasi nasional.

Untuk menjaga integrasi nasional, Akbar menegaskan untuk setiap individu ataupun kelompok politik, selalu mempraktekan demokrasi pada nilai-nilai moral yang santun agar solidaritas kebangsaan tetap terjaga. Ini sejalan dengan Bertens (1994), etika adalah nilai-nilai moral sebagai ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Dengan begitu Akbar mengharapkan demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi yang konstitusional yang mengedepankan *rule of game*. Kisah Akbar yang mampu memimpin Golkar ini berikutnya secara terang didokumentasikan melalui disertasi yang ia tulis ketika meraih gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada dengan Judul *Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2007.



Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Nama Akbar Tandjung sebagai kandidat Calon Presiden (Capres) pernah mencuat ke permukaan ketika terjadi dinamika dalam tubuh Golkar menjelang Rapimnas (kompas.com, 2013). Munculnya nama Akbar yang dari beberapa kader Golkar, dikarenakan adanya penilaian terhadap perjalanan politik Akbar yang dianggap matang dan dewasa. Selain itu, Akbar merupakan orang yang berjasa mendemokratisasi Golkar dan menjadi penengah dalam konflik yang sering terjadi antar faksi.

Penilaian terhadap diri Akbar, tidak muncul tiba-tiba. Akbar mempunyai potensi besar yang dapat menjadi capres pemilu 2014, apabila potensi ini mau diramunya. Tidak menutup kemungkinan, Akbar dapat menjadi capres alternatif, ketika masyarakat sudah menyadari bahwa Akbar mempunyai potensi dari gabungan beberapa capres yang ada. Beberapa potensi tersebut diantaranya:

Pertama, jiwa kepemimpinan Akbar sudah teruji. Akbar yang mempunyai latar belakang perbedaan pilihan politik yang kontras diantara saudara-saudaranya, yakni abangnya yang berada di PDIP dan PPP, membuat Akbar menjadi sosok pemimpin berkarakter *"man of consensus"* di dalam dunia

politik. Selain predikat, *man of consensus*, kesantunan dan kesabaran Akbar dalam berpolitik, menurut Harijanto Tohari -- yang juga sebagai petinggi Partai Golkar -- dinilai "*lebih Solo ketimbang Orang Solo*". Gambaran ini mensiratkan Akbar sebagai politisi yang dapat mempersatukan golongan dengan mengedepankan etika politik. Pada pemilu 2014 nanti, karakter Akbar ini bermanfaat untuk berkomunikasi perihal pemilu presiden dengan capres yang berasal dari partai lain. Akbar dapat membaca dan menentukan peta politik kekuatan dirinya dan lawan politiknya untuk pencapresan.

Kedua, Akbar yang merupakan mantan Ketua Umum HMI mempunyai jaringan massa. Hingga sekarang, Akbar tak sungkan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah HMI. Ini membuat kader-kader HMI mempunyai ikatan emosional dengan Akbar secara langsung. Selain massa dari lapisan mahasiswa, Akbar juga mempunyai massa yang kategorinya pemuda. Sebagai pembentuk KNPI dan pernah menjabat Ketua Umum KNPI, membuat Akbar mempunyai kedekatan dengan beberapa pemuda KNPI yang berada di tiap daerah baik provinsi atau kabupaten/kota.

Kekuatan massa yang dapat di himpun dari HMI dan KNPI ini, ditambah dengan kehadiran organisasi pemuda di dalam Golkar seperti AMPI, yang menjadi pembangun komunikator kelompok menengah untuk kandidasi presiden hasil Pemilu 1999.

Ketiga, tak dapat dihindarkan, hampir setiap partai politik terdapat faksi didalamnya. Golkar adalah partai yang sudah mapan mengelola manajemen konflik antar faksi tersebut. Setidaknya ada lima faksi didalam tubuh Golkar, *Pertama*, faksi Jusuf Kalla yang didukung simpatisan partai Golkar dan kalangan NU. *Kedua*, faksi Akbar Tandjung yang didukung kalangan HMI. *Ketiga*, faksi Harijanto dan Priyo sebagai perwakilan kalangan muda Golkar yang mempunyai basis di kampus-kampus. *Keempat*, kelompok "macan tidur" secara berturut-turut ialah Agung Laksono dengan Kosgoro 57, Fadel Muhammad dengan basis dukungan di Indonesia Timur dan basis pendukung Surya Paloh di Munas Pekanbaru. Terakhir yang *Kelima* ialah faksi ARB dengan dukungan kalangan KADIN (pengusaha). Dari faksi-faksi ini, Akbar dinilai juga mempunyai kekuatan dari Golkar, untuk menjadi Capres maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2014.

Keempat, dengan pengalaman politiknya didalam pemerintahan baik

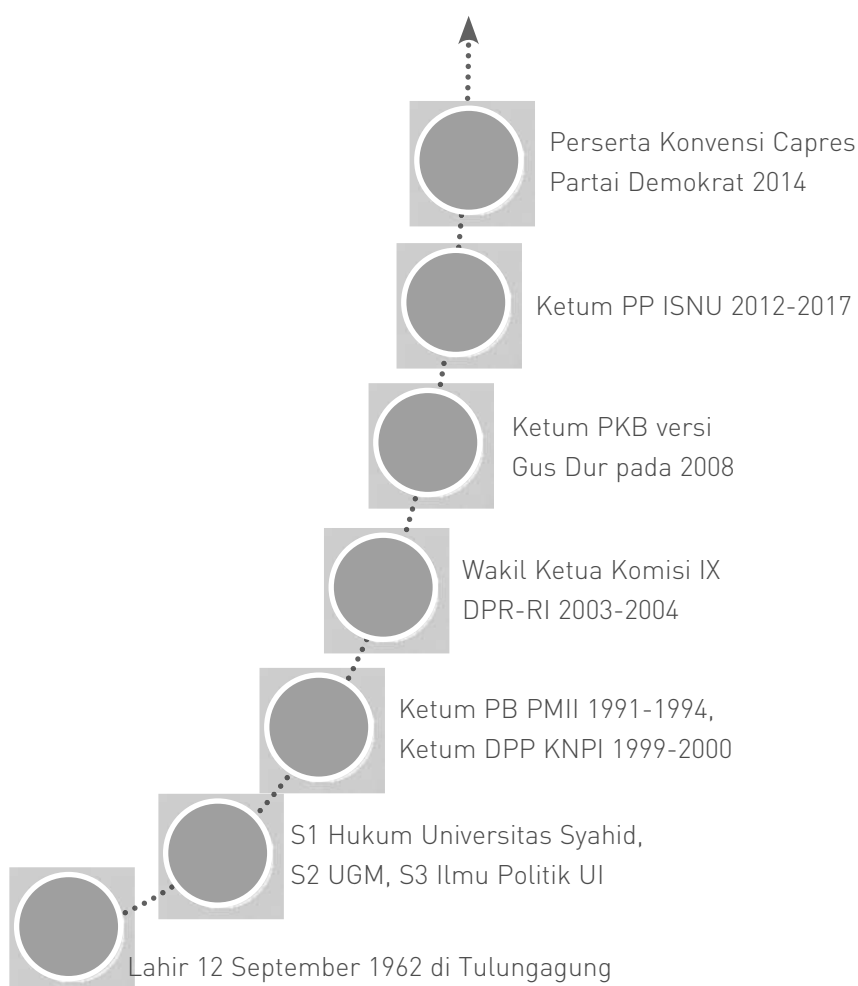
sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Menteri Sekretaris Negara ditambah pernah menjadi Wakil Sekretaris Faksi Karya Pembangunan di DPR RI dan Ketua DPR membuat Akbar mempunyai pengalaman sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Keempat hal ini dapat menjadi modal Akbar, baik dalam mempersiapkan prioritas pembangunan maupun dalam penuntasan masalah yang menjadi akar utama dari berbagai kesenjangan yang terjadi.

Memang Golkar sudah mempunyai bakal Capres yakni Aburizal Bakrie. Namun, pencapresannya bagi banyak kalangan perlu dievaluasi mengingat dan mempertimbangkan elektabilitas ARB sebagai kandidat dengan raihan Golkar dalam temuan rilis berbagai lembaga survei yang timpang. Oleh karenanya, raihan hasil Pemilu Legislatif dan perkembangan terbaru konstelasi figur Capres di 9 april 2014 nanti, akan menentukan nafas dan jalan Akbar Tanjung sebagai politisi. Apakah ia memiliki skenario baru untuk menyikapi ini? atau kini posisinya memang sudah tepat untuk menjadi Bapak yang mengayomi semua anak bangsa.

ALI MASYKUR MUSA

Pemimpin Potensial





facebook.com/ali.m.musa.9photos_all

Bersarung sambil menenteng kitab kuning merupakan ‘makanan’ sehari-harinya. Lahir dari seorang ulama terpandang dari kaum Nahdliyin tak lantas membuatnya tinggi hati. Sepenuh hati dia menekuni ilmu agama. Ali Masykur Musa, lahir pada 12 September 1962. Ali merupakan putra keempat dari lima bersaudara dari pasangan K. H. Musa Asy'ari dan Hj. Muthmainnah.

Kota Tulungagung tempat kelahirannya dikenal sebagai kota budaya. Berbagai peninggalan Kerajaan Majapahit bisa dijumpai di kota penghasil marmer ini. Tak hanya itu, kota ini juga kental dengan suasana santrinya. Terdapat ratusan pondok pesantren di kota itu. Paham yang dianut pun beragam. Ada yang Salafiyah, Ashriyah, hingga kombinasi. Pada latar lokasi yang heterogen itulah, Ali Masykur dibesarkan.

Ali Masykur Musa kecil dikenal sebagai anak cerdas. Di Madrasah Diniyah, Ali langsung masuk kelas 4, sekaligus masuk SD di kelas 5. Ali kemudian melanjutkan sekolah di PGAN Tulungagung pada 1978 dan meneruskan ke Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung (*id. wikipedia.org*, 2013).

Sewaktu kecil, Ali mengaku sering berganti-ganti cita-cita, namun ia mantap memilih politik sebagai hobinya saat duduk kelas 2 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tulungagung. Pilihan itu bukan tanpa sebab, me-

lainkan telah berurat dan berakar sejak ia dididik oleh keluarga yang menanamkan kesadaran sosial, politik, dan kemasyarakatan. Ia mengaku mendapatkan indoktrinasi itu dari orang tuanya. “Hidup itu bukan kesenangan, tetapi hidup itu pengorbanan untuk orang lain,” kenangannya mengingat perkataan orang tuanya.

Keluarga dan lingkungan telah membentuk Ali menjadi sosok orang yang penuh dedikasi dan pengabdian. Meski demikian, orang tuanya tidak pernah mengizinkannya masuk dunia modern sebelum *nyantri* terlebih dahulu. Sebuah prinsip yang kemudian diterapkan Ali kepada anak-anaknya.

Karena itu, Ali Masykur pun mendaftarkan diri menjadi santri di Pondok Pesantren Panggung Tarbiyatul Ulum, Tulungagung, 1975-1978 dan Pondok Pesantren Al-Fatah, Mangunsari, Tulungagung, tahun 1978-1981. Kecerdasan Ali terus mengantarkannya hingga memasuki dunia mahasiswa. Ia menjadi mahasiswa teladan ketika lulus S1 dari Universitas Jember tahun 1986. Prestasi itu mengakibatkan Ali langsung ditawarkan untuk mengajar di alamaternya. Di sana ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil selama 12 tahun.

Masuk ke dunia politik, Ali Masykur Musa memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Apa sebab? Karena partai itu dianggap sebagai penyalur aspirasi warga NU. Selain itu, para pendiri PKB yang memang tokoh struktural di NU turut menarik hati Ali.

Nama-nama seperti KH Abdurrahman Wahid maupun Kiai Ilyas Ruchiyat membuat Ali menetapkan karir politiknya di PKB. “Politik saya adalah politik NU,” begitu Ali pernah berkelakar. Pascareformasi, Ali Masykur yang merupakan Ketua DPP PKB mendapat jatah satu kursi untuk duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) periode 1999-2004.

Demokrasi dalam Keluarga

Menerapkan demokrasi dalam keluarga memang ‘susah-susah gampang’. Namun, Ali Masykur Musa tetap berusaha menerapkannya pada ketiga anaknya. Ia memberi mereka kebebasan berpikir dan berkreasi. Ali Masykur

membebaskan anak-anaknya mulai memilih warna pakaian, keinginan mengikuti les, memilih buku, hingga memilih teman bermain sendiri. Demokrasi di rumah ia bina dengan prinsip 'tak boleh ada jarak antara orang tua dan anak'. Kedekatan orang tua dan anak, diupayakannya dengan selalu mengutamakan keluarga di waktu senggang.

Bagi Ali, mengenalkan agama pada anak itu harus dilakukan sejak dini. Ia selalu mengajarkan anak agar menyenangi membaca buku terutama buku-buku agama, sesuai dengan tingkatan umurnya. Ali tidak membatasi anaknya untuk membaca buku-buku kontemporer karena menghormati hak mereka. Tapi, sebagai orang tua, Ali Masykur selalu mengharuskan agar anak-anaknya membaca buku agama.

Di saat senggang dan liburan, biasanya sepekan sekali, ia selalu mengajak anak-anak ke toko buku. Di situ mereka boleh memilih sendiri dengan arahan orang tua, asalkan di antara pilihan itu harus ada buku-buku agama. Itu pengenalan agama dalam arti pengetahuan. Dalam arti praktik, sarjana ilmu politik ini mengharuskan anak-anaknya mengaji. Baik ke TPA maupun ke masjid. Begitu pulang dari mengaji sehabis shalat Maghrib, selalu dicek suruh membaca kembali.

Ali berpendapat orang tua adalah simbol dan sumber ketenangan. Dengan adanya orang tua di tengah-tengah mereka, anak akan merasa lebih tenang. Sebagai anggota BPK, Ali Masykur tentu sering berkunjung ke daerah selama berhari-hari. Tidak jarang anak-anaknya mengeluh karena jarangnyanya Ali berada di rumah. Saat hendak pergi, Ali selalu menjelaskan pada anak-anaknya bahwa ia melaksanakan tugas. Dan, melaksanakan tugas itu adalah menjalankan ibadah (*Republika*, 2 Mei 2008).

Dengan memahami profesi sang ayah, Ali Masykur berpendapat, ia telah memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini. Tentu saja Ali Masykur tak ingin waktu bersama anak yang hilang karena aktivitasnya itu tidak tergantikan. Sebagai kompensasi, ia selalu mengupayakan kesempatan bertatap muka. Misalnya, pagi hari sebelum berangkat bekerja, ia menyempatkan diri bersenda-gurau dengan mereka.

Di hari libur, terkadang ia mengajak anak-anaknya jalan-jalan ke tempat yang murah meriah sambil makan. Sedangkan selama Ramadhan, keluarga Ali Masykur membangun semangat untuk darusan dalam istilah

bahasa Jawa atau tadarus (membaca) Alquran. Ali Masykur merasa tidak pernah pilih kasih terhadap salah satu dari mereka. Menurut dia, anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi kasih sayangnya pada mereka tetaplah sama.

Mengantar PKB Kembali ke Parlemen

Wajah Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ali Masykur Musa riang. Ia berteriak kepada anggota DPR asal Partai Golongan Karya Slamet Effendy Yusuf, “Kami sudah lolos!” Ali Masykur pantas bersuka cita. Pada Senin 27 Agustus 2001, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pertama pascarese, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, peserta rapat sepakat menerima kembalinya FKB ke Senayan.

Memang, ada interupsi dari anggota Fraksi Reformasi Hatta Taliwang ketika Soetardjo mengetok palu pembukaan sidang. Ia menyoal kehadiran FKB, terkait dengan pernyataan pembekuan FKB karena tidak setuju dengan pelaksanaan SI MPR yang melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid.

Hatta lantas menunjukkan beberapa berita yang memuat pernyataan itu. Di antaranya ucapan Effendy Choirie, Chotibul Umam Wiranu, dan Arifin Djunaedi. Effendy Choirie dikatakan pernah menyebut DPR sebagai kaum pengibul. Sekretaris Dewan Syuro PKB Arifin Djunaedi pernah menyatakan dirinya eks anggota DPR/MPR begitu dekrit pembekuan DPR/MPR dikeluarkan oleh Gus Dur. Sedangkan Chotibul sebagai Wasekjen PKB pernah menyatakan pembekuan FKB dari DPR/MPR.

Sekitar 28 anggota FKB yang hadir tampak menahan nafas dan terdiam menunggu nasib. Ali Masykur Musa, Ali Mashud, dan Chotibul Umam terpaku di kursinya. Sementara anggota FKB yang berseberangan, yaitu Abdul Khaliq Ahmad dan Agus Suflihat terlihat memilih duduk di barisan belakang.

Interupsi Taliwang ditanggapi langsung oleh Soetardjo. Menurut sepuh PDI Perjuangan itu, kembalinya FKB ke DPR merupakan hasil Mukernas PKB pertengahan Agustus lalu. “Menurut analisa saya, keputusan ini menunjukkan bahwa PKB sudah mengakui semua keputusan DPR/MPR. Itu



www.merdeka.com

saya baca di koran-koran.”

Alangkah baiknya, kata Soetardjo, jika semua anggota dewan menerima kehadiran FKB di DPR dengan tangan terbuka. “Saya mohon kepada semuanya kita terima dengan tangan terbuka, saudara kita FKB sebagai bagian keluarga besar DPR/MPR,” pintanya. Dan, 267 peserta rapat paripurna pun menganggukkan kepala sambil berteriak “Setuju”.

Di tempat terpisah, Ketua MPR Amien Rais menegaskan, keberadaan FKB di DPR maupun MPR tidak menjadi persoalan. “Dalam rapat pimpinan tadi diambil jalan tengah yang mudah-mudahan merupakan keputusan terbaik. Saya sebagai pimpinan MPR akan mengatakan kembalinya atau kehadiran FKB di DPR/MPR berarti memang mereka telah menerima produk SI MPR,” papar Amien, usai rapat pimpinan MPR dengan Panitia Ad Hoc (PAH) MPR, di gedung DPR/MPR.

Menurutnya, pernyataan itu telah disepakati Ali Masykur sebagai ketua FKB. Jadi, ungkap Amien, “Tutup buku soal kontroversi FKB.” FKB se-

belumnya menolak menerima hasil SI MPR secara eksplisit. Akan tetapi Mukernas PKB telah memutuskan bahwa FKB kembali ke parlemen. Dengan demikian, FKB sudah siap untuk menjalankan fungsinya kembali di DPR maupun di MPR, termasuk melakukan kerjasama dengan pemerintah.

Keputusan PKB untuk tak ikut SI, sebelumnya disampaikan Wakil Sekjen Chotibul Umam Wiranu. Tak hanya menolak SI, Chotibul juga menyatakan bahwa F-PKB membubarkan diri, karena konsisten dengan maklumat presiden tentang pembubaran DPR/MPR. Namun, pernyataan itu kemudian diluruskan. Chotibul menyebut pernyataan itu sebagai pandangan pribadi.

Sekalipun PKB merekomendasikan dekrit pembekuan DPR/MPR, pengertian pembekuan dan pembubaran adalah dua hal yang berbeda. “Pemahaman kami pembekuan itu berhubungan dengan aktivitas tidak berkaitan dengan institusi. Oleh karena itu, F-PKB masih tetap eksis,” jelas Umam saat itu.

Tahun 2001 memang menjadi momentum krusial buat karir politik Ali Masykur Musa. Ketika dia baru tiga tahun menjabat sebagai anggota DPR RI (1999-2004), Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan melalui memorandum kedua pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli.

Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai presiden oleh MPR karena dugaan keterlibatan kasus penyimpangan dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Saat melalui mekanisme memorandum, Gus Dur tak bisa memberi jawaban yang memuaskan anggota MPR.

Kejatuhan tersebut diikuti dengan sikap politik Fraksi Kebangkitan Bangsa yang membubarkan diri dari parlemen. Mereka ‘patuh’ atas Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid yang memutuskan untuk membekukan MPR/DPR dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat pada Senin 23 Juli 2001 dini hari.

Hanya, Ali Masykur Musa yang ketika itu masih berusia 39 tahun, punya pendapat berbeda. Dia menilai, eksistensi Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) harus dikembalikan di parlemen. Dengan masuk ke dalam sistem, FKB dapat meneruskan perjuangan yang diwariskan oleh Gus Dur ketimbang menjadi penonton. Ali Masykur pun memimpin kembalinya FKB ke Senayan dengan jabatan baru sebagai ketua fraksi menggantikan Taufiqurrahman.

Dengan melakukan prosesi potong tumpeng, menandakan sikap po-

litik Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) untuk kembali ke Senayan. Mereka menyatakan tindakan yang diambilnya adalah merupakan realitas politik yang harus diambil. “Fraksi kami ini bukan kembali. Tapi kami akan meneruskan perjuangan di parlemen. Dan ke depan kami akan berusaha keras untuk memperluas ruang demokrasi dan membangun kembali citra partai,” kata ketua fraksi Ali Masykur Musa yang saat itu menggelar jumpa pers, di gedung DPR/MPR.

Kematangan politik ditunjukkan Ali Masykur Musa dalam usia yang terbilang muda. Pembawaannya yang santai dan gayanya yang flamboyan mampu meyakinkan lawan bicaranya. Terlebih, dengan raut muka maskulin, membuat karisma Ali Masykur terasa. Meski usia muda, Ali bukan anak kemarin sore. Dia telah dipercaya Gus Dur untuk duduk di perlemen. Selama di DPR, ia pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPR RI 2001-2003 dan 2004-2006, Anggota BKSAP DPR-RI (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) tahun 1999-2003, Anggota Komisi IX DPR-RI tahun 1999-2002.

Dilengserkannya Gus Dur tak membuat karir Ali Masykur redup di parlemen. Dia bahkan menjadi Wakil Ketua Komisi IX (Bidang Perencanaan Pembangunan dan BUMN) DPR-RI tahun 2003-2004, Wakil Ketua Komisi XI (Bidang Perbankan dan LKBB) DPR-RI, tahun 2004-2006, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tahun 2005-2009 dan Anggota Komisi XI DPR-RI tahun 2006-2009.

Ali Masykur Musa menolak anggapan bahwa politik sebagai ladang hidup. Baginya, politik itu pilihan hidup. “Saya tidak memilih politik sebagai ladang hidup, karena politik itu merupakan panggilan dan tuntutan sejarah buat saya,” begitu Ali pernah berkata (*alimasykurmusacom*, 2013).

Memimpin PKB Gus Dur

Ali Masykur Musa terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB versi Gus Dur Kamis, 1 Mei 2008, di Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat.

Pengukuhan Ali Masykur ini dilakukan setelah tim pendamping yang terdiri atas 11 orang melakukan asistensi dengan Ketua Umum Dewan Syura

DPP PKB, K. H. Abdurrahman Wahid. “Tim pendamping yang membantu ketua umum dewan syura bersepakat menunjuk dan mengangkat Ali Masykur Musa,” kata anggota tim pendamping yang juga Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan, M. Rosehan Noor Bahri, ketika membacakan hasil akhir rapat pleno.

Ali Masykur mengalahkan dua kandidat lainnya, yaitu Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid dan Muamir Muin Syam. Yenny semula didukung sembilan DPW, Muamir enam DPW, dan selebihnya menyerahkan kandidat ketua umum ke Gus Dur. Di tengah jalan, Yenny mengundurkan diri dan meminta pemilihnya mengalihkan suara ke Ali Masykur.

Pimpinan sidang, Effendy Choirie, mengatakan, dalam AD/ART PKB calon ketua umum dewan tanfidz harus mendapat persetujuan ketua umum dewan syura. Apalagi, suara mayoritas menyerahkan pilihan mereka ke Gus Dur untuk menentukan ketua umum dewan tanfidz. Gus Dur menyatakan penunjukan Ali Masykur tak akan mengurangi kekompakan DPP PKB.

Gus Dur juga mengatakan anggota DPR dari PKB yang bergabung



ke kubu Muhaimin tak akan diotak-atik. Usai ditetapkan, Ali lekas berkonsentrasi pada Pemilu 2009. Konsolidasi partai akan dilakukan untuk menjaring 17 juta pemilih pemula dan mengikat warga NU yang selama ini menjadi basis massa partai. Ali akan menjabat Ketua Umum DPP PKB untuk periode 2008-2010 menggantikan Muhaimin Iskandar yang diminta mundur dalam rapat pleno DPP PKB. Pengunduran Muhaimin ditetapkan melalui voting. Hanya, pada gilirannya, pemerintah memenangkan PKB versi Muhaimin untuk ikut dalam Pemilu 2009.

Menjadi Anggota BPK

Rapat Paripurna DPR RI ke-11, Selasa, 29 September 2009, menyepakati secara bulat bahwa dua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, yaitu T. M. Nurlif dan Ali Masykur Musa, menjadi anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2009-2014. Keduanya menggantikan dua anggota terpilih sebelumnya, Dharma Bakti dan Gunawan Sidauruk, yang dinilai bermasalah karena masih menjabat sebagai Sekjen BPK dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat ketika mendaftar (*Republika.com*, 2009).

Kesepakatan ini diambil setelah menerima fatwa hukum dari Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa ditinjau dari aspek legalistik formal, calon anggota BPK yang masih menjabat di badan pengelola keuangan negara tidak memenuhi syarat. Berbekal pendidikan, pengalaman, dan kematangannya dalam berorganisasi mengantarkan Cak Ali terpilih menjadi Anggota IV BPK RI. Di pos barunya, Ali bertugas memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.

Kemampuan Ali pun merambah hingga dunia internasional. Pada rapat World Group of Environmental Auditing (WGEA), yaitu Forum Internasional Audit Lingkungan yang dilaksanakan di Argentina bulan November 2012, Cak Ali terpilih untuk menjabat Ketua Audit Lingkungan Hidup Sedunia periode 2013 sampai 2016. Dia menjelaskan proses di mana ia dapat terpilih menjadi Ketua Audit Lingkungan Hidup Sedunia.

Kelompok Kerja Audit Lingkungan Hidup Sedunia ini mempunyai dua

tugas penting dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Pertama, membuat buku panduan untuk memeriksa dan kaitannya dengan bidang lingkungan oleh BPK sedunia. Tim yang dibentuk Ali di BPK sendiri telah mampu membuat buku *Forest Management Audite*. Di bidang lain, anggota-anggota WGEA juga membuat buku panduan serupa. Misalnya buku panduan audit pertambangan disusun oleh Tanzania, di bidang penangkapan ikan disusun oleh Afrika Selatan, dan sebagainya. Jadi, fungsi WGEA adalah mengkoordinasikan kepada anggota yang diberi tugas membuat buku panduan audit di bidang lingkungan hidup. Kedua, WGEA mempunyai program yang jauh lebih penting yaitu mengajak masyarakat dunia untuk memedulikan lingkungan.

Memiliki Basis Sosial Islam

Ali Masykur Musa merupakan seorang yang berlatar belakang santri. Darah NU yang mengalir di dalam dirinya menjadikannya populer di kalangan Islam tradisional ini. Sudah sejak muda aktif di PMII dan menjadi ketua nya di tingkat pusat, menjadikannya memiliki pengalaman seabreg di bidang aktivisme kepemudaan Islam, basis sosial Ali Masykur.

Dodi Ambardi dalam bukunya “Mengungkap Politik Kartel”, mengatakan bahwa *cleavage* (pembilahan sosial) politik di Indonesia masih begitu kuat. Pembilahan sosial politik ini merupakan basis yang kuat untuk melakukan koalisi. Dengan memanfaatkan pembilahan sosial Islam politik NU, Ali Masykur memiliki kekuatan penuh untuk lobby politik, bahkan membuat koalisi berdasarkan kemiripan pembilahan sosial politik.

Sejak muda ia adalah aktivis dan cerdas, mempunyai basis sosial pendukung yang fanatik, berintegritas sebagai salah satu anggota BPK yang tentunya profesional, adalah kekuatan-kekuatan Ali Masykur Musa.

Ide demokrasi yang dibinanya sejak di lingkungan keluarga intinya dibutuhkan seorang pemimpin Indonesia yang multikultur. Gus Dur adalah idolanya, dimana pluralitas menempati posisi yang tinggi. Oleh karena itu, tidak heran apabila Ali Masykur Musa diundang panitia konvensi calon presiden Partai Demokrat untuk ikut berkompetisi. Menurutnya, mekanisme kompetisi konvensi yang dilakukan Partai Demokrat sudah benar secara demokratis.

Ali Masykur sudah memiliki pendukung yang *given* apabila ia maju dalam bursa calon presiden di 2014. Mantan Ketua PP PMII dan Ketua PKB ini tentunya memiliki pendukung fanatik yang siap. PMII sebagai salah satu gerakan kepemudaan ekstra parlemen memiliki massa yang tidak bisa dikatakan sedikit. Jaringan yang dimiliki Ali Masykur tentunya melebar seiring dengan aktifitas-aktifitas gerakan ekstra parlemen yang pernah dilakukannya.

Setelah menjadi Ketua PP PMII, kemudian terpilih sebagai Ketua Umum DPP PKB. Walaupun kini sudah tidak lagi di PKB, basis sosial pendukung Ali Masykur masih memiliki semangat yang sama. Ali Masykur merupakan sosok muda-ideal yang sejajar dengan Anas Urbaningrum. Kemiripan antarkeduanya menjadikannya memang calon pemimpin Indonesia masa depan.

Menurutnya, selama proses konvensi Partai Demokrat berlangsung, Ali Masykur belum menggunakan basis massa sosialnya. Apabila basis massa sosial yang percaya dengan Ali Masykur “turun gunung”, tentu kekuatan pendukung politik ini masih sangat relevan untuk menjadi mesin politik di era demokrasi prosedural. Ada peluang, bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan PKB sebagai rekanan politik. Tentu kedua partai memiliki massa politik yang signifikan untuk mendukung Ali Masykur.

Ali Masykur Musa adalah representasi Islam politik di Indonesia. Tokoh muda yang memiliki kepemimpinan yang tidak diragukan lagi ini, penerus tokoh-tokoh lama Islam politik yang pensiun dari gelanggang politik Indonesia. Kini giliran santri muda seperti Ali Masykur yang maju, karena ia bukan sembarang santri, berintegritas namun juga berkualitas.

Ayo Bergerak! Sebuah Gagasan Kebangsaan

Jejak langkah dan perjuangan Ali Masykur Musa menuju tampuk kepemimpinan nasional, terangkum dalam visi dan misi Indonesia AMM (Indonesia Adil, Makmur, berMartabat). Visi dan misi ini sekaligus menjadi tumpuan gerak dan terus dikobarkan Ali Masykur Musa dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya. Begitulah bunyi kalimat pembukaan visi strategis Ali Masykur Musa dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat.



Ali Masykur Musa memiliki mimpi untuk mewujudkan Keadilan Sosial, dengan cara menumbuhkan harmoni sosial, menyeimbangkan dan keamanan yang dinamis, dan mewujudkan kepastiandan dan keadilan hukum

Di bidang ekonomi, Ali Masykur memiliki resep untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan cara mempercepat pemerataan social, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menumbuhkan pertumbuhan yang berkeadilan, yaitu kata kunci pemeraraan ekonomi.

Ali Masykur Musa juga memiliki resep untuk menjunjung martabat bangsa dengan cara memperkuat harga diri bangsa, aktif dalam membangun peradaban nasional dan dunia, serta berusaha meningkatkan daya saing Indonesia untuk menjang semua resepnya tersebut. Tentunya peradaban yang cenderung dibawa Ali Masykur lebih condong pada peradaban keislaman. Politik aliran Islam yang masih sangat relevan di Indonesia, merupakan basis sosial dan target pembangunan resep mujarab Ali Masykur (*alimasykurmusa.com*, 2013).

Indonesia adalah negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Islam politik adalah kekuatan massa yang yang besar di Indonesia. Mirip dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Islam masih menjadi paradigma dogmatif yang kuat sebagai landasan etika dan juga berpolitik. Ayo bergerak yang ingin ditularkan Ali Masykur Musa bukan hanya semacam slogan, tetapi benar-benar ajakan menggerakkan massa politik yang besar ini.

Ali Masykur yang memiliki track record aktivis kepemudaan Islam, anggota DPR RI yang idealis, tentunya mempunyai modalitas yang kuat untuk ikut maju dalam menentukan calon pemimpin Indonesia. Pengalaman sebagai aktivis gerakan ekstra parlemen, Ali Masykur punya massa apabila pemantiknya dihidupkan, yaitu Islam politik. Oleh karena itu, Ali Masykur Musa pun memutuskan untuk ikut dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat, dan juga sebaliknya Partai Demokrat pun mengundang Ali Masykur untuk ikut konvensi mengingat rendahnya elektabilitas partai ini seperti yang Pol-Tracking Institut rilis.

Ikut Konvensi Partai Demokrat

Mutmainah (80) duduk saling berhadapan dengan Ali Masykur Musa. Putra lelakinya itu baru saja tiba, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Ali menggamit tangan kiri Mutmainah, membenamkan muka, lalu menciumi punggung tangan wanita yang melahirkannya itu dengan takzim. Si pemilik tangan hanya tersenyum. Ia pandangi putra keempatnya itu dengan tatapan mata hangat berkaca-kaca.

Tangan kanannya bergerak menyentuh pundak anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI tersebut dengan lembut. “Iya saya ridhoi apa yang menjadi cita-citamu,” tutur Mutmainah sembari mengusap-usap pundak Ali, di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung (*Sindonews.com*, 2013).

Sebagai orang tua, Mutmainah mengaku hanya bisa memberi doa restu. Selain menjalani ritual tirakat puasa Senin dan Kamis, wanita yang juga ibu kandung mantan Ketua PWNU Jawa Timur Ali Maschan Musa itu, juga melakukan shalat istikharah. Ia optimistis putranya akan mampu melewati proses konvensi capres Demokrat dengan baik. “Iya saya yakin anak saya

bisa lolos. Saya mendapat isyarat baik, anak saya duduk di atas tandu dielu-elukan orang banyak,” terangnya.

Kendati demikian Mutmainah berpesan agar Ali selalu ikhlas dan tawakal menghadapi segala konsekuensi yang terjadi. “Ikhlas dan tawakal itu syarat untuk orang yang hendak naik pangkat dan derajat,” ujarnya. Restu Mutmainah membuat Ali lolos dalam sebelas nama calon presiden konvensi Partai Demokrat. Sebagai tokoh muda yang kenyang akan pengalaman berorganisasi dan berpolitik, menjadi presiden adalah mimpi besar Ali.

Sebagai kader NU, Ali mencocokkan Partai Demokrat dengan ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Menurutnya, platform yang dikembangkan Partai Demokrat yang berlatarbelakang nasional-religius, tidak jauh berbeda dengan pandangan NU dalam melihat hubungan antara negara dan agama.

Menurut pandangan NU, pendekatan agama dan negara tidak strukturalis, tetapi agama menjadi penyinar bagaimana nilai-nilai agama masuk dalam sistem bernegara. Karena itu, ujar Ali, NU berpandangan, bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila ini tidak usah diutak-atik. Ali pun berkesimpulan, dari segi *platform*, tidak ada yang diametral atau bertentangan antara Partai Demokrat dan paham dari NU.

Di samping itu, Ali Masykur menilai, saat ini adalah masa transisi atau alih generasi di tubuh Partai Demokrat. Dia mengaku tergerak untuk ikut berpartisipasi menyukseskan agenda reformasi yang masih banyak distorsi di berbagai bidang. Terlebih, tuturnya, hanya Partai Demokrat saat ini satu-satunya partai yang berani melakukan konvensi untuk mencari calon presiden secara terbuka. Langsung melibatkan partisipasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Ali mengaku hanya berpikir positif terhadap konfigurasi dan kompetisi partai politik yang ada saat ini. Bagi Ali, semua parpol muaranya adalah untuk menjadi instrumen dalam membangun negeri, dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tentang posisinya sebagai anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa mengisyaratkan siap mundur. Hanya, jika dirinya telah dinyatakan menang konvensi dan ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Modalitas sebagai kepemimpinan yang dimiliki Ali Masykur Musa dalam kapasitas pribadi sudah sangat mumpuni. Doktor Manajemen Pendidikan dari UNJ ini sudah sejak lama setelah lulus dari alamaternya, Universitas Jember, adalah seorang pendidik. Kapasitas intelektualitasnya tidak diragukan untuk maju sebagai pemimpin nasional Indonesia.

Dari sisi modalitas material sumber daya, Ali Masykur memiliki pengikut setia di kalangan Islam politik NU yang sudah dibinanya sejak menjadi pengurus, hingga menjadi ketua di PP PMII. Pembilahan Islam politik yang dimiliki Ali merupakan modalitas besar mengingat masyarakat Indonesia masih kuat semangat sosial-keagamaanya dalam melihat calon pemimpin. Oleh sebab itu, Ali Masykur Musa memiliki kekuatan basis sosial-budaya yang kuat dan bernilai positif untuk mendukungnya.

Jaringan Ali Masykur Musa di tataran nasional lewat PKB dan anggota BPK sangat erat kaitanya untuk pencalonan dirinya sebagai salah satu kandidat calon presiden. Terlebih lagi hingga 2016, Ali Masykur Musa dipercaya dunia internasional dalam mengaudit keuangan di bidang lingkungan hidup se-dunia. Isu lingkungan hidup adalah isu strategis di era pasca-modern seperti saat ini, dan Ali Masykur lewat posisi strategisnya memiliki jejaring yang kuat di seputar isu ini.

Ali Masykur Musa cukup memiliki peluang untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014 mendatang. *Pertama*, ia saat ini menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat. Dengan posisi seperti itu, peluang bagi Ali Masykur Musa untuk bisa merebut kursi R-1 di republik ini cukup ada, apalagi jika dalam konvensi tersebut ia terpilih.

Kedua, Ali Masykur Musa memiliki seabrek pengalaman di organisasi dan di pemerintahan. Ia pernah menjabat Ketua Umum PB PMII, pernah menjadi anggota DPR, dan pernah pula menjadi Ketua Umum PKB (versi Gus Dur). Apalagi saat ini, selain menjadi anggota BPK, ia juga Ketua Umum ISNU, sebuah organisasi intelektual yang memiliki basis nasional.

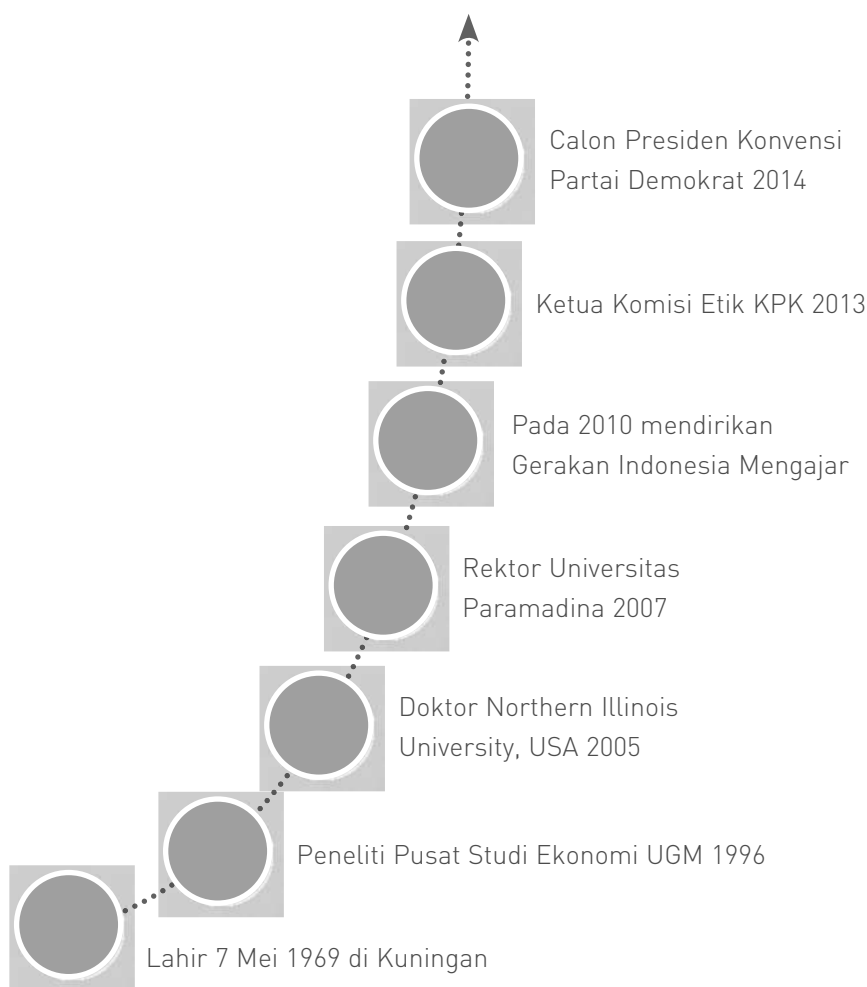
Ketiga, di kalangan Nahdliyin, Ali termasuk tokoh muda cerdas dan berpikiran progresif. Hal itu terlihat dari sepak terjang organisasinya yang begitu cerdas dan karya-karyanya yang segar. Ditambah lagi, ia juga tokoh yang lahir dari keluarga Nahdliyin yang kental. Tentu pada titik ini, dengan

ketokohan yang dimiliki, Ali memiliki ceruk massa yang cukup kuat di kalangan masyarakat Nahdhiyin.

Meski demikian, tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Ali Masykur Musa ialah tentang elektabilitasnya yang masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari berbagai survei nasional. Pun survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu, di mana elektabilitasnya masih moderat dibandingkan peserta konvensi capres Partai Demokrat lainnya.

ANIES BASWEDAN

Pemimpin Potensial





ma6ma.wordpress.com

Anies Baswedan merupakan salah satu obor bagi republik dalam melewati berbagai kompleksitas permasalahan bangsa. Kontribusinya terbentang dari pendidikan hingga antikorupsi. Namun, awal mula kiprahnya ini dirintis melalui Paramadina dan Gerakan Indonesia Mengajar. Ia percaya bahwa terdidiknya generasi menjadi kunci kemajuan bangsa. Karena kekayaan bangsa ini, bukan terletak dari sumber daya alamnya, namun, sumber daya manusia, apalagi mengingat jumlah penduduk negeri ini di peringkat empat dunia.

Anies memiliki nama lengkap Anies Rasyid Baswedan. Ayahnya, Rais Baswedan seorang intelektual dan pernah menjadi rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Ibunya Aliyah, juga seorang pengajar tulen bahkan seorang guru besar (profesor) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Darah kedua orang tuanya yang seorang intelektual-pejuang mengalir deras di tubuh Anies, sehingga tak heran langkah dan motivasinya besar untuk mengarahkan—meminjam bahasanya—melunasi janji kemerdekaan, paling tidak di ranah pendidikan.

Meskipun lahir di Kuningan, Jawa Barat, bertepatan dengan 7 Mei 1969, namun masa kecil Anies lebih banyak dihabiskan di Kota Pelajar Yogyakarta. Keadaan yang mengharuskan hijrah ke Kota Gudeg. Ia dan keluarga pun menumpang di rumah kontrakan kakeknya, Abdul Rahman Baswedan (AR Baswedan) yang merupakan salah satu pejuang Republik.

Rumah kontrakan sederhana tersebut tepat berada di belakang Malioboro, sebuah kawasan penting di Yogyakarta.

Rumah kontrakan yang ditempati keluarga Anies bukanlah rumah kontrakan biasa. Rumah itu lekat dengan nuansa heorisme dan perjuangan karena dulunya pernah ditempati oleh perintis kemerdekaan, sebut saja M Natsir, M Roem, dan Kasman Singodimedjo. AR Baswedan sendiri merupakan salah satu pejuang pra sekaligus pascakemerdekaan.

Bagi kalangan peminat sejarah, nama AR Baswedan tentu tidak asing lagi jika dikaitkan dengan peristiwa 4 Oktober 1934, di mana 6 tahun setelah para pemuda menggagas Sumpah Pemuda, AR Baswedan yang kebetulan keturunan Arab menggagas Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Di momen bersejarah itulah, terjadi pergeseran orientasi dari yang tadinya berkiblat ke Mesir, Irak, Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya menjadi berorientasi Indonesai semata.

Pergeseran orientasi tersebut tentu sangatlah penting karena sebagai pengukuhan bahwa meskipun mereka keturunan Arab tidak serta-merta membelah aspek kebangsaan di dalam jiwanya, tapi Indonesia tetap menjadi pusat orientasinya. Bukan hanya itu, AR Baswedan juga menginisiasi terbentuknya Persatuan Arab Indonesia (PAI) bersama sejumlah tokoh keturunan Arab lainnya seperti Nuh Alkaf, Salim Maskati, Segaf Assegaf, dan Abdurrahman Argubni (*Husnil*, 2014).

Ketika bangsa ini sudah mengecap alam kemerdekaannya, AR Baswedan kemudian didaulat menjadi Menteri Muda Penerangan oleh Presiden Soekarno. Pengangkatan tersebut tentu menjadi bukti penghormatan pemerintah Indonesia terhadap daya juangnya dalam membantu republik menuju kemerdekaan. Tak hanya itu, tenaga dan pikirannya juga dipakai dalam rangka melobi Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kepiawainnya dalam berdiplomasi membuat kemerdekaan Indonesia diakui oleh Mesir.

Pengakuan tersebut sangatlah penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Bukan sebatas klaim kemerdekaan yang tak diakui bangsa lain. Pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk legitimasi terhadap hakikat kemerdekaan bangsa kita. Mesir pun menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia.

Masa Kecil dan Pendidikan

Ketokohan dan karakter kepemimpinan Anies sudah terlihat sejak belia. Ia seolah diarahkan untuk selalu menjadi penebar cahaya di dalam keluarga dan lingkungannya. Dalam usianya yang memasuki 12 tahun, kepemimpinan Anies cilik sudah kentara tatkala membentuk sebuah klub yang diberi nama Kelabang (Klub Anak Berkembang). Klub tersebut untuk mewadahi anak-anak dari usia 7-15 tahun yang ingin belajar dan bermain bersama-sama. Berbagai kegiatan di dalam klubnya itu diadakan seperti olahraga dan kesenian sehingga setiap anak dapat mengetahui bakatnya masing-masing ke arah mana.

Tanda-tanda kalau dirinya kelak akan menjadi orang besar sudah terlihat dengan aktivitas baca dan kebiasaannya untuk bersua dengan kalangan pembesar-pejuang di daerahnya. Sejak kecil Anies menggemari membaca buku-buku biografi tokoh hebat Indonesia maupun dunia sehingga di dalam darahnya tertanam spirit kepahlawanan dan perjuangan. Begitu juga sudah menjadi kebiasaannya mendatangi prosesi pemakaman tokoh-tokoh pejuang seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Siti Hinggil. Kala itu ia melayat pemakaman kedua tokoh perjuangan itu bersama adiknya, Ridwan.

Pendidikan Anies dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas (pra-perguruan tinggi) bahkan sampai kuliah dilakukan di Yogyakarta. Kota ini rupanya sangat membekas di batin Anies sehingga tak ada niat satu jengkal pun meninggalkannya. Anies mengenyek pendidikan dasar di Sekolah Dasar Laboratori Yogyakarta, yang merupakan sekolah terbaik dan bersejarah. Keterampilan berbicara di depan umum sudah Anies lakukan sejak kelas V SD. Ketika itu, ia disuruh bicara di depan teman-teman dan gurunya pada momen Idul Adha.

Setelah lulus SD dengan nilai memuaskan, Anies melanjutkan ke SMPN 5 Yogyakarta yang juga merupakan sekolah unggulan dan favorit di Yogyakarta. Dalam usianya yang mangkat remaja jiwa kepemimpinan dan solidaritasnya terus diasah. Anies pernah menjadi koordinator pengabdian masyarakat. Dengan posisinya tersebut mengharuskannya banyak bicara di depan kelas untuk menghimpun dana bantuan dari teman-temannya. Dan prestasi akademik maupun non-akademiknya kian menonjol ketika ia sekolah di SMA N 2 Yogyakarta.

Belum setahun ia duduk di bangku SMA, Anies sudah didaulat menjadi Wakil Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)—padahal kebanyakan di sekolah-sekolah manapun jabatan wakil ketua atau bahkan ketua OSIS diemban oleh siswa yang sudah kelas 2. Jabatan prestisius itu menjadi jalan untuk semakin mengembangkan kepemimpinan di dalam jiwanya. Karena jabatannya itu pula membawa Anies mewakili sekolahnya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat nasional di Jakarta pada tahun 1985.

Pelatihan tersebut menghadirkan sekitar 300-an siswa terpilih dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Pada saat itu, bakat kepemimpinan Anies terlihat menonjol di antara seluruh delegasi yang hadir. Kondisi tersebut kemudian membawa Anies pada posisi sebagai ketua OSIS seluruh Indonesia dalam usianya yang terbilang paling muda di antara peserta yang lainnya.

Kecemerlangannya terus berlanjut ketika Anies duduk di kelas 2 SMA. Kala itu, ia terpilih sebagai salah satu peserta program pertukaran pelajar siswa-siswa Indonesia dan Amerika. Pengalaman internasionalnya pun dimulai. Keterpilihannya dalam program tersebut mengharuskan Anies berangkat ke Amerika Serikat dan selama satu tahun harus “mondok” di sana. Karena itulah, cakrawala globalnya semakin terasah. Wawasan internasionalnya yang sudah didapat dalam usianya yang relatif muda menjadikan kualitas intelektual dan kepemimpinannya semakin teruji.

Sepulangnya dari Negeri Paman Sam, Anies memiliki tugas baru. Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang berkantor di bilangan Senayan, Jakarta, memilihnya sebagai pewawancara sejumlah tokoh nasional. Tajuk acaranya *Tanah Merdeka*. Tugas Anies ialah melakukan wawancara terhadap perjalanan hidup sejumlah tokoh nasional di masa Orde Baru. Tentu saja pengalaman tersebut telah menjadikannya anak muda yang jauh berbeda dibandingkan anak muda bangsa lainnya ketika itu. Cara berpikir dan petualangan hidupnya telah menempatkannya pada satu tempat tertinggi yang tak semua orang dapat meraihnya.

Selepas lulus SMA dengan segala kecemerlangannya, Anies kemudian melanjutkan ke Universitas Gajah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan ekonomi. Di kampus perjuangan, intelektualitas dan karakter kepemimpinan Anies semakin terasah. Ia termasuk mahasiswa berprestasi yang mampu memadukan keberhasilan di dalam dan di luar kampus.

Ketika kuliah itu, ia pun aktif di Senat Mahasiswa yang merupakan cikal bakal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Ketika itu, organisasi kemahasiswaan Senat Mahasiswa baru saja di-bolehkan kembali setelah dibekukan oleh rezim Orde Baru karena dianggap membahayakan kekuasaan. Suara-suara kritis mahasiswa yang tergabung dalam Senat Mahasiswa dianggap sebagai upaya subversif yang lambat laun akan memporak-porandakan bangunan rezim. Beruntung ketika Anies masuk, Senat Mahasiswa kembali dibolehkan oleh rezim. Dan Anies pun, seakan tak mau melewatkan kesempatan tersebut. Ia langsung menjadi ketua senat pertamanya pasca dibekukan. Ketua Senat UGM dijalani Anies pada tahun 1992.

Karena memiliki banyak prestasi, Anies pernah mendapatkan beasiswa dari Jepang. Beasiswa bertajuk *Japan Airlines Foundation* tersebut didapatkan setelah mengikuti lomba menulis ilmiah tentang lingkungan (www.aniesbaswedan.com, 2014). Rupanya selain dikenal sebagai aktivis-organisatoris, Anies juga disebut sebagai aktivis-intelektual. Hal yang sulit mendapatkan tandingannya dari mahasiswa lain.

Mendapatkan beasiswa tersebut bukanlah hal mudah karena tulisan ilmiahnya harus bersaing dengan banyak mahasiswa lain. Beruntung Anies selalu *mengkliping* artikel, koran khusus menyoal lingkungan sehingga karya tulisnya sangat kuat referensi. Mungkin hal itu yang menjadi penilaian plus sehingga tulisannya menang. Anies pun berangkat ke Jepang untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University pada tahun 1993.

Sepulangnya dari Negeri Sakura aktivitasnya dilanjutkan di UGM sampai akhirnya lulus pada tahun 1995. Dalam usianya yang sudah matang, Anies mantap untuk menikahi kekasih hatinya Fery Farhati Ganis yang kelak akan memberikannya empat orang anak. Tanggungjawabnya tidak hanya kepada diri dan keluarganya saja, namun juga kepada permaisuri di dalam rumah tangga dan segenap keluarganya.

Tepat satu tahun pascapernikahannya, keinginan untuk terus menuntut ilmu membawanya ke pengembaraan berikutnya. Tahun 1997 ia mendapatkan beasiswa studi master di bidang *International Security and Economic Policy* di Maryland University, College Park, Amerika Serikat. Fakta bahwa dia harus bersaing dengan intelektual-intelektual dari negara-negara maju membuatnya tak pernah merasa gentar. Semangatnya semakin menggebu

untuk menggenggam pengetahuan. Tak heran, dengan semangat dan kerja kerasnya pelbagai penghargaan pun berhasil diperolehnya.

Di tahun 1998, saat statusnya masih sebagai mahasiswa master, dia mendapatkan penghargaan William P Cole III Fellow dari *School of Public Policy*, Maryland University. Tak sampai di situ, penghargaan lainnya juga diterimanya yakni ASEAN Student Award yang merupakan program dari USAID–USIA–NAFSA. Pencapaian tersebut mengukuhkannya sebagai intelektual muda cerdas dan begitu mentereng.

Setelah lulus program masternya, kiprah manis intelektualnya terus melaju tanpa bisa ditahan. Di tahun 1999, saat di dalam negerinya sendiri tengah terjadi pergeseran politik nasional dari Orde Baru yang totaliter menjadi Orde Reformasi yang menghembuskan angin kebebasan, Anies meraih beasiswa untuk menggondol gelar doktoralnya. Disertasinya ber-kutat pada persoalan otonomi daerah dan pola demokrasi di Indonesia yang baru seumur jagung.

Buah pikirnya soal otonomi daerah dan demokrasi Islam khususnya, tak hanya tertuang dalam lembar-lembar disertasi saja, melainkan juga dalam artikel-artikel di media massa atau jurnal. Aktivitasnya pun semakin padat karena undangan seminar dan menjadi pembicara seolah tak pernah berhenti. Ia pun menjadi pembicara nasional maupun internasional yang berkaitan dengan ilmu yang ditekuninya, demokrasi dan desentralisasi. Kondisi tersebut tentu saja semakin mengibarkan namanya ke jagat intelektual Tanah Air dan dunia.

Beberapa tulisannya di jurnal misalnya “*Political Islam: Present and Future Trajectory*” dimuat di *Asian Survey* yang diterbitkan oleh California University. Dan juga sebuah jurnal bertajuk “*Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections, and The Future of Democracy*” diterbitkan oleh BIEW, Australian National University (ANU). Dengan jurnal-jurnal dan artikelnya yang diterbitkan kampus-kampus ternama dan media massa terkemuka, maka menjadikan ilmunya sebagai sumbangsih berharga bagi perkembangan demokratisasi di Tanah Air yang kala itu baru saja menggeliat.

Di tahun 2004 Anies juga menerima penghargaan Gerald S. Maryanov Fellow yang diberikan oleh Northern Illinois University. Penghargaan tersebut diberikan kepada setiap mahasiswa Northern Illinois University yang memiliki prestasi dan integritas dalam mengembangkan ilmu politik.

Mengabdikan untuk Ibu Pertiwi

Setelah lulus doktor dari universitas bergengsi Amerika Serikat, Anies tak ingin berlama-lama di negeri orang, walaupun, ia sempat berkarir sebagai Manajer Riset di IPC Chicago. Anies segera terbang ke Tanah Air untuk melakukan berbagai pengabdian dalam rangka membangun bangsa. Tahun 2005, Anies bergabung dengan The Indonesian Institute (TII) yang merupakan lembaga kebijakan publik yang didirikan oleh sejumlah aktivis dan intelektual pada 2004. Di TII ia menjabat sebagai Direktur Riset. Setahun kemudian, untuk mengimplementasikan ilmunya, ia bersedia mengemban tugas sebagai Penasihat Nasional Partnership for Governance Reform.

Dan momen yang barangkali paling berkesan dalam hidupnya ialah ketika diangkat menjadi Rektor Universitas Paramadina Jakarta menggantikan cendekiawan muslim kesehlor: (alm) Nurcholis Madjid (Cak Nur). Anies patut berbangga karena ketika pelantikan tersebut usianya masih tergolong muda, 38 tahun. Hal tersebut menjadikannya sebagai rektor termuda di Indonesia. Sebuah pencapaian hidup yang sangat menginspirasi. Terlebih, berkarier di dunia pendidikan sesuai dengan latar belakang hidupnya, dimana ia dilahirkan dari orang tua yang berprofesi sebagai pendidik.

Universitas Paramadina merupakan lahan pengabdian Anies untuk memberikan perhatian berlebih, khususnya pada sektor pendidikan. Anies sadar kalau banyak anak-anak pandai yang patut diberikan kesempatan



untuk belajar dan berkembang namun harus menerima kenyataan pahit karena ketiadaan biaya. Ia lantas merintis Paramadina Fellowship yang merupakan beasiswa untuk orang-orang terbaik dan terpilih guna mengikuti pendidikan di Paramadina dengan tanggungan biaya dibebankan kepada pihak sponsor.

Para mahasiswa yang menerima beasiswa Paramadina Fellowship akan mendapatkan biaya kuliah, buku sampai biaya hidup sehingga sangat membantu mereka. Dengan idenya tersebut, kini dari komposisi mahasiswa Paramadina yang berjumlah 2000 orang sekitar 25 persennya merupakan mahasiswa penerima beasiswa. Gebrakan tersebut tentu saja menjadi sumbangsihnya sangat berharga terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Terobosan lain yang dilakukan Anies adalah memberlakukan mata kuliah antikorupsi sebagai mata kuliah wajib di Paramadina. Hal ini dilakukan untuk merespon penyakit akut korupsi yang menjerat negeri ini, sekaligus menyelamatkan masa depan para generasi penerus. Keberpihakan dan fokusnya terhadap isu anti korupsi ini membuat dirinya dipercaya berturut-turut oleh KPK sebagai anggota TIM 8 KPK (2010) dan Ketua Komisi Etik KPK (2013).

Berbagai terobosan dan kontribusinya ini membuatnya pada tahun 2008 didaulat sebagai 100 Intelktual Dunia (*Top 100 Public Intellectuals*) oleh Majalah *Foreign Policy*. Yang lebih membanggakan lagi, nama Anies merupakan satu-satunya figur dari Indonesia bahkan Asia Tenggara yang mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. Dan di tahun 2010, Majalah Foresight Jepang memilihnya sebagai 20 Orang Penting dalam 20 Tahun Mendatang bersama dengan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representative AS, Paul Ryan (www.antaraneews.com, 2010)

Yayasan Indonesia Mengajar, Mendidik Kewajiban Orang Terdidik

Masih ingat dengan sebuah ungkapan: daripada mengutuk gelap lebih baik menyalakan lilin? Itu pulalah yang melatarbelakangi pendirian Yayasan Indonesia Mengajar (YIM). Sebuah yayasan yang memiliki konsentrasi ting-

gi untuk mengirimkan para sarjana terbaik ke berbagai pelosok Tanah Air untuk mengajar di sekolah-sekolah terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa yang kekurangan guru. Anies menyadari sekaligus prihatin dengan kondisi pendidikan di negeri ini yang terlalu terpusat dan mengandalkan kota-kota besar sebagai episentrumnya. Padahal banyak anak-anak daerah yang memiliki kualifikasi dan potensi untuk berkembang jika mereka diberikan fasilitas dan pendidik terbaik.

Ide awal Indonesia Mengajar terinspirasi dari Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang diinisiasi oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri—Rektor UGM periode 1986-1990 (Basri, 2014). PTM merupakan program untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. Bedanya, gagasan Anies ihwal Indonesia Mengajar ini dikemas cukup menarik karena menawarkan dua hal sekaligus, pertama, mengisi kekosongan tenaga pengajar di SD dan memberi pengalaman baru bagi para mahasiswa terbaik selama setahun untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum mereka diterjunkan, para pengajar yang terpilih dididik dan diberi pelatihan kepengajaran secara khusus.

Ide ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Meski begitu, dalam perkembangannya, para relawan yang diperbantukan untuk mengimplementasikan gagasan Indonesia Mengajar melihat bahwa salah satu kekurangan yang menghambat pendidikan di daerah ialah buku-buku. Melihat kekurangan itu, mereka pun mencetuskan program Indonesia Menyala yang pertama kali diluncurkan pada 15 April 2011.

Program ini berhasil membangun perpustakaan-perpustakaan di beberapa pelosok tempat para relawan pengajar ditempatkan. Perpustakaan-perpustakaan tersebut sejatinya terbagi menjadi dua, yakni perpustakaan tetap dan berputar. Perpustakaan tetap hanya ada di sekolah-sekolah menjadi basis atau tempat mengajar para relawan. Sedangkan perpustakaan berputar berbentuk tas jinjing yang di dalamnya berisi buku. Tas tersebut biasanya dibawa oleh para relawan ke pedesaan-pedesaan untuk bisa dibaca oleh anak-anak yang kekurangan bahan bacaan berkualitas.

Selain Indonesia Mengajar dan Indonesia Menyala, Anies juga mengagas Kelas Inspirasi yang diharapkan akan memberikan inspirasi-inspirasi kehidupan bagi para siswanya. Dalam kelas tersebut, diundang para profesional sukses untuk turun tangan dalam berbagi dan bercerita ke-

pada anak-anak pelosok supaya mereka mendapatkan penerangan (baca: inspirasi) sehingga memiliki daya gelora dan semangat didalam mengejar cita-citanya. Kelas Inspirasi tersebut sangat besar manfaatnya untuk memberikan pencerahan bagi kedua belah pihak, baik siswa, sekolah maupun para trainer yang mengisi Kelas Inspirasi sehingga dapat saling bertaut di kemudian hari.

Melunasi Janji Kemerdekaan

Setelah berkiprah di lembaga riset, NGO, dunia pendidikan, bahkan mengurus koruptor, kiprah Anies ini diapresiasi oleh Presiden Yudhoyono sehingga diundang dalam pertarungan sebagai calon presiden. Ia merasa bahwa keinginan para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat dari segala hal seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya harus ditegakkan. Namun melihat kondisi kekinian di mana dita-cita *founding fathers* tak kunjung terwujud, ia merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam mengurus bangsa dalam konteks yang lebih luas.

Anies pun mencoba peruntungan di dunia politik dengan mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat yang kini sudah menjelang tahapan akhir. Ia beralasan bahwa harus semakin banyak orang-orang bersih dan kredibel masuk ke partai politik guna memperbaiki keadaan. Jangan biarkan partai-



partai hanya dikuasai politisi korup dan oportunis, hanya mementingkan diri dan golongannya serta abai terhadap rakyat. Semakin banyaknya orang-orang bersih yang masuk ke partai politik dan bahkan masuk ke zona pemerintahan maka rakyat akan semakin diurus dan diutamakan.

Ketika ada orang yang menanyakan, mengapa dirinya terkesan terburu-buru untuk menjadi capres di 2014—bukan 2019 di mana usianya akan semakin matang—dia menjelaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika tak ada orang baik dan berintegritas yang mau turun langsung untuk merubahnya (www.aniesbaswedan.com, 2014).

Anies merasa dirinya perlu ikut bertanggungjawab untuk mengurus perjalanan bangsa ini ke depannya supaya tidak kian kusut nan penuh sengkarut. Anies ingin menjadi bagian dari perubahan yang membebaskan bangsa ini dari keterpurukan pelbagai dimensi, apapun resikonya

Mengikuti konvensi partai memang tak ada jaminan baginya untuk menang. Sekalipun kalah, Anies tak akan pernah mempersoalkannya karena hal itu merupakan bagian dari risiko. Baginya yang terpenting ialah dengan mengikuti konvensi atas undangan pihak partai, merupakan sebuah pertanda yang ia intepretasikan sebagai panggilan untuk ikut membenahi bangsa ini. Kalah menang konvensi bukan masalah, karena yang paling prioritas ikut dalam tanggung jawab untuk memberikan sumbangsih bagi bangsa.

Konvensi dan Ide Baru Volunterisme Politik



Banyak kalangan yang menyayangkan keputusan Anies Baswedan mengikuti konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat. Di tengah badai politik yang sedang menimpa partai berlambang *mercy* ini, Anies kemudian masuk sebagai orang baru dan non-partisan untuk bergabung dalam kompetisi konvensi tersebut. Namun, Anies punya alasan kuat untuk menjalani ini, *“Saya terpanggil untuk turun tangan, tak hanya urun angan. Buat saya bukan soal 2014 atau 2019, ini soal pilih ikut tanggung jawab atau tidak. Jika saya tidak diundang maka saya tetap akan teruskan yang selama ini saya kerjakan yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi begitu saya terima undangan, maka saya nyatakan siap dan pilih berkemas untuk berjuang dalam pencalonan melalui konvensi. Saya pilih untuk ikut bertanggung-jawab atas perjalanan bangsa kita.”* (www.aniesbaswedan.com, 2014)

Anies merupakan seorang sosok muda yang demokratis, ia berkeyakinan bahwa proses kandidasi yang dilakukan secara demokratis adalah baik. Oleh karena itu, proses konvensi yang dilakukan Partai Demokrat adalah baik, dan Anies ingin turun tangan melunasi janji kemerdekaan dengan cara-cara yang demokratis. Anies Baswedan menyingkirkan stigma negatif Partai Demokrat yang banyak tersangkut kasus-kasus korupsi. Riset yang telah dilakukan Pol-Tracking Institute pada Januari 2014 memperlihatkan bahwa media, terutama televisi, lebih sering memberitakan kasus hukum (43%) dari anggota-anggota partai politik. Salah satu yang paling banyak adalah Partai Demokrat.

Terlepas dari semua itu, sosok optimistis Anies Baswedan, mempengaruhi keputusan politiknya untuk ikut dalam konvensi yang demokratis sebagai sebuah jawaban politik dari hati yang tulus, walaupun Anies Baswedan pada 3 Februari 2014 telah melayangkan surat kepada Komite Konvensi Partai Demokrat yang isinya memberikan masukan dalam proses konvensi yang ‘belum membumi’ dari rencana Partai Demokrat (www.republika.co.id, 2014). Anies menyayangkan hal tersebut, mengingat nilai-nilai dasar konvensi yang harus ‘membumi’ dan diketahui seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Rekam jejak kepemimpinan Anies Baswedan sebagai seorang aktivis mahasiswa yang berprestasi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi hingga mencapai gelar doktor dengan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional membuatnya mentereng dengan latar

belakang aktivisme dan intelektualismenya. Sekarang kita akan melihat apakah hal tersebut dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Dengan menggagas gerakan Indonesia Mengajar, maka Anies Baswedan telah menggoreskan catatan penting dalam dunia volunteerisme (semangat kesukarelawanan).

Bahkan tim sukses Anies Baswedan dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, yang tergabung dengan gerakan Relawan Turun Tangan, adalah bentuk konkrit organisasi volunteerisme dalam politik. Anies mengatakan bahwa tidak ada yang dibayar dalam kegiatan-kegiatan Relawan Turun Tangan. Semua dilakukan berdasarkan keinginan pribadi setiap relawan untuk membantu kegiatan kampanye Anies Baswedan. Gerakan Indonesia Mengajar juga memiliki garis paradigma yang sama dengan Relawan Turun Tangan.

Tentu biaya politik di era demokrasi prosedural seperti saat ini adalah tinggi. Pol-Tracking Institute pun memiliki analisa yang berkesimpulan bahwa perlu ada mekanisme “rem” dalam biaya politik yang tinggi dalam pemilu. Ketika paradigma politik berbiaya tinggi digantikan dengan budaya kesukarelawanan gerakan dari bawah (*bottom up movement*), maka hal tersebut merupakan salah satu kunci jawaban atas persoalan politik demokrasi kontemporer dalam konteks Indonesia.

Peluang dan Tantangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014

Anies Baswedan memiliki rekam jejak *kepemimpinan* (*track record*) yang baik. Dari segi kapasitas hal ini terkonfirmasi dengan hasil rilis survei opini publik pada tahun 2013 yang menempatkan dirinya pada peringkat kedua setelah Joko Widodo (Jokowi).

Secara spesifik, ada dua alasan mengapa Anies memiliki peluang besar untuk bisa maju sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2014 mendatang. *Pertama*, saat ini Anies dikenal sebagai tokoh intelektual dunia yang berpengaruh. Gagasan-gagasan Anies—khususnya ihwal pendidikan—sangat segar dan inspiratif untuk Indonesia. Hal itu juga terlihat dari hasil survei *opinion makers* dan pakar oleh Pol-Tracking Institute yang dirilis pada Oktober 2012 lalu. Riset tersebut menempatkan nama Anies Baswedan

berada di urutan pertama, sebagai tokoh muda yang berpotensi menjadi Presiden 2014 dengan persentase skor 80,5 persen.

Dalam survei tersebut, seorang figur dilihat dari 13 aspek. Jika menggunakan standar kecukupan 6,00, maka hampir semua aspek menonjol pada figur Anies. Bahkan aspek kapabilitas menduduki peringkat teratas dengan skor 80,5. Tingginya aspek kapabilitas itu bisa menjadi modal penting bagi Anies bahwa di mata para pakar, ia dianggap orang yang kompeten untuk mengurus bangsa ini.

Kedua, kehadiran Anies untuk ikut menjadi peserta Konvensi Capres Partai Demokrat menjadi peluang penting baginya. Karena Anies, merupakan satu-satunya yang bukan pejabat publik turut diundang oleh Presiden Yudhoyono untuk terlibat. Dalam ajang ini, Anies harus bersaing dengan 10 peserta konvensi lainnya seperti Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

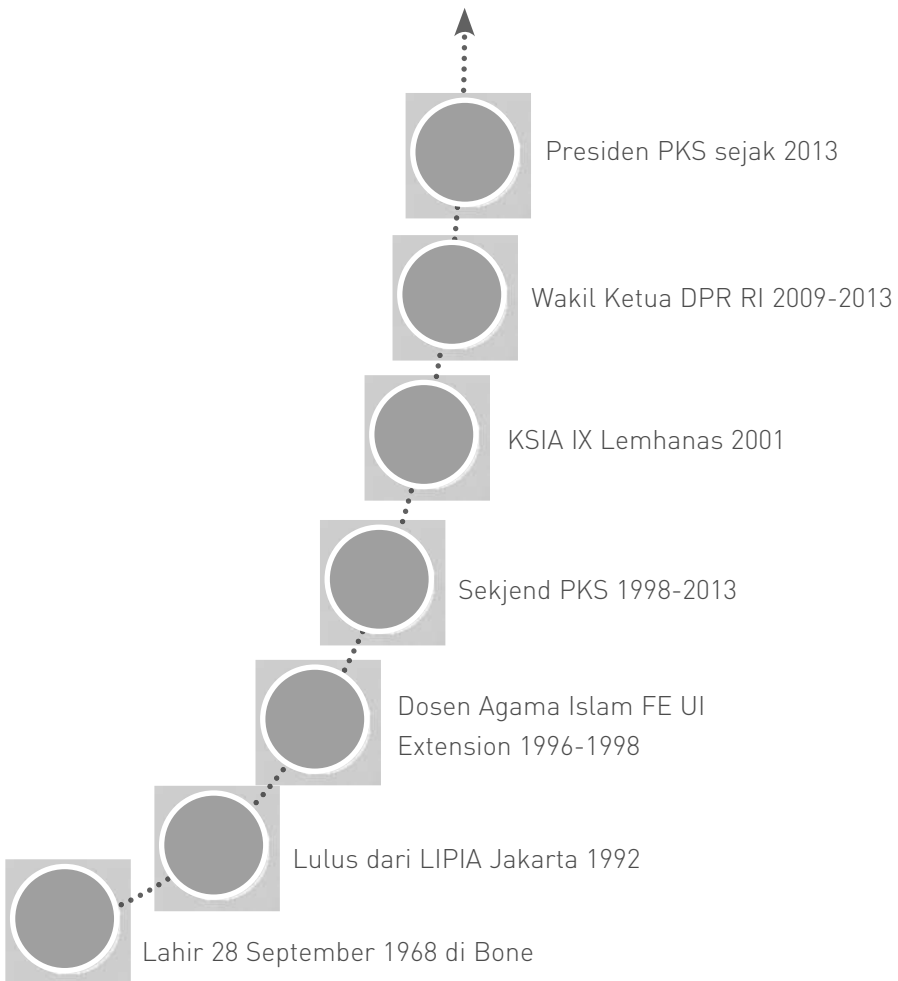
Di luar peluang di atas, Anies memiliki beberapa tantangan. *Pertama*, untuk maju dalam Pilpres 2014, Anies harus mendapatkan dukungan solid dari partai politik peserta pemilu utamanya Partai Demokrat. Jika gagal dalam konvensi, maka peluang untuk bisa menjadi Capres di Pilpres 2014 semakin mengecil.

Kedua, dalam beberapa survei yang dilakukan sejumlah lembaga riset, nama Anies belum muncul dalam daftar Capres mainstream (*top of mind*). Hal itu wajar, mengingat selama ini gerakan Anies masih banyak berkelindan dengan aktivitas pendidikan, bukan politik. Sehingga, tak heran namanya hanya beredar di kalangan kelas menengah-intelektual.

Ketiga, bila mempertimbangkan dua alasan pertama tadi, sudah seharusnya Anies merajut jalan baru agar dapat melanjutkan aksi turutan dengan cara dan ruang lingkup yang lebih luas dengan jalan terlibat dalam pemerintahan kedepan. Artinya, Anies harus mulai dan intens menjalin komunikasi politik dengan para elit.

ANIS MATTA

Pemimpin Potensial





pkjakartapusat.wordpress.com

Banyak yang menilai Anis Matta adalah benteng terakhir Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejak tersandung kasus impor sapi, PKS berusaha keras meluruskan citranya. Anis Matta adalah pilihan nyata bagi partai tersebut untuk menemukan momentum kebangkitan kembali dan berjuang meraih kepercayaan di 2014. Siapa Anis? Muhammad Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1968 silam. Usianya masih relatif muda ketimbang politisi dan pemimpin partai lainnya di Indonesia. Anis Matta adalah aktivis yang membangun karier politik dari bawah. Dia bukan anak pejabat atau pengusaha yang tiba-tiba diberi jatah jabatan.

Sejak kecil Anis dikenal sebagai pribadi cerdas. Saat masih tercatat sebagai siswa di sekolah menengah dan atas Darul Arqam pada 1980-an, dia dikenal sebagai kutu buku. Bahkan, liburan sekolah tidak diisi dengan kegiatan lain, kecuali membaca dari pagi hingga malam. Dia pun bercita-cita untuk memiliki sebuah perpustakaan besar.

Suami Anaway Irianty Mansyur ini menyukai buku-buku biografi, politik internasional, dan hubungan internasional. Mulai dari biografi tentang Soekarno, Hatta, Suharto, Baharudin Jusuf Habibie, hingga Taufik Kiemas dan beberapa tokoh besar lainnya. Menurutnya, membaca buku sejarah para pemimpin itu penting untuk menjaga kesinambungan sejarah. Baginya, dengan membaca buku seseorang akan dapat memiliki kedalaman dalam melihat suatu masalah. Lebih dari itu, Anis menyebutkan, jika politisi

tidak membaca buku, mereka akan memiliki akumulasi masalah dalam jangka panjang.

Anis meraih gelar S1 di bidang syariah Islam dari LIPIA pada 1992. Pada 2001 dia pun melanjutkan pendidikan di LEMHANNAS. Tahun 2000 ia berkesempatan mengikuti program American Young Council for Young Politician Leader (ACYPL) di Amerika.

Dari sinilah kegiatan berpolitiknya dimulai. Dia tidak hanya aktif di organisasi kampus namun juga organisasi di luar kampus. Pada 1998 dia sudah menjadi seorang sekretaris jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera selama empat periode berturut-turut hingga 2013. Dia juga menjabat sebagai majelis hikmah PP Muhammadiyah.

Meskipun sibuk berorganisasi, kecintaannya terhadap buku tak pudar. Dia bahkan terpacu menghasilkan karyanya sendiri. Ia punya dua buku monumental yang berjudul “Biar Kuncupnya Mekar Menjadi Bunga” yang diterbitkan Pustaka UMMI dan Risalah Pergerakan, terjemahan “Risalah Ta’lim-nya Hasan Al-Banna’.

Selain, itu ada beberapa buku lagi yang ikut menyumbang perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Di antaranya berjudul “*Membangun Karakter Muslim*” (2002) dan “*Model Manusia Muslim Abad 21*” (2002). Belakangan di tahun 2014, dia membuat buku tentang artikulasi gagasannya yang berjudul “*Gelombang Ketiga*”. Ia pernah beberapa kali menjadi penerjemah khusus jika Syaikh Yusuf Qardawi berkunjung ke Indonesia.

Dia memang dikenal sebagai penulis yang cukup produktif. Tulisannya bahkan menjadi referensi bagi sejumlah aktivis masjid dan dakwah kampus. Karya-karyanya pun tersebar di beberapa media Islam seperti Saksi, Tarbawi, Ummi, dan Suara Hidayatullah. Karya-karya yang tercecer di berbagai media Islam tersebut sebagian besar telah dikumpulkan menjadi sebuah buku.

Bahkan ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Anis Matta bercita-cita membangun perpustakaan terbesar di dunia. Dia menginginkan perpustakaan seperti yang dimiliki kongres Amerika Serikat. Dengan adanya perpustakaan, yang diimpikannya terbesar di dunia itu, maka anggota DPR tidak perlu lagi melakukan banyak studi banding ke luar negeri, sehingga negara bisa menghemat pengeluaran.

Demi menghadapi aktivitasnya yang padat, Anis selalu menjaga stamina dan kesehatannya. Caranya dengan selalu minum air putih minimal tiga liter sehari. Anis juga rutin berolahraga seperti gym, futsal, jogging, atau

renang. Tak hanya itu, dia pun mengontrol setiap makanan yang masuk ke tubuhnya.

Yang tak kalah penting resep menjaga kesehatannya adalah selalu gembira sepanjang hari. Menurutnya, kegembiraan hati bisa didapatkan dengan menjalani segala sesuatu dengan ikhlas. Di keluarga besarnya, Anis memang dikenal sebagai pribadi yang jujur dan berjiwa sosial.

Agama adalah Solusi

Terlahir dalam keluarga Islam yang taat membuat Anis memiliki pandangan yang kaya soal kondisi Islam dan pemikiran-pemikiran Islam. Berbicara dalam konteks Indonesia, Anis berpendapat bahwa gerakan-gerakan pemikiran Islam yang dibangun sebagai kekuatan pro-sekuler di dalam basis-basis pertahanan budaya Islam tidak pernah sanggup membawa konsep-konsep pemikiran yang orisinal.

Menurut Anis, negara lebih banyak membutuhkan peran agama, bukan sebaliknya. Agama bisa berjalan sendiri, tanpa kehadiran negara. Namun sebaliknya peran negara tidak akan maksimal tanpa ada agama. Ini terbukti dengan eksistensi ajaran agama lebih abadi dibanding dengan eksistensi negara. Aturan hukum di agama lebih banyak dibandingkan dengan aturan hukum yang ada dalam negara.

Tidak satu pun pihak yang bisa menghalangi pertumbuhan agama. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membungkam pertumbuhan agama. "Kita perlu kembali bekerja keras untuk menghadirkan agama untuk mendapatkan solusi atas persoalan bangsa ini," ujarnya di hadapan kader PKS di Kalimantan Selatan seperti dikutip Media PKS Piyungan. Solusi Islam tidak hanya dibutuhkan oleh negara ini, tapi juga oleh masyarakat dunia.

Indonesia rumit namun harmonis. Indonesia memiliki 300 etnis namun tetap harmonis karena faktor pengikatnya adalah Islam. Islam mendahulukan kemanusiaan ketimbang kesukuan. Dengan sifat-sifat dasar Islam yang dimiliki Indonesia akan menjadi negara besar di dunia. Dia menambahkan transisi demokrasi di Indonesia berjalan lancar karena nilai-nilai dasar Islam itu. Bahkan negara-negara Arab saja gagal menjalankan demokrasi. Kita lihat Mesir, baru dua tahun berdemokrasi, kini kembali ke tirani.

Yang juga menarik dari Anis adalah pandangannya tentang doa. Bagi Anis, doa bukanlah wujud ketidakberdayaan, tapi sesuatu yang bisa membuat ketidakberdayaan menjadi kekuatan. Ia meyakini bahwa doa adalah perisai atas musibah. Doa bisa mencegah musibah jika doa lebih kuat dari musibah. Tetapi jika musibah lebih kuat dari doa, maka musibah akan menimpa.

Dan jika kekuatan doa dan musibah seimbang, maka keduanya akan bertarung. Dalam salah satu bukunya Anis menulis, *“ketika engkau terimbit dan terlilit oleh problema kehidupan, sesungguhnya yang dapat membuatmu bertahan adalah harapanmu. Sebaliknya, yang akan membuatmu kalah adalah saat di mana engkau kehilangan harapan.”*

Sikapnya yang religius ditunjukkannya dengan membangun sebuah rumah masjid yang dibangun dengan menggunakan swadaya sendiri di kampung halamannya. Hal ini dilakukannya sebagai upaya untuk memperbaiki moral umat.

Bukan Politikus Karbitan

Nama Anis Matta semakin terkenal di dunia politik Tanah Air sejak dia bergabung dan menjadi deklarator Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998. Sejak itulah, saat pertama kali Presiden PK dipimpin oleh Nur Mahmudi Ismail, Anis telah menjabat sebagai sekretaris jenderal. Anis kembali terpilih saat partai berubah nama menjadi PKS dipimpin oleh Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring hingga terakhir saat Luthfi Hasan Ishaq menjabat sebagai pucuk pimpinan.

Ia merupakan Sekjen Partai yang berturut-turut menduduki jabatan tersebut. Kiprahnya sebagai Sekjen cukup krusial dan mampu menjadi motor penggerak bagi mesin partai. Sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan, bahwa kenaikan suara PKS secara signifikan merupakan berkat kontribusi yang besar dari dirinya.

Karir politiknya terus meningkat, tak hanya menjabat di partai, Anis juga menjadi Wakil Ketua DPR periode 2009-2014. Selain berpolitik, Anis juga menjadi pengusaha. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Menara Inti Tijara, Direktur Pusat Studi Islam Almanar, dan Komisaris PT Indo Media Green Pages.



www.facebook.com/AnisMatta/photos_stream

Ketika Luthfi Hasan Ishaq tersandung kasus suap impor daging sapi, Anis akhirnya dipilih menjadi Presiden PKS pada 1 Februari 2013. Dia terpilih atas hasil rapat maraton Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat di Lembang Jawa Barat. Setelah terpilih dia pun bertekad untuk melakukan konsolidasi partai. Anis yakin PKS bakal menghadapi pemilu 2014 dengan kerja keras dan meraih hasil optimal.

Untuk itu, Anis mencoba untuk mengubah pola pikir politik para kadernya melalui kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Hal ini diperlukan untuk memulihkan citra PKS untuk mengimbangi wajah politik yang kian keras dan berbahaya. Ia menyatakan, saat ini banyak konflik dan intrik dalam dunia politik, apalagi ketika semakin gencarnya strategi pembunuhan karakter dilakukan.

Dia mengimbau para kader PKS untuk menghindari praktik-praktik seperti itu, karena PKS perlu memberikan sentuhan yang lebih manusiawi

tentang politik agar masyarakat tidak menakutinya. Dengan langkah tersebut, Anis berhasil meloloskan partainya dari masa-masa kritis. Konsolidasi di daerah dan memenangkan sejumlah pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan daerah lainnya, adalah buktinya.

Walaupun pada awalnya banyak pengamat politik yang meragukan dan memperkirakan beberapa pernyataan Anis akan kontra produktif terhadap PKS. Misalnya, saat ia menyebut bahwa peristiwa yang menimpa Luthfi adalah konspirasi dan hasil skenario pihak tertentu untuk melemahkan PKS. Kenyataannya, Anis bisa meredakan gejolak di daerah dan membuat kader-kader PKS tetap solid.

Tidak mudah berada pada situasi yang dialami Anis saat itu. Dan apa yang disampaikannya saat itu, tentang isu konspirasi, merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Komunikasi politik yang dilakukan Anis ketika itu secara mengejutkan cukup efektif dalam membangkitkan semangat dan loyalitas kader PKS di daerah.

Anis memang terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang unik di tubuh PKS. Dia pun selalu melakukan sejumlah kegiatan yang menarik untuk membangun loyalitas dalam tubuh partainya. Anis misalnya pernah menggelar rapat penting soal strategi Pemilu 2014 di dalam gerbong KA Eksekutif Argo Sindoro jurusan Jakarta-Semarang. "Dalam Islam, doa musafir itu makbul," ujarnya seperti dikutip Detik.com (17/4/2013).

Anis juga pernah mengajak 70 orang pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat PKS untuk mengikuti kegiatan alam (*outbond*) di Bali. Kegiatan itu dilakukan untuk membangun kekompakan tim. Sebelum melakukan *outbond* di Bali, pengurus inti PKS lebih dulu mengikuti *roadshow* di 5 kota, yakni Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar untuk menyapa para kader PKS di daerah.

Hal ini dianggap penting agar seluruh unsur ketua di struktur DPP PKS melihat langsung realitas di lapangan. Di sela-sela konsolidasi kader dan temu tokoh di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Anis pun tidak segan ikut lomba makan durian melawan belasan jurnalis cetak dan televisi. Dia pun kalah telak.

Menurutnya, prahara yang membelit partainya selama ini dianggap ujian terbesar dan atas kerja keras yang dilakukan ternyata tak banyak

berpengaruh terhadap elektabilitas partai politik ini. Padahal sebelumnya, kalangan pengamat dan lembaga survei telah memprediksi aib politik tersebut bakal mempengaruhi kredibilitas dan elektabilitas PKS. Namun, ternyata tidak demikian.

Anis mengatakan, PKS telah mematok target untuk bisa menembus angka tiga besar secara nasional pada Pemilu 2014. Target ini bukan perkara mudah. Makanya, kader PKS harus bekerja militan untuk mendongkrak perolehan suara pada momentum pemilu tersebut.

Gelombang Ketiga: Konsep Kepemimpinan Anis

Dalam berbagai kesempatan, Anis menyampaikan gagasan gelombang ketiganya. Anis Matta melihat bahwa Indonesia mempunyai tiga gelombang waktu. Gelombang ketiga adalah gagasan Anis Matta tentang masyarakat Indonesia masa depan. Menurutnya, masyarakat gelombang ketiga memiliki lima ciri, yaitu berusia muda, berpendidikan bagus, berpenghasilan bagus, terkoneksi dengan baik, dan merupakan warga negara



www.facebook.com/AnisMatta/photos_stream

asli demokrasi. Oleh karena itu, ada dua faktor yang akan mempengaruhi masyarakat Indonesia ke depannya. “Ada dua faktor penting di masa depan. Pertama adalah faktor demografi, dan kedua adalah faktor budaya,” terang Anis.

Gelombang pertama adalah masa sebelum kemerdekaan hingga proklamasi, atau disebut sebagai proses ‘menjadi Indonesia’. Orang-orang di gelombang pertama, mulai timbul kesadaran untuk bersatu guna menghadapi tantangan dari luar.

Kemudian, pada gelombang kedua, masyarakat berpikir untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. “Pada gelombang kedua, kita menyaksikan beberapa peralihan kekuasaan di Indonesia. Orde Lama datang dengan fokusnya di bidang politik. Lalu Orde Baru menggantikan Orde Lama, fokus bangsa ini bergeser dari politik ke ekonomi. Selanjutnya masa reformasi menggantikan Orde Baru. Di masa reformasi, titik tekannya ada pada masyarakat. Gelombang kedua ini kita sebut sebagai proses ‘menjadi negara-bangsa modern,’” ungkap Anis.

Sedangkan saat ini, menurut Anis, masyarakat Indonesia bersiap memasuki gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini dicirikan dengan munculnya masyarakat Indonesia dengan lima ciri, yaitu populasi masyarakat didominasi orang muda – terutama yang berumur 45 tahun ke bawah, berpendidikan bagus, berpenghasilan bagus, terkoneksi dengan baik, dan warga negara asli demokrasi (*native democracy*).

Anis menganalogikan bahwa 60% penduduk yang dibawah 45 tahun sebagai *native* demokrasi harus dikembangkan potensinya, seperti halnya *smart phone* yang mempunyai banyak aplikasi. Menurutnya, kalau orang tua usia 50 tahun membeli *smart phone*, paling yang digunakan hanya beberapa fitur. Tapi coba lihat anak muda yang dibelikan handphone China murah, mereka bisa mengotak-atik. Anak muda kita pandang sebagai orang yang paham demokrasi, sedangkan orang tua seperti itu kita analogikan sebagai imigran demokrasi. Menurut Anis, itu adalah permasalahan pemimpin Indonesia (anismatta.net).

Anis sangat yakin, sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang-orang muda. Sudah saatnya negara ini mengandalkan pemikiran-pemikiran segar dan di luar kebiasaan, selain cerdas, berbudaya, dan gigih. Baginya ini adalah satu cara yang efektif untuk membuat Indonesia bangkit semakin

tinggi. Namun tetap merendahkan menghargai sejarah kebangsaan yang panjang.

Menurutnya, saat ini Indonesia akan memasuki era sejarah baru yang disebut sebagai era gelombang ketiga. Jelang memasuki masa tersebut, bermunculan pemimpin baru yakni kelompok mayoritas baru berumur 45 tahun ke bawah. Jumlahnya lebih dari 60 persen. Selain itu, juga ada kelompok mayoritas yang telah berusia di atas 51 tahun dan lain sebagainya.

Anis berpendapat, tidak sulit untuk memimpin Indonesia, asalkan orang yang memimpin tahu bagaimana mengurus kesepakatan. Menurut Anis, pada dasarnya orang Indonesia mudah untuk sepakat. Selain itu, bangsa Indonesia mempunyai kepercayaan diri untuk menjadi bangsa besar.

Anis juga mengatakan, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itulah yang disebut pahlawan. Pemilu 2014 yang akan datang merupakan babak baru dan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin baru yang mampu menciptakan Indonesia jaya.

Integrasi Kekuatan Politik: Menegakkan Benang Basah

Anis juga dikenal dengan terobosannya yang 'unik' dalam mengambil langkah dalam rangka memperbaiki citra PKS. Dalam perseptif Anis, PKS saat itu ibarat rumah yang hampir roboh sehingga perlu menyatukan puing-puing yang retak. Menurut Anis, perlu ditinggalkan perilaku politik yang saling menjatuhkan karena akan menimbulkan kondisi politik yang tidak sehat. Oleh karena itu, Anis mengharapkan para kader untuk tetap solid dan tetap fokus pada tujuan perjuangan PKS.

Kelihaian Anis dalam manajemen konflik dan orasi politik ternyata membuahkan hasil. Apalagi basis internal PKS yang terikat pada ideologi membuat PKS tetap solid secara internal. Justru tantangan berasal dari luar (*public opinion*). Menghadapi hal tersebut, Anis mengedepankan citra PKS sebagai partai yang lebih humanis dan nasionalis daripada membawa isu-isu keislaman yang sempit.

Beberapa langkah Anis Matta tersebut diimplementasikannya dengan melakukan safari politik ke berbagai tempat, seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, dan bertemu Pengurus Muhammadiyah, Sumut. Tidak

hanya itu, beberapa kegiatan juga dilakukan untuk mencitrakan bahwa PKS juga toleran, seperti melakukan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga, dan Gus Dur. Anis juga mengadakan peringatan jasa pahlawan sebagai bentuk nasionalisme PKS pada bangsa.

Berbagai langkah tersebut, tentu saja berpengaruh pada elektabilitas PKS yang sebelumnya telah ternoda. Dengan menguatkan konsolidasi internal dan mengembalikan citra eksternal, Anis mampu menahkodai kapal kembali berlayar dengan nyaman.

Dalam nahkoda Anis, PKS juga menjadi partai yang lebih demokratis dan terbuka (*open minded*). Bahkan, PKS juga membuka gerbang khusus bagi non-muslim untuk masuk sebagai anggota PKS. Langkah ini juga dilakukan untuk menarik lebih banyak massa dari non-muslim.

Sebenarnya, sikap Anis tersebut tidak lepas dari pemikiran Anis yang menginginkan kehidupan kebangsaan yang madani. Anis memandang kehidupan kebangsaan merupakan kesatuan menyeluruh, dimana tiap komponennya harus diperhatikan. Artinya ada keseimbangan antar komponen kehidupan kebangsaan.

Kehidupan kebangsaan tersebut dapat terwujud dengan tiga tahapan, yakni afiliasi, partisipasi, dan kontribusi (Anis Matta: 2006). Afiliasi adalah pintu masuk seseorang mendalami karakter islam dan memperbaharui komitmennya terhadap Islam. Langkah ini dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu: komitmen akidah; yang menetapkan orientasi dan tujuan hidup, komitmen ibadah; yang menentukan cara menjalani kehidupan dan komitmen akhlak; yang menentukan pola sikap dan perilaku dalam seluruh aspek kehidupan.

Selanjutnya adalah Partisipasi. Tahapan ini terjadi saat seseorang telah mencapai kesempurnaan pribadinya kemudian ia meleburkan dirinya ke dalam masyarakat untuk mendistribusikan kesalehannya kepada orang lain.

Sedangkan, tahapan Kontribusi terjadi saat seseorang yang telah terintegritasi dalam lingkungannya berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya dengan jalan menerapkan spesialisasinya sesuai dengan kompetensi utama yang dikuasainya.

Suherman mengatakan bahwa pemikiran Anis tidak bisa dibingkai oleh salah satu tipologi atau kategorisasi seperti yang telah dibahas di atas. Dalam

hal strategi perjuangan untuk eksistensi Islam, Anis memakai semua strategi sebagaimana kategorisasi yang dibuat oleh Bahtiar Effendi (pembaruan teologis, reformasi politik, dan transformasi sosial).

Anis menganut paham bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Anis mengatakan bahwa politik adalah subsistem Islam. Anis juga menyerukan reformasi birokrasi yang berusaha menjembatani jurang ideologis antara Islam Politik dan Negara. Ia juga sangat peduli terhadap transformasi sosial dengan cara melakukan penyadaran melalui pendidikan politik terhadap umat Islam. Penyadaran yang ia lakukan melalui pendekatan psikologis, terutama yang berhubungan dengan meningkatkan potensi diri.

Dari uraian di atas, merupakan refleksi pemikiran Anis Matta yang terimplikasi pada kepemimpinannya sebagai presiden PKS. Benang merah yang dapat diambil adalah bahwa ada korelasi antara agama (islam) dan pembangunan negara.



Dengan tiga langkah di atas, Anis juga menjelaskan bahwa seorang muslim dengan kompetensi dan pemahamannya akan mampu memberikan peran yang terbaik bagi negara sebagai langkah kontribusinya pada negara.

Anis tidak mempermasalahkan bentuk negara (apakah berbentuk khilafah, dinasti, atau negara bangsa) dan sistem pemerintahan (apakah parlementer, presidensial, atau monarki sekalipun). Namun, yang menjadi penekanan Anis adalah apakah negara tersebut dapat berperan sebagai instrumen penegak syariah Allah atau tidak. Negara bukanlah akhir, tapi justru merupakan awal dari sebuah peradaban.

Negara Madinah yang dicita-citakan Anis terinspirasi dari Sejarah Nabi Muhammad (Sirah Nabawiyah). Ketika di Mekah, Rasulullah membangun gerakan dengan pondasi tauhid yang kokoh. Selama 13 tahun di Mekah Rasulullah melakukan penetrasi sosial yang sangat sistematis; dimana Islam “memanusiakan” dan kemudian “memasyarakatkan”. Sewaktu hijrah ke Madinah gerakan ini telah berkembang menjadi sebuah negara.

Pemikiran ini pula yang setidaknya dapat menjelaskan relasi agama (Islam) dan negara menurut Anis. Apalagi yang berorientasi bahwa Anis menghendaki pembentukan negara Islam.

Konsep pemikiran Anis ini pula yang menghantarkan dirinya menjadi nahkoda PKS yang lebih *open minded* dan humanis. Apalagi kelihaiannya sebagai orator mampu menyatukan puing-puing semangat kader PKS yang mulai goyah saat diterpa badai. Prestasi dan Kompetensi tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan PKS, untuk membidik Anis sebagai salah satu alternatif capres 2014.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014: Persaingan Internal PKS

Dari sisi peluang, Anis cukup berpeluang untuk bisa maju menjadi capres di Pilpres 2014. *Pertama*, sebagai presiden partai, peluang Anis Matta untuk dimajukan sebagai calon presiden cukup kuat mengingat partai dakwah ini adalah partai kader. *Kedua*, Anis juga memiliki kemampuan literasi yang baik dalam menggugah massa. Anis juga dikenal sebagai tokoh yang pandai berorasi. Orasinya ringkas saja. Kurang dari 12 menit. Kalimat pembukanya akrab dan isinya sangat kaya dengan fakta-fakta tentang sejarah, pemikiran, dan pergerakan bangsa.

Ketiga, Anis termasuk tokoh muda dan memiliki tingkat elektabilitas cukup baik di internal PKS. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking

Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Anis berada di urutan ke-2 di internal PKS, tepat di bawah Hidayat Nur Wahid.

Meski demikian, tantangan besar bagi Anis Matta adalah tentang tingkat elektabilitas yang masih rendah dalam survei secara umum. Elektabilitas Anis bahkan belum masuk sepuluh besar ketika dibandingkan dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Selain itu, tantangan lain tentu terkait partainya yang belakangan mengalami penurunan elektabilitas. Berdasarkan hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu, posisi PKS mendapat angka 2,9%, turun drastis dibandingkan Pemilu Pemilu 2009 yang berada di angka 7,88%. Itulah tantangan yang harus segera dijawab Anis.

Dalam kemudi Anis Matta, PKS membentuk citra sebagai partai yang tidak lagi menonjolkan isu ideologisasi islam. Proses *rebranding* ini cukup berhasil untuk menguatkan kembali citra PKS yang sempat goyah saat diterpa kasus korupsi.

Keberhasilan tersebut menaikkan *bargaining position* Anis sebagai salah satu alternatif capres yang akan diusung PKS. Dalam perspektif politik, Anis punya modal yang cukup kuat untuk bertarung di pilpres 2014 nantinya.

Pertama, Anis adalah sosok politisi dari kalangan muda yang bersih. Dugaan yang pernah menyeruak, Anis sebagai orang dekat LHI juga terlibat korupsi pun belum terbukti. Kedua, kapasitas Anis sebagai politisi cukup mumpuni. Beberapa jabatan strategis juga pernah didudukinya, seperti Anggota DPR, Wakil Ketua DPR dan selama empat kali berturut-turut menjabat Sekjen PKS.

Anis juga mempunyai literasi yang baik dan mengelola massa. Hal ini terbukti dengan kemampuannya menahkodai PKS saat partai tersebut mengalami *distrust* dari publik yang cukup tinggi karena berbagai kasus yang menderanya.

Keempat, Anis adalah sosok politisi yang berwawasan luas. Terbukti dari beberapa karya yang pernah ditulisnya, seperti Model Manusia Muslim Abad 21 (2002), Menikmati Demokrasi (2007), Menuju Cahaya (2006), Arsitek Peradaban (2006), dan dari Gerakan ke Negara (2006).

Kelima, Anis yang juga bagian dari Majelis Hikmah PP Muhammadiyah menunjukkan kedekatannya terhadap salah satu ormas terbesar di negeri

ini. Keenam, dengan kiprahnya sebagai pengusaha, setidaknya Anis tidak mengalami kendala berarti dalam hal finansial apabila berkompetisi dalam pilpres 2014.

Tantangan justru hadir dari faktor internal partainya. Anis masih terbilang sebagai sosok yang memiliki elektabilitas yang rendah. Apalagi Dewan Syuro PKS masih berhitung peluang beberapa kadernya yang akan diusung dalam capres 2014. Beberapa nama yang santer berpeluang besar adalah Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, dan Ahmad Heryawan. Tentu saja nama-nama tersebut mempunyai kapasitas dan prestasi sesuai track record masing-masing. Peluang semakin besar jika terdapat komunikasi politik yang cukup intensif dengan petinggi dewan syuro.

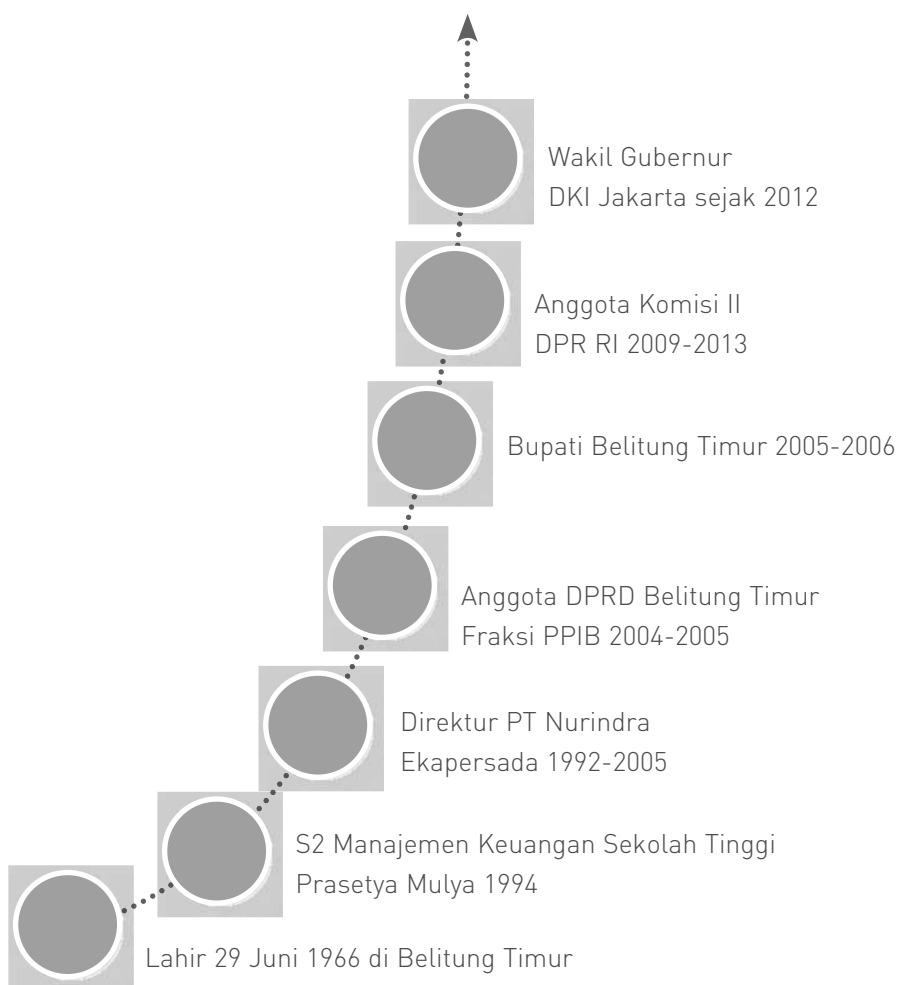
Dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu menyebutkan posisi Anis berada di urutan ke-2 di internal PKS, tepat di bawah Hidayat Nur Wahid. Hasil ini dapat menjadi referensi Anis dalam mengkalkulasi peluang politiknya dalam bursa capres yang diusung PKS.

Hal lain yang perlu dipecahkan Anis adalah pembuktiannya sebagai pemegang kemudi PKS, wajib menaikkan elektabilitas PKS. Berdasarkan hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu, posisi PKS mendapat angka 2,9%, turun drastis dibandingkan Pemilu Pemilu 2009 yang berada di angka 7,88%.

Hasil tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Anis. Namun, apabila PR tersebut dapat dipecahkan oleh Anis maka selain peluang PKS mengusung capres dari kadernya semakin besar tentu saja prestasi tersebut akan dicatat oleh Dewan Syuro PKS menjadi poin plus tersendiri bagi Anis.

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Pemimpin Potensial





yoralovita.com

Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dengan nama Ahok, lebih dikenal sebagai pengusaha sebelum menjadi politisi. Peraih Bung Hatta Award 2013 ini, merupakan tokoh antikorupsi yang fokus mengkampanyekan transparansi anggaran dan kinerja, tidak hanya ketika menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun, saat ia mulai meretas karir sebagai Anggota DPRD Belitung Timur, Bupati Belitung Timur maupun Anggota DPR RI. Keberhasilannya membebaskan biaya layanan pelayanan kesehatan gratis, saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur menarik perhatian Presiden Abdurrahman Wahid untuk turut mendukung dengan menjadi juru kampanye saat maju dalam Pemilihan Gubernur Bangka Belitung walaupun akhirnya kalah. Saat ini duetnya bersama Joko Widodo (Jokowi) cukup fenomenal, karena mampu menjawab kegelisahan masyarakat tentang sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin ibukota. Kini namanya mulai disebut-sebut sebagai salah satu calon kandidat alternatif dalam menyongsong Pemilu 2014.

Ia di lahirkan 58 tahun silam, tepatnya di Gantung, Belitung Timur, pada 29 Juni 1966. Basuki kecil menghembuskan nafas pertama di desa asal Laskar Pelangi ini. Basuki dibesarkan lewat tangan dingin kedua orangtuanya, Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsih. Basuki memiliki tiga

orang adik. Dua lelaki dan satu perempuan. Tiga orang adik Basuki, yakni Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety dan Harry Basuki. Sebagai sulung, Basuki diberi nama tianghoa Chong Wan Xie yang artinya adalah puluhan ribu belajar. Konon, sang ayah memberi nama itu agar anaknya dapat menjadi juara kelas. Dari sang ayah, Ahok, demikian dia disapa, memang dididik agar menomorsatukan pendidikan.

Indra Tjahaja yang bekerja sebagai tukang gaji para buruh kaum Tionghoa memang tidak bisa merasakan bangku sekolah. Itu sebabnya Indra berupaya sekuat tenaga agar anak-anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. “Sejak kecil kami didoktrin mesti sekolah. Bapak jual kelapa, jual apapun juga demi menyekolahkan kalian. Karena kalau tidak sekolah nggak mungkin berubah nasib dan kalian nggak mungkin bisa menolong orang banyak,” ujar Ahok mengutip wasiat ayahnya (tokohindonesia.com, 2012).

Tak hanya itu, Indra juga mendidik anak-anaknya untuk membantu orang yang kesusahan. Setiap saat, Indra selalu bercerita tentang mulianya menolong orang miskin. Sejak saat makan bersama hingga jelang Ahok terlelap di kamar tidurnya. Hanya, Ahok juga mendapatkan pelajaran disiplin yang keras dari ibu dan ayahnya. Untuk coba-coba nakal, Ahok harus berpikir seribu kali dengan hukuman yang menanti dari ibunya. Hukuman menyakitkan dari sang Ibu terjadi saat Ahok duduk di bangku SD.

Kala itu, Ahok pernah melakukan eksperimen pertamanya untuk mencicipi rasa tembakau. Penasaran dengan kebiasaan sang ayah sebagai penikmat tembakau, dia pun coba menghisap sebatang rokok secara diam-diam. Apes, kenakalannya diketahui sang ibu. Sebuah tamparan mendarat di pipi bocah itu. Tamparan yang menyakitkan lahir dan batin. Kenangan itu begitu melekat dibenak Ahok hingga ia dewasa.

Di luar rumah, Ahok dikenal sebagai pecinta hutan. Alam Gantung yang menakjubkan membesarkan Ahok menjadi bocah petualang. Dia pun sering menghabiskan hari-harinya di hutan untuk berburu burung dan memancing. Pernah pada suatu ketika, Ahok dan kawan-kawannya berburu burung di Manggar. Mereka berburu hanya dengan sebuah senapan angin, tanpa bekal makanan dan minuman. Padahal, tempat perburuan berada di hutan yang cukup jauh dari rumahnya.

Sampai di hutan, Ahok mendapat kesempatan untuk menembak seekor burung. Mereka pun mengendap-ngendap di bawah pohon sambil mencari posisi menembak yang baik. Hanya, saat senapan tersebut mau dikokang, rupanya masih ada peluru didalamnya. Celaka, seorang teman Ahok terkena peluru senapan di pinggang. Gerombolan cilik itu sangat takut dengan insiden tersebut. Ahok pun bingung bagaimana menjelaskan insiden itu kepada ayah-ibunya sendiri. Terlebih, ke orang tua temannya yang menjadi korban salah tembak itu. Beruntung, kawan itu masih bisa selamat.

Selain berburu di hutan, Ahok pun senang bermain sepak bola. Sekali waktu, ada sebuah pertandingan sepak bola di kampung. Ahok ikut di dalamnya. Hanya, Ahok dan teman-temannya resah karena pihak lawan memakai guna-guna untuk bisa menang.

Ahok kecil lantas memutar otak. Entah mengapa yang terlintas di pikirannya kemudian adalah minyak babi. Konon, minyak babi ampuh untuk mengusir roh jahat. Dengan polosnya, Ahok pun mencuri minyak babi ibunya dan mengoleskannya di sepatu teman-temannya. “Pas teman saya bilang nanti takut kena guna-guna, saya langsung bilang. Tenang, sepatu kamu semua sudah saya olesin minyak babi,” ujarnya sambil tertawa(kompas.com,2014).

Beranjak remaja, Ahok menyalurkan hobi bertualangnya ke sepeda motor. Dia senang berkendara motor dengan kawan-kawannya plesir ke kota. Dia bahkan sempat hampir kecelakaan akibat kebut-kebutan. Bukannya kapok, adrenalin Ahok semakin naik. Dia pun bicara kepada ibunya ingin ikut kejuaraan motorcross di Belitung. Ahok juga kerap main ke Kota Manggar yang bisa ditempuh sekitar 45 menit dengan mobil. Dia dan saudara-saudaranya suka membantu menjaga apotek milik ibunya.

Besar di Jakarta

Prestasi Ahok di bangku sekolah yang gemilang membuat Indra mengirim sulungnya itu ke Jakarta. Di ibu kota, Ahok akan melanjutkan duduk di bangku SMA. Bersama dengan Basuri, sang adik, Ahok melanjutkan pendidikan di Jakarta. Ketika duduk di bangku SMA, dia dan adiknya,

Basuri Tjahaja Purnama, bersekolah di salah satu sekolah swasta Kristen di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kala itu, usaha Indra di Belitung tengah diterpa persoalan ekonomi.

Basuki dan Basuri remaja pun harus menghemat kantong supaya uang bulanan dari sang ayah tidak cepat habis. Keduanya memilih angkot dengan trayek langsung, meski harus menunggu lama dan bangun lebih cepat. Mereka juga rela tidak jajan di sekolah dan memilih untuk membawa bekal dari rumah. “Saya dari SMA di SMA 3 PSKD yang ada di dekat RSPAD. Tinggalnya di Pademangan, saya waktu sekolah sudah naik Kopaja,” kisahnya (*news.viva.co.id*, 2013).

Lantaran harus mengencangkan ikat pinggang seperti itulah yang juga membuat Ahok pikir panjang untuk ‘menggebet wanita lain. “Kan ngapel itu perlu uang juga. Buat hari-hari aja sulit,” ujarnya. Meski demikian, Ahok tetap bersyukur. Setidaknya, ia tetap bisa menempuh pendidikan di kota besar. Berbeda dari banyak anak di kampung halamannya yang mimpinya berakhir di lubang-lubang tambang di Belitung.

Setelah menamatkan pendidikan SMA, Ahok memutuskan untuk kuliah di Universitas Trisakti. Dia memilih Fakultas Teknik Geologi universitas yang kampusnya berada di bilangan Grogol itu. Gaya hidup Ahok tak berubah saat mengecap bangku kuliah. Dia juga masih menggunakan bus 203 dan Kopaja. “Saya juga naik ojeg. Kemudian pindah ke Pluit, ketika kuliah, ya naik Metromini,” cerita Ahok.

Dia lulus dan menjadi sarjana Teknik Geologi (Insiyur geologi) pada tahun 1989 dan memutuskan untuk pulang kampung. Ahok lalu menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan PT Timah. Menggeluti dunia kontraktor selama dua tahun, Ahok menyadari hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki. Dia sadar, untuk menjadi pengelolah mineral, diperlukan modal (investor) dan manajemen yang profesional.

Untuk itu, Basuki memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Dia juga bercerita, ketika S-2 itulah untuk pertama kalinya dia menggunakan bus patas AC.



www.facebook.com/AhokBTP/photos_stream

Mendapat gelar Master in Bussiness Administration (MBA) atau Magister Manajemen (MM) membawa Basuki diterima kerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Ahok yang ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya pada 1992. (*tokohindonesia.com*, 2014)

Ahok sang Pengusaha

Pada tahun 1992, Ahok mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder (pemegang saham, karyawan, dan rakyat).

Ahok berharap usahanya dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain, ia meyakini PT Nurindra Ekapersada memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh.

Dengan visi itu, Basuki didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan, seperti Bapak (alm.) Wasidewo untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung pada 1994. Pabrik ini tak dibangun main-main. Ahok memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Ahok ingin pembangunan pabrik ini menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri terpadu dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik).

Sayang, langkahnya sebagai pengusaha harus terhenti di tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup akibat perlawanannya terhadap pejabat yang dianggapnya bertindak sewenang-wenang. Dengan hati yang diliputi penuh kekecewaan, Ahok memutuskan untuk meninggalkan Tanah Air dan hijrah ke luar negeri. Tetapi sang ayah tidak tinggal diam melihat keinginan anaknya itu. Ia mengatakan bahwa suatu hari rakyat akan memilih Ahok untuk memperjuangkan nasib mereka.

Sang ayah yang punya nama Tinghoa Zhong Kim Nam itu memberikan gambaran kepada putra sulungnya itu. “Kalau jadi pedagang dengan uang 1 miliar, kita membantu orang miskin sesuai dengan UMR 500 ribu, hanya dapat membantu 2000 keluarga, selesai.coba kalau kita menjadi Bupati dengan 100 miliar bisa menghasilkan 500 ribu tiap orang. Tidak ada lagi orang miskin gara-gara sakit atau tidak ada lagi orang bodoh gara-gara tidak bisa kuliah atau sekolah,” kisah Ahok mengutip ucapan sang ayah (*tokohindonesia.com*, 2014)

Pepatah Tiongkok yang mengatakan, “Orang miskin jangan melawan orang kaya dan orang kaya jangan menantang pejabat”. Pepatah itulah yang kemudian membuat semangat Ahok semakin berkobar dalam membantu rakyat kecil. Apalagi, ia melihat kenyataan dimana banyak orang miskin sakit dan sulit mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Terjun ke Politik

Terinspirasi dengan nasihat sang ayah, Ahok memutuskan terjun ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr Sjahrir. Pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hanya, Ahok tak punya modal untuk berkampanye. Dia lalu blusukan ke pelosok Belitung Timur menemui para calon konstituennya. Kepada rakyat, Ahok menyatakan menolak memberikan uang politik. Cara itu terbukti ampuh. Ahok pun berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Selama di DPRD, Ahok menunjukkan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dia menolak mengambil uang SPPD fiktif. Ahok pun dengan cepat dikenal masyarakat karena menjadi satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan rakyat untuk mendengar keluhan mereka. Di sisi lain, anggota DPRD lain tak kelihatan batang hidungnya saat rakyat 'akar rumput' menunggu mereka.

Aksi Ahok mendapat simpati. Setelah tujuh bulan menjadi anggota DPRD, muncul dukungan berlimpah dari para konstituennya agar Ahok menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005. Dia pun menyanggupi. Ahok memutuskan untuk maju sebagai bupati. Ahok lantas mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung rakyat dengan memberikan nomor telepon genggamnya meski nomor itu adalah nomor pribadi yang biasa dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarga. Dengan cara ini, ia mampu mengerti dan merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat.

Hanya, Ahok mengaku mengeluarkan Rp 2 miliar saat mencalonkan diri untuk pembinaan partai pendukungnya. "Karena kan ada 12 partai. Kemarin hampir habis Rp 2 miliar. Istilah mereka, untuk uang kantor dan semacamnya. Kalau bantuan partai itu kan wajar. Tapi kalau diperdagangkan itu enggak wajar," ujar Ahok seperti dikutip dari Merdeka.com di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Uang miliaran rupiah itu dikeluarkan Ahok secara bertahap. Pertama sekitar Rp 30 juta hingga Rp 200 juta. Menurutnya dana tersebut ber-

asal dari kantongnya sendiri karena pasangan calonnya kala itu tak memiliki banyak uang. Dengan dukungan partai dan rakyat, Ahok berhasil mengantongi suara 37,13 persen dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Padahal Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi, yang juga adalah kampung dari tokoh hukum nasional Yusril Ihza Mahendra.

Bupati di Kampung Sendiri

Sebagai orang nomor satu di kampung, Ahok pun tampil berani. Menjadi Tianghoa yang minoritas bukan alasan buat Ahok untuk merasa minder. Untuk berani memimpin, Ahok pun mengaku terinspirasi pemikiran-pemikiran mendiang Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia juga mengklaim keberaniannya terjun ke dunia politik berkat Gus Dur. “Saya kenal Gus Dur itu setelah Beliau jadi Presiden. Saya waktu itu terpilih jadi Bupati di tempat yang 93 persen orang Muslim,” kata Ahok. Tak hanya itu, dia punya modal sebagai pengusaha dan anggota DPRD. Ahok hapal betul sistem keuangan dan budaya birokrasi yang ada (*lensaindonesia.com*, 2013)

Tanpa ragu, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Kabupaten Belitung Timur. Hanya dalam waktu 16 bulan saja, pria yang gemar berolahraga ini mampu membangun sisi jaminan sosial di luar pensiun. Di bidang kesehatan, Ahok bekerjasama dengan PT. Askes untuk membuat masyarakat setempat dapat menikmati kesehatan gratis.

Di zaman Ahok, rakyat Belitung Timur dapat bebas biaya rawat jalan, rawat inap sampai kelas 3, ICU, operasi cesar serta penyediaan ambulans. Tak hanya sekadar membebaskan biaya kesehatan, Ahok pun memperhatikan masalah pendidikan. Dia pun melakukan kebijakan sekolah gratis dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Ahok juga memberikan beasiswa kepada yang berprestasi. Sedangkan untuk sarana dan prasarana, pemerintahan Ahok memperlancar arus distribusi dengan pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah serta perbaikan pelayanan publik lainnya.

Saat menjadi kepala daerah, Ahok memiliki prinsip sederhana. Jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lurus. Dengan memegang prinsip tersebut, Ahok dikenal sebagai sosok bupati yang anti sogokan baik di kalangan lawan politik, pengusaha, maupun rakyat kecil. Ia memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20 persen. Dengan demikian ia memiliki banyak kelebihan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Kesuksesan ini terdengar ke seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok maju sebagai Gubernur di tahun 2007. Pada 22 Desember 2006, Ahok resmi mengundurkan diri dari pemerintahan dan menyerahkan jabatan tersebut kepada wakilnya, Khairul Effendi. Pada tahun 2007, Ahok mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung. Pada saat itu, dia mendapatkan dukungan penuh dari Abdurrahman Wahid. Namun, dia kalah dengan Eko Maulana Ali. Dia pun gagal menjadi Gubernur Babel.

Loncat ke Senayan

Dalam pemilu legislatif 2009, Ahok maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar Caleg (padahal di Babel hanya tersedia 3 kursi), ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR. Tiket ke Senayan berhasil didapatkannya berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak.

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II. Ahok dikenal oleh kawan dan lawan sebagai figur yang apa adanya. Dia pun vokal dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat kiprahnya di DPR, Ahok menciptakan standar baru bagi anggota-anggota DPR lain dalam antikorupsi, transparansi, dan profesionalisme. Ahok pun bisa dikatakan sebagai pioner dalam pelaporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja. Semua laporan bisa diakses melalui websitenya.

Sementara itu, staf ahlinya bukan hanya sekedar bekerja menyediakan

materi undang-undang tetapi juga secara aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Saat ini, salah satu hal fundamental yang sedang ia perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen kandidat kepala daerah untuk mencegah koruptor masuk dalam persaingan pemilukada.

Perlawanan Ahok kepada praktik korupsi di DPR juga terlihat saat dia menolak kunjungan kerja ke Spanyol pada 24 September 2010. Alkisah, Ahok sebagai anggota delegasi GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) DPR RI dan Parlemen Maroko akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko. Dia berangkat dengan 6 rekan anggota DPR RI yang lain (1 PAN, 2 Demokrat, 1 PKS, 1 PDIP, dan dirinya mewakili Golkar) serta didukung oleh 2 rekan sekretaris delegasi dan 1 tenaga ahli. Hanya, Ahok gundah karena jadwal perjalanan kunjungan tersebut juga menyertakan Spanyol.

Ahok dan seorang rekannya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pun menolak berpergian ke Spanyol karena sadar tugas mereka hanya kunjungan kerja ke Maroko. Ahok pun bingung kenapa Pimpinan DPR menyetujui kunjungan 4 hari ke Maroko dan 3 hari ke Spanyol, dengan biaya perhari untuk perjalanan ke Maroko sekitar 200 dolar AS perhari sedangkan ke Spanyol mendapatkan 400 dolar AS per hari termasuk hotel.

Ahok lantas memilih hanya mengunjungi Maroko selama 5 hari, tapi menerima uang saku hanya 4 hari. Menurutnya, sikap itu diambil untuk menunjukkan penolakan kepada pembengkakan anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk kemaslahatan rakyat. Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalam berani mempertahankan integritasnya.

Baginya, di alam demokrasi, yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup.

Pada tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah *TEMPO* sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pen-



www.facebook.com/AhokBTP/photos_stream

dayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan; bukan politik instan yang sarat pencitraan(www.ahok.org, 2014)

Cinta yang Sederhana

Kisah cinta Ahok dan Veronika Tan bisa dibilang berjalan singkat. Keduanya pertama kali berkenalan pada tahun 1994 saat melakukan pelayanan di gereja. Dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut ke pernikahan. “Nggak sempat pacaran,” katanya.

Sikap Ahok yang sejak dulu terkenal sebagai sosok yang tegas, galak, dan emosional, malah membuat Veronika Tan jatuh hati. Sementara Pak Ahok pun mengaku jatuh cinta dengan wanita berperawakan tinggi, langsing, dan berkulit putih lantaran sering bertemu di gereja yang sama. Keduanya lantas menikah pada 6 September 1997. Kini mereka telah dikaruniai putra pertama pada tahun 1998 Nicholas, kemudian putri kedua Nathania pada tahun 2001, dan putra ketiga Daud Albeenner pada tahun 2006.

Pasangan Ahok dan Veronika rupanya adalah pasangan yang sama-sama sibuk. Meski hanya Ahok yang menjadi wakil gubernur dan sering terdengar gaung kiprahnya di mana-mana, rupanya Veronika tidak kalah sibuknya sebagai istri Wakil Gubernur.

Meski begitu, Veronika dan Ahok masih tetap saling bekerjasama dalam mengurus rumah tangga. Misalnya mengantarkan anak sekolah, memasak untuk keluarga hingga menjadi tempat curahan hati Ahok. “Ya pastilah kalau ada keluh kesah, Bapak mau cerita ke mana selain ke rumah, intinya kami menampung,” kata Veronika. Meski galak di luar, Ahok tak ditakuti oleh anak-anak mereka. Veronika bercerita, justru hubungan Ahok dan anak-anaknya seperti teman dan sahabat sendiri. (www.merdeka.com, 2012)

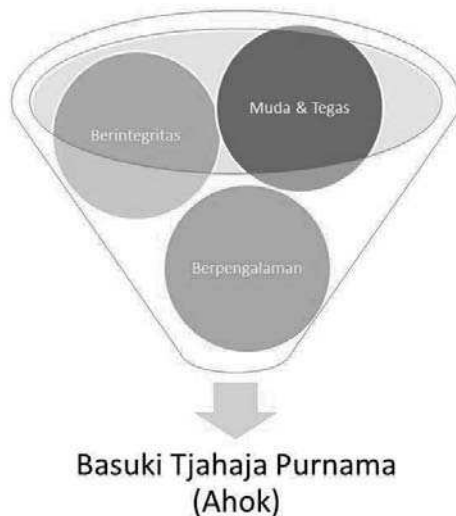
Ahok mengaku bukanlah orang yang romantis. Oleh karena itu, ia dan istri terkesan tidak banyak melakukan hal-hal yang menunjukkan kemesraan mereka. Meski keduanya tidak pacaran, namun tersirat betapa Ahok sangat tahu bagaimana cara menyayangi istri dan anaknya.

Pendamping Jokowi

Tahun 2012 nama Ahok kian mencuat karena dipilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI-P dan Gerindra. Berbekal keteguhan untuk tampil sebagai pemimpin yang bisa menjadi teladan, Ahok memilih ikut bersaing dalam pilkada Gubernur DKI Jakarta.

Ahok yakin dengan pengalaman birokrasinya, tindakan dan kebijakannya nanti pasti akan lebih diliput media ketika menjadi Wagub di Jakarta ketimbang ketika menjabat di Belitung. Sehingga masyarakat luas akan lebih mengerti tentang kebijakan yang dia ambil. Ahok yakin bahwa karakter teruji mampu mengalahkan segalanya. Dia pun mengutip pernyataan bapak bangsa Amerika Serikat, Abraham Lincon, “Rakyat sedang menanti karakter teruji. Jadi kalau ingin menguji karakter sejati orang, beri dia kekuasaan” (*tokohindonesia.com*, 2014).

Bagi Ahok, membangun Rumah Indonesia di atas empat fondasi dasar yakni Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi dan sesuai dengan cita-cita proklamator Indonesia. Dengan fondasi tersebut maka tidak akan ada lagi perbedaan suku dan agama apapun, yang ada hanya berdasarkan konstitusi.



Dengan pemahaman tentang Rumah Indonesia itulah, Ahok menilai, masalah Jakarta hanya bisa diatasi oleh pemimpin yang jujur untuk rakyat. Karakter Ahok yang keras dan ceplas-ceplos dinilai pas sebagai pendamping Jokowi yang memiliki karakter khas orang Solo, kalem dan tenang. Meski berbeda latar belakang, keduanya banyak kesamaan. Basuki yang akrab disapa Ahok mengakui kesamaan dirinya dengan Jokowi. Untuk urusan pakaian, dia suka kemeja kotak-kotak. Ia mengaku, lemarnya dipenuhi kemeja kotak-kotak, tren mahasiswa geologi.

Saking klopnya urusan pakaian, Jokowi sampai tahu ukuran kemeja Ahok, tanpa bertanya. Itu diakui Ahok ketika mendaftar bakal cagub dan cawagub di KPUD Jakarta. Mulanya Ahok tak yakin, kemeja kotak-kotak yang disodorkan Jokowi bakal pas di badannya. Tapi ternyata memang pas.

Kecocokan pasangan nomor urut tiga ini sebelumnya sudah terlihat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Kisah ini disampaikan Megawati saat menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-77 politisi senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang juga dihadiri pasangan Jokowi-Ahok di Jakarta.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Modalitas latar belakang Ahok sangat baik untuk maju dalam pertarungan calon presiden di 2014 ini. Ahok adalah sosok baru dan unik dalam kepemimpinan nasional sejak medio 2013. Darah Tionghoa yang dimilikinya menjadikanya “sesuatu yang baru” dalam dunia politik Indonesia kontemporer. Tidak berlebihan apabila Ahok adalah sebuah fenomena, bersama-sama dengan Joko Widodo, Tri Rismaharani, dan Syahrul Yasin Limpo.

Era kepemimpinan kaku nan birokratis sudah ditinggalkan. Perilaku pemilih Indonesia cenderung memilih pemimpin yang luwes, apa adanya, dan turun ke bawah. Perubahan perilaku memilih ini menjadikan Ahok sangat cocok menjadi pasangan Jokowi yang unik, dan memang hasil Pilkada membuktikan hal tersebut. Bila survei kualitas personal kandidat oleh Poltracking di bawah ini dijadikan acuan, maka, secara detail akan terlihat beberapa aspek yang menonjol di antaranya sebagai berikut:

Dari sisi peluang, ada beberapa hal yang bisa menjadi peluang Ahok untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014. *Pertama*, pengalamannya di pemerintahan daerah yang sampai menduduki posisi Bupati Belitung Timur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan bukti bahwa dia memiliki kapasitas *leadership* yang sangat baik, dan elektabilitas yang tinggi. Selain itu, profesionalitas dan manajerial Ahok sebagai pengusaha juga cemerlang, terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang dipimpinnya di Belitung Timur.

Kedua, Ahok memiliki *track record* yang relatif bersih dari kasus hukum. Berbeda dengan tokoh-tokoh politisi lain yang cenderung sangat penuh dengan kasus hukum. Partai Gerindra pun yang mengusung Ahok memiliki persepsi yang bersih.

Ketiga, karakter kepemimpinan personal Ahok yang tegas menjadikannya menjadi sosok unik yang dinanti masyarakat Indonesia dimana ada keunikan, maka disitu media akan datang dan memberitakan. Survei yang dilakukan Pol-Tracking Institut terkait dengan kecenderungan perilaku pemilih membuktikan bahwa pemberitaan media massa (46,9%) menjadi sumber informasi publik paling tinggi dibandingkan variabel lain seperti Iklan 23%, lingkungan tempat tinggal 9%, keluarga, dan lain-lain.

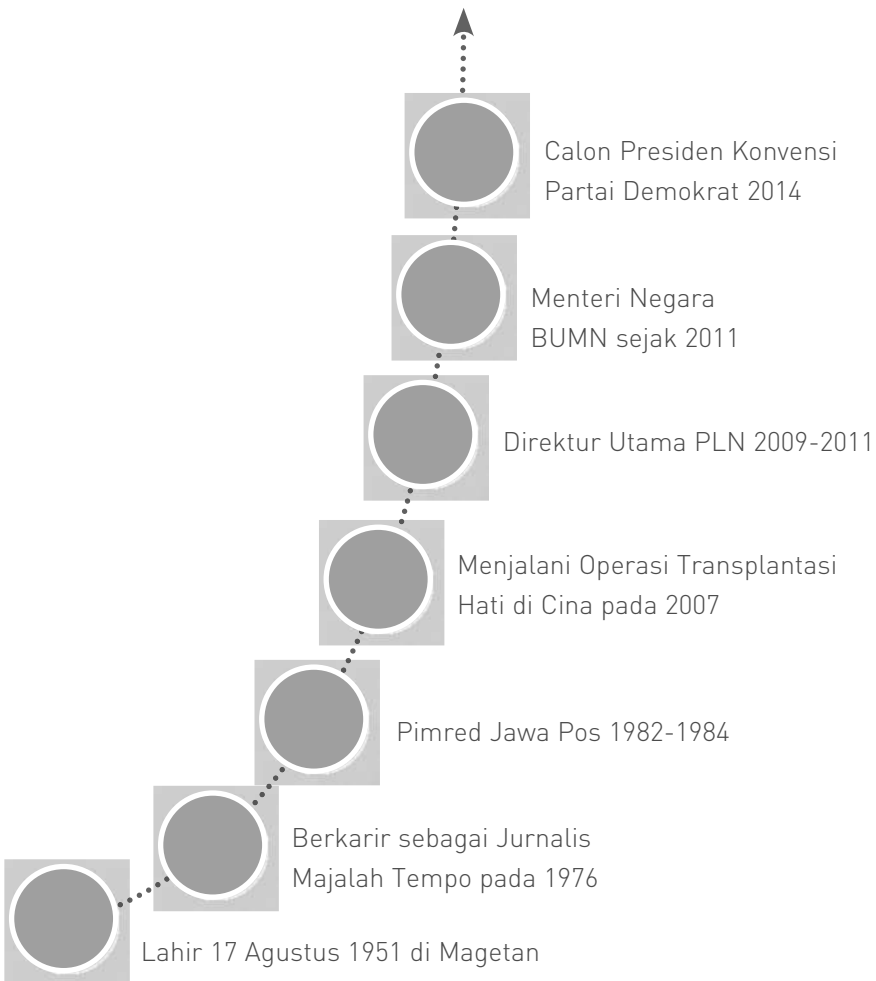
Artinya, publisitas partai di media menjadi krusial dalam membentuk persepsi publik. Apa yang diberitakan media massa terkait partai cukup menentukan sebagai sumber informasi publik. Dan media massa sejak terpilihnya pasangan Jokowi-Ahok, selalu mengerubungi mereka berdua layaknya “semut mengerubungi gula”. Hal ini merupakan keuntungan yang baik bagi Ahok.

Pada faktanya, saat ini Ahok adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta mendukung Gubernur Jokowi maju di Pilpres 2014. Sementara Wagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diharapkan tetap bertahan di DKI. “Publik cenderung setuju dalam kandidasi Jokowi (52,96%), namun kurang setuju jika Ahok menjadi capres/cawapres (32,03%). Angka ketidaksetujuan dalam kandidasi Ahok (43,29%) lebih besar dibandingkan angka persetujuan,” kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda AR (www.news.detik.com, 2014).

Meski demikian, Ahok juga memiliki tantangan. Beberapa survei yang dilakukan sejumlah lembaga riset, nama Ahok belum terlalu meroket dan bahkan tidak ada. Hal itu menjadi tantangan penting bagi Ahok jika kelak mencalonkan diri sebagai capres. Sebab, dalam konteks demokrasi elektoral, seorang calon presiden harus mendapatkan dukungan suara dari masyarakat luas. Artinya, untuk menjadi RI-1, tak cukup hanya bermodal cerdas, kredibel, bersih, dan tegas, tapi juga harus disokong oleh raihan suara yang memadai. Itulah tantangan besar yang harus segera dijawab dan diselesaikan oleh Ahok.

DAHLAN ISKAN

Pemimpin Potensial





kabar24.com

Dahlan Iskan lahir di Magetan, 17 Agustus 1951, tepat dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dahlan, begitu ia akrab disapa, dibesarkan di lingkungan pedesaan dengan kondisi serba kekurangan. Ketika masih SMA, cita-cita Dahlan Iskan simpel: ingin mempunyai sepeda. Selain sepeda waktu itu barang mewah, bagi Dahlan sepeda juga akan memudahkan ia berangkat ke sekolah. Sepeda merupakan alat transportasi cukup bergengsi ketika itu.

Karena tidak punya sepeda, ia pun sering meminjam sepeda teman-temannya. Tapi ayahnya yang hanya bekerja sebagai buruh tani melarangnya meminjam sepeda. Alasannya, takut sepeda itu rusak dan tidak bisa mengkatinya. Kondisi inilah yang mengetuk hati Dahlan Iskan untuk bangkit dan bekerja keras untuk merubah nasib. Maka, setelah lulus SMA, ia langsung menyusul kakaknya di Samarinda untuk kuliah di IAIN Samarinda

Di kampus, Dahlan mengalami kejenuhan luar biasa. Bagi Dahlan kampus tidak mempengaruhi perubahan hidupnya. Ia tidak suka materi perkuliahan yang cenderung teoritis. Dahlan pun mulai malas berkuliah sebab di kampus ia merasa tidak bertambah pengetahuannya. Tak selang lama, ia akhirnya lebih menyibukkan diri ke dunia kepenulisan yang ada di kampus daripada ikut kuliah di kelas. Dahlan bergabung menjadi wartawan

koran kampus, hingga akhirnya menjadi wartawan koran lokal. Di sinilah intuisi jurnalistiknya mulai terasah.

Sang Jurnalis Sejati

Karena lebih suka dengan tantangan dunia jurnalistik, pelan-pelan kampusnya pun ditinggalkan. Kariernya di dunia jurnalistik semakin moncer ketika Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) memberikan kesempatan kepadanya untuk magang. Saat *open recruitment*, ia merupakan peserta yang paling menonjol. Saat itu terdapat 6.000 peserta dan hanya dipilih 18 orang. Dahlan merupakan orang yang unggul dari 18 orang itu.

Tahun 1976, Dahlan akhirnya bergabung menjadi wartawan majalah *Tempo*. Ketika menjadi wartawan *Tempo*, ia pernah berhasil menyuguhkan berita tragedi kapal Tampomas II dengan sangat tajam dan mendalam. Kapal tersebut adalah milik perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia yang terbakar dan tenggelam. Beritanya sungguh mengejutkan karena sekitar 5.000 penumpangnya terbakar hidup-hidup di Perairan Masalembu, Laut Jawa.

Karena mampu mengulas berita itu dengan sangat menarik, Dahlan banyak mendapat pujian hingga akhirnya dipromosikan sebagai kepala biro *Tempo* Surabaya. Tapi meski telah menjadi wartawan *Tempo*, kondisi ekonominya tidak lekas membaik. Ia belum memiliki sepeda, apalagi sepeda motor. Honor dari kerja menjadi wartawan hanya mampu untuk menyewa petakan (kosan) dan sisanya hanya cukup untuk biaya transportasi.

Setelah 7 tahun menjadi wartawan, tahun 1982 Dahlan memimpin surat kabar Jawa Pos. Dahlan mampu menjadikan Jawa Pos—yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 eksemplar—dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Lima tahun kemudian terbentuklah Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia.

Tahun 1997, ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta. Sementara pada tahun 2002, ia berhasil mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru. Tidak hanya itu, karier Dahlan terus melesat hingga ia akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris PT Fangbian Iskan Corporindo (FIC) yang kemudian membuat pembangunan Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL). SKKL ini akan menghubungkan Surabaya di Indonesia dan Hong Kong dengan panjang serat optik 4.300 kilometer. (wikipedia.org, 2014)

Karena nama Dahlan semakin populer dan dikenal memiliki kinerja bagus, tahun 2009 ia diangkat menjadi Direktur Utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang kerap mendapat kritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di Jakarta. Semenjak memimpin PLN, kepercayaan publik pun makin bertambah kepada Dahlan Iskan. Dahlan dianggap berhasil mereformasi birokrasi PLN. Dahlan membuat beberapa gebrakan di antaranya bebas “byar pet” se-Indonesia dalam waktu 6 bulan, gerakan sehari sejuta sambungan, dan lain-lain. Dahlan saat itu juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011. Sebelumnya, tahun 2010 PLN telah berhasil membangun PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Banda, Bunaken Manado, Derawan Kalimantan Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Citrawangan.

Karena dianggap memiliki gagasan orisinal, pada tanggal 17 Oktober 2011, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pengganti Menteri BUMN, Mustafa Abubakar yang menderita sakit. Ia terisak dan terharu begitu dirinya dipanggil menjadi menteri BUMN karena merasa berat meninggalkan PLN yang menurutnya sedang pada puncak semangat untuk melakukan reformasi PLN. Tapi bagi Dahlan, pemberian amanah untuk memimpin kementerian BUMN merupakan penghargaan bagi dirinya.

Filosofi Sarung dan Filosofi Air

Ada filosofi unik yang selalu dipegang dalam hidup seorang Dahlan Iskan, yakni “filosofi sarung”. Menurutnya, sarung itu pakaian yang unik dan

fleksibel sekaligus multifungsi. Sarung bisa digunakan apa saja, mulai dari alat untuk beribadah, mencari rizki, *fashion*, sampai alat untuk menakut-nakuti.

Sebagai contoh, sarung bisa menjadi selimut jika kedinginan. Kalau sarung itu robek, masih bisa dijahit. Jika di tempat jahitan robek lagi, sarung masih bisa ditambal. Kalau tambalannya robek, sarung masih bisa digunakan. Misalnya, robekan sarung itu bisa dipakai sebagai sarung bantal ataupun popok bayi.

Jika dikaitkan dengan dunia positif, filosofi sarung ini bisa dimaknai bahwa seorang politisi itu selayaknya selalu mampu mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat banyak, baik ketika masih menjabat sebagai pimpinan partai ataupun lembaga pemerintahan, maupun ketika sudah lengser. Selain itu, seperti halnya sarung yang bisa digunakan untuk menutupi tubuh bagian bawah, dada, dan kepala, begitulah seorang politisi seharusnya bersikap.

Seorang politisi atau pejabat publik harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Ketika berhadapan dengan tukang becak ataupun pedagang sayur, ia harus mampu menyamar seperti mereka, berbahasa layaknya mereka dan bergaul layaknya orang biasa. Ada saatnya pejabat itu di kantor dengan berpakaian mewah ala pemerintah, tapi ada saatnya pula pejabat turun gunung melihat realitas sosial yang sebenarnya. Komunikasi pejabat tidak melulu kepada orang-orang yang “berkerah putih”, tapi juga harus kepada orang-orang yang “berkerah hitam”.

Tentu saja, selain filosofi sarung, filosofi yang lekat dalam hidup seorang Dahlan Iskan adalah “filosofi air”. Dalam banyak sumber dijelaskan, Dahlan sukses membangun dan memimpin Jawa Pos karena filosofi air. Dalam filosofi air, semakin deras air tersebut, maka semakin bagus. Air juga selalu mengalir ke celah-celah yang kosong.

Dalam membangun Jawa Pos, misalnya, Dahlan Iskan tidak memiliki desain besar pada awalnya. Jawa Pos dibangun dengan kerja keras dan mengalir begitu saja. Karena itu, dibandingkan tokoh-tokoh lainnya, Dahlan termasuk sosok yang unik dalam membangun karier. Dahlan bukan tipologi orang yang bermimpi muluk-muluk dan tinggi, itu dibuktikan dari pengakuannya jika semasa muda Dahlan tak memiliki cita-cita (Iskan, 2012).



merdeka.com

Dahlan berpendapat seseorang yang memiliki cita-cita akan cenderung mempertaruhkan hidupnya untuk memperjuangkan cita-citanya itu, sementara jika tidak punya cita-cita, seseorang akan hidup lebih fleksibel. Sepintas, pendapat itu tentu bertolak belakang dari pola pikir (*mindset*) orang-orang sukses kebanyakan. Sebab, cita-cita itu biasanya dijadikan sebagai jalan, tangga, ataupun pemandu hidup. Tentu saja, orang yang tak memiliki cita-cita akan cenderung berjalan berkelok-kelok, tidak pasti, bahkan gamang. Dalam pandangan orang kebanyakan, cita-cita amatlah penting fungsinya, bahkan perlu ditanamkan sejak kecil.

Namun sungguh aneh, hal yang demikian itu tidak berlaku bagi seorang Dahlan Iskan. Dahlan memberikan ilustrasi, jika seseorang memiliki cita-cita kuat, maka ketika suatu saat menemui dinding atau tembok besar yang menghalangi cita-citanya, penghalang itu akan terus diterjangnya. Jika beruntung tembok tersebut akan runtuh sehingga ia dapat terus melaju. Tapi jika ternyata tembok itu lebih kuat darinya, maka ia pun akan menghadapi apa yang disebut *chaos*. Bandingkan jika orang tersebut tidak memiliki cita-cita. Ketika ia dihadapkan pada dinding yang tebal dan tak bisa diruntuhkan, ia pasti akan berbelok.

Pendapat Dahlan seperti itu tentu aneh. Tapi itulah sosoknya, selalu aneh sepanjang zaman. Tapi yang menarik, Dahlan telah membuktikan pendapat anehnya itu dengan kesuksesan yang telah dicapainya.

Meski begitu, kesuksesan Dahlan Iskan—jika ditelisik lebih jauh—sebenarnya juga disebabkan beberapa faktor penting. *Pertama*, konsisten dengan sikapnya. Dahlan Iskan adalah orang yang memiliki integritas tinggi dalam tugas apapun. Sebelum mengatakan sikap A dan B, ia biasanya sudah memikirkannya masak-masak, bahkan tak jarang mencobanya. Ia tipe orang yang lebih mendahulukan sikap dan aksi nyata sebelum berkata ataupun berkelakar.

Karena itu, ketika mengintruksikan kebijakan-kebijakan baru di tubuh PLN saat itu, praksis tak ada bawahannya yang membantahnya. Sebab, sebelum memberikan intruksi, ia selalu mendahuluinya dengan keteladanan. Jadi karyawan yang akan membatah merasa sungkan.

Kedua, gila kerja (*workaholic*). Dahlan Iskan dikenal sosok yang pekerja keras. Pengalaman kerja keras itu ia dapat sewaktu masih kecil. Ia terinspirasi oleh ayahnya yang juga pekerja keras. Tak pelak jika oleh teman-temannya, Dahlan dianggap orang yang tidak mempunyai pusar. Bahkan saking getolnya bekerja dan tidak lagi mengenal capek, fisik Dahlan Iskan melemah. Hingga akhirnya harus ganti hati.

Ketiga, keberanian mengambil resiko besar. Dalam bahasa orang Jawa, Dahlan ini mungkin disebut orang yang “nekat”. Sebab, dalam dunia bisnis, orang yang nekat biasanya lebih cepat mendapatkan perubahan dan pembelajaran. Dahlan suka tantangan dan resiko. Baginya, jatuh bangun dalam berbisnis adalah hal yang biasa dan lumrah. Orang yang luar biasa adalah orang yang mampu merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Sikap Dahlan yang tidak takut gagal inilah yang justru mendorongnya menjadi orang sukses.

Total Kekayaan dan Tidak Ambil Gaji

Seperti disebut di atas, Dahlan Iskan saat ini memang orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dari segi sosial dan finansial, karier yang dibangun

Dahlan benar-benar terlihat. Secara sosial, siapa yang tak kenal Dahlan Iskan saat ini. Sementara dari segi finansial, Dahlan adalah orang yang awalnya merangkak dari nol dan kini sudah sangat lebih dari cukup. Tahun 2010, dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK mencatat bahwa total harta kekayaan Dahlan mencapai lebih dari Rp 48,8 miliar.

Merasa lebih dari cukup, ketika menjabat sebagai Direktur PLN, Dahlan tidak mengambil gaji dan tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan. Bahkan, Ibu Nafisah (istrinya) menyarankan agar bensin mobil dinas yang dipakai menggunakan dana pribadi saja. Tentu saja apa yang dilakukan Dahlan Iskan itu bukanlah bentuk pencitraan semata. Sebab, ia memiliki tradisi seperti itu sudah sejak lama sebelum ia menjabat Direktur PLN dan Menteri BUMN. Ketika bekerja di perusahaan-perusahaan daerah, misalnya, Dahlan sudah memiliki kebiasaan tidak mengambil gaji, bahkan kerap menggunakan aset dan harta yang dimilikinya untuk jaminan perusahaan-perusahaan tersebut.

Padaahal, kalau dihitung, gaji Dahlan Iskan lumayan tinggi di PLN, yakni mencapai 150 juta per bulan. Meski begitu, sepeser pun gaji tersebut tidak ia



ambil. Bahkan tak jarang, ia kerap mengeluarkan dana dari saku pribadinya untuk biaya operasional PLN. Sebagai contoh, ketika ada konferensi di Bali, ia pernah merogoh koceknya sebagai uang transportasi para karyawannya untuk menghadiri konferensi di Bali tersebut.

Tentu saja, apa yang dilakukan Dahlan ini merupakan sesuatu yang langka dimiliki pejabat Indonesia kebanyakan. Orang pun mungkin bertanya, dari mana sebenarnya kekayaan Dahlan Iskan diperoleh?

Sebenarnya, untuk ukuran orang terkaya di Indonesia, Dahlan tidak termasuk terdaftar dalam nominator tertinggi. Artinya, Dahlan masih belum terlalu 'dihitung' untuk ukuran orang kaya di tanah air. Ia disebut kaya karena kekayaan yang dimilikinya itu sebenarnya tidak hanya terletak di nominal harta semata, tapi lebih pada kepribadian dan investasi sosial. Dalam dunia kerja, Dahlan tipologi orang yang tidak kenal lelah. Hal ini terlihat dari kiprahnya membangun Jawa Pos. Betapa tidak, Jawa Pos yang sedari awal merupakan surat kabar yang *mati segan hidup tak mau*, tapi di tangannya, koran tersebut menjadi raksasa media yang melebar ke seluruh penjuru Nusantara.

Dahlan telah merubah Jawa Pos yang awalnya koran biasa yang menjelma menjadi raksasa media. Di tangan Dahlan Iskan, Jawa Pos Grup berkembang dengan sangat pesat. Kini terdapat sekitar 120 media cetak dan 20 stasiun televisi yang berada di Jawa Pos Grup. Ini belum di dalamnya jaringan percetakan, pembangkit listrik, pabrik kertas, perminyakan, properti, agribisnis, dan seterusnya. Jika ditaksir, aset Jawa Pos sendiri mencapai triliunan rupiah dengan omset sekitar 2 triliun. Dahlan mempunyai 2 buah helikopter yang dibelinya sebelum operasi transplantasi hati. Selain helikopter, Dahlan juga memiliki mobil mercy, mercedez benz, dan mobil jaguar.

Dahlan yang Kontroversi

Dahlan juga dikenal kontroversial. Sepak tertangnya sering dibilang seperti koboi. Dari membuka pintu tol, ikut berdesak-desakan naik kereta rel listrik, sampai menginap di rumah petani. Langkah "sigap" Dahlan Iskan itu memang keluar dari prosedur dan tak lazim, bahkan bisa ditafsirkan

melanggar aturan dan tradisi. Namun itulah Dahlan, sosok yang selalu menarik untuk disimak.

Ada satu keunikan Dahlan yang sampai sekarang masih dianggap kontroversial, yakni tentang kebiasaannya memakai sepatu kets. Kebiasaannya itu terbawa sampai ia menjadi Direktur PLN hingga Menteri BUMN. Bisa dibilang, Dahlan lah satu-satunya pejabat di Indonesia yang ketika dilantik menjadi menteri memakai sepatu kets.

Apa sebenarnya yang melatarbelakangi Dahlan tidak mau melepaskan sepatu ketsnya? Yang pasti, apa yang dilakukan Dahlan sepertinya bukan cari sensasi. Jika dilihat dari latar historisnya, Dahlan memakai sepatu kets itu sudah lama, semenjak menjadi wartawan di Samarinda dan Tempo. Sepatu kets memang identik dengan wartawan. Sebab, pekerjaan wartawan itu berbeda dengan pekerjaan pegawai kantor yang telah tersusun rapi jadwalnya. Wartawan baru bergerak (bekerja) ketika terjadi insiden atau peristiwa, sementara pekerjaan orang kantor sudah pasti dan ditentukan. Wajar jika sepatu kets menjadi pilihan wartawan untuk menemaninya karena selain dinamis, sepatu kets juga tahan banting.

Hal itulah yang dilakukan Dahlan Iskan semenjak menjadi wartawan. Ia selalu menggunakan sepatu kets ke mana pun pergi. Hingga kebiasaan ini terbawa ketika ia menjadi bos Jawa Pos, Direktur PLN, hingga Menteri BUMN.

Selain itu, Dahlan juga memiliki kebiasaan yang aneh tapi juga bisa dibilang sederhana. Sebagai contoh, tidak jarang misalnya ketika memimpin rapat di Jawa Pos ia juga hanya memakai pakaian training. Bahkan hal itu sering dilakukan saat ia bertemu dengan rekan bisnis. Kesederhanaan Dahlan itu juga terbawa saat ia menjabat sebagai Dirut PLN, baru belakangan ia memakai jas kerena ingin menyesuaikan dengan keadaan. Tentu saja, apa yang dilakukan Dahlan bukanlah bentuk pencarian sensasi yang disengaja. Itu adalah karakter pribadi Dahlan dari dalam yang sudah lama melekat.

Tentu Dahlan melakukan itu semua juga karena alasan. Menurut beberapa sumber, kegandrungan Dahlan memakai sepatu kets semakin menjadi-jadi setelah ia selesai melakukan operasi hati. Menurut dokter, ia harus

selalu menjaga kesehatannya dengan cara berolahraga. Dahlan ingin selalu berjalan kaki ketika berangkat kerja sebagai bentuk olahraga. Karena itu, sepatu kets menjadi pilihannya yang paling nyaman.

Sementara memakai training ketika memimpin rapat atau bertemu koleganya adalah bagian dari strategi Dahlan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Biasanya, sehabis olahraga, ia langsung menuju kantor tanpa bolak-balik ke rumah terlebih dahulu. Itu ia lakukan supaya waktu tidak terbuang sia-sia di jalan Jakarta yang penuh dengan kemacetan.

Selain itu, hal kontroversial lainnya adalah Dahlan pernah naik ojek dari kampus ITB menuju Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Ia juga pernah membuat terkejut penumpang kereta *commuter line* jurusan Jakarta-Bogor saat naik dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Bogor untuk mengikuti rapat kabinet di Istana Bogor, Jumat pagi, 23 Desember 2011.

Dahlan dan Terobosan Birokrasi

Sepak terjang Dahlan Iskan banyak diapresiasi publik. Namun satu hal yang patut diajungin jempol dari sosok Dahlan Iskan ini adalah keberaniannya melakukan terobosan dalam bidang birokrasi. Ketika menjadi Direktur PLN, ia merubah birokrasi PLN yang kaku menjadi lentur, yang berlapis-lapis menjadi beberapa lapis, yang rumit menjadi aplikatif. Di PLN, Dahlan begitu antusias bekerja. Ia berkomunikasi dengan siapa saja. Bahkan, ia telah berkomunikasi lebih dari 40 ribu karyawannya dalam forum CEO Notes. Melalui CEO Notes inilah Dahlan melakukan komunikasi tentang visi dan misinya membangun PLN ke depan. Dahlan juga memberikan motivasi, supporting, dan jalan keluar ketika karyawannya mengalami kebuntuan.

Selama 6 bulan menjabat sebagai Dirut PLN, perubahan-perubahan nyata terjadi di tubuh PLN. Dahlan telah menyelesaikan permasalahan listrik yang awalnya sering mati. Ia juga *melaunching* gerakan sehari sejuta sambungan. Ia mereformasi birokrasi PLN yang berbelit. Pada Mei 2011, misalnya, ia menetapkan bulan tanpa surat perintah perjalanan

dinas (SPD). Setiap karyawan PLN yang melakukan perjalanan dinas tidak ada penggantian uang perjalanan. Program bulan tanpa surat perjalanan ini selain untuk menghemat anggaran PLN, juga dalam rangka untuk merangsang karyawan memanfaatkan fasilitas yang ada.

Selain disiplin, Dahlan juga dikenal sosok yang tidak menghambur-hamburkan anggaran negara. Ia berhasil menghemat pembelian trafo dari Rp 120 miliar menjadi Rp 67 miliar untuk 5 trafo yang dipasang di Bekasi, Gandul, Cibatu, Cilegon, dan Kembangan. Tahun 2011, ia bahkan menghemat anggaran trafo menjadi Rp 37 miliar. Tanpa diduga sebelumnya, PLN pun mampu membukukan keuntungan sekitar Rp 2,8 triliun rupiah hanya dengan waktu triwulan pertama tahun 2011 (Ecep dkk, 2013).

Berkat kerja kerasnya, Dahlan mendapat penghargaan sebagai *Marketer of The Year Indonesia* (MOTY) 2010. Penghargaan itu diberikan karena keberhasilannya menahkodai Perusahaan Listrik Negara.

Inovasi Dahlan

Pada Desember 2012, Dahlan memperkenalkan secara resmi mobil sport listrik buatan anak bangsa, Tucuxi di Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Pembuatan mobil listrik, baik yang berkonsep citycar maupun Tucuxi, merupakan proyek pribadinya.

Meski masih menjadi proyek pribadi, ke depan pemerintah menginginkan agar mobil listrik bisa diproduksi secara massal dan bisa menjadi mobil nasional di masa mendatang. Ambisi inilah yang dianggap Dahlan sangat mendesak untuk direalisasikan sehingga ke depan, Indonesia tidak bergantung lagi dengan BBM

Namun sayang, saat menjajal mobil listriknya, Dahlan Iskan sebagai pemegang kemudi dan mekaniknya Ricky mengalami kecelakaan di Magetan setelah mengalami masalah pada rem pada 5 Januari 2013. Beruntung keduanya tidak mengalami cedera berarti.

Pada 8 Juli 2013, Dahlan menerima gelar *honoris causa* di bidang komunikasi dan penyiaran Islam dari IAIN Walisongo Semarang. Rektor IAIN Walisongo Semarang menilai Dahlan sebagai sosok inspiratif, aka-

demisi, pengambil kebijakan dan implementor program. Walau tidak menyelesaikan pendidikan di IAIN tapi bisa sukses di bidang usaha dan pemerintahan.

Gaya “kepemimpinan taktis” Dahlan ternyata memesonanya SBY. Hingga akhirnya, Demokrat, partai yang dekat dengan sosok SBY ini menawarkan Dahlan untuk ikut menjadi peserta konvensi capres 2014. Dahlan pun bersaing ketat dengan para tokoh populis lainnya, seperti Ali Masykur Musa, Anies Rasyid Baswedan, Dino Patti Jalal, Endriartono Sutanto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Para peserta konvensi pun melakukan sejumlah strategi dan komunikasi politik untuk memperebutkan rekomendasi partai berlambang piramida tersebut. Selain itu, perang gagasan juga terjadi untuk mengukur kapasitas dan kompetensi analisis capres dalam menghadapi persoalan bangsa ini. Tidak terkecuali oleh Dahlan Iskan.

Salah satu gagasan Dahlan yang seting dikemukakan di berbagai kesempatan adalah gagasannya terkait energi. Mantan Menteri BUMN itu mengatakan, dirinya akan fokus dalam enam kategori energi, yakni BBM, blok migas, gas hulu dan hilir, listrik, batubara dan geothermal.

Menurutnya, energi ibarat kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat tiap hari. Karenanya Dahlan mengajak semua pihak untuk melakukan penghematan energi. Pasalnya selama ini masyarakat seolah tak sadar pentingnya untuk melakukan penghematan energi termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Dahlan sadar betul bahwa ke depan, energi akan menjadi persoalan yang sangat besar jika tidak ditangani dengan baik. “Kita praktis menghadapi persoalan besar di semua sektor energi. Semua harus kita atasi dan kita bangun. Kalau tidak maka ke depan kita tidak akan punya cadangan pasokan gas ataupun BBM,” ujar Dahlan dalam pidato politiknya dalam Konvensi Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Pria yang hobi memakai sepatu kets tersebut mengungkapkan bahwa konsistensi menjadi modal penting pemerintah ke depan. “Saya percaya bahwa dengan kemajuan ekonomi secara konsisten terjadi selama 10

terakhir ini, sudah saatnya Indonesia melangkah pada tahapan baru untuk menuju kesejahteraan dalam bidang energi.” Tegasnya.

Sebelumnya, dalam forum yang sama Dahlan memiliki impian yang besar jika terpilih menjadi presiden. Seperti disampaikan kepada wartawan detik.com (29/08/2013), mimpi pertama Dahlan adalah ingin agar Indonesia menjadi negara besar dalam waktu 5 tahun dengan GDP paling tidak 2.000 billion US\$. Menurut Dahlan, jika hal itu terwujud maka Indonesia bisa menjadi negara terbesar nomor 9 di dunia mengalahkan Meksiko dan ekonomi Spanyol.

Mimpi lainnya adalah cita-citanya untuk memperbaiki ranking Indonesia dalam MDG'S. Menurut Dahlan, Indonesia saat ini berada di nomor 122 jauh di bawah Vietnam nomor 75. Padahal Indonesia pernah di atas Vietnam. Beberapa aspek tersebut menjadi fokus perhatian jika memang terpilih menjadi presiden nantinya.

Kerja Kerja Kerja! adalah spirit yang menjadi gambaran betapa Dahlan serius untuk membenahi persoalan bangsa. Satu persoalan mendasar yang menurut Dahlan menjadi akar persoalan adalah ketidakmauan. Pemerintah seringkali tidak mau berbuat ketika masalah datang. Apalagi dinamika politik membuat pemerintah kadang tersandera untuk berbuat.

Bahkan, Dahlan pun pernah menjadi korban dinamika politik saat dikait-kaitkan dengan beberapa kasus terkait posisinya sebagai Dirut PLN, seperti Dahlan dianggap membuat PLN merugi karena laba yang didapatkan PLN tahun 2011 sebesar 7,2 triliun berkurang 28,7% dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 10,1 triliun. Padahal beban pengeluaran perusahaan justru naik.

Kasus lain yang pernah menyikuk Dahlan adalah saat audit BPK menemukan kerugian 37 triliun pada 2009/2010 akibat penggunaan solar untuk beberapa pembangkit listrik. Dahlan dianggap bertanggung jawab akan hal tersebut. Namun, semua itu dilalui Dahlan dengan sikap tenang. Dahlan optimis kebijakan yang diambilnya lebih besar manfaatnya dibanding dengan mudharatnya.

Sekarang, langkah Dahlan untuk menuju kursi capres 2014, masih ditentukan dari hasil konvensi 2014. Jika nanti terpilih, maka Dahlan juga

memiliki PR tersendiri untuk menguatkan konsoliditas partai demokrat, yang saat ini juga sudah mulai retak. Apalagi, dengan beberapa kasus korupsi yang menimpa kader partai tersebut, Dahlan juga harus meyakinkan kepada publik bahwa partai pengusungnya masih memiliki jiwa yang bersih. Akankah Dahlan akan mendapat kereta dari partai demokrat untuk bertarung dalam pilpres 2014? Tentu menarik untuk dinantikan.

Menunggu Restu Demokrat

Pasca tembus dalam 11 peserta konvensi partai demokrat, banyak pihak yang mulai memperhitungkan Dahlan sebagai salah satu kandidat capres 2014 nanti. Tetapi, Dahlan tidak ingin menanggapi hal tersebut secara serius.

Dahlan menjelaskan bahwa partisipasinya mengikuti konvensi hanya ingin memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara di sisa-sisa umurnya. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, Dahlan memang cukup pantas untuk menduduki posisi tersebut.

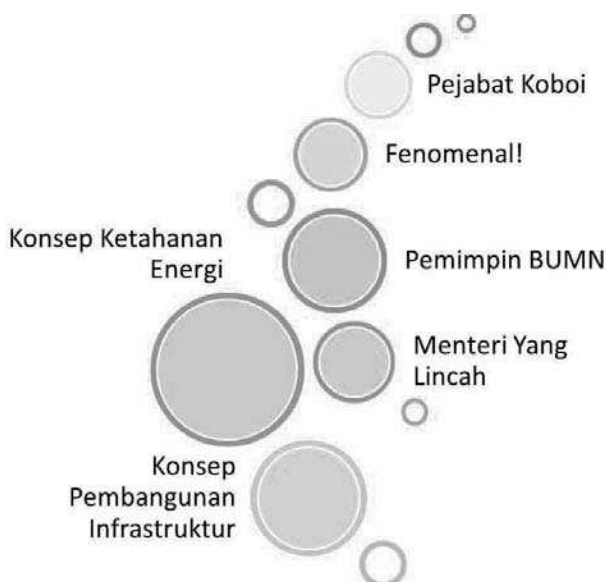
Dalam kacamata politik, Dahlan juga memiliki modalitas yang cukup kuat. Pertama, Dahlan selama ini dikenal pejabat publik yang amanah dan bekerja cepat. Hal itu terlihat pada gebrakan-gebrakan yang dilakukan saat menjadi Direktur PLN maupun saat menjadi Mentari BUMN.

Kedua, sebagai mantan jurnalis, Dahlan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat meningkatkan relasi politik atau menambah votegatersnya. Selain itu, Dahlan tidak memiliki masalah berarti soal finansial karena mempunyai bidang usaha yang cukup sukses. Apalagi, jika Demokrat merestui akan menambah dorongan finansial yang dapatnya.

Dahlan juga cukup dekat dengan basis ulama. Dahlan Iskan dididik dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren milik keluarga ibunya, yaitu Pesantren Sabilil Muttaqin di Magetan. Melanjutkan ke IAIN Samarida tapi tidak tamat. Menurut Dahlan pelajaran yang didapatkan di bangku kuliah sudah dipelajarinya di pesantren.

Terakhir, hadirnya Dahlan menjadi peserta konvensi capres Partai De-

mokrat juga menjadi tiket penting untuk semakin dikenal publik. Bukan tidak mungkin jika ia gencar melakukan sosialisasi elektabilitasnya akan semakin naik. Grafik elektabilitas Dahlan memang naik. Bahkan di antara peserta konvensi capres Partai Demokrat, ia berada di peringkat teratas. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu. Ini menunjukkan bahwa Dahlan berpeluang besar memenangi konvensi dan bukan tidak mungkin akan mendapatkan *golden ticket* dari Demokrat menuju pilpres 2014.



Namun demikian, hal yang perlu dihindari Dahlan ialah ihwal gebrakannya yang terlalu over. Dahlan memang banyak melakukan gebrakan di institusinya, namun tidak sedikit blunder yang ia ciptakan. Salah satu kasus yang disorot terkait gaya “urakan” Dahlan saat memimpin Kementerian BUMN adalah laporannya kepada Badan Kehormatan DPR terkait sejumlah anggota DPR yang diduga melakukan “pemerasan” ke sejumlah BUMN. Belakangan Dahlan merevisi laporan tersebut, setelah isu tersebut mengemuka di publik.

Selain itu, tantangan lain Dahlan tentu tentang kendaraan partai. Jika ia tak bisa memenangkan konvensi capres Partai Demokrat, peluangnya

untuk bisa menjadi capres akan semakin menciut. Sebaliknya, jika ia bisa memenangkan konvensi, maka peluangnya akan terbuka lebar. Apalagi Dahlan merupakan bos media yang berpengaruh di negeri ini. Dengan media yang dimiliki, ia akan dengan mudah mendapatkan publisitas yang pada gilirannya akan bisa menaikkan elektabilitasya.

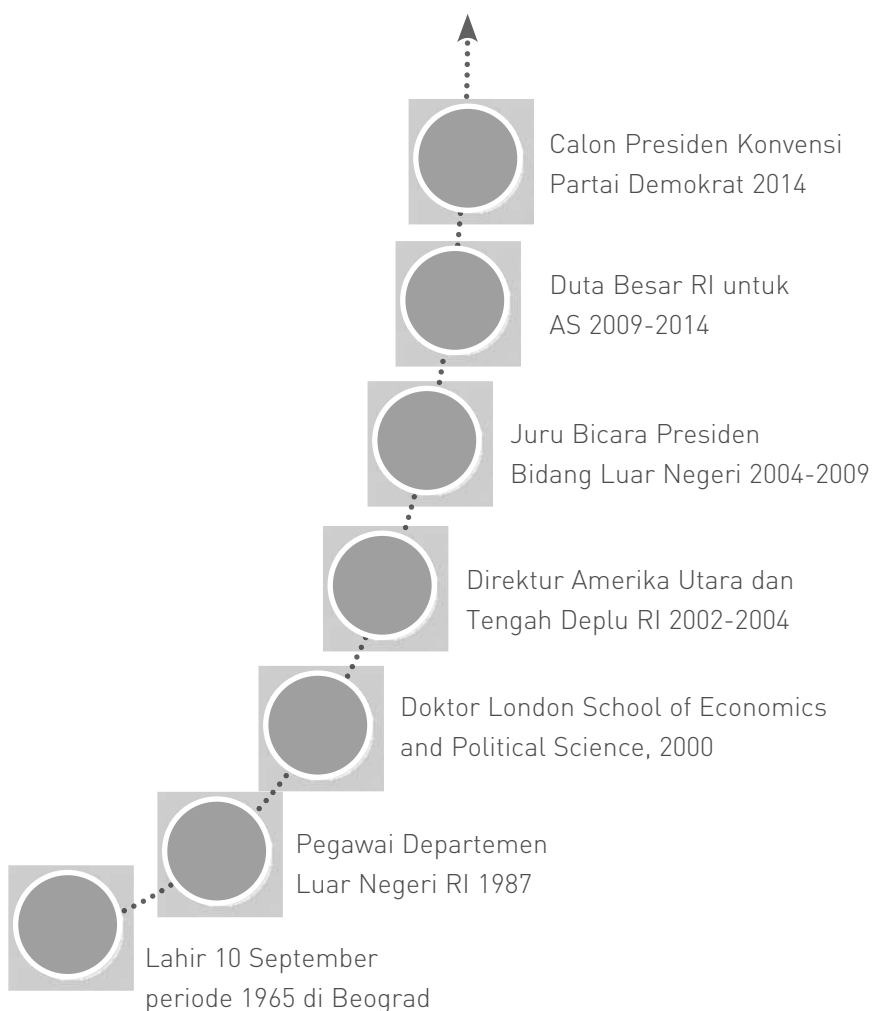
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Dari sisi peluang, Dahlan Iskan cukup besar untuk menjadi capres di Pilpres 2014. *Pertama*, Dahlan selama ini dikenal pejabat publik yang amanah dan bekerja cepat. Hal itu terlihat pada gebrakan-gebrakan yang dilakukan saat menjadi Direktur PLN maupun saat menjadi Mentari BUMN. *Kedua*, hadirnya Dahlan menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat juga menjadi tiket penting untuk semakin dikenal publik. Bukan tidak mungkin jika ia gencar melakukan sosialisasi elektabilitasnya akan semakin naik. Dan benar, grafik elektabilitas Dahlan memang naik. Bahkan di antara peserta konvensi capres Partai Demokrat, ia berada di peringkat teratas. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu.

Namun demikian, hal yang perlu dihindari Dahlan ialah ihwal gebrakannya yang dianggap terlalu over. Dahlan memang banyak melakukan gebrakan di institusinya, namun tidak sedikit “blunder” yang ia ciptakan.

DINO PATTI DJALAL

Pemimpin Potensial





Namanya muncul ke permukaan publik ketika dipercaya oleh Presiden Yudhoyono sebagai Juru Bicara Presiden. Setelah itu, ia kemudian dipercaya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Doktor lulusan *London School of Economics* ini merupakan diplomat karir yang meretas jalannya mulai dari Jubir Satgas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur (P3TT), Kepala Departemen Politik KBRI Washington dan Direktur Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri. Lahir dari keluarga diplomat membuat Dino Patti Djalal pun memilih karier sebagai seorang diplomat. Kariernya sebagai diplomat dimulai pada 1987. Konsistensinya sebagai diplomat terinspirasi rekam jejak sang ayah, Hashim Djalal sebagai diplomat ulung. Sebagai peserta konvensi Demokrat, ia mempromosikan gerakan Indonesia Unggul, 45-21. Gerakan tersebut digagasnya mengacu pada tantangan generasi muda yang terbesar saat ini yaitu bagaimana mewujudkan nilai-nilai 45 dengan realita di abad ke-21.

Dino lahir di Beograd, Yugoslavia, 10 September 1965. Ia lahir dari pasangan Hasyim Djalal (ayah) dan Jurni (ibu). Orang tuanya berasal dari Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Sang ayah merupakan seorang diplomat Indonesia ternama. Pada 1979, setelah menamatkan pendidikan SD dan SMP-nya di Al Azhar, Jakarta, Dino hijrah ke Amerika mengikuti sang ayah yang ditugaskan sebagai wakil duta besar di negara tersebut. Dia pun melanjutkan pendidikan ke McLean High School, Amerika Serikat.

Meskipun dikenal sebagai anak orang nomor dua di Kedutaan Besar Republika Indonesia (KBRI). Namun hal itu tidak membuatnya sungkan untuk mengambil pekerjaan sampingan. Apalagi di AS, banyak remaja yang bekerja sambil sembari sekolah. Dino pun menjadi tukang cuci piring di KBRI. Untuk pekerjaan tersebut dia dibayar 10 dolar setiap usai bekerja (detik.com, 2012). Dia selalu ingat pesan ayahnya, bahwa, melakukan pekerjaan rendah akan mengubah cara pandanginya dalam memandang hidup. Pengalaman tersebut akan membantunya untuk menjadi orang yang lebih berguna dan kuat di masa depan.

Apa yang disampaikan sang ayah ternyata benar. Pengalaman kerja membuat Dino bertanggung jawab, menghargai aturan dan disiplin. Dia percaya, kalau seseorang ingin merasakan sukses, dia harus mencari guru yang keras dan bisa menghukum ketika dirinya salah. Guru yang bisa menempa dirinya menjadi orang yang berwatak dan menyiramnya dengan ilmu pengetahuan untuk selalu berprestasi. Ilmu yang bisa diserap dari satu mentor bisa menyamai ratusan buku dan duduk bertahun-tahun di bangku kuliah.

Kariernya sebagai diplomat dimulai pada 1987. Dia bergabung dengan Departemen Luar Negeri setelah menyelesaikan pendidikan S-1-nya di Universitas Carleton. Dia kemudian dipercaya menjadi asisten Dirjen Politik Wiryono Sastrohandoyo setelah menyelesaikan latihan di Pusdiklat dan merampungkan MA dari Simon Fraser University, Kanada. Sebenarnya keinginan Dino adalah masuk Direktorat Organisasi Internasional, namun akhirnya dia memetik pelajaran berharga. Ternyata sebagai asisten Dirjen Politik malah membuahkan jenjang karier yang lebih bermanfaat bagi Dino. Dia dibolehkan memilih lokasi penempatan dan pilihan itu jatuh ke KBRI London. Di sana Dino berkesempatan meraih gelar doctor di bidang hubungan internasional dari *London School of Economics and Political Science* (pemilu.com, 2013)

Berbagai penugasan penting pernah diemban, antara lain sebagai Juru Bicara Satuan Tugas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur (P3TT), Kepala Departemen Politik KBRI Washington, dan Direktur Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri. Sebagai kepala kantor di KBRI Washington, Dino mewajibkan seluruh stafnya untuk mengambil cuti setiap tahunnya. Ini karena, setahun penuh mereka memberikan dedikasi

terbaik kepada negara. Oleh karena itu, negara juga harus balik mewajibkan mereka untuk membayar utang pada keluarga. Menurutnya, ini bagian dari modernisasi birokrasi Indonesia. Pegawai negeri juga harus bisa menikmati hidup secara wajar. Ia pun sempat menjabat sebagai Direktur Urusan Amerika Utara dan Amerika Tengah di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, sebelum akhirnya bersama Andi Mallarangeng kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Presiden ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia (merdeka.com, 2013). Untuk menduduki posisi-posisi itu, Dino mengembangkan kemampuan profesional pribadi yang dianggap strategis yakni cara mengambil kebijakan, analisa, berpidato, menulis pidato, lobi dan kepemimpinan. Dino mengaku mengasah kemampuan itu dengan susah payah, bukan datang secara alami sejak awal. Sebagai diplomat Dino mempunyai satu metodologi konvensional yaitu semakin dia melihat orang menjauhi atau membenci Indonesia, maka dia akan semakin gencar berupaya mendekati orang itu. Hal ini sesuai dengan nasehat sang ayah. “Jadi orang pandai saja tidak cukup. Kamu harus pandai-pandai.” Katanya. Menurutnya, dalam melakukan diplomasi yang perlu disadari adalah sulit bagi Indonesia untuk disegani di panggung internasional kalau Indonesia dipandang sebagai bangsa yang selalu marah dan mudah tersinggung. Untuk menjadi pemimpin di pentas dunia, Pemerintah Indonesia harus bisa tegas tapi juga bisa luwes, moderat, dan kreatif.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia abad 21 menuntut bukan hanya sosok diplomat pejuang, namun juga diplomat innovator. Bebas aktif akan selalu relevan sepanjang masa. Namun tanpa internasionalisme, bebas aktif akan hambar dan kehilangan jiwanya. Dengan internasionalisme, diplomasi bebas aktif Indonesia berhasil menciptakan Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, ASEAN, Konvensi Hukum Laut, dan lainnya. “Bung Hatta adalah proklamator dan pencetus diplomasi bebas aktif. Dia adalah contoh terbaik di mana nasionalisme dan internasionalisme berpadu dengan subur dalam diri seorang pemimpin. Setelah menjadi praktisi di dunia diplomasi, Dino melihat ada satu konsep yang lebih penting dari kekuatan yaitu otoritas yang terdiri dari pengaruh, kredibilitas, atau kewibawaan.

Dalam bidang diplomasi, Dino pun sadar betul arti penting masyarakat diaspora. Diaspora adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ting-

gal di luar negeri bahkan ada yang telah berganti kewarganegaraannya. Menurutnya, diaspora Indonesia adalah komunitas global besar yang padat karya, modal, teknologi, budaya, jaringan, dan idealisme. Mereka adalah aset besar bangsa Indonesia yang selama ini tidak terdeteksi dalam radar pemerintah Indonesia.

Dari pengalamannya bergaul dengan komunitas diaspora, Dino mengambil kesimpulan bahwa nasionalisme tidak selalu bisa diukur dari paspor tapi dari isi hati. Banyak orang Indonesia karena berbagai alasan ganti paspor dan menjadi warga negara asing. Namun umumnya mereka terus mencintai Indonesia dan selalu siap melakukan apapun untuk tanah airnya. Kepedulian yang besar terhadap komunitas ini membuatnya menggagas dan mendukung secara penuh Kongres Diaspora Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menggali potensi yang sangat besar dari komunitas diaspora untuk kepentingan bangsa (<http://www.diaspora-indonesia.org>, 2013).

Dalam perjalanan kariernya, Dino merangkum hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal itu antara lain terbuka pikiran, tidak meremehkan hal-hal kecil, dan bahwa ketekunan lebih penting daripada bakat. Selain itu jangan menganggap diri penting dan tahu segalanya, bahwa ambisius itu bagus, dan jangan ragu atau takut tampil beda.

Bagi Dino, hubungan dengan orang lain juga sangat penting dalam mencapai sukses. Menjaga integritas juga hal yang tak boleh dipinggirkan. Hal lain yang tak kalah penting adalah menjadi diri sendiri. “Anda boleh saja merasa diri unik, nyentrik, dan hebat, namun tanpa suatu prestasi, Anda tidak akan dianggap orang,” katanya. Menurutnya, saat sekolah dulu banyak orang yang menganggap dia seorang anak yang culun dan tidak keren. Dia tidak punya pacar dan hanya fokus untuk belajar dan bekerja dengan keras. Beberapa teman bahkan tak ragu menertawainya. Namun dia tidak pernah menyesal menjadi culun. Menurutnya, mereka yang dikenal culun kini justru menguasai dunia.

Mereka yang menertawakan orang-orang culun tersebut kini bekerja pada mereka. Silicon Valley, Wall Street, Belangore, Zhenzen, Samsung, Sony, Apple, Google, dan lainnya dikendalikan oleh orang-orang culun. Negara berkembang yang bergerak saat ini adalah akibat pasukan orang-orang culun. “Jadi bila ingin menang di abad 21, jadilah culun dan bangun kekuatan culun,” katanya.

Menjadi Ayah dan Seorang Muslim

Setelah mempersunting Rosa Rai Djalal yang berprofesi sebagai dokter gigi, Dino dikaruniai tiga orang anak dengan nama Alexa, Keanu, dan Chloe. Bagi Dino, sehebat-hebatnya musik Wolfgang Amadeus Mozart tetapi tidak akan mampu menandingi keindahan suara tawa riang anak-anak kita di rumah.

Dino memang dikenal sebagai seorang ayah yang penyayang dan selalu menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anaknya meskipun dirinya sangat sibuk. Dino yakin bahwa waktu berkualitas saja tidak cukup, yang terpenting adalah kuantitas waktu. Semakin banyak waktu yang dihabiskan dengan anak-anak, semakin mampu orang tua untuk mengerti dan mengenal anak-anaknya.

Sebagai orang tua, bagi Dino, penting untuk mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai sosial agama. Selain itu, mengajarkan mereka untuk memiliki cara pikir yang tepat. Anak-anak harus ditempa untuk menguasai kemampuan digital, menganalisa, berpikir kreatif, ilmu logika, membentuk jaringan, dan penguasaan bahasa.

Idealnya anak-anak Indonesia harus bisa bahasa Indonesia, daerah, dan Inggris. Namun lebih ideal lagi, bila anak-anak juga bisa bahasa Asia lain, misalnya bahasa Mandarin serta satu bahasa Eropa. “Kalau ini semua dikuasai, percayalah anak-anak kita akan unggul kalau nanti mengadu nasib di lapangan kerja,” katanya.

Dia pun mengingatkan agar orang tua tidak sering mengajak anak-anaknya ke mal. Anak-anak yang terlalu sering menghabiskan waktunya di mal akan menjadi anak yang bodoh dan dangkal. Mereka pun bisa menjadi generasi yang lembek. Anak-anak Indonesia kini mempunyai fasilitas yang jauh lebih baik dari masa kecil orang tuanya.

Televisi, komputer, telepon pintar, email, mal, dan lainnya. Tapi kalau tidak hati-hati, semua itu bisa berdampak memanjakan mereka dan membuat mereka menjadi malas, kurang fokus, dan kurang gigih. “Kita sebagai orang tua harus selalu mencermati hal ini. .” katanya. Menurutnya, ada satu momen menjadi seorang ayah yang tidak pernah dia lupakan. Yaitu ketika sedang naik mobil bersama anaknya, Keanu, yang baru berusia enam tahun. Saat itu, Keanu bertanya. “Papa apakah papa bersyukur?” tanyanya. Dino pun tersentak dan bertanya maksud dari pertanyaan itu.

Sang putra pun menjawab. “Papa sudah hebat jadi duta besar, sering

masuk TV, punya rumah besar, punya uang, punya supir, dan banyak pembantu, disayang sama mama, Alexa, Keanu, dan Chole, disayang sama opa eye (SBY). Papa bersyukur *ngak?*. Malam itu, Dino sadar bahwa Keanu mengingatkannya bahwa orang yang unggul adalah orang yang bersyukur. Uang tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Banyak orang yang sangat kaya yang merasa kosong. Kekosongan tersebut harus diisi dengan cinta, kebaikan, kebijaksanaan, dan semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang tak kalah penting, agama.

Sebagai seorang Muslim, Dino sangat peduli dengan perkembangan umat Islam di masa depan. Menurutnya, umat Islam saat ini masih banyak merujuk pada abad ke-13 sebagai abad kejayaan Islam, karena memang pada zaman itu Islam menjadi peradaban tertinggi dunia melebihi peradaban Eropa, Tiongkok, dan India. Namun menurutnya, Muslim harus berusaha jangan sampai kebanggaan ini hanya bersifat nostalgia dan terlalu terpaku pada sukses masa lalu. Umat Islam harus berupaya sebisa mungkin agar abad ke 21 bisa menjadi abad terbaik penganut Islam, bahkan melebihi kejayaan Islam di abad ke-13.



embassyofindonesia.org

Tantangan strategis bagi umat Islam dewasa ini adaah timbulnya garis pemisah yang semakin kental antarkelompok Syiah dan Sunni. Ini sedang terjadi di Timur Tengah dan dia berharap bangsa Indonesia jangan sampai terseret masuk dalam konflik ini. Asia Tenggara khususnya Indonesia, harus bisa menjadi benteng agar umat Islam tetap kompak, rukun, dan harmonis. Kalaupun ada perbedaan antar kelompok, tidak meluas dalam aksi kekerasan. Umat Islam Indpnesia juga harus selalu menjaga hubungan baiknya dengan umat agama lain. Tanpa orang Kristen, Hindu, Budha, atau Konghucu, Indonesia bukan lagi Indonesia.

Dia yakin, Indonesia ke depan bisa menjadi gravitasi umat Islam dunia. Secara spiritual kiblat umat Iskam sedunia akan selalu ka'bah di Mekah dan tidak akan pernah berubah. Namun secara geopolitik, politik, ekonomi, dan kultural, kiblat umat Islam bisa bergeser ke tempat lain selain Arab Saudi. Indonesia bisa menjadi gravitasi dunia Islam karena umat Islam Indonesia maju, damai, dan toleran. Demokrasi Indonesia mapan, ekonomi tumbuh pesat, dan politik stabil. Situasi Indonesia kontars dengan gejolak-gejolak panas yang sekarang terjadi di Timur Tengah setelah revolusi *Arab Spring*. Namun umat Islam Indonesia tetap harus meningkatkan kemampuan dirinya.



Cara terbaik bagi umat Islam di Indonesia untuk maju adalah dengan membangun kewirausahaan. “Di sini sebenarnya kita mempunyai banyak peluang. Jangan lupa, Nabi Muhammad adalah pedagang yang apik,” ujarnya. Islam masuk ke Indonesia bukan melalui perang tapi melalui perdagangan dan gerakan nasionalisme Indonesia pun dimulai antara lain dengan munculnya Syarikat Dagang Islam. Melihat potensi tersebut, Dino menyangkan mengapa selama puluhan tahun di abad ke-20, umat Islam Indonesia menjadi layu semangat wirausahanya. Namun yang jelas sekarang, agama ini mempunyai peluang untuk membentuk jutaan wirausahaan Muslim modern di Indonesia.

Dino yakin sekali semangat kewirausahaan tersebut, etos untuk selalu mencari nilai tambah, dan semangat berinovasi dan sukses, merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang perlu terus digali dan dijalankan oleh umat kita. Dino ingin melihat lebih banyak lagi ustad bisa memberikan siraman batin dan inspirasi bagi jamaah untuk berprestasi, tidak hanya melulu bicara soal surga dan neraka.

Dino pun percaya dengan kekuatan doa. Saat ini manusia hidup di masa internet bisa mengirimkan pesan kepada siapapun dan di mana saja hanya dalam beberapa detik. Namun jarak terpendek antara dua orang bukanlah email, sms, atau telepon. Jarak yang paling dekat adalah doa. “Doa anda pada saya akan menghubungkan kita dan membuat kita semakin dekat dari pada apapun di dunia ini,” ujarnya.

Indonesia Unggul

Menyusul namanya kerap disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Dino pun mulai aktif untuk mempromosikan diri dan pemikirannya. Salah satunya dengan membuat gerakan Indonesia Unggul, 45-21. Gerakan tersebut digagasnya mengacu pada tantangan generasi muda yang terbesar saat ini yaitu bagaimana mewujudkan nilai-nilai 45 dengan realita di abad ke-21 (www.modernisator.org, 2008)

Menurutnya, apa yang dulu berlaku pada 1945 kini telah jauh berubah. Pada tahun tersebut, pejuang bangsa meneriakkan revolusi, kini generasi muda bicara reformasi atau transformasi. Dulu pejuang bangsa

memperjuangkan kemerdekaan, kini generasi muda mengusung *inter-dependence*. Dulu negara ini berjuang mati-matian melawan kolonialisme, kini Indonesia menjadi bagian dari globalisme. Dulu ancaman bangsa datang dari luar dalam bentuk subversi atau invasi asing. Kini ancaman lebih banyak dari dalam negeri sendiri dalam bentuk korupsi, terorisme, separatisme, intoleransi, dan lain-lain. Dulu Indonesia disebut sebagai dunia ketiga, kini negara ini mempunyai status yang lebih bermartabat sebagai negara berkembang (*emerging market*).

Dulu pejuang kemerdekaan bercita-cita agar Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Sekarang itu sudah tercapai dan bahkan berdiri sejajar saja tidak cukup. Indonesia harus berdiri di garis terdepan pergaulan antar bangsa. Jadi semangatnya tetap sama, namun lapangannya sudah berbeda dan sesuai dengan itu. “Ambisi kita sebagai bangsa juga sudah berubah,” ujarnya.



Pemuda di zaman sekarang punya kekuatan begitu dahsyat. Pemudalah yang menyalakan api reformasi di Indonesia pada 1998. Pemudalah yang menyumbangkan rezim-rezim kuat di Timur Tengah. Pemudalah yang kini menjadi motor dari globalisasi, inovasi, dan ekonomi kreatif. Pendeknya pemuda kini telah menjadi kekuatan super yang bisa mengubah peta politik, ekonomi, dan sosial dunia. Generasi muda harus menjadi agen perubahan permanen. Bukan perubahan sesaat. Untuk itu, mereka harus bekerja keras untuk melepaskan Indonesia dari segala belenggu yang selama ini mengungkung energi produktif dan kreatifitas bangsa kita.

Generasi muda menurutnya tidak boleh lagi alergi dengan politik dan pemerintahan. Dino percaya untuk menghasilkan perubahan, generasi muda harus memulainya dari dalam bukan dari luar. Saat ini, mereka yang tergolong yang terbaik dan terpintar masih ragu masuk pemerintahan. Mereka masih menjauh karena maraknya korupsi, mobilitas karir yang kurang jelas, lemahnya insentif dan ragu apakah bisa menyesuaikan dengan budaya korporat pemerintah yang cenderung kaku. Mereka belum *sreg* dengan budaya korporat birokrasi. Yang paling mahal dari orang yang masuk ke pemerintahan atau politik adalah idealisme. Dari 10 orang idealis yang masuk, setelah 10 tahun mungkin hanya dua atau tiga yang bisa mempertahankan idealismenya.

Satu masalah besar bangsa ini adalah banyak orang yang masuk ke politik atau pemerintahan karena alasan yang salah. Ada yang masuk karena ingin dapat fasilitas atau ingin mendapat otot politik untuk melindungi bisnisnya atau ingin mencicipi kekuasaan atau ingin sekedar populer. Mereka masuk karena segala alasan namun mengabaikan alasan yang paling hakiki untuk terjun ke dunia politik atau pemerintahan, yakni untuk mengabdikan total pada negara dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Hal ini juga pernah dirasakan Dino saat memulai karirnya di pemerintahan dulu. “Saya meninggalkan bangku universitas dan masuk ke dunia pemerintahan pada 1986. Umur saya waktu itu 21 tahun, penuh dengan idealisme. Namun saya justru menemukan dunia yang kejam. Nilai hidup saya tercabik,” ujarnya.

Dino melihat maraknya korupsi, penindasan, dan keserakahan. Pelanggaran hak manusia, penyelewengan kekuasaan, serta otoritarianisme. Pengalaman ini justru menempa karakternya bukannya membuatnya mundur. Dia lambat laun belajar bagaimana berfungsi dalam dunia seperti itu dan bagaimana mengubahnya selangkah demi selangkah.

Pemimpin 2014

Dino mendapat pelajaran pertama dari politik bahwa dalam politik seseorang harus berhadapan dengan orang-orang yang nyata dan kehidupan yang nyata. Setiap keputusan mempunyai dampak langsung bagi hidup

dan nyawa orang. Karena itulah setiap keputusan harus diambil dengan tanggung jawab yang penuh.

Hal ini penting karena seringkali ada akademisi atau birokrat yang menjadi pejabat namun tetap berpikir abstrak dan tidak mempunyai koneksi yang riil terhadap permasalahan. Mereka tidak peduli apakah keputusan-keputusan yang mereka ambil akan bermamfaat dan berdampak positif bagi banyak orang atau tidak. Oleh karena itu, menurutnya, tahun 2014 lebih dari sekedar tahun pemilu atau tahun regenerasi politik. Tahun 2014 adalah masa di mana masyarakat Indonesia harus lebih jelas menentukan arah bangsa di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat dan dahsyat.

Tahun 2014 adalah masa di mana Indonesia harus mulai merancang secara rinci profil insan Indonesia di abad ke-21. Insan yang bukan saja punya hak-hak sebagai warga negara namun juga punya akta kelahiran, ijazah, pendidikan, listrik, air bersih, rekening bank, KTP, NPWP, pekerjaan, rumah yang layak, dan bermasa depan.

Pemikiran tersebutlah yang membuatnya percaya diri untuk mengambil panggung pada konvensi Calon presiden Partai Demokrat pada 15 Desember 2013. "Saya tidak haus kekuasaan. Namun saya haus pengabdian dan prestasi," ujarnya saat didapuk untuk membacakan pidato di depan peserta konvensi. Dia tidak menginginkan, dekade gemilang Indonesia lewat begitu saja dan hilang, sebagaimana sering terjadi pada bangsa lain.

Menurutnya, sudah waktunya Indonesia dipimpin oleh pemimpin masa depan. Ia tidak harus selalu berusia muda, karena ada juga anak muda yang berpikiran kolot. Namun yang jelas betapapun usianya ia harus berpikiran muda. Dia pun harus mampu menjadi pemimpin di pentas dunia yang mampu bersikap tegas tapi juga bisa luwes, moderat, dan kreatif. Luwes yang dimaksudnya adalah seorang pemimpin tidak pernah 'kawin' dengan satu ide namun 'kawin' dengan solusi. Sehingga begitu satu ide sudah tidak lagi memberikan solusi, maka dia akan mengadopsi ide berikut yang bisa menjanjikan solusi.

Semua orang bisa pintar berteori, jago berpidato, mahir berkomentar, lihai berdebat, dan pandai mencari popularitas. Namun tidak semua orang bisa menyelesaikan konflik, merancang kebijakan, mencari solusi, dan menangani masalah-masalah nasional yang sangat kompleks. Ke-

mampuan menggerakkan massa dan kemampuan menjalankan roda-roda pemerintahan adalah dua hal yang sangat berbeda. Presiden yang baik adalah presiden yang mempunyai kedua kemampuan ini. Presiden Indonesia 2014 harus menjadi presiden pendidikan dan inovasi. Pemimpin yang baik memang semestinya selalu mencoba menjadi populis. Namun kalau ia hanya terus mengedepankan populisme, maka di akhir jabatannya ia tidak akan mencapai prestasi apa-apa.

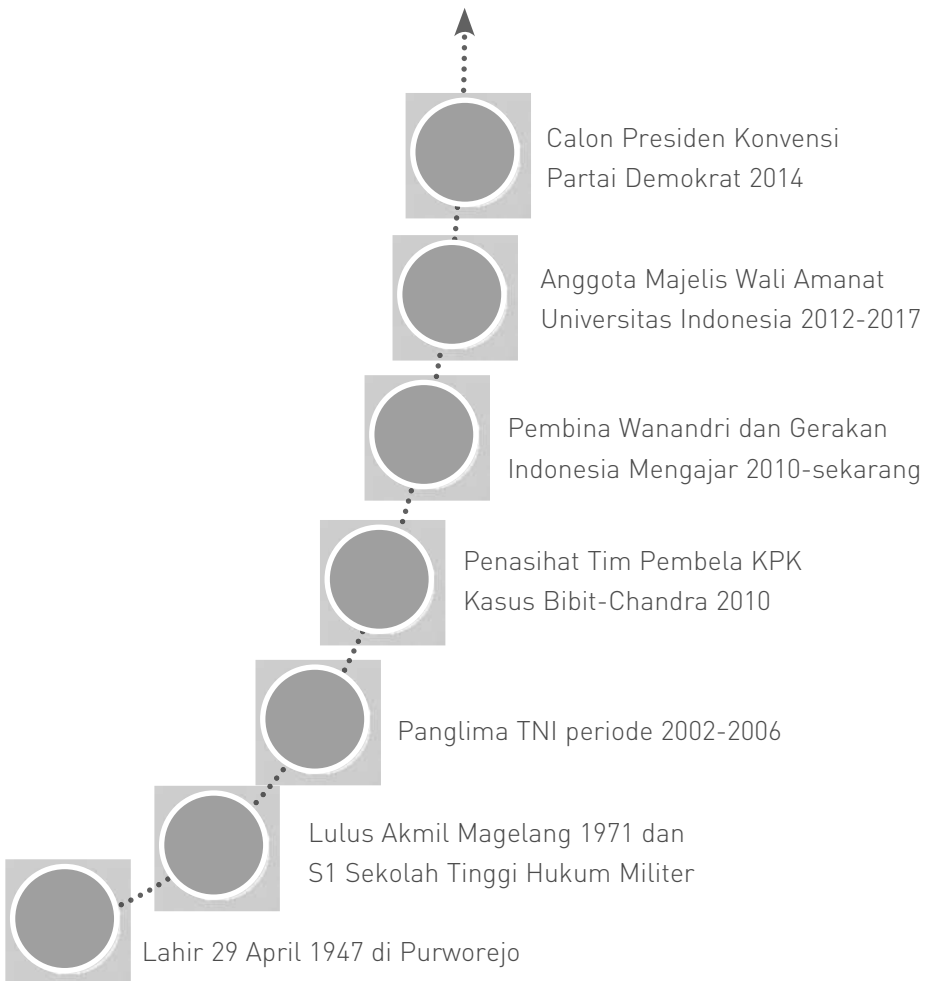
Apabila pemerintah dan parlemen bisa menghasilkan regulasi-regulasi pintar dan undang-undang yang inovatif, maka berbagai belenggu produktivitas akan hancur. Berbagai masalah bangsa dapat diselesaikan dan potensi Indonesia yang luar biasa akan dapat diwujudkan melalui prestasi.

Generasi politik 2014 menurutnya, harus bisa mengembalikan kepercayaan rakyat pada politik. Generasi ini diminta untuk terus mengubah nasib bangsa dari 'Indonesia Bisa' menjadi 'Indonesia Serba Bisa'. Apa artinya, secara ekonomi, bisa menjadi raksasa Asia, secara politik bisa menjadi demokrasi yang mapan, dengan politik yang berkualitas. Secara budaya, tradisi, dan modernitas tumbuh bersama secara harmonis. Secara sosial, rakyat bisa hidup bebas, rukun, dan bahagia dari sabang sampai merauke.

Dengan pemikiran yang maju dan berusia muda, Dino bisa saja tampil bersinar dalam pemilihan umum 2014. Namun hingga saat ini kontribusi dan gagasan-gagasannya belum cukup bergaung di telinga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Dino harus berhasil membereskan pekerjaan rumah terbesarnya yaitu mendongkrak elektabilitasnya yang masih rendah. Bila hal tersebut bisa diselesaikan dengan nilai sempurna, maka tak ada jalan yang sulit bagi Dino untuk mencapai puncak kepemimpinan di Indonesia.

ENDRIARTONO SUTARTO

Pemimpin Potensial





id.wikipedia.org

Pilih Dokter atau Militer?

Endriartono Sutarto lahir di Purworejo, 29 April 1947. Ayahnya seorang tentara bernama Sutarto dan begitu menjunjung tinggi kedisiplinan dan daya juang. Ibunya Siti Sumiarti, seorang ibu yang sudah bersusah payah melahirkannya dengan penuh cinta dan kesederhanaan.

Tahun 1947 negara belum sepenuhnya stabil. Meskipun Proklamasi Kemerdekaan sudah dikumandangkan dua Proklamator Republik Soekarno-Hatta, namun rupanya sang penjajah belum menyerah begitu saja. Belanda masih terus saja melancarkan agresinya untuk kembali menguasai tanah jajahan yang sudah digenggamnya selama 3,5 abad. Alhasil, pertempuran-pertempuran kecil masih kerap terjadi.

Kondisi tersebut tentu membuat keluarga Sutarto yang notabene seorang tentara harus hidup secara berpindah (nomaden). Sutarto kecil selalu dibawa berpindah-pindah sehingga Purworejo sesungguhnya lebih tepat disebut tempat untuk menumpang kelahirannya. Meskipun begitu, Purworejo tetap melekat dihati Sutarto. Purworejo merupakan kota kecil yang telah menjadi bagian dari sejarah hidupnya.

Kehidupan masa kecil Sutarto yang lekat dengan perjuangan dan dentuman bom merupakan modal penting dalam mengarungi masa-masa berikutnya. Aktivitas ayahnya yang seorang tentara telah membuatnya

begitu mafhum dengan nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme. Meski begitu, Sutarto kecil belum memiliki bayangan bahwa kelak ia akan mengikuti jejak sang ayah. Dia malah sempat ingin menjadi seorang dokter yang dimatanya merupakan profesi mulia karena bisa membantu banyak orang untuk meraih kesehatannya. Kisahnyapun begini!

Setelah melewati masa-masa kritis karena gempuran Belanda, hidupnya mengalami ketenangan setelah imperialis itu tak lagi menghujani Tanah Air ini dengan bom dan berondongan senjata. Karena itu, keluarga Sutarto dapat tinggal agak lama di suatu daerah atau kota. Ia menghabiskan masa remaja sampai kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP) di Jakarta. Lantas, ia melanjutkan studinya sampai jenjang SMA di Kota Kembang Bandung karena mengikuti penugasan ayahnya.

Setelah lulus SMA tentu saja ia harus menentukan pilihan apakah mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang prajurit atau berkuliah di universitas di luar dunia militer. Sebab, selain berkarier di TNI, ternyata ayahnya juga seorang psikolog yang tentunya kuliah di universitas umum. Sutarto pun pernah berniat untuk menjadi dokter sebagaimana sang ayah yang mengambil kuliah selain berdinasi di militer. Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung pun menjadi pilihannya.

Mengapa memilih kedokteran? Alasannya sangat sederhana bahkan klise: ingin membantu sebanyak mungkin orang, terutama orang-orang kecil. Dalam pandangannya, rakyat kecil yang sedikit sekali memiliki kekuatan materi tentu akan kesulitan untuk membayar biaya pengobatannya yang mahal ketika mereka sakit. Karena itu, Sutarto merasa tergerak hatinya untuk mengambil jalur pendidikan yang bisa mengarahkannya supaya dapat membantu banyak orang.

Ihwal keinginannya menjadi dokter, Sutarto kemudian menyampaikannya kepada ayahnya. Sang ayah tidak melarang, tapi hanya mengingatkan bahwa untuk menjadi seorang dokter dibutuhkan kedisiplinan tinggi. Sang ayah melihat kalau Sutarto belumlah memiliki tingkat kedisiplinan tinggi yang sesuai harapannya. Ayahnya menganggap kalau standar disiplin Sutarto harus ditingkatkan lagi. Sutarto pun harus ditatar dan digembleng lagi supaya mampu menyelesaikan kuliahnya tepat waktu.

Standar disiplin yang digunakan ayahnya sangat tinggi meski saat itu Sutarto sudah aktif di beberapa organisasi kepemudaan yang tentu saja

memerlukan aspek disiplin. Berbekal saran ayahnya tersebut, Sutarto kemudian berpikir bahwa profesi yang identik dengan kedisiplinan sesuai harapan ayahnya itu ialah tentara. Disamping itu, dengan menjadi tentara bukan hanya tingkat disiplinnya saja yang akan meningkat, namun juga rasa nasionalisme untuk membela Tanah Air dengan segenap rakyat didalamnya.

Maka, permenungannya tentang jalan hidup yang akan ditempuhnya berakhir pada kesimpulan: ia harus menjadi tentara seperti ayahnya. Sutarto pun mendaftarkan diri ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) yang bermarkas di Magelang. Pun sebelum dirinya mendaftar di AKABRI, Sutarto telah mendaftar di Fakultas Kedokteran Unpad Bandung. Masuk AKABRI seolah ingin membuktikan bahwa dirinya bisa seperti yang diharapkan ayahnya. Ia ingin memiliki dan menyaingi tingkat disiplin ayahnya dan tentara-tentara lainnya.

Yang menarik, sekalipun Sutarto anak seorang perwira TNI namun dalam mengikuti berbagai rangkaian tes masuk yang sangat sulit dan ketat tak pernah sekalipun membawa-bawa nama ayahnya. Ia tak ingin mendompleng nama ayahnya yang sebetulnya bisa saja dilakukan untuk memudahkan langkahnya. Ia ingin membuktikan kalau dirinya mampu berjuang sendiri.

Dan benar, akhirnya kerja kerasnya itu terbayar lunas dengan diterima sebagai calon prajurit TNI. Hasil kelulusannya tersebut merupakan pelengkap setelah sebelumnya ia juga berhasil lulus tes di Fakultas Kedokteran Unpad. Sungguh pencapaian yang tak bisa disamai semua orang karena dengan dua hasil tersebut menunjukkan bahwa Sutarto kuat secara fisik dan mumpuni untuk menjadi seorang intelektual. Dengan diterima masuk AKABRI yang notabene lebih banyak menguji unsur kekuatan fisik dan lulus dari Kedokteran Unpad yang tesnya lebih banyak berorientasi pada pengujian aspek intelektualitas, telah menjadikan seorang Endriar-tono Sutarto sebagai “manusia lengkap”.

Dengan keyakinan tinggi, ia merelakan hasil kelulusan di Fakultas Kedokteran Unpad menjadi bagian dari kenangan indah. Sutarto lebih mantap masuk AKABRI untuk mengikuti jejak ayahnya sekaligus menjadi pembela Tanah Air yang ia cintai.

Berkarier di Militer

Sutarto sadar bahwa ia telah memutuskan hal yang sangat besar dalam hidupnya. Memilih menjadi seorang prajurit ketimbang dokter merupakan pilihan mendebarkan ketika itu. Tidak mudah untuk menentukan dua hal yang berseberangan dengan konsekuensi hidup yang jauh berbeda. Dokter merupakan profesi elite yang menjamin kelaikan materi dan cenderung diharapkan oleh setiap mertua—jika kelak mau melamar seorang istri. Berbeda dengan tentara yang mengharuskannya tiap detik bertarung dalam maut karena tugasnya ada di medan peperangan.

Namun apapun, pilihan hidupnya sudah diputuskan. Sutarto memilih memberikan pengabdian dengan jalur yang berbeda dari keinginannya semula. Ia pun mulai menjalani pendidikan dan pelatihan di AKABRI Magelang dengan serius. Ia tak mau hanya bisa memutuskan namun nir-eksekusi. Hanya bisa membuat keputusan tanpa dilaksanakan. Menjadi anggota TNI ialah kebanggaannya. Menjadi seorang prajurit ialah proses pengabdian yang tak kalah mulianya ketimbang menjadi dokter.

Hari demi hari dilalui dengan antusias di Lembah Tidar, Magelang. Tak sedikitpun merasa terpaksa dan penuh tekanan. Sebaliknya, setiap momen dan helaan nafas yang dihirup di Lembah Tidar dijalani dengan keriang. Hal itu membuktikan bahwa menjadi seorang prajurit ialah *passion*-nya. Sampai akhirnya, Sutarto pun berhasil menamatkan pendidikan militernya dengan pangkat Letnan Dua (Letda) pada tahun 1971.

Jabatan pertama yang diembannya ialah Komandan Peleton Bantuan (Dantonban) Yonif Linud 305 Kostrad. Ia menjalankannya dengan maksimal sehingga kinerjanya dinilai memuaskan. Di tahun 1979 Sutarto diberikan amanah baru sebagai Kepala Sesko Operasi (Kasiops) Yonif Linud 330 Kostrad. Setelah itu, jabatan demi jabatan terus diraihinya dengan hasil gemilang. Di tahun 1988-1989 ia ditunjuk untuk menjadi Komandan Kontingen Garuda IX yang dikirim ke Iran dan Irak (negara berkonflik) dibawah misi UNIMOG. Ketika itu, jabatannya sudah Letnan Kolonel (Letkol). Tugas ke negara bertetangga yang berkonflik tersebut semakin menegaskan kemampuan militer dan pergaulannya di tingkat internasional.

Setelah itu, banyak jabatan lain yang diembannya. Kariernya terus menanjak seiring dengan prestasi-prestasi yang diukir. Sampai akhirnya tibalah negeri ini pada masa yang tak diinginkan banyak orang karena



antarasumsel.com

cukup banyak menelan korban: peristiwa Mei 1998 menjelang kejatuhan rezim. Di tahun 1997-1998, posisinya sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) untuk menjamin keselamatan presiden sebagai simbol negara. Tentu bukan situasi yang mudah dihadapi ketika ancaman terhadap keselamatan presiden berasal dari elemen rakyatnya sendiri yang menuntut dirinya mundur.

Beruntung kericuhan dan pertumparahan darah tidak terjadi secara berkepanjangan karena Presiden Soeharto segera melepaskan jabatannya. Estafet kepemimpinan nasionalpun berganti dari *The Smiling General* ke teknokrat yang jago membuat pesawat: B. J. Habibie. Tak lama berselang Habibie berkuasa, Abdurrahman Wahid didaulat menjadi presiden republik selanjutnya.

Di masa Presiden GusDur, karier Sutarto semakin melesat. Gus Dur melantiknya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Oktober 2000 menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto. Seiring dengan itu, pangkatnyapun dinaikkan menjadi jenderal bintang empat. Setelah acara pelantikan yang dilakukan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Sutarto menjelaskan bahwa dua tugas yang menjadi prioritasnya dalam memimpin organ Angkatan Darat ialah mengembalikan disiplin prajurit dan meningkatkan profesionalisme prajurit.

Yang menarik, perjalanan naiknya Sutarto sebagai KSAD, publik tidak banyak yang tahu dan sempat diwarnai kisah menarik. Sebab, pilihan Presiden Gusdur untuk menduduki jabatan KSAD awalnya Letjen Agus Wirahadikusumah. Namun calonnya tersebut harus terpental karena konon Letjen Agus tidak didukung oleh sejumlah petinggi TNI AD. Bahkan para perwira tinggi itu mengancam akan mengundurkan diri secara serempak jika Gus Dur tetap merealisasikan niatnya mengangkat Letjen Agus.

Desas-desus yang berkembang ketika itu bahwa di tubuh TNI-AD tercipta tiga kutub yakni “kutub GusDur”, “kutub Megawati” dan “kutub Wiranto” yang memang sedari awal sudah tak cocok dengan kepemimpinan Gus Dur setelah “dicampakkan” dari posisi Menhankam/Pangab. Sutarto sendiri disebut-sebut sebagai jenderal yang apolitis. Sutarto dianggap paling steril dan tidak merepresentasikan kepentingan apapun, sehingga penunjukannya sebagai KSAD dianggap tepat oleh banyak pihak.

Dalam perjalannya, kepemimpinan Sutarto dianggap dapat membawa angin segar. Setelah GusDur turun dari tampuk kepresidenan karena laporan pertanggungjawabannya ditolak DPR dan digantikan Megawati, Sutarto pun ditunjuk untuk mengemban tugas yang lebih tinggi. Megawati mengangkatnya sebagai Panglima TNI pada 7 Juni 2002. Jabatan yang sebetulnya sudah bisa diprediksikan oleh banyak kalangan melihat *track record*-nya di militer.

Tahun 2002 merupakan momen yang tak mungkin dilupakan oleh Sutarto. Selain menduduki jabatan prestisius dengan bintang empat di pundaknya, ia segera melakukan reformasi di tubuh TNI. TNI di masa kepemimpinan Sutarto pun gencar melakukan reformasi berbagai aspeknya terkait dengan tugas dan fungsinya. Sutarto hendak mengembalikan TNI ke tempat semestinya.

Pemilu 2004 merupakan ujian berat baginya. TNI harus bisa menjaga netralitas, tidak memihak kepada calon manapun sekalipun Pemilu 2004 diwarnai oleh capres-capres dari militer: SBY dan Wiranto. Sutarto pun mencoba teguh untuk membawa gerbong TNI berada di jalur netral.

Pemilu 2004 berhasil dilaksanakan secara aman dan tertib. Presiden SBY dan wakilnya Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Kesuksesan tersebut tentu saja tak bisa dilepaskan dari peran Jenderal Sutarto sebagai panglima yang berkomitmen

untuk menjaga Pemilu 2004 dengan konsisten dari gangguan-gangguan pengacau keamanan, serta yang terpenting menjaga kenetralan TNI.

Tercatat dalam medio jabatannya ada beberapa kejadian penting yang melibatkan kiprah TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Misalnya, terjadinya kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia untuk mengembalikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang begitu meresahkan masyarakat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Memang yang menjadi juru runding dari pihak Indonesia ialah otoritas terkait seperti dari Kemenkumham, wakil presiden, dan lainnya namun tanpa penjagaan di lapangan akan menjadi sia-sia perundingan apapun yang dibuat.

TNI dibawah kendali Jenderal Sutarto tentu berperan besar dalam menjaga perdamaian di lapangan supaya tidak sampai terjadi baku tembak, paling tidak sampai rampungnya perundingan damai. Tentu akan menjadi berlainan hasilnya kalau saja ada salah satu pihak yang terpancing dan sampai menggelar operasi militer. Perundingan yang tengah dilakukan di Helsinkipun menjadi tak ada artinya.

Prestasi besar lain yang dianggap memiliki pengaruh besar dan menjadi batu pijakan di tubuh TNI ialah soal reformasi struktur dan jabatan.



<http://pendiriartonosutarto.web.id>

Reformasi tersebut diambil dengan maksud untuk memberikan rasa memiliki dan tak ada kesan dianak-tirikan. Di masa Orde Baru sudah menjadi rahasia umum kalau Angkatan Darat merupakan elemen ABRI yang paling banyak mendapatkan porsi penting di TNI dengan menafikan elemen lainnya yakni Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

Karena itu, agar tumbuh suasana egaliter, Sutarto mengambil tindakan konstruktif dengan menetralsir dominasi Angkatan Darat. Alurnya sangat jelas dan sistematis. Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya begitu identik dengan Angkatan Darat dirombaknya dengan memberikan jabatan tersebut kepada dua angkatan lainnya dengan syarat kapabilitas dan keandalan tertentu yang menjadi patokan penilaian.

Beberapa jabatan penting yang sebelumnya didominasi oleh perwira-perwira tinggi TNI-AD kemudian diberikan kepada dua angkatan lainnya dengan alibi keadilan dan kapabilitas. Jabatan Asisten Logistik Markas Besar TNI dan juga Kasum TNI misalnya, yang sebelumnya sudah berpuluh tahun tak pernah diberikan kepada Angkatan Laut dan Udara kemudian diberikan kepada Angkatan Udara. Begitu juga dengan jabatan bintang tiga di jajaran TNI yang sebelumnya hanya dikuasai Angkatan Darat kemudian direstrukturisasi hanya menjadi tiga posisi yang kesemuanya diisi oleh masing-masing angkatan.

Setelah pensiun dari militer, Jenderal Sutarto ternyata tak lantas diam. Sejak 2010 sampai saat ini ia aktif di beberapa organisasi seperti Pembina Perhimpunan Pecinta Alam Wanadri, Ketua Umum 7 Summit Expedition, Pembina Gerakan Indonesia Mengajar yang diinisiasi oleh intelektual sekaligus saingannya sekarang di Kovensi Partai Demokrat Anies Baswedan, dan juga sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI). Sutarto juga tercatat sebagai Pembina Yayasan Indonesia Setara.

Dengan alasan ingin mengabdikan kepada bangsa secara lebih luas, Sutarto memutuskan untuk bergabung dengan partai politik. Pilihannya pun jatuh ke Partai Nasional Demokrat yang dibesut taipan media Surya Paloh. Dia tertarik dengan gagasan Restorasi Indonesia yang selama ini didengungkan sebagai jualan politiknya. Sutarto juga menyatakan kesamaan visi dan misi dengan Nasdem sehingga akhirnya bersedia untuk ikut terlibat dalam proses politik di internal Nasdem.

Cita-Cita Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Dengan masuk politik, tentu ada tujuan yang ingin dicapai Sutarto: ingin mendermakan diri kepada bangsa di sisa-sisa umurnya saat ini. Terkait pengabdian terhadap bangsa dan negara, Sutarto pun memiliki beberapa catatan.

Dalam konteks pertanian dan pangan. Sang jenderal ternyata memiliki perhatian dan kepedulian tinggi terhadap nasib para petani Indonesia yang masih hidup susah. Ironis memang, Indonesia yang notabene negara agraris dengan lahan pertanian sangat luas dan tanahnya subur tidak mampu menghidupi rakyatnya sendiri secara maksimal. Para petani di negeri ini yang idealnya makmur dan sejahtera pun terpaksa harus hidup di batas zona miskin karena salah urus dan ketidakpedulian otoritas berwenang.

Sutarto menilai bahwa produksi pertanian sebenarnya masih bisa di-gejot dengan beberapa hal seperti pengaktifan kembali lahan tidur yang selama ini masih sia-sia tak terpakai, membangun infrastruktur pedesaan, memberikan akses permodalan serta meningkatkan teknologi tepat guna yang sangat diperlukan oleh kalangan petani. Selain itu, menurut Sutarto, sebaiknya pemerintah memiliki peranan dalam memberikan bantuan bibit unggul, memberikan bantuan manajemen dan penyuluhan, serta menggali berbagai potensi lokal sesuai daerah masing-masing.

Fokus pertanian yang digagas Sutarto merupakan ide nya untuk membangun perekonomian Indonesia, sekaligus mensejahterakan masyarakat di pedesaan. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini berada di desa, dan mayoritas dari mereka adalah petani. Apabila pemerintah turun tangan dengan berbagai kebijakan pro pertanian dan petani, serta insentif-insentif lainnya, maka pertanian di Indonesia akan berkembang dengan sangat pesat.

Dalam konteks ini, pemerintah masih belum banyak berperan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian di Indonesia sehingga dampaknya nasib petani pun berada di tubir kemiskinan. Hidup merekapun semakin sengsara dengan panjangnya jalur tengkulak yang biasa mematok harga rendah terhadap nilai jual hasil-hasil pertanian mereka.

Ketahanan pangan adalah cita-cita luhur Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Merupakan amanat konstitusi untuk mensejahterakan kepentingan umum. Tetapi ketahanan tidak akan terjadi tanpa kedaulatan

pangan. Ibarat motor tanpa bahan bakar. Keduanya merupakan satu kesatuan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, keduanya merupakan masalah sosial-ekonomi Indonesia. Keduanya merupakan tanda bahwa Indonesia benar-benar merdeka dalam arti sesungguhnya. Keduanya adalah masalah politik kebijakan agraria, khususnya tenurial.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (FAO, 1995). Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketahanan pangan berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat.

Hasil dari konferensi FAO, World Food Summit 2006, menyebutkan bahwa ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan yang sesuai dengan nilai-nilai atau budaya setempat.

Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi, yaitu pertama setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata, dan terjangkau. Kedua, setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif.

Konsep ketahanan pangan tersebut memberi penekanan pada akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan yang cukup, bermutu, bergizi, dan berimbang, serta harganya terjangkau, meskipun begitu setiap individu yang menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga mendapat akses pangan yang sama sesuai kebutuhan individu tersebut (Widodo, 2001: 1-8).

Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah bahwa pemerintah mempunyai dua kewajiban, yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Kedua hal ini merupakan kewajiban utama negara kepada rakyatnya. Tetapi, kondisi pangan di Indonesia masih jauh dari cita-cita ketahanan pangan karena tidak ada kedaulatan pangan, dan salahnya paradigma kebijakan politik pangan, serta kebijakan lain yang pragmatis dan berdampak atas masalah pangan saat ini.

Birokrasi yang Netral

Soal peningkatan daya saing bangsa yang menurutnya sangat terkait erat dengan reformasi birokrasi. Menurutnya, birokrasi di negeri ini sangat tidak efisien dan kontraproduktif. Makanya ia menekankan betapa penting reformasi birokrasi yang meliputi menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan elemen-elemen birokrasi mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, akuntabilitas aparatusnya, ketatalaksanaan, pengawasan, dan pelayanan publik serta sistem pengupahannya.

Sedangkan dalam konteks upaya pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi ini sangatlah berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Jika hukum bagi koruptor yang sudah tertera didalam konstitusi ditegakkan tanpa pandang bulu dan menggunakan prinsip berkeadilan maka segenap persoalan korupsi dapat ditekan secara maksimal. Penegakkan hukum secara maksimal dalam upayanya untuk memberantas tikus-tikus korupsi merupakan langkah konstruktif untuk mengembalikan wibawa negara.

Korupsi terdapat erat di dalam sistem birokrasi. Endriartono Sutarto ingin memberantas masalah korupsi itu dalam tubuh birokrasi. “Birokrasi haruslah netral dari kepentingan politik, sehingga korupsi politik dapat ditekan”, menurutnya. Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber (1974) dibayangkan merupakan sebuah serangkaian sistem yang membentuk sebuah organisasi raksasa yang disebut negara dan kesemuanya tunduk pada prinsip-prinsip rasionalitas, berjenjang, dan memiliki fungsi-fungsinya masing-masing.

Beberapa karakteristik birokrasi antara lain adalah adanya rasionalitas, adanya pembagian kerja yang jelas, adanya hierarki jabatan, adanya pengaturan sistem yang konsisten (teratur dan tertib), adanya prinsip formalistik impersonalitas (sistem formal yang agak kaku), dan penempatan berdasarkan karier.

Birokrasi idealnya adalah sistem administrasi yang netral. Birokrasi mengikuti kekuasaan politik yang menjadi lingkaran utamanya. Sehingga tidak heran apabila keterlibatan politik dalam birokrasi menjadi sesuatu yang mutlak. Birokrasi adalah bagian dari pemerintahan, dan pemerintahan akan ada apabila terdapat akumulasi modal. Dan sejarah terbentuknya birokrasi di Indonesia adalah untuk menunjang akumulasi

modal sejak era kolonial. Akan tetapi, reformasi birokrasi perlu digagas untuk mengentikan kebiasaan lama birokrasi yang rentan korupsi.

Menurut indonesianis David Reeve (2013), birokrasi acap kali dijadikan sebagai mesin politik dalam sejumlah kampanye politik. Kasus ini terjadi sejak Orde Baru Soeharto dengan menggunakan sistem Colongan Karya. Sehingga kekuatan birokrasi menjadi tumpuan kemenangan Colongan Karya dan juga sumber modal untuk pembiayaan politik dan kampanye.

Birokrasi digunakan untuk menjembatani proses artikulasi kepentingan-kepentingan politik yang ada. Proses ini terjadi karena penguasa politik memiliki kekuatan untuk merekrut apapun yang disukainya untuk duduk sebagai birokrat administratif. Dan memang birokrasi menjadi sistem yang digunakan penguasa politik sebagai organisasi yang mengurus akumulasi modal.

Birokrasi juga merupakan instrumen untuk menjawab janji politik. Ketika penguasa politik duduk dalam kekuasaan yang signifikan, maka janji-janji politik yang digunakannya selama proses kampanye akan menggunakan birokrasi sebagai implementasinya.

Dalam proses pembuatan kebijakan, birokrasi seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan tukar-menukar keuntungan politik. Bentuk tukar-menukar keuntungan dapat berupa konsesi (izin usaha) kebijakan, janji kebijakan, dan konsesi proyek dalam implementasi kebijakan. Proses ini yang dikatakan Robinson (2013) sebagai kapitalisme birokrasi. Di era reformasi saat ini, sumber patronase yang kerap terjadi bukanlah lagi pada Colongan Karya, tetapi pada institusi-institusi demokrasi pasca amandemen ke-4.

Sebagai instrumen yang digunakan penguasa politik untuk mengorganisasi sumber kapital, maka birokrasi dibajak. Karakter pembajakan birokrasi adalah sama dengan karakter era Orde Baru Soeharto. Karakter patron-klien implementasi kebijakan dan konsesi proyek untuk modal partai politik dan politisi di era demokrasi prosedural kini menjadi hal yang lazim. Inilah konteks keterlibatan politik dalam birokrasi.

Dalam berbagai proses politik, politisi relatif menggunakan janji politik untuk membangun loyalitas dan komitmen dengan birokrasi. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, birokrasi sering digunakan sebagai instrumen untuk mendistribusikan sejumlah political rewards kepada para pendukung politisi.

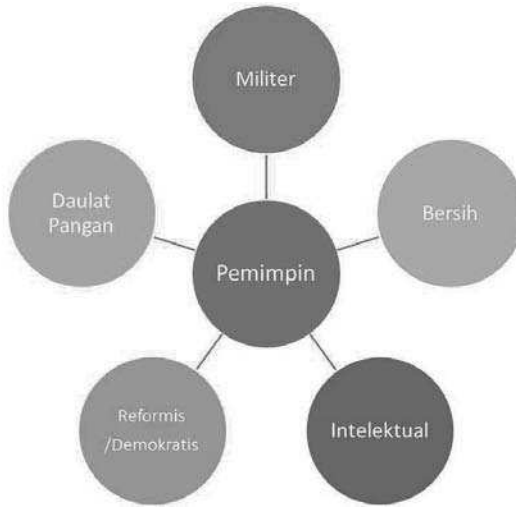
Kegiatan loyalitas politik ini tidak hanya terjadi searah antara birokrasi dan institusi politik, tetapi juga sebaliknya antara institusi politik dengan birokrasi. Ada hubungan simbiosis mutualisme dalam proses ini. Apabila sudah menyangkut masalah akumulasi kapital, maka kepentingan pragmatis untuk bertahan hidup menjadi jalan yang harus ditempuh diantara semua pihak. Oleh karena itu, Endriartono Sutarto menilai perlu ada gagasan memodernkan birokrasi sebagai lembaga yang netral.

Toleransi dan Profesionalitas TNI

Persatuan dan toleransi antar-umat beragama. Dalam sebuah acara, Sutarto pernah membahas ihwal pentingnya bangsa kita memetik hikmah dari Piagam Madinah yang pernah dibuat Nabi Muhammad pada 622 Masehi. Banyak hal yang diatur dalam konstitusi atau dasar negara pertama yang banyak diakui pelbagai pakar tersebut seperti persatuan dan hak asasi manusia (HAM). Intinya, Piagam Madinah mengatur bagaimana persatuan negara sangat penting sekalipun didalamnya terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa dan agama.

Menyoal reformasi TNI yang memang pernah dilakukannya semasa masih aktif sebagai Panglima TNI. Dia memandang bahwa negara harus memprioritaskan pembaruan dan pembangunan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) supaya tidak dilecehkan negara lain. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang tidak sepatutnya dilecehkan bangsa lain, seperti oleh negara tetangga, hanya karena tidak memiliki Alutsista yang kuat dan tangguh. Berbeda kalau Indonesia memiliki perlengkapan persenjataan yang mumpuni maka negara manapun ketika hendak melecehkan bangsa ini akan berfikir seribu kali.

Membahas soal Alutsista bukan berarti bahwa TNI harus mengimpornya dari luar (negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman) namun bisa memberdayakan elemen lokal seperti PT. Pindad Bandung. Siapa bilang produk Alutsista lokal memiliki kualitas rendah? Siapa bilang anak-anak negeri tak memiliki kemampuan untuk membuat seperangkat persenjataan militer sebagaimana perusahaan-perusahaan di negara maju membuatnya? Sutarto memiliki pengalaman langsung soal ini!



Dulu, ketika masih berkecamuk Gerakan Aceh Merdeka, dalam kapasitasnya sebagai Panglima TNI, ia pernah memerintahkan tank Scorpion ke Aceh untuk mengantisipasi gerakan separatis GAM. Namun ternyata Inggris yang merupakan negara pembuat tank tersebut melarang penggunaannya di Aceh karena dianggap diluar kontrak kerjasama. Sutarto pun memutar otak sehingga tercetuslah ide untuk menggunakan produk tank dalam negeri.

PT. Pindad pun disuruh memproduksi panzer untuk digunakan dalam operasi di Aceh. Panzer tersebut harus mampu bergerak di kawasan hutan rimba khas Aceh. Tak tanggung-tanggung, PT. Pindad hanya diberikan waktu 3 bulan saja untuk merancang dan membuatnya. Apa hasilnya? Ternyata dalam tempo yang relatif sangat singkat itu Pindad mampu menyelesaikan proyek besar pembuatan panzer yang kemudian digunakan oleh TNI. Panzer produk anak negeri itu memang masih alakadarnya namun harus diperhatikan bahwa waktu produksi yang diberikan kepada mereka sangatlah singkat. Logiknya jika dengan waktu singkat saja sudah bisa memproduksi panzer bagaimana jika diberikana tenggat lama sesuai dengan perhitungan dari pihak PT. Pindad sendiri?

Ada satu hal yang menarik dari pengalaman Jenderal yang reformis dan demokratis ini, yaitu ketika diangkat sebagai Presiden Komisaris Pertamina, beberapa bulan kemudian ia mundur karena alasan gaji. Menurutnya, gaji

seorang Presiden Komisaris Pertamina terlalu tinggi, Rp 150 juta per bulan, sedangkan dirinya tidak terlalu berat dalam hal pekerjaan. Untuk itu ia memilih mundur. Sutarto melihat bahwa keadilan sosial itu penting, di atas segalanya. Gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya tersebut menurutnya tidak adil. Menurutny, skala penggajian semacam itu adalah bukti ketidakadilan di Indonesia.

Keadilan sosial memang adalah salah satu kepedulian utama Endriar-
tono Sutarto. Menyinggung soal tumbuhnya orang-orang kaya di Indonesia, Sutarto mengatakan “akan lebih menggembirakan bila diantara orang-orang kaya itu tidak ada nama orang Indonesia, tapi tidak ada lagi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan”.

Dan tentu saja masih banyak perasaan pemikiran lainnya yang hanya akan terlaksana dengan menjadi seorang pemimpin negara sebagaimana yang sedang diperjuangkannya selama ini.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Mantan Panglima TNI yang memimpin di tengah arus bergulirnya reformasi ini pernah memerintahkan TNI keluar dari DPR. TNI haruslah profesional, yaitu menjaga ketahanan dan kedaulatan bangsa, bukan mengurus hal-hal politik prosedural langsung. Modalitas prinsip reformis dan demokratis yang membuat dirinya bergabung di Partai Nasdem, tetapi kemudian ikut dalam peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat ini merupakan nilai penting untuk membuatnya populer di kalangan masyarakat sipil kebanyakan.

Modalitas kepemimpinan yang cemerlang di TNI hingga menempati posisi Panglima, tidak perlu duji dan ditanyakan lagi. Modalitas jejaring politik yang dimiliki Sutarto sudah mumpuni untuk membuatnya layak diperhitungkan dalam jajaran nama-nama capres 2014. Pernah menjadi anggota tim sukses Presiden SBY pada 2009 adalah modal utama material sumber daya yang dimilikinya. Jawa, petinggi militer, berprestasi, dan bersih adalah modalitas Sutarto.

Dari sisi peluang, ada beberapa hal yang bisa menjadi peluang Endriar-
tono Sutarto untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014. *Pertama*, pengalamannya di militer yang sampai menduduki orang pertama di lingkungan

TNI merupakan bukti bahwa dia memiliki kapasitas *leadership* yang sangat baik. Tak banyak prajurit TNI yang memiliki jenjang karier secemerlang dirinya. Pun ketika menjadi pucuk pimpinan TNI, ia sosok yang dianggap berhasil melakukan reformasi TNI di masa reformasi seperti restrukturisasi kepemimpinan TNI menjadi tidak hanya didominasi Angkatan Darat.

Kedua, Jenderal Sutarto memiliki *track record* yang relatif bersih dari kasus atau isu HAM yang seakan telah menjadi kebiasaan dituduhkan kepada anggota TNI. Berbeda dengan Wiranto dan Prabowo misalnya, yang relatif memiliki catatan kelabu terkait isu pelanggaran HAM di Tim-Tim atau Peristiwa Mei 1998.

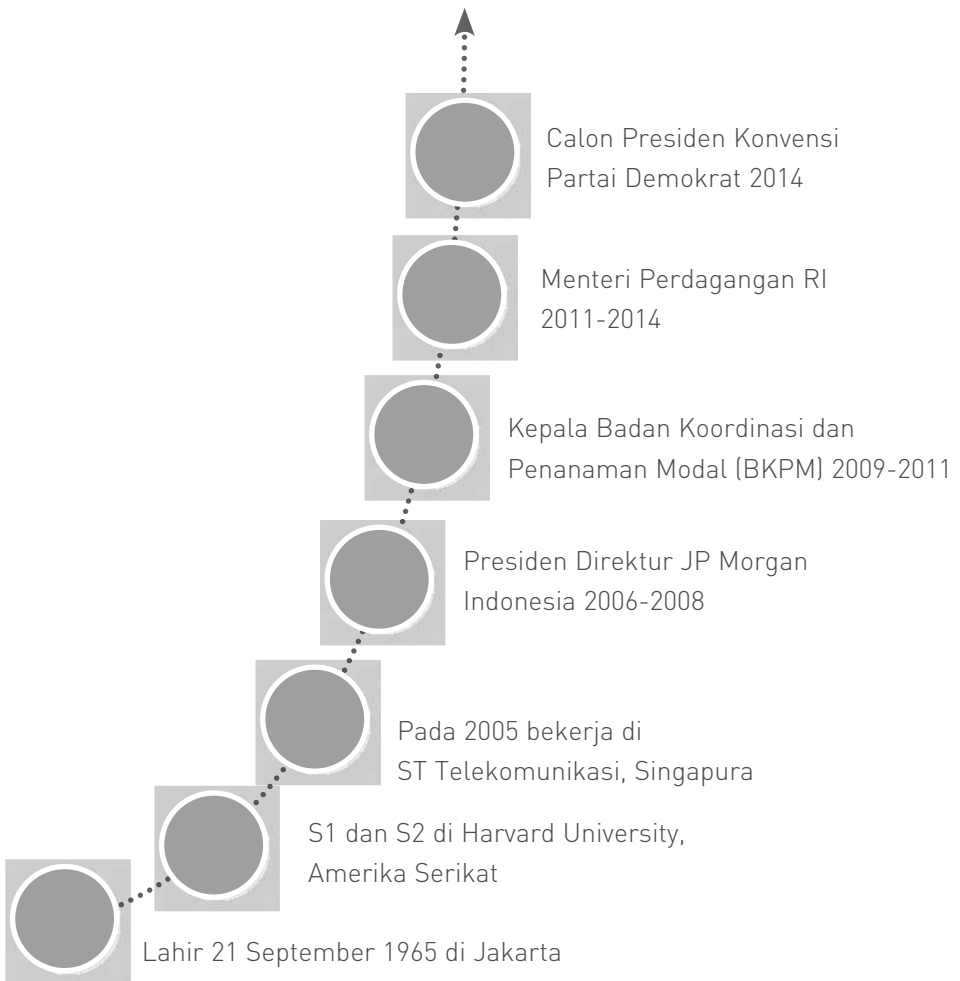
Ketiga, Endriartono Sutarto pernah 26 kali mendapat penghargaan bergengsi. Di antaranya yakni Bintang Mahaputra Adipradana, Satya Lencana PBB/UNIIMOG, Penghargaan Kelas 1 dari Pemerintah Singapura, Penghargaan Kelas 1 dari Kerajaan Brunei Darusalam, Penghargaan Kelas 1 dari pemerintah Malaysia, Penghargaan kelas 1 dari pemerintah Thailand, dan Bintang Kehormatan The Royal Order of Sahametrei Mohaserevadh Grand Cross.

Meski demikian, tantangan terberat Endriartono Sutarto tentu saja popularitasnya yang masih rendah kemudian berdampak pada tingkat elektabilitasnya. Elektabilitas Endriartono—meski dihadapkan dengan peserta konvensi lainnya—masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Endriartono masih di urutan ke-8 di antara peserta konvensi lainnya.

Selain itu, ia juga belum memiliki partai yang secara pasti akan mendukungnya dalam kandidasi capres di Pemilu 2014. Di Konvensi Demokrat ia harus bersaing dengan 11 peserta lainnya sehingga tidak ada jaminan baginya untuk maju didukung oleh Partai Demokrat. Ini artinya, mundurnya Endriartono Sutarto dari Partai Nasdem untuk kemudian menerima undangan konvensi Demokrat bisa menjadi berkah namun juga musibah jika nanti ia tak bisa memang dalam konvensi. Selain itu, Endriartono saat ini juga relatif masih sangat minim mendapatkan publisitas di media. Inilah tantangan yang harus dijawab Endriartono.

GITA WIRJAWAN

Pemimpin Potensial





facebook.com/GitalrawanWirjawan/fref=ts

Berwajah tampan dan pintar membuat Gita Wirjawan populer di kalangan masyarakat perempuan. Gita lahir di Jakarta, 48 tahun silam, tepatnya pada 21 September 1965. Gita adalah bungsu dari lima bersaudara pasangan Wirjawan Djojosoegito yang orang Jawa dan Paula Warokka Wirjawan yang orang Manado.

Gita memang bukan orang biasa, terlahir dari keluarga ningrat dengan latar belakang santri yang terpelajar. Keluarga mereka tumbuh dalam intelektualitas yang sangat baik. Kakek Gita yang bernama Raden Ngabeni Hadji Minhadjurrahman Djojosoegito pernah menjabat sebagai ketua Muhammadiyah Purwokerto.

Kakek Gita juga pernah menjadi sekretaris jenderal organisasi massa Islam Muhammadiyah di zaman kepemimpinan Ahmad Dahlan. Dari sang kakek ini, Gita punya pertalian darah dengan pendiri Nahdhlatul Ulama (NU), Hasyim Asy'ari, melalui istri Rois Akbar, yakni Mbah Hasyim Putri. Hasyim Asy'ari adalah kakek dari presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid (*inilah.com*, 2013).

Ayah Gita adalah dokter perwakilan Indonesia di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sering berpindah tugas keliling dunia. Ini membuat Gita tumbuh menjadi sosok “internasionalis” dan terbiasa bergaul dengan masyarakat antar-negara sehingga memiliki pandangan yang sangat terbuka.

Bukan dari Keluarga Biasa

Keluarga Wirjawan sukses menjadi profesional keuangan. Selain Gita, kakak-kakaknya pun sukses dalam berbagai bidang. Dian Budian Wirjawan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa menggantikan Glen Yusuf. Sedangkan Wibowo Suseno Wirjawan adalah mantan Direktur Utama PT Jakarta Internasional Container Terminal, mantan Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Koja, dan mantan Deputi BP Migas. Sementara Rianto Ahmadi Djojosoegito merupakan mantan Presiden Direktur PT Allianz Life Indonesia. Satu lagi kakaknya bernama Marina Wirjawan (*id.wikipedia.org*, 2013)

Meski anak bungsu, Gita tidak terlalu dimanja. Sang ibu menerapkan kedisiplinan pada anak-anaknya. Ketika sekolah di Amerika Serikat, Gita bahkan tidak ditunjang secara finansial karena ayahnya baru saja pensiun dari pekerjaannya. Dia pun harus bekerja agar bisa bertahan hidup di negeri orang. Berbagai pekerjaan paruh waktu ditempuhnya demi sesuap nasi dan membiayai kekurangan biaya sekolahnya. Gita sempat menjadi tukang masak, tukang *ngepel*, pengamen, dan sopir. Pekerjaan tersebut dilakoninya selama puluhan jam seminggu. Padahal dia juga harus mengambil lima hingga tujuh kelas per semester di universitasnya, Harvard.

Saat tinggal di India, Gita terpaksa menjual kulit ular agar dapat melanjutkan pendidikannya setelah ayahnya pensiun. Uang yang diperolehnya dari berjualan itu digunakannya untuk membeli barang yang bernilai lebih tinggi. Kala itu, produk *walkman* dan *boombox* sedang tenar. Dia menjual kembali alat elektronik tersebut ketika pindah ke Thailand.

Gita juga pernah menjual celana merek Levis ke India yang dibelinya di Amerika. Saat itu di India celana dengan merek terkenal itu belum banyak dijual. Keuntungannya lumayan sehingga Gita bisa membeli skuter. Dari berjualan sana-sini dan beragam pekerjaan sampingan itulah, Gita bisa hidup selama 12 tahun di Amerika.

Perjuangan yang ditempuhnya selama belajar di Amerika membentuk karakternya. Dia menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan pekerja keras. Dia pun menjadi pribadi yang sederhana. Meski telah menjadi pe-tinggi, Gita masih memilih mencukur rambut di tukang cukur biasa bertarif Rp20 ribu. Selain itu, dia tidak terlalu suka menggunakan pakaian yang

mentereng. Biasanya dia membeli satu celana bermerek lalu meminta tukang jahit untuk membuat celana serupa.

Gita memang tak risih menggunakan produk lokal buatan anak bangsa sehari-hari. Jaket hitam yang kerap digunakannya di berbagai acara menurut Gita dibeli di Tanah Abang. Sementara untuk pakaian, Gita kerap membelinya di Pasar Senen. Sedangkan sepatunya dibeli di pusat pengrajin sepatu Cibaduyut, Bandung. Menurutnya, menggunakan produk lokal tak semata wujud kecintaan pada Indonesia, namun juga pengakuan terhadap kualitas produk dalam negeri yang tidak kalah dari produk impor.

Gita juga dikenal suka makan singkong. Menurutnya, singkong adalah salah satu makanan alternatif pengganti nasi yang memiliki banyak manfaat. Singkong bisa menjadi solusi masalah berat badan. Setelah rutin mengonsumsi singkong sejak 2012, berat badan Gita turun hingga 11 kilo. Hasil tes darah dan kolesterolnya pun normal bahkan berada di bawah batas yang semestinya. Gita biasanya memakan singkong saat sarapan dan menyantap nasi merah pada siang hari.

Gita pun mengklaim dirinya tidak pernah menggunakan fasilitas kelas utama saat melakukan perjalanan dinas. Dia lebih suka menggunakan fasilitas ekonomi dan bisnis. Langkah ini dilakukannya untuk mendukung rencana Kementerian Keuangan untuk menekan pemborosan anggaran perjalanan dinas.

Jazz dan Golf

Kedua orang tua Gita selalu menganjurkan anak-anaknya untuk mempunyai hobi dan menekuni hobi mereka. Gita dan saudara-saudaranya sejak kecil dipaksa belajar memainkan piano klasik. Ayah dan ibu Gita memang pecinta musik. Ayahnya pandai memainkan biola, sedangkan ibunya pintar bermain piano.

Gita mulai kursus piano sejak usia enam tahun. Dia ingat betul saat awal-awal dipaksa ikut kursus piano klasik dan dia memberontak karena dia benar-benar tidak suka. Bahkan ibunya harus selalu memaksanya. Ibunya harus menyeretnya untuk kursus dua kali seminggu di sore hari setelah pulang sekolah. Gita pun menangis tak mau ikut. Namun setelah

dua hingga tiga bulan belajar, Gita kecil tak lagi merasa terpaksa pergi ke tempat kursus piano. Dia malah sangat menikmati berlatih sendiri bahkan sampai dimarahi ibunya karena terlalu sering dan terlalu lama menghabiskan waktu untuk berlatih piano.

Dia pun senang belajar memainkan instrumen musik lain seperti gitar, biola, bass, saksofon, hingga gitar. Gita juga mengoleksi gitar elektrik keluaran Fender bertanda tangan James Brown. Soal jenis musik, Gita memilih Jazz. Kecintaan Gita pada Jazz terpupuk sejak usia 13 tahun. Ketika dia tidak sengaja mendengar permainan Earl Klugh, Dave Brubeck, Wes Montgomery, Duke Ellington, hingga raja Jazz, Miles Davis yang diputar kakaknya (*id.wikipedia.org*, 2013)

Gita tidak hanya menjadikan musik sebagai hobi, dia pun menekuninya. Gita bahkan mengejar beasiswa sekolah musik terkenal di Amerika, Berkeley, dan berhasil mendapatkannya. Dia akan mengikuti perkuliahan di jurusan Bisnis, Harvard pada siang hari dan malamnya mengikuti pembelajaran di sekolah musik. Bagi Gita, belajar bisnis semata-mata untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Sedangkan sekolah musik murni mengikuti hatinya.

Meskipun demikian, pada tahun keempat kuliah musiknya, atas desakan sang ibu yang khawatir sekolah musik tersebut dapat mengganggu studinya di Harvard, Gita pun berhenti. Sang ibu khawatir ketekunan sang anak bermusik membuatnya memilih musik untuk mendapatkan uang. Padahal pada 1980-an, seniman ataupun pemusik dianggap sebagai karier yang tidak pasti dan tidak dapat memberikan pendapatan besar. Namun hal tersebut tak membuat keinginannya yang kuat untuk bermusik luntur. Bahkan setelah menjadi bos di sebuah perusahaan besar dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Gita tetap setia dengan hobinya itu.

Suami dari Yasmis Stamboel ini pernah manggung di kafe, seperti Hard Rock dan News Café. Dia pun mempertunjukkan bakatnya bermusik di atas panggung pertunjukan jazz yang paling ditunggu di Indonesia, Java Jazz 2012. Di perhelatan tersebut, Gita bermain bersama pentolan grup jazz Fourplay, Bob James. Dia juga menulis lagu dalam album-album yang diterbitkannya. Seperti pada album "Inner Beauty" milik kelompok bandnya sendiri. Dia juga menulis lagu bersama Bob James yang diberi judul Roll It.

Gita bahkan mendirikan rumah produksi musik bernama Omega Pacific Production.

Ia memproduksi album jazz bagi pianis Nial Djuliarso, grup jazz Cherokee, dan Bali Lounge dengan vokalis Tompi. Beberapa lagu dalam album-album itu juga dia aransemen sendiri. Selain memproduksi album jazz, Gita mengeluarkan album pop milik Tompi, Bali Lounge II, dan Dewi Lestari. Gita mendapatkan mamfaat yang besar dalam bermusik. Bukan hanya bisa memperoleh kepuasan batin tetapi juga dapat membantunya dalam berbisnis. Wawasannya yang luas tentang seni dan musik bisa melicinkan transaksi ataupun kerja sama bisnis yang tengah dirintisnya dengan sejumlah klien. Dia juga merasa menjadi lebih peka terhadap manusia sehingga bisa membaca bahasa tubuh rekan bisnisnya.

Selain bermusik, Gita juga sangat menyukai olahraga. Olahraga yang paling dinikmatinya adalah golf. Gita telah mengenal golf sejak usianya 10 tahun dari sang ayah. Awalnya dia hanya menemani sang ayah bermain golf di akhir pekan. Lama-lama dia pun tertarik dan mempelajarinya. Pada usia 13 tahun, ketika mengikuti sang ayah yang bertugas di Bangladesh dan India, Gita pun mengikuti sejumlah turnamen regional dengan hasil membanggakan. Kecintaanya pada golf ditularkannya kepada ketiga anaknya. Gita kerap mengajak anak dan istrinya untuk bermain golf bersama di waktu senggang. Anak sulungnya Gian Putra Wirjawan (18 tahun) bahkan mengikuti sejumlah turnamen golf. Gian pernah mewakili Indonesia dalam kualifikasi turnamen golf tingkat dunia.

Gita mendirikan sekolah bagi para pegolf muda berbakat bernama Ancora Golf. Murid-murid Ancora Golf dididik instruktur dari Singapura untuk dipersiapkan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional. Tak tanggung-tanggung, Gita menanggung seluruh biaya hidup dan menyiapkan asrama bagi anak-anak didik Ancora Golf. Mereka juga diberikan uang saku sebesar Rp 4 juta per bulan. Gita rajin menengok sekolah golfnnya. Sesekali dia mengecek fasilitas asrama dan memastikan kenyamanan para murid di sekolah itu.

Selain golf, Gita gemar bermain basket, renang, dan sepak bola. Gita pernah bekerja sebagai auditor di klub basket terkenal di Amerika, Miami Heat pada 1989-1992. Gita juga merupakan fans berat klub tersebut. Gita

juga tercatat sebagai pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pada 14 Desember 2012, Gita resmi menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2012-2016. Pelantikan tersebut dilaksanakan di kompleks Pelatnas Cipayung, Jakarta, setelah sebelumnya tertunda cukup lama setelah ia terpilih dalam Musyawarah Nasional PBSI di Yogyakarta pada 20-22 September 2012. Di tangannya, PBSI mampu mengantarkan sejumlah pebulutangkis Indonesia untuk mendapatkan gelar juara dunia kembali, setelah bertahun-tahun mandek (*id. wikipedia.org*, 2013)

Karier dan Bisnis

Gita menempuh pendidikan S-1 di University of Texas Amerika Serikat. Kemudian meneruskan kuliah S-2 pertamanya di jurusan Administrasi Bisnis, Baylor University, pada 1989. Selepas kuliah, ia memulai kariernya dengan bekerja di Citibank. Pada 1999, dia mengambil kuliah S-2 kembali di jurusan Administrasi Publik, *Harvard University* dan lulus pada 2000.



Setelah menyelesaikan studinya di Harvard, Gita bergabung dengan Goldman Sachs Singapura, sebuah bank yang didirikan oleh Marcus Goldman hingga 2004. Tahun berikutnya, dia pindah ke ST Telekomunikasi sampai 2006 yang juga berbasis di Singapura. Gita kemudian kembali ke Indonesia dan bekerja untuk JP Morgan Indonesia sebagai direktur utama. Namun pencapaian yang baik di JP Morgan, tak membuat Gita puas. Apalagi, Gita sudah memprediksi bisnis perusahaan asal Amerika tersebut akan terganggu karena badai krisis finansial AS akan segera menerpa negara yang mengklaim adidaya tersebut.

Bukan hanya JP Morgan, Gita pun sudah sejak lama curiga bahwa krisis di AS akan menyebar. Gita pun memberi tahu sejumlah ekonom dan pemerintah tentang prediksi tersebut. Sayangnya tidak ada yang menganggap hal tersebut serius hingga krisis finansial benar-benar terjadi di Amerika dan berdampak salah satunya ke Indonesia. Dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri pada April 2008 dari JP Morgan.

Pada tahun yang sama, dengan niat yang kuat, Gita mendirikan perusahaan baru yang diberinya nama Ancora Capital. Ancora adalah perusahaan pengelola investasi yang mendapat sponsor dari berbagai pihak baik individual maupun institusi yang tugasnya mencari perusahaan-perusahaan bermasalah yang layak dikucurkan investasi.

Lalu ditingkatkan kinerjanya dan dijual kembali. Persentase bagi hasilnya bisa beragam. Perusahaan *Private Equity* bisa mendapat *fee management* sebesar 2 persen dan 20 persen untuk *carry interest* atau semacam *success fee*. Ancora sendiri membidik saham-saham perusahaan yang ia perkirakan akan rugi karena krisis keuangan global itu, terutama di sektor energi dan sumber daya alam.

Dalam hitungan bulan, perusahaan ini mengambil alih sebagian saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Multi Nitrat Kimia. Selain itu, dua perusahaan properti yang berbasis di Jakarta dan Bali. Gita sengaja memilih perusahaan yang telah melantai di bursa karena kapitalisasi dan rekapitalisasinya akan lebih mudah dilakukan melalui jalur pasar modal.

Pihaknya dapat melakukan aksi akuisisi karena dia memiliki kemauan yang kuat untuk berwirausaha. Keberhasilan Gita memimpin Ancora juga



twitter.com/GWirawan/2014/media

berkat banyak mengandalkan koneksinya saat kuliah di Harvard. Gita pun tidak butuh modal besar untuk mendirikan perusahaan tersebut. Modalnya hanya tabungan selama dia bekerja dan itu pun hanya untuk menggaji karyawan. Kemudian dengan reputasi yang luas dan nama baik yang dimilikinya, ia dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan di luar negeri.

Pada 2008, dia menghimpun dana investasi dari para investor asal Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang mencapai 300 juta dolar AS. *Private Equity* milik Gita adalah perusahaan pertama di Indonesia yang menggunakan ketentuan syariah. Gita berencana menarik lebih banyak modal dari negara-negara Islam di luar Indonesia untuk diinvestasikan pada instrumen investasi tersebut.

Ancora tidak melulu hanya soal duit. Selain membuat Ancora Golf, Gita juga mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan di bawah Ancora yaitu Ancora Foundation. Yayasan itu fokus memberikan donasi pendidikan bagi pemuda Indonesia. Yayasan ini telah membuat beberapa program beasiswa bagi mereka yang ingin dan mampu melanjutkan pendidikannya di

sejumlah universitas terkenal di dunia, seperti John F. Kennedy School of Government, Harvard University, University of Cambridge, dan University of Oxford.

Ancora Foundation juga memberikan beasiswa untuk mereka yang melanjutkan pendidikan di sejumlah universitas dalam negeri yaitu Universitas Paramadina dan Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu ada pula program beasiswa khusus lainnya, seperti The Ancora-Khazanah Scholarship Program dan The Ancora Scholarship Program di Jawa Barat. Bagi Gita, pendidikan adalah modal yang penting bagi sebuah negara. Dengan program beasiswa ini, Gita berharap bisa mencetak banyak pemuda Indonesia yang memiliki wawasan luas dan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan Indonesia.

Menjadi Menteri Perdagangan

Menjadi seorang profesional handal di bidang keuangan dengan nama baik di tingkat internasional tidaklah mudah, tetapi Gita Wirjawan telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi seperti itu. Sebagai salah satu menteri terkaya di Kabinet Indonesia Bersatu II, uang bukanlah kendala penting bagi Gita. Politik memang membutuhkan uang, dan Gita sudah memilikinya sebagai seorang pengusaha kelas atas.

Perusahaan Gita yang bergerak di bidang investasi membuktikan dirinya memiliki bakat manajerial yang baik dalam mengelola organisasi perusahaan. Dengan waktu hanya beberapa tahun saja, perusahaan Gita mampu mengakuisisi beberapa perusahaan besar yang sedang tertimpa krisis ekonomi dunia. Lewat tangan dingin Gita, maka perusahaan yang nyaris rugi akan kembali sehat dan menghasilkan laba yang tinggi. Apabila Gita mampu menyehatkan perusahaan, pastilah ia juga mampu menyehatkan negara.

Kepemimpinan dan manajerial Gita Wirjawan sudah tidak patut lagi dipertanyakan karena bukti-bukti otentik sudah ada di depan mata setiap orang. Dengan mendirikan Ancora Foundation, Gita tidak hanya melulu mengurus soal keuntungan perusahaan, tetapi juga memiliki niatan mulia untuk memajukan bangsa melalui pendidikan tinggi yang berkualitas.

Modalitas kepemimpinan bisnis yang dimiliki Gita, diperoleh karena banyaknya pengalaman sejak kecil di luar negeri. Gita berbisnis dan bekerja di perusahaan multinasional dengan budaya internasional yang disiplin, menjadikannya seorang profesional keuangan yang disegani di tingkat nasional dan internasional. Gita Wirjawan adalah anak negeri yang membanggakan Indonesia. Tidak heran ketika Gita memutuskan untuk maju sebagai peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 2014 karena memang Gita memiliki modalitas kepemimpinan dan kemampuan bisnis yang sangat luar biasa.

Selain layak sebagai salah satu kandidat tekuat konvensi calon presiden Partai Demokrat, Gita Wirjawan juga seorang pemimpin yang mampu meramalkan situasi yang akan datang. Gita memang bertangan dingin mengurus perusahaan, disamping mampu membaca situasi untuk mengambil langkah yang paling menentukan, dimana orang-orang mungkin belum berpikiran ke arah sana. Salah satu contoh adalah saat Gita Wirjawan memutuskan untuk mundur sebagai Direktur Utama JP Morgan Indonesia karena Gita memperkirakan bahwa krisis ekonomi dunia akan segera datang. Ternyata benar, pada 2008 krisis ekonomi dunia benar-benar datang, dan Gita Wirjawan secara pribadi tidak ikut menanggung dampak negatif krisis. Seorang yang cerdas dan memiliki kepekaan tinggi dalam mengambil keputusan. Buahnya adalah disaat krisis sedang terjadi, tidak lama kemudian Gita Wirjawan diminta Presiden SBY untuk masuk dalam jajaran kabinetnya.

Terjun ke Politik

Pada akhir 2009, Gita resmi bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagai Kepala BKPM, Gita bertugas membenahi permasalahan-permasalahan investasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada 19 Oktober 2011, dia mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dengan ditunjuk Presiden SBY sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu. Gita menjadi menteri terkaya dalam kabinet. Nilai kekayaan yang dilaporkannya berjumlah Rp 397,65 miliar.

Gita tidak menolak untuk bergabung dengan kabinet karena dia merasa memiliki panggilan untuk melakukan perubahan. Menurutnya, sebagai menteri dia bisa melakukan lebih banyak hal untuk negara ini. Dia tidak lagi hanya menghasilkan kebijakan untuk diterapkan di organisasi ataupun perusahaannya. Kebijakan yang dia ambil sebagai menteri akan berpengaruh terhadap kepentingan umum dan menyangkut skala yang lebih besar.

Nama Gita mulai disebut-sebut sebagai kandidat calon presiden RI pada 2014 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan enam kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh capres dalam perayaan ulang tahun Partai Demokrat pada September 2011. Enam kriteria tersebut adalah muda, cerdas, mampu membawa ekonomi Indonesia bermartabat skala internasional, dan sejalan dengan kebijakan SBY. Dia juga harus mendapat pengakuan domestik dan internasional serta bersih dan berintegritas.

Selanjutnya, nama Gita disebut terang-terangan oleh Hayono Isman yang juga berasal dari Partai Demokrat pada Mei 2012. Selanjutnya, Gita ikut serta dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat pada September 2013. Gita pun menyatakan kesiapannya bila menjadi capres Partai Demokrat jika itu menjadi keputusan konvensi. Gita memutuskan untuk terjun ke dunia politik karena dia merasa selama ini ada kesan orang yang ingin menjadi pemimpin harus dikenal oleh 250 juta penduduk. Padahal menurutnya, siapa pun bisa maju menjadi calon presiden asalkan memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas. Dia mengubah paradigmanya dari pemimpin dipilih 250 juta menjadi 250 juta orang bisa dipilih menjadi pemimpin.

Karena itu, Gita mengklaim bahwa aktivitasnya berpolitik lebih bertujuan untuk menginspirasi orang lain. Bahwa orang biasa yang tak punya latar belakang politik juga berpeluang menjadi presiden. Gita cukup percaya diri untuk menjadi calon presiden lantaran melihat Indonesia sudah saatnya dipimpin orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Sebab bangsa ini sudah mulai setara dengan negara maju dalam berbagai hal.

Indonesia adalah negara yang penuh sesak dengan kaum muda. Ini adalah modal yang sangat berharga bagi kemajuan Indonesia ke depan. Menurut Gita, generasi anak muda Indonesia haruslah generasi Justin Bieber. Apa itu generasi Justin Bieber? Generasi yang mampu menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia disaat usianya masih sangat muda. Kita lihat

contoh penyanyi Justin Bieber, orang rela mengantre sehari-hari untuk mendapatkan tiket konsernya. Padahal ia masih sangat belia. Generasi Indonesia haruslah seperti Justin Bieber. Muda, sukses, dan menginspirasi.

Tidak hanya Justin Bieber, tetapi Gita juga menginginkan generasi Indonesia menjadi generasi gangnam style. Anak muda Indonesia haruslah seperti Psy yang mampu mengguncang dunia dengan tarian-tariannya. Psy yang berasal dari Korea Selatan, negara di Asia, dapat membuktikan bahwa dirinya mampu sukses di seluruh dunia. Bayangkan saja, Psy adalah orang yang secara fisik mungkin tidak menarik, tetapi justru menjadi penari paling fenomenal di dunia. Generasi muda Indonesia harus melihat bagaimana Justin Bieber dan Psy meraih sukses ke seluruh dunia.

Serius di Konvensi Demokrat

Diperkenalkan alam pertemuan kecil pertama kali pada 2005 dengan Presiden SBY saat dirinya masih menjadi bankir di JP Morgan Indonesia. Presiden SBY pertama kali bertemu dengan Gita berdiskusi soal perkembangan dan tren ekonomi Indonesia terkini. Dengan analisa data terkini dan faktual, Gita mengatakan bahwa Indonesia haruslah dapat melakukan *easy of doing business*. Gita saat itu adalah Presiden Direktur JP Morgan Indonesia.

Gita banyak memaparkan tentang perkembangan ekonomi dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Paparan Gita rupanya memuaskan Presiden SBY. Secara berkala Presiden SBY kemudian berdiskusi dengan Gita. Diskusi tersebut berlanjut sekalipun Gita tak lagi menjadi bankir, namun sudah menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia.

Belakang Presiden SBY tidak puas hanya berdiskusi dengan Gita. Presiden SBY menginginkan Gita masuk bersamanya dalam kabinet untuk mengurus dan menata perkonomian Indonesia. Gita pun dilantik menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Presiden SBY pernah mengucapkan kalimat yang berisi kriteria-kriteria calon pemimpin Indonesia. Semua kriteria tersebut merujuk dan sungguh ada di diri Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan sendiri. Ketika Partai Demokrat membuat sebuah mekanisme pemilihan calon presiden yang

akan diusung, maka Gita Wirjawan sudah sepantasnya ikut dan bersaing dalam kompetisi ini. Presiden SBY memang menyukai gaya personalitas Gita, dan juga sisi kepemimpinannya yang sudah teruji. Indonesia adalah negara dengan tingkat pertumbuhan yang menjanjikan, dimana modal-modal investasi internasional banyak yang ingin masuk untuk investasi di negara ini. Gita adalah salah satu pengusaha yang mengelola investasi, maka sudah sejalan sekiranya apabila Presiden SBY menilainya mampu meneruskan kebijakan ekonominya.

Indonesia adalah negara dengan tingkat pertumbuhan kelas menengah yang menjanjikan. Dengan populasi yang luar biasa produktif ada di tengah piramida penduduk, maka Indonesia adalah surga bagi investor asing dan dalam negeri untuk mengembangkan bisnisnya, dan akan memberikan keuntungan ekonomi berupa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gita Wirjawan memiliki resep ekonomi Indonesia dengan mengedepankan prinsip *ease of doing business* untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, masih memiliki keterikatan batin dengan birokrasi zaman dahulu kala. Dimana masih ada anggapan lebih banyak izin lebih baik untuk alasan pengawasan. Menurut Gita, hal tersebut harus diubah.

Untuk mendukung prinsip pembangunan ekonomi tersebut, Indonesia masih memiliki tantangan infrastruktur yang masih menjadi kendala yang dihadapi pengusaha asing, maupun domestik. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar untuk membangun suatu industri seperti listrik, air, jalan, bandara, dan pelabuhan.

Rezim perkreditan Indonesia juga masih tidak mendukung berkembangnya kewirausahaan Indonesia. tingginya suku bunga yang diberikan sangat tidak berbanding dengan rendahnya suku bunga yang diberikan di Malaysia atau Singapura. Gita meyakini bahwa semua itu harus diubah dan dibanahi. Gagasan prinsip pembangunan ekonomi Gita yang sejalan dengan gagasan pembangunan ekonomi Presiden SBY yang membuatnya menjadi seperti “anak emas” SBY.

Hal tersebut dapat dilihat dari kemunculan Gita setiap hari di media massa dan pemberitaan setelah menjabat sebagai Kepala BKPM dan kemudian Menteri Perdagangan. Presiden SBY memiliki harapan yang

besar terhadap Gita untuk mampu meneruskan pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan Presiden SBY.

Dari sisi kapabilitas pendidikan, Gita Wirjawan memiliki gelar master di dua ilmu administrasi, yaitu bisnis dan publik. Gita juga terbukti memiliki tangan dingin untuk mengurus hal-hal yang berbau ekonomi-perdagangan. Gita Wirjawan adalah seorang yang humanis. Humanisme Gita tumbuh karena jiwa seni dalam dirinya. Hal tersebut membuatnya memiliki kemudahan mengurus hal-hal ekonomi pembangunan berdasarkan nilai-nilai humanisme. Nilai humanisme dan demokrasi yang dimiliki Gita adalah modalitas moril yang penting untuk menjadi seorang pemimpin nasional yang dicintai semua kalangan.

“Rasa cinta saya terhadap negeri ini begitu kental. Merah putih selalu menjadi prioritas dalam benak saya, dan walaupun tidak bergabung di pemerintahan dapat tetap berkontribusi kepada negara, saya tetap berkeinginan untuk bergabung dengan pemerintah”. Itulah kata-kata Gita Wirjawan saat diwawancarai Michael Umbas untuk menulis buku autobiografinya yang berjudul “Gita Wirjawan: Sebuah Perjalanan”.

Gita Wirjawan resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan RI setelah RUU Perdagangan masuk ke DPR RI dan seusai perundingan World Trade Organization. Gita memilih mundur karena ingin fokus sebagai salah satu kandidat calon presiden di dalam kompetisi konvensi calon presiden Partai Demokrat. Keinginan Gita yang begitu kuat untuk fokus di konvensi Demokrat memperlihatkan keinginannya yang kuat untuk menjadi calon presiden, terlepas dari kontroversi mundurnya Gita.

Setelah mundur sebagai Menteri. Untuk meningkatkan dukungan masyarakat kepada Gita, setelah menyatakan mundur Gita langsung blusukan ke Kota Bandung. Gita menemui pemilih muda di Kota Bandung. “Pemimpin itu harus berasal dari kalangan muda”, kata Gita disela-sela diskusi dengan kalangan muda di Bandung.

Selain itu, Gita juga menyambangi salah satu pondok pesantren tertua di Kota Bandung. Aktivitasnya yang dilakukan untuk merebut dukungan kalangan Islam berpendidikan. Tidak hanya itu, Gita juga menemui Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat yang masih disegani oleh masyarakat Jawa Barat. Semua itu dilakukan dengan plong karena sudah tidak lagi terbentu

dengan protokoler dirinya sebagai menteri. Survei Gita memang tinggi pasca mundurnya Gita sebagai Menteri.

Memang soal mundur dan tidak mundur menjadi kontroversi. Ada semacam saling sindir diantara peserta konvensi Partai Demokrat. Posisi yang paling rentan terkena serangan adalah Dahlan Iskan yang juga peserta konvensi Partai Demokrat. Dahlan Iskan masih duduk sebagai Menteri Negara BUMN. Selain itu, masih ada juga Marzuki Ali (Ketua DPR RI), Irman Gusman (Ketua DPD RI), dan Ali Masykur Musa (Anggota BPK RI) yang menduduki jabatan publik. Tetapi posisi menteri adalah posisi eksekutif, sehingga memiliki peluang yang besar untuk menjalankan roda pemerintah dibanding posisi legislatif dan auditor.

Kontroversi Gita untuk mundur berbanding lurus dengan keuntungannya untuk bisa lebih fokus. Niatnya menjadikan Indonesia lebih baik memang benar-benar Gita impikan untuk diwujudkan pada 2014 ini.

Gita Berani untuk Lebih Baik



Gita Wirjawan memiliki tagline “Berani Lebih Baik” dalam pertarungan konvensi calon presiden Partai Demokrat. Gita memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, merata, adil, dan berkualitas. Semua hal itu akan dilakukannya dengan memperbaiki pembangunan sosial-politik dengan pementapan dan penyempurnaan kebijakan nasional yang makin demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Gita memiliki mimpi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, memiliki sumberdaya manusia yang unggul, berlandaskan semangat kemandirian dan jati diri bangga berbangsa. Dengan semangat kewirausahaan dan jiwa muda, maka Gita akan menggapai apa yang menjadi platformnya dalam kompetisi konvensi calon presiden Partai Demokrat di 2014 (*ayogitabisa.com*, 2013).

Gita Wirjawan memiliki modalitas yang kuat untuk menjadi calon presiden RI 2014. Dari sisi modalitas kapasitas, Gita Wirjawan memiliki semua nilai-nilai profesionalitas kepemimpinan di atas rata-rata. Banyak aktif di sektor privat di bidang keuangan dan perdagangan internasional membuatnya termasuk seorang yang terdepan di bidang ekonomi internasional. Lulusan Universitas Harvard ini memiliki kemampuan teoritis dan praktikal sekaligus yang menjadikannya calon kuat secara kapasitas untuk menjadi calon presiden RI 2014.

Dari sisi modalitas material, Gita Wirjawan memiliki perusahaan yang terus berkembang dan sangat menjanjikan di masa depan. Hal ini adalah modal kuat untuk membiayai mesin politik yang dibutuhkan sebagai kendaraan menuju kursi kepresidenan. Dari sisi penampilan, Gita adalah calon pemimpin muda yang berintegritas, cerdas dalam mengambil keputusan, dan disegani di dunia bisnis.

Modalitas jaringan yang dibangun Gita Wirjawan sejak masih bekerja di luar negeri menjadikannya memiliki jejaring internasional yang luas. Jejaring tersebut terdapat di dua sektor paling strategis, yaitu di dunia masyarakat ekonomi internasional dan di dunia masyarakat politik yang sejak menjadi Menteri Perdagangan sudah dibangun olehnya. Ketika Gita mulai bergelut di bidang sosial-kemasyarakatan lewat organisasi nirlaba, maka proses penguatan kapasitas Gita sebagai seorang pemimpin yang bottom up sedang dibangun. Apabila sektor ketiga ini menjadi kekuatan penting,

maka Gita sudah memiliki ketiga prasayat untuk maju sebagai pemimpin yang memiliki modalitas potensial di 2014.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Jika dianalisis, maka akan terlihat beberapa hal yang dapat menjadi peluang bagi Gita untuk maju dalam kontestasi demokrasi di Pilpres 2014. *Pertama*, sebagai figur baru, Gita memiliki rekam jejak kepemimpinan (*track record*) positif dan dapat menjawab keinginan publik terkait kebutuhan akan sosok baru yang berkualitas. Hal itu terlihat dari survei *opinion makers* dan pakar oleh Pol-Tracking Institute yang dirilis pada Oktober 2012 lalu. Riset tersebut menempatkan nama Gita berada di peringkat 10 di antara para politisi, profesional, dan pengusaha yang sudah lama berkiprah.

Tentu, capaian ini tidak buruk, apalagi Gita baru meretas jalan sebagai ‘politisi’ terhitung sejak tahun 2009. Apalagi dari beberapa aspek yang dinilai dalam survei tersebut, terdapat beberapa aspek yang menonjol dari seorang Gita. Misalnya aspek kapabilitas dengan skor (7.04), visioner (6.46), dan leadership skills (6.37). Ketiga aspek ini tentu bisa menjadi penting bagi Gita.

Kedua, Gita memiliki pandangan-pandangan yang *genuine* terkait bidang ekonomi sehingga karena prestasinya itu, ia didaulat menjadi Menteri Perdagangan. *Ketiga*, keikutsertaan dalam konvensi bisa menjawab problem akseptabilitas partai maupun elite yang menjadi kelemahan Gita selama ini. Bagi Demokrat, kehadiran Gita barangkali bisa menjadi solusi atas regenerasi kepemimpinan nasional.

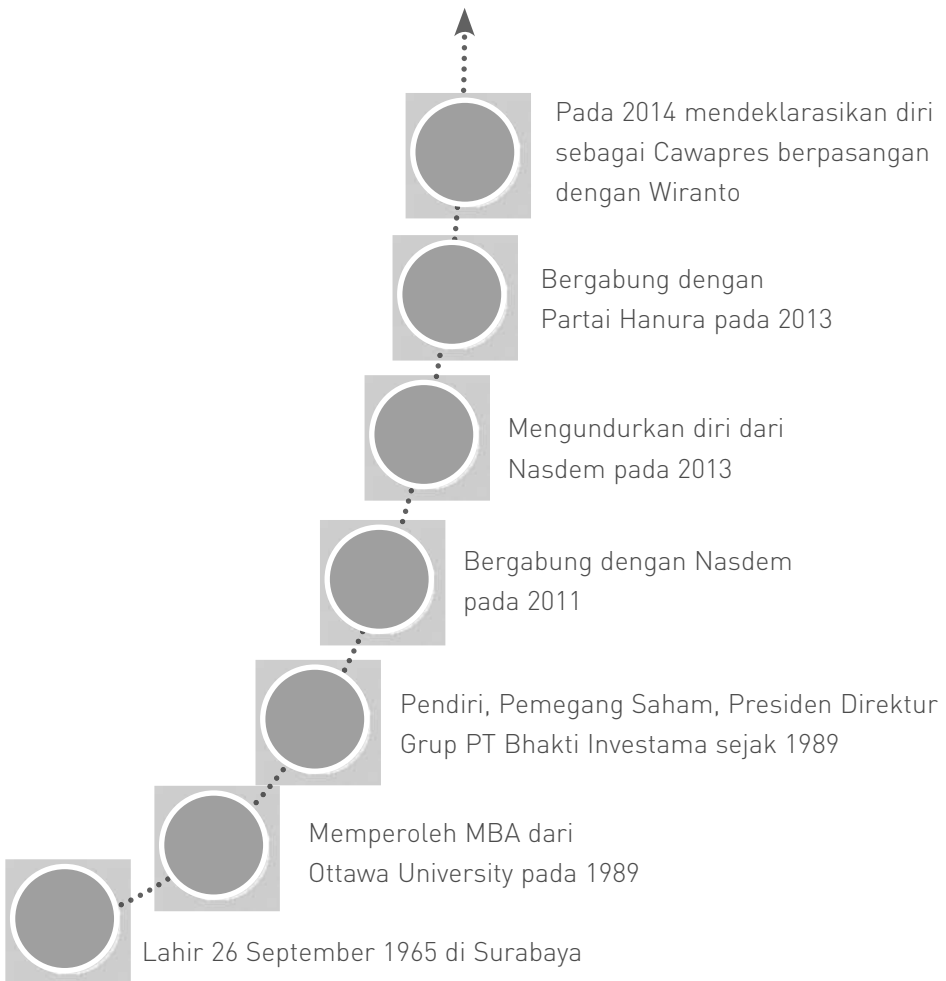
Namun demikian, meski mendapatkan dukungan penuh dari Partai Demokrat tak menjamin jalan Gita untuk menjadi presiden pada 2014 akan mulus-mulus saja. Banyak tantangan yang harus dihadapi, untuk itu Gita harus memanfaatkan semua peluang yang dimiliki agar tujuan tercapai. Sebagai seorang Menteri Perdagangan, banyak gagasan Gita yang dianggap kurang mendukung kemandirian ekonomi nasional. Kesimpulan tersebut terutama berdentung saat Gita bicara soal impor. Gita dinilai sebagai menteri yang suka sekali impor—meskipun bagi

Gita, langkah tersebut diambil semata-mata untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di dalam negeri.

Tantangan berikutnya tentang elektabilitas Gita yang masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Gita masih di urutan ke-5 di antara peserta konvensi lainnya. Dan tantangan elektabilitas ini perlu mendapat perhatian khusus dari Gita dan timnya

HARY TANOESOEDIBJO

Pemimpin Potensial





kolom-biografi.blogspot.com

Di dunia politik, nama Hary Tanoesoedibjo masih tergolong baru. Salah satu taipan media di Indonesia ini baru terlibat dalam politik praktis saat bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang dibentuk koleganya, Surya Paloh. Kemesraan antara keduanya ternyata tidak berlangsung lama. Hary terlibat silang pendapat yang tajam, puncaknya ia pun memutuskan keluar dari partai yang membawa gagasan perubahan itu.

Curita media yang dimiliki Hary rupanya menjadi pesona yang menggiurkan bagi partai politik di tanah air. Sejumlah parpol nyata-nyata mengajak Hary bergabung. Namun, hati Hary telah tertambat. Tak lama setelah memutuskan keluar dari NasDem, Hary lantas mengumumkan bergabung bersama Hanura untuk melanjutkan perjalanannya kembali.

Pria yang memiliki nama asli Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo ini lahir di Surabaya pada 16 September 1965 silam. Ia adalah anak dari Ahmad Tanoesoedibjo, seorang pengusaha. Hary adalah bungsu dari tiga bersaudara, kedua kakaknya bernama Hartono Tanoesoedibjo dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo.

Hary kecil terkenal nakal. Baru tiga bulan menempuh pendidikan di SMAK St Louis Surabaya, dia mendapat skorsing selama enam bulan. Ini lantaran Hary memimpin tawuran dengan murid SMA Petra. Kenakalan terus berlanjut, namun lama-kelamaan mulai menunjukkan titik jenuh. Hary mulai sadar dan giat belajar.

Pada 1984, Hary memutuskan untuk ikut ujian persamaan yang digelar Dinas Pendidikan saat itu. Akhirnya dia lulus dan mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikan di Carleton University, Kanada. Dia bahkan lulus dengan nilai terbaik alias *cumlaude*. Dia lalu melanjutkan pendidikan S2-nya di Ottawa University dan meraih gelar Master of Business Administration, juga dengan status lulusan terbaik.

Usai kuliah Hary lekas kembali ke Indonesia dan mengadu nasib di Jakarta. Meskipun berasal dari keluarga berada, Hary tidak mau manja. Dia ingin mandiri dan tidak bergantung dengan siapapun. Dia bekerja keras untuk hidupnya. Hingga di umurnya yang masih terbilang muda saat ini, 48 tahun, Hary telah mampu mencetak kerajaan bisnisnya sendiri.

Memulai dari Nol

“Saya memulai usaha dari nol. Sejak kuliah, saya berpikir bagaimana supaya mandiri. Saya dagang di Kanada waktu itu,” kisahnya. Bagi Hary, kunci sukses berwisausaha bukanlah bermodal besar, namun berpikir besar, fokus, dan cermat memanfaatkan peluang diiringi semangat berjuang untuk mengejar tujuan.

Di awal kariernya, dia mendirikan PT Bhakti Investama Tbk. Ketika itu, fokus perusahaan ini pada kegiatan pasar modal dengan modal usaha hanya Rp 200 juta. Pada 1997, dia membawa perusahaannya untuk *go public*. Padahal krisis ekonomi sedang melanda Indonesia ketika itu. Dia justru melihat kondisi tersebut sebagai sebuah momentum. Dia tetap yakin Indonesia akan bangkit dari krisis dan berkembang menjadi besar. Meskipun bau pesimisme menyeruak di setiap sudut negara ini.

Hary juga mengakuisisi banyak perusahaan yang bangkrut dan asetnya dijual murah oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dia pun memperbanyak relasinya, bahkan merapat ke keluarga Cendana yang memiliki investasi dan dana besar. Hal ini bukan hal sulit bagi Hary karena dirinya adalah seorang pelobi dan negosiator ulung.

Ketika Soeharto lengser, bisnis keluarga Cendana pun goyah. Bukannya menjauh, Hary dengan bakat bisnisnya yang besar, justru mempererat hubungan dengan keluarga tersebut. Dia malah berperan sebagai penyelamat bisnis Cendana. Pada 2002, dia masuk ke lingkungan bisnis Cendana de-

ngan membeli 24,94 persen saham perusahaan Bimantara Citra yang didirikan putra Soeharto, Bambang Trihatmojo.

Di tangan Hary, perusahaan tersebut malah mampu bangkit dan meraup keuntungan yang lebih besar. Harga saham Bimantara di lantai bursa terus bergairah dan merangkak naik. Hary secara bertahap meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut hingga menjadi pemegang saham mayoritas. Bimantara pun kemudian menjadi anak perusahaan Bhakti Investama dan diubah namanya menjadi PT Global Mediacom Tbk.

Selain Bimantara, Hary juga melirik bisnis media keluarga Cendana, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dimiliki oleh Siti Hardijanti Rukmana atau kerap disapa Mbak Tutut. TPI saat itu memang terancam pailit karena terbelit utang sebanyak 55 juta dolar AS. Hary kemudian melakukan perjanjian dengan Mbak Tutut. Mereka sepakat bila semua utang tersebut diambil alih Hary. Dia juga akan menambah modal agar kinerja TPI membaik. Sebagai imbalannya, Mbak Tutut memberikan 75 persen sahamnya di TPI kepada Hary. Dia pun menjadi pengendali penuh operasional perusahaan tersebut.

Kini suami Liliana Tanaja itu, tidak hanya memiliki TPI dan Bimantara. Hary menaungi lebih dari 23 ribu karyawan, tujuh perusahaan di Indonesia dan satu di luar negeri. Nilai sahamnya sudah mencapai triliunan. Perusahaan yang dimiliki Hary umumnya bergerak di sektor media penyiaran dan telekomunikasi.

Selain menjadi Presiden Direktur Global Mediacom, Harry juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 2003. Dia pun tercatat sebagai Komisaris PT Mobile-8 dan Telecom Tbk, Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera grup perusahaan Global Mediacom dan Bhakti Investama. Selain tiga stasiun TV swasta, yaitu RCTI, MNC TV, dan Global TV, grup medianya juga mencakup stasiun radio Trijaya FM dan media cetak Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust (Kini menjadi Sindo Weekly), dan tabloid remaja Genie.

Pada 2011, Majalah *Forbes* merilis daftar orang terkaya di Indonesia dan Hary menduduki peringkat ke-22 dengan total nilai kekayaan sebesar 1,19 miliar dolar AS. Pada rilis terbaru *Forbes* 2013, kekayaan Hary semakin meningkat mencapai 1,35 miliar dolar AS.

Hary dikenal sebagai pribadi yang terbuka dan senang untuk berbagi ide. Bukan sekali dua kali dia berdiri di depan khalayak sebagai pembicara dan memberikan motivasi untuk berwirausaha. Hary tidak segan mengungkapkan perjuangannya dalam memulai bisnis dan menyemangati masyarakat untuk mencontoh kerja kerasnya itu. Dia pun tidak keberatan mengungkapkan rahasia kesuksesannya.

Ayah dari empat orang putri dan seorang putra tersebut berpendapat, hal yang paling penting untuk mencapai kesuksesan adalah tidak putus asa dalam berusaha. Kegagalan bukanlah hal yang harus disesalkan. Menurutny, seorang pebisnis harus pernah merasakan kegagalan agar mampu bangkit kembali dan membangun usaha yang lebih besar dengan merujuk pada kegagalan sebelumnya.

Hary mengakui, hasil kerja kerasnya baru dapat ia nikmati empat hingga lima tahun lalu. Pada 2008, keuntungan perusahaannya baru mencapai Rp 20 triliun, namun saat ini bisa mencapai sekitar Rp100 triliun. Keberhasilan dalam pandangan Hary tidak lah diperoleh dalam sesaat, melainkan membutuhkan proses panjang. Untuk itu, menurutnya generasi muda harus berani mengambil langkah untuk menentukan masa depannya. (koran. *sindo.com*, 2013)

Selain itu, agar sukses berbisnis menurut Hary seseorang harus memiliki kecepatan dalam mengambil keputusan dan berani menerima resiko. Namun tetap harus memiliki perhitungan yang matang, mengedepankan kualitas, dan etos kerja yang tinggi. Selain itu, seorang pebisnis harus semangat, fokus, rajin, disiplin, rendah hati, dan bergaul dengan lingkungan yang tepat.

Seorang wisausahawan, lanjut Hary, juga tidak boleh berhenti belajar. Dia harus rajin membaca buku maupun surat kabar baik dari dalam maupun luar negeri. "Orang dulu meragukan saya apa saya bisa mengatur perusahaan televisi padahal saya tidak memiliki pengalaman di bidang itu. Namun buktinya saya bisa karena saya mau belajar dan fokus. Itu kuncinya," katanya.

Pebisnis juga harus memiliki komitmen yang kuat. Menurutny, banyak orang tidak bisa maju karena tidak mau berubah menjadi lebih baik. Dia mungkin memiliki keinginan tapi tidak mau melakukannya. Konsistensi adalah harga mati dalam bisnis. Baginya banyak orang pandai merencanakan tapi lemah dalam eksekusi. Banyak orang tahu memulainya tapi tidak

tahu mengakhirinya. Padahal keberhasilan ditentukan bagaimana kita mengakhirinya, bukan bagaimana memulainya.

Menurutnya, bila generasi muda Indonesia mau berjuang keras untuk mencetus keberuntungannya sendiri, maka Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Apalagi negara ini memiliki anugerah populasi penduduk yang cukup besar dan mayoritas adalah penduduk berusia di bawah 40 tahun. Indonesia lanjutnya membutuhkan lebih banyak wirausahawan dan akademisi yang berkualitas.

Dia pun percaya akan kekuatan doa. Menurutnya, doa sangat penting dalam keberhasilan segala sesuatu baik yang sedang maupun yang akan dilakukan. Karena spiritualitas itu adalah kekuatan untuk mencapai tujuan.

Sepakbola dan Tinju

Hary memiliki ketertarikan yang besar terhadap olahraga. Dia pernah terlibat dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat periode 2003-2007, dengan jabatan bendahara. Hary pun pernah mendatangkan tim sepak bola terkenal dunia, Arsenal ke Indonesia. Ini adalah kunjungan Arsenal kedua setelah 31 tahun silam. Kedatangan Arsenal ke Indonesia selain menjadi prestasi tersendiri untuk perkembangan sepakbola Tanah Air, kunjungan tersebut juga dijadikan Hary untuk membuat Komisi Penyelamatan Sepak Bola Indonesia (KPSI) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) rujuk.

Dia menginginkan tim yang berlaga dengan Arsenal adalah gabungan pemain dari Indonesian Super League (ISL) dan Indonesin Premier League (IPL) yang disebut Dream Team. Menurut Hary, adanya konflik antara KPSI dan PSSI malah membuat prestasi persepakbolaan Indonesia kian sulit untuk maju. Dia menginginkan ISL dan IPL bisa disatukan demi terciptanya tim nasional yang lebih kuat.

Hary juga menunjukkan kepeduliannya dengan legenda sepak bola Indonesia yang telah meninggal dunia, Abdul Kadir. Hary tidak kuasa melihat kondisi Abdul yang miskin, padahal dia telah menyumbangkan banyak medali bersama tim nasional Indonesia ketika dia masih aktif bermain sepak bola. Dia pun memberikan bantuan kepada keluarga Abdul pada Juni 2012. Bantuan tersebut berupa materi dan bahan bangunan yang dapat

mendukung proses renovasi rumah keluarga almarhum di Kalimalang, Bekasi.

Selain peduli akan persepakhwaan Tanah Air, Hary juga menunjukkan ketertarikannya yang besar pada cabang olahraga tinju. Hary bergabung dengan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) sebagai Dewan Kehormatan periode 2012-2016. Bagi Hary, berkecimpung dalam jajaran Pembina Pertina adalah suatu kehormatan. Raja media ini berkomitmen ingin mengangkat nama Indonesia supaya lebih dikenal di dunia internasional melalui prestasi olahraga tinju.

Pada awal Februari 2013, ia bersama Ketua Umum Pertina Reza Ali melakukan penandatanganan akta pendirian PB Pertina. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari usaha Hary yang akan memberikan bantuan dana untuk Pertina. Dia memberikan anggaran secara rutin untuk mendukung aktivitas Pertina. Sesuai dengan aturan Kementerian Pemuda dan Olahraga, setiap penerima anggaran wajib memiliki akta pendirian. Sementara Pertina, meskipun sudah berdiri semenjak 1959 ternyata belum memiliki akta pendirian.

Menembus Dunia Politik

Belasan tahun bergelut di ladang bisnis, rupanya tak membuat Hary berpuas diri. Dia pun memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Banyak pihak yang terkejut dengan kemunculan Hary di politik praktis. Namun bukan Hary namanya bila tidak membuat kejutan. Jika dirunut ke belakang, sebagai pengusaha Hary memang dikenal sebagai sosok fenomenal. Kerap membuat gerakan yang tak terduga bahkan kontroversial.

Dalam majalah *Tempo* edisi 25 Februari 2013, Hary mengungkapkan alasannya masuk dunia politik. "Sederhana saja, bukannya saya sok idealis, negara ini banyak masalah dan semakin tak ada kepastian," ungkapnya. Padahal masyarakat membutuhkan kepastian dalam segala hal, dari kebijakan ekonomi, sosial, sampai soal kepemimpinan. Tapi hal tersebut masih bisa diperbaiki. Agar menjadi bagian dari perubahan itu, menurutnya jalannya adalah melalui panggung politik.

Menurutnya, terjun ke dunia politik bukan hal yang gampang. Dia mengorbankan banyak hal untuk itu. Dia mengaku tidak banyak keuntungan

yang diperolehnya dari keputusan tersebut, malah kontraproduktif. Hary menjelaskan, ada tiga risiko yang harus ditanggungnya yaitu harus berpikir jernih, energi, dan dana. Namun dia yakin, hidup adalah pilihan. Pilihannya yang diambilnya adalah berbuat sesuatu untuk menghadirkan sebuah perubahan dan untuk itu dia harus mengorbankan sesuatu.

Dengan kekuatan media dan dana yang dimilikinya, tidak sulit bagi Hary untuk menemukan kendaraan politiknya. Dia mengaku, sejak keputusannya untuk terjun ke politik didengungkan, hampir semua partai mendekat padanya. Namun di awal kariernya di politik, Hary memutuskan untuk bergabung dengan Partai NasDem pada Oktober 2011 yang didirikan dan dipimpin oleh seorang pengusaha media juga, Surya Paloh.

Pada November 2011, Hary muncul pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai NasDem yang pertama. Di partai tersebut, Hary menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional. Sejak ia berkiprah melalui Partai NasDem, Hary mendukung-dengungkan semboyan *Gerakan Perubahan*, suatu gerakan yang dimotori oleh kelompok angkatan muda Indonesia. Menurutnya, di dalam Partai NasDem 70 persen kadernya terdiri dari generasi muda.

Namun keberadaannya di partai tersebut tak berlangsung lama. Pada 21 Januari 2013, Hary mengumumkan bahwa ia resmi mengundurkan diri



dari Partai NasDem karena adanya perbedaan pendapat dan konflik yang meruncing. Hary pun lantas merasa sedih dan sangat berat meninggalkan Partai NasDem yang telah tiga bulan ia besarkan. Apalagi partai tersebut telah berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan resmi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan Nomor Urutan 1.

Setelah meninggalkan NasDem, Hary membentuk organisasi massa Persatuan Indonesia (Perindo) untuk Perubahan pada Februari 2013. Bersama Perindo, Hary ingin menyalurkan segenap obsesinya yang dahulu tidak mendapat tempat di Partai NasDem. Yang utama adalah memprioritaskan Perindo untuk kaum muda Indonesia dari segala kalangan.

Banyak orang yang berpikir bahwa Perindo akan dibesarkan Hary sebagai partai politik dan kendaraan barunya untuk menghadapi Pemilu 2014. Namun anggapan tersebut salah, Hary tetap mendekatkan diri dengan sejumlah partai yang telah lama berdiri. Setidaknya ada tiga partai yang jadi pertimbangan Hary, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Akhirnya, Hary memutuskan untuk bergabung dengan Hanura. Di partai yang dikomandoi Wiranto ini, dia langsung dipercaya sebagai ketua dewan pertimbangan partai. Hary memilih Hanura karena partai ini memenuhi tiga hal, yaitu mempunyai sikap dan prinsip yang jelas, konsisten dengan tujuan awal pembentukannya, dan tidak sedang dalam kondisi konflik.

Hary menolak bergabung dengan PKB karena partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut memiliki basis massa Islam tradisional yang kuat, yaitu kaum Nahdhiyin yang bermuara ke Nahdlatul Ulama (NU). Hary menilai, sepak terjangnya di PKB akan kurang optimal karena ia bukan seorang Muslim.

Sedangkan alasan keengganan Hary bergabung dengan Partai Demokrat karena partai penguasa ini sedang terlibat konflik internal yang cukup parah di tataran elite. Lagi pula, Hary menginginkan partai yang jauh dari kesan korupsi. Sementara banyak aktivis Demokrat yang dididuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat kasus korupsi, sebut saja Nazarudin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan banyak lagi.

Sejumlah survei menyebutkan Hanura mempunyai predikat sebagai partai politik yang paling bersih, tidak korup, dan tidak merusak lingkungan. Apalagi partai ini dipimpin oleh Wiranto yang sudah makan asam garam di

dunia perpolitikan Indonesia. Hary pun memiliki paham yang sama dengan Wiranto mengenai masalah bangsa dan solusi untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Tak sampai setahun masuk ke Partai Hanura, Hary langsung dilantik sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu partai tersebut. Alasan pengangkatannya adalah karena Hary memiliki modal politik yang besar. Partai Hanura berharap mendapatkan limpahan dana dan juga bantuan publikasi melalui jaringan media MNC Group yang dimiliki Hary.

Hary pun kini dipilih menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Wiranto yang didapuk sebagai bakal calon presiden. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013) lalu, di Hotel Mercure, Jakarta Pusat. "Saya tidak berusaha untuk menjadi presiden atau wakil presiden, tapi saya diminta untuk menjadi kandidat wakil presiden," ujar Hary setelah deklarasi.

Bukan Cawapres Injury Time

Pendeklarasian Hary Tanoe sebagai cawapres dari Wiranto yang dilakukan kurang lebih 1 tahun sebelum pemilu adalah satu terobosan budaya politik. Selama reformasi banyak cawapres yang maju pada pemilu 1999, 2004, 2009 ialah seorang yang menunggu pinangan dari seorang capres. Mereka dapat dikategorikan sebagai cawapres *injury time*. Yang juga dapat diartikan cawapres yang dirangkul berdasarkan hasil kalkulasi suara kompetisi pileg.

Menurut Nixon, pemimpin tidak bekerja keras untuk mengejar popularitas, tetapi popularitaslah yang bakal mengejar dirinya (Alfian, 2009). Hary Tanoe yang bukan cawapres *injury time*, dapat dikategorikan merupakan pemimpin atau cawapres yang mau berkeringat dari awal. Hary Tanoe melakukannya dengan menjalankan program-program partai Hanura.

Apabila ditanya perihal koalisi yang akan dilakukan Hanura, hingga hari ini pun, Hary Tanoe akan menjawab masih terlalu pagi. Hary Tanoe menyadari betul, perjuangan Hanura mencalonkan capres dan cawapres berasal dari satu partai tidaklah ringan. Karena harus memenuhi syarat UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan capres dan cawapres adalah

partai atau gabungan partai yang berhasil meraih 20% dari total kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% persen dari suara pemilih sah nasional.

Hary Tanoe sendiri menargetkan Hanura dapat meraih suara pileg sebesar 30%. Caranya, Hary Tanoe memfokuskan kemenangan pada daerah pemilihan Jawa, yakni dengan memasang caleg yang berlatar belakang Jawa diatas 50%. Disamping itu, Hary Tanoe juga akan melakukan sosialisai partainya kepada pemilih melalui beberapa media, seperti televisi, radio dan surat kabar.

Hal positif lain yang dapat dilihat dari partai Hanura dan Hary Tanoe adalah sebagai kubu oposisi. Yang menurut Ignas Kleden, “mereka baik dan benar dalam politik dan dapat diuji dalam wacana publik yang terbuka”. Hal ini dapat tersirat dari Hary Tanoe sebagai cawapres yang bersama Wiranto sebagai capres yang mempunyai slogan “Bersih, Peduli, Tegas”.

Pengertian Bersih menurut Hanura adalah terbebas dari perbuatan tercela atau melanggar hukum melakukan korupsi serta tindakan hukum lainnya. Hal ini telah terbukti dari beberapa hasil survey yang dirilis tentang pelaku korupsi yang berlatar belakang partai politik, menjelaskan Partai Hanura adalah relatif merupakan partai bersih diantara partai-partai lainnya.



Kemudian yang dimaksud dengan Peduli adalah kepedulian Hanura terhadap situasi dan keadaan negara dan bangsanya seperti yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan yang lainnya. Program Kartu Asuransi Jiwa dan Kredit Tanpa Bunga untuk UKM adalah beberapa program diantaranya.

Dan untuk pengertian tegas yaitu menindaklanjuti segala persoalan sesuai prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari keputusan Partai Hanura yang menolak Bail Out Bank Century dan menolak pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba, yakni Corby.

Persatuan Indonesia untuk Perubahan

Sebagai pemimpin atau cawapres, Hary Tanoe juga mempunyai gagasan yakni Persatuan Indonesia. Gagasan ini diejawantahkan oleh ormas bentukannya yakni Perindo. Perindo pun mempunyai slogan “untuk perubahan”.

Latar belakang gagasan Persatuan Indonesia dibuat oleh Hary Tanoe karena kekhawatirannya terhadap praktek demokrasi yang oligarkis yang merugikan rakyat banyak dan mengancam persatuan. Hary Tanoe mengharapkan praktek demokrasi di Indonesia dapat dikembalikan pada relnya yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan ini tercermin dari tujuan perindo yaitu “untuk menggalang, mengorganisir, menggerakkan dan menumbuhkembangkan persatuan nasional dengan bersungguh-sungguh mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan demokratis melalui penguatan kedaulatan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan”. Dan inilah yang dimaksud untuk perubahan oleh Perindo.

Maka dari itu, Hary Tanoe membuat operasionalisasi gagasan Persatuan Indonesia ini melalui visi dan misi Ormas Perindo. Visi Ormas Perindo sendiri adalah “Indonesia yang berkemajuan, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya diatas kekuatan persatuan nasional”.

Sedangkan Misi nya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, *Pertama*, Membangun persatuan nasional sebagai prasyarat bangsa berdaulat. Yang berarti

secara aktif membangun kesadaran dan kepeloporan untuk terciptanya persatuan nasional dalam perspektif satu negara bangsa yang bertumpu pada dimensi manusia sebagai rakyat, tanah air sebagai wilayah kedaulatan dan sumber kehidupan, dan mewujudkan impian didirikannya Republik Indonesia sebagai tugas sejarah yang lahir dari semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan 1945.



Kedua, Menggalang kekuatan perubahan menuju terwujudnya visi Perindo. Perindo menyadari sepenuhnya, adalah kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh menggalang segenap kekuatan perubahan melalui perwujudan nyata untuk pemerataan, kesetaraan, emansipasi yang merupakan nilai dasar Persatuan Indonesia. Kekuatan perubahan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, politik dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, Mendorong nilai-nilai nasional sebagai pedoman bersama kehidupan berbangsa dan bernegara. Perindo secara aktif mempertahankan nilai kebangsaan yakni gotong royong, bhineka tunggal ika, demokrasi ekonomi, negara hukum, hak asasi manusia dan internasionalisme sebagai kekuatan nasional. Perindo tidak hanya mempertahankan, tapi secara sa-

dar dan aktif mendorong nilai-nilai nasional tersebut untuk menjadi laku politik seluruh masyarakat Indonesia.

Hary Tanoe juga memahami peran pemuda dalam melakukan perubahan di sepanjang sejarah pembentukan dan pembangunan Indonesia. Berkaca dari itu, Hary Tanoe merangkul pemuda kedalam Perindo sebagai kadernya. Melalui Perindo, kawula muda diharapkan akan mamu menyumbangkan pemikiran dan ide untuk perbaikan bangsa ini.

Anak-anak muda yang mendukung Hary Tanoe dan Perindo ialah beberapa mantan kader NasDem, mantan aktivis 1998 dan beberapa mahasiswa. Mereka diantaranya, seperti Ahmad Rofiq, Saiful Haq, Endang Triana dan Yusuf Lakaseng. Selain itu juga untuk menghimpun beberapa pemuda kedalam Perindo, dibuat organisasi sayapnya yakni Asosiasi Pemuda Indonesia Perindo (API Perindo) dan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Perindo (Perisai Perindo).

Dengan menghimpun dan menjadikan pemuda sebagai motor pergerakan Perindo, ini dapat dinilai berhubungan dengan dasar Hary Tanoe yang terjun ke dalam politik karena alasan idealisme. Seperti yang diungkapkan Hary Tanoe, saat pengunduran dirinya dari Partai NasDem, "Politik itu idealisme, bisnis itu organisasi komersial. Di organisasi politik kita berbeda, Kalau bisnis, bisa saja saya berbisnis dengan Surya Paloh. Kita berpolitik bukan karena berbisnis".

Dengan begitu, terjawab sudah kecurigaan selama ini terhadap Hary Tanoe yang dinilai berpolitik hanya untuk meraih keuntungan secara materi. Dengan kata lain dapat disimpulkan, alasan Hary Tanoe berpolitik ditinggah kemapanan ekonominya adalah untuk melakukan pengabdian dan perubahan, seperti yang dikatakannya dari awal dan disetiap kesempatan.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Masuknya Hary Tanoe dalam bursa cawapres 2014 mempunyai daya tarik tersendiri. Pada era reformasi tren pengusaha masuk kedalam dunia politik, seperti Soetrisno Bachir dan Salim Hashim Djojohadikusumo, kini semakin dipertegas dengan Hary Tanoe sebagai pengusaha media yang menjadi Ketua Dewan Pakar Partai NasDem lalu berpindah menjadi Ketua Bapilu Partai Hanura. Bahkan tidak cukup dengan itu, Hary Tanoe pun menjadi

cawapres untuk aktualisasi dirinya dan mencapai idealisme politik yang dicita-citakannya.

Hal ini mungkin dikarenakan Hary Tanoe melihat fakta keberhasilan pengusaha media yang dalam karier politiknya berhasil menduduki jabatan publik. Diantaranya yang terkenal, di Asia adalah Thaksin Sinawatra yang merupakan pengusaha media di Thailand yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Thai Rak Thai dan berhasil menjadi Perdana Menteri periode 2001 sampai dengan 2006. Atau juga di Eropa, Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi yang juga pengusaha media besar yang berhasil menjadi Perdana Menteri mulai dari 1994-1995, lalu 2001-2005 dan 2008-2011.

Keberhasilan para pemilik media tersebut menjadi Perdana Menteri dapat ditiru Hary Tanoe dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya sebagai modal cawapres pada pemilu 2014 nanti. Beberapa kekuatan tersebut diantaranya, kekuatan materi, media massa, masa ormas dan figure muda.

Pertama, dengan kekuatan materi yang dimilikinya, Hary Tanoe dapat dikatakan memiliki posisi yang lebih unggul diantara cawapres lainnya dan dapat berperan signifikan untuk membesarkan Partai Hanura. *Didik Supriyanto dan Dia Wulandari (2012)* mengatakan kekuatan material dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan partai politik, yang meliputi operasional, kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, public expose, dan perjalanan dinas pengurus.

Hal ini terlihat ketika Hary Tanoe menjadi Ketua Bapil. Dengan posisi ini Hary Tanoe bertanggungjawab terhadap setiap hal baik strategis atau teknis kemenangan pada pemilu 2014 nanti. Terkait dengan itu, beberapa kegiatan pun dibuat Hary Tanoe, diantaranya membuat acara pembekalan kepada para caleg dari Partai Hanura, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan sampai tingkat kabupaten/kota, yang tentunya tidak dengan modal yang sedikit. Dan ini akan mempermudah konsolidasi dari tiap caleg dan kader partai untuk seirama menjalankan strategi kemenangan yang sudah dibuat baik untuk Hanura atau Wiranto dan Hary Tanoe.

Hary Tanoe pun sebagai cawapres, juga aktif mensosialisasikan dirinya dengan membangun komunikasi atau mengadakan acara dengan orga-

nisasi-organisasi masyarakat. Sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan Hary Tanoe adalah dengan mengadakan suatu acara atau mensupport program-program dari ormas terkait, baik materi ataupun non materi.

Kedua, dengan menguasai beberapa media, baik cetak ataupun elektronik, hal ini membantu Hary Tanoe dapat berkomunikasi secara efektif dan massal kepada pemilih-pemilih yang ada di daerah. Meminjam istilah Nimmo, Hary Tanoe dapat dikategorikan sebagai politisi yang juga menjadi agen untuk melakukan komunikator politik yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat, melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program dan tujuan politik, memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan pendukung partai. Ditambah juga menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi pembicaraan dalam bentuk opini publik dan meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, *agenda setting*, maupun komentar-komentar politik.

Ketiga, dengan inisiatif Hary Tanoe mendirikan dan mengembangkan Ormas Perindo sampai dengan sekarang, sangat bermanfaat sebagai basis pendukung yang loyal diluar Hanura. Hary Tanoe dapat menjadikan kekuatan kader Perindo untuk mendukung dirinya sebagai cawapres. Caranya dengan memastikan adanya Perindo disetiap tingkatan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Dan membuat program Ormas Perindo tersebut berbeda dengan Partai Hanura, namun tetap mendukung tujuan kemenangan Wiranto dan Hary Tanoe sebagai pasangan capres dan cawapres dari Hanura. Mair mengatakan bahwa organisasi sosial dapat memanfaatkan hal-hal yang bersifat *social cleavages* sebagai instrumen mobilisasi politik gerakan mereka (*Mair dalam Katz & Crotty, 2006*).

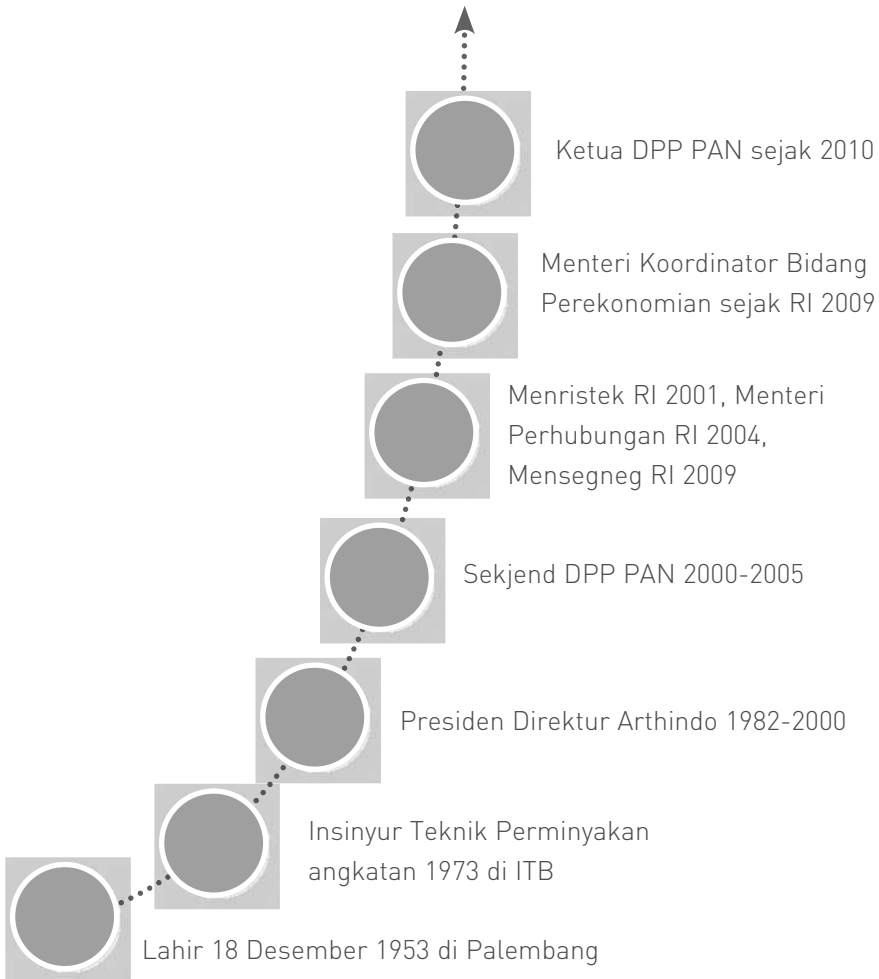
Keempat, yang juga menjadi kelebihan Hary Tanoe adalah melakukan mobilisasi melalui Perindo adalah sosoknya sebagai figur muda. Figur muda ini terus ditampilkan Hary Tanoe disetiap kesempatan. Mulai dari merangkul anak-anak muda kedalam Perindo dan juga membuat program-program yang menampung aspirasi muda. Beberapa program seperti Beasiswa yang diberikan Hary Tanoe kepada pelajar dan mahasiswa serta membuat kompetisi olahraga dibeberapa bidang, secara langsung

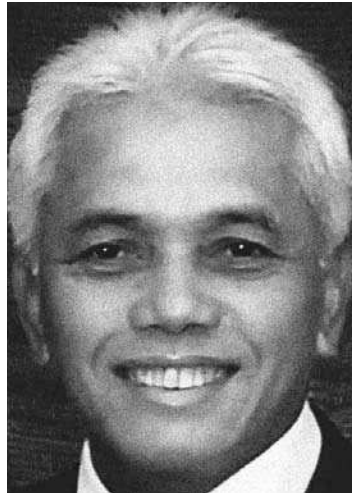
atau tidak, dapat semakin melekatkan dirinya sebagai figure muda dan meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya dimata pemilih pemula muda.

Meskipun demikian, Hary Tanoe sebagai cawapres dari Wiranto yang diusung Partai Hanura, tetap mempunyai tantangan. Tantangannya adalah pemenuhan syarat pengajuan capres dan cawapres yang harus dapat dipenuhi oleh Hanura bersama Wiranto dan Hary Tanoe. Memang tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, tetapi yang pasti Hanura bersama Wiranto dan Hary Tanoe harus tetap membuat “Plan B” apabila rencana pengajuan capres dan cawapres ini tidak berjalan seperti yang diinginkan.

HATTA RAJASA

Pemimpin Potensial





eranya.com

Ketokohan Hatta Rajasa tak perlu dipertanyakan lagi. Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah mencicipi berbagai posisi penting di kabinet. Perawakannya yang berbeda dengan rambut putihnya yang khas telah membangun citra tersendiri terhadap dirinya.

Hatta dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan pada 18 Desember 1953. Usai menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Palembang, Hatta melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknik Perminyakan ITB pada 1973. Usai kuliah dia bekerja di perusahaan swasta PT Bina Patra Jaya sebagai teknisi lapangan hingga 1978.

Selanjutnya pada 1980, Hatta bergabung dengan PT Meta Epsi sebagai Wakil Manager teknis. Pekerjaan tersebut hanya bisa dilakoninya hingga 1983. Hatta kemudian melanjutkan kariernya sebagai Presiden Direktur Arthindo. Pada 1999, Hatta mulai fokus dengan karier politiknya dengan menjadi Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR-RI dan pada 2000 menjadi Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) hingga 2005.

Pengalamannya berorganisasi pada Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) saat masih mahasiswa, memberinya pengaruh yang positif dalam perjalanannya menjadi seorang politisi. Hatta tidak hanya memiliki kecerdasan secara politik tetapi juga memiliki kecerdasan secara intelektual dan penguasaan yang penuh terhadap berbagai problematika dalam teknik, teknologi, dan pembangunan. Ia adalah seorang politisi religius yang pluralis dan memiliki watak kebangsaan yang kuat.

Kepiawaiannya di panggung politik membuat sosoknya semakin dikenal dan dilirik oleh Presiden Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri, sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya. Pada 2001, Hatta resmi menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kabinet Gotong Royong. Ketika Indonesia berganti presiden pada 2004 menjadi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hatta tetap dipercaya sebagai menteri di kementerian berbeda yaitu Perhubungan.

Namun jabatan sebagai Menteri Perhubungan tak begitu mulus dipegangnya. Masa jabatannya ditandai dengan beberapa kecelakaan transportasi besar yang menyita perhatian masyarakat. Di antaranya musibah Mandala Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.

Pada 2007, Hatta dipindahtugaskan menjadi Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu. Lalu dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Hatta dipercaya sebagai Menteri Bidang Perekonomian. Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi, Hatta terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015 menggantikan Soetrisno Bachir. Dia pun ditunjuk sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014 dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 (*id.wikipedia.org*, 2013).

Suami Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa ini memang dikenal sebagai sosok yang memiliki kompetensi, loyalitas, dan profesionalitas dalam menjalani karier. Tak heran ia selalu dipercaya untuk menduduki pos menteri di setiap kabinet. Bahkan, ia dianggap sebagai menteri yang langsung paling aktif pada hari pertama sejak sidang perdana Kabinet Indonesia Bersatu I dilakukan pada 22 Oktober 2004.

Hatta langsung bekerja mempersiapkan program kerja 100 hari Departemen Perhubungan. Dengan kemampuan manajerial dan kecepatan mengambil keputusan, Hatta tidak membutuhkan satu hari pun masa adaptasi untuk pengenalan masalah di departemen yang ia pimpin. Hatta tidak hanya memberi instruksi dari belakang meja, tapi juga terjun langsung ke pusat-pusat pelayanan yang dianggap memerlukan perhatian dan penanganan khusus.

Selain itu, Hatta Rajasa juga dikenal piawai dalam melakukan komunikasi politik. Sebagai contoh, saat muncul dua arus kekuatan besar pasca Pemilihan Umum 1999 antara kubu BJ Habibie dan Megawati Sukarnoputri,

Hatta bersama Amien Rais aktif menggalang komunikasi dan lobi politik untuk meredam situasi panas. Salah satu caranya dengan mengusung kekuatan “poros tengah” dan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.

Jika dicermati, kunci sukses Hatta dalam menjalani karier politik, tak lepas dari sikapnya dalam memandang sebuah profesi. Menurutnya, saat melakukan sesuatu, jangan ada dualisme. Fokus dan kerjakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. Tak heran jika kemudian saat ia menjalani tugas sebagai menteri, Hatta tak pernah membawa jaket sebagai ketua umum partai politik. Kerap kali wartawan harus “gigit jari” saat meminta konfirmasi tentang masalah politik di tempat kerja. “Saya saat ini sebagai menteri, bukan ketua umum partai politik,” jawabnya.

Hatta juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin. Para koleganya di kantor menyebutnya Mr 7 tet. Ini karena, dia selalu datang sebelum pukul 7 di kantornya Kementerian Perekonomian. Kedisiplinan ini rupanya sudah menjadi kebiasaan Hatta sejak kecil dan terus berlangsung hingga saat ini. Hatta terbiasa tidur jam dua pagi karena harus menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya, namun dia tetap bisa bangun lebih awal.

Dongeng Hatta

Kunci sukses Hatta yang paling besar adalah keluarga. Hatta dikenal sebagai pribadi penyayang keluarga. Gaya hidup keluarganya pun tidak berubah ketika ia menduduki jabatan penting di pemerintahan. Sang istri tetap menyetir mobil sendiri. Hatta pun bakal sangat marah jika mendapatkan keistimewaan di jalan raya, seperti pengawalan motor Patwal. Meskipun beresiko terkena macet, ia justru menikmati hal itu. “Saya tak biasa jika harus diistimewakan. Kalau tidak ingin terjebak macet harus berangkat lebih awal,” ujarnya.

Saat anaknya Rasyid Rajasa harus berhadapan dengan hukum karena menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan seorang korban meninggal dunia, Hatta terus mendampingi sang anak. Meskipun demikian, dia tidak mau pihak kepolisian memberikan keistimewaan kepada sang anak hanya karena dia adalah seorang anak menteri. Hatta mempersilahkan polisi menyelidiki kasus anaknya dan meminta sang anak mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Cara Hatta dalam membina rumah tangganya tak lepas dari pengaruh orang tuanya. Hatta berasal dari keluarga yang hangat. Hatta paling dekat dengan sang ibu. Di ingatan Hatta, almarhumah ibunya, Siti Aisyah, pandai sekali bercerita. “Sehabis magrib kami sekeluarga pasti bersila sambil mendengar Ibu mendongeng, bercerita tentang banyak hal, bahkan tentang hal-hal di luar imajinasi saya yang saat itu masih kanak-kanak,” ujarnya.

Sayangnya Hatta tidak bisa mendampingi sang ibunda di jam-jam terakhirnya. Pada Juli 2010, Hatta yang sudah menjadi Menko Perencanaan harus pergi ke salah satu negara di Afrika sebagai bagian dari penugasan dari Presiden SBY. Sebenarnya dia merasa berat untuk berangkat karena sang ibu sedang sakit keras. Namun setelah permisi, dia akhirnya berangkat. Saat ada di sana, dia sempat menelepon ibunya yang mengaku sudah tak kuat dan merasa ajal akan menjemput. Ketakutan itu benar-benar terjadi, sang ibu meninggal dunia. “Saya lalu berdoa dari jauh. Dari kecil saya berdoa ingin menyenangkan Emak. Doa saya kalau Emak meninggal, saya ingin mendoakan dan mengantarkannya dengan tangan sendiri,” kata Hatta.

Namun apa daya, dia berada di negara yang 36 jam perjalanan jauhnya dengan menggunakan pesawat dari Indonesia. Karena hanya mengandalkan pesawat komersial, Hatta tak bisa apa-apa untuk mengejar



waktu kepulangannya ke Indonesia. Dia pun merelakan sang ibu untuk dikebumikan tanpa kehadirannya. Dia lalu menangis dan melaksanakan shalat. Dia pun berdoa agar dirinya bisa segera kembali ke Indonesia dan menyalatkan sang ibu.

Ketika selesai shalat, tanpa disangka Hatta ditemui PM Malaysia yang meminta izin pulang lebih dulu ke Malaysia. “Saya tanya, naik apa? Dia bilang bawa pesawat sendiri. Saya kaget. Tentu saya tanya apakah saya bisa ikut? Dan beliau membolehkan. Akhirnya saya bisa sampai Jakarta, masih sempat bertemu almarhum ibu saya, menyalatkan, hingga mengebumikan,” lanjutnya. Kedekatannya dengan sang ibu itulah yang membuatnya meluncurkan dua seri buku cerita anak-anak yaitu ‘Cerita Tentang Kebijaksanaan’ dan ‘Cerita Tentang Keberanian’. Dia berharap buku tersebut bisa digunakan oleh para orang tua untuk membangun kedekatan dengan anak-anak mereka.

Menurutnya, budaya mendongeng harus dilestarikan karena turut membangun karakter para pemimpin bangsa ini. Melalui dongeng itulah, kata Hatta, dunia dan cakrawala berpikirnya menjadi luas, tak sebatas kampung. Hatta menambahkan, ia pernah membaca pernyataan Albert Einstein yang berkata, bila mengharapkan anak-anak cerdas, bacakanlah mereka dongeng. Menurutnya, Indonesia sangat kaya akan cerita rakyat yang berisikan tuntunan moral pembentuk karakter. Jadi, pembuatan buku itu pun juga merupakan upaya melestarikan dan mengembangkan dongeng-dongeng dari seluruh Nusantara.

Hattanomics

Hatta mendapatkan banyak sorotan saat menjabat sebagai seorang Menteri Perekonomian. Berbeda ketika dirinya dipercaya sebagai Menteri Perhubungan di mana begitu banyak kecelakaan transportasi besar terjadi, pada posisinya yang baru tersebut justru banyak pencapaian ekonomi yang diterima Indonesia. Hatta memiliki banyak ahli ekonomi di belakangnya sehingga membuat strategi ekonomi yang dikeluarkannya cukup efektif. Hal ini juga tidak terlepas karena imbas membaiknya pandangan global terhadap perekonomian Indonesia.



<http://hatta-rajasa.info>

Pencapaian ekonomi yang sebenarnya tak sepenuhnya berkat tangan dingin Hatta itu akhirnya diklaim sebagai dampak dari Hattanomics. Istilah Hattanomics mirip dengan istilah yang digunakan sejumlah ekonom untuk mendefinisikan strategi ekonomi yang digunakan Shinzo Abe untuk membangkitkan kembali ekonomi Jepang, Abenomics (*hatta-rajasa.info*, 2013).

Salah satu strategi ekonomi yang digadang-gadang dalam Hattanomics adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). MP3EI adalah konsep transformasi ekonomi dengan mendorong penyelesaian sejumlah proyek yang dapat pemeratakan pembangunan di seluruh Tanah Air. MP3EI disahkan pada Mei 2011. Program ini merupakan integrasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2002-2025. Secara garis besar, program MP3EI 2011-2025 merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada 2025.

Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata bisa mencapai sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan. Berbeda dengan perencanaan-perencanaan ekonomi terdahulu, MP3EI berisi sejumlah terobosan aksi pengembangan aktivitas ekonomi yang lebih konkret.

Dalam dokumen yang diterbitkan Kemenko Perekonomian, rencana pengembangan MP3EI akan dilakukan melalui pendekatan yang berdasar semangat "*Not Business As Usual*". Pendekatan ini dimaksudkan agar terjadi

perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta.

Yang menarik, program MP3EI ini menempatkan pihak swasta sebagai elemen utama dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara pemerintah akan mendukung penuh melalui peran regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan *debottlenecking* terhadap ketentuan-ketentuan yang bisa menghambat pelaksanaan investasi. Sementara fasilitasi dan katalisasi akan diberikan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun insentif fiskal dan non fiskal.

Rencana besar MP3EI sebagai upaya mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi akan ditempuh melalui pengembangan delapan program unggulan, yang terdiri atas dua puluh dua kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama. *Pertama*, mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia yakni, Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global. Ketiga, memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Menurut Hatta, realisasi investasi proyek yang tergabung dalam MP3EI sejak 2011 hingga Juli 2013 mencapai Rp 647,46 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun 240 proyek infrastruktur di enam koridor ekonomi. Sebanyak 40 persen proyek berada di koridor Jawa. Sedangkan 60 persennya berada di koridor luar Jawa yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku.

Hatta juga memaparkan, dari realisasi tersebut proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN cukup besar. "Hal ini menunjukkan bahwa BUMN kita sekarang sudah dapat menjadi motor pembangunan infrastruktur," katanya. Realisasi investasi BUMN mencapai Rp 100 triliun untuk

31 proyek dari total investasi di sektor infrastruktur yang mencapai Rp 283 triliun untuk 146 proyek. Sedangkan total investasi swasta di bidang infrastruktur hanya Rp 14 triliun untuk 8 proyek, pemerintah Rp 99 triliun untuk 79 proyek, dan campuran sebesar Rp 143,12 triliun untuk 32 proyek.

Ke depan, Hatta mengatakan, pemerintah akan mendorong lebih banyak porsi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif untuk mereka. Menurutnya, perbaikan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sektor riil.

Hatta juga menyampaikan, dari hasil rencana investasi validasi nilai kegiatan investasi di tiap koridor MP3EI medio 2011-2015 diketahui total investasi MP3EI mencapai Rp 4. 481 triliun dengan jumlah 1. 568 proyek. Angka ini meningkat dibandingkan total nilai investasi pada saat MP3EI diluncurkan 2011 silam yaitu Rp 4. 012 triliun dengan jumlah 1. 264 proyek. Nilai investasi sektor riil mencapai Rp 2. 177 triliun (583 proyek) dan infrastruktur Rp 2. 304 triliun (985 proyek). Sementara sebelum divalidasi investasi di sektor riil Rp 2. 226 triliun (639 proyek) dan infrastruktur Rp 1. 786 triliun (625 proyek). (suarapembaruan.com, 2013)

Hatta menyatakan, sejak MP3EI diluncurkan, banyak kemajuan yang dicapai tetapi ada tantangan. “Tantangan pertama adalah dalam mengembangkan pembangunan di enam koridor utama agar terjadi keseimbangan,” ujarnya. Pemerintah tidak ingin pembangunan terpusat di Jawa saja. Hatta juga memaparkan, kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara keseluruhan yaitu 57,7 persen. Namun sumbangan PDB dari Pulau Kalimantan kurang dari 10 persen, bahkan Pulau Sulawesi kurang dari lima persen. Kalau dibiarkan, investor akan lebih memilih berinvestasi di Jawa. Apalagi pekerja di Jawa juga terampil.

Hatta: Berkerja Nyata

24 November 2011 merupakan tanggal bersejarah bagi Aliya Rajasa, putri Hatta. Karena pada tanggal tersebut Aliya disunting oleh seorang pemuda. Yang menjadi luar biasa adalah sang penyunting adalah Edhie Baskoro, putra presiden SBY. Hal ini memunculkan spekulasi politik bahwa pernikahan tersebut merupakan pembuka tabir kedekatan Hatta dengan SBY.

Spekulasi tersebut bisa dipercaya, karena memang SBY memiliki kedekatan yang intensif dengan Hatta. Pernah bersama dalam kabinet Megawati sebagai menteri, Hatta juga dipercaya SBY masuk dalam jajaran kabinetnya. Bahkan, ada spekulasi yang beranggapan Hatta adalah partner SBY dalam pemilihan para menteri pembantu SBY. Spekulasi ini tentu memang memerlukan bukti konkrit.

Meskipun begitu, sebaikt kalimat yang terdapat dalam situs Hatta (<http://hatta-rajasa.info/biografi>), “Pun kala Presiden SBY ‘terkurung’ dalam situasi sulit, nama Hatta Rajasa selalu menjadi yang terdepan dalam menjalin komunikasi ‘lobi’ politik.” Kalimat ini menjadi penegas kedekatan tersebut.

Meskipun berbagai isu menyeruak, tetapi Hatta Rajasa membuktikan diri bahwa dia adalah politisi yang mempunyai profesionalisme kerja. Salah satunya saat menjabat sebagai Menteri Kordiantor perekonomian. Jabatan publik tersebut menjadi panggung pembuktian Hatta mampu mengemban tugas dengan baik.

Lembaga survey, seperti LSI pada Januari 2013 sendiri mengadakan survey terkait kinerja para menteri yang berasal dari parpol. Hasilnya, sebanyak 58,23% responden meyakini menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin SBY, akan lebih sibuk mengurus partaiunya.

Berdasarkan survei LSI tersebut, meskipun ada 30,38% responden masih percaya dengan kinerja para menteri, dan hanya sekitar 11,39% responden enggan menjawab, namun LSI menyimpulkan para menteri akan lebih sibuk mengurus partaiunya.

Menanggapi survey tersebut, Hatta akan tetap bersikap profesional dan menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian. Persepsi tersebut pun tidak terbukti. Bahkan hingga kini perekonomian di Indonesia tidak terjadi gejolak yang berarti.

Apabila merujuk pada catatan perjalanan kariernya dalam bidang politik, Hatta termasuk salah satu politisi cemerlang. Sebagai politikus, bersama Amin Rais dia berhasil membentuk kekuatan ‘poros tengah’ sebagai respon terhadap perselisihan kubu Habibie dan Megawati dan mengusung Gus Dur menjadi Presiden.

Kemudian, dalam ranah kepartaian, Hatta meniti karirnya cukup panjang hingga berhasil menduduki kursi nahkoda PAN. Selama menjadi Ketua Umum PAN inilah, Hatta diusung untuk maju dalam kompetisi menjadi RI 1.

Meskipun merestui, ada beberapa catatan yang diberikan Amin Rais kepada Hatta jika ingin melenggang menjadi capres. Catatan itu antara lain adalah pemenuhan target suara sebesar dua digit pada pemilu 2014. Memang, jika menganalisis tingkat elektabilitas yang didapatkannya, suara PAN masih bersifat stagnan. Tiga pemilu terakhir PAN hanya mampu meraih suara pada kisaran 6-7%. Pada pemilu 1999, PAN memperoleh suara 7,1%, pada pemilu 2004 sebesar 6,4% dan pemilu 2009 sebesar 6,0%. Hal inilah yang masih perlu menjadi pembuktian Hatta pada pemilu 2014 nantinya.

Namun, target tersebut bisa saja tidak terlampaui sulit, jika melihat popularitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Hatta. Apalagi Hatta dinilai sebagai salah satu komunikator politik yang handal. Seperti, saat menyelesaikan demo buruh pabrik yang mematikan jalur tol Cikampek-Jakarta hingga ancaman mogok Asosiasi Pilot Garuda, kesemuanya diselesaikannya dengan strategi komunikasi yang tepat sehingga permasalahan tersebut dapat mereda.

Pasca dideklarasikan sebagai capres dari PAN, Hatta menunjukkan komitmen kerja nyatanya. Hatta telah menyiapkan visinya apabila terpilih menjadi presiden. Adapun delapan butir pemikiran Hatta Radjasa yaitu *pertama*, perlunya kebersamaan seluruh komponen bangsa untuk menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai elemen konstitutif yang mesti dipertahankan. *Kedua*, sebagai bangsa yang dibangun berdasarkan nasionalisme dan konstruksi masyarakat yang multikultural, menjadikan keduanya tak terpisahkan.

Pandangan *ketiga*, memastikan pemisahan atau pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, penegakan hak-hak dasar warga negara seperti hak kebebasan dan kemerdekaan berserikat pembagian kekuasaan dan wewenang pusat dan daerah, dan good governance.

Pemikiran *keempat*, membangun ekonomi yang tidak saja berorientasi ke luar, tetapi juga ke dalam. Agenda perubahannya adalah mendorong pasar yang terbuka dan adil. Tak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataan.

Butir *kelima*, memperjuangkan tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Keenam*, membangun kemandirian bangsa secara konsisten. *ketujuh*, kaji ulang terhadap cara mengelola kekayaan alam. Dan *kedelapan*, menciptakan program perlindungan sosial (*hatta-rajasa. info*, 2013).

Delapan konsep pemikiran yang setidaknya menjadi bukti komitmen Hatta untuk mentransformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Apabila menganalisis buah pemikiran tersebut, Hatta telah menyiapkan pemikiran yang mendukung sisi kerakyatan. Jika Hatta nantinya terpilih menjadi Presiden RI diharapkan dapat mensinergikan segala kepentingan kelompok dan masyarakat guna membangun negeri menuju kearah yang lebih baik.

Survei dari LSI menempatkan Hatta Rajasa sebagai capres yang memperoleh dukungan paling tinggi dari partai Islam. Meskipun, menurut Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi dari segi ideologi politik PAN bukanlah parpol islam, namun sering dalam survei dikelompokkan sebagai parpol Islam. Viva menambahkan, hasil survey tersebut adalah kenyataan empiris yang berkembang di masyarakat yang mayoritas Islam bahwa figur Hatta Rajasa diterima luas di kalangan umat Islam.

Viva juga menuturkan, alasan mengapa Hatta diterima oleh semua kelompok masyarakat, di antaranya, figur Hatta adalah sosok muslim nasionalis yang tidak diragukan lagi komitmen kebangsaannya. Ciri kaum nasionalis tersebut adalah menghargai dan menghormati keberbedaan atau keberagaman. Kedua, Hatta memiliki visi politik dan ekonomi yang jelas dalam mewujudkan Indonesia Baru yang adil makmur, sejahtera.

Dalam analisisnya, LSI menilai Hatta sebagai salah satu tokoh dengan tingkat konflik yang rendah. Kepopulerannya membuatnya didapuk sebagai kandidat paling potensial sebagai cawapres dari duet tokoh nasionalis dan tokoh Islam.

LSI juga menampilkan skenario pasangan capres ideal dari poros tengah. Apalagi jika digunakan untuk menaikkan elektabilitas partai islam, seperti PAN. Salah satu alternatif pasangan yang cukup memungkinkan adalah perpaduan nasionalis-islam. "kemungkinan hadirnya capres-cawapres ideal nasionalis-Islam dari poros tengah seperti Jokowi-Hatta masih wacana," papar Ardian Lipo, peneliti LSI.

Survei LSI dilakukan pada 12 September-5 Oktober 2013 dengan menggunakan metode multi stage random sampling. Survei ini melibatkan 1.200 responden di 33 Provinsi. Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka menggunakan kuisisioner dengan margin of eror sebesar 2,9 persen.

Ketiga, Hatta berpengalaman mengelola negara atau pemerintahan selama ini sehingga sebagai teknokrat sangat memahami bagaimana membangun pemerintahan yang berpegang pada prinsip meritokrasi. Ketiga alasan ini pula yang juga menjadi modal politik yang cukup strategis Hatta diusung oleh PAN.

Hatta dan 2014

Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014. Keputusan itu secara bulat diambil dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011. Dengan pernyataan sikap itu, PAN adalah parpol pertama yang mendeklarasikan kadernya secara resmi untuk maju di Pilpres 2014. Dukungan itu berawal dari konsolidasi 427 Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian, desakan DPD itu didukung seluruh Dewan Perwakilan Wilayah dalam Rakernas. Tindak lanjut dari keputusan itu, para pengurus DPD hingga pusat diminta membentuk tim sukses pemenangan Hatta.

Di hadapan kader PAN, Hatta mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak tantangan ke depan. Meskipun keadaan Indonesia sekarang jauh lebih baik dibandingkan delapan tahun yang lalu. “Kini, pertanyaan kritis kita adalah bagaimana melakukan transformasi demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berperadaban di abad ke-21 ini,” ujarnya.



Menurutnya, terdapat delapan pandangan utama untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang tahan banting. (portal hatta-rajasa. info, 2013). *Pertama*, perlunya kebersamaan seluruh komponen bangsa. Semua yang membentuk Indonesia, semua yang menjadikan Indonesia ada, dan semua yang merupakan pondasi Indonesia, harus tak terusik eksistensinya oleh apapun, oleh siapapun, di sepanjang dan di semua zaman.

Kedua, Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun berdasarkan nasionalisme yang diaduk oleh sentimen akan nasib, cita-cita, dan tujuan yang sama di atas konstruksi masyarakat multi-etnik, masyarakat majemuk—masyarakat multikultural. Ini berarti bahwa dalam konstruksi yang paling elementer, Indonesia sesungguhnya dibentuk oleh dualitas atau dua hal beda yang menjadikannya satu tak terpisahkan, Nasionalisme dan Multikulturalisme.

Indonesia memerlukan nasionalisme sebagai dasar untuk membangun negara-bangsa (*nation-state*) yang eksistensinya menjadi relevan karena hadirnya sentimen sejarah dan kehendak untuk bersatu mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Sebaliknya, Indonesia juga memerlukan sebuah ruang yang memungkinkan terpeliharanya ragam identitas dan kesetiaan kolektif demi dan untuk atas nama Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar dari lahirnya bangsa Indonesia sejak awalnya. “Sejarah mengatakan pada kita, mengabaikan salah satu di antaranya demi mengutamakan yang lain, hanyalah akan merusakkan keduanya,” katanya.

Ketiga, Indonesia tengah mengalami sebuah mega perubahan yang terjadi di tiga wilayah sekaligus. Di ruang negara, agenda perubahannya terutama berlangsung untuk memastikan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan di antara lembaga yudisial, legislatif, dan eksekutif guna dihindarinya dominasi kekuasaan satu lembaga terhadap yang lain.

Indonesia menurutnya, harus mencegah Bergeraknya pendulum dari titik keseimbangannya. Pemerintah harus mencegah pelemahan sistem presidensial yang akan membawa konsekuensi yang luas terhadap pemerintahan pilihan rakyat. Seian itu menegaskan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan dan kemerdekaan berserikat, hak untuk memperoleh pelayanan dasar, dan sejumlah hak sosial dan kultural lainnya.

Selanjutnya, pembagian kekuasaan dan kewenangan di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dengan tujuan utama efektivitas pelayanan publik. Tata kelola yang baik

di semua lembaga publik harus dijaga dan korupsi harus dijadikan musuh bersama bangsa.

Di ruang masyarakat atau *civil society*, agenda perubahannya adalah melakukan transformasi sosial untuk menciptakan sejumlah kualitas yang menggambarkan hadirnya masyarakat dengan kapital sosial yang kuat, plural, terbuka, toleran, serta berkesediaan untuk saling hormat dan saling membantu. Kehadiran demokrasi yang beretika dan bermartabat menjadi keharusan, memahami kebebasan bukanlah tak terbatas, harus ada ruang untuk menghormati hak-hak orang lain serta mentaati pranata hukum.

Keempat, di ruang pasar, agenda perubahannya tidak saja mendorong terjadinya pasar yang terbuka namun juga pasar yang adil. Tidak saja sebuah ekonomi yang berorientasi ke luar namun juga sebuah ekonomi yang berorientasi ke dalam. Tidak hanya sebuah ekonomi yang mengejar pertumbuhan namun juga pemerataan yang bersifat inklusif. Tidak hanya mempraktikkan ekonomi yang terbuka dan maju namun juga sebuah ekonomi yang dapat menjamin kemandirian dan ketahanan pokok berdasarkan prinsip *survival-ability* dan *sustain-ability*.

Pembangunan yang berpihak pada pertumbuhan, pemerataan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta prinsip menjaga kelestarian lingkungan. “Terhadap ini semua, saya berpendapat bahwa sebaik-baiknya sebuah perubahan adalah sebuah perubahan yang terhadapnya kita mengendalikan tidak saja arah dan besarnya namun juga terhadap fase-fase dan kecepatannya,” katanya.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah diwujudkan. Tidak boleh lagi terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Anugerah sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan haruslah dinikmati secara bersama-sama bukan hanya kelompok tertentu saja tanpa memandang suku, etnik, daerah maupun agama. Kelompok besar tidak memonopoli penguasaan akan sumber daya alam.

Pengabaian terhadap prinsip-prinsip fundamental ini dapat mengakibatkan muncul dan berkembangnya ketidakharmonisan yang bisa berujung pada disintegrasi nasional. “Tak mungkin kita biarkan kemiskinan justru ada di sumber-sumber kekayaan alam yang tersebar di bumi Indonesia,” ujarnya.

Keenam, membangun kemandirian bangsa secara konsisten. Kemandirian suatu bangsa harus dimaknai sebagai suatu kemampuan dan ke-

tahanan yang dimiliki oleh sebuah bangsa untuk tetap ikut serta dalam kompetisi global. *Ketujuh*, diperlukan kaji ulang terhadap cara kita mengelola kekayaan alam. Renegoisasi kontrak haruslah dimaknai sebagai upaya mencapai suatu kerja sama yang berkeadilan.

Kedelapan, pentingnya program perlindungan sosial. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah penting, akan tetapi menjaga agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial juga penting, untuk itu diperlukan program-program bantuan dan perlindungan sosial untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Strategi pembangunan untuk semua harus betul-betul diwujudkan.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Jika dianalisis, terlihat beberapa hal yang dapat menjadi peluang bagi Hatta untuk mencapai posisi tertinggi dalam Pilpres 2014. *Pertama*, Hatta Rajasa memiliki jejak kepemimpinan yang baik sebagai pengusaha dan menteri. Pengalamannya mengurus berbagai perusahaan yang bergerak dalam konstruksi dan perminyakan menjadikannya pemimpin yang matang dalam menyelesaikan berbagai problematika publik.

Kedua, Hatta memiliki citra sebagai tokoh islam yang nasionalis. Modal politik ini pula yang bisa menarik minat para pemilih basis islam yang mencari tokoh islam yang lebih pluralis. Apalagi partai pengusungnya, PAN juga sekarang lebih terbuka, meskipun PAN memiliki kedekatan historis terhadap Muhammadiyah.

Ketiga, Hatta masih dianggap sebagai politisi yang bersih. Meskipun sempat diduga terlibat kasus dalam penyalahgunaan kewenangan, seperti dalam kasus penambahan kereta KRL. Namun, dugaan tersebut tidak terbukti.

Keempat, Hatta memiliki kesempatan untuk memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Umum PAN dan di lembaga pemerintahan sebagai momentum untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Apalagi Hatta juga pernah tiga kali menjadi menteri dan selama itu pula kinerjanya dinilai bagus. Sudah barang tentu prestasi-prestasi yang dicetak Hatta menjadi nilai tawar tersendiri baginya untuk mengabdikan dengan posisi lebih tinggi dari sekadar menteri.

Kelima, kapasitasnya sebagai pengusaha menjadi modalitas yang cukup tinggi dalam relasi politik dengan pengusaha maupun sebagai kemampuan finansialnya. Hatta berpeluang untuk membangun komunikasi politik dengan para pengusaha untuk memperkuat votegatersnya. Selain itu, sebagai pengusaha, Hatta tidak akan mengalami kendala finansial dalam pencapresannya.

Selanjutnya, Hatta juga dapat mengembangkan basis massa pendukung dengan sayap-sayap relasi politiknya. Apalagi Hatta yang tampil sebagai sosok yang moderat, akan mampu menarik minat dari para pemilih yang masih belum menentukan pilihannya, seperti kaum muda.

Meski demikian, Hatta Rajasa juga memiliki tantangan. Sebagai kandidat presiden, Hatta masih memiliki elektabilitas yang rendah. Begitu halnya elektabilitas partai yang digawangnya juga masih lemah.

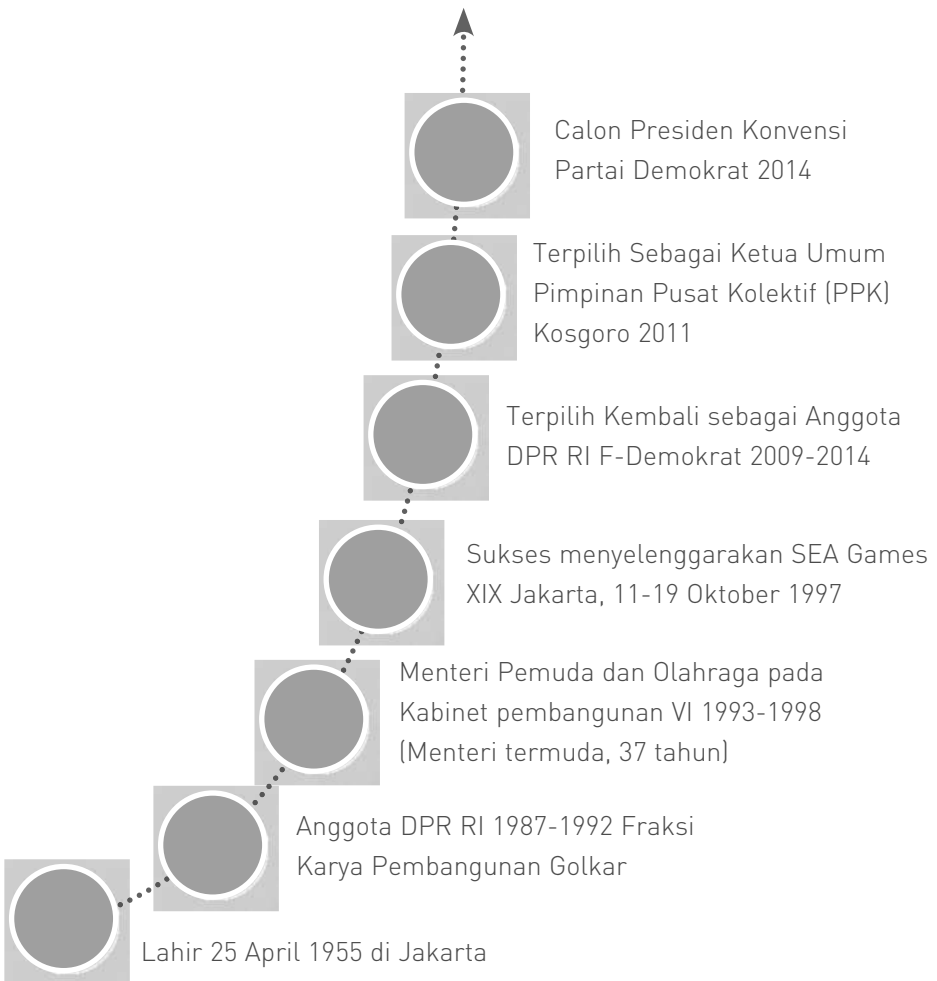
Survei Pol-Tracking Institute yang dirilis 20 Oktober 2013, menyatakan ada tiga menteri yang kinerjanya dinilai responden relatif lebih baik ketimbang menteri-menteri lainnya. Mereka adalah (Menteri Agama) Suryadharma Ali, (Menteri Koordinator Perekonomian) Hatta Rajasa, dan (Menteri Pemuda dan Olahraga) Roy Suryo.

Apabila kategorinya adalah menteri yang menjadi ketua umum partai politik, maka urutan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja menteri adalah Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) sebesar 30,86 persen, Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) sebesar 23,01 persen, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) sebesar 15,85 persen, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan (Ketua Umum Demokrat) sebesar 14,91 persen.

Hasil survei tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan Hatta dalam Pemerintahan SBY selama ini masih belum meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan karena masih diungguli oleh menteri-menteri lainnya yang juga berpotensi maju dalam kompetisi capres 2014. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Hatta harus mempublikasikan prestasi-prestasi yang pernah dicetaknya secara luas kepada publik melalui berbagai media. Sehingga, berdampak pada peningkatan popularitas dan akseptabilitas publik atas dirinya.

HAYONO ISMAN

Pemimpin Potensial





facebook.com/pages/Hayono-Isman

Beberapa remaja usia tanggung mengendap di semak-semak. Malam itu, mereka mengincar lori pembawa tebu yang sebentar lagi akan melintas di hadapan. Lori itu mendistribusikan tebu dari perkebunan menuju pabrik saban Subuh. Beruntung, tak ada penjaga yang menjadi pengawas. Hap. Mereka melompat ke lori dan mengambil beberapa batang tebu. Usai mendapat tebu, remaja itu pun lari terbirit-birit demi menghindari kejaran petugas.

Kenangan masa kecil itu masih hinggap di kepala Hayono Isman. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini menjadi politikus Partai Demokrat itu menguak kisah masa kecilnya kepada wartawan cilik sebuah surat kabar nasional belasan tahun lalu. Ketika itu, dia masih duduk sebagai Menpora di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. “Bapak mulai mencuri buah sewaktu kelas dua SMP. Setelah pulang dari luar negeri, Bapak sekolah di Malang,” ujar Hayono sambil buru-buru menambahkan, “Kenakalan ini berbahaya, jadi jangan kalian tiru”

Hayono Isman lahir di Jakarta, 25 April 1955. Hayono lahir dari pasangan Mas Isman dan Els Wowor. Ketika kecil, Hayono bersekolah TK di sekolah Bu Kasur. Memasuki Sekolah Dasar (SD), Hayono menghabiskan waktunya di Myanmar, Thailand, dan Kota Kairo di Mesir. Ayah Hayono, Mas Iman, adalah duta besar dari negara-negara tersebut. Karuan saja Hayono harus ikut kemana sang ayah pergi. Dia pun harus berpindah-pindah sekolah dari negara satu ke negara lain.

Petualangan Hayono kecil di negeri orang membuatnya mengalami banyak kejadian unik. Sewaktu di Myanmar, ada perayaan keagamaan Umat Buddha yaitu upacara siraman air. Seperti kita ketahui, penduduk negara yang juga dikenal sebagai Burma ini memang mayoritas penganut agama Buddha. Maksud siraman ini agar orang yang disiram mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa, karena air dianggap berguna bagi manusia. “Nah, kami berdiri di pagar kedutaan dan setiap orang lewat disiram,”ujarnya.

Semasa duduk di bangku sekolah, prestasi akademis Hayono bersinar ketika SD. Saat itu, dia terus mendapatkan rangking di kelas. Hanya, ketika dia duduk di bangku SMP dan SMA, prestasi tersebut tak dapat dipertahankan. Hayono mengaku ada beberapa mata pelajaran yang tak disukainya, contohnya Analit dan Kimia. Ketika sekolah, Hayono berkisah, dia menyukai pelajaran olah raga dan sejarah.

Putra Kosgoro

Hayono Isman tak bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya, Mas Isman. Sejarah mencatat kontribusi Mas Isman terhadap perjuangan merebut kemerdekaan. Mas Isman adalah komandan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Jawa Timur. Sebenarnya, Mas Isman bukan pemuda asli Surabaya. Ayahnya Darmowarsito berasal dari Purworejo, Jawa Tengah dan bertugas di Majalengka. Darmowarsito kemudian mempersunting putrid Rajagaluh yang menghasilkan putra dan putri. Salah satu keturunannya adalah Mas isman.

Di Surabaya, Mas Isman mengorganisir kawan-kawannya yang belajar di Sekolah Menengah Tinggi Surabaya untuk membentuk TRIP. Slogan mereka ketika itu, Belajar, Berjuang, Bergembira. TRIP dibentuk untuk menggantikan bala tentara Dai Nippon yang ketika itu dipaksa menyerah oleh sekutu.

Aksi heroik TRIP mengganggu ketenangan pasukan Belanda. Keberanian mereka disebut hanya bisa disamai oleh tentara pelajar Vietnam. Tak kurang, terdapat 44 tentara pelajar yang menjadi martir pada perang kemerdekaan sepanjang 1945 sampai dengan 1950. Mereka berjuang mati-matian mengusir tentara pendudukan Inggris dan Jepang di Surabaya.

Setelah kemerdekaan bisa dicapai, suasana Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di bawah ancaman perpecahan. Muncul gerakan ber-

senjata dari berbagai kelompok yang ingin memberontak dan mendirikan negara sendiri. Kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) muncul di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Tengah. Di Maluku Selatan, berkembang Republik Maluku Selatan (RMS). Sedangkan di Sumatra, tumbuh pemberontakan Persatuan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta di Sulawesi.

Pada tahun itu, banyak eks anggota TRIP Jawa Timur yang sudah memegang posisi penting di pemerintahan. Mereka menjadi pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), diplomat, hingga menjadi pengusaha.

Sebanyak 33 alumni TRIP kemudian berkumpul di kediaman Mas Isman, di Jalan Sabang, Jakarta untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 November 1957. Mereka berdiskusi tentang kondisi kekinian di mana negara yang diperjuangkannya terancam pecah belah. Alhasil, mereka pun memutuskan membentuk wadah koperasi untuk menjadi payung organisasi. Di sini, terbentuklah Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro).

Mas Isman membangun Kosgoro sebagai organisasi perjuangan baru untuk membuktikan komitmen dan tetap mengabdikan kepada bangsa dan negara. Sebagai eks komandan TRIP, dia berujar, "Mari beralih dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembangunan." Dalam buku *Peran Historis Kosgoro* oleh Ramadhan KH, Suhardiman selaku ketua Umum SOKSI berpendapat bahwa di bawah kepemimpinan Mas Isman berhasil mengintegrasikan kekuatan Tri Karya (Kosgoro, Soksi, MKGR) sebagai pilar utama Golkar.

Walaupun dalam format tersebut ada pilar A(bri) B(irokrat) namun pilar O(organisasi dalam Golkar) terutama Tri karya masih dominan mewarnai perjalanan Golongan Karya. Disorganisasi terjadi secara faktual setelah terjadinya pengendalian Golkar diluar paham 'kekaryaan' sebagaimana dimaksudkan para pendiri. Tiga kekuatan paham tersebut adalah HMI (personifikasi Abdul Gafur), Sosialis (Midian Sirait), Katolik (Cosmas Batubara).

Berprestasi di Saat Krisis

Hayono Isman tercatat sebagai menteri termuda di Kabinet Pembangunan VI pimpinan Presiden Suharto. Saat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, usianya baru mencapai 37 tahun. Hayono mengaku tidak pernah berniat jadi menteri.

Menurutnya, Mas Isman pun menginginkan putra sulungnya ini untuk menjadi pengusaha, sedangkan adik laki-lakinya diarahkan ke politik. Hanya, kenyataan yang terjadi terbalik. Hayono lebih sering berkiprah ke politik. Dia pun memulai karir di senayan saat diminta untuk menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan yang merupakan representasi Golkar mulai tahun 1987 hingga 1992. (hayonoisman.com, 2014)

Di parlemen, Hayono bekerja sebaik mungkin meski tak menyukai pekerjaan sebagai politikus. "Mungkin Bapak Presiden (Suharto) melihat kerja saya, sehingga mengangkat jadi pembantu presiden. Jadi yang perlu ditiru, kita mesti bekerja sebaik mungkin, meski tidak menyukai pekerjaan itu. Dengan begitu, hal baik pun akan muncul," ujarnya. Hayono duduk di 'kursi menpora' ketika negara sedang dalam keadaan krisis. Padahal, banyak *event* besar yang harus diikuti Indonesia saat itu. Salah satunya perhelatan SEA Games XIX Jakarta, 11-19 Oktober 1997 yang akan mengundang seluruh negara Asia Tenggara.

"Saya berharap, dengan adanya krisis keuangan saat ini, panitia penyelenggara SEA Games XIX bisa meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang dikeluarkan," ujar Hayono ketika menyiapkan Panitia SEA Games XIX. Menurut Hayono, semua pengeluaran harus diperhitungkan dengan matang. Kalau perlu, semua pengeluaran harus diketatkan kecuali untuk perlengkapan atlet dan pelatih serta biaya pertandingan.



Efisiensi dana termasuk untuk penyulutan api SEA Games XIX nanti. Penyulutan obor yang rencananya akan dilakukan dari Candi Borobudur, Magelang dan diarak melalui jalan darat menuju Jakarta dibatalkan. Untuk efisiensi, penyulutan api itu hanya disulut di Sekretariat ASEAN Jakarta kemudian diarak menuju senayan. Tak hanya itu, Hayono menyampaikan pesan Presiden Suharto agar penyelenggaraan SEA Games tak perlu mewah.

Salah satu contoh kemewahan yang dihindari adalah kegiatan-kegiatan upacara atau seremonial berlebihan. Jika itu dilakukan, Hayono mengaku khawatir akan membebani masyarakat. Beban itu antara lain pungutan dana langsung dari masyarakat. Ia berpendapat agar dana yang ada diarahkan untuk meningkatkan mutu fasilitas tempat pertandingan. Tujuannya agar memenuhi standar internasional. Dana untuk penyelenggaraan SEA Games ketika itu memang terbatas. Panitia memperkirakan anggaran SEA Games sebesar Rp 95 miliar atau Rp 15 miliar lebih banyak dari perhitungan semula.

Untuk itu, Hayono memutar otak. Dia pun mengusulkan adanya penjualan stiker SEA Games XIX yang dikelola Konsorsium. Konsorsium ini mengedarkan hampir 17,8 juta lembar stiker yang akan dijual ke seluruh wilayah Indonesia. Stiker tersebut akan dibebankan ke masyarakat yang mampu melalui pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon, hotel, rumah makan, penerbangan dan berbagai tempat hiburan.

Harga per lembar stiker per lembar tersebut bervariasi, mulai dari Rp 1000 sampai Rp 50 ribu. Dari penjualan stiker tersebut diharapkan mampu terkumpul dana sebesar Rp 40 miliar. Itu berarti hampir setengah biaya total penyelenggaraan SEA Games yang dianggarkan hampir mencapai Rp 105,4 miliar.

Meski mengakui memahami penggalangan dana melalui penjualan stiker, namun Hayono berharap konsorsium juga memperhatikan cara-cara lainnya, seperti meningkatkan upaya kemitraan dengan berbagai kerjasama sponsor dengan penerbitan perangko atau melalui berbagai jalur penerbangan.

Hayono pun terbang ke Brunei Darussalam untuk memenuhi undangan Menteri Kebudayaan dan Sukan Brunei. Pada kesempatan itu, ia menagih janji Brunei yang rencananya akan membantu dana penyelenggaraan SEA Games. Dengan dana alakadarnya, kontingen Indonesia terbukti menjadi juara umum SEA Games XIX. Dalam pesta olahraga antara bangsa-bangsa Asia Tenggara ini, kontingen 'Merah Putih' berhasil menjadi negara yang mengumpulkan medali paling banyak.

Tak hanya itu, mereka menorehkan prestasi bagus dengan memecahkan 2 rekor dunia junior, dan mempertajam 21 rekor SEA Games. Dengan demikian, kontingen Indonesia membayar kontan kegagalan di SEA Games XVIII/1995 di Chiang Mai, Thailand. Ketika itu kontingen Indonesia harus puas menempati posisi kedua dalam klasemen pengumpul medali terbanyak. Gelar juara umum direbut kontingen Thailand.

Hasil yang dicapai Indonesia jauh melampaui target yang diperkirakan. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebenarnya hanya menargetkan sekitar 146 -172 medali emas. Kenyataannya Indonesia mampu meraih 189 emas.

Hayono dan beberapa pejabat KONI yang bertugas mempersiapkan kontingen Indonesia selama sekitar 10 bulan terakhir mengaku puas dengan hasil di SEA Games XIX. Kepuasan muncul karena sebelumnya banyak masalah melilit persiapan kontingen Indonesia.

Perjalanan pelatnas selama ini berlangsung tidak mulus. Penyebabnya, kucuran dana yang tidak lancar dari konsorsium swasta selaku penyandang dana. KONI Pusat dan masing-masing PB (Pengurus Besar) induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia sempat harus menomboki lebih dulu.

Hayono pun menegaskan, jangan sampai momentum keberhasilan di SEA Games XIX berhenti dan hilang begitu saja. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan pembinaan olahraga prestasi berhenti begitu saja sebab Asian Games dan multi event lainnya telah menanti. Tapi, ini tidak mudah dan selalu terbentur dengan masalah dana. Kendati tidak mudah memecahkan persoalan klasik ini, Hayono berpendapat harus dicari jalan keluarnya.

Tak Bergantung pada Kharisma

Sebagai tokoh muda, Hayono Isman pernah beberapa kali 'dititipkan' pesan tersirat oleh Presiden Suharto. Pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaan jenderal besar yang murah senyum tersebut, Hayono mendengar langsung pesan presiden yang berkaitan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 1997.

Suatu hari, Hayono dipanggil Presiden Suharto di Cendana, Menteng, Jakarta. Seusai bertemu presiden, Menpora dipersilakan masuk ke ruang

wartawan yang merupakan bagian dari kediaman Suharto. Kepada para wartawan, Hayono Isman menyampaikan pesan Suharto untuk bangsa Indonesia yang sedang menyongsong pemilihan umum tanggal 29 Mei 1997. Esok harinya, tanggal 27 Maret 1997, beberapa surat kabar menerbitkan pesan Suharto itu di halaman depan. Sebagai catatan kaki, tanggal 27 Maret 1997 adalah peringatan tahun ke-29 Suharto dilantik sebagai presiden kedua RI oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (*kompas.com*, 2013)

Dalam pesannya yang disampaikan lewat Hayono Isman waktu itu, Suharto meminta bangsa Indonesia, khususnya kaum muda, tidak menggantungkan diri pada kharisma perorangan. "Dengan kata lain, janganlah di negara ini, kita menggantungkan kepada kharisma perorangan. Akan tetapi, gantungkanlah kepada sistem yang kuat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata Hayono Isman mengutip ucapan Suharto.

Ketika itu, Hayono tak memungkiri jika Pak Harto masih merupakan figur pemimpin yang dianggap paling mampu menjabat presiden. Namun, Hayono meminta agar dukungan pada perseorangan itu lebih dititik-beratkan kepada sistem yang dibangun. "Jadi masyarakat jangan terlalu emosional dalam bersikap, serta lebih hati-hati," katanya.

Pernyataan Hayono itu disampaikan sehubungan dengan maraknya berbagai analisis dari banyak kalangan masyarakat seputar suksesi berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Umum MPR. Terlebih, Pak Harto sebe-



facebook.com/pages/Hayono-Isman

lumnya meminta agar Golkar meneliti kembali pencalonan dirinya sebagai presiden RI 1998-2003. Maka, wajar jika apa yang dilontarkan Hayono menjadi isu nasional ketika itu.

Mengacu pada konsep pemikiran tersebut, Hayono menilai bahwa jika dukungan untuk memilih Pak Harto itu hanya didasarkan pada kharismanya saja, itu adalah tidak benar. Tapi, Hayono justru bisa menerima kalau dukungan terhadap Pak Harto untuk menjabat sebagai presiden RI periode mendatang itu didasari oleh niatan untuk memperkuat sistem yang telah dibangun selama ini.

Hayono pun mengakui sudah seharusnya generasi muda diberikan peluang. Jika tidak dimulai, ujarnya, dikhawatirkan pada abad ke-21 mendatang bangsa Indonesia justru akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, Hayono merespons positif adanya usulan dari Kosgoro yang telah mengajukan kriteria untuk calon wakil presiden berasal dari generasi muda serta mempunyai semangat muda dan komitmen terhadap generasi muda.

Sebelumnya, di Desa Pucang Gading, Demak, Jawa Tengah, 29 Mei 1996, Suharto menyampaikan keengganannya untuk dipilih lagi dengan alasan pada tahun 1998 usianya telah 77 tahun. Kemudian, pada 21 Maret 1997, di Istana Negara, Jakarta, Suharto mengatakan, pemilu akan terus berjalan sepanjang masa. Oleh karena itu, harus diusahakan jangan mempertahankan status quo. (*kompas.com*, 2013)

Namun, pada 8 Maret 1998, semua fraksi di MPR datang ke Jalan Cendana dan meminta Suharto bersedia kembali menjadi presiden. Suharto menjawab bersedia. Hingga pada akhirnya, Presiden Suharto harus meletakkan jabatannya di tengah kepuangan demonstrasi rakyat dan mahasiswa. Pada 21 Mei 1998, Pak Harto mundur.

Hayono mengagumi sosok Suharto. Buat dia, bapak pembangunan itu adalah seorang pemimpin yang tegas dan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memajukan Indonesia. Ada tiga hal yang menjadi prioritas penguasa Orde Baru ini dalam memajukan Indonesia yaitu stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Selama lima tahun menjadi menteri dalam pemerintahan jenderal bintang lima itu, Hayono mengakui memiliki kesan bahwa jenderal besar itu adalah seorang yang cerdas dan tegas. Cerdas, karena Pak Harto memiliki keinginan kuat untuk belajar dari orang muda dan beliau orangnya mau mendengar. Sedangkan ketegasannya berasal dari pendidikan dan pengalamannya sebagai tentara.

Konflik di Kosgoro

Musyawarah Besar VIII Kosgoro merupakan tonggak hitam sejarah yang paling rapuh yang mewarnai perjalanan sejarah organisasi itu. Dalam forum regenerasi pimpinan dalam siklus lima tahunan, Kosgoro yang di masa peralihan politik itu ikut terkontaminasi dengan semangat anti kemapanan yang tengah menjadi euphoria (kegandrungan).

Mubes VIII berlanjut hingga dua tahap, namun perpecahan tak terhindarkan. Semula Mubes VIII KOSGORO berlangsung tanggal 12 -15 Nopember 2000 di Hotel Indonesia. Mubes ini gagal memilih Ketua Umum baru. Berkembang nama Agung Laksono dan Hayono Isman, dengan pendukung yang sama-sama kuat. Mubes lanjutan, berlangsung tanggal 11-13 Mei 2001 dengan mengambil tempat di Hotel Cempaka, Jakarta Pusat. Di sinilah perpecahan itu terjadi. (Djonharro, 2011)

Agung Laksono mendapat dukungan dari Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro Provinsi seluruh Indonesia dan satu gerakan: Ikatan Sarjana KOSGORO, sedangkan Hayono Isman didukung oleh seluruh Gerakan, Badan dan Lembaga tingkat Pusat, kecuali Ikatan Sarjana Kosgoro.

"Saya menginginkan Kosgoro yang independen bebas dari afiliasi politik manapun," kata Hayono putra sulung Mas Isman sang pendiri Kosgoro. Sebetulnya, sejak awal berdirinya, Kosgoro tercatat sebagai kelompok induk organisasi (Kino) Golkar yang berdiri pada 1964. Sejak 1997, Golkar sudah resmi berubah diri menjadi Partai Golkar sesuai dengan yang disyaratkan UU Nomor 2 tentang Papol dan UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu.

Hayono tegas menolak Kosgoro dikembalikan ke *khittahnya* sebagai pendukung Golkar. Alasannya, Partai Golkar bukanlah Golkar yang dulu. Yang jelas, jika terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro, Hayono menjanjikan prioritas program bidang perekonomian. Menurutnya, karena asyik bermain di politik, Kosgoro lalai menjalankan program ekonomi. Sementara itu, Agung Laksono adalah mantan sekjen PPK Kosgoro era Ketua Umum Soeprapto yang kini aktif sebagai salah seorang ketua DPP Partai Golkar selama dua periode berturut-turut.

Agung sendiri tak setuju dengan prasyarat kepengurusan Kosgoro bebas dari orang partai. Kubu Agung mengingatkan, jika Hayono terpilih, dikawatirkan Kosgoro akan mengikuti tradisi NU yang lebih mengutamakan kepemimpinan kiai dan keturunannya.

Menurut dia, aktif menjadi anggota politik, adalah hak asasi manusia.

Sehingga, ditambahnya, adanya keinginan membuat kriteria calon ketua umum harus bebas dari pengaruh politik tertentu, sangat mengada-ada. Selama masa Mubes, di sebuah hotel berbintang di kawasan Thamrin itu banyak beredar isu *money politics*. Isu itu berhembus dari masing-masing kubu: Bambang W Suharto, Agung Laksono, dan juga Hayono Isman.

Mubes lanjutan di Hotel Cempaka malahan kian mempertajam perbedaan sikap dan pendapat kedua kubu yang bertikai. Untuk segera mengakhiri petentangan itu, maka terbentuklah pimpinan mubes yang baru dengan ketua Djeliteng Soejoto (Jawa Timur). Pimpinan Mubes ini sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam Mubes, menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum terpilih. Agung segera mengusun kepengurusan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro masa bakti 2001-2006.

Sementara itu, kubu Hayono Isman memaklumkan keberadaanya sebagai pewaris perjuangan Kosgoro dan segera menetapkan kepengurusan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro masa bakti 2001-2006. Dalam kepengurusan itu, Abdul Muin Angkat, ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal.

Kepemimpinan dan kepengurusan ganda ini berlangsung selama dua tahun. Upaya perujukan dan islah terus dilakukan bahkan dengan peranan para tokoh senior Kosgoro. Namun tidak pernah membawa hasil, karena kedua belah pihak sama-sama merasa benar. Sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Kubu Agung Laksono bertekad mempertahankan amanat Pedoman Perjuangan Mas Isman dengan Orientasi Karya dan Kekaryaan, sedangkan Kubu Hayono Isman bertekad mengembangkan Independensi dengan tidak lagi menggunakan Pedoman Perjuangan Mas Isman dan Buku Forta karangan Mas Isman yang bernapaskan Golkar.

Untuk mengakhiri konflik, Hayono Isman dan Abdul Muin Angkat menggugat Agung Laksono dan Syamsul Bachri arena dianggap sebagai pihak yang tidak berhak memimpin Kosgoro dengan mempergunakan atribut-atributnya. Tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan itu dan bahkan menempatkan PPK Kosgoro pimpinan Agung Laksono dan Syamsul Bachri sebagai kepengurusan yang sah dan berhak mempergunakan atribut-atribut Kosgoro dan mengelola aset-aset organisasi Kosgoro.

Dalam perkara banding, kembali Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, dengan memenangkan duet Agung Laksono & Syamsul Bachri. Pada sisi yang lain, baik para tokoh, fungsionaris, maupun para kader dan anggota Kosgoro menarik

kesimpulan, bahwa upaya perujukan, islah dan semacamnya untuk mempersatukan kedua kubu telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil.

Kemudian berkembang pemikiran yang sangat jernih dan gagasan yang sangat arif, yaitu memberi kebebasan kepada kedua kelompok ini berjalan sendiri-sendiri, dengan mengembangkan kemampuan masing-masing. Diharapkan, masyarakat, bangsa, negara dan sejarah yang akan menilai, siapa yang unggul dalam mengembangkan Pedoman Perjuangan dan Tridharma: Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas sebagai warisan paling berharga dari Mas Isman dan TRIP Jawa Timur, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena itu dengan berkibarnya dua bendera, yakni Kosgoro dan bendera Kosgoro 1957 yang berlomba-lomba dalam mengembangkan Tridharma: Pengabdian-Kerakyatan-Solidaritas dan Pedoman Perjuangan, dalam masyarakat. (Djonharro, 2011)

Untuk Rakyat Sampai Akhir Hayat

Di tengah badai yang menerpa partai Demokrat, Hayono tetap loyal kepada partainya. Ketika ditanya apakah dirinya pernah mendapat tawaran dari partai lain, Hayono menjawab belum pernah. Kalaupun nantinya tawaran itu menghampiri, Hayono menyatakan tidak akan tergoda. Menurut dia, partai demokrat yang terbaik.

Hayono justru menyayangkan beberapa kader yang berpindah partai. Baginya, bila kasus korupsi di Partai Demokrat yang menjadi alasan berpindah partai, itu kurang tepat. "Pasalnya, Partai Demokrat merupakan partai yang berkomitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Ini misalnya dibuktikan dengan dipenjarakannya para kader yang terbukti korupsi." Tegasnya.

Mungkin loyalitas inilah yang menjadi poin plus sehingga dirinya menjadi salah satu kandidat capres partai berlambang piramida tersebut. Tidak hanya itu, prestasi dan pengalamannya juga membuktikan Hayono sebagai sosok yang bertanggung jawab dan amanah dengan jabatan.

Di tengah banyaknya kader partai yang tersangkut kasus korupsi, Hayono masih menjadi politisi yang bersih. Karakter yang ingin ditampilkan

kembali oleh partai demokrat bahwa masih ada kader yang benar-benar bersih di dalam partainya.

Dalam kandidasi konvensi partai, Hayono sudah mempersiapkan diri dengan matang. Menapaki kursi capres, Hayono mengusung visi “Indonesia Maju dan Kokoh Berlandaskan Jiwa Gotong Royong”.

Visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi, yaitu: memperkuat sistem ekonomi yang inklusif, berdaya saing tinggi dengan kekuatan infrastruktur, membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa pejuang dan berjiwa gotong royong.

Selain itu, Hayono juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif, transparan, profesional, dan berorientasi setinggi-tingginya juga menjadi pada kepuasan publik. Aspek kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatiannya dengan meningkatkan sistem jaminan sosial. Dalam aspek lapangan kerja, akan diperluas melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.



Hayono juga berjanji akan meningkatkan kapasitas diplomasi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, serta mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai suprastruktur penguatan ekonomi nasional.

Dari beberapa misi tersebut, ada tiga hal yang paling krusial untuk Indonesia saat ini agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara

maju dan berkembang lainnya, yakni membangun ekonomi yang kuat, membentuk pemerintahan solid dan membangkitkan kembali gotong-royong.

Menurutnya, ekonomi kuat dapat dimulai dengan membangun SDM produktif yang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan modal tersebut Hayono meyakini masyarakat akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengambil resiko dalam berinovasi dan bersaing.

Sedangkan pemerintahan yang solid ditandai dengan kerjasama antar elemen pemerintah yang padu baik presiden, menteri dan jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah yang saling mendukung dalam menerapkan kebijakan. Tentang penghidupan kembali gotong-royong, menurutnya modal yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam membangun Indonesia.

Butuh Kerja Keras Lebih Tapi Ada Peluang

Masih terbuka jalan bagi beberapa tokoh untuk menatap pilpres 2014. Apalagi para kandidat capres dari konvensi partai demokrat. Peluang masing-masing calon masih terbuka lebar. Apalagi dinamika politik membuat siapa pemenang konvensi masih abu-abu. Hal ini membuka peluang bagi Hayono untuk menaikkan elektabilitasnya.

Dalam perspektif politik, Hayono memang memiliki modalitas cukup tinggi. *Pertama*, ia merupakan politisi senior dan juga aktif di organisasi kemasyarakatan, parpol, lembaga eksekutif (pemerintahan), maupun legislatif (DPR). Bahkan Hayono tercatat sebagai menteri termuda di Kabinet Pembangunan VI pimpinan Presiden Suharto. Saat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, usianya baru mencapai 37 tahun.

Kedua, sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat yang juga menjabat Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, ia berpeluang besar mendapat dukungan kuat dari internal Partai Demokrat. Bahkan tersiar kabar, Kosgoro juga mendukung keputusannya maju sebagai peserta konvensi Partai Demokrat. Konon, Kosgoro akan memberikan dukungan penuh kepada Hayono Isman.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

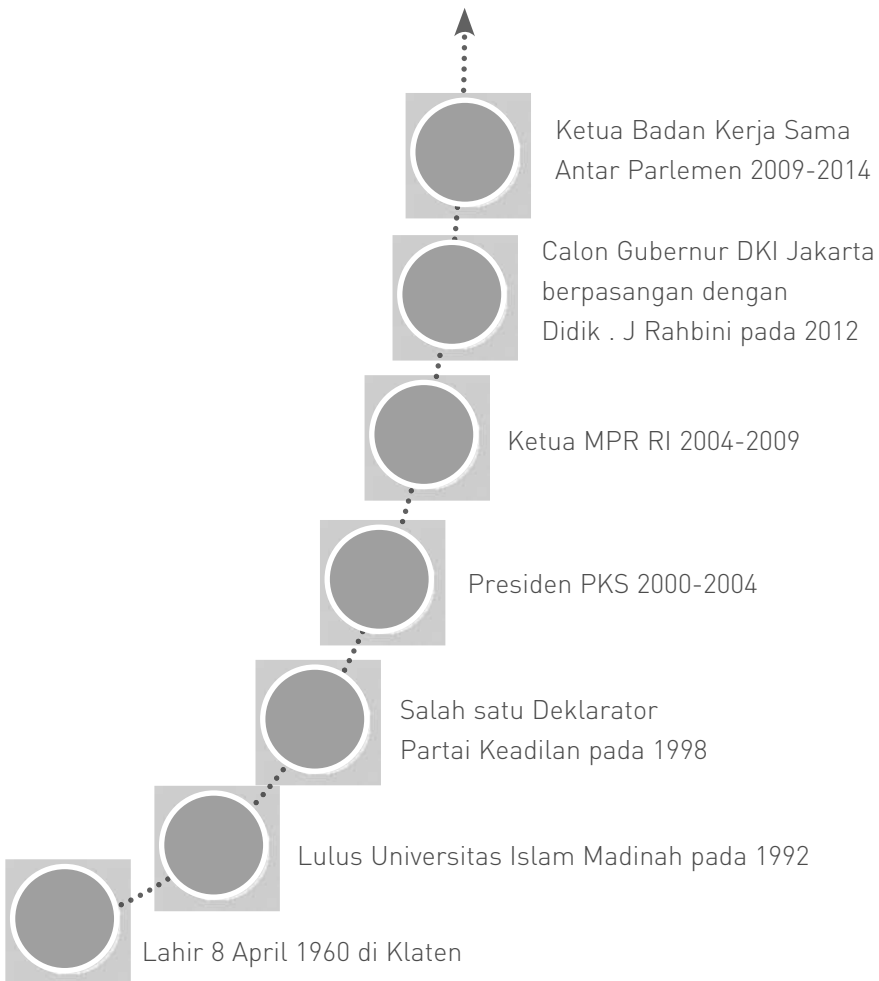
Jika dianalisis, melihat jam terbangnya yang cukup membanggakan, Hayono Isman memiliki peluang untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014 mendatang. *Pertama*, ia merupakan politisi senior dan juga aktif di organisasi kemasyarakatan, parpol, lembaga eksekutif (pemerintahan), maupun legislatif (DPR). Bahkan Hayono tercatat sebagai menteri termuda di Kabinet Pembangunan VI pimpinan Presiden Suharto. Saat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, usianya baru mencapai 37 tahun.

Kedua, saat ini ia tercatat sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat. Masuknya nama Hayono di konvensi menjadi tiket peting baginya, apalagi ia juga menjabat Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Pada titik inilah, ia berpeluang besar mendapat dukungan kuat dari internal Partai Demokrat. Bahkan tersiar kabar, Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) juga mendukung keputusannya maju sebagai peserta konvensi Partai Demokrat. Konon, Kosgoro akan memberikan dukungan penuh kepada Hayono Isman.

Meski demikian, salah satu kelemahan yang juga menjadi tantangan bagi Hayono adalah tentang elektabilitasnya. Elektabilitas Hayono masih rendah di antara tokoh-tokoh nasional secara umum. Begitu pula di internal konvensi. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Hayono masih di urutan ke-9 di antara peserta konvensi lainnya.

HIDAYAT NUR WAHID

Pemimpin Potensial





Sosoknya bersahaja dan rendah hati. Di tengah hingar bingar politisi anggota legislatif yang indentic dengan berbagai fasilitas mewah, nama Hidayat Nurwahid adalah anomali. Saat dirinya didaulat menjadi Ketua Musyawarah Perwakilan Rakyat (MPR) 2004-2009 dia menolak sejumlah fasilitas mewah yang diberikan negara. Integritas dan konsistensinya membuat nama Hidayat lekat di benak masyarakat. Hal itu juga yang membuat nama Hidayat jauh dari isu korupsi dan membuatnya berpeluang menjadi calon alternatif bagi masyarakat dalam pemilihan umum 2014 yang menginginkan pemimpin yang bersih.

Muhammad Hidayat Nur Wahid lahir dan tumbuh di Klaten, Jawa Tengah. Hidayat lahir 8 April 1960. Hidayat sejak kecil sudah ditanamkan ilmu agama yang kuat, karena orang tuanya berasal dari keluarga pemuka agama. Kakeknya dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah di Prambanan. Ayahnya, sekalipun berlatar Nahdlatul Ulama, juga pengurus Muhammadiyah. Sementara sang ibu adalah aktivis Aisyiah. Tak aneh bila ajaran Islam begitu melekat di dirinya.

Meski kental dengan kultur Muhammadiyah, Hidayat tidak pernah dipaksa oleh ayah dan ibunya untuk masuk Muhammadiyah. Malahan, selepas balik dari menimba ilmu di Madinah, ia lantas aktif di Yayasan Alumni Timur Tengah yang banyak anggotanya adalah pegiat NU.

Hidayat memilih mendalami Islam dalam setiap sekolah yang dipilihnya.

Dalam pandangan Hidayat, Islam itu meliputi empat hal. Pertama, *al-islam*, yakni penyerahan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kedua, *al-silm*, yang berarti kedamaian. Ketiga, *al-salam*, artinya kesejahteraan. Keempat, *al-salamah*, yang artinya keamanan atau keselamatan. Itulah nilai-nilai Islam yang berlaku universal.

Lulus dari SDN Kebondalem Kidon, Pramban, Klanten pada 1972, ia masuk Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo. Setelah SD, ia dimasukkan sang ayah ke Gontor karena banyak saudaranya yang sekolah di sana. Selama mengenyam pendidikan di pesantren modern tersebut ia selalu mendapatkan prestasi yang membanggakan, peringkat pertama atau kedua. Di sana dia juga aktif berorganisasi. Di samping menjadi pengurus OSIS, Hidayat pun anggota Pelajar Islam Indonesia (PII). (wikipedia.org, 2014)

Ustad Hidayat

Ketertarikan yang besar terhadap Islam membuatnya melang buana hingga ke daerah asal usul Islam, yaitu Arab Saudi untuk mendapatkan pendidikan. Dia kembali mengambil program sarjana di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi dan lulus pada 1983.

Keputusannya untuk belajar ke luar negeri adalah berkat dorongan seorang sahabat karibnya, yang mengingatkannya bahwa *mubadzir* kalau ijazah dari Gontor hanya untuk meneruskan studi di dalam negeri. Lalu kawannya itu juga lah yang mengusahakan agar Hidayat dapat sekolah ke luar negeri.

Selesai sarjana di Madinah, Hidayat langsung mengikuti program pasca-sarjana (S2) jurusan akidah di universitas yang sama pada 1987. Sebenarnya, ia tidak terpikir untuk melanjutkan ke S2. Tapi tiba-tiba namanya masuk nominasi untuk ikut ujian S2. Hari itu ia dapat informasi dari orang lain dan hari itu juga ia harus menempuh ujiannya. Dan ternyata Hidayat lulus.

Ketika masuk S3 pun ia tidak punya niat sama sekali. Dosen pembimbingnya yang agak memaksa supaya ia mengambil peluang S3 yang diberikannya. Padahal waktu itu, ia sudah *ngotot* untuk pulang ke Indonesia untuk berdakwah. Akhirnya Hidayat melanjutkan pendidikannya hingga bergelar doktor pada 1992.

Selama menimba ilmu di Arab Saudi, Hidayat sempat menjadi ketua

perhimpunan mahasiswa asal Indonesia. Ia pernah terpaksa berurusan dengan KBRI setempat karena mempersoalkan “Asas Tunggal” dan Penataran P-4. Sepulang dari tanah suci, Hidayat aktif dalam berbagai kegiatan dakwah sebelum terjun di dunia politik pada 1999. Dia juga menjadi Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah.

Hidayat mengaku dalam menjalankan kehidupannya ia berpandangan sederhana, yaitu mengalir begitu saja dengan penuh tawakal. “Dan Alhamdulillah, hidup saya berjalan dengan lancar,” katanya. Sepanjang hidupnya, ia merasa Allah membimbing dan memberikan yang terbaik buatnya. (tokohindonesia.com, 2014)

Sosok ramahnya tidak sekedar pencitraan di media. Hidayat, kerap ikut bermain sepak bola bersama masyarakat di sekitar tempat tinggalnya meskipun sibuk di dunia politik. Kegemarannya dalam bermain sepak bola memang sudah bawaan sejak masa muda. Saat kuliah di Madinah pun ia tetap main sepak bola. Ia juga rutin bermain bulutangkis. Hidayat juga memiliki fisik yang prima, tidak jarang ia masih kuat main selama lima set *non stop*.

Baginya, olahraga tidak sekedar kegiatan fisik saja. Melainkan bagian dari sunnah ajaran Rasul. Nabi saja tangguh dalam berkuda, memanah, dan gulat. Motivasi itulah yang menyebabkannya tidak pernah lepas dari olahraga. Karenanya ia menganjurkan setiap masyarakat membiasakan diri rutin berolahraga, apapun bentuknya. Menurutnya, dengan olahraga rutin maka stamina kerja seseorang menjadi meningkat. Hidayat juga mengaku jika olahraga semakin penting ketika terjun mengurus partai politik. Karena politik juga memerlukan stamina fisik yang prima.

Hidayat juga sangat suka membaca. Dia bahkan dijuluki kutu buku oleh orang-orang dekatnya. Hal ini diakuinya karena ditularkan oleh keluarga besarnya yang banyak berprofesi sebagai guru. Maka itu, tak sulit baginya untuk mengkhhatamkan novel silat Ko Ping Ho dan komik-komik Jawa pada masa remajanya.

Hingga sekarang, ia tetap membiasakan diri membaca. Dia menyempatkan membaca buku setiap hari meskipun sibuk. Tidak penting berapa banyak yang dia baca, yang jelas setiap hari harus ada buku yang dibacanya. Karen itu tidak heran, apabila perpustakaan pribadinya penuh buku-buku

baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Sebagian besar merupakan oleh-oleh dari studinya di Arab Saudi.

Kehidupan pribadi Hidayat juga pernah disorot oleh publik, terutama ketika Hidayat memutuskan untuk menikah lagi, setelah sang istri Kastian Hidayat meninggal dunia. Dari pernikahannya dengan istri pertamanya itu, Hidayat mempunyai empat anak yaitu Inayatu Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, dan Hubaib Shidiqi.

Hidayat kemudian menikahi Diana Abbas Thalib yang berprofesi sebagai dokter pada 11 Mei 2008. Perkenalan keduanya lantaran difasilitasi oleh seorang *almarhumah* tokoh wanita PKS yang sangat disegani yaitu, Yoyoh Yusroh. Ada yang unik saat berlangsungnya pernikahan kedua pasangan itu. Hidayat secara khusus mengundang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghitung uang dari setiap amplop hadiah yang diterimanya. Karena saat itu, Hidayat masih melakoni jabatan publik, Ketua MPR.



biografi-hidayat-nur-wahid-6

Usaha Hidayat layak diapresiasi, karena sebagai upaya KPK untuk mengawasi dan memberantas gratifikasi hadiah bagi pejabat. Tidak semua pejabat negara bersikap kooperatif dengan tim KPK yang menelisik peluang gratifikasi dari hadiah pernikahan. Hadiah baik dalam bentuk amplop, karangan bunga, sumbangan, maupun hadiah lainnya, semuanya disortir dan dicatat oleh KPK yang berlangsung di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra IV nomor 16, Jakarta Selatan. Tiga petugas KPK selama empat jam memeriksa semua isi amplop dari tamu. Hadiah di atas Rp 1 juta, akan dikembalikan ke kas negara. Kalau nominalnya di bawah itu, Hidayat dan istrinya bisa mengambilnya. Namun Hidayat menjelaskan bahwa pesta perkawinan itu bukan untuk mencari sumbangan, melainkan mengikuti tradisi.

Dari pernikahan tersebut, Hidayat menerima sumbangan hingga sekitar Rp 191 juta. Terdiri atas uang tunai sebesar Rp 130 juta, cek Rp 12 juta, mata uang asing sekitar 5.000 dolar AS atau setara dengan Rp 46 juta, dan 500 dolar Singapura atau setara Rp 3,25 juta. (antikorupsi.org, 2008)

Hidayat juga sangat perhatian dengan keluarga. Meskipun kegiatan politiknya menyita waktu, ia selalu menyempatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Menurutnya, ia selalu berusaha berlaku adil karena bagaimana pun segala sesuatu punya hak, apalagi keluarga. “Dan insya Allah saya akan tetap berkomitmen untuk membina keluarga serta di sisi lain mengurus dakwah karena keduanya merupakan hal yang saling melengkapi bukan saling menafikan,” katanya.

Hidayat dan PKS

Latar belakang keluarga yang tokoh agama tidak pernah membuat Hidayat berniat menjadi politisi. Hidayat melakoni politik karena bekal organisasi yang dia geluti sejak muda. Hidayat tercatat sebagai Anggota Pelajar Islam Indonesia (1973), Andalan Koordinator Pramuka Gontor bidang Kesekretariatan (1977-1978), Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi (1981-1983), Ketua PPI Arab Saudi (1983-1985), Peneliti Lembaga Kajian Fiqh dan Hukum Al Khairot, dan Anggota Pengurus Badan Wakaf Ponfok Modern Gontor (1999).

Hidayat memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulunya bernama Partai Keadikan (PK) sebagai wadah politiknya. Hidayat juga dikenal se-

bagai perintis PK dan ikut mendeklarasikan berdirinya partai tersebut. Keterlibatannya dalam PK dimulai karena dia juga adalah pengajar dan pengurus Yayasan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam Al Haramain yang dianggap sebagai salah satu wadah yang membidani kelahiran PK, selain Studi dan Informasi untuk Dunia Islam Kontemporer (SIDIK).

Menurut Hidayat, hal itu memang tidak bisa dibantah sekalipun tidak mutlak begitu. Namun, menurut Hidayat sebetulnya PK juga diinisiasi oleh beberapa organisasi lainnya lagi yakni Institute of Science and Technology Studies (ISTEC).

Kalau boleh diformulasikan yang dari Al Haramain adalah para alumni Timur Tengah, yang dari ISTEC adalah para alumni dari Barat dan yang dari SIDIK adalah para aktivis dakwah dari Indonesia. Ada juga dari lembaga pendidikan Nurul Fikri dan Yayasan Ibu Harapan pimpinan Yoyoh Yusroh. Perpaduan ini terlihat sangat manis dan sinergis, meskipun lembaga-lembaga itu tidak menjadi *underbouw* PK saat berdirinya. Mereka tetap independen. (tokohindonesia.com, 2012)

Hidayat terpilih jadi Presiden PKS dalam Musyawarah Nasional (Munas) I pada 21 Mei 2000 sampai 11 Oktober 2004, menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang memilih mundur untuk tetap sebagai PNS. Sejak awal Munas nama Hidayat sudah masuk dalam daftar nominasi. Maka tidak mengherankan bila dalam sidang Majelis Syuro PK, ia terpilih.

Nama Hidayat sebenarnya telah lama digadang-gadang untuk menjadi orang nomor satu di PK. Waktu partai itu akan dideklarasikan, ia sebenarnya nyaris didaulat untuk menduduki kursi presiden partai. Namun, ia menolak. Karena dia merasa belum saatnya menduduki posisi itu.

Namun, dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKS sebelumnya, Hidayat tak dapat menolak permintaan untuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) sekaligus Ketua Dewan Syura. Jabatan yang berada di atas jabatan presiden.

Bersama partai ini pula ia maju dalam pemilihan calon legislatif 2004-2009, daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Hidayat meraih total suara 106.521 dan duduk di bangku DPR Komisi I yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.

Dalam memimpin PKS, ia bertekad menjadikan partai ini merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. PKS datang berusaha untuk menjadi bagian dari solusi. Caranya adalah dengan tidak menjalankan politik

kotor, menghalalkan segala cara, politik yang menolerir korupsi. Demikian juga, dalam memilih koalisi. Hidayat beranggapan, PKS membuka diri untuk bekerjasama dengan beragam partai yang tetap berkomitmen dengan politik yang bersih, peduli, bermoral, dan berpegang pada cita-cita reformasi. Menurutnya, bagi PKS, dalam berpolitik keberkahan adalah hal yang utama. Kemenangan bukan tujuan PKS.

Dalam memimpin PKS dia juga sangat selektif soal kepengurusan. Namun, bukan berarti partai ini eksklusif. Sebab, pada tingkat konstituen, PKS terbuka terhadap siapa pun, termasuk kalangan nonmuslim. Ia mengakui, dengan menyatakan diri sebagai partai Islam, PKS pernah dianggap eksklusif, bahkan sempat dicap fundamentalis.

Dalam sebuah partai, menurutnya ada dua hal yang harus sangat diperhatikan yakni massa dan pemimpin. Sama halnya dengan dakwah, kalau partai ini dipimpin oleh orang yang punya massa banyak tapi secara moral bermasalah, misalnya berperilaku maling, maka kita bukan lagi sedang menjalankan Islam tapi malah menipu masyarakat dan perpolitikan kita.

Ia menegaskan bahwa partainya tidak mau seperti itu. Karena pada hakekatnya politik PKS adalah politik Islam yang dasarnya Islam dan visinya dakwah dan pelayanan. Karena itu, PKS tidak perlu memasukkan hal-hal yang *syubhat*, apalagi yang haram, walaupun hal itu bisa mendatangkan kepuasan. Sebab, menurutnya, kalau itu dilakukan juga, maka yakinlah bahwa umur dakwah ini akan sangat pendek. Sebentar saja akan muncul berbagai konflik yang luar biasa, fitnah yang tidak karuan yang pada akhirnya akan mematikan dakwah. (tokohindonesia.com, 2012)



Selama kepemimpinannya, PKS selalu tampil simpatik dalam menyikapi berbagai masalah dalam negeri maupun dunia. Termasuk dalam menyikapi konflik antara orang Islam dan non Islam seperti di Maluku, PKS tidak bersikap reaktif seperti Laskar Jihad. Juga dalam menyikapi ancaman perang yang dilancarkan AS ke Irak. PKS melakukan demo besar-besaran, tetapi sangat tertib dan simpatik. Hal ini didasari pemahaman kader partai ini tentang Islam.

Tidak hanya itu, dalam kepemimpinannya, Hidayat mampu menam-pilkan PKS sebagai partai yang aktif bersuara namun tertib. Banyak sekali aksi massa PKS, yang dilakukan secara tertib. Hal ini tidak lepas dari ko-mando Hidayat yang tidak ingin merusak citra partai. Di masa Hidayat ini pula, lebih menekankan masalah-masalah kebangsaan sedangkan isu-isu keislaman mulai dikesampingkan. Strategi ini cukup berhasil, terbukti de-ngan melejitnya suara PKS dengan meraih 8,33 juta suara atau 7,3 % pada pemilu 2004 dan 7,88 % pada pemilu 2009.

Dengan menimbang basis pendukung di DKI Jakarta, PKS kembali memberanikan diri untuk mengusung calon tersendiri di pilgub DKI 2012. Terpilihlah Hidayat Nur Wahid didampingi Didik J Rachbini sebagai cagub DKI Jakarta yang diusung oleh PKS. Namun, ternyata duet Hidayat dan Didik belum mampu menandingi Gubernur popularitas Jokowi.

Meskipun begitu, Hidayat menerima kekalahan dengan lapang dada. Karena dirinya telah berikhtiar dengan maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan sehingga tidak ada yang perlu disesali. Sikap ksatria tersebut tidak menghilangkan kharisma Hidayat, terutama dalam internal PKS. Terbukti Hidayat masih masuk dalam radar capres yang akan diusung PKS dalam pertarungan pilpres 2014 nanti.

Hidayat memang belum pernah mengemukakan gagasan politiknya secara jelas. Namun, sikap politik dan kepemimpinannya dalam dunia po-litik dapat memperlihatkan bagaimana Hidayat adalah sosok religius yang moderat.

Namun, Hidayat juga menyangkan rusaknya citra PKS yang sangat islamis dan positif tersebut setelah Presiden PKS setelahnya, Luthfi Hasan Ishaaq, dikaitkan dengan kasus impor sapi dan dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Meskipun demikian, Hidayat yang kini menjabat sebagai ketua Fraksi PKS di DPR dan anggota Majelis Syuro PKS, percaya vonis tersebut tidak akan memecah belah PKS tetapi justru menguatkan partai tersebut.

Menurut Hidayat, kader PKS yang sebelumnya mengidolai Luthfi Hasan juga akan merasa perlakuan yang tidak adil. Hal ini, lanjutnya, akan menimbulkan militansi semangat juang yang gigih dari para kader. Dia berharap masyarakat bisa mengesampingkan kasus itu dan melihat bahwa PKS memiliki lebih banyak sisi positif. Partai ini diuntungkan oleh anggota yang kebanyakan adalah orang yang memiliki *kafaah*, kompetensi syariah yang memadai. Selain itu, banyak juga fungsionaris PKS yang tamat S3 dari Mesir, Saudi, Pakistan, Malaysia, Eropa, Amerika, dan Jepang. Sehingga mereka memiliki kemampuan untuk merujuk secara mendalam kepada literatur-literatur klasik pemikiran Islam, termasuk pemikiran politik.

Hidayat tidak menampik pasti ada salah satu kader yang tidak mampu memegang amanah, namun kader yang seperti itu keberadaannya sedikit. PKS lanjutnya bukan partai para malaikat yang tidak punya prestasi. PKS itu hanya partai tempat para manusia yang bisa berbuat khilaf. Namun perlu diingat, kesalahan yang dilakukan itu sifatnya individual sebagai seorang manusia, bukan mencerminkan partai.

Menjadi Ketua MPR

Hidayat menjadi Ketua MPR RI untuk periode 2004-2009 setelah mengalahkan saingannya, Sucipto dengan selisih dua angka yang diusung Koalisi Kebangsaan. Hidayat didukung oleh Koalisi Kerakyatan yang terdiri dari partai-partai pendukung SBY-Kalla plus PPP yang keluar dari Koalisi Kebangsaan.

Koalisi Kerakyatan saat itu mencalonkan Paket B yakni Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS sebagai calon ketua dan AM Fatwa dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Serta, dua dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) BRAY Mooryati Sudibyo dari DKI Jakarta dan Aksa Mahmud dari Sulawesi Selatan masing-masing sebagai calon wakil ketua.

Sedangkan Koalisi Kebangsaan mencalonkan Paket A, yakni Sucipto dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai calon ketua dan Theo L Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar. Selain itu, dua unsur DPD Sarwono Kusumaatmaja dari DKI Jakarta dan Aida Ismet Nasution dari Kepulauan Riau, masing-masing sebagai calon wakil ketua.

Hidayat akhirnya meraih 326 suara, unggul dua suara dari Sucipto yang meraih 324 suara. Sedangkan tiga suara abstain serta 10 suara tidak sah.

Pemilihan berlangsung demokratis dalam Sidang Paripurna V MPR di Gedung MPR, Senayan, Jakarta 6 Oktober 2004. Ia pun menggantikan Amien Rais dan kemudian digantikan oleh Taufiq Kiemas. (tokohindonesia.com, 2012)

Setelah resmi menjadi ketua MPR, Hidayat memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Pilihan tersebut diapresiasi banyak pihak. Bahkan dinilai sebagai tradisi baru yang patut ditiru dalam percaturan politik Indonesia. Majelis Syuro DPP PKS memilih Tifatul Sembiring menggantikannya sampai akhir periode.

Sudah menjadi komitmen partainya, setiap kader tidak pantas merangkap jabatan di partai manakala dipercaya menjabat di lembaga kenegaraan dan pemerintahan (publik). Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan. Sekaligus untuk dapat memusatkan diri pada jabatan di lembaga kenegaraan tersebut.

Selain itu, langkah-langkah populisnya seperti menolak kendaraan dinas yang mewah saat itu membetot perhatian dan apresiasi masyarakat. Dia juga menolak pemberian laptop bagi anggota dewan seharga Rp 21 Juta dan cincin kenangan anggota DPR.

Mengenai anggaran Ketua MPR, perjalanan dinas dihitung berdasarkan hari kerja dan tidak termasuk hari perjalanan. Dia pun berhasil melakukan program penghematan anggaran MPR sebesar Rp 59,7 miliar. Laporan keuangan MPR dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

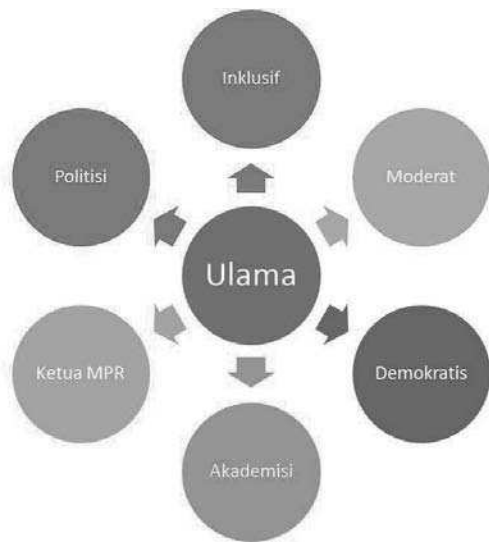
Hidayat pun dianggap berhasil menjalankan tugasnya itu. Dia mensosialisasikan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang menjalankan demokrasi. Ini mendapat apresiasi dari duta besar sejumlah negara asing untuk Indonesia. Hidayat pun dinilai sebagai sosok pimpinan MPR yang konsisten menjalankam ketentuan UUD.

Hidayat masih terus ikut rapat paripurna sebagai anggota DPR RI. Dia pun mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden SBY 15 Agustus 2009. Dia juga melahirkan hari konstitusi dengan SK Presiden Nomor 18/2008. Selain itu, memprakarsai dan mempopulerkan Sosialisasi UUD 1945 melalui Cerdas Cermat Nasional pada tingkat SMU, mulai dilaksanakan sejak 2008.

Islam dalam Bingkai Demokrasi

Nuansa demokratis yang tumbuh di dalam keluarga Hidayat, ternyata berpengaruh pada kepribadian Hidayat. Hidayat tampil sebagai tokoh sekaligus politisi yang cukup moderat. Salah satu bukti saat Hidayat ikut serta dalam pembentukan Forum Indonesia Damai (FID) pasca pemboman di malam Natal 2000, atau penggalangan Komite Indonesia untuk Solidaritas rakyat Irak (KISRA).

Dalam wawancara Tempo Edisi17/XXXV/19 - 25 Juni 2006, Hidayat berpendapat bahwa syariat adalah proses bagaimana menciptakan manusia unggulan, menghadirkan moralitas bangsa, menghadirkan masyarakat sejahtera, dan bagaimana menegakkan hukum. Oleh karena itu, syariat islam menurut Hidayat Nur Wahid tidak bisa dipahami secara dogmatis dan kaku. Penerapannya dilaksanakan sesuai sistem yang dianut suatu negara.



Indonesia yang telah melaksanakan reformasi seharusnya mampu menjadi jembatan dalam terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena demokrasi memberi jalan bagi terciptanya kesempatan yang sama untuk semua warga negara. Selain itu, kebebasan yang diberikan akan membuka peluang gagasan-gagasan baru bagi kehidupan bernegara yang lebih baik.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah tidak dijalankannya sistem demokrasi secara baik sehingga demokrasi belum menemukan jalan

sesuai yang dicita-citakan. Apalagi masih adanya perilaku oknum politik yang belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan rakyat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi noda bagi sistem demokrasi saat ini.

Hidayat menyadari adanya heterogenitas di negeri ini. Oleh karena itu, Hidayat sepakat untuk mengutamakan dialog dalam mengelola perbedaan yang ada. Bukan dengan tindakan yang represif. Baginya, tindakan represif hanya akan menimbulkan perpecahan dan gelombang yang lebih besar dalam penerapan syariat. Tentu saja, tindakan represif juga akan mengancam persatuan dan kesatuan umat. Oleh karena itu, Hidayat sangat mementingkan sikap politik yang bersih dan terbuka. Dengan demikian, demokrasi juga akan berjalan sesuai dengan cita-cita yang diinginkannya.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Sebagai tokoh Muslim yang dikenal pemikirannya moderat, Nidayat Nur Wahid memiliki peluang untuk menjadi capres di Pilpres 2014. *Pertama*, ia memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik sebagai Presiden Partai, Ketua Fraksi, dan bahkan Ketua MPR RI. *Kedua*, Hidayat juga tokoh yang dikenal bersih selama ini, memiliki kendaraan partai yang jelas, serta dikenal sederhana dan rendah hati.

Ketiga, dalam Pemilu Raya (Pemira) yang digelar PKS beberapa waktu lalu, posisi Hidayat menempati urutan teratas. Hidayat mengalahkan koleganya seperti Anis Matta, Ahmad Heryawan, dan Nur Mahmudi Ismail. Artinya dalam konteks ini, Hidayat menjadi orang paling tinggi tingkat popularitas dan elektabilitasnya di internal PKS.

Meski demikian, kelemahan Hidayat ialah tentang gagasan besarnya untuk Indonesia. Sejauh ini, visi atau gagasannya dalam membangun Indonesia secara komprehensif belum begitu tampak. Apalagi, meski memiliki eletabilitas tertinggi di internal partai, namun elektabilitasnya di antara tokoh-tokoh nasional lainnya masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Hidayat masih belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Itulah tantangan yang harus segera dijawab Hidayat Nur Wahid.

Menjelang pilpres 2014, partai-partai peserta pemilu sudah bersiap diri menyongsongnya. Ada yang sudah menyusun berbagai program kemenangan, survey elektabilitas, bahkan sudah ada partai politik yang dengan berani mendeklarasikan capres yang akan diusungnya.

PKS sebagai partai yang memiliki ribuan kader yang cukup solid, ternyata tidak mau gegabah dalam menentukan calon presiden yang akan diusungnya. Ketok palu diserahkan kepada Dewan Syuro untuk menentukan siapa capres yang akan diusung partai islam tersebut. Belum lagi, PKS juga msaih ingin memperhitungkan peluangnya pada pileg nanti.

Meskipun begitu, sudah ada beberapa nama yang dipilih dari hasil Pemira November 2013 lalu sebagai bakal capres 2014 yang diusung PKS. Mereka adalah Anis Matta, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Heryawan. Ketiga calon ini dianggap yang paling potensial untuk menaikkan elektabilitas partai.

Apabila dianalisis, masing-masing calon mempunyai track record dan modal politik yang tidak beda jauh. Namun, jika berkaca hasil Pemira PKS, yang dilaksanakan November 2013 lalu, Hidayat Nur Wahid mendapatkan dukungan terwahid dari mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah PKS.

Perolehan suara Hidayat mengalahkan empat kandidat lainnya. Hidayat memperoleh 18,34 % suara, Anis Matta 17,46% suara, Ahmad Heryawan 16,69 % suara, Tiffatul 11,5% suara, dan Nur Mahmudi Ismail 7,41% suara. (kompas.com, 2 februari 2014).

Ini artinya, kharisma Hidayat masih menjadi magnet bagi pengurus internal PKS. Memang Hidayat telah mengukir tinta emas bukan saja bagi perjalanan PKS tetapi juga kiprah politiknya di negeri ini. Tentu saja ini menjadi magnet tersendiri bagi internal PKS.

Dalam kacamata politik, Hidayat sebenarnya juga memiliki modal yang cukup besar jika maju dalam pilpres 2014. *Pertama*, ia memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, mulai dari Presiden Partai, Ketua Fraksi, dan bahkan Ketua MPR RI.

Kedua, Hidayat juga tokoh yang dikenal bersih selama ini. Kesederhanaan dan kehati-hatiannya dalam mengemban jabatan menjadi karakteristiknya selama ini. Menurutnya, pemimpin juga harus menjadi teladan bagi umatnya. Oleh karena itu, saat menduduki jabatan elitis pun, Hidayat masih menjaga kesederhanaannya.

Ketiga, Hidayat adalah sosok yang loyal kepada partai. Salah satunya, saat diamanati maju dalam pilgub DKI, Hidayat dengan sikap ksatria bertarung mengemban amanah partai tersebut. Meskipun belum berhasil, tetapi Hidayat mampu menunjukkan kharisma tersendiri bagi warga DKI.

Keempat, dengan pengalaman organisasinya yang cukup banyak, membuka peluang tersendiri dalam menaikkan elektabilitasnya. Apalagi sikapnya yang moderat, membuat Hidayat tidak susah untuk meraih voters dari luar internal partai.

Meskipun begitu masih ada tantangan yang mungkin mengganjal Hidayat dalam pilpres nanti. Pertama, dari internal partai. Memang dalam Pemira PKS, Hidayat mendapatkan suara terbanyak dari pengurus internal PKS. Namun, tidak menutup kemungkinan para pengurus yang memilih calon yang tidak tembus seleksi capres, (Tiffatul dan Nur Mahmudi Ismail) akan mengalihkan basis massanya untuk mendukung bakal capres lain, yakni Anis Matta dan Ahmad Heryawan.

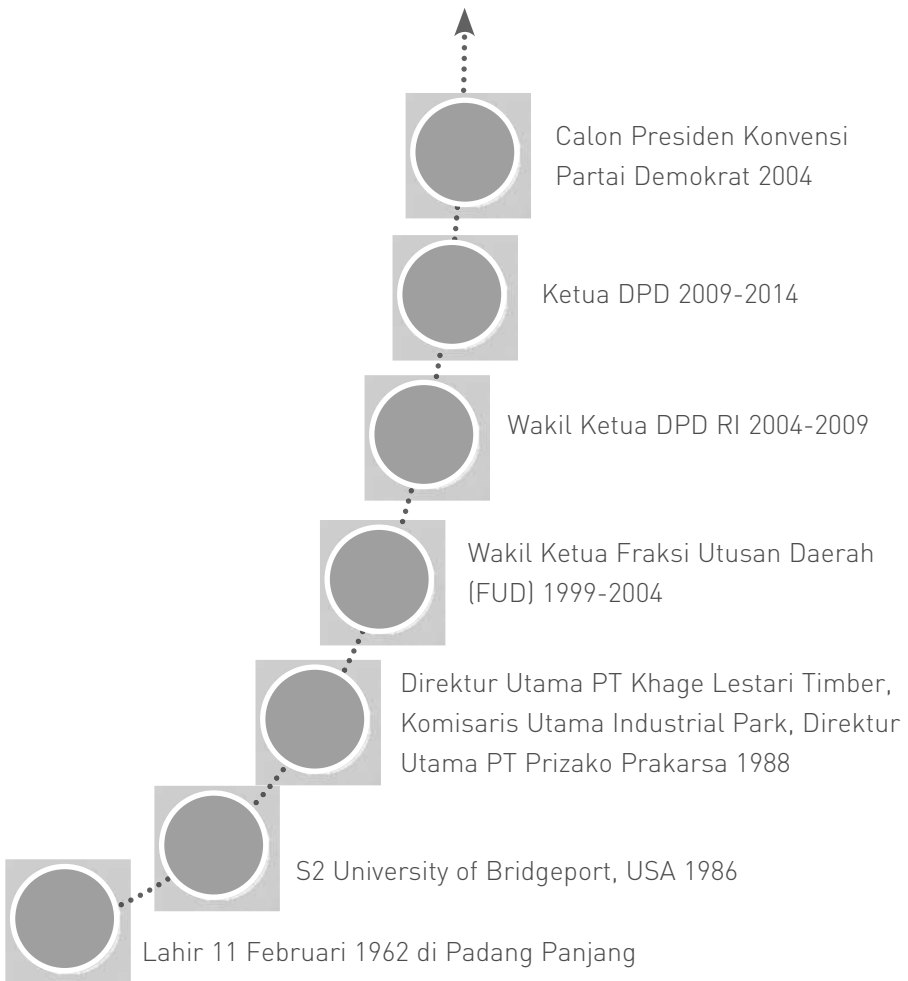
Apalagi Anis Matta sekarang menduduki kursi nomor 1 partai. Akan menjadi blunder tersendiri apabila Hidayat tidak menguatkan suara dari basis internal partai.

Kemudian, tantangan yang lebih besar justru hadir dari eksternal partai. Meski memiliki elektabilitas tertinggi di internal partai, namun elektabilitasnya di antara tokoh-tokoh nasional lainnya masih relatif rendah.

Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Hidayat masih belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Itulah tantangan yang harus segera dijawab Hidayat Nur Wahid.

IRMAN GUSMAN

Pemimpin Potensial





irman-gusman-005-djoko-poerwanto

Keluarga Saudagar Emas

Sore di Padang Panjang. Bocah itu terlihat rapi dengan rambut kelimis agak berminyak. Irman Gusman, sang bocah, sudah bersiap untuk ikut Haji Kamili, kakeknya, pergi keliling kota. Sedan buatan Amerika bermerek Impala pun sudah dipanaskan. Kendaraan bermesin 6. 000 cc itu siap melaju untuk menampung Abak-Cucu berkendara.

Pada tahun 60-an, tidak banyak orang yang memiliki sedan. Haji Kamili adalah satu dari orang yang sedikit itu. Maklum, Abak adalah saudagar emas terbesar di Sumatra Barat ketika itu. Jaringan toko emasnya tak hanya sampai di Padang Panjang, tapi melanglang hingga ke Bukit Tinggi, Padang, bahkan jauh ke Palembang.

Layaknya orang Minang, Abak ingin seluruh saudaranya dapat mandiri dengan berwirausaha. Mereka pun diajarkan cara berdagang dan diberi pinjaman modal oleh Abak untuk menjual emas. Termasuk Gusman Gaus, kemenakan Abak, yang tak lain merupakan ayah Irman Gusman.

Hanya, Gusman Gaus rupanya disuruh merantau ke Yogyakarta sejak SMA. Kemudian, dia meneruskan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Gusman Gaus dipanggil pulang pada 1959 karena ada pergolakan daerah di Sumatra Barat. Kuliahnya di Jakarta terbengkalai. Gusman Gaus pun harus melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Setelah

lulus, Gaus meneruskan bisnis Abak sebagai saudagar emas dan membuka tiga toko, kemudian menikah dengan Janimar Kamili. Saudara jauh yang juga berasal dari rumpun Datuk Batuah.

Irman Gusman lahir di Kota Padang Panjang, 11 Februari 1962. Dia merupakan anak kedua dari 14 bersaudara. Sejak masa kanak-kanak, Irman selalu berada di bawah pengawasan ayahnya. Tak terkecuali saat Gusman Gaus harus tinggal di Jakarta selama setahun untuk mengikuti pendidikan manajemen di LPPM. Ketika itu, Irman kecil turut dibawa ayahnya ke Jakarta. Irman pun sekolah di SD Taman Siswa di Matraman Dalam, Jakarta.

Sewaktu di Jakarta, ayah Irman membawa anaknya untuk mengikuti tes psikologi. Gusman Gaus ingin mengetahui seberapa cerdas sebenarnya Irman. Berdasarkan tes, Irman masuk dalam kategori anak cerdas karena nilai IQ-nya tinggi. Psikolog pun merekomendasikan Irman untuk langsung mengikuti ujian akhir SD tanpa menjalani pendidikan di kelas VI.

Balik ke Padang, Irman pun ikut ujian persamaan SD dan langsung masuk kelas enam. Pada usia 11 tahun, Irman sudah duduk di bangku kelas 1 SMP Negeri 3 Padang. Irman ketika itu tercatat sebagai siswa termuda dibanding teman sekelasnya yang rata-rata berusia dua tahun lebih tua. Irman kemudian meneruskan sekolahnya di SMA Don Bosco, salah satu SMA swasta terbaik di ibu kota provinsi Sumatra Barat. Hanya, Irman tak kerasan. Dia kemudian pindah ke SMA Negeri 2 Padang dan menyelesaikan studinya di sana.

Dia kemudian merantau ke Jakarta untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (UKI). Di Jakarta, Irman tercatat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (www.irmangusman.com, 2014). Lulus dari UKI, Irman lantas melanglang buana untuk kuliah di Amerika Serikat. Dia mengambil master untuk bisnis di Universitas Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat. Irman lulus pada Mei 1988.

Irman menikahi seorang gadis bernama Liestyana Rizal. Seorang perempuan Minang yang dikenalnya di Jakarta. Mereka pun dikarunai 2 putri dan 1 putra, yaitu Irviandari Alestya Gusman, Irviandra Fathan Gusman dan Irvianjani Audria Gusman. Merekalah yang menjadi penyemangat utama Irman dalam menjalani pengabdianya nanti bagi bangsa dan negara.

Pengusaha Muda

Kembali dari Amerika Serikat dengan gelar MBA tak membuat Irman Gusman melamar menjadi karyawan. Alih-alih menjadi orang gajian, Irman memilih menjalani trahnya sebagai pengusaha meski harus merangkak dari bawah. Pemuda berusia 26 tahun itu mulai menghidupkan dan merevitalisasi industri perkayuan milik keluarga yang sedang sekarat dan terbelit utang.

Ia bekerja keras tanpa mengenal libur. Dalam setahun, Irman kemudian berhasil menyulap usaha keluarga yang telah bangkrut itu menjadi bangkit. Perusahaan kayu tersebut berhasil menjadi eksportir kayu gergajian yang menguntungkan. Hanya, kebangkitan itu tak berjalan lama. Pemerintah memberlakukan larangan ekspor kayu gergajian dan membuat bisnis kayu Irman terpukul. Dia pun nyaris menutup pabrik kayu itu sampai pada akhirnya, Irman bertemu dengan bekas dosen pembimbingnya di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Burhan Napitupulu.

Burhan lantas mengenalkan seorang ahli desain kayu asal Jerman. Irman pun tertarik dan kembali bersemangat untuk menjalankan lagi roda produksi pabrik kayunya. Usai melunasi semua utangnya, Irman kemudian mendapatkan fasilitas perbankan untuk modal. Dia kemudian membangun industri perkayuan modern di Lingku Industri Kecil (LIK)



Ulue Gadut, pinggir Kota Padang. Dalam waktu kurang dari setahun, areal seluas satu hektar tersebut ia sulap menjadi industri *woodworking* terpadu dengan orientasi ekspor. Rencana Irman berhasil. Pada awal tahun 1990-an, pabrik yang hampir tutup itu berhasil diubah menjadi salah satu industri perkayuan terbesar di Sumatra Barat dengan bendera PT. Khage Lestari Timber.

Terbaik di daerah tak lintas perusahaan milik Irman mendapat kemudahan fasilitas bisnis. Saat perusahaannya mulai berorientasi ekspor, banyak urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Irman harus bolak-balik terbang Padang-Jakarta untuk mengurus kredit bank hingga mendapat rekomendasi dan kuota ekspor. Di mata Irman, praktik ini tidak efisien. Pengusaha daerah seperti Irman pun harus mengeluarkan biaya lebih tinggi ketimbang pengusaha di Jakarta, bahkan Pulau Jawa.

Demi efisiensi dan penghematan, Irman akhirnya menyewa rumah di Jakarta. Namun, hijrahnya Irman menuai hikmah. Namanya mulai beredar di kalangan pengusaha di Jakarta. Perusahaannya pun mulai diperhitungkan dan masuk dalam direktori ISA (Indonesian Sawntimber Association). Sebagai anggota ISA, Irman aktif dalam berbagai kegiatan asosiasi. Dia pun turut dalam misi dagang ke Eropa pada tengah tahun 1992 yang dipimpin langsung menteri perdagangan.

Irman mulai melebarkan sayap ke Jakarta. Dia pun bergabung dengan Grup Fortune. Tak hanya itu, Irman mengelola dan mengembangkan bisnis bidang perminyakan bersama Pian Tanjung, teman kuliah di Amerika Serikat. Juga, Edi Kuntadi, teman yang dikenalnya saat kuliah di Jakarta pada 1980-an. Mereka membuka usaha dengan bendera PT. Prizako Prakarsa dan fokus kepada *oil equipment*. Bekerjasama dengan Pertamina, Prizako juga mulai merambah pasar spot market untuk minyak.

Irman juga mulai aktif sebagai pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Dia tercatat menjadi Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Badan Pengurus Pusat Hipmi. Di Hipmi, Irman Gusman berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti Soetrisno Bachir, Bambang Riyadi Soegama, Hariadi Soekamdani, hingga Chairul Tanjung.

Pergaulan Irman tak sebatas lokal. Dia pun menjalin persahabatan dengan sesama pengusaha kayu asal Malaysia, Abdul Razak. Irman berkenalan dengan Razak saat mereka ikut dalam delegasi ASEAN Trade Tim-

ber Mission ke beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Belanda, Belgia, hingga Prancis.

Razak adalah Presiden Direktur Sindora Sdn Berhad, pengolah kayu milik BUMD Kerajaan Negeri Johor, Malaysia. Usai perjalanan ke Eropa, mereka pun saling bekerjasama. Abdul Razak mengunjungi Sumatera Barat bersama Chairman Johor Corporation Datuk Ali Haji Hasyim. Johor Cooperation (JC) akhirnya berinvestasi di tanah kelahiran Irman.

Sebulan kemudian, Irman berkunjung ke Johor. Irman melihat Negeri Johor sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Malaysia, yakni 8 hingga 11,5 persen setahun. Penggerak utamanya adalah JC. Bisnis perusahaan ini sungguh luas. JC bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri, pelabuhan, perkebunan kelapa sawit dan pengolahan, properti, pariwisata, hingga rumah sakit.

Irman pun kembali mengajak JC untuk bekerjasama membangun kawasan industri di Padang. Melihat pengalaman Johor, keberadaan kawasan industri sangat efektif untuk menarik investasi dari luar negeri dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kerja sama pun terjalin. Mereka mendirikan PT. Padang Industrial Park (PIP) pada Agustus 1994. Perusahaan patungan antara PT. Andalas Rekasindo Pratama (Sumatra Barat) dengan JSED Techonopark (anak perusahaan Johor Cooperation). Andalas merupakan perusahaan gabungan antara kelompok Irman Gusman dengan Pemprov Sumbar. Dengan kerja sama ini, kawasan industri padang resmi berdiri. Tak kurang, Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Ir. Hartarto meletakkan batu pertama kawasan tersebut.

Dari sini, Sumbar mulai mendunia. Pemerintah pusat pun mulai melibatkan provinsi ini ke dalam kerja sama regional. Sumbar terlibat dalam kerja sama segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.

Masuk Gelanggang Politik

“Kita memerlukan tokoh-tokoh yang berbobot untuk duduk di MPR, dan Pak Irman sangat pantas untuk itu.” Ungkapan itu meluncur begitu saja

dari mulut seorang perwira. Di sebuah restoran seafood di Padang. Kolonel Syahrial mendorong pengusaha kayu sukses asal Padang, Irman Gusman, agar ikut maju meramaikan pemilu. Ketika itu, September 1999, pemilu pertama pascareformasi di DPRD Sumbar bakal diselenggarakan sepuluh hari lagi. Syahrial pun mengungkapkan, sebenarnya Irman bisa menjadi utusan dari Fraksi TNI/Polri. Syaratnya, dia dapat melobi jenderal-jenderal di Mabes. “Kalau kami di daerah tinggal melaksanakan,” ujarnya.

Irman tertarik dengan saran dari Kolonel Syahrial. Terlebih, MPR hasil reformasi akan menentukan presiden dan wakil presiden baru. Tak hanya itu, MPR baru ini akan mereformasi sistem ketatanegaraan negara. Hanya, Irman memutuskan untuk melobi kenalannya di partai politik. Di antaranya, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Arwan Kasri yang juga Ketua DPRD Sumatra Barat, dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan Sumbar, Darmadi. Mereka berjanji membantu. Sayangnya, Irman tak bisa dicalonkan langsung karena bukan kader. Hingga dia bertemu dengan Menteri Koperasi Adi Sasono.

Adi yang juga aktivis ICMI tersebut kemudian bertanya sedang ada agenda apa di Padang. Kemudian, Irman mengungkapkan rencananya untuk maju dalam pemilihan anggota MPR Utusan Daerah dari Sumatra



Barat. Hanya, Irman ketika itu kurang bersemangat. Dia pun mengeluhkan persoalannya kepada Adi jika parpol yang sudah dia hubungi ternyata tidak bisa mencalonkannya karena harus memajukan kader sendiri. “Ada peluang di TNI/Polri, saya sudah bertemu pimpinannya tapi kan mereka tergantung komando,” ujarnya.

Ketika itu, suara Syahganda Nainggolan, anak muda aktivis CIDES terdengar renyah saat menyela pembicaraan. “Mas, itu kan ada Pangdam Bukit Barisan, katanya adik Mas Adi juga,” ujarnya. Nama yang dimaksud Syahganda adalah Mayjen Abdul Rahman Gofar. Pria yang baru ditemuinya di Medan. Syahganda pun langsung memberikan nomor telepon jendral itu kepada Adi Sasono.

Adi lantas menelepon nomor yang diberikan. “Begini Pangdam, ini ada sahabat saya, Irman Gusman. Dia mau mencalonkan diri jadi anggota MPR Utusan Daerah dari Sumatra Barat. Jadi, tolong diatur agar dicalonkan Fraksi TNI/Polri dari sana,” ujarnya. Usai menutup pembicaraan, Adi kemudian berkata kepada Irman. “Beres Irman. Tunggu sajalah, pasti dia kerjakan,” ungkap Adi.

Keesokan paginya, Irman mendapat telepon dari Kolonel Syahril. Dia menyampaikan undangan dari Danrem 032/Wirabaja Sumatra Barat untuk makan malam di Padang sambil bersilaturahmi bersama anggota Fraksi TNI/Polri di DPRD Sumatra Barat. Pertemuan itu diadakan di Restoran Nelayan, tepat di pinggir pantai. Pertemuan itu pun mengungkap adanya perintah dari Pangdam Barisan agar Irman maju sebagai calon utusan daerah dari Fraksi TNI/Polri. Danrem dan jajarannya diwajibkan untuk menyukseskan langkah Irman tersebut.

Pada zaman itu, lima anggota MPR Utusan Daerah dari setiap provinsi dipilih oleh DPRD Provinsi. Setiap calon diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Atas titah sang Pangdam Bukit Barisan yang ‘diperintah’ Adi Sasono, Irman diusulkan oleh Fraksi TNI/Polri DPRD Sumatra Barat yang notabene hanya memiliki enam dari 45 kursi di DPRD. Irman yang ketika itu baru berusia 37 tahun terpilih dengan suara terbanyak atau 31 suara. Irman maju dengan mengalahkan banyak nama politisi hebat di DPRD Sumbar ke MPR sebagai utusan daerah.

Memperjuangkan Daerah

Masuk sebagai wakil dari utusan daerah, Irman Gusman harus mengalami ujian pada sidang pertama. Ketika itu, MPR justru memutuskan untuk menghapus keberadaan Fraksi Utusan Daerah.

Irman dan sejumlah tokoh daerah seperti Jusuf Kalla dan Aksa Mahmud, juga Djojo Sutisno berusaha meyakinkan sidang paripurna untuk mempertahankan keberadaan fraksi ini. Buatnya, menghapuskan FUD berarti melanggar konstitusi. Pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 dengan jelas menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Hanya, karena kenyataannya banyak anggota fraksi yang juga merupakan kader dari partai politik di daerah, maka mayoritas setuju FUD dihapuskan. Ketetapan MPR lantas disahkan lewat palu Amien Rais.

Sebanyak 125 anggota FUD, termasuk Irman, harus memilih apakah bergabung kepada fraksi partai politik, Fraksi Utusan Golongan atau Fraksi TNI/Polri. Kebingungan melanda Irman. Pasalnya, meski dicalonkan oleh Fraksi TNI/Polri di DPRD Sumbar, Irman tak mungkin bergabung dengan fraksi tersebut karena bukan anggota aktif. Akhirnya, dia memilih masuk ke Fraksi Utusan Golongan.

Meski berada dalam Fraksi Utusan Golongan, Irman tetap konsisten memperjuangkan keberadaan Fraksi Utusan Daerah. Irman lantas menggalang dukungan membentuk Forum Utusan Daerah. Nama-nama seperti Jusuf Kalla (Sulawesi Selatan), Oesman Sapta (Kalimantan Barat), dan Hatta Mustafa (Sumatra Selatan) ada dalam forum ini.

Jalan untuk mengembalikan FUD tidaklah mudah. Irman dan kawan-kawan butuh waktu dua tahun untuk membuka kembali tabir gelap penghapusan fraksi tersebut. Irman dan anggota forum lainnya pun bekerja keras untuk melobi dan meyakinkan banyak pihak. Mereka berkeliling ke pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi, hingga Badan Pekerja MPR untuk meyakinkan perlunya FUD. Alhasil, pada sidang tahunan 2001, MPR kembali mengakui keberadaan FUD dengan mengubah ketentuan dalam tata tertib majelis. Irman pun didaulat untuk duduk sebagai Wakil Ketua FUD MPR periode 2001-2004.

Saat duduk sebagai wakil ketua fraksi dimanfaatkan Irman untuk terus memperjuangkan daerah. Tak terkecuali untuk memunculkan institusi baru di tengah semangat amandemen UUD 1945. Institusi tersebut, sekarang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Daerah. Dengan keberadaan DPD sebagai institusi independen, maka DPD mencatatkan diri sebagai institusi pertama yang sejajar dengan DPR di Senayan.

Buat Irman, terbentuknya DPD berarti mengembalikan organisasi tata negara bangsa ini ke bentuknya semula. Gagasan adanya DPD sudah di-kemukakan oleh Mohammad Yamin pada rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia menggagas pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen. Ide ini akhirnya terealisasi dalam bentuk adanya utusan daerah di MPR.

Gagasan ini semakin nyata pada periode konstitusi selanjutnya, UUD Republik Indonesia Serikat. Ide tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat RIS yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS. Hanya, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ide ini kembali mentah karena konstituante kemudian dibubarkan. Konstitusi kemudian dikembalikan kepada UUD 1945.

Praktik penguatan pemerintah pusat (sentralisasi) yang terjadi pada era Orde Baru menjadi evaluasi bagi konstitusi pascareformasi. Pada masa amandemen UUD '45 di bawah komando Amien Rais, berkembang ide perlunya perwakilan daerah yang terlembagakan di tingkat nasional. Ini untuk menjaga keseimbangan antar-daerah dan antar-pusat dengan daerah secara adil.

Anggota DPD pertamakali dipilih pada Pemilu 2004. Dengan rekam jejaknya selama menjadi anggota MPR Irman Gusman berhasil menarik simpati warga Sumatra Barat. Dia pun maju kembali ke Senayan dengan 'bekal' yang lebih baik. Irman menjadi wakil daerah dengan perolehan suara terbesar di Sumbar. Tak hanya itu, Irman dicalonkan oleh anggota DPD se-Sumatera, lewat deklarasi Batam, untuk maju sebagai calon tunggal pada pemilihan Ketua DPD.

Untuk maju sebagai Ketua DPD, Irman dihadapkan dengan tokoh nasional seperti Ginanjar Kartasasmita dan Sarwono Kusumatmadja. Pada

putaran pertama, Irman masuk ke dalam peringkat tiga setelah Ginandjar. Sementara Mooryati Soedibyo dan Aksa Mahmud mengundurkan diri karena lebih memilih mencalonkan diri sebagai wakil pimpinan MPR. Menjelang putaran kedua, La Ode Ida, anggota DPD peraih suara terbanyak asal Sulawesi Tenggara mengambil *microfon* sambil memegang kertas di tangan kiri. “La Ode Ida mau bicara sekarang. Saya akan membacakan pernyataan saya,” katanya sambil melangkah ke podium di samping meja pimpinan sidang.

La Ode Ida mengucapkan terima kasih kepada anggota DPD yang mendukungnya sebagai ketua. Namun, dia memutuskan untuk mundur dengan alasan suara yang tak memadai untuk terus maju dalam pemilihan. Demi misi perubahan, kata La Ode, dia menyampaikan imbauan moral kepada para pendukungnya untuk memberikan dukungan kepada Irman Gusman dalam pemilihan suara berikutnya.

Sontak saja, tindakan itu disambut hujan interupsi. Ada yang menganggap tindakan La Ode bentuk kampanye. Lainnya menilai wajar. Alhasil, sidang pun diskors hingga pukul 19.00 WIB. Pimpinan sidang Mooryati Soedibyo kembali mengetukkan palu pertanda sidang dimulai. Buat Irman, melawan Ginandjar dan Sarwono sama saja David melawan Goliath. Nama-nama ini sudah dikenal Irman sejak dia masih menjadi pelajar. Mereka adalah sosok politisi senior dan teknokrat tulen yang jadi tulang punggung Orde Baru.

Pemilihan putaran kedua dilakukan. Ginandjar mendapat 59 suara, Irman 43 suara, dan Sarwono 26 suara. Belum ada calon yang mampu mendulang 50 persen. Artinya, putaran ketiga harus dijalankan. Irman kali ini harus berhadapan dengan Ginandjar. Terjadi susul-menyusul antar-tokoh senior dan pengusaha muda dari tanah Minang. Alhasil, 74 suara didapatkan oleh Ginandjar sementara Irman memperoleh 54 suara. Jadilah Ginandjar Kartasmita terpilih sebagai ketua lembaga yang baru saja dibentuk itu.

Pada Pemilu 2009, Irman Gusman kembali maju menjadi anggota DPD. Usai terpilih ke Senayan, Irman lantas kembali berkompetisi untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD RI. Irman mengulangi tradisi mendapat dukungan dari calon yang ikut berkompetisi. Kali ini, dari GKR He-

mas. Pada putaran terakhir, Irman pun berkompetisi dengan Wakil Ketua DPD lainnya, La Ode Ida. Alhasil, Irman meraih 81 suara, sedangkan La Ode 130 suara.

SBY Pun Hadir di Sidang DPD

Agenda tahunan setiap tanggal 16 Agustus menjadi konvensi hadirnya presiden di Sidang Paripurna DPR RI. Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadwal ini masih berlaku. Hanya, jika dahulu RAPBN presiden hanya didengar dan dibahas oleh DPR, maka seharusnya DPD kini ikut membahasnya.

Kepada Ketua DPR RI Agung Laksono, Irman Gusman diutus Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita membahas perihal tersebut. Irman meminta sidang gabungan. Alasannya, DPD akan ikut membahas dan memberikan pertimbangan RAPBN. Tentu ada seremoni di mana DPD harus menerima langsung secara resmi dari presiden.

Agung Laksono menolak usul itu. "Ini kan Sidang Paripurna DPR, jadi pesertanya tentu anggota DPR saja. DPD nanti kita undang untuk mendengarkan saja, bukan sebagai peserta sidang paripurna," ujar politikus Partai Golkar itu.

Mendengar penolakan Ketua DPR RI, Ginandjar Kartasasmita terlihat kecewa. Sambil melihat ke arah Irman, dia bertanya apa langkah selanjutnya. Merasa mendapat bola, Irman seketika melontarkan usul liar. "Kita adakan saja Sidang Paripurna DPD dan kita minta presiden menyampaikan pidato kenegaraan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan daerah," katanya.

Mendengar usul itu, Ginandjar awalnya ragu. Hanya, setelah diingatkan kalau DPD dan DPR adalah lembaga setara, Ginandjar pun setuju. Seketika, dia langsung menunjuk Irman sebagai Ketua Panitia Sidang Paripurna Khusus DPD untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang pembangunan daerah.

Pada awalnya, media massa nasional memberitakan negatifnya respons istana atas usul tersebut. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra memberi pernyataan kemungkinan presiden tak setuju jika harus

hadir di dua sidang paripurna sekaligus pada 16 Agustus. Penasaran dengan pernyataan Yusril, Irman menelepon Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Tangan kanan SBY itu pun menjelaskan, presiden memang membahas soal rencana DPD menggelar sidang paripurna. Kata Sudi, presiden memerintahkannya untuk membahas dengan pimpinan DPD tentang pelaksanaannya.

Besok sore, telepon genggam Irman berdering. Muncul nama Wakil Presiden Jusuf Kalla di sana. Spontan, Irman langsung menjawab panggilan itu. “Halo Bang Ucup, apa kabar nih?” ujanya. “Man, itu soal rencana DPD mengadakan rapat paripurna, presiden sampaikan ke saya, beliau setuju.” “Wah bagus sekali. Kabar gembira bang. Lalu bagaimana?” “Ya kita cari waktu sendiri saja, misalnya seminggu setelah paripurna di DPR.”

Awalnya, JK menginginkan agar sidang paripurna DPD tersebut diadakan di ruang Nusantara III. Ini mengingat jumlah anggota DPD yang hanya 128 orang. Menurutny, sayang jika terlihat sepi. Hanya, Irman *keukeuh* jika perhelatan akbar itu diselenggarakan di ruang paripurna. Dia punya trik sendiri untuk meramaikan ruangan dengan kapasitas seribu orang itu.

Irman pun mengundang seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk menghadiri pidato kenegaraan presiden tersebut. Tak hanya itu, dia mengundang Ketua DPRD Provinsi, para rektor dan tokoh adat dari semua provinsi, duta besar negara sahabat, plus semua pimpinan lembaga negara dan para menteri anggota kabinet. Dengan demikian, kekhawatiran JK akan sepi pada sidang paripurna bisa teratasi.

Selanjutnya, Irman berpikir soal pakaian. Dia berprinsip tak mau menggunakan jas dan dasi yang diistilahkan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk paripurna kali ini. Pada mulanya, mereka berencana untuk mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Akan tetapi, panitia sepakat memilih batik sebagai pakaian yang digunakan untuk mendengar pidato presiden.

Irman pun masih memikirkan sentuhan akhir untuk memeriahkan rapat paripurna pertama itu. Dia kemudian memasukkan Twilite Orchestra pimpinan Addie M. S sebagai pemberi warna khas untuk rapat yang diselenggarakan pada 23 Agustus 2005 itu. Pada awalnya, Ginandjar sempat berkeberatan karena DPD tak menyediakan sponsor.

“Ndak masalah, Pak. Kita cari sponsor,” ungkap Irman. Tanpa membuang waktu, Irman langsung menelepon Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Emir sejak lama memang sudah menjadi sahabat Irman. Dia meminta Garuda untuk mensponsori acara tersebut. Tapi, Emir menanyakan kompensasi untuk Garuda. Dengan santai, Irman menjawab seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan ketua DPRD dari seluruh Indonesia akan terbang dengan Garuda ke Jakarta untuk menghadiri sidang paripurna DPD. Itu sebagai kompensasi. Emir pun senang dengan tawaran Irman dan menyatakan setuju.

Ketika Selasa, tanggal 23 Agustus 2005 datang, ruang paripurna DPR RI beda dari biasanya. Sidang paripurna tersebut sungguh meriah, berbeda dengan sidang paripurna yang biasa diselenggarakan oleh DPR. Selama empat tahun berikutnya, sidang paripurna khusus DPD hasil ide kreatif Irman Gusman tetap dijalankan.

Konvensi Partai Demokrat

Jumat, 31 Agustus 2013 di Wisma Kodel, Jakarta Selatan. Siang itu, suasana wisma lebih ramai dari biasanya. Maklum, ada momentum penting yang dijadwalkan akan diselenggarakan Panitia Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat untuk diusung pada Pemilihan Presiden 2014 nanti. Panitia pun mengeluarkan sebelas nama penting yang akan berkompetisi dalam konvensi. Mereka adalah nama-nama beken yang sering muncul di gelanggang politik nasional. Di antara sebelas nama itu, muncul seorang pejuang daerah sejak awal reformasi, Irman Gusman.

Mengapa nama Irman muncul? Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah lama menaruh hati kepada putra Minang ini. Tanpa basa-basi, SBY sempat mengungkapkan komitmennya akan membantu Irman menjadi Ketua DPD saat Irman berkunjung ke Istana untuk mengucapkan selamat atas kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2009. “Pak Irman tentunya ingin menjadi Ketua DPD. Saya akan bantu nanti dengan apa yang saya bisa,” katanya.

Hanya, SBY kemudian buru-buru menambahkan, kalau nanti tidak terpilih sebagai Ketua DPD, maka Irman diminta untuk membantunya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Hubungan Irman dengan SBY memang

terbilang mesra. SBY kerap mengajak Irman untuk mempromosikan DPD saat tugas ke luar negeri. Tak hanya itu, Irman sempat mewakili presiden atas permintaan SBY untuk menghadiri World Islamic Economic Forum (WIEF) di Kuwait pada akhir April 2008. Kepercayaan SBY kepada Irman berlanjut saat Partai Demokrat hendak mencari sosok calon presiden yang bakal didukung pada Pilpres 2014.

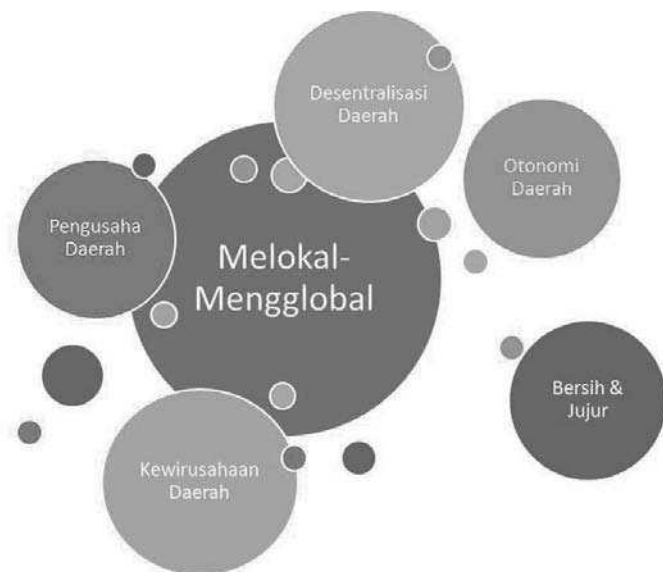
Bersama sepuluh nama lain, Irman muncul sebagai kandidat serius dalam konvensi. Meski saingannya berat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu tampak yakin akan maju sebagai pemenang. Ia mengaku optimistis karena tujuan awalnya mengikuti konvensi ini adalah menang dan menjadi presiden terpilih di periode selanjutnya. “Yakin menang, optimis, karena ingin melihat bangsa ini ada perubahan,” kata Irman di sela-sela acara pengarahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada peserta konvensi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (11/9/2013) malam, seperti dikutip *Kompas.com* (*kompas.com*, 2013).

Irman menuturkan, tak ada kandidat lain yang dianggap menjadi lawan berat dalam konvensi. Pasalnya, ia menilai peluang yang dimiliki masing-masing kandidat tak ada yang berbeda. “Konvensi itu angin segar. Kami dan semua jadi punya peluang untuk maju. Tujuan saya menjadi presiden,” ujarnya.

Irman pun mulai melakukan konsolidasi menghadapi konvensi calon presiden (capres) dari Partai Demokrat. Ia juga mengaku siap menjadi kader Demokrat jika memenangkan konvensi capres Demokrat tersebut. “Menang sudah menjadi konsekuensi dari pemenang konvensi untuk menjadi kader Demokrat sebab pemenang konvensi berarti siap membawa *platform* Demokrat,” kata Irman seperti dikutip dari *Republika Online*. (*Republika*, 2013)

Irman juga menerangkan visi dan misinya menjadi capres. Ia ingin membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur dalam perubahan yang berkesinambungan. Mandiri secara ekonomi, kata Irman, berarti mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Antara lain, mengurangi impor pangan dengan meningkatkan hasil pertanian, membangun industri di dalam negeri, dan mengolah energi di dalam negeri.

Indonesia Bukan Hanya Jakarta!



Irman Gusman adalah pengusaha sukses yang menganggap sentralisasi kekuasaan sebagai penyebab keterbelakangan Indonesia. Ungkapan bahwa Indonesia adalah Jakarta, Jakarta adalah Indonesia, kini bagi Irman sudahlah berakhir sejak era desentralisasi dan otonomi daerah bergulir pasca Presiden Soeharto turun.

Cara pandang sentralistik tersebut hendak dilawan Irman. Politisi sekaligus pengusaha asal Sumbar ini sejak awal reformasi secara konsisten memperjuangkan upaya kesetaraan pusat dan daerah yang menurutnya adalah kunci kesejahteraan Indonesia.

Dalam pandangan Irman, kebijakan pemerintah pusat yang setralistik sering tidak menguntungkan iklim usaha di daerah. Hal tersebut menjadi paradigmanya karena pengalamannya sebagai pengusaha dari daerah merasa didiskreditkan karena berbagai hal yang bukan dari Jakarta.

Irman mengakui bahwa gagasan tentang arti penting pembangunan bervisi kerakyatan dan desentralistik itu turut dipengaruhi oleh pendidikan yang ia ikuti. Seusai lulus dari UKI, ia berangkat ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan S2 di Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut.

Dari sanalah Irman melihat langsung bagaimana kejayaan AS terbangun terutama akibat pemberdayaan dan pemerataan pembangunan masyarakat daerah. Irman belajar betapa setiap daerah memiliki otonomi untuk mengembangkan diri dalam hubungan harmonis dengan pemerintah pusat. Implikasinya, negara bagian dimungkinkan tumbuh sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing. Hal inilah yang ingin digagas oleh Irman untuk Indonesia ke depan.

Terkait dengan masih banyaknya eksekusi negatif dari bergulirnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah, Irman mengatakan bahwa “kalau sekarang ada penolakan karena dianggap gagal, saya merasa itu datang dari mereka yang kehilangan kekuasaan dan kenikmatan. Mereka merasa harus mengendalikan kekuasaan karena kekuasaan itu adalah uang. Ini soal *mindset* dan kepentingan. Otonomi baru berjalan 12 tahun. Kalau ada yang salah, diperbaiki kemudian disupervisi. Ini ibarat seperti anak yang sedang belajar. Kalau salah, harus dibimbing, diluruskan. Si anak akan terus belajar memperbaiki dirinya”.

Irman adalah seorang pengusaha kayu yang terbilang sukses, tetapi bukan merupakan orang kuat yang dekat dengan pemerintah di Jakarta. Irman memiliki pengalaman kuota dalam bisnis yang tidak enak karena sistem sentralisasi yang dikuasai segelintir orang-orang tamak di Jakarta. Ia mengatakan bahwa, “saya belajar bahwa yang menentukan itu bukan kapasitas produksi yang kita miliki. Akibatnya ada orang yang bisa produksi tapi tidak bisa mengeskpor. Sementara ada yang tidak bisa produksi tapi punya kuota besar. Jadi kuota inilah yang diperdagangkan. Semakin dia bisa ‘bermain’ di atas, semakin besar kuota yang di dapat”. Hal tersebut tidaklah adil bagi pengusaha daerah seperti Irman. Oleh sebab itu, Irman pun ingin melakukan pembaharuan yang signifikan agar lebih adil.

Selain iklim yang adil dalam persaingan antarusaha di pusat dan daerah, Irman mencotohkan perlu ada kebijakan dari pemerintah yang bisa memajukan daerah. Gagasan ini adalah sebuah pelajaran yang bisa diambil dari contoh Amerika Serikat. Menurut Irman, pemerintah pusat tidak boleh hanya mengundang undang-undang yang hanya cenderung bersifat nasional. Pemerintah perlu melihat per sektor, bukan per wilayah. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Irman mengambil contoh di AS. Di sana ada kebijakan nasional dan kebijakan regional. AS melakukan pemetaan potensi masing-masing daerah yang kemudian dijadikan dasar bagi kebijakan regional. Apabila ada daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam, mereka diberi kebijakan usaha tertentu.

“Ambil contoh negara bagian Nevada. Itu daerah yang sebenarnya tertinggal karena hanya ada gurun pasir. Mereka diberi insentif untuk tumbuh dengan mendirikan *entertainment complex*, tempat perjudian. contoh lain adalah Delaware yang ada di antara Washington dan New York. Karena keringanan pajaknya, daerah itu menjadi tempat yang nyaman untuk mendirikan *headquarter* perusahaan-perusahaan terbesar Amerika. Jadi, kebijakan negara bagian itu berbeda-beda”, imbuh Irman.

Menurut Irman, hal tersebut dapat dilakukan dengan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam otonomi daerah yang dikaitkan antara pusat itu hanya terdapat kewenangan, yaitu luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum, moneter, dan agama. Untuk urusan yang lain menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Jadi semangatnya adalah memberi ruang bagi daerah untuk membangun, walau tentu disesuaikan kondisi masing-masing”.

Kebijakan daerah dan regional tersebut haruslah selaras dengan kebijakan nasional. Akan tetapi, pada dasarnya kebijakan nasional adalah akumulasi dari seluruh kebijakan dari seluruh kebijakan regional, baik pada provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini yang akan membentuk karakter masing-masing daerah.

Melokal Sekaligus Mengglobal

Irman Gusman menegaskan bahwa pada 2014 ini, Indonesia butuh seorang pemimpin yang mempunyai visi global, tetapi tetap bisa meramunya dengan kondisi lokal. Pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki komitmen dalam hal kesejahteraan ekonomi, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pasar bebas di depan mata. Tetapi, yang diperlukan bukanlah yang hanya mengerti ekonomi semata. Pemimpin Indonesia kedepan saat ini haruslah pemimpin yang dapat menjaga keindonesiaan, kebangsaan,

dan pluralisme kita. Apapun suku bangsa, asal daerah, kelas, agamanya, warga Indonesia harus merasa *at home* di negaranya. Apabila perasaan tersebut sudah muncul, kreativitas di berbagai bidang akan muncul dengan sendirinya.

Untuk membuat semua merasa *at home*, tentunya harus diperhatikan betul apa yang membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Apakah karena kurang diperhatikan, apakah karena kurang mendapat kesempatan, atau karena disingkirkan? Apabila lingkungannya sudah terbentuk, maka yang lainnya tinggal berjalan.

Pemimpin Indonesia harus mempelajari kebijakan apa yang bisa menyebabkan pengusaha papan atas tetap kuat, tetapi sekaligus bagaimana kekuatan itu juga menyebarkan dan lapisan menengah ke bawahnya juga ikut menguat. Menurutny, “kita tidak anti pengusaha besar, yang kita tidak mau kekayaan itu hanya menumpuk di segelintir orang sementara masih banyak yang belum beuntung”.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Sejarah hidup Irman Gusman adalah sejarah hidup seorang pejuang yang keras menggapai asa yang diinginkannya. Sejak awal kehidupan berusaha menjadi pengusaha sukses. Sepulang dari Amerika Serikat, Irman muda tidak memilih menjadi karyawan dengan gaji yang tinggi, tetapi memilih berwirausaha. Darah Minang yang khas di bidang wirausaha dimanfaatkan Irman dalam menggapai mimpi hidupnya membangun Sumbar yang sejahtera. Terbukti berhasil, ia dipercaya sebagai perwakilan daerah oleh kalangan militer.

Menjadi keunikan sendiri ketika Irman yang berlatar belakang bukan militer, didukung militer dalam awal karirnya dalam politik. Terpilih dengan suara terbanyak untuk mewakili Provinsi Sumbar ke MPR adalah buktinya. Setelah sampai di MPR RI, perjalanan politik Irman sesungguhnya baru akan dimulai. Pertarungan sengit dan demokratis yang terjadi dalam pemilihan Ketua DPD RI, membawa Irman masuk semakin jauh dalam gelanggang politik nasional, semakin dekat dengan Presiden SBY selaku presiden.

Irman dipercaya banyak orang, sosok pengusaha sukses dari Sumbar ini

terkenal karena keuletan, jiwa pantang menyerah, dan kreativitas memikat orang lain dengan kebijakan-kebijakan dan program DPD RI yang kreatif di saat lembaga baru ini masih dihantui pembubaran karena dianggap tidak efektif, padahal UUD 1945 menghendaki adanya DPD. Kini, Irman Gusman, seorang dari daerah yang sangat berpeluang mendapatkan kembali hati masyarakat daerah di 33 provinsi ini maju sebagai calon presiden dari konvensi Partai Demokrat.

Dari sisi modalitas personal, Irman adalah seorang yang jujur, cerdas, dan disukai banyak kalangan, baik di elit pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini terbukti membawanya masuk dalam gelanggang politik nasional. Aktif sebagai pengusaha dan pengurus Hipmi adalah kekuatan Irman dalam mendulang dukungan dari lokus penting masyarakat ekonomi.

Dari sisi modalitas sumber daya material, Irman sudah mencukupi dan ditambah dengan dukungan yang baik dari kolega-koleganya yang terpercaya, maka masalah uang yang dibutuhkan untuk pencalonan dapat diatasi. Sumber daya massa yang dimiliki Irman adalah dukungan daerah. Hal ini beririsan dengan sisi modalitas jejaring yang dimiliki karena utusan-utusan daerah yang mendukung Irman tentu akan merasa terwakili dengan majunya Irman sebagai seorang yang afirmatif terhadap isu-isu keaderahan yang mereka butuhkan di pusat pemerintahan Jakarta.

Jika dianalisis, maka akan terlihat beberapa hal yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Irman Gusman. *Pertama*, sebagai Ketua DPD RI, ia memiliki peluang untuk membangun jejaring di 33 provinsi di Indonesia. *Kedua*, saat ini Irman menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat. Jika ia bisa memenangkan konvensi tersebut, maka peluang untuk menjadi capres sangat besar.

Ketiga, Irman memiliki pengalaman cukup lama di pemerintahan. Bahkan ia juga salah satu tokoh penggagas DPD RI, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Irman pernah diangkat sebagai keluarga kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Tentu dengan rekam jejak seperti itu, Irman cukup berpeluang untuk tampil sebagai capres di Pilpres 2014 mendatang.

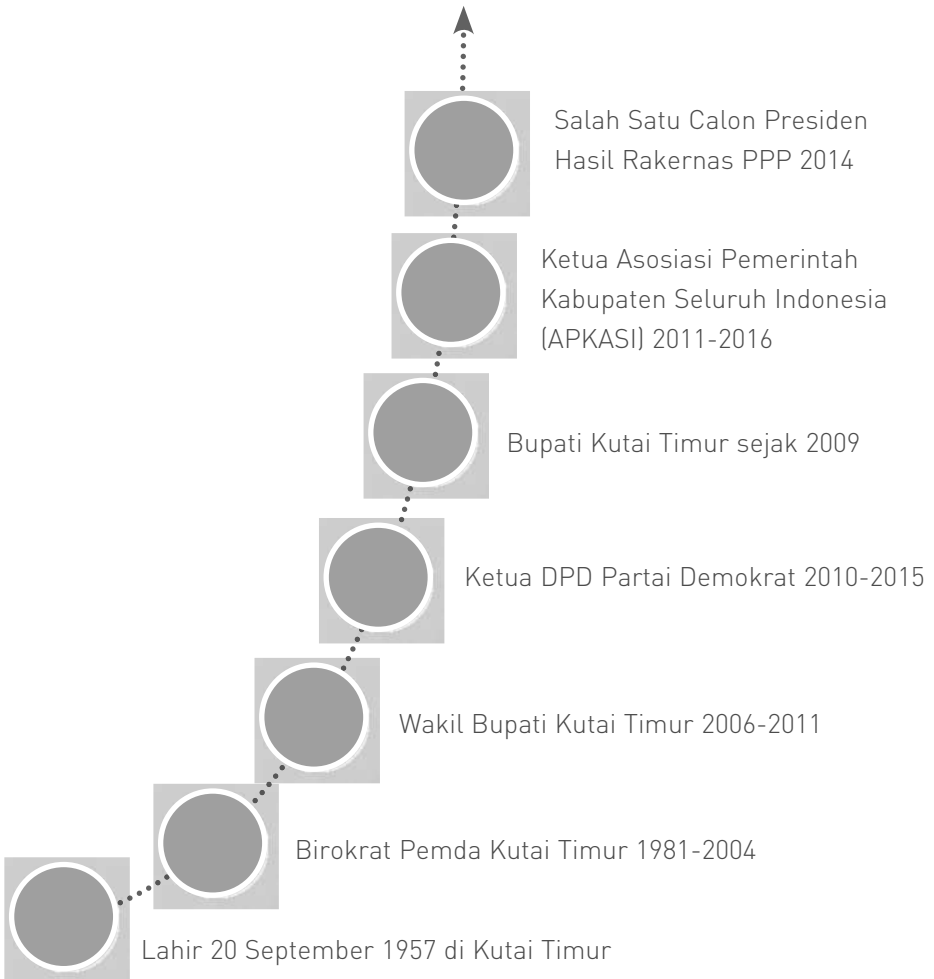
Namun demikian, kelemahan Irman tentu ihwal elektabilitasnya yang masih relatif moderat. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute

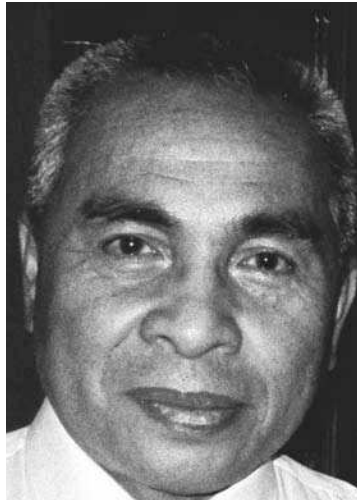
periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Irman masih di urutan ke-4 di antara peserta konvensi lainnya. Lebih dari itu, dalam survei *opinion makers* dan pakar yang digelar oleh Pol-Tracking Institute Oktober 2012 lalu, posisi Irman Gusman hanya mampu bertengger di peringkat 24 di antara 35 figur muda yang terseleksi.

Dari 13 aspek yang diteliti, aspek yang paling menonjol dalam diri Irman adalah aspek *physical appearance* dengan skor hanya 60. 0. Sementara nilai terendah pada aspek akseptabilitas partai dengan skor 50. 2. Selain itu, tantangan lain Irman tentu terkait dengan masih mendapat publisitas yang rendah di media. Problem inilah yang kemudian bisa berdampak pada elektabilitasnya yang merangkak lambat. Itulah tantangan yang harus segera dijawab dan diselesaikan Irman.

ISRAN NOOR

Pemimpin Potensial





kalutnews.wordpress.com

Namanya melambung setelah berani menutup tiga perusahaan asing yakni Churcil Mining, Planet Mining, dan Miang Besar Coal Terminal karena terbukti menyalahi izin operasi di Kutai Timur. Malah perusahaan tambang Inggris, Churcil Mining dan Planet Mining melawannya di Arbitrase Internasional dengan tuntutan awal US\$ 2 Milyar. Ia meniti karir panjang sebagai birokrat, sebelum akhirnya duduk sebagai Wakil Bupati dan Bupati Kutai Timur. Isran Noor lahir di Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur pada 20 September 1957. Kelahirannya bertepatan dengan Hari Isra' Mi'raj, Hari Raya Umat Islam untuk memperingati malam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Oleh karenanya, Isran kecil sering dipanggil Isra' (isrannoor.com, 2013)

Keluarga Isran dikenal sebagai Muslim yang taat dan sangat memperhatikan masalah pendidikan. Ayahnya, Siul Bakrie banyak mengajarkan nilai-nilai keagamaan, sementara ibunya, Hadijah, masih memiliki darah bangsawan Kutai. Dengan latarbelakang keluarga seperti itu, Isran dan kesepuluh saudaranya tumbuh menjadi anak-anak yang religius dan berwawasan luas.

Didikan keluarga yang konsisten ini membuat Isran kecil menonjol dalam kemampuan membaca Al-Quran. Pada suatu ketika, Isran menyimak

bacaan Alquran gurunya di sekolah, merasa bacaan sang guru tidak tepat, Isran pun mengoreksinya. Sang guru pun menangis karena malu. Namun, setelah itu, Isran menjadi sahabat sekaligus anak kesayangan Ibu Guru (Suharsono, 2013). Berkat kepiawaian Isran membaca Al-Qur'an, ia sempat meraih predikat sebagai qari terbaik ketika mengikuti Mutsabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) di Sangkuriliang.

Kemampuan Isran membaca Al-Qur'an ini banyak membantunya dalam menguasai bahasa Arab maupun menginspirasi dirinya mempelajari bahasa-bahasa asing lainnya seperti Perancis, Inggris, dan Jerman, karena kondisi ini juga didukung oleh banyaknya awak kapal-kapal perusahaan asing yang menetap di Sangkulirang.

Teman-teman Isran mengenal dirinya sebagai sosok pekerja keras dan cerdas dalam menyikapi hidup keluarganya yang serba kekurangan. Pekerja keras karena ia turut membantu nafkah keluarga dengan menggembalakan kambing dan memotong padi. Sementara, kecerdasannya lahir karena hobinya membaca, sehingga diberi julukan "Isran si Komik". Gelar ini berawal dari hobinya membaca komik. Namun, setelah komik, ternyata hobinya ini berlanjut ke semua buku bacaan lainnya (isrannor-otoda.com, 2013).

Isran juga sosok yang mandiri dan ini terbukti saat ia duduk di bangku SMA I Samarinda. Ketika tinggal di Asrama Sangkulirang, ia rutin mendapat bekal dan beras yang dikirim dari orang tuanya. Hanya, pada satu ketika, kemarau panjang melanda. Gagal panen terjadi di seluruh Kalimantan. Isran akhirnya berpikir keras. Dia pun akhirnya memasak bubur dicampur dengan kangkung liar yang tumbuh di sekitar asrama. Dengan demikian, beras pun bisa lebih dihemat. Di waktu yang berbeda, untuk mengusir rasa laparnya, Isran pernah menyantap tiga ikat ubi talas yang sudah mengering di tempat sampah (Suharsono, 2013).

Kisah hidupnya ini menginspirasi dirinya untuk lebih sukses lagi dalam menjalani studi di universitas maupun berkarir di birokrasi. Setelah lulus sekolah pada tahun 1976. Ia kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Kemudian lulus dan tercatat sebagai sarjana lulusan terbaik. Kegemilangannya studinya ini, diikuti dengan aktivitasnya di organisasi. Isran terpilih menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian Unmul pada 1978-1979. Dan ia sempat di-

percaya oleh rekan-rekannya sebagai anggota pengurus Badan Koordinasi Kemahasiswaan Unmul 1979-1980.

Lepas sarjana, Isran lalu melanjutkan kuliah S-2. Isran mengambil studi komunikasi pembangunan di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya dan lulus pada 2003. Pilihan-pilihan pendidikannya ini merupakan respon dirinya terhadap kebutuhan dan kondisi Kutai Timur (Lugina, 2013). Sesuai jurusannya saat kuliah, Isran Noor memilih karier sebagai penyuluh pertanian provinsi (PPS) 1981-1995. Setelah itu, dia pun diangkat sebagai Kepala Bidang Usaha Pertanian 1996-2000. Karena kinerja yang baik, karier Isran terus meningkat. Hingga, dia menjabat sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur pada 2001-Juli 2004. Namun, karirnya yang gemilang ini tak bertahan lama, karena banyak pihak yang tidak begitu nyaman dengan capaian yang selama ini ia raih. Isran akhirnya harus menerima dinonaktifkan dan hanya menerima gaji sebagai PNS.

Jejak Sang Bupati

Saat menganggur ini, Isran Noor menerima tawaran dari Awang Faroek Ishak untuk menjadi pasangannya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kutai Timur, 12 Desember 2005. Paket Awang Faroek dan Isran ternyata disambut publik Kaltim. Singkat cerita, Isran Noor menjadi kepala daerah mendampingi Awang Faroek untuk periode 2006-2011.

Belum genap lima tahun menjabat, tepatnya tahun kedua masa jabatannya, Awang Faroek kembali bertarung untuk memperebutkan posisi Gubernur Kalimantan Timur. Awang Faroek menang dan Isran Noor diangkat menjadi bupati didampingi oleh Ardiansyah sebagai Wakil Bupati. Belum lama ia mengisi jabatan sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Timur, Isran Noor membuat keputusan mengejutkan dengan memperkarakan divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepunyaan Keluarga Bakrie di Arbitrase International karena melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada Pilkada Kutai Timur untuk masa jabatan 2011-2016, Isran Noor kembali maju sebagai Bupati berpasangan dengan Ardiansyah dan berhasil meraih dukungan publik dengan presentase dukungan mencapai 51.10%. Terpilihnya Isran sebagai Bupati semakin memudahkan dirinya untuk me-

nuntaskan visinya untuk Kutai Timur, yakni “Pembangunan daerah yang bertumpu pada pembangunan berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Kalimantan Timur.”(www. kutaitimurkab. go.id, 2012).

Visi ini menarik, karena lebih fokus pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Padahal di sisi yang lain kekayaan bahan tambang Kabupaten Kutai Timur begitu besar. Artinya, orientasi pembangunan lebih menitikberatkan bagaimana penduduk Kutai Timur lebih berkualitas, sehingga kekayaan tambang yang dimiliki bisa diberi nilai tambah dan pada tahapan berikutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implemetasi visi ini secara langsung dapat terlihat dari kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur utamanya di bidang pendidikan. Di mana sekolah gratis dari SD-SMA dan para guru diberi tunjangan adil sesuai dengan zona keterjangkauan (www. leadership-park.



com, 2010). Sementara, untuk mewujudkan Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, pemerintah daerah fokus kepada kelapa sawit dan memberi insentif yang sama untuk bagi penyuluh pertanian.

Dalam kalkulasi Isran, setiap 1 hektar lahan kelapa sawit dapat menyerap satu tenaga kerja langsung. Artinya, satu keluarga kecil telah terbebas dari kemiskinan. Dengan cepat, Isran justru memperluas lahan sawit dari hanya 14 ribu hektar pada tahun 2000, menjadi 185 ribu hektar pada 2008. Hanya, menanam kelapa sawit tak mudah, karena dirinya harus membuka lahan hutan. Padahal, Kalimantan diandalkan pemerintah menjadi bagian dari paru-paru dunia. Kalimantan masuk dalam proyek untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020.

Pada bagian lain, layaknya daerah lain di Kalimantan, Kutim pun memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Kabupaten ini menyimpan potensi bahan tambang batu bara mencapai 5,35 miliar ton. Sekitar 1,95 miliar ton. Di samping tambang, terdapat potensi perikanan, pertanian dan perkebunan yang membuat kabupaten ini masuk dalam jajaran kabupaten terkaya di Indonesia.

Sang Visionaris

Selain untuk Kutai Timur, visi Isran ini juga mulai menyentuh kabupaten-kabupaten lainnya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pada organisasi yang dibentuk sejak tahun 2000, Isran akhirnya dipercaya sebagai Ketua APKASI periode 2011-2014. Isran fokus memperjuangkan kepentingan daerah salah satunya dengan terbitnya PP No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. PP hasil revisi PP sebelumnya itu membantu para kepala daerah dari jeratan hukum terkait penyusunan anggaran di daerah (Majalah Otonom, 2013).

Pada bidang yang lain, inisiatif Isran membeli kapal patroli untuk kemudian diserahkan kepada TNI AL sebagai armada patroli di perairan Kutai Timur dan sekitarnya ini menjadi menarik, karena untuk pertama kalinya sebuah pemerintah daerah melakukannya. Belum lagi, kesediaan Isran menjadikan daerah Sekerat, Kutai Timur sebagai lokasi latihan gabungan

TNI. Selain fokus dengan daerah, Isran percaya, masa depan Indonesia ada di laut (Maritim). Oleh karenanya, sejarah kedigdayaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit di bidang maritim perlu dilanjutkan.

Bagi Isran, langkah ini harus segera dimulai dengan menggeser Singapura, dan menjadikan Indonesia pusat transportasi dan perdagangan laut dengan membuat pelabuhan di Indonesia jauh lebih sibuk daripada Singapura (Suharsono, 2013).

Mendunia Karena Gugatan Churchill Mining

Isran Noor mencatat sejarah sebagai kepala daerah yang pernah digugat oleh perusahaan asal Inggris. Churchill Mining Plc menggugatnya, satu paket dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam lewat badan arbitrase internasional di Washington DC, Amerika Serikat. Gugataannya tidak main-main. Nilainya mencapai Rp 19 triliun.

Awalnya, Churchill masuk ke Indonesia melalui PT. Indonesia Coal Development (ICD), di mana perusahaan itu memiliki 95 persen saham, sementara lima persen saham lainnya dimiliki oleh Planet Maining Plc, sebuah perusahaan dari Australia. ICD sendiri didirikan sebagai perusahaan pemilik modal asing (PMA) pada 2005.

Churchill membeli saham PT ICD yang disangkanya bergerak di sektor pertambangan, padahal PT ICD bergerak di sektor jasa kontraktor pertambangan (*mining service*) sebagaimana yang diijinkan oleh BKPM pada izin yang dimiliki oleh PT ICD. Di Kalimantan, Churchill memiliki 75 persen saham Grup Ridlatama.

Pada masa pemerintahannya, Isran Noor mencabut izin usaha Kuasa Pertambangan (KP) empat perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kutai Timur, salah satunya adalah Grup Ridlatama. Empat perusahaan tersebut telah melanggar berbagai peraturan di Indonesia. Pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran pemalsuan surat yang berdasarkan surat laporan audit khusus yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II Tahun 2008, BPK mengindikasikan adanya lima Kuasa Pertambangan yang mereka temukan di lapangan adalah palsu.

Selain itu, ada pelanggaran ketentuan kehutanan dengan adanya keterangan dari Menteri Kehutanan kepada Bupati Kutai Timur, yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan ini dilakukan di atas kawasan hutan produksi. Oleh karenanya Menteri Kehutanan memberikan rekomendasi kepada Bupati Kutai Timur untuk menghentikan kegiatan di kawasan hutan produksi dan mencabut KP-KP tersebut.

Tak terima dengan tuduhan itu, 27 Agustus 2010, Grup Ridlatama menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda untuk memohon agar surat keputusan pencabutan KP dinyatakan tidak sah. Tetapi gugatan ke PTUN Samarinda itu ternyata dimenangkan oleh Bupati Kutai Timur.

PTUN Samarinda memutuskan penerbitan surat keputusan pencabutan KP milik Ridlatama Group itu tidak menyalahi hukum, begitupun dengan putusan di PTTUN dan MA dengan begitu seharusnya sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi Grup Ridlatama untuk memasalahkan pencabutan izin IUP yang dikuasainya. Merasa memiliki saham 75% di Ridlatama, pada 21 Juni 2012, Churchill Minning Plc membawa masalah ini ke arbitrase internasional. Churchill menggugat pihak RI senilai 2 miliar dolar AS (sekira Rp19 triliun), karena merasa perusahaannya ditutup secara sepihak dan tanpa ada kompensasi.

Isran Noor menyatakan optimistis pemerintah Indonesia akan menang menghadapi gugatan Churchill Mining Plc di Badan Arbitrase Internasional di Washington DC Amerika Serikat. Menurutnya, gugatan perusahaan tambang asal Inggris itu salah alamat. Dia menilai, kasus tambang Churchill di Kabupaten Kutai Timur bukan karena kesalahan pemerintah daerah, melainkan masalah bisnis antara Churchill dengan perusahaan nasional PT Ridlatama. Dia pun berkesimpulan, keliru jika Churchill menggugat Pemerintah Indonesia.

Dia menjelaskan, Churchill tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Pemkab Kutai Timur karena Pemkab hanya mencabut izin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi kelompok usaha Ridlatama Group yang mencakup PT Ridlatama Tambang Mineral, PT Investama Resources, PT Ridlatama Trade Powerindo, dan PT Investmine Nusa Persada. Churchill mengklaim memiliki 75 persen saham di empat perusahaan Ridlatama itu.

“Saya mau perlihatkan kepada investor dunia, bahwa negara kita me-

miliki peraturan. Saya tidak ada maksud untuk menghalang-halangi investasi, justru saya ingin menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, jadi menegakan ini adalah jaminan, tanpa hukum tidak ada yang mau berinvestasi di Indonesia,” ucapnya(www.jpnn.com, 2013)

Lawan Rezim UU Minerba

Keberanian Isran Noor juga teruji di Mahkamah Konstitusi. Merasakan ketidakadilan dalam pengelolaan mineral dan batu bara, Isran Noor menempuh langkah hukum terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Sejumlah pasal dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Melalui pengacaranya, Bupati Isran Noor mengajukan *judicial review* pasal 1 angka 29, angka 30, angka 31, pasal 6 ayat (1) huruf e, dan ayat (2). Ada lagi Pasal 10 huruf b dan c, pasal 11-19, termasuk penjelasan pasal 15, yang dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, Isran Noor berdalih beberapa ketentuan tersebut menghambat kepala daerah untuk mengelola kekayaan sumber daya mineral dan batubara di wilayahnya.

Robikin Emhas, pengacara Isran, menjelaskan kliennya mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan UU Minerba sesuai kewenangan yang dijamin pasal 18 ayat (1) huruf D UUD 1945. Ia memberi contoh Pasal 29 ayat (1) UU Minerba. Pasal ini merumuskan wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dan tata ruang nasional. “Pasal 1 angka 29 UU Minerba menabrak/menghilangkan batasan wilayah administrasi sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,” urai Robikin di hadapan Majelis Hakim Panel sidang Mahkamah Konstitusi. Apabila pasal-pasal itu tetap berlaku, maka pemohon tidak dapat mengurus dan mengatur penetapan wilayah pertambangan yang ada di wilayah pemohon sendiri. “Hal ini akan mempengaruhi pendapat asli daerah yang berimbas pada tidak terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dicanangkan pada APBD,” ujarnya(www.hukumonline.com, 2014)

Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi daerah untuk mengatur dan meng-

urus pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sebaliknya, berdasarkan UU Minerba penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan menetapkan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menempatkan pemerintah pusat menjadi atasan dari pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan ini sebenarnya sudah diatur tegas dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan asas otonomi daerah masing-masing.

Gugatan Isran Noor menang gemilang di Mahkamah Konstitusi (MK), setelah uji materi ini dikabulkan sebagian untuk Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Tiga pasal dalam undang undang tersebut diganti sehingga kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan wilayah pertambangan tidak lagi ada. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah membacakan amar putusan untuk gugatan pengujian UU Minerba oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dengan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.” Dalam amar putusan tersebut, pernyataan pasal 6 ayat 1 huruf e, pasal 9 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba diubah sebab bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam amar putusan, disebutkan bahwa pasal 9 ayat 2 diubah menjadi “WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Konvensi Rakyat dan Mukernas PPP

Setelah Demokrat mengumumkan secara resmi 11 nama peserta konvensi, peluang Isran untuk terlibat dalam kontestasi Capres-Cawapres di internal partai tertutup. Kondisi ini cukup mengejutkan, mengingat, sebelumnya nama Isran termasuk yang paling awal direkomendasikan. Bila ditelusuri lebih jauh, beberapa nama-nama yang muncul, justru ahistoris dengan partai



twitter.com/IsranOfficial

maupun publik selama ini. Selain tak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid, nama-nama tersebut lebih sering eksis karena kedekatan personal dengan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Majelis Tinggi Partai, yang tak lain dan tak bukan adalah Presiden Yudhoyono.

Bila di internal partai peluang Isran dan sudah tertutup, maka, di tingkatan eksternal partai, nama Isran rutin menghiasi panggung perpolitikan tanah air. Kondisi ini dapat terus berlangsung, dengan catatan ritme aktivitas Isran Noor baik sebagai Bupati Kutai Timur, Ketua APKASI dan Ketua PERHIPTANI, berjalan secara konsisten. Ketiga tanggung jawab tersebut signifikan mendongkrak popularitas hingga elektabilitas Isran, bila diikuti dengan kebijakan konkrit yang berpihak kepada rakyat maupun inovasi program yang berkontribusi meningkatkan secara langsung kesejahteraan masyarakat.

Realitas inilah yang dibaca oleh Sholahuddin Wahid atau akrab disapa

Gus Sholah, melalui gagasan Konvensi Rakyat. Dalam kegiatan ini selain Isran Noor, diundang enam putra-putri terbaik bangsa lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra, Rizal Ramli, Sofjan Sauri Siregar, Ricky Sutanto, Tony Ardie, dan Anni Iwasaki (www.konvensirakyat.com, 2014). Pada tahapan berikutnya, nama Isran Noor kembali muncul sebagai hasil rekomendasi munas PPP di Bandung tahun 2014, yang menetapkan sembilan nama sebagai calon presiden. Mereka di antaranya adalah 1) Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, 2) Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, 3) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, 4) Panglima TNI Jenderal Moeldoko, 5) Bupati Kutai Timur Isran Noor, 6) Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Yenny Wahid, 7) Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, 8) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, 9) Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Khofifah Indar Parawansa (www.kompas.com, 2014)

Bila melihat respon publik dan elit, apa yang dilakukan Isran ini mendapat apresiasi positif. Dan perlu ditindaklanjuti dengan terus meningkatkan kinerja sebagai aparatur pemerintah maupun salah satu kandidat presiden yang kini diperhitungkan di tingkat nasional. Bila ditelusuri, Isran hari ini merepresentasikan putra terbaik dari bumi Borneo yang dulu hanya dikenal melalui sosok Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden periode 2001-2004. Dan sekarang telah muncul sosok baru yang berjuang melanjutkan apa yang sudah ia lakukan.

Peluang dan Tantangan Jelang Pemilihan Presiden 2014

Dalam rilis survei *opinion makers* yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute, 7 Oktober 2012 lalu, nama Isran Noor termasuk dalam 10 figur potensial dari daerah terseleksi. Nama-nama ini hadir setelah melewati tahapan metaanalisis, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penjurian oleh 100 pembuat opini publik dan para pakar dari berbagai bidang dengan memasukkan beberapa kriteria; (a) bahwa figur muda ini berusia antara 35 tahun (sesuai syarat usia minimum pada UU Pilpres No. 42 Tahun 2008, pasal 5 huruf (o); (b) memiliki peluang politik di partai dan berpengalaman pada jabatan-jabatan strategis publik; (c) cukup terpublikasi dengan baik.



Bila standar kecukupan 60.0 dan baik bernilai 70.0 dijadikan indikator penilaian di atas, maka Isran termasuk salah satu sosok kepala daerah yang berkualitas. Hal ini dapat terlihat dari peringkat 5 yang diperoleh dan beberapa aspek yang memperoleh nilai baik, seperti, intelektualitas, keberanian mengambil keputusan, komunikasi publik, dan empati/aspiratif.

Beberapa aspek yang menonjol ini, dibuktikan dengan beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh Isran sebagai Bupati Kutai Timur. Pertama, Aspek intelektualitas dapat terlihat keberhasilan Isran menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur secara signifikan pada tahun 2012 di level 12.48%. Padahal, di tingkat nasional, pemerintah hanya berhasil meraih target 6.23%.

Kedua, keberanian mengambil keputusan, dapat tercermin dari konsistensi Isran menjalani proses arbitrase internasional untuk menguatkan putusan mencabut izin usaha pertambangan Churchill Mining Plc (Inggris) yang terbukti menyalahi peraturan daerah. Selain itu, inisiatif kandidat menggunakan dana APBD untuk pembelian KRI Kudungga dalam rangka menjaga perbatasan dari praktik (illegal fishing and logging) patut diapresiasi.

Ketiga, komunikasi publik yang dibangun cukup baik. Kandidat secara rutin membangun dan merawat komunikasi kepada elit melalui aktivitas Pemerintah Daerah Kutai Timur, APKASI, dan PERHIPTANI. Selain itu, kemampuan kandidat menyampaikan pesan secara artikulatif, mempermudah para pihak memahami kandidat. Ini belum ditambah dengan kinerja sosialisasi dan publikasi kinerja kandidat di media cetak maupun elektronik nasional.

Tabel 1.1
Uraian Penilaian Kualitas Kepemimpinan Isran Noor
(Poltracking, 5 Mei 2013)

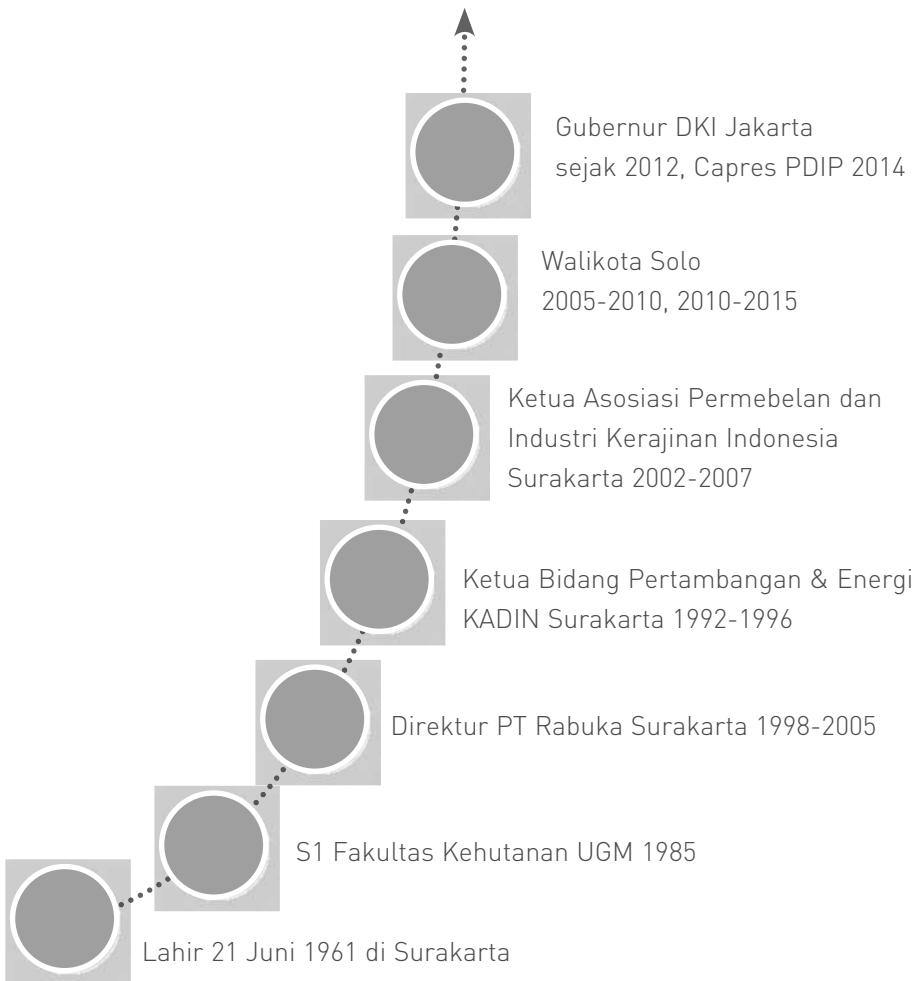
No.	Aspek Kepemimpinan	Skor	Peringkat di antara 10 Kepala Daerah
1.	Integritas	67. 66	7
2.	Intelektualitas	70. 18	7
3.	Visioner	69. 56	8
4.	Leadership skills	70. 32	4
5.	Pengalaman prestatif	69. 92	6
6.	Keberanian mengambil keputusan	73. 66	3
7.	Komunikasi Publik	70. 42	9
8.	Empati/Aspiratif	71. 9	3
9.	Akseptabilitas Publik	68. 56	4
10.	Akseptabilitas Partai	69. 18	5
	Nilai Akhir (Rerata Nilai)	70. 14	5

Figur Isran Noor sebenarnya berpotensi maju sebagai Calon Presiden (Capres). Hal ini menjadi relevan mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinannya selama ini. Mulai dari yang baik di pemerintahan daerah sebagai Bupati Kutai Timur dua periode 2008-2011 dan 2011-2016. Selain itu, berturut-turut, ia dipercaya sebagai Ketua APKASI periode 2011-2014. Ketua Dewan pembina DPP Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) periode 2012-2017 dan Ketua Umum Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (PERHIPTANI) periode 2012-2017. Artinya dari sisi jaringan nasional atau basis massa, Isran Noor memilikinya.

Meski demikian, tantangan terberat Isran Noor tentu soal elektabilitas. Keikutsertaan dalam Konvensi Rakyat dan munculnya nama Isran Noor dalam rekomendasi Mukernas PPP di Bandung kemarin, diharapkan dapat membantu.

JOKO WIDODO

Pemimpin Potensial





kumpulan2biografi.blogspot.com

Bersahabat dengan Nestapa

Joko Widodo adalah fenomena dalam jagat politik Tanah Air. Namanya kini terus meroket dalam berbagai lembaga survei, santer diberitakan media, dan bahkan menjadi pembincangan hangat di warung kopi. Meski demikian, Jokowi, begitu dia akrab disapa, awalnya bukan siapa-siapa. Kehidupan dan keluarganya jauh dari hiruk-pikuk keningratan. Ayahnya, Notomihardjo, hanya pekerja serabutan di bidang perkayuan yang penghasilan hariannya tak seberapa. Sedangkan ibunya, Sujiatmi Noto-mihardjo, ibu rumah tangga biasa yang hanya bertugas membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih dan ketulusan.

Dari keluarga miskin yang hidupnya nomaden—berpindah dari satu rumah kontrakan kecil ke kontrakan lainnya di bantaran kali di Solo—itulah Jokowi mengenyam arti dan makna kesederhanaan dan keterbatasan. 21 Juni 1961 ialah penanggalan ketika dia dilahirkan. Kehidupan orang tuanya yang miskin menjadikannya senantiasa digelayuti oleh nestapa. Jangankan mengharap untuk mendapatkan fasilitas yang serba lengkap dan mahal seyogyanya anak-anak sebaya yang kaya, masih bisa makan saja sudah menjadi anugerah tak terperi. Meski begitu, kondisi yang serba pas-pasan itu tak lantas membuat ia murung dalam menjalani hidup. Justru karena kondisi itulah naluri kreatifnya semakin terasah.

Jokowi sangat mencintai kehidupan kampung dan orang-orang di dalamnya. Hidup mereka begitu sederhana dan apa adanya. Jauh dari hiruk-pikuk hedonisme dan riak-riak kesombongan. Kehidupan dan cita-cita mereka juga sederhana: bisa makan setiap hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Sebuah asa standar orang-orang di kampung, termasuk asa bagi keluarga Jokowi.

Jokowi bertumbuh menjadi anak yang memiliki empati tinggi bukan hanya kepada sebaya, namun juga kepada orang-orang dewasa yang kurang beruntung lainnya. Naluri kemanusiaannya terasah. Hatinya terus disepuh sehingga mengkilat seperti emas. Kebahagiaannya ialah ketika ia bisa memberikan bantuan kepada orang lain, sekecil apapun. Ia sadar bahwa dirinya sendiri tidaklah lapang secara ekonomi, namun energi untuk dapat memberikan sebagian saja dari yang dipunyai, begitu besar.

Sebagai misal, Jokowi memiliki kebiasaan berbelas kasih kepada setiap pedagang keliling yang dijumpainya. Ia sering memanggil mereka sekalipun tak tahu apa yang dijualnya. Sampai suatu ketika, Jokowi memanggil tukang arang tanpa tahu apa yang dijualnya itu. Baginya, rona wajah yang berseri si pedagang arang itu setelah menerima pembayaran arang dari ibunya merupakan kebahagiaannya yang sejati. Sekalipun, setelah si tukang arang itu pergi, ibunya mengomelinya karena sebetulnya ia tidak sedang butuh arang dan uangnya pas-pasan.

Masa kecil Jokowi jauh dari kelimpahan materi namun ia tak pernah berputus asa atau bahkan menyalahkan Tuhan. Ayahnya yang sering ia sebut dengan bapak, walaupun berpendidikan rendah namun memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat kaya. Ayahnya senantiasa bekerja keras dan bertanggungjawab. Meski berprofesi sebagai tukang kayu dan bambu kecil-kecilan, namun spirit untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke level perguruan tinggi tak pernah pupus.

Jokowi kemudian tumbuh menjadi orang yang terdidik. Dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas, Jokowi menyelesaikan di kota kelahirannya, Solo, dengan hasil yang memuaskan. Baginya, sekolah merupakan kemewahan tersendiri yang tak boleh disia-siakan. Keinginannya untuk berbalas budi kepada kedua orang tua dan memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga begitu membubung. Dan Jokowi sadar bahwa

dengan bersekolah yang rajin dan konsisten merupakan “jalan pembebas” dari karut-marut kehidupan ekonomi keluarganya yang mengesankan.

Tuhan pun menjawab kerja kerasnya selama berpendidikan di sekolah menengah atas. Hasil ujian akhir dari SMA Negeri 6 Solo yang memuaskan membuatnya mampu menembus saringan masuk ke salah satu universitas dengan reputasi mentereng di Yogyakarta, Universitas Gajah Mada (UGM). Di kampus perjuangan—perjuangan hidup bagi dirinya maupun bagi masyarakat banyak dari berbagai pola kebijakan pemerintah kala itu yang merugikan—itu Jokowi mengambil Jurusan Kehutanan.

Alasannya sederhana. Sedari kecil ia sudah lekat dengan dunia per-kayuan dan bambu. Bisnis kecil-kecilan ayahnya dan beberapa saudara yang lain, bergelut dengan kayu. Lingkungan rumah kontrakannya juga berdekatan dengan pasar yang menjadi ladang transaksi kayu dan bambu. Intinya, dalam kesehariannya Jokowi bisa dengan mudahnya berjumpa dengan kayu dan bambu. Kayu seolah telah menjadi “penanda” alur hidupnya. Maksudnya, segala hal yang berkaitan dengan kayu seolah telah digariskan lekat dengan jalan hidupnya. Karena itulah, ia mantap untuk mengambil jurusan kehutanan (*Endah*, 2012).

Cinta dan Bisnis

Sisi lain kehidupan Jokowi, selain kesederhanaan dan keuletannya, yang juga menarik diulas ialah haluan musiknya. Jokowi sangat menggemari musik-musik cadas seperti Led Zepellin, Lamb of God, Metallica dan Slank. Baginya, musik merupakan instrumen untuk mengekspresikan jiwa mudanya kala itu yang haus akan pembebasan. Ia kemudian mengidentikkan dirinya dengan penampilan musisi-musisi cadas itu: berambut gondrong, memakai aksesoris sangar dan berpenampilan urakan.

Baginya, penampilan dan lirik lagu band-band idolanya itu begitu menggugah dan sesuai dengan jiwanya yang meskipun pendiam namun ekspresif, dinamis dan bertenaga bahkan sedikit ‘liar’. Jokowi merasa kalau ekspresi jiwanya benar-benar terwakili dalam musik-musik cadas.

Pengkhayatnya terhadap musik-musik cadas tak hanya cukup pada level mengagumi saja namun juga berupaya untuk menyelami dan meraih semangatnya. Ketika itu, di Solo sedang tenar-tenarnya grup band

bernama Trencem. Salah satu punggawanya ialah Setiawan Djodi, seorang pengusaha dan musikus kenamaan Tanah Air. Jokowi pun ikut larut dengan arus anak muda kala itu yang begitu menggemari musikalitas band Trencem yang terkenal keras dan menghentak.

Kegemarannya terhadap musik *rock* yang keras seolah telah memberikannya energi untuk berjuang melakukan pembebasan terhadap segala fakta sosial ekonomi keluarga, lingkungan terdekat atau masyarakat di kotanya. Naluri dan jiwa kritisnya semakin muncul dan didorong kuat-kuat oleh setiap lantunan musikalitas keras yang kerap kali ia dengarkan.

Sejak saat itulah, musik keras menjadi cita-rasa bermusik ala Jokowi yang didasari oleh filosofi pembebasan. Di dalam musik cadas itu Jokowi seolah menemukan saluran untuk menjunjung idealisme setinggi-tingginya untuk protes terhadap keadaan yang tidak adil, dan di saat ada kesempatan mengejawantahkan segala bangunan pemikirannya untuk mengabdikan kepada negara dan rakyatnya. Makanya, ketika Jokowi kini telah menjadi pemimpin—dari walikota kemudian gubernur—kegemaran terhadap musik cadas itu tak pernah hilang (*Thayrun*, 2012).

Yang menarik, sebagaimana anak muda yang lainnya, Jokowi juga pernah merasakan getaran cinta terhadap lawan jenis. Namanya Iriana, seorang Jawa tulen yang kala itu tengah berkuliah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wanita sederhana itu telah meluluhkan hati sang pecinta musik *rock* ini. Bukan hanya keanggunan Iriana yang membuat perasaan Jokowi terkulai, namun juga perangai sang pujaan hati yang dianggapnya pas untuk menemani perjuangan hidupnya. Jokowi menganggap apa yang dicari dari calon pendampingnya ada pada diri Iriana: cerdas, pengertian dan sabar. Karena itulah, Jokowi mantap untuk melanjutkan hubungannya dengan Iriana ke jenjang yang serius.

Mahligai rumah tangga bersama Iriana, ia gadang-gadangkan akan terjadi pascakelulusan kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi merasa sudah mantap untuk hidup mengayuh dayung kehidupan bersama sang belahan jiwa. Perasaan riang pun tak bisa tergambarkan. Benaknya telah disesaki oleh perasaan cinta, gembira dan imaji tentang masa depan bersama wanita yang telah menjadi separuh jiwanya itu.

Sampai akhirnya, Jokowi berhasil lulus kuliah dengan hasil memuaskan. Iapun mencoba melamar pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Jokowi

berhasil diterima di sebuah perusahaan besar berbasis di Aceh, PT. Kertas Kraft Aceh. Kondisi yang cukup membuatnya dilema. Disatu sisi, Jokowi akan segera bekerja di perusahaan besar dan mapan, namun di sisi lain ia khawatir Iriana, sang kekasih yang sudah siap dipersuntingnya, tak bersedia untuk mengikutinya ke Aceh.

Namun ternyata Iriana sosok yang begitu membuatnya kagum. Jawaban Iriana ketika ditanyakan soal kesediaan mengikuti jejak pengembaraannya ke Aceh, sungguh di luar dugaan. Iriana bersedia mengikuti Jokowi bekerja di Aceh sekalipun ditempatkan di tengah hutan belantara yang jauh dari kota. Maka, dengan hati mantap, Jokowi pun berangkat ke Aceh, tepatnya pada tahun 1985.

Setelah melewati beberapa bulan, Jokowi kemudian kembali ke Solo untuk menikahi Iriana. Kemudian kembali lagi ke Aceh sambil memboyong Iriana pada tahun 1986. Tentu saja, sekalipun sedari awal sang istri sudah mantap dan tegas untuk mengikuti jejak sang suami, melihat kondisi hidup di hutan sedikit membuatnya *shock*. Kebiasaan hidup di Solo dan Yogyakarta yang notabene mudah bertemu dengan orang, pasar, jalan bagus, kendaraan mudah dan seterusnya, bukan hal mudah dirubah dan disesuaikan. Diperlukan kemantapan hati untuk hidup di tengah hutan belantara yang dipenuhi pohon-pohon besar, binatang buas, bahkan



pasukan gerombolan atau jubah putih yang merupakan embrio Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Keadaan yang serba kontras tersebut tentu saja mengagetkan bahkan menimbulkan *culture shock*. Namun karena rasa cinta kepada sang suami, Iriana sekuat mungkin beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan baru. Pada minggu-minggu berikutnya, Iriana pun sudah semakin betah tinggal di rantau. Namun karena bukan cita-cita Jokowi jika sepanjang hayat ingin jadi karyawan. Ia bekerja sesungguhnya hanya ingin menimba pengalaman dan mengumpulkan uang buat bekal berbisnis di Solo.

Dan benar, tahun 1988 Jokowi memutuskan untuk *resign* dari perusahaan yang telah memberikannya pengalaman dan penghasilan yang lumayan. Ia kembali ke Solo sekalipun belum tahu betul akan memulai bisnis dari mana. Ilmu kehutan dan per kayuan baik dari sisi teori maupun praktik sudah didapatnya secara cukup. Namun ia masih belum paham dan belum memiliki peta akan memulai bisnisnya dari mana. Sampai akhirnya, Jokowi memutuskan untuk ikut di perusahaan pakdenya, kakak sang ibu yang bernama Miyono. Kebetulan Pakde Miyono memiliki perusahaan meubel yang terbilang besar. Jokowi pun ditempatkan di bagian produksi.

Di pabrik milik pakdenya itu, Jokowi belajar banyak hal mulai dari proses produksi, desain, marketing sampai manajemen sumber daya manusia. Pekerjaan tersebut ia kerjakan dengan sungguh-sungguh karena memang sesuai dengan *passion*-nya. Ia bangga dan bahagia mendapatkan kesempatan berharga dari pakdenya yang notabene telah banyak mengecap asam-garam dunia bisnis permeubelan.

Terhitung hanya setahun ia bekerja di perusahaan pakdenya tersebut, Jokowi kemudian memutuskan untuk keluar dan memilih membangun bisnisnya sendiri. Ketika itu, waktunya berbarengan dengan lahir putera pertamanya yang diberinama Gibran Rakabuming. Kelahiran si sulung tentu banyak menyedot keuangannya. Tabungannya menipis. Namun niatnya tak kendur untuk mulai berbisnis. Ilmu per kayuan dan bisnis permeubelannya bisa dikata sudah dikuasai dan sudah saatnya ia mempraktikkannya sendiri.

Jokowipun mendirikan CV Rakabu. Sebuah kios berukuran kecil dan sederhana di kawasan Kadipuro, Solo, disewanya untuk dijadikan tempatnya berkarya. Dengan dibantu beberapa orang karyawannya, Jokowi mulai mengerjakan order meubel dari sekitar Solo. Soal permodalan, kebetulan

ayahnya mengajukan pinjaman ke bank dan mendapatkan Rp 30 juta. Hasil pinjaman itu kemudian dibagi dua. Jokowi mendapatkan jatah pinjaman Rp 15 juta. (Endah, 2012)

Dengan keadaan yang masih serba terbatas itu, semangat Jokowi untuk maju terus menggebu. Ia tak segan untuk terlibat langsung dalam proses produksinya. Bukannya tak percaya kepada anak buah, namun baginya, selain karena alasan efisiensi untuk menggaji karyawan, memberikan contoh kepada bawahan sebaiknya dilakukan dengan kerja nyata bukan sebatas omongan. Jokowi kemudian mulai memasarkan produknya *door to door*. Dari pintu ke pintu. Jokowi tak sungkan mendatangi setiap rumah yang baru dibangun, atau sedang dalam tahap pembangunan untuk menawarkan produk permeubelan yang mungkin dibutuhkan mereka.

Ketekunan dan kerja keras Jokowi mulai menunjukkan hasil. Orderannya mulai banyak dan bahkan membuatnya kewalahan. Produksi meubelnya banyak disukai dan membuat puas para pelanggannya. Dari situ, orderan ke perusahaan meubelnya tak hanya sebatas dari tatar Solo saja namun sudah ada yang datang dari luar kota termasuk Jakarta. Bahkan Jokowi pernah mendapatkan order sebesar Rp 60 juta. Nilai order yang pada waktu itu, tahun 1990, lumayan besar.

Namun ternyata, inilah salah satu batu sandungan terberat yang pernah dialami Jokowi selama meniti karir bisnisnya. Setelah barang dikirimkan, uang pembayaran tak kunjung dilunasi. Jokowi kemudian sadar kalau dirinya telah ditipu. Produk mebel senilai Rp 60 juta pun raib begitu saja. Tak kuasa, iapun lunglai dan lemas. Kondisi perekonomiannya morat-marit. Perusahaannya yang baru seumur jagung terpaksa harus diliburkan sampai waktu tak tentu. Ia pun bekerja serabutan untuk menopang kebutuhan keluarganya. (Endah, 2012)

Tak berapa lama, titik terang mulai Tuhan perlihatkan. Ketulusan dan kerja keras Jokowi seakan dikasihani semesta. Beberapa pelanggan yang pernah memesan mebel kepadanya mulai menelpon lagi untuk order. Maka dengan semangat yang masih tersisa, ia berusaha bangkit. Ia kembali menata laju bisnisnya supaya tidak kembali terperosok ke lubang yang sama. Memang tak mudah membuang seluruh bayang-bayang kegagalan yang baru saja dialaminya. Kasus penipuan yang baru diterimanya ialah

sebuah fakta yang tak mungkin dilupakan, namun harus diambil hikmah dan pelajarannya.

Perlahan tapi pasti ia kembali bergelut dengan bisnis yang pernah membuat hidupnya sedikit enak. Berbisnis kayu memang sudah menjadi *passion-nya*, jadi menghindari bisnis tersebut dan kemudian beralih ke bisnis yang lain, seperti mengejar fatamorgana di padang pasir. Semakin dikejar semakin menjauh. Berbisnis yang bukan menjadi keahlian atau *passion* seseorang, kata orang, sama saja dengan bunuh diri atau menggali kuburnya sendiri. Barangkali petuah itulah yang diyakini betul oleh Jokowi.

Dia pun membulatkan tekad untuk melupakan kegagalan yang pernah dialaminya. Ia menerima dan mulai mengerjakan pesanan yang datang bak air bah. Mungkin itulah jawaban Tuhan terhadap makhluk-Nya yang tak pernah melupakan doa dan berbuat baik kepada sesama. Sampai akhirnya, permodalannya diperkuat oleh pinjaman dari bank yang agunannya dipinjamkan dari sebuah perusahaan besar. Modal sebesar Rp 500 juta pun akhirnya bisa diraih.

Dengan modal yang sangat besar di tahun 1991 itu membuat Jokowi bisa merealisasikan segala angan-angan bisnis permeubelannya. Ia bergerak dengan sangat cepat, bahkan berlari. Karyawan perusahaan meubelnya ditambah menjadi puluhan orang. Pabriknya diperluas, bahkan ditambah menjadi beberapa di seluruh Solo. Iapun sudah siap dengan segala instrumentasi untuk mengekspansi bisnis permeubelannya bukan hanya di Solo, tapi keluar kota bahkan menjangkau pasar internasional.

Segala informasi ihwal bisnis permeubelan ditampungnya. Jokowi kemudian mendapatkan kabar bahwa akan ada *even* di Singapura. Ia bersiap untuk mengikuti pameran berskala global tersebut. Di pameran kaliber dunia tersebut, Jokowi dan perusahaannya mendapatkan banyak relasi. Dalam bisnis, ketercukupan modal saja tentu tidaklah cukup. Terkadang, faktor relasi atau hubungan bersahabat dengan sesama pebisnis, kolega atau calon klien merupakan hal yang jauh lebih penting.

Dan terbukti, pascamengikuti pameran di Singapura, Jokowi mendapatkan order meubel satu kontainer. Pesanan yang tentu saja membelalakan mata dan sebelumnya tak pernah terbayangkan. Setelah beres melayani pesanan itu, berkah Tuhan seakan tak pernah menjauh darinya. Suatu

waktu, ia pernah didatangi oleh seorang pengusaha asal Taiwan yang kemudian memesan sejumlah komponen meubel dalam jumlah diluar dugaan. Tak cukup sampai disitu, beberapa bulan kemudian pesanan 18 kontainer datang dan harus selesai dalam 1 bulan. (Endah, 2012)

Ajaib. Kata itulah yang pantas untuk menggambarkan apa yang dialami Jokowi pasca-kebangkrutannya. Ia kehilangan Rp 60 juta namun Tuhan menggantinya dengan berpuluh bahkan beratus kali lipat. Sejak saat itu, bisnisnya terus berkembang. Pangsa pasarnya sudah menjangkau Eropa. Tahu sendiri, segala karya yang “diterbangkan” ke Eropa akan dihargai sangat tinggi. Begitu juga produk-produk meubel Jokowi.

Namun bukan Jokowi namanya kalau lantas berpuas diri dengan segala torehan individu yang digoreskannya. Ia berempati dengan teman sejawat, sesama pengusaha meubel yang menengah-kecil. Permodalan dan pengetahuan yang kurang membuat agresifitas bisnis mereka kurang bergairah. Hanya jalan di tempat. Kasarnya, cukup berpenghasilan untuk makan saja sudah bagus.

Dari situ, Jokowi kemudian menginisiasi untuk menyatukan mereka dalam sebuah wadah. Ia ingin mempersatukan dan melindungi para pengusaha dan pekerja permeubelan dari berbagai levelnya dalam satu naungan supaya mereka bisa bertukar pikiran, pengalaman, dan ilmu lainnya. Jokowi pun kemudian mendeklarasikan Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo) Komda Surakarta yang digelar pada 11 Juli 2002. Ia sendiri yang didaulat jadi ketuanya.

Mengayuh Idealisme di Jagat Politik

Setelah menjadi Ketua Asmindo, kesibukan Jokowi semakin bertambah. Ia tak hanya sibuk mengurus bisnisnya sendiri namun juga sibuk mengurus anggota-anggota Asmindo yang notabene terdiri dari ratusan pengusaha meubel dan kerajinan lainnya. Waktunya banyak tersita di luar rumah. Beruntung Jokowi memiliki istri dan anak-anak yang mengerti kesibukannya sehingga mereka tak ikut menyumbang keluh-kesahnya karena sering ditinggal suami dan ayahnya.

Sampai akhirnya godaan dari ranah politik mulai menyapa. Awalnya ia menanggapi dingin desas-desus beberapa anggota Asmindo yang men-



calonkannya menjadi Walikota Solo. Jokowi punya alasan kenapa dirinya tak mau bersentuhan dengan politik. Selain keluarganya bukan berasal dari organ politik, ia juga menganggap kalau politik bukanlah dunianya. Di politik memperbanyak musuh sangat mudah dan cepat. Berbeda dengan bisnis, yang cepat dan mudah justru memperbanyak relasi dan teman.

Namun karena desakan yang masif dan konsisten, lambat-laun kekokohan hati Jokowi mulai goyah. Ia paling tak kuasa ketika melihat banyak rakyat Solo yang hidup dalam kemiskinan. Jangankan untuk membiayai anak sekolah sampai ke level tertinggi sesuai cita-citanya, supaya terpenuhi isi perutnya setiap hari saja mereka sudah kelimpungan.

Ia sendiri sudah merasakan betapa tak enaknyanya menjadi orang miskin. Hak-haknya selalu dinegasi penguasa korup atau pejabat serakah. Seakan rakyat miskin tak boleh sekolah dan sakit. Mereka harus memperjuangkan nasibnya sendiri dengan sedikit saja dibantu negara. Rumah-rumah mereka kebanyakan tak laik huni dan sejujurnya lebih mirip dikatakan bukan tempat tinggal manusia, tapi hewan.

Bukan hanya soal kemiskinan warga Solo yang sudah akut, namun banyak dimensi masalah lainnya yang harus dibenahi. Soal berbagai pening-

galan sejarah yang membuat Solo kemudian disebut kota *heritage* yang sudah banyak yang ditelantarkan, soal korupsi di lingkungan birokrasi, soal pedagang kaki lima (PKL) yang semakin semrawut dan masih banyak lagi.

Dan Jokowi ingin merubah itu semua. Merubah wajah kota yang dicintainya berubah lebih manusiawi dan elegan untuk ditinggali. Tapi apa bisa hal itu dilakukan kalau tanpa kekuasaan? Tentu *nothing!* Satu-satunya jalan untuk mengubah segala keruwetan multi-dimensional itu ialah dengan kekuasaan di tangannya. Ia harus menjadi Walikota Solo yang sah secara konstitusional untuk dapat berbuat banyak membuat sejumlah langkah terobosan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Solo.

Ia kemudian bersedia untuk menjadi calon Walikota Solo di depan anggota Asmindo yang tentu saja disambut dengan riuh. Setelah menimbang siapa wakil dan partai politik mana yang akan digunakan sebagai kendaraan, maka jatuhlah pilihan pada FX Hadi Rudyatmo dan PDI Perjuangan. Alasan pemilihan Rudy—begitu biasa FX Hadi Rudyatmo di-sapa—yakni karena satu tujuan dan satu hati. Rudy berkomitmen untuk berjuang membela hak-hak rakyat. Orientasi kekuasaannya, ketika kelak dipercaya, ialah demi dan untuk rakyat.

Sedangkan kenapa PDI Perjuangan? Jokowi merupakan pengagum Bung Karno dengan segenap pemikirannya. Bung Karno yang notabene ayah biologis Megawati, sang ketua umum, tentu saja banyak pemikiran dan warna perjuangannya yang diikuti oleh Megawati. Karena itulah, Jokowi memilih PDI Perjuangan sebagai kapal politiknya untuk berjuang.

Pasangan Jokowi-Rudy pun segera dideklarasikan. Sejak awal, Jokowi sudah mewanti-wanti kepada tim suksesnya untuk tak membiasakan membagi-bagi uang kepada rakyat. Jokowi tak ingin membodoh-bodohi rakyatnya dengan kesenangan sesaat yang pada akhirnya akan menyengsarakan karena salah pilih calon pemimpin. Ia ingin alami bergerak dan berpolitik tanpa sedikitpun merekayasa.

Pemilihan Walikota Solo Periode 2005-2010 waktu itu diikuti oleh 4 pasangan calon yakni *incumbent* Slamet Suryanto yang berpasangan dengan Hengky Nartosabdo, Jokowi-Rudy, Achmad Purnomo-Istar Wahyudi, dan Hardono-Dipokusumo. Dan sesuai perhitungan suara, ternyata pemenang pertarungan ialah pasangan Jokowi-Rudy dengan raupan suara mencapai

36,65% atau 99.747 suara, kemudian disusul Achmad Purnomo-Istar Wahyudi dengan 79.213 (29,08%).

Kemenangan tersebut tentu diluar dugaan karena sebelumnya Jokowi jauh dari hiruk pikuk politik lokal. Dia pengusaha tulen yang notabene banyak bergaul hanya dengan kalangan terbatas, yakni pengusaha dan *stakeholders*-nya. Tapi pilihan rakyat sudah ditentukan. Jokowi-Rudy menjadi pasangan terpilih Walikota Solo periode 2005-2010. Keduanyapun mulai bekerja secara profesional untuk melunasi janji-janji politiknya ketika kampanye.

“Ngewongke” Para PKL

Di masa kepemimpinannya selama 5 tahun, tentu banyak hal yang telah diperbuat oleh Jokowi dan pasangannya. Asal-usulnya yang berasal dari kalangan bawah membuatnya menaruh perhatian lebih kepada segenap rakyatnya yang kesusahan. Ia ingin kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang begitu besar di Solo segera ditekan. Maka jadilah ia pemimpin yang merakyat, membaur dengan kalangan pedagang, petani, seniman.

Yang paling disorot dari kebijakan Jokowi di Solo—selain mobil Esemka yang akan dibahas lebih lanjut—ialah keberhasilannya dalam memindahkan para pedagang kaki lima (PKL) yang selalu saja dianggap benalu yang menghapus keindahan kota. Mereka, para PKL itu senantiasa ditempatkan dalam terma negatif sehingga harus dengan cara-cara negatif dan destruktif pula untuk memberangusnya.

Karena memandang PKL dalam sisi yang negatif itulah membuat sisi positif dari mereka tak terlihat. Padahal kalau mau jujur, PKL merupakan sekelompok manusia yang tak minta belas kasihan dari pemerintah. Mereka tidak manja karena bisa mengurus dirinya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka tak minta dikasihani untuk sekadar mengisi perutnya yang keroncongan atau memberi uang jajan kepada anaknya yang merengek. Mereka berjuang untuk hidupnya sendiri sekalipun hatinya selalu was-was karena kekhawatiran dirazia Satpol PP atau lapaknya diabrak-abrik preman karena tak sanggup bayar upeti.

Jokowi mencoba memandang PKL dari sudut positifnya. Jokowi

menganggap PKL harus diberdayakan karena merupakan aset potensial untuk mendongkrak perekonomian daerah. Kegigihan dan keuletan mereka untuk mencukupi keekonomian keluarganya seharusnya difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah. Memang mereka memilih lokasi berdagang yang terkadang membuat tata kota menjadi kurang ciamik. Sebuah saja pelataran Monumen Juang 1945 di Banjarsari yang dikuasai puluhan PKL, menjadikannya terlihat kotor, jorok dan semrawut.

Namun hal itu tentu saja bukan alasan untuk mengusirnya secara paksa dan atau memukulinya dengan pentungan khas Satpol PP. Penyelesaian masalah PKL dengan jalan kekerasan bukan untuk mencari solusi, melainkan menciptakan masalah baru yang lebih rumit. Para PKL itu mungkin bisa dijaring seketika itu, namun tak ada yang menjamin mereka tak akan kembali berjualan di kemudian hari. Bahkan untuk mempertahankan lapak kehidupannya itu, mereka juga akan mati-matian melawan Satpol PP yang dikerahkan untuk mengusir mereka. Kalau sudah begitu, rakyat versus pemerintah akan terjadi perang tak berkesudahan. PKL akan membenci pemerintah dan semakin membandel jika ditertibkan.

Dasar pemikiran itu rupanya dipakai Jokowi. Baginya, PKL bukanlah hama untuk dibunuh. Mereka seharusnya dijadikan mitra untuk berkembang. Para PKL juga manusia yang memiliki hati dan rasa. Sehingga pendekatan dari hati ke hati itulah yang dipakai Jokowi untuk melobi mereka. Jokowi mencoba mengambil jalan lain untuk merelokasi PKL yang sebelumnya telah ditetapkan Pemda Solo. Iapun mendekati mereka dengan hati. Jokowi menawarkan solusi dengan rasa dan kasih, bukan pentungan atau kebengisan.

Apa yang terjadi? Lambat laun para PKL itu mengerti kalau Jokowi berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Ia lebih humanis dan egaliter. Sisi kemanusiaannya lebih dominan ketimbang kebengisannya. Terlebih puluhan kali mereka diundang untuk makan besar di Loji Gandrung, rumah dinas sang walikota.

Jokowi benar-benar bekerja dengan hati dan nuraninya. Ia tak memilih menggunakan kekuasaannya untuk menerabas atau bermental serba instan yang kerap kali ditunjukkan oleh pemimpin lainnya di negeri ini. Jokowi sangat menghargai proses dan ulet. Pendiiriannya kuat dan keputusannya

sukar diubah sekalipun banyak orang disekelilingnya membisikkan kalau merelokasi PKL sama saja menunggu petir di siang bolong. Sedikit mustahil karena telah terjadi berpuluh-puluh tahun.

Dan terbukti, setelah Jokowi mengundang mereka makan malam sebanyak 54 kali, para PKL bersedia untuk ditempatkan di Pasar Klithikan dengan biaya sewa hanya Rp 2. 500 saja perhari. Ketika pemindahan yang banyak diliput media tersebut, tak ada sedikitpun kericuhan yang terjadi. Pemandangan saling gebuk atau PKL dengan Satpol PP atau tangis histeris ibu-ibu yang lapaknya dibongkar sama sekali tak terjadi kala itu. mereka begitu legowo menerima keputusan sang walikotanya untuk dilokalisir ke tempat baru.

Sejak keberhasilannya itu, namanya semakin dikenal luas. Nama Jokowi bukan hanya menghiasi ranah media lokal, namun juga menasional. Suatu hal yang tentunya jarang diketemukan pada pemimpin daerah lain yang prestasinya dibicarakan sampai ke tingkat nasional, bahkan internasional. Bukan hanya soal PKL dan perbaikan ekonomi kalangan marginal, Jokowi juga dianggap berhasil dalam mengembalikan Solo sebagai kota budaya (*heritage city*).

Salah satu bentuk keberhasilannya, Solo pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan The World Heritage Cities Conference and Expo di tahun 2007 silam. Konferensi berbiaya besar dan memerlukan persiapan matang itu pada akhirnya menghasilkan Deklarasi Solo. Dampak dari penyelenggaraan tersebut ialah diakuinya wayang kulit sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO setahun kemudian. Fakta tersebut tentu sangat mengesankan dan menjadi prestasi tersendiri yang menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia, khususnya Solo, tak kalah dengan kebudayaan dari negara-negara lainnya.

Setelah itu, berbagai aktifitas kebudayaan terus dilakukan seperti Festival Wayang Cilik, pertunjukan seni Matah Ati, Solo City Jazz, sampai Rock in Solo. Segala hal itu dilakukan Jokowi untuk kembali mengangkat citra Solo sebagai kota berbudaya dan warganya bangga dengan berbagai kekayaan dan keunikan budayanya tersebut.

Dengan berbagai langkah terobosan simpatik yang dilakukan Jokowi selama masa jabatannya 2005 – 2010 seperti percepatan pembuatan KTP

dan izin usaha, upaya relokasi ribuan PKL tanpa ricuh, sampai mengangkat kembali budaya Solo bukan hanya di level nasional tapi juga internasional berimbas pada kemenangan mereka di Pilkada Solo periode keduanya. Jokowi-Rudy kemudian mampu melenggang kangkung pada periode 2010-2015 dengan raupan suara mencapai 90%.

Jokowi dan Nalar Esemka

Popularitas Jokowi makin melambung ketika mobil Esemka karya anak-anak sekolah kejuruan SMK 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta berhasil diciptakan. Mobil Esemka yang murni dirancang oleh anak-anak sederhana nan lugu di Solo itu telah membunahkan harapan dan semangat di hati Jokowi dan segenap warga Solo bahwa dengan tekad yang membaja dan semangat pantang menyerah ternyata mereka bisa mewujudkan hal yang sulit sekalipun.

Mobil Esemka yang berkekuatan 1.500 cc, berukuran panjang 4,8 meter dan bisa memuat sampai 7 orang dengan tenaga 102 PK ini merupakan buah manifestasi impian dan semangat. Produk yang digadang-gadang sebagai mobil nasional ini merupakan murni kreativitas dan imajinasi anak-anak SMK di Solo yang sudah sepatutnya diapresiasi dan diacungi dua jempol (Endah, 2012).

Jokowi tak kalah bangga dengan kelahiran mobil Esemka. Di balik sunggingan senyumnya ketika banyak pewarta berniat meng-*interview*-nya, di hatinya yang terdalam ia menangis haru dengan keberhasilan anak-anak sederhana di Solo yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Keahlian dan imajinasi mereka jika dikembangkan dengan model yang tepat, maka kelak akan menjadi ahli otomotif level dunia. Ia pun ingin memberikan wadah untuk berkarya dan berkreasi menyempurnakan dan mengindustrikan mobil Esemka dengan membangun pabrik lewat pengembangan Solo Technopark.

Jokowi pun tak segan untuk mengganti mobil dinasny dari yang tadinya menggunakan Toyota Camry menjadi mobil Esemka berplat AD 1 A. Ialah kebanggaan tersendiri ketika berdinasi sebagai pemimpin kota Solo dengan ditemani si tangguh Esemka yang notabene hasil kreasi anak negeri. Lebih dari soal kebanggaan pribadi seorang Jokowi, penggunaan mobil tersebut

sebagai kendaraan dinas tentu juga akan semakin memompa semangat para siswa SMK karena buah karya mereka dihargai.

Namun begitu, selalu saja di setiap kesuksesan seseorang ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Berbanding lurus dengan puja-puji yang diterima Jokowi karena dianggap telah berjasa dalam mempopulerkan mobil Esemka, ada juga pihak yang mencibirnya. Mereka mengatakan kiprah Jokowi dengan Esemkanya hanya untuk menaikkan popularitasnya sebagai bekal maju di Pilkada DKI Jakarta yang sebentar lagi akan digelar, kala itu. Namun bukan Jokowi namanya kalau lantas gundah hanya dengan tuduhan “sederhana” semacam itu.

Melenggang ke DKI Jaya

Sebetulnya, istri dan anak-anaknya: Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep, tak setuju Jokowi terjun ke politik. Namun ketidaksetujuan mereka bukan berarti berbuah pada penolakan. Iklim demokratis dalam lingkup keluarga Jokowi begitu kental. Mereka satu suara tak setuju Jokowi menceburkan diri ke dunia politik, namun istri dan anak-anaknya tak pernah melarangnya.

Bagi istri dan anak-anaknya, Tuhan telah memberikan anugerah yang banyak terhadap keluarga mereka sehingga tak perlu lagi Jokowi berkarya di tempat lain selain di bisnis. Usaha permeubelannya jalan stabil bahkan terus menanjak. Dia juga mengurus perkumpulan pengusaha meubel sehingga, dalam benak keluarganya, tak perlu berbuat yang neko-neko. Berbuat yang sedari dulu tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Namun Jokowi merasa pengabdianya kepada rakyat harus diperluas. Jokowi ingin menjadikan politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan imajinya soal kesejahteraan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat. Orientasi berpolitiknya selalu rakyat, bukan diri atau golongan. Karena itulah ia mantap untuk maju sebagai calon Walikota Solo dan menang pada 2 kali pemilihan. Setelah pemilihan yang kedua, 2 tahun berselang dia memutuskan pilihan politik yang berat: maju di Pilkada DKI 2012 lalu.

Sontak keputusannya banyak digunjingkan orang. Banyak yang menyangka Jokowi menjadi haus kekuasaan karena baru dua tahun jabatan di

Solo (periode kedua), sudah mau jadi gubernur ibukota. Namun dirinya bergeming karena merasa tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan tersebut. Ia hanya menjalankan mandat partainya untuk bertugas mengabdikan hidupnya kepada rakyat yang lebih luas, Jakarta.

Jadilah ia calon Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama yang dicalonkan Partai Gerindra. Sama dengan Rudy di Solo, Jokowi tak menolak Ahok karena dianggap memiliki kesamaan visi dan misi untuk mengembangkan dan memajukan DKI Jakarta yang notabene sebagai episentrum negara. Saat kampanye tersebut, Jokowi – Ahok pun terkenal dengan blusukan dan kemeja kotak-kotaknya sebagai simbol politik mereka.

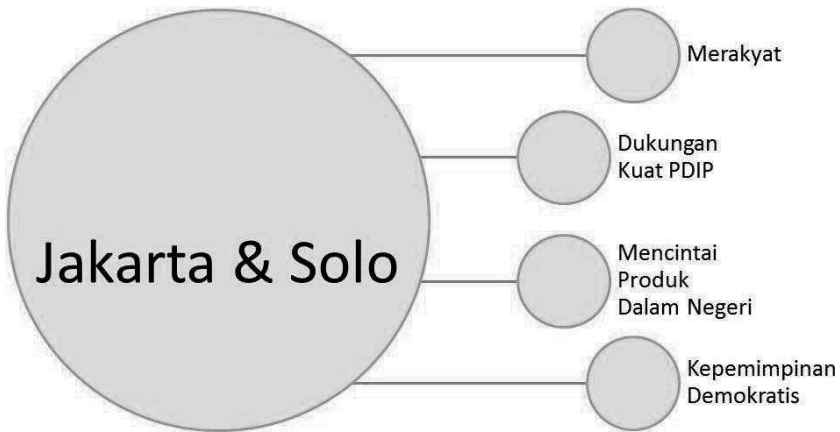
Ketika pemilihan digulirkan, mereka berhasil menang sehingga jadilah Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Selama setahun kepemimpinannya hingga kini, telah banyak program yang digulirkan seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS), merelokasi para PKL di Pasar Tanah Abang yang kesemrawutannya begitu akut, penataan bangunan-bangunan liar di beberapa wilayah kumuh seperti Kali Opak, Kali Jelakeng dan Kali Pakin, normalisasi Waduk Pluit untuk menampung air bah ketika musim banjir tiba dan masih banyak lagi.

Sama halnya seperti ketika memimpin Solo, media selalu membuntuti segala aktivitas yang dilakukan pasangan fenomenal ini. Hampir tiap hari berita tentang Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI, diberitakan. Terlebih ketika ia berhasil menempatkan para PKL di Tanah Abang untuk mau berjualan di dalam gedung yang telah disediakan dengan penggratisan kios selama enam bulan pertama. Kelengangan jalan di sekitar pasar terbesar di Asia Tenggara tersebut bisa dirasakan dan tidak lagi menimbulkan kemacetan. Media dan masyarakat pun mengapresiasi langkah cerdas dan beraninya tersebut.

Gagasan: Blusukan, Tegas dan Baru

Banyak kalangan kurang mengetahui apa yang menjadi gagasan politik Jokowi. Sebabnya adalah Jokowi bukan termasuk pemimpin yang banyak bicara. Ia lebih banyak terjun langsung ke masyarakat, berkomunikasi

tentang berbagai hal yang menjadi masalah mereka dan memikirkan jalan keluarnya dalam bentuk kebijakan. Banyak yang menilai gaya kepemimpinannya ini, melepas kekakuan formal dari pemimpin-pemimpin sebelumnya.



Pasca reformasi yang banyak terjadi adalah praktik politik elitis yang eksklusif. Yakni praktik politik yang berwajah lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah yang dikatakan Jeffrey Winters dengan sebutan oligarki.

Para oligark dengan kekuatan materinya terjun ke politik untuk mengamankan materi atau bahkan menambah jumlah materinya. Tak ayal yang dipraktekan adalah politik *ala* machevallian yakni menghalalkan segala cara demi tujuan. Dampak nyatanya para elit yang menjadi pemimpin ini mempunyai jarak dan tak terintegrasi dengan rakyatnya.

Jokowi adalah pemimpin dengan praktek politik yang merakyat dan inklusif. Dia melepas batas-batas formal nan kaku untuk menjadi pemimpin yang menjawab tuntutan demokrasi dari rakyatnya. Dia melepas budaya "asal bapak senang" dan patron klien yang telah mendarah daging dan diwariskan dari rezim sebelumnya.

Jawaban Jokowi terhadap itu semua adalah dengan gagasan blusukan yang dipraktekannya. Blusukan bukanlah konsep gaya kepemimpinan yang baru. Telah banyak tokoh yang melakukannya, sebut saja Khalifah Umar

bin Khattab. Blusukan adalah satu praktek perilaku pemimpin yang oleh Max Weber disebut sebagai pemimpin legal-rasional yang mengutamakan rakyat sebagai pemberi mandat. Namun, banyak penguasa yang lupa terhadap *virtue*-nya dan membuat mereka terjebak kedalam yang dikatakan Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Jokowi pun mengatakan alasan blusukannya ialah untuk mengetahui kondisi rakyat yang sebenarnya dan mencari solusi dari masalahnya. Solusi tersebut akan berwujud dalam satu kebijakan. Pendek kata, Jokowi merubah cara pandang pembuatan kebijakan yang selama ini *top down* menjadi *bottom up*.

Gagasan blusukan, bagi Jokowi dianggap bukanlah hal yang luar biasa. Dia mengatakan, blusukan adalah satu cara yang memang harus dilakukannya. Karena bagi Jokowi memimpin itu bukan untuk mengkhianati dan Jokowi tidak mau menyediakan waktu untuk itu. Blusukan yang dilakukan Jokowi dalam istilah Rhodes (1997) ialah *governing without government* (pemerintahan tanpa pemerintah) (www.dw.de, 2014). Karena Jokowi yang tidak berjarak dengan masyarakatnya.

Di tengah fenomena pemimpin yang banyak diistilahkan galau atau bimbang, Jokowi justru membuat contoh antitesisnya dengan menjadi pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas ini menurut Jokowi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penyelewengan yang banyak ada, seperti korupsi, kesenjangan dan sistem patrimonial birokrasi.

Gagasan kepemimpinan tegas oleh Jokowi ditujukan untuk memberikan keteladanan kepada para bawahannya. Gagasan ini terlahir dari pengalaman Jokowi sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menilai, budaya patrimonial warisan kolonial telah mendarah daging pada kebanyakan birokrat di Indonesia. Jokowi menilai kerja birokrat tersebut tidak punya *passion* dan lamban.

Ketegasan utama yang dilakukan Jokowi adalah terhadap pemberantasan korupsi di antaranya dalam tubuh birokrat. Jokowi melihat perilaku korup ini selain didukung oleh kultur juga didukung oleh sistem dan pemimpinnya. Maka Jokowi mengatakan untuk merubah itu diperlukan

rolemodel yang demokratis dan mengutamakan keterbukaan serta transparan.

Role model yang demokratis bagi Jokowi ditujukan untuk melepas penjara birokrasi yang terjadi selama ini. Sebagai contoh ketika memimpin Solo, Jokowi berujar “saat hendak mengambil keputusan saya terbentur oleh sederet birokrasi dalam pengambilan keputusan, seperti PP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur. Seorang wartawan mengatakan pada saya, “Pak, ini kan ada “permen”-nya. Saya langsung menjawab, “Saya tahunya hanya permen Kopiko”, ujar Jokowi.

Selain itu, gagasan yang selalu didorong oleh Jokowi adalah “baru”. Banyak kata atau kalimat yang keluar dari Jokowi, seperti Pemimpin Baru, Jakarta Baru dan ini juga membuat para pendukung Jokowi yang menginginkannya menjadi Presiden 2014, membuat slogan Indonesia Baru.

Istilah ‘baru’ dalam politik sering didengungkan untuk menggantikan rezim yang lama. Istilah baru tersebut dapat dilihat secara komperhensif melalui Teori sistem dari Gabriel Almond, yakni mulai dari masyarakatnya yang termasuk kedalam kelompok-kelompok *interest group* atau *preasure group*, wacana kebijakannya yang nantinya diputuskan oleh legislatif sampai dengan pelaksanaannya oleh eksekutif (Amanahme,2012). Selain dapat dilihat dari sistem politik ini, istilah ‘baru’ juga dapat dilihat melalui ideologi dari seorang pemimpinnya, mulai dari visi, misi, sampai dengan pengambilan dan produk kebijakannya.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Jokowi tentang orientasi kepemimpinan politiknya yakni, “Saya berprinsip, ketika orientasi pengambilan keputusan adalah seutuh-utuhnya ditujukan untuk kebaikan rakyat, maka yang akan menjaga keselamatan adalah pantulan niat baik. Tidak lebih tidak kurang”. Maka tak heran kalau sampai dengan sekarang, Jokowi sangat dicintai oleh kebanyakan warga Solo dan DKI Jakarta. Dan bahkan didukung mereka untuk menjadi capres pada Pemilu 2014.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Banyak kalangan melihat politik Indonesia terpaku pada pusat. Seperti Istana dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membuat potensi politik yang

ada di daerah tak terlihat. Maka tak aneh apabila, kandidat capres pada Pemilu 2014 nanti, sebagian besar tokoh politik yang berada di pusat.

Ironinya sebagian besar pejabat politik di pusat, terseret atau terindikasi beberapa kasus, terutama seperti korupsi. Di sisi lain, banyak juga pejabat politik tersebut diberitakan tentang hal-hal yang negatif yang tak dapat diterima publik. Akibatnya, publik menginginkan pemimpin dari daerah yang selama ini tak terlihat, tetapi mempunyai banyak prestasi.

Pada titik inilah, Jokowi barangkali menemukan momentumnya. Jokowi memiliki peluang besar dalam Pilpres 2014 mendatang. *Pertama*, Jokowi memiliki *track record* yang positif, baik sebagai pengusaha, walikota dan juga gubernur meskipun belum dituntaskan jabatannya secara penuh. *Kedua*, dari berbagai survei nasional, elektabilitas Jokowi terus menanjak sekalipun saat itu dirinya belum secara resmi memproklamkan dirinya sebagai capres 2014. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi elektabilitas Jokowi teratas dengan skor (37. 46).

Selain itu, dalam survei pakar dan *media makers* Pol-Tracking Institute terhadap para tokoh daerah (pemimpin daerah) yang dilakukan Oktober 2012 lalu, posisi Jokowi paling unggul dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Dengan standar kecukupan 6. 00, maka beberapa aspek seperti kapabilitas, visioner, *leadership skills*, dan lain-lain, semuanya di atas angka 6. 00. Ini artinya, Jokowi paling unggul di atas standar yang ada. Selain itu, yang lebih menarik lagi ialah tentang aspek penerimaan publik (85. 52) dan komunikasi publik (85. 08). Tingginya skor kedua aspek itulah yang menyebabkan kenapa Jokowi selalu unggul dalam berbagai survei nasional.

Ketiga, dukungan media *mainstream* dan media sosial yang terus memberikan positif Jokowi. Hal itu tentu akan menjadi juru kampanye efektif sekaligus juga menjadi tameng kuat jika ada pihak-pihak yang berniat untuk mendiskreditkannya.

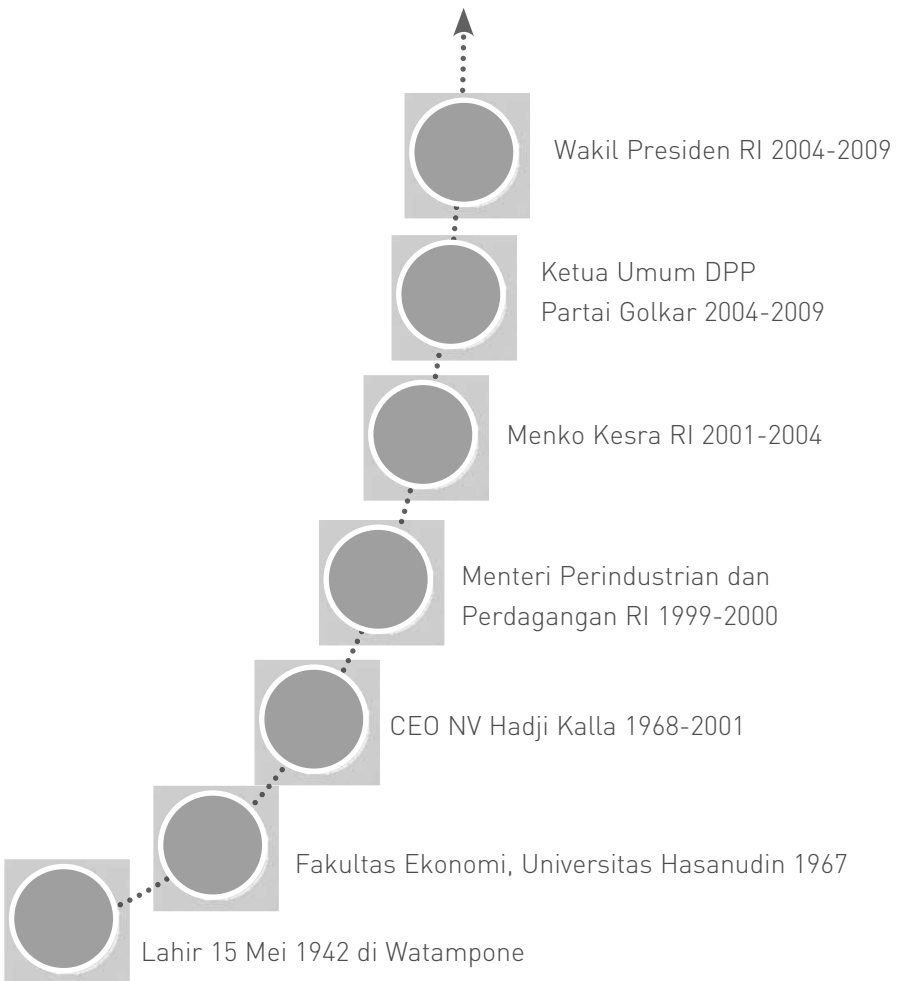
Meski demikian, tantangan sekaligus bisa menjadi hambatan bagi Jokowi tentu terkait tanggungjawab moril sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru diembannya selama 2 tahun. Hal itu terbukti dari berbagai 'sindiran' terhadapnya ketika dideklarasikan oleh PDI Perjuangan menjadi capres 2014.

Selain itu, tantangan terbesar Jokowi lainnya adalah soal trah Soekarno. Sebab dalam konteks trah Soekarno, harus diakui, secara geneologis, Jokowi bukanlah orang yang memiliki trah ataupun darah dari kaum nasionalis elite PDI Perjuangan. Tentu pada titik-titik tertentu ihwal 'kepantasan' Jokowi menjadi capres PDI Perjuangan pasti tetap akan dipertanyakan. Sebab, PDI Perjuangan bukan partai seperti Golkar ataupun PKS. PDI Perjuangan adalah partai yang kuat trahnya dibandingkan partai-partai lainnya.

Terakhir adalah tentang politik luar negeri Jokowi. Jokowi selama ini dianggap pemimpin yang hanya jago kandang. Beberapa pengamat masih ada yang meragukan apakah Jokowi mampu bergaul dengan dunia internasional melihat jam terbang Jokowi selama ini memang di dalam negeri. Inilah 'pekerjaan rumah' yang harus segera dijawab Jokowi.

JUSUF KALLA

Pemimpin Potensial





metro-newz.com

Tak banyak lidah orang menyebut nama Watampone. Sebagai salah satu kota dengan tingkat populasi penduduk terpadat nomor dua di Sulawesi Selatan, Ibu Kota Bone ini kalah tenar dengan Makassar. Butuh empat jam ditempuh untuk sampai ke kota ini. Watampone dapat dilalui lewat darat melalui Maros, Bantimurung, Camba.

Tak sedikit tokoh besar lahir di tanah Watampone. Jendral (Purn) M Jusuf lahir di kota ini. Juga, pahlawan pembebasan milik rakyat Bone, La Tenriatta Arung Palakka yang menghembuskan napas pertamakali di bumi padi ini. Watampone juga menjadi tanah tempat lahirnya 'orang kecil' dari pasangan Haji Kalla dan Athirah. Muhammad Jusuf Kalla, orang kecil yang sanggup memberi catatan besar dalam perjalanan sejarah bangsa ini.

Jusuf Kalla lahir pada 15 Mei 1942. Ucu, panggilan kecil JK, lahir dari keluarga saudagar. Haji Kalla adalah sosok pengusaha ulet yang bisa membuktikan kepada dunia tentang kesuksesannya. Pada usia 15 tahun, Haji Kalla yang masih remaja sudah punya kios sendiri di Pasar Bajoe, enam kilometer dari Watampone. Di pasar ini, Haji Kalla berdagang kain sejak tahun 1935 hingga 1947.

Gairah bisnis Haji Kalla kian membuncah. Mulai tahun 1955, dia pun mulai mendevirsifikasi produk dagangannya dengan menjual hasil bumi. Rempah-rempah itu pun sampai ke Makassar. Untuk melancarkan bisnisnya, dia membeli satu petak rumah toko berlantai tiga di Jl. Pelabuhan

(sekarang Jl. Martadinata) di Makassar. Di sana, Haji Kalla mulai sering bergaul dengan eksportir dan importir.

Tiga tahun sesudahnya, Haji Kalla mendirikan pabrik tekstil. Dengan penghasilan yang terus membesar, dia pun memutuskan untuk berinvestasi di bisnis transportasi. Haji Kalla membeli sebuah mobil truk untuk mengangkut hasil bumi dari Bone ke Makassar. Usaha distribusi ini dinamakan Cahaya Bone. Dia lalu membuat kelompok usaha dengan mendirikan NV (Namlozee Venonchap) Haji Kalla (Abdullah, dkk, 2012).

Dengan bisnis yang semakin maju, Haji Kalla mulai memikirkan siapa penerus usahanya. Dia pun memilih bocah kecil yang kebetulan, menjadi putra tertua dari sepuluh bersaudara. Daeng Ucup atau Jusuf Kalla. Ucup dikenalkan bisnis oleh ayahnya sejak berusia 8 tahun. Dia disuruh menjaga toko dengan jabatan kasir. Tak hanya melakukan pekerjaan recehan, Ucup pun diisi dengan berbagai pengetahuan ekonomi oleh ayahnya. Dia selalu ikut dalam perundingan bisnis Haji Kalla.

Jusuf Kalla juga kerap diajak sang ayah mengurus bisnis ke Makassar. Di ibu kota provinsi, mereka menginap di Hotel Capitol. Di sana, Haji Kalla menemui para tauke pemilik barang tekstil dan barang kelontong. Para tauke senang karena barang yang mereka titipkan kepada Haji Kalla laku keras. Di sisi lain, para pembeli merasa dilayani ekstra.

Bisnis keluarga Kalla tak sepenuhnya berjalan sukses. Pada 1965, inflasi tercatat hingga di angka 650 persen. Nilai rupiah dipotong dari Rp 1. 000 hingga menjadi Rp 1. Bisnis pun tak bisa berjalan. Kedua orang tua JK harus menganggur. Usaha yang tetap bisa dijalankan hanya bus antar-kota dan berdagang sutra. Sementara kantor harus tutup. Ketika itu, sulit untuk menentukan harga karena harga naik terus. Bisnis pun menjadi rumit. Banyak orang yang tidak pegang duit. Mereka memegang barang. JK ketika itu berpindah-pindah menjaga barang. Jika hari ini menjaga semen, maka besok harus menjaga ban.

Haji Kalla pun menghitung semua barang yang dimiliki. Lantas, dia menjualnya dan dibelikan lima kilogram emas. Athirah menyuruh JK untuk membuat bunker penyimpanan di dalam kamarnya. Bunker itu untuk menyimpan peti stainless yang di dalamnya terdapat emas. Hanya dirinya, JK, dan Haji Kalla yang boleh tahu penggalan itu. Tak hanya soal bisnis, orang tua Jusuf Kalla mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam. JK tumbuh dalam dua pengaruh besar. Sang ayah, Haji Kalla adalah

pengikut Nahdatul Ulama, sedangkan sang ibu, Athirah merupakan warga Muhammadiyah (Abdullah, dkk, 2012).

Lambat laun Jusuf memahami perbedaan NU dan Muhammadiyah. Namun, tidak juga selamanya mulus. Pada akhirnya, dia pun memandang perlunya sebuah jalan tengah. Baginya, ini adalah langkah yang terbaik. Hal itu pun bukan semata karena perbedaan ibadah, melainkan karena sikap keras sang ayah. Secara ritual, akhirnya dia mengikuti ajaran yang dianut sang bapak. “Lebaran ikut bapak, apalagi dengan otoriter. Ibu juga ikut bapak. Kami sembahyang tarawih 20 rakaat,” katanya.

Dengan latar belakang demikian, JK menjadi sosok yang terbiasa menghargai orang lain, termasuk orang yang berbeda pandangan dan keyakinan dengannya. Semenjak kecil, dia sudah diasuh orangtua untuk hidup sesuai ajaran agama Islam yang dianutnya, jujur, dan menghargai orang lain.

Haji Kalla sangat puritan berkaitan dengan masalah agama. Dia tidak segan merotan anaknya yang tidak mau mengaji. Belajar Al-Qur'an biasanya dilakukan di masjid atau rumah guru agama pada sore hari. Pendidikan agama memang harga mati bagi keluarga Kalla. Mereka menerapkan aturan yang ketat bahkan keras. Anak-anaknya akan dihukum jika lalai mengaji dan shalat. Jika mengetahui anaknya tidak mau mengaji, Haji Kalla akan memukul anaknya dengan rotan.

Sang ibu sama tegasnya untuk urusan ini. Kalau lalai shalat dan tidak mengaji, atau rapor ada angka merahnya, dia akan memarahi JK. Namun, jika rotan melayang sang ibu mengiba-iba kepada sang ayah. “Jangan diteruskan,” kata JK menirukan ibunya. Ya, bila dianggap benar, dia tidak ragu membela anak-anaknya.

JK pertama kali mengenal Mufidah saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Saat itu, mereka baru pindah dari SMA 1 ke SMA baru. Di sana, JK bertemu dengan adik kelasnya Mufidah Miad Saad. Mufidah kelahiran Sibolga, 12 Februari 1943. Putri pasangan HBuya Miad dan Sitti Baheram ini sudah ditaksir JK sejak Mufidah duduk di kelas satu. Hanya, selepas lulus, mereka berbeda kampus. Jika JK masuk Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Mufidah menjadi mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (Abdullah, dkk, 2012).

JK tak kehilangan akal untuk terus mendekati Mufidah. Tahu kalau pujaan hatinya bekerja sampingan sebagai teller di BNI 46, JK rajin menabung di bank tersebut. Tak hanya itu, JK pun melamar untuk menjadi asis-

ten dosen di UMI Makassar. Pada 1966, mereka akhirnya bertunangan. Setahun kemudian, JK dan Mufidah menikah. Sebenarnya, karier Mufidah di BNI 46 melesat selepas menikah. Dia dipercaya untuk menjadi Wakil Pimpinan di BNI 46 cabang Makassar. Hanya, JK lebih menginginkan istrinya berada di rumah setiap kali dia pulang kerja. Sejak saat itu, Mufidah pun mengundurkan diri dari BNI 46.

Pewaris Mahkota

Haji Kalla menyerahkan tongkat kepemimpinan perusahaannya kepada JK pada 1967. JK didaulat sebagai Direktur Utama NV. Hadji Kalla. Peralihan tongkat estafet tersebut terjadi seiring berubahnya situasi nasional. Jendral Soeharto mengambil tampuk kepemimpinan dari Bung Karno usai peristiwa G-30 S/PKI. Presiden Soeharto pun memulai pemerintahannya dengan program rencana pembangunan lima tahun (repelita) yang fokus kepada infrastruktur. Kebijakan ini ditangkap sebagai peluang bisnis oleh JK.

Dia pun segera mendirikan PT Bumi Karya, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor konstruksi bangunan. Modal untuk mendirikan perusahaan diambil dari setengah kilogram emas yang disimpan di dalam kamar ibunya. Saat perusahaannya mulai berjalan, beberapa manajer perusahaan yang juga aktivis belum selesai kuliah, contohnya Aksa Mahmud dan Alwi Mahmud. Alhasil, mereka pun berhenti dari studinya dan fokus untuk mengembangkan Bumi Karya.

Sayangnya, pemerintah tak berkenan dengan penamaan Bumi Karya. Penyebabnya, kata Karya yang disematkan di belakang Bumi sudah terlebih dahulu digunakan sebagai nama salah satu badan usaha pemerintah. JK pun mengubah namanya menjadi Bumi Karsa.

Di masa awal, bisnis Bumi Karsa sangat ekspansif. Meski tergolong perusahaan baru, Bumi Karsa sukses membangun Jalan Trans Sulawesi. Jalan yang menghubungkan Sulawesi dari selatan hingga ke utara. Selain membangun jalan, Bumi Karsa membangun bandara di beberapa daerah, seperti Bandara Hasanuddin, Bandara Biak, hingga Bandara Aceh.

Masih di tahun 1967, JK juga mengembangkan bisnis otomotif. NV Hadji Kalla menjadi pelopor importir mobil merek Toyota. Alkisah, saat itu



politik. kompasiana.com

Gubernur Sulawesi Selatan ingin naik mobil jenis Toyota. JK pun bertanya ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta di mana bisa membeli mobil tersebut. Saat sudah dapat informasi, JK lagi-lagi menggunakan emas yang disimpan ibunya di dalam kamar.

Pada 1969, JK bahkan ditawari manajemen Toyota Jepang untuk menjadi agen tunggal pemegang merek (ATPM) di Indonesia. Sadar kalau kemampuan perusahaannya masih terbatas, baik dari sisi modal maupun sumber daya manusia (SDM), JK menolak tawaran itu. Dia pun menyerahkannya kepada William Soerjadaja yang belakangan dikenal dengan sebutan om William, pendiri PT. Astra yang hingga saat ini menjadi raja otomotif di Indonesia.

Perjalanan bisnis JK lainnya adalah PT. Bukaka Teknik Utama. Bukaka adalah nama kampung keluarga Hajjah Athirah di Bone, Sulawesi Selatan. Di Jakarta, Bukaka lebih dikenal sebagai nama perusahaan yang sudah *go internasional* dengan produk garbaratanya. Bukaka terus berkembang dan memegang keagenan alat berat Kobelco. Perusahaan ini menang tender di Departemen Pekerjaan Umum untuk pengerjaan *aspalt mixing plat* (Abdullah, dkk, 2012).

Dengan cepat, produk garbarata Bukaka terkenal seantero Asia. Produk Bukaka digunakan di berbagai bandara seperti di Haneda Jepang, bandara Hongkong, dan kerap memenangkan berbagai tender internasional. De-

ngan seabrek bisnis yang dimiliki JK, ada nilai-nilai dari Haji Kalla yang selalu dipertahankan. Haji Kalla tidak mau hidup dari komisi, terlebih dari rente. Haji Kalla tak mau mengandalkan laba dari pergerakan saham. Bisnisnya harus riil dan didapat dari kerja keras. Kalau mendapat rezeki, jangan lupa zakat dan sedekah.

Ini pun dipraktikkan JK. Dia selalu menanyakan tentang alokasi zakat, sedekah, dan sumbangan perusahaan kepada lingkungan sekitar. “Pak JK selalu menanyakan itu. Seringnya bilang ah kurang itu, kurang itu, ditambah lagi. Keluarkan lagi,” kata Fatimah Kalla. JK pun lebih suka mengandalkan insting bisnis ketimbang berdasarkan laporan bawahan yang bertumpuk-tumpuk. Jangan kaget kalau *time line* pekerjaan yang dirancang oleh manajemen kemudian diacak-acak karena dianggap terlalu lambat.

Karier Politik

JK merintis karier politiknya dari bawah. Sejak masih duduk di bangku mahasiswa, dia dikenal sebagai Sekretaris Jendral Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Makassar saat peristiwa G 30 S/PKI meletus pada 1965. Tensi politik yang memanas membuat JK maju sebagai Ketua Presidium KAMI bersama Alwi Hamu sebagai sekjen. Aktivis KAMI didominasi oleh mahasiswa dari berbagai macam latar belakang. Ada HMI, GMKI, hingga PMKRI. Mereka pun datang dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Mereka pun bersahabat. Beberapa di antaranya bekerja bersama JK di NV Hadji Kalla. Sebagian menjadi dosen, politisi, bahkan wartawan.

Selain menjadi Ketua Presidium KAMI, JK pun tercatat aktif sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Hasanuddin, dan Ketua Pemuda Sekretaris Bersama Golkar. JK tak hanya bersahabat dengan aktivis lokal Makassar. Dia pun memiliki jaringan luas ke tokoh-tokoh aktivis yang nantinya akan menjadi pemimpin di negeri ini. Sebut saja Mar'ie Mohammad, Fahmi Idris, Sofjan Wanandi, hingga Akbar Tandjung.

JK tercatat selama 40 tahun aktif di kepengurusan Golkar. Saat masih mahasiswa, JK bahkan menjadi ketua. Dia pun duduk sebagai anggota DPR mewakili pemuda kurang lebih 3 tahun. Kesibukan bisnisnya membuat JK harus lebih fokus mengurus perusahaannya yang tengah berekspansi ke Jakarta, bahkan dunia.

Lima tahun kemudian, JK menjadi anggota MPR mewakili Golkar hingga 20 tahun setelahnya. JK memilih MPR karena lembaga tertinggi negara itu sidangnya hanya satu kali dalam lima tahun, sehingga dia hanya sibuk berpolitik dalam lima tahun sekali. Di daerah, JK juga mengikuti kegiatan-kegiatan Golkar. Karier politik JK mencapai puncak saat dia duduk menjadi wakil presiden. Dia berhasil duduk di pucuk pimpinan partai beringin tersebut demi meredam gejolak politik di parlemen. Saat ini, JK duduk sebagai Dewan Penasihat DPP Partai Golkar.

Di lembaga pemerintahan, cukup banyak posisi yang pernah diemban JK. Dia pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, meski hanya enam bulan. Dan kembali menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Bersama Susilo Bambang Yudhoyono, JK kemudian mencalonkan diri sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2004. Mereka menang dan JK duduk sebagai wapres.

Menuju Istana

Pesawat Athirah terbang dari Ambon menuju Jakarta. Jet pribadi milik Jusuf Kalla itu terbang gesit di udara. Di dalamnya, empunya pesawat duduk di row terdepan. Tangannya sedang sibuk mengotak-atik nama di atas sebuah buku catatan kecil. Semua nama itu adalah profil yang berpotensi akan menjadi calon presiden pada Pilpres 2004.

Sebagai pebisnis, JK percaya segala sesuatu bisa diperhitungkan. Termasuk politik. Pada perhitungannya itu, JK percaya dia mampu memenangkan pilpres dengan angka mutlak 60 persen. Hanya, ada syarat berlaku untuk kemenangan itu. Dia harus berpasangan dengan siapa pun capres yang berpotensi maju plus jika mereka mampu menembus putaran kedua.

Angka 60 persen muncul dari asumsi JK jika dia bisa memperoleh limpahan dari pemilih Islam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Ditambah, pemilih dari Partai Golkar, jika paket dari Partai Golkar tersisih. JK memang bukan orang baru di mata *nahdhiyin*. Ayah JK, Haji Kalla, adalah pendiri NU-Sulsel yang juga merupakan politisi PPP. Sedangkan ibunya, Athirah merupakan tokoh sentral di organisasi sayap perempuan Muhammadiyah, Aisyiah. Jika dia bertarung dengan Megawati dalam

putaran kedua, JK lebih percaya diri. Dia percaya pencalonan Megawati masih mendapat resistensi terlebih di kalangan umat Islam yang menentang capres perempuan (Abdullah, dkk, 2012).

JK memutuskan untuk meninggalkan konvensi calon presiden Partai Golkar lebih awal meski masih *listing* untuk masuk ke putaran kedua. Dia sudah mendengar informasi soal suara DPD-DPD Golkar yang sudah menerima 'tender' konvensi. Pada Minggu, 18 April 2004, JK pun secara resmi menyampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung perihal pengunduran dirinya tersebut. Setelah mundur, JK kemudian mendekati kepada seorang purnawirawan TNI yang juga baru mundur dari Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri. Dia adalah mantan menteri koordinator politik dan keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono.

Di mata publik, paket SBY-JK adalah pasangan yang saling melengkapi. SBY berasal dari Jawa dan seorang tentara. Sedangkan JK, pria asli Sulawesi Selatan ini mewakili etnis dari Indonesia Timur. Tak hanya itu, JK dikenal sebagai pengusaha sukses dan dapat menjadi representasi kaum nasionalis-religius. Perkawinan politik antar-dua tokoh tersebut terjadi antara Maret–Mei, lewat proses yang cepat. Perantara kedua tokoh ini adalah Rahmat Witoelar. SBY diceritakan, menghubungi Rahmat Witoelar untuk menyampaikan pesan kepada JK. Dia mengaku mempunyai komitmen dengan JK untuk saling membantu seperti pembicaraan mereka yang sempat berlangsung pada 11 Maret 2004 lalu. Atas dasar pesan itu, mereka berdua lalu maju ke putaran Pilpres 2004.

Dasar pebisnis, JK tak mau sekadar jadi ban serep jika maju dalam pilpres nanti. Dia pun membuat kontrak politik tertulis dengan SBY yang akan dipraktikkan dalam pemerintahan jika mereka menang. Dalam kontrak itu, JK bertugas untuk mengawasi pengembangan ekonomi dan sosial. JK pun lebih berperan sebagai kepala staf ketimbang hanya pemimpin seremoni.

Nama JK sebagai jargon kampanye pun lahir setelah pasangan itu mendaftar ke KPU pada 10 Mei 2004. Pada awalnya, iklan kampanye yang akan dibuat untuk memperkenalkan pasangan ini adalah SBY-Muhammad Jusuf Kalla. "Saya tidak enak, masa saya sebagai cawapres lebih banyak mengambil *space* daripada nama beliau sebagai capres yang hanya tiga huruf." Alhasil, tim kampanye sepakat agar namanya diganti menjadi SBY-MJK. Hanya, JK punya firasat tak enak dengan nama MJK. Dia bilang, nama MJK bisa jadi diplesetkan menjadi MCK karena hanya berbeda satu huruf.

Imron Zubaidi, seorang anggota Tim Lembang 9 dari Bukaka Group pun memecah kebuntuan. Dia mengusulkan nama JK dengan menghapus M di depan. Istri JK, Mufidah menyetujuinya. Dia pun mendorong Imron agar mengusulkan kepada mantan Dirut Bukaka tersebut. Jusuf Kalla pun mengiyakan. Sejak itu, nama JK menjadi lebih populer ketimbang nama asli Muhammad Jusuf Kalla. Jurus menggunakan nama SBY-JK terbukti ampuh. Dengan jargon 'Bersama Kita Bisa', duet ini memenangkan Pilpres 2004 dan mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dengan angka telak pada putaran ke-2, yakni raihan suara 60,62 persen.

Wapres Gaya Saudagar

Duduk di kursi RI 2, JK dihadapkan dengan segudang masalah. Pada 2005, harga minyak dunia membengkak hingga 70 dolar AS per barel. Dam-paknya, harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan hingga 120 persen. Menjelang keputusan ini, terjadi diskusi menarik antara SBY dengan JK tentang kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga. Keputusan harus cepat diambil untuk mencegah krisis sosial.

SBY : Kapan dinaikkan?

JK : Kita naikkan minggu depan

SBY : Mengapa harus minggu depan?

JK : Karena itu dua hari sebelum puasa

SBY : Itu sensitif Pak Wapres

JK : Kenapa sensitif, justru sensitif setelah puasa.

Kalau puasa orang cuma makan dua kali, berarti masak cuma dua kali. Jadi, tidak banyak minyak tanah yang dipakai. Kemudian bulan puasa juga orang tidak suka pergi jalan-jalan, maka kurang bensin yang dipakai. Dan yang paling penting, orang tidak demo karena tentu mereka takut kehausan dan makruh juga puasanya kalau marah-marah (Abdullah, dkk, 2012).

Itulah gaya JK yang sederhana dan logis. Tidak hanya berhasil menaikkan harga BBM dengan meminimalisir gejolak, JK pun sukses meredam gejolak politik di Senayan. Dengan posisinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, JK bisa mengambil kebijakan dengan aman. Hanya, JK masih berpikir keras untuk dapat meminimalisir rakyat miskin yang turut menjadi menjadi korban akan kenaikan harga minyak. Terlebih, para pengguna



www.unsoed.ac.id

minyak tanah yang jumlahnya masih menjadi mayoritas di negeri ini. Harga jual Rp 700 minyak tanah per liter yang dinaikkan menjadi Rp2000 per liter pun masih menunjukkan harga tinggi. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah terlalu besar. Dalam hitungan JK, minyak tanah harusnya berada dalam angka Rp 7000-an. Harga yang tentunya bakal membuat dampak sosial besar.

Dengan berani, JK pun membuat revolusi di bidang energi yang menorehkan tinta emas dalam sejarah bangsa ini. Dia pun mencari alternatif energi yang mampu menghemat pengeluaran pemerintah adalah solusinya. Dibantu sang adik, Achmad Kalla, yang berlatar belakang Teknik Fisika dari Institute Teknologi Bandung (ITB) dan tahu banyak seluk beluk energi, JK mulai melakukan uji coba kecil. Dimintanya sang adik membandingkan langsung efektifitas penggunaan LPG dibanding minyak tanah.

Percobaan sederhana ini menuai hasil positif. Secara kalori penggunaan LPG lebih efisien dibanding minyak tanah senilai Rp1. 812 per liter. Dalam hitungan JK, dengan adanya selisih untuk alokasi konsumsi minyak tanah 10 KL, jika digantikan dengan LPG sejumlah 4,5 ton, pemerintah dapat

menghemat subsidi hingga Rp 18 triliun (pada saat ini penghematan bisa mencapai 50 triliun per tahun). “Nah, bila dengan LPG, total konsumsi yang dibutuhkan hanya dengan 4,5 juta ton saja. Artinya pemerintah bisa menghemat subsidi lebih dari separuhnya!” ungkap JK penuh keyakinan.

Asumsi-asumsi sederhana ini semakin membuat JK yakin, LPG memenuhi semua syarat untuk menggantikan minyak tanah. Beban subsidi berkurang. Tidak itu saja, LPG bakal memberikan *imej* negeri ini tak lagi terbelakang. Akhirnya dibuatlah keputusan dengan tidak mengubah secara total penggunaan uang oleh masyarakat.

Tangani Konflik dengan Manajemen Bisnis

Muhammad Jusuf Kalla seakan dilahirkan untuk bergelut dengan krisis. Sebab ketika masih berusia 25 tahun, putera Bone ini sudah harus memegang kendali bisnis ayahnya yang sedang menurun. Dan ia berhasil. Tangan dinginnya mampu menyingkirkan berbagai kesulitan dan menyelamatkan bisnis keluarganya. Lalu, pada usia berkepala enam, tangannya masih bertuah mengantarkan perdamaian di Poso dan Ambon saat menjabat sebagai Menkokesra.

Dengan merendah, ia mengatakan, upayanya dalam perjanjian Malino adalah sebagian dari tugas sebagai seorang menteri, mengatasi masalah konflik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia melihat konflik dan perselisihan akan menyebabkan kemiskinan, baik dalam bentuk materi ataupun nonmateri. Sehingga, kepada mereka yang bertikai, harus diberikan kesadaran untuk menghentikan konflik dengan cara damai bukan melalui perang.

JK lalu berupaya secara ikhlas memberikan pengertian bahwa apa yang mereka lakukan, baik itu kepada orang Islam maupun Kristen, sebenarnya semakin membawa mereka masuk neraka. Memang, dalam menangani konflik Poso dan Ambon, JK berani mempersalahkan kedua belah pihak. Ia tidak hanya memuji dan membujuk mereka yang bertikai.

JK punya resep tentang pengelolaan konflik, menurutnya konflik yang sering terjadi di Indonesia itu konteksnya memang politik. Tetapi, lebih banyak konflik yang terjadi di panggung horizontal, di antara masyarakat. ternyata, sesuai dengan hasil penelitian, konflik horizontal terbanyak

justru pecah karena masalah tanah (sumber ekonomi), misalnya antara masyarakat pengolah dan pemodal seperti di Mesuji, Bima, dan Kalimantan. Jadi kita harus tahu dulu mana sumber konfliknya, baru kita bisa memberikan jalan keluar yang paling adil. Persoalanya ternyata ada di masalah ekonomi.

Selain cerdas dalam mengetahui sumber-sumber konflik, JK memang seorang tokoh yang cukup berpengaruh terutama di Indonesia Bagian Timur. Ia sangat peduli atas percepatan pembangunan Indonesia, tak terkecuali di kawasan Timur itu. JK memang dikenal sebagai seorang anak bangsa penganut agama Islam yang taat dan berjiwa kebangsaan. Itulah sebabnya JK bisa dengan berani berbicara dengan kelompok-kelompok bertikai di Poso dan Ambon. Ia tidak berpihak kepada salah satu kelompok. Keikhlasan dan kejujurannya membawa damai tidak diragukan oleh masyarakat setempat (*tokohindonesia.com*, 2013).

JK juga dikenal biasa menghargai orang lain, termasuk orang yang berbeda pandangan dan keyakinan dengannya. Dari kecil ia memang sudah diasuh orang tuanya untuk hidup sesuai ajaran agama Islam yang dianutnya, jujur, dan menghargai orang lain.

Menjadi Capres

Meski saling melengkapi, duet SBY-JK harus 'bercerai'. SBY merasa tak lagi sehati dengan gaya JK yang suka memotong birokrasi. Hubungan mereka pun sering menjadi buah bibir di media. Publik melihat ada rivalitas di dalam istana. Kesan adanya kompetisi mencuat saat pemilihan legislatif. JK yang harus mengampanyakan partainya memberi *tagline* 'Lebih Cepat Lebih Baik'. Diusung oleh Partai Golkar, JK pun maju sebagai calon presiden. JK kemudian bermanuver menggandeng Megawati, Prabowo, dan Wiranto untuk membangun koalisi baru. Koalisi beranggotakan Partai Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura ini disebut Koalisi Besar.

Sehari setelah pertemuan Koalisi Besar, Sabtu 2 Mei 2009, pasangan JK-Win resmi dideklarasikan. JK tak membuang waktu. Pada masa kampanye, JK memaksimalkan waktunya yang hanya sebulan untuk menyosialisasikan diri dan program-programnya. Dalam sehari, putra bugis itu bisa berkampanye di dua hingga tiga kota dengan berpindah-pindah. JK bahkan

pernah menyisir tiga provinsi sekaligus dalam sehari. Lampung, Sumatra Selatan, hingga Kalimantan Barat.

Dalam kampanye-kampanyenya, JK berupaya mengangkat tema tentang 'Kemandirian Bangsa'. Dengan semangat mandiri, JK yakin Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Asia seperti India, Cina, dan Jepang. Syaratnya, dikelola dengan lebih cepat dan lebih baik. Hanya, takdir tak berpihak kepada pasangan ini. JK-Win harus kalah dan merelakan pasangan SBY-Boediono duduk di istana. Meski kalah, JK enggan melepaskan silaturahmi dengan SBY. JK pun tanpa ragu mengangkat telepon SBY dan berbicara melalui telepon yang disiarkan langsung di stasiun televisi. Dalam kesempatan itu, JK memberi selamat kepada SBY yang memenangkan pilpres.

Pada kesempatan mengisi acara di pembukaan Ospek UGM pada 2013, JK mengatakan bahwa Indonesia harus berdaulat. Berdaulat di bidang ekonomi, pangan, dan energi. Hal tersebut merupakan kunci sukses untuk menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Hakikat dasar pengusaha yang dimiliki JK, menjadi paradigma prinsipilnya dalam mengambil setiap kebijakan negara.

Terus Beraktivitas

Lepas dari jabatan sebagai wakil presiden, tak membuat JK menganggur. Dia mendapat amanah sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Pada musyawarah nasional (XIX) di Ancol, 12 Februari 2010, JK menerima tongkat kepemimpinan dari ketua PMI lama, Mar'ie Muhammad.

Di tangan JK, aktivitas sosial PMI bergerak lebih cepat. JK pun mulai dari area birokrasi dengan membidani lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7, yakni pemerintah mendukung keuangan PMI. Tak hanya itu, JK juga tak gagap saat bencana tiba. Erupsi Gunung Merapi 2011 yang memakan banyak korban jiwa membuatnya harus turun tangan. JK mengirim *haglund* untuk menjangkau tanah yang suhunya mencapai 200 derajat.

JK mengibaratkan PMI seperti koperasi. Modalnya dari masyarakat, manfaatnya untuk masyarakat. Tinggal PMI yang akan mengatur distribusinya. Oleh karena itu, JK mengungkapkan, perlu dibangun gotong royong oleh palang merah, lalu diberi tempat mall atau kampus dengan gratis dan

perusahaan swasta membantu membangun interiornya. Sementara, PMI Pusat untuk peralatannya, perusahaan untuk operasionalnya, dan relawan sebagai pelaksana. Lengkaplah PMI sebagai koperasi.

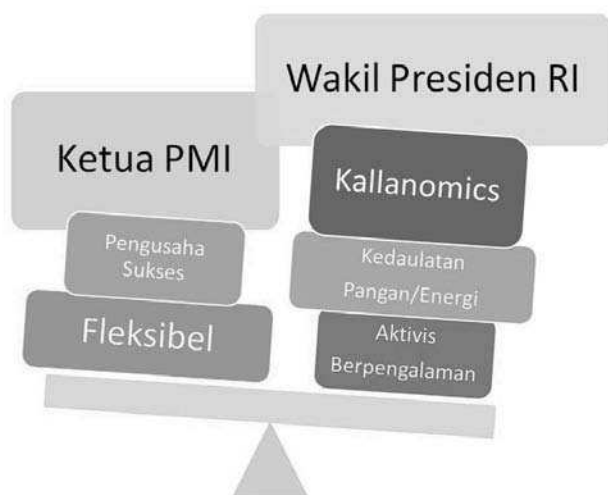
JK juga aktif untuk kegiatan pariwisata. Teranyar adalah bagaimana JK menjadi Duta Komodo. Tak kenal lelah, JK berkampanye dan mengajak publik Indonesia untuk mengirim sms memilih Pulau Komodo. JK pun meminta kepada operator, penyedia jasa dan P2K untuk mengurangi tarif SMS premium secara drastis menjadi Rp 1. Perhelatan yang diadakan New7Wonders ini pun mencatatkan komodo masuk ke dalam salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Kesibukan JK lainnya adalah di bidang agama. Dia menjadi Ketua Dewan Dakwah Masjid Se-Indonesia.

Bukan hanya sebatas terus beraktifitas, tetapi JK juga menjadi media darling di media massa nasional. Banyak pemberitaan media yang sangat positif terhadap aktifitas JK selama di pemerintahan dan setelah pemerintahan seperti saat ini. Hal itu dapat terjadi karena ketika masih menjabat wakil presiden, JK membangun hubungan yang baik dengan insan pers. Tradisi ‘jumatan’ yaitu kebiasaan jurnalis mengejar narasumber seusai yang bersangkutan selesai Jumatan, diubah oleh Kalla. Salah satu ruangan di belakang Istana Wakil Presiden diubahnya menjadi ajang jumpa pers selepas sholat Jumat.

Kedekatan JK dengan pers tidak hanya terbatas pada narasumber *doorstop*, melainkan panelis dalam diskusi di berbagai media. contohnya adalah profram acara “Jalan Keluar” yang dirancang oleh Kompas TV yang mana JK adalah pembawa acaranya. Hal-hal semacam itu yang membuat JK dekat dengan kalangan pers hingga kini.

Kallanomics

Sampai saat ini cita-cita JK tidak pernah surut untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa nomor satu di Asia. Ia memiliki visi ke depan untuk Indonesia agar lebih maju dan bermartabat. Pemikiran dan gagasannya selalu berbasis kepercayaan diri, kekuatan, dan kemandirian bangsa. Dengan memacu semangat kewirausahaan dan bisnis yang mendorong pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peduli kemajuan bangsa, Indonesia bukan hanya akan meminimalkan berbagai konglik, tetapi juga akan dihormati oleh negara lain.



JK sangat peduli dengan produk nasional. Sejak 2000-an, kemeja maupun sepatunya tidak ada yang bermerek luar negeri. Semua produk nasional. Saat menjadi Wakil Presiden RI, JK sering merazia sepatu para pejabat yang bertandang ke Istana Walpres. Baginya, mencintai produk dalam negeri tidak cukup dengan sebatas semboyan, tetapi harus diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat razia ini, para menteri saat itu, para dirjen, kemudian merazia hal yang sama ke para pejabat bawahan mereka.

JK juga orang yang begitu percaya kualitas SDM putra-putri bangsa yang kini sudah sangat mampu untuk mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Ini dapat dilihat dari beberapa infrastruktur yang paling moderen di negeri ini adalah buatan kreatifitas anak-anak negeri. JK sendiri telah membuktikannya saat membangun Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Ia sangat menyayangkan selama ini Indonesia yang punya sumber daya melimpah, tetapi tidak mengelolanya sendiri. Sumber daya energi Indonesia kemudian malah diimpor ke luar negeri. Sisa ekspornya baru kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut JK, seharusnya kebutuhan dalam negeri yang diutamakan terlebih dahulu, sementara sisanya itulah yang diekspor. Berbagai gagasannya itu terangkum dalam sistem khas JK yang sering disebut Kallanomics. Saripati Kallanomics adalah, “kemandirian bangsa, baik secara politik maupun ekonomi”.

Saat menjabat Wapres, JK diberi wewenang berdiplomasi dengan EXXON. JK berhasil membuat EXXON angkat kaki dari Blok Natuna. Namun, tidak lama kemudian wewangnya dicabut dan kontrol tidak lagi berada di tanganya. JK memiliki mimpi untuk membangun bangsa yang mulia, yang berkarakter, yang mandiri, bukan bangsa yang menjual dirinya kepada kepentingan asing. JK tidak mau bangsa ini menjadi bangsa yang kerdil, yang inferior di hadapan bangsa yang maju, agar tidak dipandang rendah oleh bangsa lain. JK selalu optimis bahwa selalu ada harapan untuk menanggulangi berbagai kemelut di negeri ini.

Soal gagasan tentang ekonomi yang dipercaya JK, dapat dilihat saat JK menjabat sebagai menteri dahulu, ketika Indonesia masih berhubungan dengan IMF. JK adalah salah satu menteri yang menentang intervensi IMF, yang notabene ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. IMF ingin membubarkan Bulog, IMF ingin agar perdagangan gula menjadi bebas, demikian pula halnya dengan perdagangan beras. JK menolak keinginan mereka yang ingin menjalankan liberalisme secara besar-besaran di Indonesia.

JK selalu beranggapan bahwa peran pemerintah masih penting untuk mengontrol pasar di dalam negeri. Bukanya kita anti ekonomi global, tetapi satu hal yang mesti diingat perdagangan global sangat tidak *fair*. Negara dunia ketiga hanya menjadi *price taker*, sementara negara maju menjadi *price maker*. Indonesia tidak bisa menentukan berapa harga dari setiap hasil bumi karena semua sudah ditentukan oleh pembeli. Yang jadi masalah, harga 1 kg kakao sangat jauh di bawah jika dibandingkan harga 1 kg Silver Queen.

JK dituduh oleh orang luar sebagai protektif. Menurutny, ia tidak apa-apa dituduh seperti itu. Yang paling penting bagi JK asset bangsa terlindungi. Hal yang sama juga saat menjabat menteri, JK kerap menolak banyak hal yang berbau asing.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Sejak kecil JK sudah diajari tentang makna bertanggung jawab. Bersama ayahnya, JK sudah diajari untuk menjaga toko dan barang dagangan, mengurus pembukuan sebagai kasir, dan menyimpan uang sebagai modal

di masa depan. Pelajaran paling berharga tersebut membentuk pribadi JK sebagai seorang pemimpin di masa depan kelak yang berintegritas dan kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Dari sisi modalitas personal, JK adalah seorang pemimpin yang dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kepemimpinan JK dalam menyelesaikan konflik sangat andal dan kreatif, seperti yang ia lakukan di Poso dan Aceh. “Jalan Keluar” adalah nama tengahnya JK. Ia bertangan dingin dalam berbagai krisis masalah, dan konflik sosial sepelik apapun sumbernya, ia selalu berhasil. Ia reda konflik-konflik tersebut dengan brilian.

Sedari muda JK memang sudah terbiasa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada disekelilingnya. Aktif dalam politik sedini mungkin sebagai pengurus kepemudaan Golkar di daerahnya, menjadi pemimpin gerakan ekstra-kampus (HMI) di kampusnya, dan sedini mungkin sudah duduk sebagai anggota DPR dan MPR di Jakarta adalah bukti bahwa politik adalah bagian awal dari hidup JK disamping bisnis perdagangan. Sehingga tidak heran ketika JK mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya.

Dari sisi material sumber daya, JK merupakan seorang pengusaha kaya raya yang sukses. Perusahaannya *seabreg*, dimana menyumbangkan pendapatan yang signifikan untuk negeri ini. JK dapat disejajarkan dengan Aburizal Bakrie dalam hal kekuatan ekonomi yang dimiliki. Politik membutuhkan uang, apalagi di era demokrasi langsung prosedural seperti saat ini. Sehingga kekuatan ekonomi capres haruslah juga kuat. Sisi sumber daya massa yang dimiliki JK juga sangat baik. Dekat dengan kalangan Islam politik: NU dan Muhammadiyah. Kekuatan basis massa Islam politik yang masih kuat hingga kini di Indonesia menjadikannya memiliki massa yang religius, sekaligus nasionalis. Hal tersebut yang membuatnya sangat tidak bisa dianggap remeh dalam soal menggerakkan orang.

Dari sisi jejaring, JK sudah tidak perlu ditanya lagi. JK punya jejaring di lokus masyarakat ekonomi yang luas, nasional maupun internasional. JK pun pernah menjadi anggota legislatif, menteri, wakil presiden, pengurus masjid, lembaga sosial, dan sebagainya yang menjadikannya ada di setiap wilayah, masyarakat politik dan masyarakat sipil sekaligus.

Alternatif kebijakan yang pernah dicetuskannya menjadikan sebuah revolusi konsumsi: dari minyak tanah ke LPG. Rasional dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pada hitung-hitungan yang matang, karena

latar belakang pengusahanya, maka menjadikan JK banyak sukses dalam kebijakan publik yang ia rancang.

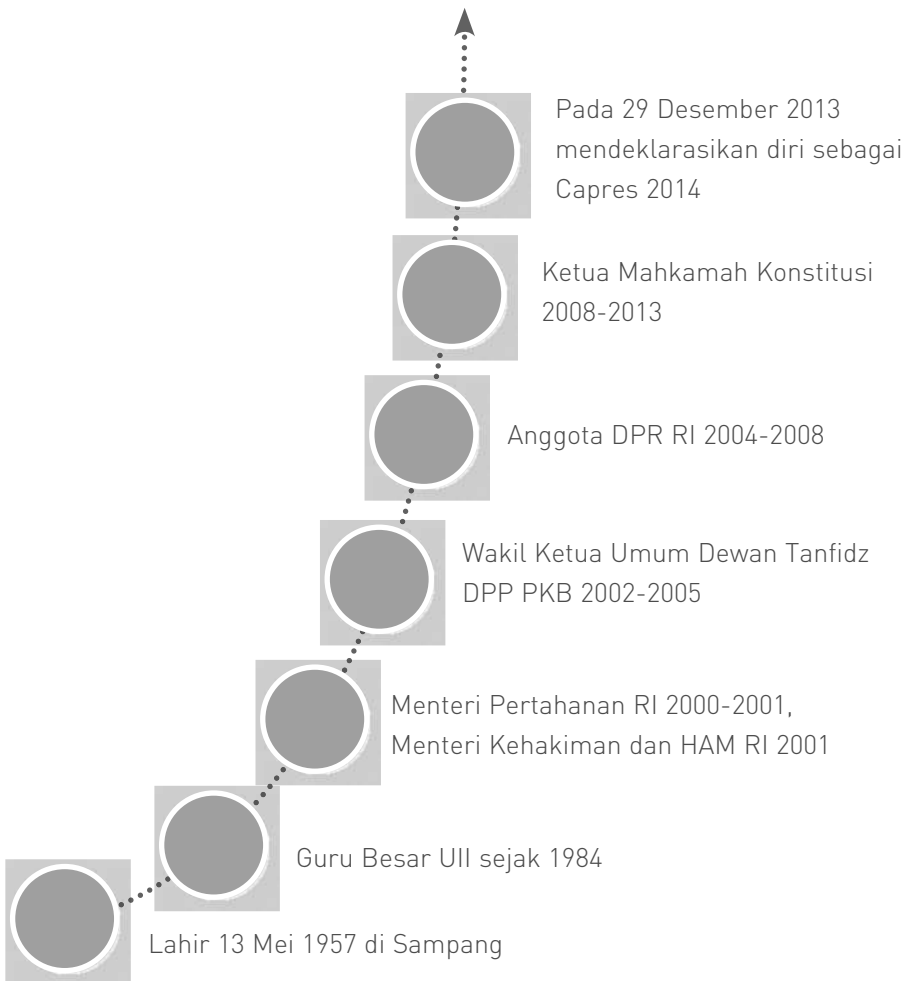
Karena itu, peluang JK untuk maju sebagai Capres 2014 sangat tinggi. *Pertama*, selain memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang baik, sebagai pengusaha ulung, menteri, dan wakil presiden, JK juga punya kharisma dan gaya kepemimpinan yang khas. Selama menjabat sebagai wakil presiden misalnya, JK dianggap pemimpin yang cekatan dan cepat tanggap ketika ada masalah. Gagasan-gagasannya brilian sehingga saat duet bersama SBY dengan posisi sebagai wakil presiden, banyak prestasi yang dicetaknya.

Kedua, soal elektabilitas. Meski JK terbilang tokoh lama, namun dari sisi elektabilitas tetap stabil. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi JK masih di urutan ke-4 di antara kandidat lainnya.

Meski demikian, kelemahan atau tantangan JK saat ini adalah tentang kendaraan politik. JK sudah tak memiliki kendaraan partai yang kuat seperti dulu. Partai Golkar yang pernah mengusungnya sebagai Capres 2009 lalu, kini sudah menentukan calon presidennya, yaitu Aburizal Bakrie. Selain itu, JK saat ini juga dianggap tokoh yang sudah kehilangan momentum. Jika di tahun 2014 mendatang ia tetap mencalonkan diri sebagai presiden, dari sisi umur ia dianggap sudah terlalu tua. Apalagi saat ini juga banyak tokoh muda yang tak kalah enerjik dan brilian pikiran-pikirannya. Sebut saja tokoh muda seperti Prabowo Subianto atau Joko Widodo.

MAHFUD MD

Pemimpin Potensial





jurnalpatrolinews.com

Mahfud MD memiliki nama lengkap Mohammad Mahfud. Ia lahir pada 13 Mei 1957 di Omben, Sampang Madura, dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah. Banyak orang bertanya kenapa di belakang namanya ada embel-embel MD. Sekilas ada yang menyangka itu gelar akademik, tapi ternyata MD singkatan nama ayahnya: Mahmodin. Sementara makna dari nama Mahfud sendiri adalah “orang yang terjaga”. Mahfud diberi nama itu dengan harapan kelak jika sudah besar jadi orang yang senantiasa terjaga dari hal-hal buruk.

Mengenai inisial MD, sebenarnya sampai lulus SD belum ada inisial tersebut. Inisial MD di belakang nama baru ketika ia memasuki sekolah lanjutan pertama, saat di Pendidikan Guru Agama (PGA). Saat di kelas I sekolah tersebut ada tiga murid yang bernama Mohammad Mahfud. Hal itu membuat wali kelasnya meminta agar di belakang setiap nama Mahfud diberi tanda A, B, dan C. Namun karena kode tersebut dirasa seperti nomer becak, wali kelas lalu memutuskan untuk memasang nama ayahnya masing-masing di belakang nama Mahfud. Jadilah Mahfud memakai nama Mahfud Mahmodin sedangkan teman sekelasnya yang lain bernama Mahfud Musyaffa’ dan Mahfud Madani.

Dalam perjalanannya, Mahfud merasa bahwa rangkaian nama Mahfud Mahmodin terdengar kurang keren sehingga Mahmodin disingkatnya menjadi MD. Tambahan nama inisial itu semula hanya dipakai di kelas, tetapi

pada waktu penulisan ijazah kelulusan SMP (PGA), inisial itu lupa dicoret sehingga terbawa terus sampai ijazah SMA, Perguruan Tinggi, dan Guru Besar. Hal itu karena nama pada ijazah di setiap tingkat dibuat berdasarkan nama pada ijazah sebelumnya. Berawal dari situlah nama resmi Mahfud menjadi Moh Mahfud MD.

Mahfud merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Tiga kakaknya antara lain Dhaifah, Maihasanah dan Zahratun. Sementara ketiga adiknya bernama Siti Hunainah, Achmad Subkhi dan Siti Marwiyah. Latar kehidupan keluarganya yang berada di lingkungan taat beragama membuat pemberian nama arab tersebut penting.

Mahmodin, ayah Mahfud, adalah pria asal Desa Plakpak, Kecamatan Pangantenan dan berprofesi sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Mahmodin lebih dikenal dengan panggilan Pak Emmo—suku kata kedua dari Mah-mo-din, yang ditambahi awalan em. Dalam surat pengangkatannya sebagai pegawai negeri, Emmo diberi nama lengkap oleh pemerintah menjadi Emmo Prawiro Truno.

Sebagai pegawai rendahan, Mahmodin kerap berpindah-pindah tugas. Setelah dari Omben, ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmodin berpindah lagi ke daerah asalnya yaitu Pamekasan dan ditempatkan di Kecamatan Waru. Di sanalah Mahfud menghabiskan masa kecilnya dan memulai pendidikan sampai usia 12 tahun. Dimulai belajar dari surau sampai lulus SD.

Soal pasangan, Mahfud menikah dengan Zaizatun Nihayati (Yatie), gadis teman kuliahnya di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, pada tahun 1982. Yatie adalah perempuan kelahiran Jember, 18 November 1959, anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Sya'roni dan Shofiyah. Zaizatun Nihayati berijazah Sarjana Hukum dan pernah bekerja sebagai guru SMU. Tetapi ketika Mahfud diangkat menjadi menteri dan harus berpindah ke Jakarta, maka pekerjaannya sebagai guru ditinggalkan, sampai sekarang.

Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas Hukum UII pada 1978 saat keduanya sama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak 1979, keduanya mulai dekat dan akhirnya berpacaran. Hubungan keduanya bertahan lama, sehingga pada 2 Oktober 1982, Mahfud dan Yatie resmi menikah di Semboro, Tanggul, Jember. Dari pernikahan itu, Mahfud dan Yatie dikaruniai tiga orang anak. Pertama adalah Mohammad Ikhwani Zein, laki-laki kelahiran 15 Maret 1984, saat ini sudah lulus dari S1

dari Fakultas Kedokteran UGM. Anak kedua adalah Vina Amalia, gadis yang lahir 15 juli 1989. Dan yang ketiga, adalah Royhan Akbar, lahir 7 Februari 1991.

Soal pendidikan, Mahfud mempercayakan ketiga anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah formal dan tidak ada satupun yang dimasukkan ke pesantren. Mahfud menilai pesantren belum bisa memberi jawaban terhadap tantangan pendidikan sekarang. Barangkali pesantren bisa membekali untuk tahapan basic (dasar) hingga SLTP. Tapi untuk tahap sesudah itu, pesantren kalau kondisinya seperti sekarang, belum bisa diandalkan untuk mengantarkan anak menyongsong masa depan yang semakin berat.

Sementara untuk Mahfud MD sendiri, karier akademisnya dimulai sebagai dosen di Fakultas Hukum UII Yogyakarta dengan jabatan Asisten Ahli Madya pada tahun 1984. Tetapi urutan itu tidak berlaku bagi Mahfud MD, sebab usai meraih gelar Doktor pada tahun 1993, ia langsung menduduki jabatan Lektor Madya. Artinya Mahfud melompati jabatan Asisten Ahli dan Lektor Muda. Lompatan itu dimungkinkan. Kemampuan berprestasi dan menghimpun kum (Cumulative Credit Point) sangat menentukan kemungkinan terjadinya lompatan. Mahfud berhasil menghimpun kum dari aktivitasnya mengajar, meneliti, menjadi narasumber seminar, menulis jurnal ilmiah dan buku, terlibat berbagai organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Bahkan dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai salah satu peserta pendidikan doktor yang menyelesaikan studinya dengan cepat. Pendidikan S-3 di UGM itu diselesaikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Sampai saat itu (1993) untuk bidang Ilmu-Ilmu Sosial di UGM hampir tidak ada yang bisa menyelesaikan secepat itu, rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun.

Tentang kecepatannya menyelesaikan studi S-3 itu Mahfud mengatakan bukan karena dirinya pandai atau memiliki keistimewaan tertentu, melainkan karena ketekunan dan dukungan dari para promotornya yaitu Prof Moeljarto Tjokrowinoto, Prof Maria SW Sumardjono dan Prof Affan Gaffar. Selain selalu tekun membaca dan menulis di semua tempat untuk keperluan disertasinya, ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud ke Amerika Serikat, tepatnya ke Columbia University (New York) dan Northern Illinois University (DeKalb) untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama satu tahun.

Ketika melakukan studi pustaka di Pusat Studi Asia, Columbia University, New York Mahfud berkumpul dengan Artidjo Alkostar, senior dan mantan dosennya di Fakultas Hukum UII yang sekarang menjadi hakim agung, sedangkan ketika menjadi peneliti akademik di Northern Illinois University, Mahfud berkumpul dengan Andi Mallarangeng yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Ketika itu Andi Mallarangeng menjadi Ketua Perhimpunan Muslim di wilayah itu sehingga Mahfud diberi satu kamar tanpa menyewa di sebuah kamar yang dijadikan masjid dan tempat berkumpulnya keluarga mahasiswa muslim di berbagai negara. Selain itu, Mahfud juga tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih derajat doktor pada tahun 1993. Dia meloncat mendahului para dosennya dan senior-seniornya di UII, bahkan tidak sedikit dari para dosen dan senior-seniornya yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbingnya dalam menempuh pendidikan pascasarjana.

Untuk menyandang gelar Guru Besar, Mahfud juga termasuk orang yang tercepat. Pencapaian itu diraih Mahfud saat usianya baru menginjak 41 tahun. Tidak heran jika pada waktu itu, Mahfud tergolong sebagai Guru Besar termuda di zamannya. Satu nama yang dapat disejajarkan adalah Yusril Ihza Mahendra, yang juga meraih gelar Guru Besar pada usia muda.

Tentu saja, gelar Guru Besar yang diraih Mahfud tak lepas dari dukungan karya tulisnya yang sangat banyak dan bervariasi, baik dalam bentuk buku teks ilmiah, jurnal maupun makalah ilmiah, artikel dan kolom di berbagai media massa, sampai *academic appraisal*. Jika dihitung dari awal menjadi dosen sampai meraih gelar Guru Besar, Mahfud hanya membutuhkan waktu 12 tahun. Hal itu menjadi sesuatu yang cukup berkesan baginya. Sebab umumnya seseorang bisa merengkuh gelar Guru Besar minimal membutuhkan waktu 20 tahun sejak awal kariernya.

Berbaju NU, Berbadan Muhammadiyah

Mahfud MD kecil lahir dan besar di lingkungan NU yang kental. Budaya nahdliyin begitu lekat menyelimuti alam bawah sadar Mahfud kecil. Ayahnya aktivis NU di Waru-Pemekasan yang pada tahun 1971 dijabloskan ke tahanan Koramil karena berkampanye untuk partai NU pada pemilu 1971, sementara Mahfud sendiri bukanlah pimpinan NU, bukan pula pengurus NU.

Dalam organisasi keagamaan tersebut di Indonesia itu, Mahfud bisa dibayangkan sosok yang “mengintimi” NU secara kultural, bukan struktural. Dengan pengertian, ia sangat dekat dengan orang-orang ataupun kyai-kyai NU, tapi tidak pernah memiliki jabatan penting dalam struktur organisasi NU. Dalam keseharian, Mahfud mempraktikkan tradisi ibadah ala NU, seperti suka tahlilan, salawatan, istighosah ataupun manakiban, termasuk melafalkan niat saat akan beribadah seperti membaca *nawaytu* atau *ushalli*.

Mahfud mencintai organisasi keagamaan NU bukan lantaran doktrin dari keluarga atau lingkungan semata. Mahfud punya argumen sendiri untuk tetap konsisten “berbaju” NU. Bagi Mahfud, NU itu organisasi inspiratif. Sikap dasar kebangsaan NU jelas: keseimbangan antara ukhuwah Islamiah (persaudaraan sesama Islam), ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Mahfud merasa pemikirannya senafas dengan NU, yakni tidak suka dengan formalisme-formalisme agama di dalam hukum maupun negara. Mahfud sangat



menghayati kehidupan NU yang sangat akomodatif dan pluralistik serta melindungi terhadap aliran-aliran primordial yang berbeda dengan tubuh bangsa kita.

Namun demikian, karena Mahfud dibesarkan di Yogyakarta yang merupakan pusat organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah, ia sangat dekat dengan kultur Muhammadiyah. Saking dekatnya, tidak sedikit pula guru Mahfud MD yang berasal dari Muhammadiyah. Sebut saja Amien Rais, begawan di UGM. Mahfud dekat dengan Amien Rais dan sangat mengidolakan ide-ide bernasnya tentang politik. Salah satu cerita Prof Amien Rais ketika mengajar mata kuliah Politik Timur Tengah di UGM pertengahan 1980 yang hingga kini masih dikenangnya adalah tentang cerita “kancil pilek”. Cerita itu pernah dituangkan Mahfud di harian Jawa Pos (13 Juni 2007) dengan judul “Politik-Hukum Kancil Pilek”.

Selain Amien Rais, Prof Syafii Maarif juga sangat dekat dengan Mahfud MD. Mahfud malah pernah menjadi asisten Buya Syafii Maarif sewaktu di UII. Di Universitas Islam Indonesia itu, Buya Syafii Maarif mengajar mata kuliah Ideologi Negara Pancasila. Tapi karena beliau sering sibuk, Mahfud lah yang mengajarkan mata kuliah tersebut hampir saban waktu.

Mahfud juga pernah menjadi murid langsung KH. Ahmad Azhar Basyir—Ketua Umum PP Muhammadiyah sebelum Prof Amien Rais—selama lima tahun. Mahfud juga pernah belajar dengan Ustad Bakir Sholih, tokoh kenamaan Muhammadiyah. Dan kerap berdiskusi dengan KH AR Fachrudin, tokoh penting Muhammadiyah.

Di sinilah Mahfud MD agaknya cocok disebut sebagai tokoh yang “berbaju” NU tetapi “berbadan” Muhammadiyah. Mahfud dapat mengakomodasi dari dua visi dan pemikiran ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu sekaligus. Selain itu, Mahfud sendiri juga pernah mengatakan, “Saya ini berhati NU tapi berotak Muhammadiyah” (Budiarti, 2010). Sebab, bagi Mahfud, NU dan Muhammadiyah itu berbeda hanya dalam hal titik tekan. NU itu tekanannya pada perilaku, ketulusan, dan kelembutan hati, sedangkan Muhammadiyah itu menekankan pada rasionalitas, kecerdasan otak dan ketegasan, sehingga lebih sistemik.

Menjadi Pejabat Tanpa Sepeser Uang

Hidup Mahfud MD bisa dibilang selalu beruntung alias berkah. Dalam beberapa *talk show* di stasiun televisi ia selalu bilang, “Tuhan telah memberi lebih dari apa yang saya minta selama ini.” Sebab, sedari kecil, cita-cita Mahfud tidak muluk-muluk: ingin menjadi guru agama. Latar belakang keluarga yang religius membuat pikiran-pikirannya juga religius.

Tapi semenjak ia melakukan pengembaraan intelektual ke kampus UGM dan UII, cita-citanya tiba-tiba berubah. Jika dihitung, jabatan yang pernah disandang Mahfud sudah lengkap. Ia pernah menjadi akademisi sekaligus politisi. Tapi yang menarik dari semua itu, Mahfud adalah tidak rakus jabatan. Mahfud selalu mengatakan bahwa jabatan yang pernah diraihny—mulai dari Guru Besar, Menteri, Anggota DPR RI, maupun Hakim Konstitusi—benar-benar anugerah Tuhan karena diperoleh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun.

Ketika Mahfud masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, ia merasa menjadi orang yang percaya diri. Sebab, ia dipilih secara adil, dalam artian ia masuk ke MK tanpa keluar sepeser uang pun, tanpa ada kolusi maupun nepotisme. Ia dipilih semata-mata karena kredibilitas dan integritasnya. Bahkan mengenai pencalonannya jadi Hakim Konstitusi, kepada teman-temannya di DPR, Mahfud berkata, “Kalau mau pilih, silahkan pilih, kalau ndak mau ya ndak apa-apa.” Sebab, sedari awal Mahfud sudah mengatakan kepada teman-temannya bahwa pencalonannya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun, baik atas nama uang bensin, administrasi, ataupun traktiran.

Karena tidak suka mengeluarkan uang ketika memperoleh jabatan, Mahfud juga tidak mau menerima uang tidak wajar karena jabatan. Meskipun kadang secara hukum tidak melanggar, tapi hati Mahfud berontak. Sebagai orang yang lama menjadi pejabat publik di berbagai bidang, tak jarang ia sering menerima hadiah, baik mengenai prestasi yang diraihny, ketika berceramah, maupun ketika kunjungan kerja. Sebagai contoh, tahun 2010 lalu merupakan tahun terbanyak Mahfud memperoleh penghargaan. Penghargaan-penghargaan tersebut biasanya berupa trophi ataupun piagam, barang berharga, bahkan ada yang berupa uang.

Pernah suatu ketika Mahfud mendapat penghargaan berupa uang Rp 20 juta dari Republika karena menjadi Tokoh Perubahan 2009. Pernah pula ia

menerima penghargaan dari kampus almamaternya UII plakat emas sebesar 66 gram. Mendapat penghargaan itu, Mahfud membatin, “Penghargaan itu kan surat keputusan, kok ada uangnya?”. Untuk membentengi dirinya dari tuduhan yang tidak-tidak, setiap mendapat penghargaan seperti itu, Mahfud langsung melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah itu sebagai gratifikasi atau tidak. Kalau KPK mengatakan itu legal, maka ia ambil kalau tidak akan segera dikembalikan kepada sang pemberi.

Tentu saja Mahfud melakukan ini bukan lantaran pencitraan atau mencari sensasi semata sebagai pejabat publik, tapi lebih karena bentuk kehati-hatian. Sebab, ibarat pepatah *nila setitik susu sebelangga*, oleng sedikit saja ia mengemban amanah, bisa berdampak fatal. Apalagi jabatan-jabatan yang dimiliki Mahfud merupakan jabatan yang harusnya bisa menjadi contoh, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi misalnya. Tentu saja, jabatan-jabatan seperti ini akan sangat berbahaya jika sedikit saja oleng atau punya cacat.

Selain itu, dari sisi gaya hidup, Mahfud juga tergolong orang yang sederhana. Ia bukan orang yang neko-neko serta rakus dengan harta. Meskipun sudah menjadi pejabat publik, ia tetap sosok yang merakyat. Bahkan dalam hal makanan, ia juga tak pilih-pilih. Pernah suatu ketika pedagang kaki lima di Yogyakarta kaget karena tiba-tiba Mahfud MD datang dengan berjalan kaki membeli nasi goreng. Pedagang kaki lima itu terkejut karena wajah Mahfud baginya tidak asing lagi karena sering tayang di televisi.

Kesederhaan inilah yang membuat Mahfud MD merasa sangat cukup dengan gaji sebagai pejabat publik selama ini. Karena itu, Mahfud selalu ngotot tidak mau menerima honor yang tidak jelas ataupun dobel dalam bentuk apapun. Hal yang paling banyak dialami mendapat honor dobel ketika ia menjadi Anggota DPR RI.

Sebagai contoh, ketika rapat kerja (raker) dengan salah satu departemen, dia sudah disangoni atau diberi uang saku oleh DPR, tapi departemen juga memberikan uang kepadanya karena sudah dianggarkan. Semua anggota DPR menerimanya karena itu uang legal, dan Mahfud tidak ada alasan untuk menolak. Mahfud pun menerima uang tersebut. Tapi setelah diterima, uang tersebut langsung disetorkan ke bank. Uang tersebut dikembalikan kepada negara sebagai setoran penerimaan negara, bukan pajak.

Hal seperti itu sering terjadi ketika Mahfud menjadi pejabat publik, khususnya waktu menjadi anggota DPR. Ia kerap mendapatkan uang dubel. Kalau uang itu legal ia terima. Tapi setelah diterima, seperti biasa uang tersebut akan disetorkan ke bank sebagai penerimaan negara. Tentu saja, Mahfud melakukan itu bukan untuk apa-apa. Mahfud ingin menjaga hatinya dari sikap ketamakan (rakus harta). Ia pun hanya akan menerima uang yang memang pantas diterimanya, sesuai apa yang dikerjakannya.

Mahfud hanya mau menerima honor dari tiga sumber. Pertama, gaji dia sebagai Ketua MK (saat masih menjabat). Kedua, honor mengajar sebagai dosen. Mahfud menerima honor mengajar sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi negeri karena jumlahnya sudah standar. Di perguruan tinggi tempat ia mengajar sudah diatur ketentuan tarif mengajar. Jadi uang tersebut jelas sumbernya (Budiarti, 2010).

Ketiga, ia menerima uang dari honor tulisan-tulisan dan royalti buku-buku. Namun karena saat ini ia sangat sibuk, ia sudah tidak lagi mengurus royalti buku-bukunya. Yang penting bukunya laku dan lancar penjualannya di pasaran, itu sudah menjadi kepuasan tersendiri baginya.

Tiga Amalan Mahfud MD

Dalam berbagai seminar ataupun *talk show*, Mahfud selalu mengatakan bahwa jabatan yang telah diembannya saat ini adalah anugerah Tuhan yang tak terkira. Ia merasa menjadi hamba yang disayang Tuhan. Dalam berbagai kesempatan, hidup Mahfud selalu beruntungan. Mahfud selalu menyadari bahwa ternyata di balik kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya terdapat rahasia luar biasa dari Tuhan yang sungguh tidak bisa diduga.

Dulu sewaktu lulus dari Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Mahfud melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Mahfud yakin diterima karena punya kompetensi. Tapi keyakinan itu tak terwujud ketika pengumuman PNS tiba. Mahfud tidak diterima yang diterima justru malah teman-temannya yang sebenarnya secara kompetensi biasa-biasa saja.

Mahfud sempat kecewa karena ia merasa murid yang pintar tetapi kenapa tidak diterima. Ia juga penasaran ingin melihat hasil tesnya kalau diperbolehkan. Tapi begitulah kalau Tuhan sudah mengatur. Mahfud baru tahu hikmah dari kegagalan itu setelah beberapa tahun ia menjadi dosen

Ull. Sebab, teman-temannya yang tidak terlalu pintar meski sudah bertahun-tahun tetap saja menjadi pegawai rendahan di Departemen Agama. Sementara karier Mahfud terus melejit.

Cerita lain yang menjadikan Mahfud selalu bersyukur dan merasa disayang Tuhan adalah tentang batalnya menjadi menteri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peristiwa itu tepatnya tahun 2004. Saat itu SBY ikut pemilihan umum dan menang. Berita bahwa Mahfud akan dilamar menjadi menteri terus beredar sepanjang September-Oktober 2004. Posisi Mahfud waktu itu adalah Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan PKB adalah partai koalisi SBY.

Selain merupakan pucuk pimpinan di partai, Mahfud juga memang memiliki kualifikasi sebagai menteri karena kemampuan, pengalaman, popularitas, dan keilmuan yang dimilikinya. Karena itu, tidak heran jika namanya selalu muncul di media massa dalam bursa menteri kabinet SBY. Apa yang diberitakan media itu tentu tidak salah karena Mahfud sendiri pernah dipanggil oleh SBY bersama Alwi Shihab di Hotel Four Session, Kuningan, Jakarta.

SBY mengatakan kalau nanti ia terpilih jadi presiden, PKB akan dapat tiga atau empat kursi menteri. Nomor urut satu dan dua Alwi Shihab dan Mahfud, sementara yang ketiga dan keempat bisa Khofifah Indarparawansah, Saefullah Yusuf, AS Hikam atau Ali Masykur Musa. Mahfud menjadi yakin bahwa dirinya akan dipinang SBY setelah ia dipanggil di kediamannya di Cikeas, Bogor. Mahfud ditanya tentang kesediaannya menjadi menteri dan Mahfud mengiyakan.

Di situlah media semakin gencar memberitakan Mahfud menjadi menteri. Waktu itu, isu santer media menyebutkan Mahfud akan menduduki pos Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun anehnya, ketika menjelang pengumuman kabinet, semua calon diundang ke Cikeas dan Mahfud tidak mendapatkan undangan. Dalam hati Mahfud membatin, ia memang tidak perlu dipanggil SBY karena sudah pernah dipanggil sendiri secara langsung.

Tapi ketika SBY mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu, ternyata mana Mahfud tidak disebut. Nama menteri dari PKB yang disebut justru Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Pada waktu itu, Mahfud memang tidak sedih, tapi agak kecewa. Kekecewaan itu lebih karena media telah begitu

santer membicarakannya. Tapi Mahfud tidak bersedih karena jabatan baginya adalah pengabdian. Mahfud kemudian pergi umrah ke Mekah bersama istri untuk menenangkan diri, mendekap ke keharibaan Tuhan.

Dan sepulang dari Mekah, akhirnya rahasia Tuhan itu terkuak juga. Suasana politik memanas dan PKB bersitegang. Gus Dur tidak mengakui menteri-menteri asal PKB dalam kabinet SBY. Akibatnya, siapapun yang jadi menteri SBY dianggap keluar dari PKB. Terjadilah polemik panjang antara Alwi Shihab, Muhaimin Iskandar, dan Gus Dur. Tak berselang lama, Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf di-resuffle dari Kabinet Indonesia Bersatu. Di sinilah Mahfud baru tahu hikmahnya kenapa ketika itu ia tidak menjadi menteri. Mahfud merasa disayang Tuhan.

Mahfud merupakan sosok pejabat yang dekat dengan Tuhannya. Ia religius tapi berpikiran inklusif. Ada beberapa amalan yang selalu ia jalankan sebagai pondasi dalam ia melangkah. Meski tidak ada momen khusus, setiap dua pertiga malam, Mahfud selalu menyempatkan diri untuk shalat malam. Bahkan ketika menjadi aktivis—setiap menghadapi momen penting—kualitas dan kekhusyuan salat malam semakin menjadi-jadi. Tiga amalan yang selalu dibaca Mahfud setiap habis salat Magrib dan Subuh adalah membaca Al-Qur'an surat Al-Waqiah, Al-Kahfi, dan surat Yasin.

Dari Akademisi, Menteri, Poltisi, hingga Penjaga Konstitusi

Harus diakui, perjalanan karier Mahfud MD termasuk komplrit. Bagaimana tidak, asam garam berbagai bentuk kekuasaan pernah didudukinya. Ia pernah mengecap jabatan penting dan strategis secara berurutan pada tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Di wilayah eksekutif, Mahfud pernah masuk ke jajaran birokrasi eksekutif di level pusat ketika di tahun 1999-2000 didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Berikutnya pada tahun 2000 diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputy Menteri Negara Urusan HAM, yang membidangi produk legislasi urusan HAM.

Tidak cukup sampai di situ, karier mantan aktivis HMI ini terus menanjak. Tahun 2000-2001, ia dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Sebelumnya, Mahfud ditawari

jabatan Jaksa Agung oleh Presiden Gus Dur tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis.

Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada 8 Februari 2001. Meski diakui, Mahfud tidak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2001 dan Senin, 23 Juli, Gus Dur lengser. Sejak itu Mahfud menjadi Menteri Kehakiman dan HAM demisioner.

Karena suka dengan tantangan, setelah menduduki jabatan eksekutif, Mahfud justru memutuskan untuk terjun ke politik praktis. Keputusan Mahfud ini cukup aneh, namun begitulah sosoknya selalu unik dan mengundang banyak tanya. Di politik, Mahfud sempat menjadi Ketua Departemen Hukum dan Keadilan DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Meski sempat memutuskan untuk kembali menekuni dunia akademis (kembali ke kampus) dengan keluar dari PAN, namun dalam waktu tidak lama, Mahfud kemudian bergabung dengan mentornya, Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di PKB, Mahfud dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2002-2005. Di tengah-tengah



kesibukan berpolitik itu, Universitas Islam Kediri (Uniska) memining Mahfud MD untuk menjadi Rektor periode 2003-2006. Meski bersedia, namun beberapa waktu kemudian Mahfud mengundurkan diri karena khawatir tidak dapat berbuat optimal saat menjadi Rektor akibat kesibukan serta domisilinya yang di luar Kediri.

Kiprah dan perjuangan Mahfud terus berlanjut, hingga akhirnya ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008. Mahfud MD bertugas di Komisi III DPR sejak 2004 bersama koleganya di Fraksi Kebangkitan Bangsa. Namun sejak 2008, Mahfud MD berpindah ke Komisi I DPR. Di samping menjadi anggota legislatif, sejak 2006 Mahfud juga menjadi Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham).

Setelah berkiprah di eksekutif dan legislatif, Mahfud akhirnya menajutuhkan pilihan mengabdikan di ranah yudikatif untuk menjadi Hakim Konstitusi melalui jalur DPR. Setelah melalui serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan bersama 16 calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR akhirnya Mahfud bersama dengan Akil Mochtar dan Jimly Asshiddiqie terpilih menjadi hakim konstitusi dari jalur DPR.

Seperti dijelaskan pada www.mahfudmd.com, salah satu hal yang mendorong Mahfud MD menjadi Hakim Konstitusi adalah panggilan hatinya sebagai ahli hukum tata negara. Selain itu juga karena ia tertarik dengan perkembangan MK. Di luar faktor itu, Mahfud juga mengaku diajak oleh Jimly Asshiddiqie untuk berjuang di MK dalam rangka membangun Indonesia dengan konstitusi yang benar. Keduanya sering bertemu karena posisinya yang sama-sama sebagai ketua asosiasi hukum tata negara.

Dalam pandangan Mahfud, sebagai lembaga Negara, MK tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Bukan karena ia sedang memimpin lembaga penafsir konstitusi tersebut, tetapi lebih disebabkan lembaga ini sama sekali belum pernah tersentuh alias steril dari sandungan kasus hukum (meski belakangan citra MK sempat rusak akibat tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK atas dugaan kasus suap). Dia menyebut ada tiga lembaga Negara yang menurutnya bagus dan bersih yaitu, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai tergetnya sebagai Hakim Konstitusi, Mahfud MD justru menuturkan tidak punya target apa-apa. Ia akan bekerja mengalir saja

sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Sebab baginya jabatan Hakim Konstitusi berbeda dengan jabatan di birokrasi lain seperti menteri atau lainnya. Kalau posisi menteri memang harus kreatif dan mendinamisasi banyak program, sementara Hakim Konstitusi sebaliknya, tidak boleh banyak program. Kalau Hakim Konstitusi banyak program justru akan berpotensi melanggar kewenangannya.

Itulah karier Mahfud yang begitu gemilang. Tidak heran jika Ketua DPR RI Maezuki Alie pernah mengatakan, Mahfud MD adalah orang yang sangat beruntung karena bisa berjalan-jalan di banyak ranah, dari akademisi ke menteri, dari menteri ke politisi, dan dari politisi ke Mahkamah Konstitusi.

Gagasan Politik: Penegakan Hukum dan Keadilan menjadi Agenda Utama

Setidaknya gagasan itulah yang disampaikan Mahfud dalam wawancaranya kepada wartawan majalah REQuisitoire (19/04/2013) tentang gagasan politiknya apabila menjadi presiden. Dalam wawancara tersebut Mahfud mengungkapkan bahwa selama ini yang menjadi fokus utama dalam pembangunan negara adalah ekonomi. Namun, yang terjadi ekonomi dikolusikan oleh asing dan konglomerat hitam. Oleh karena itu, solusinya berada pada penegakan hukum dan keadilan.

Bagaimana proses penegakan hukum dan keadilan akan dilakukan? Kuncinya menurut Mahfud harus dimulai dari *strong leadership*. Pemimpin (Presiden) akan mengisi setiap jabatan pembantunya, seperti pada menteri, Jaksa Agung, Kapolri dan lainnya dengan orang-orang yang tidak tersandera masa lalu. Dengan demikian, optimisme rakyat akan kinerja pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab akan semakin tinggi.

Melihat sekilas gambaran tersebut memang cukup menumbuhkan optimisme kepada sosok yang terbilang memiliki kompetensi yang kuat di bidang hukum dan politik. Memang selama ini, Mahfud dikenal sebagai sosok yang tidak pandang bulu untuk penegakan hukum. Terbukti, saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud berani membongkar mafia hukum yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum

melalui penyetelan rekaman pembicaraan kolusi di antara mereka (kasus cicak-buaya).

Dengan ketok palu Mahfud, puluhan kursi DPR/DPRD hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang sudah ditetapkan KPU/KPUK dibatalkan karena dianggap terjadi kecurangan dan penyimpangan. Mahfud pula yang membatalkan jabatan Jaksa Agung, membubarkan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional, membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan, membubarkan BP Migas, dan menguatkan peran DPD serta berbagai terobosan hukum lainnya. Dalam tapuk kepemimpinan Mahfud inilah, masyarakat memberi apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen, tegas dan berwibawa sehingga seringkali Mahkamah Konstitusi mendapatkan berbagai penghargaan.

Pangkal penyakit kronis bangsa ini menurut Mahfud adalah birokrasi negara. Permasalahan hukum yang terjadi selama ini cenderung tertuju kepada birokrasi yang korup. Banyak oknum birokrasi yang terjebak dengan hasrat pribadi sehingga terjerumus dalam limbah korupsi maupun kolusi. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan sistem yang kuat untuk mengelola birokrasi.



Tidak hanya itu, menurutnya, patologi birokrasi masih terjadi dalam hal aspek kinerja dan pelayanan, belum lagi kualitas kinerja birokrasi di berbagai daerah belum sepenuhnya bekerja dengan optimal sehingga mempengaruhi citra pelayanan negara kepada masyarakat. Menurutnya, jikalau kinerja dan pelayanan negara dapat berjalan secara baik, tentunya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada negara. Solusi dari permasalahan ini tentu saja kembali pada faktor kepemimpinan yang kuat dan independen.

Terkait dengan kepemimpinan, sebagai sosok yang pernah berjuang bersama Gus Dur, tentu saja Mahfud banyak terinspirasi pula dari sepak terjang kepemimpinan Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur adalah sosok pemimpin visioner, demokratis dan egaliter. Saat kepemimpinan Gus Durlah, terjadi desakralisasi istana, dimana istana yang pada mulanya terlihat angker dan sulit dimasuki orang, menjadi terbuka bagi semua orang. Bahkan, banyak orang dengan mudah untuk bertemu Gus Dur sebagai presiden, tanpa prosedur protokoler yang ketat dan berbelit-belit. Presiden benar-benar milik rakyat. Pemandangan yang sangat langka dimasa proses transisi demokrasi di Indonesia. Romantisme Mahfud pada sosok pemimpin seperti Gus Dur dituangkannya dalam Buku *Gus Dur Islam, Politik dan Kebangsaan*.

Terkait demokrasi, Mahfud berasumsi saat ini demokrasi di Indonesia berjalan tanpa kontrol alias kebablasan. Mahfud berkeyakinan bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik apabila hukum juga terbangun dengan baik. Menurutnya, demokrasi yang tidak terkontrol hanya akan menimbulkan anarki. Sedangkan, anarki hanya akan menimbulkan korupsi-korupsi politik. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa demokrasi dan hukum harus berjalan seimbang.

Memang melihat uraian *track record* Mahfud MD memberikan optimisme tersendiri tentang kapabilitasnya maju sebagai calon presiden. Setidaknya, dengan berbagai permasalahan bangsa yang terjadi sekarang ini, gagasan Mahfud untuk menempatkan hukum diatas politik bisa menjadi salah satu solusinya.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Sebelumnya sempat, Mahfud ditawarkan untuk mengikuti konvensi Partai Demokrat, sehingga menjadi kandidat capres dari Partai Demokrat. Mundurnya Mahfud dari peserta konvensi capres Partai Demokrat misalnya bisa menjadi “blunder” tersendiri bagi Mahfud. Sebab, meskipun ia berasal ingin “nyapres” dari partai lain seperti PKB dan PPP.

Namun langkah tersebut masih sangat prematur jika melihat kedua partai itu suaranya selalu tipis di parlemen. Jika PKB dan PPP tidak mampu melewati ambang batas presiden, maka tertutup sudah peluang Mahfud MD menjadi capres. Apalagi PKB yang diyakini akan menjadi “kendaraan politiknya” kini juga memiliki capres lain, yakni raja dangdut Rhoma Irama dan Jusuf Kalla.

Namun, dengan analisa potensi yang ada, Mahfud akan menentukan ijtihad politiknya dengan memilih jalan menuju RI 1 jika dimotori oleh PKB, partai yang memiliki kedekatan historis pada dirinya. Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa Mahfud lebih memilih PKB daripada partai lainnya.

Pertama, Mahfud berasal dari keluarga NU dan ayahnya pernah berjuang untuk partai NU. Sebagai PNS, ayah Mahfud, Mahmoedin, tetap setia mendukung dan memperjuangkan Partai NU. Seperti ketika pemilu tahun 1971, Mahmodin, sebagai Ketua KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) tetap membiarkan dan mendorong NU menang di TPS yang dipimpinnya. Akhirnya, setelah perhitungan suara selesai, Mahmodin dibawa ke Koramil selama dua minggu. Dari peristiwa inilah, Mahfud mulai mengagumi dan mengidolakan tokoh-tokoh NU. Apalagi sejak kecil, Mahfud juga sering diikuti dengan kegiatan-kegiatan NU.

Kedua, Mahfud memiliki kedekatan historis dengan PKB. Saat persepilihan dengan Matori Abdul Jalil, sempat ada wacana bagi kubu Gus Dur untuk mendirikan partai tersendiri. Namun, hal itu diurungkan karena nilai kebesaran dari PKB. Meskipun partai baru akan berdiri dan diisi dengan orang-orang lama di PKB (pendukung Gus Dur) tetapi partai tersebut bukan PKB. Oleh karena itu, meskipun saat ini PKB dipimpin oleh Muhaimin Iskandar yang notabene pernah berselisih dengan Gus Dur, Mahfud tetap bersedia untuk maju sebagai capres jika dicalonkan oleh partai berlambang bulan sembilan tersebut.

Ketiga, setidaknya Mahfud sudah melihat peluang yang ada dari elektabilitas PKB dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya. Elektabilitas PKB saat ini cukup bagus. Meskipun begitu, untuk maju menjadi cawapres dari PKB tidaklah mudah.

Pertimbangannya ada dua hal, apakah Muhaimin memperhatikan popularitas personal calon, ataukah hanya mempertimbangkan egoismenya sebagai pemegang kunci partai. Setidaknya nama calon-calon yang beredar, seperti Rhoma Irama, Mahfud MD, Jusuf Kalla dan kecenderungan yang lebih tampak, Muhaimin mendukung Rhoma Irama.

Namun, Muhaimin juga perlu mempertimbangkan berbagai modal politik yang dimiliki setiap calonnya. Apabila dianalisis, Mahfud memiliki modal politik sebagai berikut:

Pertama, sebagai tokoh yang meneruskan tradisi NU, Mahfud MD sering sowan ke berbagai kyai dan ulama di Indonesia, terutama basis unggulan NU yang berada di Jawa Timur. Setidaknya para kyai di Jawa Timur akan lebih memberikan restunya kepada Mahfud dibandingkan dengan Rhoma atau JK. Belum lagi kekuatan *basis* masa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang terkenal dengan kesetiaannya. Tentu saja, Rhoma tidak akan mendapatkan dukungan dari para kyai Jawa karena Rhoma berasal dari Jakarta dan memiliki *background* politik, ala kutu loncat.

Pertama, track record yang baik. Mahfud dipandang sebagai pemimpin yang memiliki sepak terjang di atas rata-rata. Di dunia akademis, ia tak bisa diragukan lagi karena selain telah menjadi Guru Besar, ia juga mengajar puluhan kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di panggung politik, Mahfud salah satu penggagas atau pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), bahkan di PKB ia juga pernah menjadi wakil ketua DPP PKB. Selain itu, untuk jabatan publik, dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif pernah ditempatinya. Ia pernah menjadi menteri, anggota DPR, Hakim Konstitusi, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Modal lain yang dimiliki Mahfud adalah berasal dari Jawa (Madura, Jawa Timur). Berkaca pada pengalaman terdahulu, Presiden terpilih adalah berasal dari Jawa. Kharisma pemimpin dari Jawa masih menjadi magnet tersendiri dalam pilpres 2014, setidaknya jika melihat hasil pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah suara untuk capres dari Jawa lebih besar.

Mahfud juga dikenal sebagai sosok yang bersih. Mahfud adalah sedikit

dari pejabat Indonesia yang kejujurannya sangat teruji. Ia dikenal pejabat yang bersih dan tidak mudah menerima hadiah dalam bentuk apapun. Ia pantang menerima honor dobel, hadiah yang tidak jelas (meskipun itu hadiah dari penghargaan atas dirinya). Ia selalu melaporkan hadiah-hadiah itu ke KPK, apakah KPK menyebutnya gratifikasi atau tidak. Ia sangat hati-hati mengenai uang, khususnya sumber uang yang didapat. Saat masih menjadi pejabat publik, Mahfud tidak mau menerima honor selain dari gaji Ketua Mahkamah Konstitusi, honor dosen di kampus, dan honor tulisan di koran dan royalti buku.

Pengalaman Mahfud yang juga pernah menjadi salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pendirian PAN, dan juga tumbuh dengan para tokoh Muhammadiyah membuat peluangnya untuk mendapatkan basis massa pendukung dari Muhammadiyah juga cukup kuat. Apalagi, jika hasil suara yang didapat PKB tidak memenuhi ambang batas parlemen, peluang untuk mendapatkan dukungan berupa koalisi dengan partai lain, seperti PAN juga cukup besar.

Meskipun modal politik yang cukup besar, tetapi tidak demikian dengan hambatan politik yang dialaminya. Sebagai sosok yang murni lahir dari akademisi dan hakim yang bersih. Mahfud mungkin akan tersisih jika diperhitungkan dari segi sisi kapasitas modal kapital yang dimilikinya. Apalagi dalam politik transaksional seperti ini, modal kapital dianggap penting sebagai salah satu nilai sendiri yang ditawarkan kandidat kepada partai, sebagaimana kita lihat banyak partai yang sekarang membuka jalan lebar bagi pengusaha yang memiliki modal kapital yang besar untuk memegang peranan penting dalam partai.

Namun, setidaknya perhitungan ini akan tereliminasi jika memang PKB tidak mengharapkan modal kapital dari Mahfud MD, setidaknya juga dibandingkan calon-calon lain yang dihembuskan (JK dan Rhoma Irama).

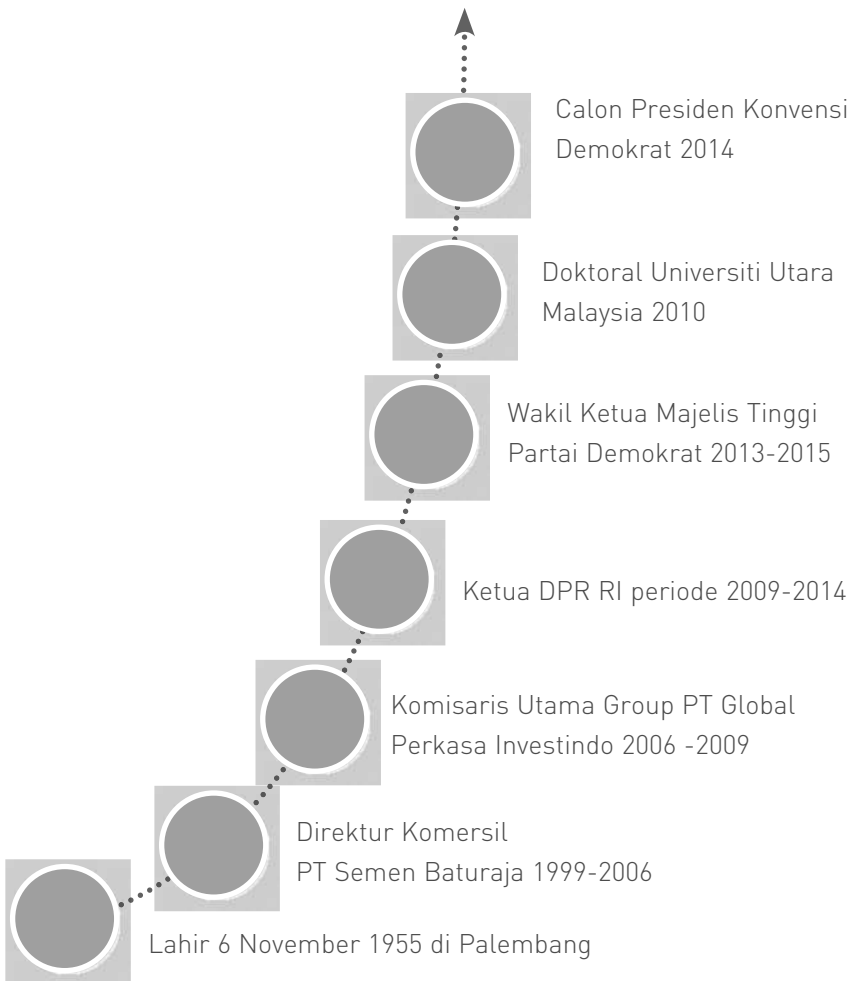
Hambatan kedua tentu saja restu pengurus internal partai karena PKB saat ini mungkin berbeda dengan PKB yang Mahfud besarkan bersama Gus Dur dahulu. Oleh karena itu, dukungan yang solid dari dalam internal partai berlogo bulan dunia tersebut cukup penting untuk membangun optimisme Mahfud dalam menyukkseskan pencapresannya. Karena kita tahu bahwa, perpecahan dukungan internal PKB terkait calon yang didukung untuk berkompetisi merebut kursi RI 1 juga membuat suara yang ada dalam internal PKB juga terbelah. Setidaknya, apabila PR ini mampu

diselesaikan Mahfud dengan komunikasi politik yang intensif maka jalan Mahfud melangkah bersama PKB akan terbuka lebar.

Menurut hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu menyebutkan posisi Mahfud masih di urutan ke-7 di antara tokoh nasional lainnya. Elektabilitas Mahfud ini mungkin akan berubah jika memang Mahfud telah resmi memiliki kendaraan politik, karena jelas kendaraan politik pengusung tentu menentukan kekuatan pendukung yang akan memilihnya.

MARZUKI ALIE

Pemimpin Potensial





prasetya.ub.ac.id

Bos BUMN yang Religius

Menjabat posisi strategis sebagai Ketua DPR, membuat nama Marzuki Alie cukup dikenal publik. Kepemimpinannya di legislatif diharapkan mampu membawa DPR menjadi institusi yang berwibawa meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk pemberantasan korupsi di dalam tubuh DPR.

Marzuki lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 6 November 1955. Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga harmonis yang bersahaja, religius dengan memegang teguh prinsip-prinsip kedisiplin, kejujuran, dan komitmen. Hal ini membentuk karakter Marzuki menjadi seorang pekerja keras.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, profesi yang dijalani maupun tugas yang diembannya, Marzuki selalu berupaya maksimal untuk memberikan hasil yang terbaik. Ketika masih duduk di bangku SMA, ia selalu mendapatkan nilai yang terbaik sebagai juara kelas dengan nilai matematika maksimal.

Ketika teman-temannya bergulat dengan bangku kuliah, Marzuki meninggalkan Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia untuk menjadi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Keuangan. Ketika ditugaskan di Palembang, Marzuki diminta ayahnya untuk memimpin perusahaan keluarga di samping melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Setelah menyelesaikan kuliahnya, Marzuki berhenti menjadi PNS dan memutuskan untuk berkarier di perusahaan negara, PT Semen Baturaja (Persero) Sumatera Selatan sebagai staf akuntansi. Sambil tetap menjalankan perusahaan keluarga dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Pasca-sarjana Universitas Sriwijaya. Prestasi akademiknya tidak bisa dipandang remeh, Marzuki memperoleh Indeks Prestasi 4.00 dari skala 4.00 saat itu. Sebuah pencapaian yang sempurna.

Selama bekerja di Semen Baturaja, kemampuan manajerial Marzuki Alie berkembang pesat. Dia pun dipercaya menjabat sebagai kepala biro di berbagai tempat, yaitu kepala Biro Umum, Biro Anggaran, Biro Akuntansi, dan Biro Pemasaran serta Kepala Departemen Keuangan.

Kompetensi Marzuki diuji ketika Semen Baturaja pada 1997 terancam bangkrut karena terimbas krisis ekonomi global. Perusahaan tersebut pun menjadi salah satu perusahaan yang menjadi pasiennya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian Kementerian BUMN menunjuk Konsultan Boston Consulting Group untuk melakukan penilaian terhadap Semen Baturaja dan menyimpulkan bahwa perusahaan itu harus dilikuidasi. Namun Marzuki tidak sependapat dengan keputusan itu. Menurutnya hal tersebut bukan solusi terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Kementerian BUMN pun kemudian menunjuknya sebagai Direktur Komersial Perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan pada 1999. Berbekal pengalaman dan ilmu keuangan yang dimiliki, ia dan timnya dengan penuh percaya diri melakukan penyehatan perusahaan melalui restrukturisasi keuangan senilai Rp 488 miliar. Dia juga menyelesaikan pembangunan pabrik yang terbengkalai.

Dia pun berhasil. Utang tersebut berhasil dibayar dengan *cash settlement* pada 2000. Nilai aset perusahaan tersebut pun membaik. Dari hasil penilaian dari Independent Appraisal Company pada 2001, aset Semen Baturaja melonjak menjadi sebesar Rp 1,2 triliun dari *negative value* berdasarkan

penilaian Boston Consulting Group pada 1999. Semen Baturaja pun berhasil keluar dari BPPN dan menjadi perusahaan yang sangat sehat.

Atas keberhasilan ini, Marzuki diangkat menjadi Direktur Utama pada November 2001. Namun sayangnya, pengangkatannya tidak pernah dieksekusi, akibat adanya intervensi politik. Jabatan tersebut justru diberikan kepada karyawan Departemen ESDM eselon III atas rekomendasi seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Januari 2002.

Peristiwa tersebut mendorongnya untuk masuk ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat sebagai Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumsel. Sebagai bentuk konsistensi sikapnya, Marzuki mengajukan surat permohonan berhenti beberapa kali, namun permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Menteri BUMN. Permohonan tersebut baru dikabulkan pada akhir 2005. Marzuki bisa berhenti sepenuhnya dari Semen Baturaja dan memulai karier politiknya.

Marzuki pun kemudian menjadi fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan ikut membawa partainya menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif serta pemilihan presiden pada 2004. Selanjutnya pada 2005 dia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Pada Pilpres 2009, Marzuki Alie pun dipercaya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono. Hasil Kongres II Partai Demokrat di Bandung 2010, Marzuki dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat 2010-2015. Marzuki juga sangat aktif dalam organisasi-organisasi Pendidikan, Sosial, dan Kepemudaan, Keagamaan, dan Profesi. Kesenangan berorganisasi memang sudah tumbuh dalam dirinya sejak duduk di bangku sekolah.

Dalam organisasi sosial keagamaan, Marzuki Alie aktif sebagai Ketua Dewan Ahli Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) dan juga sebagai Dewan Penasihat Jammiyatul Qura' wal Huffadzh, salah satu lembaga Otonom di PB Nahdatul Ulama. Banyak teman sepergaulannya yang tidak sadar kalau dia adalah seorang yang religius. Mereka bahkan kaget ketika Marzuki menjadi Imam sholat Jum'at di Masjid Al-Markaz Jenderal Moh Yusuf Makasar saat perhelatan Muktamar NU di Makasar. Atau ketika dirinya

memberikan Khotbah Jum'at di Masjid Istiqlal Jakarta, serta memberikan tausyiah Ramadhan di Masjid Istiqlal di Kantor Komisi Yudisial.

Selain agamis, sosoknya adalah pluralis. Dia diterima di hampir setiap golongan agama lainnya. Dia malah menjadi penasehat Yayasan Klenteng Kioe Lie Tong. Selain itu, mewakili keluarga Cokorda Raka Sukawati untuk menyampaikan sambutan dalam acara Plebon, yaitu prosesi pembakaran mayat atas meninggalnya istrinya di Puri Kantor Ubud.

Marzuki percaya, perjalanan karier profesional yang mulus serta lompatan karir politik yang fenomenal tidak terlepas dari jalan yang diberikan Tuhan. Dia memiliki sikap yang tidak *ngoyo* dan mengalir apa adanya. “Saya punya prinsip, apapun yang saya kerjakan yang penting bermanfaat bagi umat. Selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas,” ujarnya.

Pengalaman Pahit yang Berharga

Kombinasi pengalaman pahit, reformasi politik, dan figur Presiden SBY menjadi fondasi dan semangat bagi Marzuki Alie untuk berpolitik. Sebelum bergulat di dunia politik, Marzuki Alie adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Keuangan (1975-1980). Merasa kurang nyaman dengan budaya kerja PNS, ia beralih ranah profesi ke PT Semen Baturaja dan berhasil mencapai posisi tinggi. Pengalaman dan kariernya di situlah yang menjadi titik tolak dalam hidup Marzuki selanjutnya.

Akibat krisis moneter pada 1997, berdasarkan kajian para konsultan handal, perusahaan semen milik negara tersebut divonis bangkrut bersama dengan beberapa BUMN lain. dalam kapasitasnya sebagai Kepala Non Teknik Proyek OPT II, Marzuki mengajukan solusi; kerja sama dengan Cemex Mexico, salah satu pemasok dan produsen bahan baku bangunan terbesar di dunia, dalam bentuk akuisisi.

Perusahaan berhasil diselamatkan dan bertahan hidup tanpa bantuan pemerintah. Nilai aset perusahaan meningkat pesat. Ramalan para ahli di Boston Consulting Group meleset.

Prestasi ini membuat Marzuki ditunjuk sebagai Direktur Utama pada 2011. Tetapi, kenaikan jabatan Marzuki tak pernah terjadi, sebab terjadi

campur tangan politik salah satu partai besar di tanah air. Peristiwa penjejalan tersebut mendorong Marzuki untuk masuk ke politik, lalu bergabung dengan Partai Demokrat.

Amanah Sebagai Ketua DPR

Pada momen pelantikan anggota DPR periode 2009-2014, marzuki menyebutkan perbaikan citra lembaga legislatif merupakan salah satu target dan tugas jajaran DPR sekarang. “Kekurangan masa lalu akan kami perbaiki”, ujar Marzuki.

Demi mencapai target, ia mengatakan bahwa diperlukan sistem baru untuk membangun DPR sebagai sebuah lembaga yang aspiratif. “Sistem tersebut tidak semata-mata terkait dengan jaminan kelengkapan teknis operasional yang memperlancar tugas dan kinerja Anggota Dewan, tetapi juga yang lebih penting adalah menjamin berkembangnya kualitas sumber daya manusia DPR, sehingga mampu menghadapi dan menjawab berbagai tantangan dan kendala yang kompleks”, kata Marzuki. (www.marzukialie.com)

Janji Marzuki terlihat mulai ditunaikan lebih kurang satu setengah tahun kemudian. Di awal 2012, Marzuki tanpa ragu datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan sejumlah dokumen terkait proyek bermasalah di DPR terhitung sejak 2010. Diantaranya, proyek renovasi ruang banggar yang menjadi ramai dan fenomenal di pemberitaan media massa karena proyek renovasi itu bernilai mencapai Rp 20 miliar.

Tidak sedikit pun orang heran atas pelaporan proyek tersebut oleh Marzuki. Sebab ia merangkap pula sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), maka secara teoritis ia tahu betul tentang keberadaan semua proyek di DPR tanpa terkecuali. Namun menurut Marzuki, dalam level praktik tidak demikian. Menyadari ada beberapa celah tak terdeteksi dalam pengawasan proyek DPR, maka ia menyerahkan ke KPK untuk melakukan penyelidikan.

Agaknya, Marzuki sudah gerah dengan stereotipe publik. Barbagai isu miring soal *penilepan* uang negara tidak berhenti menerpa lembaga tempat ia bernaung. Mendatangi KPK bisa jadi langkah awal yang baik.



Berbekal pengalaman dan kiprahnya, setelah terpilih sebagai anggota DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) yang disebut sebagai Dapil neraka pada Pemilu 2009, Marzuki pun diberikan amanat yang tidak ringan. Mereka diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat dan didukung oleh fraksi-fraksi di DPR lainnya sebagai Ketua DPR periode 2009-2014.

Pada pidato pelantikannya sebagai Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan bahwa tugas kepemimpinannya di DPR merupakan amanat mulia yang menuntut tanggungjawab tinggi. Amanah tersebut harus senantiasa dijaga dan ditunaikan secara optimal.

Menurutnya, persoalan citra DPR yang kian terpuruk juga tidak terlepas dari kualitas kinerja sekretariat jenderal yang sangat mempengaruhi pencitraan lembaga wakil rakyat. Selama kepemimpinannya, Kesenjangan DPR mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak 2010 sampai 2013 ini.

Selain itu, Setjen DPR juga menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai badan publik yang proaktif dalam persiapan, pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai badan publik terbaik dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah ditetapkan menjadi model nasional keterbukaan informasi publik.

Setjen DPR pun mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2012 dengan predikat nilai "CC". Lembaga ini pun menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas kinerjanya yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara tahun 2011 sebagai juara kedua kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara untuk kelompok kementerian dan lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 satuan kerja.

Pada Juli 2012, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI pun telah ditetapkan sebagai Koperasi Terbaik urutan ke-5 dari 342 Koperasi Primer Fungsional di Wilayah DKI Jakarta. Penghargaan Terbaik UMKM AWARD 2012 untuk kategori "Koperasi Karyawan". Setjen DPR RI juga secara menyeluruh te-

lah menerapkan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE). DPR juga telah menyelenggarakan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik berbasis online. Ini prestasi luar biasa, sebab selama ini sekretariat jarang menerima penilaian tanpa pengecualian. Ini artinya, DPR telah menjadi lembaga negara yang paling transparan sejak era Marzuki Alie.

Secara pribadi, Marzuki Alie pun memiliki prestasi yang membanggakan sebagai Ketua DPR. Dia menjadi pimpinan beberapa parlemen internasional, yakni Presiden SEAPAC (*South East Asia Parliamentarians Against Corruption*) 2012-2013, *President of Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC)* atau Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), *President of Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *President of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, dan Presiden *Faspped (Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education)*.

Terakhir Marzuki Alie dipercaya sebagai *Persident of 2nd World Ecological Safety Assembly (WESA)*, menggantikan Perdana Menteri Kamboja Samdech Hun Sen sebagai *1st President of WESA*. Dalam kunjungannya ke London mendampingi Presiden SBY, Marzuki Alie mendapat gelar kehormatan dan Ratu Elizabeth II sebagai *Knight Commander in order of St. Michael and St. George* pada 2012.

Pengalamannya yang cukup panjang di bidang politik, membuat Marzuki Alie pun menelurkan sejumlah buku. Bukunya yang cukup menarik adalah *Pemasaran Politik di Era Multipartai*. Buku ini memberikan sejumlah langkah untuk menekan biaya kampanye politik. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya tentang hal ini saat menempuh pendidikan strata 3 bidang ilmu *marketing politics* di Universiti Utara Malaysia, Sintokh, Kedah Malaysia, membuat buku ini patut disimak.

Dalam buku tersebut, Marzuki menyoroti banyaknya anggota dewan yang menghabiskan dana miliaran rupiah demi meraih kursi di Senayan. Dia pun mengaku merogoh kantong saat Pemilu 2014, tapi angkanya tak sampai segitu. Bahkan boleh jadi ongkos politiknya terbilang hemat. Dia juga berhasil menekan ongkos politiknya saat pertama kali memulai karier politik di DPR.

Pada saat politisi lain mencalon diri dari kampung halaman masing-

masing, suami Asmiyati ini justru memilih dapil DKI III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Marzuki sadar dirinya butuh dana besar untuk pasang baliho, cetak selebaran, dan bikin alat kampanye lainnya. Terasa berat di kantong, ia lalu memutar otak.

Muncullah ide kegiatan untuk mengatasi masalah masyarakat di wilayahnya. “Modal saya, dua unit mesin penyemprot nyamuk (*fogging*),” ujarnya. Kebetulan, kata Marzuki, saat itu baru saja pergantian musim dari penghujan ke kemarau. Waktunya jentik nyamuk berkembang biak. Dibantu sejumlah relawan, Marzuki menghubungi ketua RT yang wilayahnya jadi sasaran penyemprotan nyamuk. (www.jurnalparlemen.com, 2013)

Kegiatan ini tidak dipungut biaya. Asalkan rumah yang sudah disemprot boleh ditemplei stiker bergambar Marzuki Alie lengkap dengan ajakan mencoblosnya. Marzuki menyediakan obat nyamuk yang bagus sehingga efektif memberantas jentik nyamuk dan warga pun senang, tidak menolak.

Marzuki juga membuat buletin masjid yang dibagikan menjelang shalat Jumat. Karena buletin masjid, tentu saja tidak ada ajakan memilih sosok atau partai politik tertentu. Tapi nama sang penulis buletin, yang tak lain adalah calon anggota DPR, tercantum di sana. Sejumlah strategi inipun terbukti berhasil mengantarkan Marzuki Alie ke Senayan bahkan menjadikannya sebagai Ketua DPR.

Loyalis Demokrat

Karier Marzuki Alie di panggung politik nasional relatif masih seumur jagung. Tetapi tak tanggung-tanggung, pada kesempatan pertama Marzuki masuk ke lingkungan Senayan, ia langsung ditunjuk oleh pemangku tertinggi Demokrat, Presiden SBY, untuk mengisi jabatan tertinggi di DPR.

Marzuki mengalahkan kandidat terbaik lain dari Partai Demokrat, antara lain Taufik Effendi (mantan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara), Hayono Isman (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Orde Baru), dan Syarif Hassan (Ketua FDP DPR). Sungguh pencapaian yang luar biasa.

Memang, jika kita bicara tentang Partai Demokrat, dan secara khusus Presiden SBY, Marzuki memang memiliki tempat istimewa. Kesetiaan

Marzuki pada Partai Demokrat, terlebih pada sang ketua, tak perlu diragukan lagi.

Pada Pilpres 2004 dan 2009, Marzuki tidak pernah absen sebagai tim kampanye Presiden SBY. Pada Pilpres 2004, Marzuki adalah Koordinator Sumatera Tim Pemenangan SBY-JK, dan ia pun sukses mendongkrak suara PD di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada Pilpres 2009, Marzuki kembali bekerja keras sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono untuk membawa mereka ke kursi RI 1 dan RI 2. Kerja keras Marzuki terbayar, SBY-Boediono meraih 54 persen suara nasional.

Kemandirian Inovasi dan Iptek

Marzuki Alie percaya bahwa Indonesia membutuhkan kemandirian inovasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk bisa berkembang menjadi bangsa yang maju. Apalagi di era yang semakin terbuka dan global, masyarakat Indonesia harus lebih bersiap.

Menurutnya, tolak ukur kemajuan suatu bangsa era modern saat ini adalah inovasi dalam sains. Namun demikian, menempatkan Iptek dalam kehidupan manusia harus ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Penguasaan Iptek berkembang menjadi faktor penentu daya saing. Oleh karena itu, inovasi Iptek harus mandiri guna mendukung perekonomian nasional. Konsitusi negara telah memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek. Dalam masa Orde Baru, GBHN memberikan landasan haluan bagi setiap tahapan rencana pembangunan nasional. Memasuki era reformasi, politik kemandirian pengembangan inovasi dan Iptek dikukuhkan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2002 yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2004-2025.

Dalam konstelasi politik global dewasa ini, globalisasi ekonomi semakin memperkuat lahirnya sebuah rezim ekonomi global yang tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang di satu sisi. Namun demikian, pada saat yang sama, globalisasi ekonomi juga menawarkan peluang manfaat ekonomis yang bisa diraih semua bangsa. Dalam pemikiran seperti ini, pengembangan inovasi dan

penguasaan Iptek yang bersifat mandiri menjadi agenda nasional setiap bangsa.

Menurutnya, ruang yang bisa dikelola oleh negara dalam koridor ini bisa dilihat dari beberapa hal. Politik alokasi belanja publik untuk kegiatan yang mendukung bagi pengembangan inovasi dan Iptek. Marzuki mengatakan, total belanja APBN untuk penelitian dan pengembangan hanya 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. *Oleh karena itu*, perlunya realokasi peruntukkan anggaran pendidikan untuk kegiatan pengembangan inovasi dan pengembangan Iptek.

Pemerintah juga harus memperkuat sinergitas antarsemua komponen pemangku kepentingan. Padahal pemerintah harus bisa bekerja sama dengan pelaku usaha dan akademisi untuk meningkatkan kemandirian inovasi dan iptek. Tak hanya pemerintah, DPR pun menurutnya harus ikut mendukung kemandirian inovasi dan Iptek. DPR harus memberikan komitmen politik penuh dalam mendorong dan mengawal pemerintah untuk melakukan upaya terobosan politik dalam rangka menguatkan kemandirian inovasi dan pengembangan Iptek ke depan.

Melalui fungsi legislasi, DPR mendorong semua komponen pemangku kepentingan untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Dalam konteks inilah, DPR memberikan ruang publik yang luas dalam proses revisi peraturan perundang-undangan terkait. Hal yang sama dalam kerangka fungsi anggaran, khususnya dalam penentuan disain politik anggaran untuk pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek yang lebih proporsional.

DPR pun perlu memberikan kemauan politik yang kuat dalam urusan pengembangan inovasi dan Iptek secara mandiri dalam rangka menopang agenda pembangunan jangka panjang. Untuk itu, optimalisasi pendayagunaan segenap sumber daya dan penguatan kualitas SDM secara nasional harus diperkokoh berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta berkelanjutan dan demokratis. Pemerintah, dunia industri, dan lembaga penelitian atau perguruan tinggi harus bersinergi dan memperkokoh daya saing perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pengalaman, gagasan, dan prestasinya di DPR RI, dan tentunya keberaniannya, diam-diam langkah awal berani Marzuki untuk melapor proyek mencurigakan di DPR mengesankan salah satu petinggi Gerindra, Martin Hutabarat. Ketua DPP Partai Gerindra itu menganggap upaya Marzuki membersihkan lembaga tinggi negara dari citra “kandang korupsi” oleh publik patut dipuji.

Komentar Martin kian menggelitik perhatian media dan berbagai kalangan, dengan mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Dewan Pembina PD itu tengah dilirik untuk mendampingi petinggi Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden.

Kabar tentang pencalonan Marzuki di Pilpres 2014 ini tidak hanya dari Gerindra, tetapi juga dari partai asal Marzuki. Marzuki memutuskan untuk ikut menjadi salah satu kandidat calon presiden konvensi Partai Demokrat. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa nama Marzuki sudah ada di antara salah satu dari 10 tokoh yang ada di kantong Presiden SBY untuk menggantikan dirinya.

Marzuki dan Konvensi

Dalam pidato pemaparan visi dan misi dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat pada Januari 2014, Marzuki memiliki gagasan untuk memajukan dan membangun Indonesia. Dari perjalanannya selama menjabat sebagai Ketua DPR, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, yaitu biaya hidup yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena harga pangan yang mahal, penyediaan energi yang dirasakan mahal dan atau kadang kala langka, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang belum menjangkau ke seluruh wilayah, transportasi yang mahal karena terbatasnya infrastruktur, semakin maraknya korupsi dan lain sebagainya.

Menurut Marzuki, “demikian banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat, maka tidak mungkin mampu kita selesaikan apabila kita berpikir secara segmented atau sektoral”. Oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin harus mampu melihat permasalahan pembangunan secara holistik serta dilandasi dengan pemahaman ke Indonesiaan yang menyeluruh. Dari kesemua persoalan tersebut, maka Marzuki dapat merumuskan tantangan



marzukialie.com

yang dihadapi oleh Bangsa ini antara lain adalah sebagai berikut; *pertama* adalah tantangan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut mencakup antara lain (besaran makro), inflasi yang didorong oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok, defisit APBN dan hutang internasional, serta defisit transaksi perdagangan internasional maupun jatuh temponya hutang internasional yang akan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang kuat dunia yang pada akhirnya secara tidak langsung akan mengganggu kapasitas daya beli masyarakat.

Kedua, tantangan rendahnya sebaran layanan pendidikan yang memadai yang mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dasar di remote areas, kurangnya rasio tenaga didik yang cakap, serta masih belum meratanya pendidikan dasar yang murah dan terjangkau. *Ketiga*, tantangan minimnya sebaran layanan kesehatan masyarakat. Antara lain diindikasikan kurangnya jumlah tenaga medis khususnya di luar Jawa dan Sumatera, baik un-

tuk layanan yang terkait dengan penyakit, maupun yang terkait dengan kecukupan gizi, kesehatan balita, dan kehamilan.

Keempat, infrastruktur dasar yang belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari buruknya kualitas dan rendahnya kuantitas infrastruktur (misalnya ketersediaan transportasi masal, jalan dan jembatan), akan mendorong tingginya biaya ekonomi atas penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Disamping tingginya biaya ekonomi bagi masyarakat, buruknya kualitas infrastruktur akan menghambat laju penyebaran informasi dan pengetahuan serta teknologi kepada masyarakat, khususnya di luar wilayah Jawa dan Sumatera.

Kelima, demokratisasi dan desentralisasi pembangunan daerah. Beberapa kajian dari beberapa perguruan tinggi menyatakan bahwa proses demokratisasi di Indonesia sudah sangat 'bebas', yang dapat dikatakan sebagai tahap yang berlebihan. Prasyarat dasar dari terwujudnya demokratisasi yang baik, masih belum dapat dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain, tingkat pendidikan dasar masyarakat yang baik (untuk memudahkan proses edukasi kesadaran keterwakilan politik dan bernegara), ketersediaan media yang berimbang (untuk meminimalkan asymmetric information), ketersediaan dukungan kelembagaan yang kredibel bagi proses demokrasi (lembaga pemilu, dan peraturan pendukungnya), serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana kunci proses demokratisasi. Permasalahan yang senada juga muncul dari sisi pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah. Dari sisi desentralisasi ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat banyak, seperti pemekaran wilayah dan beban biaya pembangunan, korupsi yang 'terdesentralisasi', koordinasi pembangunan antara wilayah yang menjadi lebih rumit, serta munculnya kooptasi dari 'elit lokal' terhadap target pembangunan.

Langkah 1

KEDAULATAN EKONOMI

(green economy, antara lain mencakup kedaulatan pangan dan kedaulatan energi)

Langkah 2

KEDAULATAN PENGELOLAAN POTENSI BANGSA

(potensi manusia, potensi budaya, potensi iptek, potensi alam termasuk di dalamnya potensi kelautan nasional dan lain sebagainya)

Langkah 3

KEDAULATAN WILAYAH

(keamanan dalam negeri serta pencegahan korupsi)

Keenam, korupsi dan penegakan hukum. Sangat banyak tantangan pada upaya penanggulangan korupsi dan penegakan hukum. Korupsi yang masih merajai para penegak hukum, serta para pimpinan lembaga pemerintahan, menjadi salah satu bukti kondisi buruknya penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya mental para penyelenggara pemerintahan/negara. Proses penegakan hukum, disertai contoh kepemimpinan yang kredibel, dan edukasi masyarakat mengenai korupsi dan dampaknya, akan menjadi upaya yang cukup ampuh dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Edukasi masyarakat untuk mewujudkan “budaya disiplin dan jujur”, menjadi mendesak, mengingat secara ‘samar’ telah ada budaya permisif atas abuse of power baik dalam upaya adanya keuntungan finansial maupun non-finansial.

Ketujuh, wibawa diplomasi internasional. Reposisi Indonesia sebagai negara besar dengan bentang luas wilayah, kekayaan potensi alam, dan jumlah penduduk yang ada, sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh dalam diplomasi internasional dan menjadi bangsa bermartabat dihadapan bangsa bangsa lain di dunia.

Marzuki Alie dalam pidatonya mengatakan, “bila saya diamanahkan untuk memimpin gagasan besar NKRI, maka saya akan mewujudkan Ke-

daulatan sebagai solusi pembangunan nasional, mencakup; *pertama*, kedaulatan ekonomi (green economy, antara lain mencakup kedaulatan pangan dan kedaulatan energi). *Kedua*, kedaulatan pengelolaan potensi bangsa (potensi manusia, potensi budaya, potensi iptek, potensi alam termasuk di dalamnya potensi kelautan nasional dan lain sebagainya). *Ketiga*, kedaulatan wilayah, keamanan dalam negeri serta pencegahan korupsi. Apa yang akan kami lakukan tersebut, adalah demi masa depan anak dan cucu kita di masa yang akan datang”.

“Saya ingin menegaskan lagi pernyataan saya dalam pidato deklarasi konvensi lalu, bahwa saya, Marzuki Alie, akan mendedikasikan diri saya menjadi “ruang” terbaik bagi seluruh anak bangsa, menghidupkan pemimpin-pemimpin di pusat dan daerah, yang unggul dan berkeadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat. (marzukialie.com, 2014)

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Marzuki Alie merupakan seorang tokoh baru di dunia politik Indonesia. Walaupun masih terbilang baru, prestasi yang diperoleh Marzuki di DPR tidaklah sedikit. Sebelum menjadi Ketua DPR RI, Marzuki seharusnya adalah Direktur Utama Semen Baturaja, tetapi diganjal oleh intervensi politik. Pengalaman yang dimilikinya dalam menolak perusahaan yang nyaris bangkrut dan divonis oleh lembaga konsultan ternama, membuat dirinya patut diacungi jempol sebagai “orang yang hebat mengurus perusahaan dan organisasi”. Tidak berlebihan ketika kemampuan hebat Marzuki terhadap PT Semen Baturaja, dapat diandalkan untuk mengurus republik ini. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, dan Marzuki Alie memilikinya. Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat mengeluarkannya dari krisis, dan Marzuki Alie adalah orang yang tepat untuk diandalkan berkat pengalamannya.

Modalitas kapabilitas pendidikan Marzuki Alie sangat baik. Meraih gelar doktor di Malaysia, dan memiliki intelektualitas tinggi karena sejak kecil sudah meraih nilai-nilai yang membanggakan. Nilai matematika dan ilmu logika Marzuki Alie adalah yang terbaik dan maksimal di kelasnya, tidak heran ketika Marzuki memimpin perusahaan dan lembaga legislatif, setiap

lembaga tersebut berbenah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Marzuki Alie adalah seorang yang rasional dalam mengambil sikap dan keputusan manajerial.

Modalitas sumber daya material yang dimiliki Marzuki Alie sudah terbangun dari banyaknya aktivitas keorganisasian di segala sektor, mulai dari organisasi politik, kepemudaan dan kemahasiswaan, profesi, dan sebagainya. Marzuki juga merupakan salah satu petinggi di Partai Demokrat, sehingga memiliki basis massa yang kuat di lingkaran Demokrat. Tidak hanya itu, Marzuki adalah seorang yang religius. Marzuki aktif di organisasi keislaman yang membuat dirinya juga memiliki basis massa Islam politik, pernah menjadi pengurus di ISNU membuatnya memiliki simpati dan kedekatan dengan kelompok Nahdatul Ulama. Marzuki dapat memandaatkan kekuatan basis massa Islam politik yang masih menjadi kekuatan penting di Indonesia.

Dari sisi modalitas jejaring nasional, Marzuki sudah mantap karena merupakan pengurus partai pemenang pada Pemilu 2009. Jejaring internasional yang dibangun Marzuki selama menjadi Ketua DPR RI pun sangat baik di bidang anti-korupsi dan organisasi parlemen negara-negara Islam, sehingga memang jejaring basis Islam politik

Dari sisi peluang, Marzuki Alie cukup memiliki peluang menjadi capres di Pilpres 2014. *Pertama*, masuknya Marzuki sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat menjadi peluang penting. Jika ia bisa memenangkan konvensi, maka pintu menjadi capres (bahkan presiden) sangat terbuka lebar. *Kedua*, dari sisi pengalaman, Marzuki memiliki *track record* yang cukup membanggakan. Selain saat ini menjabat orang nomor satu di DPR RI, dalam pergaulan internasional ia juga cukup diakui.

Sebagai misal, ia pernah menjadi pimpinan beberapa parlemen internasional, yakni Presiden *SEAPAC* (*South East Asia Parliamentarians Against Corruption*) 2012-2013, *President of Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC)* atau Parlemen Negara-Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), *President of Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *President of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, dan Presiden *Faspped* (*Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education*).

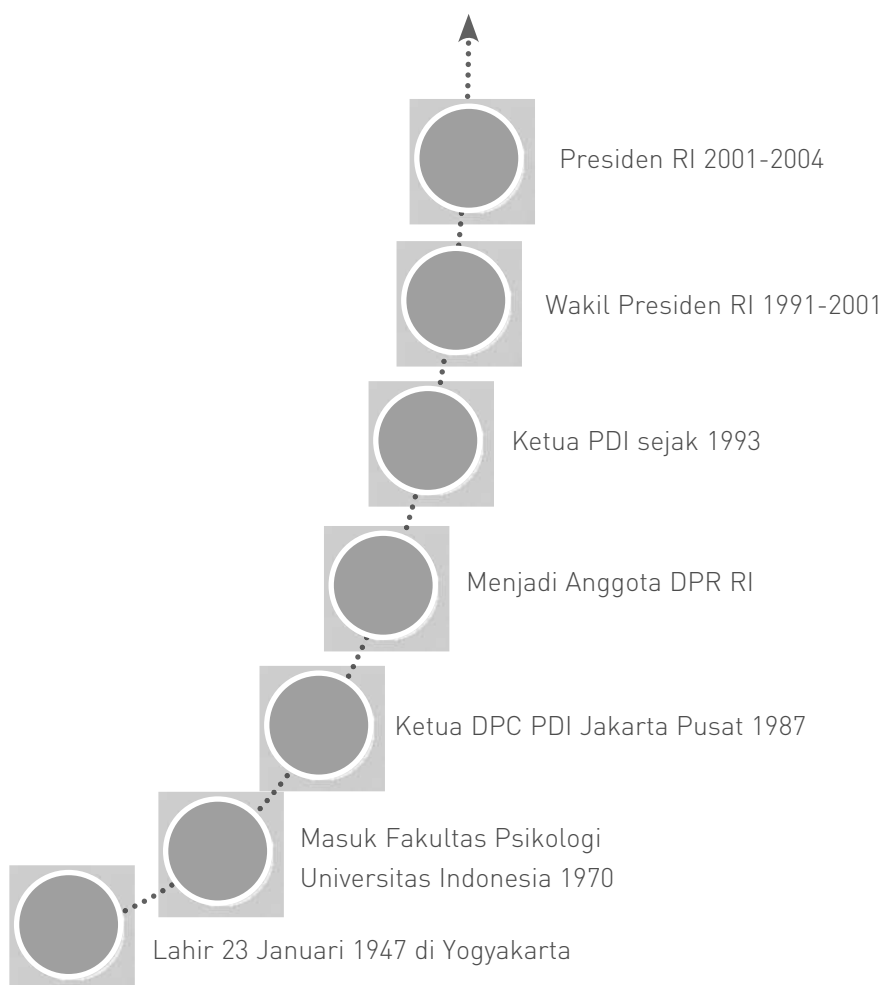
Terakhir Marzuki Alie dipercaya sebagai Persident of 2nd World Ecological Safety Assembly (WESA), menggantikan Perdana Menteri Kam-

boja Samdech Hun Sen sebagai 1st President of WESA. Bahkan dalam kunjungannya ke London mendampingi Presiden SBY, Marzuki Alie mendapat gelar kehormatan dan Ratu Elizabeth II sebagai *Knight Commander in order of St. Michael and St. George* pada tahun 2012.

Meski demikian, kelamahan yang sekaligus menjadi tantangan Marzuki adalah ihwal elektabilitas yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu, menyebutkan bahwa posisi elektabilitas Marzuki belum masuk 10 besar dalam survei nasional, meski tingkat elektabilitas ketika dikerucutkan di antara peserta konvensi Partai Demokrat berada di urutan ke-2. Itulah tantangan yang harus segera dijawab Marzuki Alie.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pemimpin Potensial





tanya-biografi.blogspot.com

Dalam tidurnya, Fatmawati bermimpi. Suaminya tercinta, Soekarno, memberikan kembang sepatu berwarna merah sebagai hadiah. Usai bercerita tentang mimpi itu, Soekarno pun bertakwil. Mimpi itu adalah pertanda jika istrinya akan melahirkan seorang putri. Malam di Kampung Ledok Ratmakan, Yogyakarta, 23 Januari 1947, mimpi Fatma menjadi nyata. Di tengah nyanyian petir dan kencangnya badai, bayi merah perempuan lahir ke muka bumi.

Ditemani Soekarno, Fatma melahirkan di kamar yang memang dipersiapkan khusus untuk persalinan. Suasana semakin syahdu dengan hangatnya lampu temaram. Fatma tersenyum melihat tangis keras anaknya yang melawan derasnya suara hujan. Bung Karno, Presiden RI pertama, memberikan nama kepada bayi itu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno-putri. "Putri kami lahir. Kami menamakannya Megawati. Mega berarti awan," ujar Bung Karno (*De Fretes & Sri Hastuti, Megawati Putri Sang Fajar, 2012*)

Mega menjadi anak kedua pasangan Soekarno-Fatmawati. Sebelumnya, Guntur Soekarno telah lebih dahulu lahir ke dunia. Meski sang ayah sudah dinobatkan menjadi presiden pertama republik ini, kehidupan keluarga kecil mereka jauh dari ideal. Mereka harus berpindah-pindah tempat karena menjadi buronan tentara Belanda. Usai agresi militer Belanda II pada 21 Juli 1947, Yogya semakin tidak aman. Di tengah kejaran Belanda, Bung Karno diceritakan sering berlari sambil menggendong kedua anaknya yang sedang tertidur pulas.

Mereka pun pindah ke Madiun, Jawa Timur. Madiun dipilih karena dekat dengan koordinasi dan aktivitas revolusi kemerdekaan yang harus terus dikawal. Situasi semakin genting. Bung Karno pun akhirnya ditangkap Belanda. Bersama keluarganya, mereka diasingkan ke Toba, kemudian dibawa ke Pulau Bangka.

Mega kecil baru merasakan kehidupan normal setelah kedaulatan Republik Indonesia diakui Belanda. Adis, panggilan kesayangan Bung Karno untuk Mega, menghabiskan masa kecilnya di Istana Merdeka dengan belajar menari. Di hadapan tamu-tamu, Mega senang mempertontonkan kebolehan nya.

Mega juga memiliki minat yang besar kepada tanaman. Dia memiliki koleksi anggrek di kebun istana. Boleh jadi, kebiasaan itu membuat sifat Mega menjadi welas asih. "Dari kecil sampai sekarang, ia begitu lembut dan keibuan," kata Mbok Tjitro, pengasuh anak-anak Bung Karno.

Saat bersekolah di TK Istana, Mega pun tidak memilih kawan. Bersama keluarganya, Mega bersekolah dengan saudaranya dan 20 anak karyawan istana. Teman-teman Mega dari berbagai kalangan, dari anak-anak tukang rumput, anak sopir, anak nelayan, hingga anak direktur kabinet Bung Karno. Semua teman masa kecil Mega bermain bersama di Istana Cipanas, Bogor. Mega memiliki kenangan unik bersama Bung Karno. Pada pagi di tahun 1954, Mega yang baru berusia tujuh tahun bersama kakaknya, Guntur yang berusia 10 tahun disuruh menutup mata selama 10 menit sambil menanggalkan semua pakaian.

"Syuuurr. . "Air hangat tumpah di atas ubun-ubun kedua bocah itu. Air mengalir deras ke celah pangkal rambut kakak-beradik. Bak sungai, air hangat itu merayap ke wajah dan terbendung mampir di bibir mereka. Lidah mereka mengecap rasa asin campur manis. "Bapak mengencingi kami berdua," ujarnya.

Bung Karno bercerita, dia mengencingi kedua anaknya karena mereka sering sakit-sakitan. Asma, step, disentri hingga tifus pernah diidap oleh Guntur dan Mega. Padahal, dokter kepresidenan sering menancapkan jarum suntik pencegah penyakit ke tubuh Mega dan Guntur. Hasilnya nihil. Menurut Mega, Bung Karno kala itu malu jika anak presiden sakit-sakitan.

Bukan Istri Biasa

Diah Permata Megawati Putri menikah dengan Penerbang Surindro Supjarso. Sabtu, 1 Juni 1968. Surindro akrab disapa Mas Patjul. Pria berperawakan tinggi ini lulusan terbaik dari Akademi Angkatan Udara. Perkenalan antar-mereka dijembatani oleh Guntur, kakak Mega. Setelah menikah, pada 1968 Mega ikut tinggal bersama suaminya di Madiun, Jawa Timur. Di sana, Mega mengurus anak pertamanya Mohammad Rizki Pratama.

Kabar buruk itu datang ketika Mega mengandung anak kedua. Surindro mengalami kecelakaan. Pesawat Skyvan T-701 yang dia tumpangi jatuh dari angkasa. Elang besi itu jatuh di Perairan Biak, Papua, pada 22 Januari 1970. Tewasnya sang suami membuat Mega berduka. “Dia berkabung lama,” kata Rachma.

Anak kedua Mega pun lahir tiga bulan setelah Mas Patjul pergi. Sang anak harus lahir sebagai yatim ke dunia. Namanya, Mohamad Prananda Prabowo. Hingga Maret 1971, jasad Surindro dan tujuh awak pesawat lainnya belum dapat ditemukan. Hanya reruntuhan pesawat yang terlihat.

Kesedihan Mega dalam rentang waktu lima tahun hidupnya semasa dewasa memang datang berurutan. Sebelumnya, ayahanda tercinta, Presiden Soekarno harus lengser dari jabatan pada 1966. Bung Karno jatuh usai peristiwa berdarah G 30 S/PKI. Pada 1970, masih tahun yang sama dengan tewasnya Mas Patjul, Bung Karno wafat. Meski getir, Mega sadar hidupnya harus berlanjut. Dia pun memutuskan untuk memulai episode baru dalam hidup bersama seorang lelaki bernama Hassan Gamal A. H. Pernikahan keduanya dipublikasikan dalam kolom berukuran 9x6 cm di Harian *Kompas* edisi 5 Juli 1972.

Hanya, kemalangan Mega sepertinya belum tuntas. Rencana pernikahan itu ditentang oleh keluarga Mega. Pihak keluarga beralasan Surindro belum pasti meninggal dunia. Alasan lainnya, citra Hasan di mata keluarga sudah telanjur buruk. Hasan dikenal sebagai mantan diplomat yang suka menipu. Hanya, sikap keras pasangan tersebut tidak tergoyah. Pada suatu pagi, Hasan mengajak Mega untuk berangkat ke Sukabumi. Mereka pun menikah diam-diam di Kantor Urusan Agama Sukabumi dengan penghulu H. Muhammad Cholil Fathurrohman.

Perdebatan mengenai pernikahan tersebut memanasi. Keluarga Bung Karno berang dan menyewa seorang pengacara untuk membatalkan pernikahan itu. Perang opini juga terjadi lewat media. Tidak kurang, seorang Buya Hamka ikut memberi komentar atas pernikahan Mega dan Hasan. Di

tengah perdebatan, Mega diam. Dia enggan mengeluarkan sepatah kata pun untuk menengahi konflik ini. Alhasil, keluarga Bung Karno menang. Pengadilan Tinggi Agama Istimewa Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga proklamator itu. Maka, pernikahan itu pun akhirnya batal demi hukum.

Pada awal Juli 1971, Guntur mengajak seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk berziarah ke Blitar, Jawa Timur. Di sana, dia dikenalkan dengan Mega. Nama panggilan pria itu, bule. Sedang nama lengkapnya, Taufiq Kiemas. Disebut bule, karena dia sosok pemuda bertubuh jangkung dan berkulit putih. Taufiq bernama asli Tas-tavan Kiemas. Dia lahir di Jakarta, 31 Desember 1941 dari pasangan Tjik Agus Kiemas dan Hamzatun Rusjda. Saat kuliah di Universitas Sriwijaya, Palembang, Taufiq menjadi Ketua GMNI Palembang pada 1963.

Bule menghabiskan masa kecilnya di Jawa. Orang tuanya hijrah ke Yogyakarta pada 1947-1948. Meski tak pernah mengerti bahasa jawa dan tak kenal Yogyakarta, kedua orang tua Taufiq tetap memutuskan pindah dengan satu alasan. Mereka merasa sebagai orang republikan yang harus ikut andil untuk berjuang. Akhirnya, Taufiq dan keluarganya pindah kembali ke Palembang. Dia pun kuliah di Unsri dan aktif di GMNI. Selain itu, Taufiq bergabung di organisasi bernama Inti Pembina Jiwa Revolusi, organisasi penegak ajaran Bung Karno. Di sini, Taufiq berkenalan dan dekat dengan Guntur.

Aktivitas organisasi Taufiq bukan tanpa hambatan. Saat isu anti-PKI (Partai Komunis Indonesia) mencuat, Taufiq turut menjadi korban. Dia dididuk aparat dan ditahan di Markas Corps Polisi Militer Kodam Sriwijaya pada 1966. Di balik terali besi, Taufiq sempat menunjukkan selebar koran yang menampilkan foto Mega. Kepada sahabatnya, Adjis Saip, Taufiq berkelakar, “Ini calon ayu (kakak perempuan) kau.”

Taufiq dibui hingga satu tahun. Dia akhirnya bebas dari tahanan dengan jaminan Jendral Abdul Haris Nasution dan Letnan Jendral Alamsjah Ratu Perwiranegara. Mereka adalah petinggi militer yang merupakan kawan dekat ayah Taufiq. Tujuh tahun berselang, apa yang dikatakan Taufiq di dalam penjara menjadi nyata. Mega dan Taufiq menikah pada Maret 1973. Mega memutuskan untuk menerima pinangan Taufiq usai dia mendapat surat resmi dari AURI mengenai gugurnya Surindro—suami pertamanya—di bulan yang sama.

Setahun berselang, Mega dan Taufiq dianugerahi seorang putri yang diberi nama Puan Maharani. Taufiq pun resmi menjadi ayah dari tiga anak, Tamtan, Nanan dan Puan. Di satu kesempatan, Taufiq pernah berkata,

“Sejak awal menikah, saya menganggap Tamtan dan Nanan sebagai anak kandung. Mereka tidak saya beda-bedakan dengan Puan. ”Taufiq pun dikenal sebagai suami yang dapat mengomunikasikan sikap politik Megawati. Perannya sebagai penengah saat Megawati berkonflik dengan SBY sukar dilupakan. Dia pun menjadi Ketua MPR RI untuk memayungi dua pihak sekaligus, oposisi dan partai koalisi.

Hanya, Taufiq pun menyusul Mas Patjul ke alam barzah. Dia menghembuskan wafat terakhir pada Sabtu 8 Juni di Singapura. Setelah mendapat perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Taufiq mengalami kelelahan saat menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 1 Juni lalu. Taufiq Kiemas dikenal sebagai sosok yang paling getol mengampanyekan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Taufiq dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur dengan upacara militer. Di pusara yang masih basah itu, Megawati mendampingi putrinya hasil pernikahan dengan Taufiq, Puan Maharani yang tampak sesegukan. Sementara, Mega tampak tenang menahan kesedihan.

Korban Politik

Pada awalnya, Megawati lebih suka menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan merawat kebunnya. Hanya, darah politik warisan Bung Karno rupanya tak bisa membuat Mega terhindar dari takdir. Pada 1987, Mega bersama saudaranya Guruh Soekarnoputra akhirnya menerima pimpinan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Soerjadi menjadi anggota.

Masuknya putra-putri Bung Karno dalam barisan partai berlambang banteng itu mendapat sambutan hangat publik PDI. Mega menjadi salah satu calon anggota legislatif pada pemilu tahun itu untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Alhasil, raihan suara PDI naik dan Mega lolos ke Senayan. Perannya sebagai anggota DPR RI dinilai kurang menonjol. Mega tercatat jarang datang untuk rapat ke parlemen. Hanya, Mega beralih dia menjalankan lobi politik di luar Senayan (*Ade Ma'ruf, Megawati Soekarnoputri: Riwayat Pribadi dan Politik Bung Karno*, 2013).

Salah satunya adalah menerima penugasan dari Ketua DPR/MPR Kharis Suhud untuk melobi anggota parlemen Kuba. Syahdan, permasalahan

Timor Timur sedang menjadi isu hangat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Mega pun diminta untuk berbicara kepada Kuba, yang menjadi salah satu anggota, untuk mengubah sikap tentang Timor Timur. Dari menentang integrasi menjadi mendukung integrasi.

Dalam pertemuan dengan delegasi Kuba, Mega berkata, "Beri saya cerutu." Tak banyak yang dibicarakan antara perwakilan kedua negara karena delegasi Kuba tak mengerti Bahasa Inggris. Bahkan, orang Kuba itu hanya mengetahui Indonesia lewat sosok Soekarno. Dengan tangkas, Mega pun berinisiatif menjadikan cerutu sebagai alat lobi. Melihat putri proklamator itu memegang cerutu—yang menjadi simbol nasional negara Fidel Castro itu—delegasi Kuba luluh. Dalam voting di DK PBB, mereka memutuskan untuk abstain dan pembicaraan soal Timor Timur di DK PBB pun gagal dilakukan.

Karier politik Mega mencuat usai Pemilu 1992. Dia berhasil naik menjadi Ketua Umum DPP PDI Pada 1993. Proses naiknya Mega melalui jalan berliku. Alkisah, Kongres PDI di Medan untuk memilih ketua umum ternyata tak menghasilkan apa-apa. Partai nasionalis ini kemudian menggelar Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, Mega mampu mengungguli kandidat lain, yakni Budi Hardjono. Budi didukung pemerintah untuk memimpin PDI menggantikan Soerjadi.

Usai menjabat sebagai ketua umum, posisi Mega dikuatkan dengan Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Akan tetapi, pemerintah ternyata tidak puas dengan pilihan 'warga banteng'. Ketidaksukaan rezim Soeharto ditunjukkan saat melarang Mega mengenakan nama Soekarnoputri di belakang namanya. Pemerintah meminta Mega menggunakan nama Megawati Taufiq Kiemas.

Pemerintah pun me-*nyetting* adanya Kongres Luar Biasa di Medan tiga tahun usai Mega menjadi ketua. Kongres yang disutradarai oleh Fatimah Ahmad ini bertujuan melengserkan Mega dari jabatan. Kongres Medan kemudian tercatat menghasilkan keputusan untuk memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI menggantikan Mega. Mega tak mau ambil pusing dengan Kongres Medan. Di hadapan pendukungnya, Mega menegaskan kongres tersebut tidak konstitusional. "Saya, Megawati Soekarnoputri, tetap menjadi pimpinan PDI," ujarnya.

Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, dipenuhi oleh spanduk dukungan kepada Mega. Mereka pun membuat spanduk cap jempol darah



sejarah.kompasiana.com

yang dipasang di kantor DPP dan rumah pribadi Megawati di Jl. Kebagusan, Jakarta Selatan. Soerjadi yang didukung pemerintah lantas mengancam Mega akan merebut paksa kantor DPP PDI. Pada pagi, 27 Juli 1996, kelompok Soerjadi menyambangi kantor PDI. Mereka menyerang massa pendukung Mega yang berubah menjadi kerusuhan massal. Korban jiwa pun jatuh, kebanyakan, dari pendukung Mega.

Atas adanya perebutan paksa tersebut, Mega memilih bersikap elegan. Alih-alih membalas dengan kekuatan fisik, Mega mengajukan gugatan ke meja hijau, meski akhirnya juga kandas di pengadilan. Massa banteng yang kecewa lantas memboikot PDI Pimpinan Soerjadi. Pada Pemilu 1997, perolehan suara PDI merosot tajam. Pendukung setia Mega memilih PPP dengan slogan Mega-Bintang sebagai pelarian.

Menjadi Presiden

21 Mei 1998, Presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatan. Rezim orde baru pun berakhir setelah terjadinya kerusuhan hebat yang mengorbankan ma-

hasiswa sebagai martir. Akan tetapi, masih banyak para pendukung dan simpatisan Golkar yang menginginkan orde baru kembali berkuasa. Untuk merespons keruhnya situasi politik setelah reformasi, empat tokoh nasional bertemu di Ciganjur, Jakarta Selatan. Mereka adalah KH. Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Pertemuan yang digagas mahasiswa ini lantas menghasilkan Deklarasi Ciganjur.

Delapan poin yang dihasilkan salah satunya adalah agenda reformasi total. Caranya, dengan mempercepat Sidang Umum MPR dari Desember 1999, menjadi Agustus 1999. Dari pertemuan ini, Mega kemudian menyiapkan partainya untuk menjadi pemenang pemilu. Dia menambahkan kata 'Perjuangan' di belakang PDI sebagai pembeda dengan PDI versi Soerjadi.

Hasilnya mujarab. Pada Pemilu 1999, Pemilu yang dipercaya sebagai pesta demokrasi sejati usai jatuhnya Orde Baru tersebut, memenangkan partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih PDIP meraup suara hingga 33,7 % dan menjadi pemenang. Euforia warga usai melengserkan rezim Soeharto membuat PDIP bersama Megawati menjadi pilihan. Terlebih, PDIP dicitrakan sebagai partai yang kerap menjadi korban pemerintahan, khususnya setelah peristiwa 27 Juli.

Hanya, belum adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung membuat Mega harus bertarung di parlemen. Dinamika politik pun terjadi. Kekuatan Islam membentuk poros tengah yang disutradarai oleh Amien Rais untuk 'menangkal' Mega menjadi presiden. Dalam voting di Sidang Istimewa MPR, Mega harus legowo untuk menerima K. H Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Sementara, Mega ditempatkan menjadi wakil presiden. "Pemilu presiden itu PDIP yang menang. Kalau mengikuti alurnya, saya berkesempatan jadi orang pertama (presiden). Tapi karena ini politik, saya terpaksa jadi wapres. Tapi itu saya jalankan saja," ujar Mega.

Pada awalnya, hubungan pasangan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri sebagai dua pimpinan pucuk pemerintahan berjalan mesra. Mega mengaku tidak pernah mengatakan kepada Gus Dur usai menyelesaikan tugasnya. Mega hanya berkata, "Bapak presiden, ini hal-hal yang sudah kita siapkan. Silakan maunya bagaimana."

Hanya, kemesraan itu tidak berlangsung lama. Hubungan keduanya memburuk. Mega jarang hadir dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Gus Dur. Mega juga tidak hadir pada pertemuan partai politik yang digagas Gus

Dur di Istana Bogor. Bahkan, Mega malah melakukan pertemuan politik dengan sejumlah pimpinan parpol di rumah pribadinya di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Hubungan keduanya memanans saat Gus Dur memecat menteri yang merupakan kader PDIP, Laksamana Sukardi. Laks dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laks dicopot bersama Jusuf Kalla, menteri asal Partai Golkar, tanpa sepengetahuan Mega. Sejak saat itu, Mega pun mengambil jarak politik dengan Gus Dur.

Konflik antara presiden dengan wakilnya ini juga terjadi di parlemen. Parpol-parpol Islam yang tergabung dalam poros tengah, tak puas dengan kinerja Gus Dur. Tak hanya itu, parpol ini sudah merasa terlebih dahulu disepelkan Gus Dur. Eskalasi suhu politik yang memanans pun membuat kekuatan poros tengah melunak kepada PDIP. Kekuatan nasionalis dan religius ini membangun kesepakatan politik baru. Dari lawan, menjadi kawan.

Munculnya kasus Buloggate yang diduga melibatkan Gus Dur juga lingkaran dalamnya menjadi awal 'kampanye' Mega menjadi presiden. Terbentuklah panitia khusus (Pansus) Bulogate DPR RI sebagai langkah penyelidikan atas kasus tersebut. Akhirnya, DPR mengambil sikap mosi tidak percaya kepada pemerintah. Gus Dur pun dijatuhkan dan Mega secara otomatis menjadi presiden.

Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, 23 Juli 2001. Sore itu, Mega resmi menjadi presiden. Dia dilantik di hadapan anggota MPR RI sebagai pengganti Gus Dur. Kemudian, Mega menyampaikan pidato. "Mari kita akhiri silang kata atau pertikaian yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat," ujarnya.

Untuk meredakan penolakan massa parpol Islam kepada dirinya, Megawati menggandeng Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Hamzah dikenal sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan, juga tokoh NU. Mega pun yakin bisa bekerjasama dengan Hamzah dalam menggalang pemerintahan yang baru. "*Alhamdulillah* sepanjang saya berjalan dengan Pak Hamzah, beliau memang membantu saya. Dalam arti, ada hal yang memang harus diputuskan oleh presiden," kenang Mega.

Ibu Presiden 'Diam Itu Emas'

Sejak kecil, Adis—panggilan kecil Mega—memang terkenal pendiam. Dia lebih sedikit bicara, banyak tersenyum, lembut dan keibuan. Akan tetapi, Adis juga memiliki sifat keras kepala. Selain menurunkan sifat Bung Karno,

sifatnya ini disebut sebagai dampak dari kehidupannya yang keras dan tanpa pengasuh. Berbeda dengan adik-adiknya yang lahir setelah revolusi.

Sukmawati Soekarnoputri, adik kandung Mega, mengungkapkan tentang karakter kakaknya itu. "Saya menilai kakak saya itu so cool. Dari dulu tenang, sabar, tidak banyak bicara. Jadi waktu saya melihat Mbak Mega mulai pidato di depan rakyat, saya terheran-heran," ujarnya. Pilihan diam, tutur Mega, menjadi keputusan yang diambil sebagai strategi menghadapi ketidakjelasan kisruhnya politik nasional. Menurutnya, banyak sekali permainan dan intrik politik yang membuat para politisi tak memaknai tujuan reformasi dengan sesungguhnya.

Dengan gaya memimpin yang tenang dan tak banyak bicara, Megawati berada di peringkat ke-15 dalam daftar "50 Tokoh Komunikator Paling Berpengaruh se-Asia Masa Kini" yang dirilis Majalah Asiaweek edisi awal Juni 2011. Megawati ketika itu meraih predikat Silent Enigma. Hanya, gaya dan pembawaan Megawati kerap menjadi olok-olok lawan politiknya. Tak kurang, Gus Dur pernah berkata saat menjadi presiden dan berkonflik dengan Megawati yang masih duduk sebagai wakil presiden. "Akhirnya, Indonesia punya presiden yang gak bisa ngeliat dan wakilnya yang gak bisa ngomong."

Megawati pun dikritik karena dinilai kurang mampu memimpin pemerintahan. Terlebih, saat harus memberi arahan di bidang ekonomi. Seorang menteri di bidang ekonomi pernah memaparkan konsep perencanaan pembangunan bidang ekonomi kepada Megawati. Presiden kemudian merespons, "Sampean yang ahlinya dan mengerti, laksanakan. Saya yang tanggung jawab." (*De Fretes & Sri Hastuti, 2012*).

Kritik ini meluas kepada pertanyaan publik mengenai kemampuan akademis Megawati yang dicap tidak lulus kuliah. Megawati bahkan sempat terancam terjegal dari Pilpres 2009 saat wacana capres harus sarjana menguak ke publik.

Sebenarnya, Mega sempat merasakan duduk di bangku kuliah. Dia masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Dia pun menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung. Hanya, dia tidak meneruskan kuliah. Dia berhenti karena pada waktu itu ada peristiwa G-30 S PKI. Mega mengaku, dia dilarang ikut pendidikan karena peristiwa tersebut.

Megawati juga dikritik mengenai cara dia menjalankan kehidupan beragama. Mega pernah tertangkap kamera sedang berada di sebuah pura di Bali. Di pura itu, Megawati terlihat mengangkat tangan dalam posisi

menyembah dan menadah. Dia terlihat menerima percikan air suci dari seorang pendeta. Foto-foto tersebut tersebar lewat media massa. Maka, muncullah pertanyaan publik, apakah Megawati seorang Muslimah atau penganut Hindu?

Saat mendengar kabar itu, Megawati hanya tersenyum. Tanpa ada terlonjar satu patah kata pun untuk merespons isu tersebut. Mega juga dikritik karena tampilannya yang enggan mengenakan busana kerudung. Dia dianggap presiden yang kurang islami. Hanya, Mega kemudian bicara. “Sekarang saya mau tanya, masalah Islami itu sebetulnya *opo toh*? Makanya saya bilang, biarkan saja orang bicara, berkomentar. Saya juga kapan-kapan boleh dong berkomentar,” ujarnya.

Megawati-SBY

Kekesalan Megawati Soekarnoputri kepada pria ini sulit ditahan. Terlebih, Mega sudah menganggap orang yang dipercaya untuk menyiapkan Pemilu 2004 menikamnya dari belakang. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2004, Mega pun enggan hadir, bahkan untuk sekadar menonton pelantikan itu dari stasiun televisi. Mega memilih menyibukkan diri untuk berkebun ketimbang melihat saingannya itu dilantik menjadi presiden. “Kalau orang lain, Amien Rais presiden, Wiranto presiden, siapalah, saya datang. Namun, kalau ini (Yudhoyono) saya enggak bisa karena dia menikam saya dari belakang,” ujar Mega dalam sebuah rapat di DPP PDIP.

Saat SBY masih menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Mega sudah menaruh curiga kepadanya. Kubu Mega sudah was-was jika SBY akan mencalonkan diri sebagai presiden. Terungkap ke publik kalau Mega sering mengucilkan SBY dari rapat kabinet. Sikap istana ternyata menguntungkan SBY yang tampil ke publik sebagai korban kezaliman. Tak kurang, sutradara kenamaan Garin Nugroho menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai “opera sabun SBY.”

Pada 11 Maret 2004, Yudhoyono mengirim surat pengunduran diri dari Kabinet Gotong Royong. Kepada pers, SBY berujar, sikap tersebut diambil usai pernyataan Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada 10 Maret lalu yang tidak merespons permohonannya untuk komunikasi langsung kepada presiden.

SBY mengaku sudah mengirim surat pada 8 Maret untuk menghadap dan menjelaskan secara langsung apa yang terjadi. Dia merasa, kewenangannya sebagai menteri yang mengendalikan jajaran pejabat di bidang politik dan keamanan sudah diambil langsung Megawati. Padahal, dia seharusnya menyiapkan Pemilu 2004 yang tinggal beberapa saat lagi. Hanya, hingga 11 Maret 2004, SBY belum mendapatkan jawaban. Dia pun mengundurkan diri dari kabinet pimpinan Mega.

Keesokan harinya, presiden sudah merespons surat permohonan mengundurkan diri dari penggawanya itu. Mega langsung mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 M tertanggal 12 Maret 2004 tentang penggantian jabatan Menkopolkam. Kemudian, Mega pun menetapkan Hari Sabarno yang merupakan Menteri Dalam Negeri sebagai Menko Polkam ad interim. Keputusan ini tertuang dalam Surat Sekretaris Negara No. B 82 tertanggal 12 Maret 2004.

Keppres tentang pemberhentian Yudhoyono dari jabatannya diantarkan langsung pada malam hari. Dalam suratnya, Mega mengucapkan terima kasih kepada SBY atas jasa dan perannya sebagai Menko Polkam. Dia pun menyatakan, dapat memahami alasan yang diungkapkan SBY dalam surat pengunduran diri tersebut.

Dalam Pilpres 2004, Megawati mencalonkan diri sebagai presiden. Ini adalah pilpres kali pertama dalam sejarah republic, di mana rakyat bisa memilih langsung presidennya, setelah puluhan tahun memilih presiden lewat perpanjangan tangan parlemen.

Ketika itu, Mega tengah mencari figur calon wakil presiden yang tepat. Dalam beberapa kesempatan, Mega mengatakan, pasangan presiden dan wakil presiden harus mencerminkan kombinasi militer-nonmiliter, Jawa-luar Jawa, dan partai nasionalis-religius. Hanya, Mega mengungkapkan, kriteria tersebut tak bisa berlaku mutlak. Dia berkelakar sulit mematok sesuatu yang ideal di 'negeri gado-gado' seperti Indonesia.

Akhirnya, Mega pun memutuskan untuk maju bersama Hasyim Muzadi dalam pilpres. Pilihan ini diambil usai kunjungan Taufiq Kiemas, yang juga merupakan suami Mega, ke Pondok Pesantren Al Hikam, Malang. Kedatangan Taufiq untuk melamar kiai yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama itu untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Mega.

Mega-Hasyim sangat optimistis akan menang hanya dalam satu putaran. Mereka berharap mendapat dukungan dari massa akar rumput yang didominasi oleh kader PDIP dan NU. Pilihan yang diambil Mega ini juga melihat kondisi merosotnya perolehan suara PDIP. Partai ini harus kehilangan lebih dari 15 % suara dan cuma mendulang sekitar 19,4 % suara dalam pemilu legislatif. PDIP pun harus mengaku takluk dari Partai Golkar yang menjadi pemenang dalam pemilu.

Megawati Center, lembaga *think-tank* yang menyokong suksesi Megawati sebagai capres, menghitung bahwa Hasyim memiliki pengikut sekitar 40 juta warga *nahdhiyin*. Angka ini dinilai berpotensi untuk mendongkrak perolehan suara Mega. Hanya, tim sukses Mega agaknya lupa jika masih ada Gus Dur yang menjadi tokoh sentral kaum *nahdhiyin*. Dengan tegas, Gus Dur mengatakan, tak merestui sekukupun majunya Hasyim mendampingi Megawati dalam pilpres.

Suara kaum sarungan pun pecah. Pengikut Gus Dur mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin, lantaran Salahuddin Wahid adalah adik kandung Gus Dur. Terlebih, majunya Gus Solah sudah disokong oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga mendapatkan restu dari Gus Dur. Sedangkan, ulama struktural NU dapat dipegang oleh Hasyim. Serangan kepada Mega-Hasyim pun dilancarkan oleh sejumlah kiai yang melontarkan fatwa, haram hukumnya untuk memilih presiden perempuan. Fatwa itu keluar usai pertemuan tertutup di kediaman KH Mas Subadar, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Pasuruan, Jawa Timur, awal Juni 2004.

“Dalam ajaran *ahlusunnah waljamaah*, pemimpin tidak boleh perempuan, kecuali darurat. Memilih dan mencalonkan perempuan itu haram hukumnya,” begitu petuah Subadar. Hasil akhir ternyata tidak berpihak kepada Mega. Putri Bung Karno itu harus keok dari mantan anak buahnya di kabinet. SBY yang mencalonkan diri dengan kader Partai Golkar Jusuf Kalla, akhirnya memenangkan pemilihan presiden dengan dua kali putaran.

Lima tahun kemudian, tepatnya Juli 2009, Megawati kembali memutuskan untuk masuk dalam gelanggang. Mega memilih berpasangan dengan calon dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Mega harus bersaing dari pasangan SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Dalam kampanyenya, Mega menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi kerakyatan. Dia menilai, ekonomi kerakyatan yang didukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai lebih tangguh menghadapi krisis.

Mega ketika itu mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem



facebook.com/megawati.soekarnoputri

perekonomian yang berdasarkan pada konstitusi dan sesuai dengan apa yang sudah dirintis para pendahulu bangsa. “Sehingga, Indonesia menjadi negara yang berdaulat,” kata Megawati saat memaparkan visi dan misi ekonominya di hadapan pengurus dan peng usaha Kadin Indonesia, di Jakarta, seperti dikutip dari harian *Republika*.

Ide ini dibangun Mega untuk menandingi pasangan SBY-Boediono yang sudah mendapat cap neo-liberalis. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, Boediono dinilai terlalu bergantung dengan asing. Ekonom Econit Hendri Saparini mengatakan, Boediono sulit untuk melepas stempel neo-liberalisme yang melekat padanya. Kebijakan Boediono sewaktu menjabat menko perekonomian, dinilai sebagai perwujudan neoliberalisme.

Hanya, ekonomi kerakyatan yang ‘dijual’ pasangan Megawati-Prabowo masih kalah dengan kesuksesan Presiden SBY menjaga pertumbuhan ekonomi. Pun, publik merasa pasangan Mega-Pro tidak mampu menunjukkan dalam bentuk teknis praktik ekonomi kerakyatan tersebut. Alhasil, Mega kembali kalah dari SBY dengan satu kali putaran.

Pemimpin Kharismatik: Mimpi Indonesia Raya

“Saya hanya ingin Indonesia Raya”. Demikianlah harapan Megawati dalam sebuah acara di stasiun televisi (*Mata Najwa*, 22 Januari 2014). Harapan yang tulus hadir dari trah pemimpin besar, Soekarno.

Meskipun Megawati adalah putra dari sang proklamator, namun sebenarnya Mega tidak mempunyai hasrat terjun ke politik. Apalagi wasiat dari mendiang sang Ayah agar keluarganya tidak terjun ke dunia politik. Namun, takdir berkata lain. Mega hadir dalam percaturan politik dengan menerima pinangan PDI.

Dinamika politik yang dialami Mega cukup berliku. Awal masuk PDI, Mega terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 1987. Kemudian, saat Kongres PDI di Surabaya tahun 1993, Mega terpilih menjadi Ketua Umum.

Disinilah Mega mulai masuk eskalasi politik. Terpilihnya Mega menjadi Ketua Umum ternyata tidak mendapat respon positif dari pemerintah orde baru saat itu. Sehingga dengan dukungan pemerintah terjadilah Kongres PDI di Medan tahun 1996, dan terpilihlah Soerjadi sebagai Ketua Umum. Dari sinilah akar PDI pecah. Hingga terjadi tragedi 27 Juli 1996, dimana terjadi perebutan kantor PDI yang sangat fenomenal.

Karena konflik tersebut, maka Mega berinisiasi membentuk partai tersendiri. Tahun 1998, terbentuklah partai PDIPerjuangan yang dipersiapkan untuk mengikuti pemilu. Satu tahun kemudian, PDI Perjuangan masuk dalam salah satu parpol peserta pemilu. Dan di luar dugaan, PDI Perjuangan sukses menjadi pemenang pemilu dengan 33,74% suara dan mendapatkan 153 kursi parlemen.

Kemenangan tersebut, memberi peluang bagi Mega untuk menduduki jabatan RI 1. Namun, takdir Tuhan berkata lain. Karena saat itu pemilihan presiden ditentukan parlemen, maka dinamika politik pun terjadi. Kekuatan poros tengah tidak mampu dibendung Mega, sehingga dalam Sidang MPR tahun 1999 terpilihlah Gus Dur sebagai presiden kala itu, dan Mega hanya dihadiahi kursi Wakil Presiden.

Awal mula kepemimpinan Gus Dur dan Mega berjalan mesra. Namun, kemesraan itu tidak berlangsung lama, Mega diisukan tidak sejalan dengan sikap Gus Dur yang semaunya sendiri. Faktor tersebut juga memicu kegelisahan di parlemen karena berbagai arah kebijakan Gus Dur sulit diprediksi. Akhirnya, dengan cukup dramatis, diadakan Sidang istimewa

MPR tanggal 23 Juli 2001. Sidang tersebut menandai berakhirnya kepemimpinan Gus Dur dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor II/MPR/2001 karena telah mengeluarkan maklumat (dekrit) pembubaran MPR/DPR. Implikasinya, Mega mendapat karpet merah meneruskan estafet kepemimpinan negara. Peristiwa ini juga menandai sejarah pertama kalinya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden perempuan.

Pada pemilu 2004, merupakan langkah awal sejarah demokrasi di Indonesia. Karena saat itu, pertama kalinya pemilu presiden langsung diadakan. 20 Oktober 2004 menjadi panggung Mega kembali memperebutkan kursi Presiden. Saat itu, Mega didampingi Hasyim.

Pilihan Hasyim yang saat itu menjabat sebagai Ketua PBNU dianggap tepat karena Hasyim dianggap sebagai representasi NU sebagai ormas keagamaan yang memiliki basis massa yang sangat besar. Apalagi hasil Pileg saat itu tidak begitu bagus. PDIP kalah dari Golkar yang mendapatkan 21,58% suara. Sedangkan PDIP hanya mendapat 18,58% suara. Penurunan suara tersebut tentu saja berdampak pada basis dukungan yang dimiliki Mega dalam pilpres 2004. Inilah pertimbangan lain dari pemilihan Hasyim Muzadi. Namun, PDIP mungkin lupa bahwa masih ada sosok Gus Dur, yang sangat kharismatik. Gus Dur saat itu menegaskan tidak akan memberikan dukungan kepada Mega. Apalagi, saat itu, suara NU terpecah karena Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah juga diusung mendampingi Wiranto. Ganjalan lain datang dari beberapa ulama akar rumpun yang menyuarakan keharaman memilih presiden perempuan. Akhirnya, hanya basis ulama struktural yang bisa dirapatkan oleh pasangan Mega-Hasyim.

Akhirnya, pada pilpres 2004 tidak ada pasangan yang memperoleh perolehan suara mutlak. Mega-Hasyim menduduki posisi kedua dengan 26,61% suara dibawah SBY-JK dengan 33,57% suara. Digulirkanlah pilpres putaran kedua yang diikuti dua kandidat teratas Mega-HASYim dan SBY-JK. Kurangnya basis dukungan menjadikan Mega-Hasyim kembali kalah dengan perolehan suara 39,38% dibawah SBY-JK yang meraih 60,62% suara. Meskipun begitu, Mega menetapkan sikap yang tegas dengan menarik kemudi partainya menjadi partai oposisi. Ketegasan tersebut mengarahkan PDIP menjadi partai yang memonitoring kebijakan pemerintah.

Pada pemilu 2009, Mega kembali naik ke panggung pilpres dengan memilih Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Namun, duet tersebut

ternyata belum mampu mengalahkan pasangan terpilih, SBY-Budiono yang meraih 60,80% suara sehingga pilpres kali ini hanya berjalan satu putaran.

Dua kali gagal dalam pilpres, Mega tetap kokoh dengan pendiriannya dengan menarik kemudi kapal menjadi partai oposisi. Meskipun dampaknya, tidak ada satupun posisi jabatan pemerintahan yang diberikan kepada kader PDIP. Keteguhan prinsip inilah yang kemudian menguatkan citra PDIP yang sangat tegas mengkritisi kebijakan pemerintah yang seringkali tidak pro rakyat. Seperti, saat rencana kenaikan harga BBM. PDIP dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut.

Hingga saat ini, PDIP masih memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari kharisma Megawati yang masih menjadi magnet tersendiri, terutama bagi penganut Soekarno. Pemimpin kharismatik adalah orang yang memiliki kelebihan, perbedaan dan keisimewaan daripada yang lain (Alfan Alfian, 2009: 140). Salah satu ciri dari pemimpin kharismatik adalah mampu mempengaruhi banyak orang dan dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Dari batasan tersebut, menjadi jawaban mengapa Mega menjadi magnet tersendiri bagi para pengikutnya sehingga PDIP hingga saat ini masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi.

Salah satu sikap Mega yang sangat terlihat adalah teguh pendirian. Mega sangat kuat memegang prinsip nasionalisme dan Pancasila. Cita-citanya untuk meneruskan perjuangan Bung Karno terlihat dengan berbagai sikap politiknya. Selain itu, Mega adalah politisi yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mega memilih untuk diam dan mengamati sirkulasi politik yang ada sebelum mengambil keputusan politiknya. Inilah mengapa banyak pihak yang sulit untuk menerawang hati dan pikiran Mega.

Kedua sikap tersebut, teguh dalam pendirian dan tidak gegabah dibawanya untuk meneruskan perjuangan Bung Karno. Sebagai trah Soekarno yang pernah menduduki jabatan presiden, Mega sanggup memberikan kontribusi bagi bangsa ini.

Sebagai presiden di tengah kegaduhan politik, Mega sebenarnya masih mewarisi kondisi perpolitikan yang belum stabil. Meskipun begitu, ada beberapa tinta emas sepanjang perjalanan Mega menjadi presiden. Dalam bidang ekonomi misalnya, Mega cukup memberi pencerahan dengan menstabilkan kondisi ekonomi saat itu. Hal tersebut terlihat dari fondasi ekonomi saat itu, seperti inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, penguatan kurs rupiah terhadap dolar, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pemerataan pembangunan, Mega membentuk beberapa provinsi baru, seperti Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat hingga Bangka Belitung. Kebijakan tersebut, dalam rangka untuk akselerasi pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Kebijakan lain yang diambil Mega adalah pembentukan akademi intelijen pertama di Indonesia, pembentukan KPK, melakukan privatisasi dalam rangka penyehatan BUMN, penertiban bisnis TNI dengan dikeluarkannya Keppres No. 34 tahun 2004, dan tahun 2003, Indonesia keluar dari IMF yang menandakan Indonesia menjadi bangsa yang mandiri.

Pasca menduduki jabatan presiden, Mega tetap menjadi tokoh yang cukup disegani. Dalam kapasitasnya menjadi Ketua PDIP, di tengah banyaknya partai yang merapat kepada pemerintah untuk mencari pembagian kue-kue kekuasaan, Mega dengan tegas mengambil sikap sebagai oposisi. Hal itupun dilakukan pasca pemilu 2009. Meskipun menjadi partai oposisi, PDIP tetap memiliki elektabilitas tinggi. (survei LSI)

Dengan sikap pasif dan diamnya, Mega menjadi tokoh politik yang sulit ditebak. Meskipun begitu, sikap politiknya selalu ditunggu dan diperhitungkan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mega tidak akan gegabah mengambil keputusan yang sangat krusial bagi masa depan bangsa ini. Tentu saja, Megawati mempunyai kalkulasi politik terkait keputusannya nanti. Meskipun terkesan pasif, justru Mega mencermati perkembangan politik yang ada. Sembari itu, Mega mengadakan *fit and proper test* secara persuasif kepada para kadernya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

Mengambil analisa Ikrar Nusa Bakti, tidak mustahil pada saat yang tepat ia akan memutuskan "bukan untuk maju kembali", melainkan "mengucap permissi" dan memberi jalan bagi kadernya untuk memimpin negeri ini. Semua ini demi Indonesia Raya (*Kompas, Membaca Pikiran Megawati, 5 Februari 2014*).

Maju Kembali atau Permissi

Pilpres semakin dekat, genderang pertarungan pun sudah terasa bahkan sebelum kampanye secara resmi digulirkan. Beberapa parpol tengah sibuk mempersiapkan berbagai strategi pemilu, termasuk para kandidat capres

yang nanti diusung. Maka tak sedikit, politisi yang sudah mendeklarasikan maju dalam pilpres 2014 sudah berani berkunjung ke berbagai daerah dengan berbagai atribut untuk menggaet massa pendukung.

Namun, hal tersebut nampaknya belum terjadi pada PDIP. Partai berlogo banteng tersebut masih mengunci rapat soal siapa yang nanti akan diusung menjadi presiden. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh sang ketua umum, Megawati.



Meskipun saat ini, banyak survei yang memfavoritkan salah satu kader PDIP, Jokowi sebagai kandidat Capres 2014, tetapi Mega tetap tidak terpengaruh. Mega tidak mau gegabah, karena keputusannya akan menentukan nasib bangsa ke depan.

Menarik jika kita menanti apa yang nanti akan diambil oleh Megawati. Maju kembali atau mengucap permisi? Apabila maju kembali, Mega sebenarnya masih punya kans yang cukup kuat. Pertama, Mega memiliki citra yang bersih dan nasionalis. Belum ada pelanggaran hukum yang terbukti dilakukannya.

Kedua, Mega juga mempunyai pengalaman menjadi presiden, sehingga rakyat bisa mengukur kompetensi kepemimpinannya. Tentu, pengalaman

dan popularitas masih unggul dibanding kandidat lainnya. Selanjutnya, faktor kharisma dari trah Soekarno membuat Mega masih menjadi magnet bagi penganut Soekarno.

Persoalannya, Mega sudah memasuki usia senja, sehingga banyak pihak yang menilai akan lebih baik jika Mega meneruskan estafet kepemimpinan kepada para kadernya. Apalagi sudah banyak kader potensial yang siap menerima mandat jika Mega merestui, seperti Jokowi, Risma dan lainnya.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

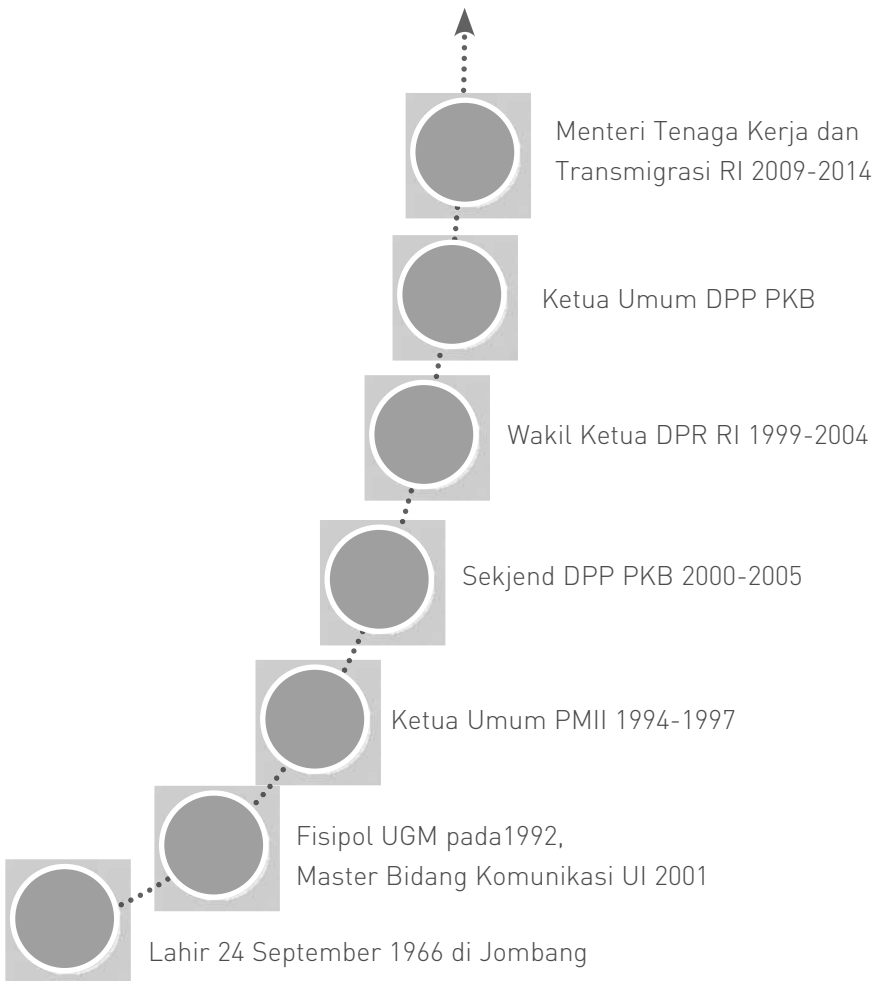
Peluang Megawati cukup tinggi untuk menjadi capres di tahun 2014 mendatang. Selain didukung dengan elektabilitas yang tinggi, Megawati selama ini dikenal sebagai tokoh politik yang bersih dan memiliki integritas tinggi. Apalagi Megawati juga pernah menjadi presiden. Tentu secara pengalaman dan popularitas, Megawati jauh melampaui tokoh-tokoh lainnya.

Namun demikian, tantangan Megawati tentu terletak pada momentum politik dan banyak pengamat mengatakan bahwa sebaiknya Megawati sudah tidak lagi mencalonkan diri. Selain persoalan usia, masalah regenerasi juga harus dipikirkan. Apalagi, di partai banteng tersebut saat ini juga sudah banyak bercokol kader-kader potensial. Sebut saja Jokowi yang elektabilitasnya terus moroket melampaui tokoh-tokoh lainnya di negeri ini, termasuk mengalahkan elektabilitas Megawati sendiri.

Tantangan berikutnya terkait elektabilitasnya yang terus menurun. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute sepanjang 2013-2014 lalu yang menempatkan posisi Megawati terus tergedradasi secara elektoral.

MUHAIMIN ISKANDAR

Pemimpin Potensial





infopublik.kominfo.go.id

Abdul Muhaimin Iskandar lahir di Jombang, 24 September 1966. Masa Remaja Cak Imin, panggilan akrabnya, merupakan aktivis yang peduli kepada perjuangan demokrasi. Sejak kecil, Putra Muhammad Iskandar ini memang sudah sering berada di tengah-tengah diskusi politik keluarga besarnya. Ayahnya adalah seorang guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang. Dia pun merupakan keturunan KH Bisri Syamsuri, seorang pengasuh pondok pesantren Tambakberas yang mempunyai peran penting terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama (NU).

KH Bisri Syamsuri dikenal sebagai ulama yang memiliki keteguhan hati dan disiplin organisasi yang ditunjukkan dalam kondisi perpolitikan saat ini. Misalnya, terbentuknya MPRS yang sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan internal Nahdlatul Ulama. Buat KH Bisri Syamsuri, ketika itu DPR adalah lembaga yang antidemokrasi. Menurutnya, ikut serta dan bergabung dengan dan dalam lembaga DPR yang tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat adalah bertentangan dengan ilmu fiqih yang dipegangnya.

Berbeda dengan kelompok NU lainnya yang dipelopori oleh sahabat karibnya, Kiai Wahab Chasbullah yang memutuskan untuk menerima keanggotaan dewan perwakilan rakyat tunjukkan dari presiden. Alasan Kiai Wahab menerima karena amar makruf nahi mungkar yang dipegang warga NU.

Meski demikian, KH Bisri Syansuri menghargai keputusan Kiai Wahab dengan tetap mempersilakan anggota konstituante dari hasil pemilu 1955 untuk menerima dan menjadi anggota MPRS dengan alasan bahwa Kiai Wahab adalah pimpinan tertinggi dalam Partai Nahdlatul Ulama harus dihormati keputusannya dan menjadi titik kesepakatan keorganisasian atau kepartaian.

Sikap bijak dan tingginya toleransi dari KH Bisri ini terbawa pada diri Muhaimin. Jiwa kepemimpinan Cak Imin sudah terlihat dan terlatih semenjak kecil. Keponakan Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur ini, ternyata selalu dipercaya oleh teman-temannya untuk menjadi ketua kelas.

Akrab Dipanggil Cak Imin

Ketika usianya baru 14 tahun, Cak Imin mendapat kepercayaan dari pihak Pesantren Denanyar untuk menjadi staf pengajar. Ketika duduk di Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, Muhaimin sudah melibatkan diri dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan politik. Cak Imin tumbuh menjadi pribadi yang kritis dan religius.

Setelah lulus Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang pada 24 September 1966, santri yang mengaku suka memberontak dan badung ini memutuskan untuk meninggalkan Jombang. Dia memilih untuk hijrah ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Keputusan tersebut dipilih karena Cak Imin merasa tak dapat berkembang jika hanya aktif di dalam lingkungan pesantren.

Perjuangannya berjalan mulus, Cak Imin pun masuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Setelah 3 tahun menimba ilmu, Muhaimin melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (1985-1992) dan jurusan Syariah IAIN Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga) (*id. wikipedia.org*, 2013).

Sikap kritisnya kian berlanjut saat duduk di bangku mahasiswa. Muhaimin muda aktif melawan otoritarianisme dan sentralisasi orde baru sejak kuliah di UGM. Dia dalam organisasi ekstrakampus yang menjadi sayap nahdhatul ulama, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Muhaimin mengembangkan kemampuan organisasinya.

Di internal kampus, Muhaimin pun masih turut eksis, yakni sebagai Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UGM, Yogyakarta, 1990. Muhaimin menyelesaikan pendidikannya di UGM pada tahun 1991 kemudian hijrah ke Jakarta. Di ibu kota bersama Gus Dur, Cak Imin mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Lembaga Pendapat Umum (LPU). Dengan tujuan untuk melakukan riset politik.

Kemudian, Cak Imin dan Gus Dur dipercaya untuk menjadi kepala divisi penelitian LPU 1992-1994. Pada waktu yang sama pria yang menyukai bidang jurnalis ini, dipercaya sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik. Namun, tabloid tersebut akhirnya diblokir lantaran mengkritik keras pemerintah pada waktu itu.

Muhaimin mulai terjun di dunia politik praktis ketika para senior NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), seusai runtuhnya rezim Orde Baru 1998. Dalam tubuh PKB, Cak Imin diberi kepercayaan oleh Gus dur sebagai Sekjen PKB. Karir Muhaimin semakin cemerlang ketika lolos untuk menduduki kursi DPR RI dalam pemilu 1999 yang merupakan pemilu awal di era demokrasi.

Karier Politik

Muhaimin Iskandar mulai tampil ke publik setelah ditunjuk KH Abdurrahman Wachid untuk menjabat sebagai Sekretaris Jendral PKB pascareformasi. Muhaimin tampil untuk menjadi juru bicara untuk PKB. Semenjak itulah, ia mulai aktif di politik nasional dan menjabat anggota DPR tahun 1999 dari daerah pemilihan Jawa Timur.

Meski masih muda, kiprah Muhaimin di senayan tak main-main. Suami dari Rustini Murtadho ini langsung diplot menjadi Wakil Ketua DPR RI sebagai perwakilan Fraksi PKB untuk masa jabatan 1999-2004. Karena kinerjanya yang positif, Gus Dur pun kembali memercayakan posisi yang sama kepada Cak Imin pada periode 2004-2009.

Aktivitas di lembaga legislatif ini, membuatnya juga terpilih menjadi Ketua DPP PKB tahun 2000-2005. Selanjutnya Pada Muktamar II PKB di Semarang, April 2005, Muhaimin terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2005-2010. Di luar organisasi, ia pernah aktif

pada Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Litbang Tabloid Detik.

Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB periode 2005-2010 secara aklamasi dalam Mukhtamar II PKB, di Semarang. Muhaimin yang merupakan satu-satunya kandidat Ketua Umum Dewan Tanfidz, karena yang lainnya telah mengundurkan diri, Muhaimin memperoleh suara mayoritas, yakni 304 dari 382 kertas suara.

Sesaat setelah pemungutan suara usai pimpinan sidang meminta kesediaan Muhaimin Iskandar untuk maju ke podium untuk menyatakan kesediaannya. Kemudian Muhaimin maju ke podium untuk menyatakan kesediaannya secara lisan. “Saya ucapkan beribu terima kasih atas dukungan teman-teman DPW dan DPC. Tidak ada pilihan kecuali menerima dan bersedia dengan niat mengabdikan kepada bangsa dan negara,” ucapnya.

Sesuai dengan tata tertib (tatib) pemilihan Ketua Umum Dewan Tanfidz, meski sudah mendapatkan suara terbanyak dari DPW dan DPC, calon juga harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Dewan Syuro terpilih yakni Gus Dur. Secara lisan Gus Dur menyatakan persetujuannya, terhadap pencalonan keponakannya itu.

Akhirnya karena Muhaimin merupakan calon tunggal, sesuai tatib, calon tunggal dinyatakan terpilih secara aklamasi. Maka pimpinan sidang menanyakan kepada peserta apakah menyetujui Muhaimin, mukhtamirin serentak menjawab setuju. Hal ini langsung disambut gembira oleh para pendukung Muhaimin. Dan seiring dengan diketokkan palu, maka Muhaimin terpilih secara sah sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Gus Dur telah membuat susunan Dewan Pengurus Pusat PKB masa bakti 2005-2010. Namun, susunan DPP PKB itu belum lengkap karena posisi wakil ketua umum masih dikosongkan. Pengumuman susunan pengurus DPP PKB itu dibacakan Ketua Umum Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang didampingi Gus Dur dan formatur lain, di Kantor DPP PKB.

Dalam susunan pengurus DPP PKB, Ketua Umum Dewan Syuro Abdurrahman didampingi tiga ketua, yaitu HZ Arifin Junaidi, KH Hamdun Ahmad, dan Sugiat Ahmad Sumadi. Sekretaris Dewan Syuro H Muhyidin Arabusman dengan Wakil Sekretaris KH Aminullah Muhtar dan Badriyah Fayumi.

Di jajaran Ketua Tanfidz ada Lalu Misbach Hidayat, Andi M Ramly,

Effendy Choirie, Maria Pakpahan, Maria Ulfa Anshori, Rosehan, dan Nursyahbani Katjasungkana. Kedudukan sekretaris jenderal dipercayakan kepada Muhammad Lukman Edy MSi, sedangkan putri Abdurrahman, Zannuba Arifah, menjadi salah satu wakil sekjen bersama Helmy Faisal, Imam Nahrawi, dan Rieke Dyah Pitaloka.

Santri Gus Dur

Jakarta, Jumat, 25 Juli 2008. Bara konflik di internal tubuh Partai Kebangkitan Bangsa 'diselesaikan' negara. Pemerintah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta Nomor M. HH-67. AH. 11. 01 Tahun 2008 tertanggal 24 Juli 2008 mengesahkan kepengurusan yang sah Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Lukman Edy. Keputusan itu mengacu pada keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan pemecatan Muhaimin dan Lukman Edy tidak sah. Keputusan itu mengembalikan kepengurusan DPP PKB sesuai dengan Muktamar Semarang tahun 2005.

Alhasil, keputusan muktamar yang mengesahkan kembali Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Lukman Edy sebagai Sekjen Dewan Tanfidz PKB sesuai Keputusan Menhuk dan HAM Nomor M-02. UM. 06. 08 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 lah yang dipakai. Berarti,



Ketua Umum Dewan Syuro PKB tetap dipegang Abdurrahman Wahid dan Sekretaris Dewan Syuro PKB adalah Muhyidin Arubusman. Susunan kepengurusan yang disahkan pemerintah itu kemudian diserahkan Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding yang didampingi Wakil Sekjen Hanif Dhariri dan Ketua DPP PKB Ida Fauziah kepada anggota KPU, Syamsulbahri dan Andi Nurpati(24/7/2008).

Keputusan itu tak membuat konflik mereda. Pertikaian kedua kubu semakin menajam. Seperti yang terjadi di DPC-PKB Gresik, dua orang caleg dari DPC-PKB Gresik kubu Muhaimin dianiaya puluhan orang di halaman kantor KPUD Gresik Selasa (19/8) malam sekitar pukul 10. 30 WIB saat hendak mengantar berkas pencalonan legislatif. Akibat penganiayaan tersebut salah satu korban Zulfan (43) menderita memar pada wajah, karena dipukuli berkali-kali oleh pelaku. Sedangkan Muslih (40) mengalami luka robek dibagian kepala bagian belakang karena ditendang berkali kali oleh puluhan pelaku tersebut.

Sebelum pemerintah mengeluarkan fatwa, Gus Dur sudah bermanuver. Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendatangi Mabes Polri, Jakarta Selatan. Mantan presiden ini dimintai keterangan sebagai saksi pelapor atas tuduhan pelanggaran AD/ART partainya.

Gus Dur datang ke Gedung Badan Reserse Kriminal Polri dengan didampingi oleh pengacaranya, Ibrani, dan Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB kubu Gus Dur, Ali Masykur Musa. "Saya mengadukan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy sebagai pihak yang melanggar AD/ART partai," kata Gus Dur seperti dikutip *Harian Republika* (28 Maret 2008).

Bentuk pelanggarannya, menurut Gus Dur, adalah setiap surat keputusan harus ada tanda tangan Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfidz, dan Sekretaris Dewan Tanfidz. "Semua ini dilanggar mereka. Mereka tidak ajak saya tanda tangan," katanya.

Konflik antara kubu Gus Dur dengan Muhaimin dimulai pada rapat pleno DPP PKB, Rabu, 26 Maret 2008. Rapat tersebut memunculkan putusan yang mengagetkan. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, diminta mengundurkan diri dalam rapat pleno itu. Mulanya, tak ada yang istimewa dari rapat pleno yang dihadiri 30 pengurus Dewan Tanfidz dan Dewan Syura itu. Di tengah jalan, rapat membicarakan kepemimpinan Muhaimin. Buntutnya, muncul tiga opsi. *Pertama*, menggelar muktamar luar biasa (MLB). *Kedua*, mempertahankan Muhaimin. *Ketiga*, meminta Muhaimin mundur.

Rapat yang juga diikuti Ketua Dewan Syura PKB, Gus Dur dan Ketua Dewan Tanfidz PKB, Muhaimin Iskandar, itu kemudian memutuskan voting. Hasilnya: 20 orang meminta Muhaimin mundur dari jabatannya, delapan meminta MLB, dan dua anggota menyatakan abstain. Karena hanya diminta mundur, Muhaimin mengatakan keputusan sepenuhnya bergantung padanya. Dia mengaku akan mengambil keputusan dua-tiga hari ini. "Saya butuh waktu merenung, berpikir, dan istikharah," katanya.

Selain itu, Muhaimin yang juga wakil ketua DPR mengaku akan berkonsultasi dengan para kiai dan bertemu Gus Dur. Ditanya alasan pleno memintanya mundur, Muhaimin mengaku tidak tahu persis. Soal isu bahwa dia sedang menggagas MLB untuk menggusur Gus Dur, Muhaimin mengatakan, "Tidak masuk akal." Gus Dur juga enggan mengungkapkan alasannya. Menurut Gus Dur, karena keputusan itu diambil bersama, semua orang harus ikut, termasuk dirinya. "Itu sudah keputusan final DPP PKB," kata Gus Dur, seraya mengatakan penggantian Muhaimin akan dibahas dalam pleno dua pekan mendatang.

Sekjen PKB, Zannuba Arifah Chafshoh, mengatakan bila Muhaimin mundur, penggantinya adalah Wakil Ketua PKB, yaitu Ali Masykur Musa. Mantan ketua PKB, Mahfud MD, mengatakan pejabat sementara hanya bisa tiga bulan. Karena Muhaimin dipilih lewat muktamar, dia hanya bisa diganti lewat MLB.

Bukan Muhaimin jika tidak licin. Merasa masih menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz PKB, Muhaimin memutuskan akan segera mengganti sejumlah pengurus DPP PKB. Salah satu yang akan dipecat adalah Yenny Wahid. Sedangkan, kubu Gus Dur melalui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PKB, Ali Masykur Musa, akan segera melaporkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Muhaimin beserta enam fungsionaris partai ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham).

Penggantian pengurus, menurut dia, hanya ditingkat Dewan Tanfidz saja. Sementara, di Dewan Syuro PKB tidak akan dirombak. Ketua Dewan Syuro PKB, Gus Dur, posisinya tidak akan dirombak. Yenny Wahid, yang hadir di acara Festival Jajan Pasar PKB di DPR, mengatakan bahwa sesuai AD/ART PKB, yang punya kewenangan untuk membuat garis besar partai adalah Dewan Syuro yang dipimpin Gus Dur.

Diungkapnya, Gus Dur merupakan representasi dari PKB. Tidak ada

satu orang pun yang bisa mengaku kalau dirinya adalah representasi PKB. Menurut Yenny, kalau basis massa PKB ditanya, mereka akan mengatakan kalau PKB itu adalah Gus Dur. Sementara itu, Plt Ketua Umum DPP PKB, Ali Masykur Musa melaporkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Muhaimin beserta enam fungsionaris partai ke Depkumham. Laporan ini akhirnya diproses hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) dan dimenangkan oleh pihak Muhaimin.

Meski hubungan mereka tampak panas, Muhaimin seringkali menyatakan jika dia masih santri Gus Dur. Baginya, Gus Dur masih merupakan tokoh yang menjadi jendela rumah NU, sekaligus rumah buat bangsa Indonesia. Bagi Cak Imin, Gus Dur masih merupakan guru yang utama. Kegaguman keponakan dengan paman ini terungkap dalam buku Muhaimin yang diterbitkan pada 2010, *Gus Dur: Pemikiran dan Perjuangan* (Iskandar, 2010).

Menakertrans

Muhaimin Iskandar duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono percaya jika anak muda NU ini bisa menjawab tantangan kompleksnya masalah pengangguran, transmigrasi, hingga tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Muhaimin memiliki angan besar, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpinnya bisa mengurangi jumlah TKI terutama sektor informal yang pergi ke luar negeri. Untuk itu, dia pun menargetkan pengurangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri hingga ke titik nol atau zero mulai tahun 2017.

Dia mengatakan, kebijakan pengurangan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri berlaku bagi tenaga kerja sektor informal, sedangkan formal masih dilakukan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. Menurutnya, permintaan tenaga kerja informal masih bisa dipenuhi apabila negara penerima memenuhi syarat minimum yang ditetapkan sehingga TKI tenang, aman dan nyaman selama bekerja di luar negeri. "Syarat minimal yang harus dipenuhi diantaranya adanya jaminan perlindungan dan penghargaan sesuai tenaga kerja formal, gaji dimasukkan ke rekening bank dan adanya jaminan sosial," ujarnya.

Menurutnya, negara yang sudah siap memenuhi syarat TKI informal adalah Hongkong, Taiwan dan Malaysia yang masih mempertimbangkan, sedangkan Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya masih belum mau. Untuk TKI, Cak Imin juga mengeluarkan kebijakan *roadmap* tahun 2017. Sebuah program jangka panjang yang dia gagas sebagai upaya perbaikan kualitas kompetensi kerja masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dalam *roadmap* tersebut, dituangkan tahapan-tahapan dan program kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berencana untuk menghentikan penempatan TKI sektor *domestic worker* ke luar negeri pada 2017 nanti. **Muhaimin mengatakan upaya penghentian penempatan TKI domestik worker pada tahun 2017 ini tidak bisa dilakukan secara mendadak melainkan dilakukan secara bertahap dan harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif.**

Dijelaskan Muhaimin dalam *roadmap* tahun 2017 nantinya TKI *domestic worker* yang berkerja di luar negeri harus berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu *house keeper* (pengurus rumah tangga), *cooker* (tukang masak), *baby sitter* (pengasuh bayi/ anak), *caregiver* (perawat jompo). Walaupun sangat terpaksa bekerja di luar negeri di sektor *domestic*, maka posisinya harus jelas dan harus diakui oleh negara penempatan yang bersangkutan. Harus ada pengakuan kerja berdasar jabatan dan profesi dari negara penempatan yang meminta.

Muhaimin mengatakan sebenarnya saat ini pemerintah ingin segera menghentikan penempatan TKI *domestic worker* ke luar negeri. Namun pemerintah harus bersikap realistis dengan kondisi masyarakat yang masih butuh bekerja di luar negeri. Muhaimin menyadari bahwa Pemerintah tidak berhak melarang warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, karena akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi hak untuk bekerja dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai solusinya, Indonesia harus meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja para calon TKI yang hendak bekerja keluar negeri serta menyediakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri sehingga para TKI dapat beralih profesi untuk bekerja di dalam negeri saja. Tantangan Muhaimin untuk menangani masalah TKI memang kompleks. Tak hanya masalah penganiayaan, banyak TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Ternyata adalah kasus Wilfrida Soik (22), tenaga kerja Indonesia asal Belu, Nusa Tenggara Timur, yang terancam hukuman mati di Malaysia.



depnakertrans. go.id

Muhaimin menegaskan, dalam melakukan pembelaan pemerintah tidak membedakan mana TKI yang legal dan ilegal. Pemerintah juga menggunakan pengacara terbaik di negara itu. Muhaimin menegaskan, pemerintah tidak pandang bulu soal itu. Untuk penanganan kasus TKI ini kita menggunakan lawyer terbaik dari negara TKI tersebut.

Muhaimin menjelaskan, pemerintah melalui Satgas TKI menggunakan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan kasus TKI di luar negeri. Misalnya di Saudi Arabia, Satgas menjalin komunikasi dengan pemerintah dan Raja serta keluarga korban untuk melakukan pembelaan. Sehingga vonis terpidana TKI bisa digeser menjadi setidaknya hukuman seumur hidup.

Pemerintah juga terus mengupayakan diplomasi yang mengedepankan aspek-aspek perlindungan WNI, antara lain melalui penajakan pembuatan perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara lain untuk memastikan adanya *blanket* guarantee pemerintah negara tujuan terutama untuk jaminan atas kondisi pekerjaan dan upah yang layak untuk TKI. Dia mengaku, terbantu dengan ratifikasi konvensi PBB tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya yang baru-baru ini dilakukan yang akan meletakkan sendi-sendi dasar bagi perbaikan sektor hulu demi terwujudnya penempatan dan perlindungan yang berkualitas bagi TKI.

Pemerintah juga melaksanakan beberapa terobosan, salah satunya adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. Menurut Muhaimin, Satgas tersebut pertama kali dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 dengan gagasan untuk memastikan bahwa pemberian bantuan hukum kepada WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati dapat dilakukan dengan lebih optimal dan efektif.

Pejuang Demokrasi

Sejak duduk di bangku kuliah, jiwa aktivis dan kritis Muhaimin sudah nampak. Pada saat kuliah di FISIP UGM, Muhaimin telah aktif dalam menyuarakan pentingnya keadilan dan demokrasi bagi Indonesia. Hal tersebut disalurkan melalui keanggotaannya dalam organisasi ekstra kampus, PMII. Tak hanya itu, dalam internak kampus, Muhaimin pernah tercatat sebagai Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial.

Bak gayung bersambut, jiwa kritisnya tersebut pun menemui momentumnya saat 1998. Rezim orde baru yang otoriter akhirnya dipenetrasi oleh kekuatan massa, terutama mahasiswa. Ribuan mahasiswa menuntut pemerintahan Soeharto lengser. Saat aksi mahasiswa bergejolak di Jakarta, Muhaimin juga turut serta menentang rezim otoritarian Soeharto.

Pasca peristiwa tersebut, menandai kehidupan baru dalam berbangsa dan bernegara. Rezim reformasi telah memberikan ruang kebebasan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi mengontrol pemerintah.

Setelah runtuhnya rezim Soeharto ini pula, muncul gagasan untuk membentuk partai yang berbasis NU. Dengan inisiasi Gus Dur, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terbentuknya PKB ini membawa angin segar bagi para kader NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Dari gerbong inilah, Muhaimin menyalurkan aspirasi politiknya.

Karir Muhaimin di PKB pun berjalan mulus. Muhaimin pernah menjabat sebagai Sekjen dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidz PKB. Dan dari partai berlambang bola dunia ini pula, Muhaimin beberapa periode menjabat sebagai anggota DPR RI.

Muhaimin merupakan salah satu tokoh yang sangat memperhatikan progresifitas demokrasi. Baginya, kehidupan berbangsa dan bernegara

yang kuat akan tercipta apabila sistem demokrasi dapat terkelola dengan baik.

Muhaimin menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya telah bereksperimen dalam proses transisi demokrasi sejak tahun 1999. Muhaimin menilai perjalanan transisi demokrasi hingga saat ini telah membawa banyak pencapaian, seperti amandemen UUD 1945, pemilu dan pilkada langsung, serta kebebasan pers yang diakui. Dengan berbagai pencapaian yang ada, Indonesia perlahan berada pada masa konsolidasi demokrasi. (*Kompas*, 15 Januari 2014)

Menurutnya, momentum pemilu 2014 ini adalah peluang untuk mendorong kristalisasi demokrasi, penyederhanaan partai politik, efisiensi pemerintahan dan APBN yang sungguh-sungguh dapat menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, momentum yang sangat berharga ini perlu digunakan untuk menemukan pemimpin yang dapat mewujudkan itu semua.

Dalam esay nya yng berjudul Demokrasi dan Mentalitas Elit, Muhaimin menjelaskan urgensi sebuah pemimpin yang berada dalam proses demokrasi. Menurutnya, kepemimpinan nasional yang kuat bisa terbentuk dengan dua syarat.

Pertama, pemimpin yang berani, berkarakter, visioner dan tulus hati (*asshidq*). Yaitu pemimpin yang berani mengambil keputusan yang tegas jika menyangkut nasib rakyat dan kepentingan nasional yang strategis.

Muhaimin mencontohkan sosok Vladimir Putin yang dianggapnya tidak menolak liberalisasi. Namun, dengan kepemimpinan Vladimir Putin, mampu meminimalisasi eksekutif negatif dari proses itu dengan mengimplementasikan liberalisasi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan nasionalnya. Ini yang disebutnya sebagai "liberalisme terkontrol".

Dengan keberanian, pemimpin tidak akan didikte negara lain, dan selalu menjaga hubungan baik dengan semua negara.

Kedua, kepemimpinan nasional yang kuat mensyaratkan bersatunya para elite politik. Tanpa persatuan antar elite maka kepemimpinan nasional akan rapuh, cenderung pragmatis, hedonistik, serta mudah diintervensi oleh kepentingan non-nasional.



Karena itu, para pemimpin seharusnya mulai belajar untuk rendah hati dan dewasa. Mereka perlu meninggalkan egoisme kelompok dan pribadi untuk suatu kepentingan strategis dan jangka panjang. Dengan kebersamaan itu, secara bertahap kompleksitas persoalan bangsa akan bisa diselesaikan. Tanpa persatuan di kalangan elite, kebangkitan bangsa tidak akan pernah terwujud.

Mentalitas elite adalah kunci utama menuju perubahan. Sistem atau nilai apa pun yang dijalankan, pada akhirnya yang menentukan adalah mentalitas para elitnya sendiri. Demokratisasi seperti apa pun yang dipilih, seharusnya diorientasikan secara nyata untuk kesejahteraan rakyat dan penguatan identitas nasional dan karakter bangsa.

Dua konsep tersebut dapat menjadi cermin bagaimana visi Muhaimin sebagai seorang pemimpin. Apalagi posisinya sebagai Ketua PKB saat ini dapat memberikan koreksi terhadap kepemimpinan negara selama ini.

Konteks tersebut pula yang juga ingin dibrandingkan Muhaimin kepada partainya. Dengan mengusung jargon Indonesia Lahir Batin, Muhaimin ingin menguatkan kembali citra PKB yang berakar NU.

Jiwa nasionalisme dan religius NU sudah terbukti dalam proses berbangsa dan bernegara selama ini. Muhaimin ingin mengingatkan publik untuk PKB adalah partai yang menjaga penuh NKRI. Dalam proses demokrasi, PKB juga menjadi salah satu pelopor partai yang toleran. Nilai-nilai yang juga digemakan oleh *faunding father* PKB, yakni KH Abdurrahman Wahid. Branding ini diharapkan mampu mendongkrak elektabilitas PKB dalam menjalani kompetisi pemilu 2014 nanti. Strategi ini tentu saja tidak lepas

dari peranan dan pemikiran Muhaimin yang ingin menunjukkan kembali bahwa PKB masih ada. PKB masih menjadi partai yang memperjuangkan nilai-nilai ke-NU-an sesuai hakekat pendiriannya pertama kali.

Sebagai sosok politisi muda, Muhaimin terbilang kritis dan berwawasan tajam. Gagasannya terhadap kepemimpinan bangsa tersebut dapat menjadi alternatif untuk menemukan konsep pemimpin yang paling cocok membawa tonggak kemudi bangsa selanjutnya.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Peluang Muhaimin untuk menjadi capres di Pilpres 2014 cukup ada. *Pertama*, ia saat ini adalah Ketua Umum PKB. Tentu dengan posisinya seperti itu—apalagi jika PKB nanti memiliki suara tinggi di pemilu legislatif—maka peluang ia untuk bisa mencalonkan diri menjadi presiden amat besar. *Kedua*, Muhaimin merupakan tokoh muda yang selama ini punya banyak prestasi. Ia menjadi menteri dan ketua umum partai dalam umur yang relatif muda. Beberapa kebijakannya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendapat angin segar dari masyarakat.

Lebih dari itu, menurut survei *opinion makers* dan pakar Pol-Tracking Institute yang dirilis Oktober 2012 lalu menyebutkan bahwa skor Muhaimin dalam aspek akseptabilitas partai mencapai 62,5 persen. Tentu skor ini bisa menjadi modal bagi Muhaimin.

Meski demikian, tantangan terberat Muhaimin tentu ihwal elektabilitas yang masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 2014 lalu yang menyebutkan posisi elektabilitas Muhaimin belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Selain itu, di internal PKB sendiri, ia juga sudah mengusung capres, yakni Rhoma Irama Mahfud MD dan Jusuf Kalla. Jika ia tiba-tiba mencalonkan diri, maka publik akan menganggapnya tidak konsisten. Meski begitu, dalam politik tak ada yang tak mungkin.

Dalam konstelasi politik saat ini, dinamika politik berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, setiap partai politik harus berhati-hati agar tidak mudah tersandung dengan berbagai isu politik yang bisa jadi dihembuskan oleh para lawan politiknya.

Hal ini pula yang patut diperhatikan oleh Muhaimin sebagai nakhoda partai yang identik dengan warna hijau tersebut. Apalagi sepeninggal Gus Dur, nuansa konflik internal PKB belum mereda. Setidaknya, ketidakrelaan pihak keluarga Gus Dur kepada para tokoh politik yang memanfaatkan nama besar Gus Dur dalam kampanyenya menjadi bukti bahwa masih ada yang belum selesai antara pihak keluarga Gus Dur dengan PKB.

Sebagai politisi yang juga dekat dengan keluarga Gus Dur, Muhaimin tentu saja akan berusaha memecahkan persoalan tersebut. Apalagi dengan perpecahan tersebut berimplikasi pada *voters* fanatik Gus Dur yang mungkin tidak tertarik lagi dengan PKB. Sepeninggal Gus Dur, PKB belum memiliki tokoh yang menjadi magnet elektoral seperti Gus Dur.

Upaya merajut kembali benang-benang yang putus harus segera diselesaikan, agar PKB kembali menjadi basis aspirasi pemilik NU. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka persoalan elektabilitas partai tidak perlu dipikirkan lagi karena NU sebagai ormas islam terbesar di negeri ini memiliki basis massa yang besar dan tersebar di berbagai pelosok negeri.

Apabila PR tersebut dapat diselesaikan, maka ini bisa menjadi modal tersendiri pula bagi Muhaimin untuk menyongsong pilpres 2014. Pertama, saat ini adalah Ketua Umum PKB. Tentu dengan posisinya seperti itu, maka peluangnya mencalonkan diri menjadi presiden amat besar (seperti yang terjadi di beberapa partai besar lainnya).

Kedua, Muhaimin merupakan tokoh muda yang selama ini punya banyak prestasi. Ia menjadi menteri dan ketua umum partai dalam umur yang relatif muda. Beberapa kebijakannya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendapat angin segar dari masyarakat.

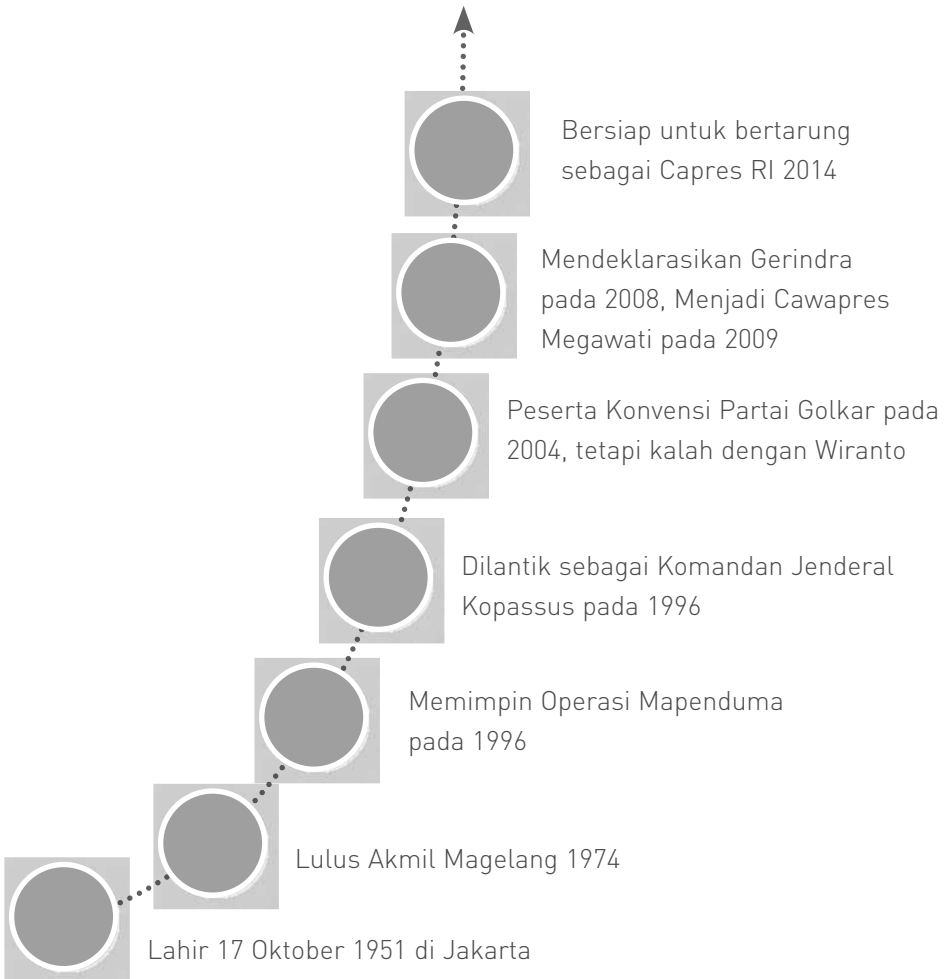
Ketiga, Muhaimin juga masih tergolong politisi yang bersih dari kasus-kasus korupsi. Beberapa isu yang ditujukan kepadanya belum terbukti kebenarannya. Keempat, kedekatannya pada ulama dan keluarga besar NU, menjadi modal tersendiri untuk menjaring massa dari NU. Keempat, jabatan publik yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi nilai tersendiri dalam meningkatkan elektabilitasnya.

Meski demikian, tantangan terberat Muhaimin tentu ihwal elektabilitasnya yang masih sangat rendah. Wacana poros tengah yang dikundangkan kepada partai-partai islam juga belum memberikan peluang kepadanya.

Menurut survey dari LSI menempatkan Hatta Rajasa sebagai tokoh populer di antara tokoh-tokoh partai Islam yang ada. Hatta Rajasa memperoleh suara, 31,3%, Yusril Ihza Mahendra 15,2%, Muhaimin Iskandar 11,8%, Suryadharma Ali 10,7% dan Anis Matta 7,5%.

PRABOWO SUBIANTO

Pemimpin Potensial





facebook.com/PrabowoSubianto

Prabowo memiliki nama lengkap Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Ia lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari orang tua yang dikenal sebagai salah seorang intelektual sekaligus pejuang. Prabowo merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya perempuan, Bintia-ningsih dan Mayrani Ekowati. Sedangkan adiknya seorang laki-laki, Hasyim Djojohadikusumo.

Sang ayah, Soemitro Djojohadikusumo dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia yang mencicipi pendidikan di Barat. Meski begitu, tak sedikitpun nasionalismenya tergadai. Soemitro dikenal sebagai pemikir sejati yang tak segan mengkritik kekuasaan yang dianggapnya menyimpang. Soemitro dikenal galak terhadap rezim ketika itu sekalipun Presiden Soeharto merupakan besannya. Jika sudah mengkritik, bahasanya blak-blakan. Tanpa tedeng aling-alang.

Prabowo kecil dididik dengan ketegasan dan disiplin. Sekalipun kehidupan ekonominya tergolong mapan, namun tak ada fasilitas berlebihan yang diberikan orang tuanya. Segala kebutuhan diberikan ala kadarnya. Hal itu dimaksudkan supaya Prabowo tidak cengeng dan mudah mengiba. Sebagai seorang laki-laki, sikap ksatria dan tegas harus dipegang erat sebagai bekal menghadapi masa depan yang berat. Dengan begitu, maka seseorang bisa *survive*.

Beruntung Prabowo dilahirkan dari keluarga intelektual-birokrat yang jejaring relasinya begitu lengkap. Sebagai seorang ekonom yang tengah

berkibar, pergaulan Soemitro sangat luas mulai dari pejabat sampai rakyat biasa. Hal tersebut memungkinkan Prabowo kecil diajak ayahnya untuk bertemu banyak tokoh, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, langsung atau tidak langsung alam bawah sadarnya telah memuncak imaji untuk mengikuti jejak-jejak kebangsaan sang tokoh.

Dalam kultur Jawa, bertemu orang besar dan berpengaruh merupakan kemewahan tersendiri yang tak mungkin dicapai semua orang. Bertemu dengan tokoh-tokoh pendiri republik tentu menjadi berkah tersendiri bagi Prabowo, yang mungkin juga saat itu telah terkena pengaruh dari karakter mereka. Ditambah lagi dengan nuansa perjuangan yang diterapkan di dalam keluarganya semakin menambah rasa kecintaan dan keinginan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negaranya.

Prabowo tumbuh menjadi anak yang tangguh, cerdas, dan mewarisi sifat ayahnya yang penuh dedikasi dan disiplin. Imajinasinya terkait kecintaan terhadap Tanah Air dan perjuangan para pahlawan begitu melekat di benaknya. Makanya tak heran ketika kemudian Prabowo lebih memilih menjadi prajurit sejati ketimbang mengikuti jejak ayahnya yang seorang ekonom tulen. Dia memandang, prajurit ialah figur ideal sebagai manifestasi sosok pahlawan yang berjuang bagi rakyatnya di era modern.

Tentara sebagai Pilihan Hidup

Maka selepas lulus pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di American School in London pada tahun 1969, Prabowo kemudian memilih masuk AKABRI pada tahun 1970. Paska lulus SMA tersebut, sebetulnya Prabowo sudah diterima di tiga universitas bergengsi di Amerika Serikat, namun ia kukuh dengan pendiriannya. Ia lebih memilih pergi ke Magelang untuk mengikuti pendidikan kemiliteran di Lembah Tidar.

Keputusannya itu semula ditentang oleh sang ayah. Soemitro merasa khawatir dengan langkah Prabowo masuk dunia militer karena kondisi perpolitikan nasional kala itu yang kurang kondusif. Rezim Orde Baru yang represif seringkali menggunakan tangan tentara untuk memberangus demonstrasi mahasiswa yang mulai muncul untuk menentang pemerintah. Tentu Soemitro tak mau, suatu kelak, anaknya harus *vis-a-vis* dengan mahasiswa sebagai implikasi dari perbedaan pandangan yang tajam.

Namun, bukan Prabowo namanya kalau niatnya mudah digoyahkan. Kalau sudah berkeinginan, ia akan jaga sekuat tenaga sekalipun dihempaskan ombak dan badai. Ia tetap melangkah untuk masuk zona merah (*red zone*) dengan menjadi anggota militer. Terlebih, kala itu, seorang perwira tinggi TNI terus mendorong Prabowo untuk masuk pendidikan militer. Maka Prabowopun berangkat ke Magelang untuk meraih cita-citanya menjadi seorang prajurit sejati.

Babak baru kehidupannya pun dimulai. Bukan hanya raganya yang mesti jauh dari keluarga, namun fisik dan mentalnya ditempa sebegitu rupa khas angkatan bersenjata. Prabowo seolah menemukan dunia yang diidamkannya selama ini. Dunia militer yang keras dan penuh disiplin. Dunia yang kelak akan mengantarkannya ke labirin kontroversi.

Statusnya sebagai anak seorang begawan ekonomi yang dianggap dekat dengan kekuasaan dan sekolahnya yang banyak dihabiskan di luar negeri, rupanya menjadi alasan bagi segelintir temannya untuk mencandainya. Terlebih, Prabowo yang kala itu belum terlalu lancar berbahasa Indonesia karena selalu sekolah di luar negeri, menjadi alasan kuat teman sejawatnya untuk mengatakan bahwa nasionalismenya diragukan. Bagaimana mau menjadi seorang prajurit sejati, berbahasa nasional saja tidak lancar. Padahal bahasa merupakan simbol dan identitas diri sebuah bangsa yang wajib dikuasai. Kurang lebih begitulah logika yang dipakai teman sejawat Prabowo untuk menggulung mentalnya.

Namun Prabowo bergeming. Ia menganggap segala ejekan bernada sinis dari sejawatnya hanyalah riak kecil dari rintangan yang akan jauh lebih besar dihadapi di kemudian hari. Prabowo pun terus melaju.

Tahun 1974 ia lulus dari AKABRI. Beberapa teman sejawatnya Sjafrie Syamsuddin (Wakil Menteri Pertahanan sekarang), Edi Budianto, dan Mahidin Simbolon. Selepas lulus, ia banyak ditempatkan di pasukan tempur yang tentu saja banyak memberikannya pengalaman dan pelajaran. Kecerdasan dan loyalitasnya semakin terlihat sehingga banyak diapresiasi atasan-atasannya. Karier kemiliterannya pun mudah menanjak.

Tahun 1976 pangkatnya sudah naik menjadi Letnan Dua (Letda) dan memegang jabatan sebagai Komandan Peleton Grup I Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha). Tak perlu waktu lama untuk naik pangkat. Tepat setahun kemudian, Prabowo memegang kendali jabatan sebagai Komandan Kompi Nanggala 28 sampai tahun 1980-an.

Prabowopun mendapatkan pengalaman lapangannya yang pertama ketika tahun 1976 dikirim ke Timor Timur yang baru saja ditinggalkan pasukan Portugis. Laiknya di sebuah wilayah berkonflik, bahaya dan maut mengintai setiap saat. Namun begitulah konsekuensi sebagai prajurit. Dalam segala keterbatasan, ia dan pasukannya harus terus berpatroli untuk memantau situasi. Perjalanan patrolinya tak selalu mulus. Pernah suatu ketika, ia dan pasukannya nyaris mati ketika dikepung gerilyawan Frente Revolutionaria de Timor-Leste Independente (FRETILIN). Beruntung, Tuhan masih memberikannya kemujuran dengan berhasil lolos dari maut.

Keadaan pun berbalik. FRETILIN yang terdesak sampai akhirnya bisa dilumpuhkan. Sejak penaklukan pasukan pemberontak FRETILIN itu namanya kian berkibar. Prabowopun diidentikkan dengan kecerdasan dan keberanian. Karena capaiannya itu, ia kemudian dikirim ke Jerman Barat sebagai wakil Indonesia untuk mengikuti pendidikan anti-teroris di Grenzschtzgruppe 9 (GSG 9). Ketika itu, ia dikirim bersama Mayor Luhut Pandjaitan yang menjabat Komandan Detasemen 81.

Sekembalinya dari tugas pendidikan di Jerman Barat, bintang Prabowo semakin bersinar terang. Kepangkatannya terus menaik bak roket yang dilepaskan ke angkasa jauh. Kebintangannya pun ternyata sejalan dengan kisah-kasihnya. Wanita idamannya tak main-main, ia anak seorang penguasa Orde Baru. Prabowo pun kemudian menikah dengan Siti Hedyati Hariyadi (Titiek Soeharto) pada tahun 1983. Pernikahan yang bukan hanya menaikkan statusnya sebagai mantu seorang penguasa, namun juga memperluas jejaringnya bukan hanya dari kalangan militer, namun juga politik.

Semenjak menjadi mantu Presiden Soeharto, Prabowo semakin dekat dengan beberapa politisi teras Golongan Karya. Itulah awal mula Prabowo bersinggungan dengan politik praktis. Substansi pembicaraannyapun berubah dari yang tadinya senang membahas soal profesionalisme keprajuritan dan kualitas militer, menjadi gemar membicarakan isu-isu kebangsaan, pemerintahan, dan kenegaraan. Cakupan pemikirannya tidak melulu kemiliteran namun diperluas ke masalah kebangsaan dalam berbagai pola dan dimensinya.

Lantas, bagaimana dengan sikap Soemitro pascaanaknya menjadi mantu seorang presiden yang selama ini selalu dikritiknya? Jawabannya,

sama sekali tak berubah. Hobi mengkritiknya masih dipertahankan. Bahkan, beliau menganggap pernikahan puteranya dengan Titiek Soeharto merupakan *historical accident* yang mustahil mengurangi daya kritisnya terhadap sang besan. Sampai-sampai Soeharto saking jengkelnya pernah berujar, “Tiek, mertuamu sudah sepuh *kok* masih radikal saja”. Soemitro pun menjawabnya dengan enteng. “Ya saya memang sudah terlalu tua untuk mengubah diri” (Soedarmanta, 2013).

Komandan Baret Merah

Karier Prabowo kian melejit. Tahun 1993, Prabowo dipercaya sebagai Pejabat Sementara Komandan Grup III Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus). Hanya beberapa saat menjadi pejabat “sementara”, iakemudian diangkat menjadi Pejabat Tetap Komandan Grup III Pusat Pendidikan Kopassus.

Sebagaimana pada penugasan-penugasan sebelumnya, Prabowo senantiasa menjalankan segala beban tanggungjawabnya dengan sepenuh hati. Dengan begitu, kariernya semakin moncer. Di tahun 1994, ia sudah menyandang jabatan Wakil Komandan Kopassus mendampingi Brigjen TNI Soebagyo HS yang menjabat Komandan Kopassusnya. Jabatan yang tentu tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang nomor satu di jajaran pasukan elite militer Indonesia.

14 bulan tepatnya Prabowo menduduki jabatan Wakil Komandan Kopassus. Setelah itu, iapun resmi menggantikan Soebagyo HS yang diangkat menjadi Panglima Kodam IV/ Diponegoro. Prabowo diambil sumpahnya menjadi Komandan Kopassus pada tahun 1995. Tanda bintang di lengannyapun bertambah menjadi dua. Sejak saat itu, ia resmi menjadi pemimpin di institusi yang bermotto “Lebih Baik Pulang Nama Daripada Gagal di Medan Tugas”.

Sebetulnya terkaan naiknya Prabowo menjadi Komandan Kopassus sudah beredar sejak jauh-jauh hari. Bukan hanya beredar di kalangan elite militer saja, kabar tersebut juga sudah diulas oleh sebuah jurnal yang berbasis di Amerika Serikat, *East-West Centre*. September 1995 tepatnya, dua bulan sebelum Prabowo diangkat menjadi Komandan Kopassus, jurnal tersebut sudah meramalkan kalau sebentar lagi Prabowo akan naik pangkat. Ramalan yang memang terbukti kebenarannya. Prabowo diangkat

menjadi Komandan Kopassus berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor 820/XI/1995 tertanggal 15 November 1995. Usianya waktu itu baru 44 tahun.

Sebagai komandan pasukan elite, tugas, dan tanggungjawabnya semakin berat. Beberapa tindakan yang dianggap sebagai prestasi selama masa tugasnya sebagai Komandan Kopassus ialah keberhasilannya dalam Operasi Mapenduma di Wamena, Papua dan juga menginisiasi Ekspedisi Mount Everest, Nepal.

Operasi Mapenduma terjadi bermula ketika sejumlah tim peneliti internasional yang tergabung dalam Operasi Lorentz '95 disandera kelompok pemberontakan rakyat Papua (OPM). Setelah ditelusuri dan dianalisis ternyata lokasi penyanderaan berada di pedalaman hutan berketinggian 3.000 meter diatas permukaan laut. Sebuah misi pasukan elitepun dirancang dibawah komando Prabowo. Fokusnya satu: membebaskan para sandera hidup atau mati.

Operasi tersebut berjalan cukup alot dan panjang. Banyak energi dan pikiran anggota yang terlibat operasi begitu terkuras. Namun misi penyelamatan itu harus tetap dijalankan apapun risikonya. Keberadaan warga asing dalam tim yang disandera tentu menjadi hal yang wajib dipertimbangkan secara matang. Keselamatan mereka harus dijamin untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara aman dan terkendali.

Operasi Mapenduma berjalan lebih kurang 129 hari sampai akhirnya berhasil menyelamatkan sebagian besar korban penyanderaan. Dari 12 orang yang tergabung dalam tim peneliti, sebanyak 2 orang meninggal selama proses penyanderaan tersebut. Tentu tak ada gading yang tak retak. Keberhasilan tersebut merupakan buah kesabaran dan kerja keras tim penyelamat yang terlibat dibawah komando sang komandan, Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga yang menginisiasi tim ekspedisi pengibaran bendera merah putih di Mount Everest, puncak tertinggi dunia. Kala itu, jabatannya sudah menjadi Komandan Jenderal Kopassus yang diemban dari tahun 1996-1998. Prabowo ingin dengan mengibarkan bendera negara di tempat paling tinggi akan memberikan kebanggaan dan kejayaan kepada bangsa. Setelah sejumlah persiapan, tim ekspedisi yang beranggotakan Kopassus, Wanadri, FPTI dan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Indonesia mulai bergerak pada 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal. Tim

gabungan tersebut dimentori oleh seorang berkebangsaan Rusia, Anatoli Boukreev. Awalnya ia meragukan kekuatan dan kemampuan tim ekspedisi karena memang sebelumnya tak punya pengalaman mendaki Everest. Namun Prabowo meyakinkan kalau tim tersebut, terutama anggota Kopassus yang terlibat memiliki daya juang tinggi.

Dan memang benar, ekspedisi yang memakan waktu sekitar 2 bulan itu sukses dijalankan. Sabtu 26 April 1997 pukul 15.25 merupakan hari yang penuh sejarah. Pratu Asmujiono yang merupakan Anggota Tim Selatan berhasil menjadi orang pertama di dalam tim yang mencapai puncak Everest. Keberhasilannya kemudian diikuti oleh Sertu Misirin. Itulah momen yang paling membanggakan karena Indonesia berhasil menempatkan wakilnya sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menggapai Mount Everest, puncak tertinggi diatas 8.500 meter diatas permukaan laut.

Misteri Mei 1998

Pascapemilu tahun 1997 yang digelar Orde Baru, memang sudah terjadi banyak pergolakan. Mahasiswa dan para aktivis prodemokrasi sudah berani secara terbuka menyuarakan aspirasinya untuk membebaskan keter tindasan rakyat dari kuasa rezim. Pemerintah pun meresponsnya dengan tindakan represif. Buntutnya, banyak aktivis yang diculik dan dibungkam. Rezim begitu ketakutan kekuasaannya akan segera terjungkal jika membiarkan eskalasi demonstrasi yang kian meninggi.

Dan puncaknya, sebagaimana diketahui banyak orang terjadi pada Mei 1998. Prabowo kala itu sudah menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Jabatan Danjen Kopassus dipegang oleh Muchdi Purwoprandjono dan Pangdam Jaya di tangan Sjafrie Syamsuddin, para sejawatnya. Tragedi kelam yang menjadi sejarah hitam kebangsaan benar-benar terjadi. Kerusuhan terjadi di seantero Jakarta tanpa bisa dibendung. Pembakaran sejumlah gedung dan toko, penyiksaan terhadap sejumlah orang, penembakan terhadap kelompok aktivis, bahkan pemerkosaan yang konon dilakukan terhadap etnis Tionghoa, masif terjadi.

Prabowo yang berada didalam rezim dan kebetulan sebagai mantu Soeharto dituduh sebagai tokoh yang mendalangi penculikan sejumlah aktivis. Tuduhan itu berkembang tanpa tahu siapa yang pertama kali meng-

gaungkannya. Iapun tak menampik dituduh sebagai dalang penculikan—atau lebih tepatnya mengamankan—beberapa aktivis seperti Andi Arief, Pius Lustrilang, Desmond J. Mahesa, dan belasan lainnya. Dengan sikap ksatria, Prabowo mengakui bahwa dirinya pernah memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan beberapa aktivis tersebut.

Namun ia mengelak kalau disebut sebagai otak penculikan sejumlah aktivis karena ia juga diperintahkan atasannya. Untuk diketahui bahwa dalam militer, komando atasan harus direspons dengan satu sikap: “siap laksanakan!”. Dalam militer, tak ada kata menawar atau bahkan menolak. Karena itulah, mau tak mau Prabowo harus menuruti perintah untuk mengamankan para aktivis tersebut yang dikenal sebagai pucuknya. Namun sayang, dia tak pernah menyebutkan secara terang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan atasan yang telah memerintahkan penculikan tersebut.

Intinya, Prabowo hanya menjadi kepanjangan tangan atas perintah tersebut bukan sebagai dalang, menurut pengakuannya. Dan terkait dengan kejadian tersebut, itikad baik telah ditunjukkan paling tidak kepada tiga orang yang pernah diculiknya, yakni Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilang, dan Haryanto Taslam. Prabowo telah meminta maaf kepada ketiganya dan kemudian mengajaknya bergabung dalam kapal politik yang telah dibentuknya, Partai Gerindra, untuk bersama-sama memperbaiki kondisi bangsa.



Tak sampai disitu, Prabowo juga pernah disangka sebagai dalang kerusuhan Mei 1998. Menurutny, tuduhan tersebut keji dan tak sesuai fakta. Namun ia tetap memilih diam seribu bahasa kala itu, karena menganggap percuma saja mengklarifikasi kebenaran yang terjadi dalam situasi yang jauh dari kondusif. Baru setelah dua tahun berselang, Prabowo kemudian bercerita apa yang sebetulnya terjadi versi dirinya kepada Asiaweek tahun 2000—karena waktu itu dia tak percaya dengan media tanah air untuk memberikan klarifikasi.

Ketika kerusuhan terjadi, Jabatannya sudah menjadi Pangkostrad. Ketika huru-hara meletus, ia berempati dengan keadaan. Ia berupaya untuk mengendalikan keadaan, dengan misalnya, menghubungi atasannya Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk mendapatkan instruksi langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Kala itu, Prabowo sudah mengetahui kalau Wiranto akan berangkat ke Malang untuk menghadiri parade militer.

Berulang kali Prabowo menghubungi Wiranto, berulang kali pula ia mendapatkan jawaban *“the show must go on”*, pertunjukkan harus tetap dilanjutkan. Sejarahpun mencatat, bahwa memang Wiranto dan sejumlah perwira TNI, termasuk Prabowo, tetap berangkat ke Malang sekalipun situasi di ibukota sudah semakin genting. Tak perlu analisis yang tajam dan mendalam untuk membaca fakta itu, *toh* masyarakat awam pun bisa melihat bahwa ada kejanggalan kenapa sejumlah perwira itu nekad menuju Malang padahal situasi Jakarta begitu mencekam.

Sintong Pandjaitan dalam *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando* (2009) juga mengemukakan kejanggalannya mengapa bisa-bisanya Wiranto yang merupakan pejabat paling berwenang untuk mengendalikan situasi, seolah malah menyepi. Kalau saja, para pejabat penting ABRI itu membatalkan rencana mereka ke Malang, maka segala kemungkinan terburuk yang pada akhirnya terjadi, bisa saja dikendalikan. Bagaimanapun kekuatan ABRI sudah terlatih dalam mengendalikan situasi keamanan seperti apapun.

Menyoal tuduhan kalau Prabowo bersama beberapa rekan menjadi dalang kericuhan Mei 1998, dikaitkan dengan pertemuan pada tanggal 14 Mei bersama beberapa tokoh seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, termasuk adiknya Hasyim Djojohadikusumo. Banyak pihak, termasuk keluarga Cendana yang menuding kalau kerusuhan tersebut sengaja

diciptakan Prabowo untuk merebut kekuasaan mertuanya. Tentu saja hal itu dibantahnya.

Menurut adiknya, Hasyim Djojohadikusumo, pertemuan 14 Mei 1998 di Markas Kostrad sama sekali tidak membicarakan soal perebutan kekuasaan. Kelompok Buyung Nasution ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga keamanan sukar dikendalikan. Jakarta seolah menjadi lautan huru-hara. Manusia-manusia begitu beringas seperti kerasukan syetan. Membaca itu, Buyung Nasution kemudian sampai pada kesimpulan bahwa rakyat memang sudah tak menginginkan pemerintahan Soeharto. Sang penguasa rezim itu harus segera turun dari jabatannya.

Pandangan tersebut diiyakan Prabowo. Namun ia mengungkapkan bahwa dirinya tak memiliki *privilege* untuk memengaruhi keputusan mertuanya supaya segera meletakkan kekuasaannya. Keputusan finalnya tetap berada di tangan Soeharto yang kala itu sedang berada di Mesir. Pertemuan itu juga, tak diinisiasi oleh Prabowo sendiri melainkan oleh kelompoknya Buyung Nasution yang ingin mengetahui situasi kekinian kala itu. Jadi, jauh panggang dari api jika disebut Prabowo menggerakkan kerusuhan melalui pertemuan tersebut. Terlebih kerusuhannya juga sudah terjadi sebelum tanggal 14 Mei.

Soeharto Undur Diri

Posisi Prabowo menjelang kejatuhan mertuanya cukup unik. Di satu sisi, sebagai Pangkostrad dia bertanggungjawab menjaga kekuasaan supaya tidak runtuh, terlebih posisinya juga sebagai mantu presiden. Namun di sisi lainnya, dia dikenal dekat dengan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan rezim, seperti Amien Rais, BJ Habibie, Gus Dur, dan beberapa tokoh lain. Karena kedekatannya itulah, ia dituduh “bermain di dua kaki”. Bahkan ada yang menyebut sosoknya penuh misteri, entah berada di pihak yang mana.

Tak pelak, keluarga Cendanapun berbalik arah. Prabowo dianggap tak loyal lagi kepada Soeharto di penghujung masa kekuasaannya. Ketika Soeharto tiba dari Mesir pada 15 Mei 1998, Prabowo termasuk orang yang ikut dalam penjemputan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ia merasakan sendiri bahwa mertuanya itu sudah bersikap dingin. Nampaknya Soeharto sudah tak memercayainya lagi.

Prabowo sendiri tahu kalau ada pihak yang berupaya mendiskreditkan dirinya dimata sang mertua. Bahkan ia sangat yakin kalau mertuanya berbalik menuding dirinya berkhianat karena sudah disesaki informasi sesat untuk merenggangkan relasinya dengan Soeharto. Ia sendiri sebenarnya sudah berupaya sekuat tenaga untuk membendung informasi negatif yang masuk ke telinga mertuanya ihwal hal negatif dirinya. Namun nyatanya tak berhasil. Sampai akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dihadapan anggota DPR/MPR, hubungannya dengan Soeharto tak jua pulih. Puncaknya, ikatan suami-isteri dengan Titiek Soeharto pun harus berakhir.

Sebelumnya, Titiek Soeharto memberitahukan bahwa ada yang memberikan informasi kepada Soeharto kalau Prabowo kerap mengadakan pertemuan dengan banyak tokoh seperti Gusdur, Amien Rais, Adnan Buyung Nasution, dan juga Habibie. Seperti diketahui mereka semua merupakan kelompok yang anti-Soeharto.

Tragedi Pemecatan

Pascaturunnya Soeharto, sesuai konstitusi, penggantinya ialah wakilnya. B. J. Habibie pun naik menjadi presiden. Tak lama berselang, Prabowo yang memang sudah kenal dekat dengan BJ Habibie, menyambangnya di Istana Negara Jakarta. Waktu itu, Prabowo memberikan ucapan selamat atas pengangkatan Habibie, pun memberikan beberapa saran. Prabowo menyarankan supaya Presiden membatasi kewenangan Menhankam/Pangab Wiranto supaya tidak ada sentralisasi kekuasaan.

Menurut Prabowo, Panglima ABRI harus dijabat orang baru. Iapun kemudian menyodorkan nama KSAD Soebagyo HS, mantan atasannya di Kopassus. Setelah bertemu dengan Habibie, Prabowopun kemudian kembali ke kantornya di Makostrad. Esoknya, 22 Mei 1998, Prabowo menerima telepon penting yang intinya dia menerima *signal* kuat kalau dirinya akan dicopot. Diapun segera bergegas menemui Habibie di Istana Negara untuk menanyakan perihal kebenaran pencopotannya. Habibie kemudian mengiyakan pencopotan Prabowo. Sebelumnya ia telah menerima laporan dari Wiranto bahwa ada pasukan liar yang bukan atas perintah Pangab menuju ke Jakarta dan bergerak ke wilayah Patra Kuningan, kediaman B. J. Habibie.

Wiranto kemudian menyarankan supaya melucuti jabatan Prabowo karena dikhawatirkan akan membahayakan situasi ibukota, dan terlebih keselamatan presiden. Habibie pun kemudian memerintahkan Wiranto untuk mencopot Panglima Kostrad Prabowo Subianto dan digantikan oleh Mayjen TNI Johnny Lumintang. Jabatan Lumintang hanya berlangsung 6 jam karena posisinya kemudian digantikan oleh Mayjen TNI Djahmari Chaniago. Sedangkan Prabowo sendiri ditawarkan posisi Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI yang tak lagi strategis.

Menjadi Pengusaha Sukses

Setelah berhenti berkarir di dunia militer, Prabowo memulai peruntungannya menjadi seorang pengusaha mengikuti jejak adiknya, yaitu Hasyim Djojohadikusumo. Apabila terhentinya karir militer Prabowo dipandang sebagai kecelakaan atau kekurangan, maka banyak hal yang lebih besar yang bisa dilakukan.

Soedarmanta (2013) dalam bukunya tentang Prabowo mengatakan bahwa karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli perusahaan kertas, yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Industri kertas di Indonesia tetap menjanjikan masa depan yang baik. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) dari Grup Sinar Mas, misalnya, menempati urutan teratas dengan kapasitas terpasang 2.111.000 ton per tahun.

Diluar Grup Sinar Mas, PT Kiani tercatat sebagai produsen kertas cukup besar, yaitu 525.000 ton per tahun. Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit.

Banyak kalangan menilai, Prabowo cukup sukses dalam berusaha. Selain Kertas Nusantara, Prabowo tercatat sebagai Komisaris Perusahaan Migas Karaznabasmunai di Kazakhstan, Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung

(perusahaan produksi minyak kelapa sawit), PT Nusantara Energy (Migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan pulp), PT. Jaladri Nusantara (perikanan). Karena keberhasilan dalam bidang bisnis tersebut pada Pilpres 2009, Prabowo ialah Cawapres terkaya, dengan total aset sebesar Rp 1,579 triliun dan 7,57 juta US Dollar, termasuk sejumlah kuda piaraanya dan harta benda lainnya.

Tetapi keberhasilan dalam bisnis belum memuaskan hasrat Prabowo untuk berperan dalam masyarakat. Sebagai tentara, seperti pada umumnya prajurit di dunia yang mengabdikan bangsa dan negara, Prabowo memegang teguh kata-kata "*I serve*" (aku mengabdikan). Karena alasan itulah ia terjun ke dunia politik.

Berjuang di Kancah Politik

Selepas jatuhnya Soeharto dan pemecatan dirinya dari lingkungan militer karena tuduhan kudeta, iapun memutuskan hijrah ke Yordania. Kebetulan sejak di militer, Prabowo kenal dekat dengan pangeran Yordania. Disana ia menjalankan bisnis dari berbagai bidang dan kabarnya dijadikan sebagai tamu kehormatan oleh sang raja. Setelah bisnisnya sukses dan berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya, iapun pulang ke Tanah Air. Prabowo mulai mencoba peruntungannya di jagat politik melalui bendera Partai Golkar.

Di tahun 2004, Prabowo sempat mengikuti konvensi yang digelar partai berlambang pohon beringin itu. Namun sayang, ketika itu ia dikalahkan Wiranto yang juga maju sebagai peserta konvensi. Tak mau berlama-lama kecewa, Prabowo memutuskan untuk membangun kekuatan politiknya sendiri dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Para sahabat dan koleganya di militer, para aktivis pergerakan yang dulunya sempat berseteru, maupun sejumlah intelektual diundangnya.

Bersama Gerindra, Prabowo mengobarkan idealismenya untuk memperbaiki dan membangun kondisi bangsa. Iajor-joran memublikasikan partainya kepada khalayak. Gerindra pun semakin bergeliat. Namanya mulai menancap dihati masyarakat sipil yang kecewa dengan kendaraan politik yang telah ada. Hadirnya Gerindra, dalam pandangan simpatisannya,



facebook.com/PrabowoSubianto

merupakan oase ditengah kacau-balaunya manajemen partai politik dalam pola rekrutmen maupun korupsi.

Daya tawar Prabowo sebagai nakhoda Gerindra pun kian meninggi. Meski pada Pemilu 2009 lalu, tak masuk 3 besar namun tetap diperhitungkan. Pinangan untuk mendampingi Megawati sebagai cawaprespun datang. Ia menyambutnya dengan tangan terbuka. Maka jadilah pasangan Mega-Pro yang berhasil bersaing ketat dengan pasangan SBY-Boediono. Meskipun Mega-Pro kalah, namun publik telah mencatatnya sebagai salah satu kandidat calon presiden masa depan setelah lengsernya SBY.

Selain di kancah politik, Prabowo juga dikenal aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan organisasi yang juga ikut mendongkrak namanya, khususnya dikalangan petani yang jumlahnya cukup signifikan. Tercatat sejak 5 Desember 2004 yang lalu ia duduk sebagai ketua umumnya. Iapun kembali terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-7 HKTI Periode 2010-2015. Keputusan aklamasi tersebut diterima setelah sebanyak 32 DPD HKTI menerima laporan pertanggungjawaban sang jenderal periode sebelumnya.

Selain di HKTI, Prabowo juga aktif di Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI). Prabowo dipilih secara aklamasi untuk periode 2008–2013 setelah mengantongi dukungan 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD tingkat kabupaten. Organisasi berikutnya yang juga dia pegang ialah Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI). Pada Munas yang digelar 27 Februari 2012, untuk ketiga kalinya ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar IPSI (PB IPSI).

Prabowo dan 6 Program Aksi Gerindra

“Saya tidak rela bangsa kita kalah dari bangsa lain di kawasan kita”, itulah kata-kata Prabowo dimana mimpinya ingin membuat Indonesia terbang tinggi seperti Garuda. Melalui Gerindra, Prabowo menjanjikan antara lain:

Dua juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi bahan makanan pokok yang dapat mempekerjakan 12 juta orang; melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar; mengentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun; membagikan sedikitnya satu juta laptop kepada mahasiswa per tahun; atau bahkan menggerakkan “Revolusi Putih” dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin. Prabowo kini telah menjelma menjadi calon pemimpin yang membela kaum papa. Dia kembali, dan kini jauh lebih siap.

“Saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”, tulis Prabowo dalam memoarnya berjudul ‘Surat untuk Sahabat’ (2013).

Prabowo dan Gerindra memiliki enam program untuk mensejahterakan Indonesia bertajuk, ‘Garuda Terbang Tinggi’. “Analisa Partai Gerindra yang sudah lama kita sampaikan kepada rakyat Indonesia adalah bahwa kondisi bangsa kita saat ini merupakan sebuah paradoks. Kondisi bangsa kita adalah merupakan sebuah kejanggalan. Sebuah anomali, sesuatu gejala yang tidak masuk akal”, menurut Prabowo. (detik.com, 2013)

Indonesia adalah suatu bangsa yang kaya-raya, yang memiliki sumber alam yang luar biasa, tetapi rakyatnya miskin. Suatu bangsa yang terdiri dari $\frac{3}{4}$ laut, tetapi mengimpor ikan dan bahkan tidak hanya ikan, mengimpor garam. Suatu bangsa yang merupakan wilayah agraris, wilayah tropis, yang bisa mengalami tiga kali panen, tetapi mengimpor bawang merah, mengimpor singkong, dan sekarang mengimpor daging.

“Salah satu kesulitan utama bangsa kita saat ini adalah memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Sudah bertahun-tahun bahkan mungkin lebih dari belasan tahun, sistem ekonomi kita rapuh”. Untuk itu Prabowo percaya untuk mengimplementasikan strategi yang ia namakan strategi dorongan besar. “Yaitu strategi untuk membuka lahan-lahan produksi untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioethanol atau bahan bakar nabati (BBN), yaitu singkong, aren, tebu, jagung, kemiri, dan lain sebagainya”.

Bersama 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra, yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, khususnya pasal-pasal ekonomi yang

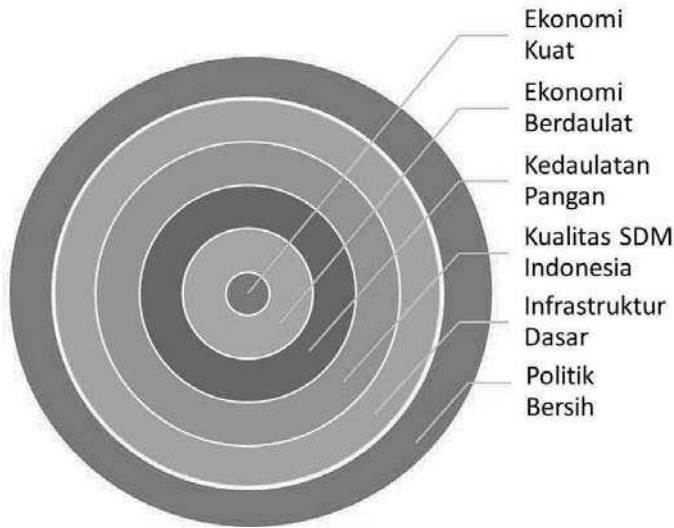
termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, Prabowo dan Partai Gerindra akan membangun ideologi ekonomi yang dikenal dengan nama ekonomi kerakyatan.

“Tujuan pertama dan utama dari 6 program tersebut adalah bagaimana kita mengamankan kekayaan nasional, yang saat ini kami lihat banyak yang bocor dan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kedua, adalah bagaimana kita dapat meningkatkan produktifitas bangsa Indonesia. kita ingin menjadi bangsa yang produktif, bukan bangsa yang hanya konsumtif. Kita ingin menjadi bangsa yang menghasilkan, bangsa yang bisa bikin mobil, bikin motor, tidak hanya beli mobil dan motor seperti sekarang ini. Kita ingin menjadi bangsa yang tidak hanya impor pangan”, tegas Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

6 program aksi tersebut adalah *pertama*, program membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan pajak, mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional, menjadikan BUMN sebagai lokomotif perekonomian bangsa, membangun industri pengolahan, dan membangun serta mengembangkan industri nasional.

Kedua, program melaksanakan ekonomi kerakyatan dengan cara memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pangan dan UMKM, mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan insentif kredit bagi masyarakat kecil dan menengah, mendirikan Bank Tani dan Nelayan, melindungi dan memodernisasikan pasar tradisional, melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, membangun infrastruktur untuk rakyat, mempercepat reforma agraria, dan mendirikan Lembaga Tabung Haji.

Ketiga, program membangun kedaulatan pangan dan energi dengan mencetak 2 juta hektar lahan baru, meningkatkan produksi pangan, membangun pabrik pupuk urea, membangun pembangkit listrik, mendirikan kilang-kilang minyak bumi dan gas, merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan menjamin harga pangan yang menguntungkan petani dan terjangkau konsumen.



Keempat, program meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan dengan cara memperkuat karakter bangsa, melaksanakan wajib belajar 12 tahun, merevisi kurikulum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan, meningkatkan kualitas pesantren, meningkatkan martabat dan kesejahteraan pengajar, memberantas perdagangan manusia, menyediakan komputer di sekolah, menjamin pelayanan kesehatan gratis, mengembangkan rumah sakit modern, meningkatkan peran PKK, menyediakan susu gratis bagi anak-anak miskin, mewajibkan sarjana dokter yang baru lulus untuk mengabdikan di daerah dan tertinggal, melestarikan budaya bangsa, dan meningkatkan prestasi tim sepak bola nasional.

Kelima, program membangun infrastruktur dan lingkungan hidup dengan cara membangun prasarana jalan dan jembatan di seluruh Indonesia, mempercepat pembangunan, membangun infrastruktur untuk industri, melaksanakan reboisasi, mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan, dan mengembangkan infrastruktur pulau-pulau paling terluar di seluruh Indonesia.

Keenam, program membangun pemerintahan yang bebas KKN dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan veteran, menciptakan dan menegakkan kepastian hukum, mencegah dan

memberantas korupsi, dan menempatkan 30 persen perempuan dalam posisi menteri (emansipasi wanita).

Kita dapat melihat bahwa Prabowo dan Partai Gerindra memiliki program strategis untuk Indonesia. begitu komprehensifnya sampai Prabowo kini layak disebut dan sangat serius untuk maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Tekadnya yang kuat tercermin dari kata-katanya, “tidak ada pilihan lain. kita harus memimpin kebangkitan bangsa Indonesia. Kita harus jadikan bangsa Indonesia bangsa yang patut dihormati dan dihargai”.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Dari sisi peluang, posisi Prabowo sangat strategis. *Pertama*, terkait jejak kepemimpinan militernya. Meskipun berakhir antiklimaks, namun sangat mengagumkan. Tentu prestasi yang gilang-gemilang ketika dalam usianya 46 tahun sudah menduduki jabatan Danjen Kopassus. Begitu juga dengan tipe kepemimpinan di bisnis dan organisasi kemasyarakatannya yang tak kalah *excellent*. *Kedua*, Prabowo didukung kekuatan logistik yang sangat baik. Dengan kekayaan yang dimilikinya, plus kekuatan modal politik yang disokong sang adik, Hasyim Djojohadikusumo, menjadikan Prabowo sebagai kandidat presiden yang mapan untuk membiayai ongkos politik.

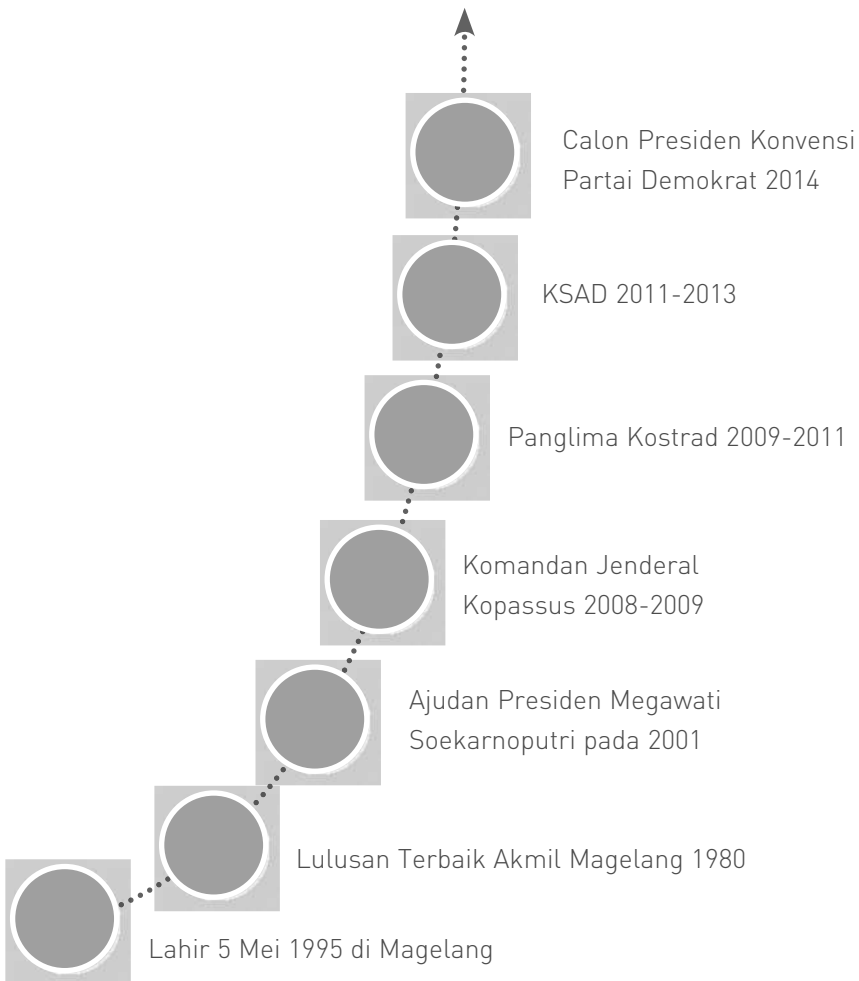
Ketiga, preferensi media yang banyak memberitakan hal-hwal kebaikannya, plus hasil berbagai lembaga survei yang stabil membayangi Jokowi akan berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi persepsi publik. Keaktifannya di media sosial seperti Facebook dan Twitter merupakan nilai plus tersendiri untuk lebih mendekatkan dirinya dengan pengagum maupun konstituenya. Jumlah likers Facebooknya yang hampir di angka 4 juta menunjukkan betapa banyaknya dukungan kepada Prabowo, sekalipun masih bersifat “maya”.

Apalagi setelah SBY tak ikut dalam pertarungan Pilpres 2014, maka munculnya Prabowo dapat menjadi solusi. Terlebih sosoknya sudah dikenal luas sejak Pemilu 2004 silam dimana iklannya begitu masif di televisi. Dalam survei Pol-Tracking Institute periode 2013-2014 lalu, yang menyebutkan posisi Prabowo berada di urutan ke-2 di antara tokoh nasional lainnya. Posisi ini tentu menjadi modal penting baginya.

Meski demikian, terbesar Prabowo tentu terkait beban di masa lalu, dalam tragedi kelam Mei 1998, dan ketika bertugas di Timor-Timur. Selain itu, Partai Gerindra sebagai kendaraan politik blm mampu meraih elektabilitas tinggi sehingga sulit membantu menyumbangkan suara terhadap pencalonannya kelak.

PRAMONO EDHIE WIBOWO

Pemimpin Potensial





facebook.com/PramonoEdhieWibowo

Dalam setahun belakangan ini, namanya kerap menghiasi pemberitaan di berbagai media Tanah Air. Ketika masih aktif di militer, ia beberapa kali diwawancara, ditulis beritanya terkait pelbagai hal faktual yang terjadi seperti penyerangan anggota TNI di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Namun, namanya tidak seintens pascadirinya pensiun dan kemudian beranjak ke panggung politik.

Pramono Edhie Wibowo adalah nama lengkap sang jenderal bintang empat yang merupakan anak mantan Pangkostrad, Sarwo Edhie Wibowo. Pak Pramono, begitu ia disapa, ialah anak kelima dari enam bersaudara. Kota kelahirannya Magelang yang sejuk dan indah membuatnya betah menghabiskan masa kecilnya bersama keluarga besar. Ia dilahirkan pada 5 Mei 1955 sehingga sangat mudah untuk mengingat momen kelahirannya yakni “5/5/55”.

Pramono tumbuh dari keluarga yang mengedepankan sikap disiplin dan bekerja keras. Ayahnya yang seorang tentara banyak mengajarkannya nilai-nilai kedisiplinan dan fokus dalam mencapai tujuan. Dia juga diajarkan kemandirian karena tidak selamanya menggantungkan hidup kepada orang tua atau saudara-saudaranya yang lain.

Selain itu, anggota keluarganya yang berjumlah banyak mengharuskannya hidup rukun dan penuh toleransi. Hikmah dari saudara-saudaranya yang banyak, membuat Pramono meresapi makna perbedaan dan

tidak memaksakan kehendak. Sebagai anak laki-laki tertua, selain ayahnya, Pramono yang bertanggungjawab kepada kakak dan adiknya. Dia dituntut untuk bisa tampil ke depan membela nama baik keluarga ketika sang ayah sedang bertugas di luar rumah sebagai seorang tentara. Dan konsekuensi sebagai bagian dari keluarga tentara mengharuskannya rela hidup berpindah-pindah (nomaden) mengikuti penugasan ayahnya. Pramono pun mencoba menikmati kebiasaan hidupnya yang berbeda dengan kebanyakan keluarga lain yang kepala rumah tangganya bukan seorang prajurit. Ia pun harus berpindah dari satu kota ke kota lain, bahkan ke negara lain. Beberapa kota seperti Bandung, Jakarta, Magelang, Purworejo, Medan, Jayapura sampai Seoul (Korea Selatan) pernah disinggahnya mengikuti jejak-karier sang ayah.

Pengalamannya berpindah-pindah mempertemukannya dengan orang-orang dan lingkungan yang baru. Pindah dari satu kota ke kota yang lainnya semakin mengenalkannya kepada keragaman budaya, suku, rasa, dan kultur sosial masyarakat Indonesia yang sangat kaya sehingga memantik rasa kecintaan terhadap bangsa yang kian meletup-letup.

Terlebih Pramono dibesarkan dari keluarga militer yang notabene mengharuskannya cinta terhadap tanah tumpah darah, membuat nasionalismenya kian mengental. Kehidupannya yang berpindah-pindah membuat Pramono harus cepat beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan baru dan juga di sekolah baru. Dari sekolah dasar sampai SMA, Pramono kerap berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain.

Meniti Karier Kemiliteran

Menjelang kelulusan SMA, sang ayah bertanya kepada Pramono ihwal rencana pendidikan apa yang akan diambilnya selepas lulus. Sebagaimana kewajaran seorang ayah kepada anaknya, tentu Sarwo Edhie menginginkan yang terbaik bagi anak kebanggaannya itu. Ia tak mau melihat anaknya masuk ke pintu kegagalan dikarenakan salah memilih jalan hidup. Ketika ditanya soal kelanjutan pendidikannya itu, Pramono mengingat bahwa di sekolah nilai paling tinggi ialah menggambar perspektif. Pramono lantas berpikir bahwa menggambar merupakan jalan hidupnya.

Karena itu, dia terpikir untuk kuliah mengambil jurusan menggambar perspektif. Ketika disampaikan keinginannya tersebut, Sarwo Edhie memberikan gambaran jika berkuliah ada kemungkinan tidak akan rampung karena ketiadaan biaya. Karena meski ayahnya seorang jenderal, namun hidup mereka bisa dikatakan menjelang miskin. Tentu mengandalkan penghasilan seorang tentara belumlah cukup untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya yang banyak.

Jenderal Sarwo Edhie juga mengingatkan bahwa sebagai seorang laki-laki sudah seharusnya kelak jika sudah berumah tangga bertanggungjawab kepada keluarga. Jika Pramono berhenti kuliah, lantas mau bagaimana bertanggungjawab secara ekonomi akibat tidak memiliki pekerjaan matang? Karena itu, Sarwo Edhie kemudian mengingatkan supaya kalau bisa Pramono mencari sekolah lanjutan yang memberikan beasiswa untuk meringankan beban keluarga.

Pramono pun menemukan jawabannya dengan dua alternatif. Yakni sekolah penerbangan Curug yang biayanya ditanggung oleh Garuda Indonesia—sebuah maskapai penerbangan ternama tanah air. Tentu mengasyikkan bisa sekolah gratis, kemudian setelah lulus diajak bergabung di maskapai penerbangan elit dan terbesar di Indonesia itu. Dengan menjadi pilot, maka keinginannya untuk terbang kemanapun—sesuai dengan penugasannya—dapat menjadi kenyataan. Dan yang kedua ialah berkarir di militer.

Akademi Militer merupakan sekolah kemiliteran yang dibiayai negara untuk mendidik putra-putri terbaik bangsa. Dan setelah dipikir secara masak, akhirnya Pramono memutuskan untuk masuk ke Akademi Militer dengan alasan hidupnya telah begitu lekat dengan dunia tentara. Ayahnya yang seorang jenderal barangkali merupakan petunjuk Tuhan untuk mengikuti jejaknya mengabdikan diri bagi Tanah Air. Pramono akhirnya mulai berlatih fisik seperti lari, mengangkat beban dan lainnya untuk bisa lolos tes fisik masuk Akademi Militer yang sangat ketat.

Selepas menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Pramono masuk Akademi Militer yang bermarkas di Lembah Tidar Magelang. Kota berhawa sejuk ini tentu saja sudah tak asing lagi baginya karena ia lahir dan menikmati masa kecil walaupun tidak lama di sana. Selama 4 tahun ia dididik dan dilatih di Lembah Tidar dengan penuh disiplin dan kerja keras. Untuk menjadi

seorang tentara tak hanya cukup mengandalkan kekuatan fisik, namun juga mental dan intelegensia.

Ayahnya yang kemudian menjadi petinggi di Angkatan Darat mewanti-wantinya supaya menjadi prajurit yang tangguh dan kuat. Menjadi seorang prajurit yang bukan hanya dapat membanggakan bagi keluarga namun juga mampu berbuat banyak untuk negara. Selepas lulus dari Akademi Militer tahun 1980-an dengan hasil sangat baik, Pramono kemudian diangkat menjadi Komandan Pleton di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha). Kopassandha ialah pasukan elite yang dibekali dengan kemampuan untuk bergerak cepat di semua medan, melakukan penembakan dengan tepat, pengintaian secara rapi dan kontra terorisme. Dengan menjadi anggota pasukan khusus membuatnya banyak dikirimkan ke medan tempur. Misalnya saja, di masa Orde Baru ia pernah sebanyak tujuh kali dikirim ke wilayah konflik Timor Timur yang waktu itu masih menjadi bagian Indonesia. Ia diterjukan bersama pasukan lainnya untuk mengendalikan situasi keamanan yang konsisten terus memanas. Setelah memegang jabatan Komandan Peleton Grup I Kopassandha, di tahun 1984 Pramono kemudian ditunjuk menjadi Komandan Kompi 112/11 Grup I Kopassandha. Karena dinilai memiliki kecakapan dalam bertugas, setahun kemudian Pramono dipercaya untuk menjabat Perwira Intel Grup I Kopassus(pramonoedhiewibowo.com, 2014)

Setelah itu, karier kemiliterannya pun kian melesat. Di tahun 1995, ia menempuh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sesko AD) untuk mempertajam kemampuannya. Setahun kemudian 1996, ia terpilih menjadi Wakil Komandan Grup I Kopassus yang semakin membuat posisinya diperhitungkan di kalangan perwira tinggi militer. Dua tahun kemudian (1998) Pramono menjadi komandannya. Sebuah lompatan karier yang gemilang karena kenaikan pangkat Pramono terbilang cepat tiap fasenya. Satu hal yang patut ditiru dari sosoknya ialah kerendahan hati dan murah senyumnya sekalipun kedudukannya di lingkungan Kopassus begitu mentereng. Ketika orang menyaksikan pribadinya yang ramah dan hangat kepada setiap orang yang ditemuinya, itulah karakter Jenderal Pramono yang sesungguhnya. Ketika Orde Baru tumbang dan menguatnya hembusan angin reformasi, kariernya terus menanjak. Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Presiden

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pramono ditunjuk menjadi ajudan sang puteri Proklamator RI Bung Karno itu (tokohindonesia.com, 2011).

Posisinya sama seperti Jenderal Wiranto ketika mendampingi Soeharto selama 4 tahun. Banyak hal dipetik dan dicontohnya dari sosok perempuan yang mampu bersaing di kancah perpolitikan nasional tersebut. Sampai ketika hubungan atasannya tersebut dengan kakak iparnya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) merenggang karena mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam, Pramono pun ikut merasakan dampaknya.

Meskipun terselip perasaan tak enak karena Megawati retak hubungannya dengan SBY, Pramono berusaha untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Ia menganggap bahwa “perseteruan” Mega dengan kakak iparnya di luar relasi pekerjaannya sebagai ajudan presiden sehingga tidak ada yang perlu dirisihkan.

Dalam catatan karier kemiliteran berikutnya, Pramono pun pernah menempuh Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI). Selepasnya, ia dipercaya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sesko TNI tahun 2004 sebagai buah kerja keras dan kerja cerdasnya. Pascasetahun mengemban jabatan sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Ekonomi di Sesko TNI, ia ditunjuk menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Selanjutnya, Pramono naik menjadi Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro. Selepas itu, tahun 2007 ia kemudian diangkat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) di tahun 2008 sampai 2009. Di tahun 2009, setelah melepaskan jabatan Danjen Kopassus ia kemudian menduduki Pangdam III/Siliwangi. Tak lama setelah itu, jabatan seperti yang pernah didapatkan ayahnya yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) diraihinya di tahun 2010 (merdeka.com, 2012)

Dan hanya setahun menduduki kursi Pangkostrad, jabatan baru yang lebih tinggi telah menantinya. Tepat dua tahun setelah kakak iparnya terpilih menjadi RI-1 untuk yang kedua kalinya, ia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Geoge Toisutta. Jabatan sebagai KSAD merupakan jabatan terakhir Pramono sebelum akhirnya pensiun dan memilih dunia politik sebagai sarana pengabdian berikutnya. Namun sebelum membahas ihwal kiprah politiknya yang baru seumur jagung, pembahasan pro dan kontra yang menyertai pelantikannya sebagai KSAD laik mengemuka.

Penyebab munculnya pro dan kontra atas pelantikannya sebagai KSAD ialah karena posisinya sebagai adik ipar Presiden SBY. Pihak yang kontra menuduh kalau pengangkatannya sebagai KSAD lepas dari profesionalisme dan kinerja melainkan lebih disebabkan karena nepotisme dan bersifat subyektif. Presiden sebagai kepala negara dan juga komandan tertinggi ABRI tentu saja memiliki *privilege* menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tertentu termasuk Pramono Pramono.

Lembaga KontraS merupakan salah satu pihak yang santer menolak terhadap pelantikan Pramono. Mereka menilai penunjukkan Pramono sebagai KSAD sangat kental unsur nepotisme ketimbang penilaian berdasarkan kinerja objektif. Hal itu, salah satunya, diperkuat dengan fakta bahwa lompat-lompat jabatannya tergolong cepat. Dari jabatan Pangkostrad untuk kemudian menjadi KSAD hanya diperlukan waktu setahun seolah-olah mengejar tenggat waktu supaya sebelum pensiun Pramono sudah menjadi KSAD. Terlebih Pramono juga sudah sejak jauh hari disiapkan sebagai Capres Demokrat.

Sedangkan pihak yang pro terhadap pelantikannya sebagai KSAD, seperti Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan seorang pengamat militer terkemuka mengemukakan bahwa sah-sah saja seorang Pramono menjadi KSAD. *Why not? Toch* tak ada aturan yang dilanggar. Segala persyaratannyapun mencukupi dan memenuhi baginya untuk mengamban tugas sebagai KSAD. Dilihat dari *track record*-nya, Pramono juga dipandang memenuhi syarat untuk memimpin organ Angkatan Darat TNI yang memang sangat prestisius itu (suarapembaruan.com, 2011)

Pemikiran untuk Bangsa

Seorang calon pemimpin bangsa harus memiliki pemikiran revolusioner dan progresif untuk menyelesaikan berbagai problem yang tengah dihadapi negaranya. Seorang pemimpin harus berkemampuan untuk memberikan solusi mencerdaskan terhadap berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah bangsa. Demikian halnya dengan Pramono yang saat ini sedang mengikuti Konvensi Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden 2014 yang tentunya harus sudah memikirkan cara jitu untuk menuntaskan pelbagai masalah kebangsaan.

Adapun visi dan misi yang coba ditawarkan oleh jenderal yang murah senyum itu, secara substansi, sama dengan pembukaan UUD 1945 yakni “menuju kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam memelihara perdamaian dunia”. Ketiga titik poin tersebut dianggap tepat untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa yang tengah dihadapi.

Dalam konteks menuju kesejahteraan umum, Pramono menawarkan pentingnya kemandirian energi dan ekonomi. Dalam pandangannya, kekayaan energi yang dimiliki Indonesia tidak semestinya lagi dikuasai asing. Pelbagai kekayaan alam bawah tanah negeri ini seperti minyak dan gas merupakan limpahan berkah Tuhan sudah selaiknya dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa sendiri. Yang terjadi sekarang ini, banyak kekayaan energi kita masih dikuasai pemodal asing.

Lalu dalam konteks kemandirian ekonomi, bangsa besar ini sudah sepatutnya untuk mulai memikirkan mencukupi berbagai kebutuhan pangan seperti bawang merah, beras, kedelai, daging sapi, dan seterusnya. Ketergantungan pangan kepada pihak luar akan menekan perekonomian dalam negeri karena harganya sangat dipengaruhi oleh kurs dollar. Pe-



nguatan ketahanan pangan lokal bukan saja akan membantu perekonomian petani dan membuka lapangan kerja baru bagi pekerja-pekerja pertanian baru namun juga mengamankan suplai pangan dalam negeri.

Disamping itu, kebocoran keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi juga wajib ditekan. Begitu dahsyatnya korupsi yang mengoyak jantung perekonomian bangsa ini dimana uang rakyat banyak digunakan untuk membiayai keserakahan dan kerakusan para koruptor. Dalam konteks ini penegakan hukum (*law inforcement*) harus benar-benar ditegakkan untuk menimbulkan efek jera. Wacana pemiskinan dan hukuman seberat-beratnya terhadap para koruptor mendesak segera diimplementasikan untuk mewujudkan keadilan yang berkeadaban di negeri ini. Dengan begitu, siapapun akan berfikir ulang sebelum melakukan tindak pidana korupsi yang menyengsarakan kehidupan rakyat kebanyakan karena pelakunya dihukum sangat berat dan segala kekayaan hasil korupsinya diambil semua oleh negara.

Kemudian yang kedua menyoal visi mencerdaskan kehidupan berbangsa. Seorang pemimpin sekelas kepala negara memang harus mampu dalam mencanangkan kebijakan pendidikan yang murah dan berkualitas bukan hanya dalam tataran formal namun juga non-formal maupun informal. Pendekatan kebijakan yang mengatur pendidikan dewasa ini lebih menekankan pada pendidikan formal padahal kedua lahan garapan pendidikan yang disebutkan diatas tak kalah pentingnya. Cakupan pendidikan non-formal dan informal sangatlah luas sehingga memberikan akses kepada masyarakat dari berbagai tingkatan usianya untuk mendapatkan pendidikan.

Kemudian ihwal “ikut dalam perdamaian dunia” tentu sebagai mantan prajurit, Pramono begitu memahami pentingnya menjalinakan sekutu dengan negara-negara lainnya untuk turut-serta dalam rangka mencegah atau menyelesaikan konflik. Salah satunya dengan cara mengirimkan pasukan ke beberapa wilayah konflik seperti Afrika, Lebanon, dan lainnya yang tergabung dalam naungan pasukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Seperti diketahui, Indonesia telah secara rutin mengirimkan kontingen Garuda atau yang biasa disingkat KONGA sejak tahun 1957 silam. Di tahun pertama kontingen Garuda yang dikirim untuk menjaga perdamaian di Mesir yang tengah bergejolak. Sejak saat itu, kontingen Garuda terus dikirim

secara simultan dan karenanya memberikan citra positif di kalangan dunia internasional bahwa Indonesia telah begitu aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia.

Secara keseluruhan, KONGA sudah mengirimkan 27 pasukan perdamaian. Adapun misi yang ke-27 nya dikirimkan ke Darfur, Sudan dibawah naungan Union-United Nations Mission in Darfur (UNAMID). Reputasi pasukan Garuda dalam menjalankan setiap misinya sangat cemerlang sehingga bisa dikatakan PBB sangat mengapresiasi dan mengandalkan pasukan perdamaian Indonesia dalam menjalankan setiap misinya di wilayah berkonflik.

Pramono merupakan seorang jenderal nasioanalis yang mengedepankan UUD 1945 dan Pancasila dalam setiap pemikiran gagasannya. Tegas dalam bersikap, harmonis dalam bertindak merupakan ungkapan yang tepat bagi setiap pemikiran dan gagasannya.

Tiket Menuju RI 1

Meniti karier ibarat mendaki gunung. Nasihat itu diterima Pramono Pramono Wibowo dari kakak iparnya, Susilo Bambang Yudhoyono, saat keduanya bersama-sama naik Gunung Lawu, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kala itu Pramono berpangkat kolonel, sedangkan Yudhoyono jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Berikut petikannya.

“Perumpamaan tersebut, menurut Pramono, mengingatkan dirinya untuk selalu mempersiapkan diri dan bertindak hati-hati. seperti mendaki gunung, selain memperhitungkan kondisi cuaca, pendaki harus melengkapi diri dengan perbekalan memadai. Melangkah pun tidak boleh tergesa-gesa karena bisa terpeleset masuk jurang”. Begitu pun ketika sudah berada di puncak gunung, menurut dia, pendaki tak boleh lupa mempersiapkan diri untuk turun. “Kalau sudah di atas juga harus tahu diri, bahwa tidak selamanya di atas, siapkan diri. Jangan sampai tidak siap. Bisa-bisa malah mati kedinginan di atas, turunlah. Kalau tidak disiapkan, kau kecapekan. Bahan makanan habis, kau akan kepeleset,” kata Pramono, menirukan nasihat Yudhoyono. (majalahdetik.com, 2014)

Berbekal semua nasihat tersebut, setahun menjelang pensiun KSAD, Pramono mengaku tidak lagi mau ditemani ajudan dan sopir pribadi. Setidaknya untuk acara di luar dinas atau pada hari libur. Nah, suatu hari, ia nekat mengemudikan mobil pribadinya hanya ditemani sang istri, Kiki Gayatri Soepono. Begitu memasuki pintu tol, keduanya kebingungan karena tak tahu berapa tarifnya. “Eh, begitu uang disodorkan, si petugas tol bilang, ‘Pak, bayarnya nanti saja kalau mau keluar. Sekarang cukup ambil kartu saja.’ Saya dan istri tak pernah tahu hal-hal semacam itu karena biasa diurus orang lain,” ujarnya tersipu. Tapi, dari pengalaman itu, dia menjadi paham. Ketika masa pensiun itu tiba, Pramono mengaku terbebas dari *post powersyndrome*. (majalah detik, 2014)

Setelah pensiun sebagai orang nomor satu di AD, Pramono memang diincar untuk menduduki jabatan paling penting di negara ini, yaitu Presiden Republik Indonesia. Indonesia memiliki rekam jejak sejarah kepemimpinan militer yang sangat banyak. Militer adalah organisasi yang



[facebook.com/PramonoEdhieWibowo](https://www.facebook.com/PramonoEdhieWibowo)

banyak menyumbangkan peradaban dan pembangunan Indonesia kini, disamping organisasi-organisasi lainnya. Peran militer, atau setidaknya pernah orang-orang dari latar belakang militer sangat mewarnai Indonesia dari sejak meraih kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.

Presiden SBY memiliki latar belakang militer. Presiden Suharto juga memiliki latar belakang militer. Presiden Suharto memimpin Indonesia selama 32 tahun yang tentunya merupakan waktu yang sangat lama untuk menyumbangkan pemikiran dan pembangunan yang berasal dari kemiliteran.

Peran politik militer di Indonesia terekam dalam banyak kajian ilmiah di bidang sosial dan politik. Menurut Muradi, pengajar ilmu politik di Universitas Padjadjaran, peran militer terjadi di lebih dua pertiga negara di Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Militer memiliki campur-tangan sejak tahun 1945 di negara-negara tersebut. Di dalam teori negara, terdapat eksistensi negara sebagai tujuan dari keberadaan militer. Militer sangat diperlukan negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatannya. Pramono adalah orang yang tidak perlu ditanyakan lagi dedikasinya dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai KSAD.

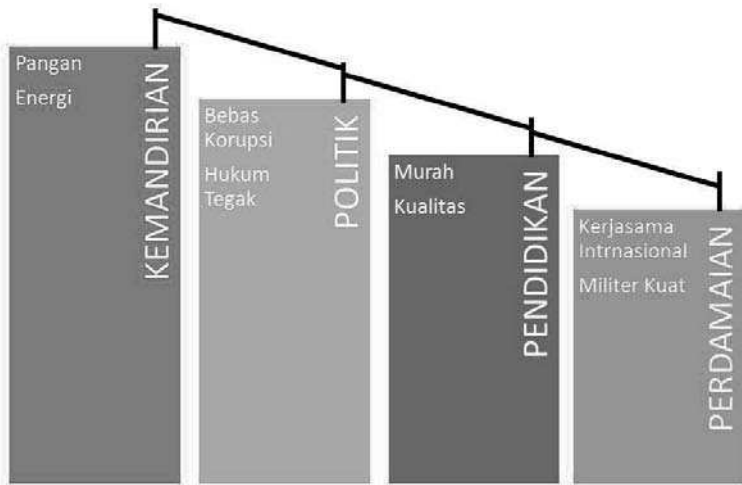
Jenderal Bintang Empat di Konvensi Demokrat

Pramono Edhie Wibowo dalam debat kandidat calon presiden Partai Demokrat mengatakan, *“seorang pemimpin harus memahami siapa dan dimana dia memimpin, tanpa mengenali potensi daerah yang dipimpin justru akan menjadi asing di negeri sendiri. Saya berpesan kepada siapapun pemimpin, kenali daerah yang kau kenali itu baik-baik, kalau tidak kenal maka bisa salah pimpin. Pahami potensi daerah itu, kalau bangun Bali, bangun sesuai budaya Bali. Jangan kita jadi asing di negeri sendiri,”* ujarnya di Hotel Aston, Denpasar, Selasa 18 Februari 2014.

Pramono jugamencontohkan daerah Bali yang memiliki potensi yang kuat di wilayah pariwisata dan budaya. Sehingga menurutnya pembangunan di Bali tak boleh meninggalkan kearifan lokal Bali. Pramono melanjutkan bahwa generasi muda Bali khususnya, harus bangga dengan kekayaan budaya Bali. Artinya jangan sampai budaya asli tergerus budaya

asing di tengah globalisasi yang terjadi. Namun, lanjut Pramono, bukan berarti bahwa masyarakat tidak mau menerima perubahan.

Pramono sangat menjunjung kebudayaan sebagai sebuah tiket untuk menuju kesejahteraan sebuah bangsa. Sebagai calon presiden yang memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakat, salah satu kuncinya adalah kebudayaan. Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang dapat membangun negeri ini menjadi lebih baik.



Pramono memiliki cara untuk mengungkapkan visi nya untuk Indonesia, *“bergerak maju mengabdikan untuk negeri”*. Dalam suatu kesempatan, Pramono berdiskusi dengan wartawan di Bali saat konvensi Partai Demokrat digelar. Pramono ditanyakan pertanyaan oleh wartawan yang membuatnya tergelitik untuk mencari solusi strategis. “Salah satu persoalan lokal yang ditanyakan kepada saya menyangkut rencana reklamasi Tanjung Benoa yang akan menjadikan Puri Besakih sebagai bagian kawasan industri wisata. Bagaimana sikap saya?”(pramonoedhiewibowo.com, 2014)

Menurut pendapatnya, pembangunan hendaknya dilakukan dengan tidak melupakan akar budaya. Pembangunan tidak dapat dilakukan bila bertentangan dengan budaya setempat. Terkait pembangunan di Bali ini, Pramono juga ingin mengimbau para investor dan pemerintahan daerah untuk mengembangkan daerah yang masih tertinggal. Pembangunan

daerah-daerah perlu terus ditingkatkan untuk kemajuan daerah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan kearifan kebudayaan lokal.

Tidak hanya soal budaya, Pramono juga memiliki gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Menurut dia, hanya dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, maka bangsa Indonesia akan adil dan makmur. Menurutnya, “Mengapa Ekonomi Kerakyatan? Ini telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Negara kita bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial”.

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat dan mensejahterakan sebanyak-banyaknya rakyat. Ekonomi kerakyatan tidak dikuasai segelintir pemegang kapital atau pemodal. Ekonomi kerakyatan berkeadilan sosial. Untuk itu Pramono memiliki resep, seperti yang ia katakan di banyak kesempatan, untuk mewujudkan ekonomi yang melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat dan mensejahterakan mereka semua, kita harus membangun kapabilitas rakyat. Pendidikan penting. Yang juga penting adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Peraturan yang dibuat pemerintah (eksekutif dan legislatif) harus memberi ruang agar ekonomi rakyat tumbuh dan berkembang (pramonoedhiewibowo.com, 2014).

Pramono menginginkan tentara benar-benar profesional, yaitu fungsinya untuk menjaga agar Indonesia kuat dan berdaulat. Menurutnya, di saat seperti sekarang ini, ketika hubungan dengan negara-negara tetangga mengalami sedikit persoalan, Pramono ingin mengingatkan pentingnya kita menjaga kedaulatan dan pentingnya kita disegani oleh negara lain. Seperti yang terjadi dengan kasus penamaan kapal perang Indonesia yang menyulut protes pemerintah Singapura. Menurutnya, pemerintah Singapura memprotes penamaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun. Padahal, ini sepenuhnya urusan dalam negeri Indonesia (detik.com, 2014). Pemerintah Australia mengusir imigran asal Timur Tengah dengan cara mengarahkan kapal mereka ke wilayah perairan Indonesia. Ini melanggar konvensi internasional. Sementara itu, kapal nelayan pencari tripang asal Merauke dibakar oleh oknum tentara Papua Nugini dan menyebabkan 5 warga hilang. “Ini sungguh kejam,” tegasnya (beritasatu.com, 2014).

Peristiwa-peristiwa tersebut mengingatkan bangsa ini terhadap pen-

tingnya menjaga kedaulatan. Indonesia, menurut dia, harus memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat agar disegani dan tidak lagi dilecehkan negara lain. Pertahanan yang lemah bukan berdampak kepada tentara, halituakan berdampak kepada warga negara. Pertahanan yang kuat adalah untuk menjaga dan memberi kententeraman di hati masyarakat.

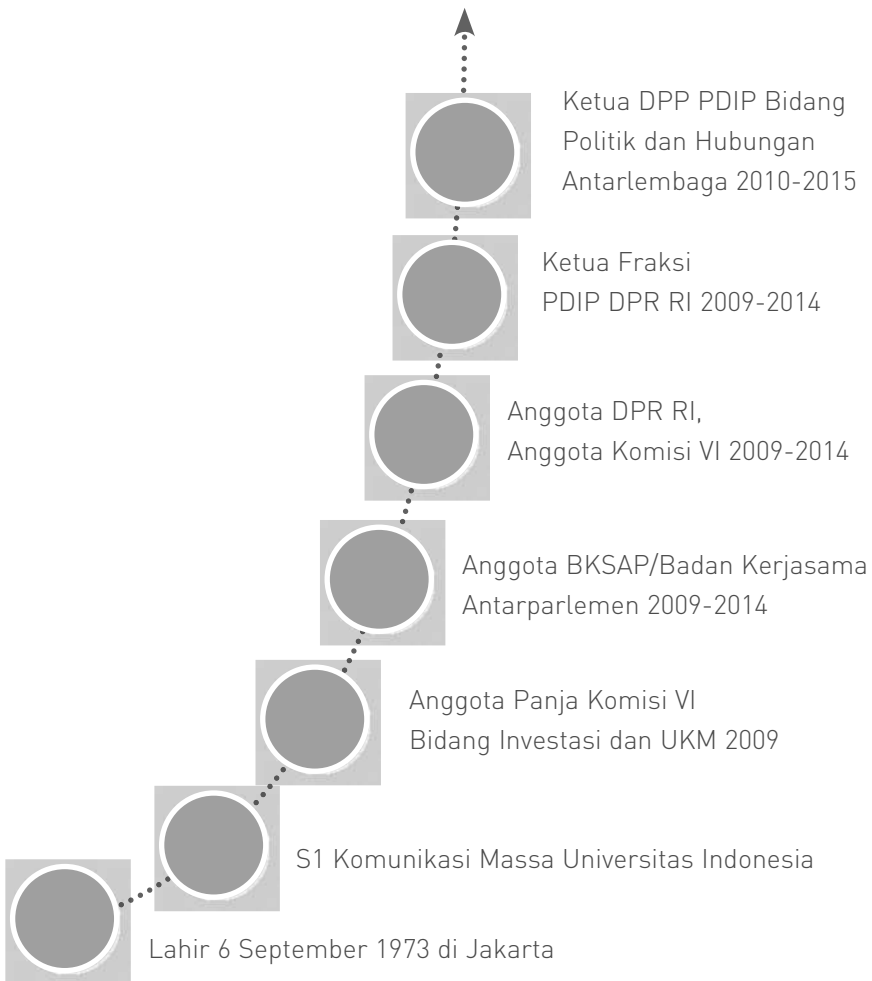
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Latar belakang Pramono yang berasal dari Jawa dan militer adalah modal terbesar untuk memenangkan Pilpres 2014. Apalagi Pramono merupakan adik ipar Presiden Yudhoyono dan anak dari Sarwo Edhi Wibowo, seorang tentara legendaris yang turut berjasa dalam menghadapi gerakan G30S 1965. Dari sisi pengalaman profesional militer, Pramono pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada periode Juni 2011-Mei 2013 dan berturut-turut dipercaya sebagai Ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri, Wakil Danjen Kopassus, Kasdam IV Diponegoro, Danjen Kopassus, Pangkostrad, dan Pangdam Siliwangi. Konteks suku, profesi, dan keluarga inilah, yang membuat Pramono dapat lebih mudah memperoleh tiket resmi maju dalam kontestasi. Di sisi lain, langkah politiknya masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat sebagai anggota dewan Pembina semakin membuka jalannya menuju istana.

Tindak lanjut dari modal yang Pramono miliki ini, kemudian diteruskan melalui Konvensi Partai Demokrat. Ia harus bersaing sengit dengan beberapa kandidat seperti Dahlan Iskan, Anies Baswedan, dan Gita Wirjawan yang beberapa kali dalam beberapa rilis lembaga survei berada di peringkat teratas. Tantangan terbesar bagi Jenderal Pramono ialah soal popularitas dan elektabilitasnya. Oleh karenanya, kedepan Pramono perlu mengintegrasikan aktivitasnya melalui kerja-kerja publik yang massif namun terdokumentasi.

PUAN MAHARANI

Pemimpin Potensial





facebook.com/puan.maharani

Pepatah lama mengatakan, “Buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya”. Sifat, karakter, tabiat dan profesi seorang anak mungkin tak akan jauh atau banyak ditentukan oleh kiprah kedua orang tuanya. Begitu pula yang terjadi pada Puan Maharani, anak ketiga presiden kelima RI Megawati Soekarnoputeri. Mbak Puan—begitu biasanya disapa—merupakan buah cinta Megawati dengan suami ketiganya Taufik Kiemas. Taufik sudah sejak jauh hari dikenalnya ketika sama-sama aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Sebelum menikah dengan Taufik, Megawati sudah mengalami dua kali bahtera rumah tangga. Suaminya yang pertama bernama Letnan Satu (Penerbang) Surindro Supjarso, seorang pilot Angkatan Udara (AURI) yang hilang dalam sebuah kecelakaan pesawat di Biak, Papua pada 22 Januari 1970. Sampai sekarang tidak diketahui rimbanya apakah sang suami sudah meninggal atau masih hidup. Tim evakuasi ketika itu hanya berhasil menemukan serpihan pesawat yang ditumpangi sang pilot naas dengan tujuh awak lainnya, tanpa menemukan keberadaan Surindro.

Mendengar suaminya kecelakaan, Megawati sangat syok. Menurut Rachmawati, sang adik, kakaknya itu berduka cukup lama. Bisa dipahami karena ketika tragedi besar itu terjadi, Mega sedang mengandung anak keduanya, M Prananda Prabowo. Sedangkan anak pertamanya M Rizqi Pra-

tama masih bocah. Selanjutnya, pascabangkit dari kesedihannya itu Mega lantas memutuskan untuk menerima pinangan seorang diplomat Mesir yang sangat mengagumi Soekarno, Proklamator RI yang juga ayahnya.

Namanya Hassan Gamal Ahmad Hasan. Pria Timur Tengah itu bersedia menikahi Megawati dengan sepenuh jiwanya. Setelah menikah, kontroversipun muncul. Beberapa pihak menyebut kalau pernikahan tersebut tidak sah karena Megawati masih berstatus istri Surindro sekalipun sudah hilang. Media massa yang kala itu dikendalikan rezim menyorot tajam kasus pernikahan tersebut. Trah Bung Karno pun gerah. Mereka memutuskan untuk membatalkan pernikahan yang baru tiga bulan itu. Mega-Hasan pun bercerai.

Setahun pascaperceraianya dengan Hasan, Mega memutuskan untuk kembali menikah dengan koleganya di GMNI. Barangkali alasan ideologi—disamping kisah romansa cinta—yang membuatnya menerima pinangan sang Arjuna. Mega-Taufik pun menikah tepat setahun paska perceraianya dengan Hasan pada 1972.

Pada pernikahannya kali ini, Tuhan memberikannya kebahagiaan dengan anugerah panjangnya usia pernikahan mereka. Kebahagiaan semakin berlimpah tatkala pada 6 September 1973 seorang puteri cantik lahir dari rahim Megawati untuk melengkapi kedua anak dari pernikahannya dengan sang pilot. Anak ketiganya itu diberinama Puan Maharani yang kelak akan menjadi penerus laju trah Soekarno sepeninggal dirinya.

Secuplik Kenangan dari Masa Kecil

Tak ada anak yang mampu menawar untuk dilahirkan dari rahim ibu seperti kehendaknya. Begitu halnya dengan kelahiran seorang bayi mungil yang kemudian dinamai Puan Maharani yang sudah ditakdirkan sebagai anak pasangan politisi. Segala kisah dan perjuangan kedua orang tua terekam dan teringat dalam pikiran Puan. Jalan politisi seolah telah menjadi jalan lurus yang dipersiapkan Tuhan melalui ayah dan ibu: Mega dan Taufik.

Menjalani kehidupan sebagai seorang politisi diwajibkan akrab dengan ritus kampanye untuk pendulungan suara. Ibarat marketing yang menawarkan jualannya supaya laku, seorang politisi juga harus *ngider* ke

seantero negeri untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan bernasnya kepada basis massanya. Itu pula halnya yang dilakukan Megawati ketika secara penuh aktif di kegiatan politik per 1986.

Aktivitas berpolitik yang menyibukkan membuat Mega dan sang suami harus meninggalkan anak-anaknya. Puan dan kedua kakaknya pun harus memaklumi. Puan pun diurus dan diperhatikan oleh kedua kakaknya Tatam (Rizqi Pratama) dan Nanan (Prananda Prabowo). Beruntung masih memiliki dua orang kakak laki-laki yang senantiasa menjaga dan menyayangnya.

Banyak suka dan duka menjalani hidup sering berjauhan dengan kasih seorang ibu. Seperti anak kecil lainnya, Puan pun mengalami hal-hal yang membuatnya cengeng dan menunda kerelaan membiarkan ibunya pergi. Jika sudah begitu, kedua kakaknya sangat berperan untuk menghiburnya. Mengajaknya bermain pelbagai hal: petak umpat, bola kasti sampai memanjat pohon. Ketiganya pun asyik dalam keriangannya yang diciptakannya.

Ada kisah menarik ketika mereka bermain memanjat pohon. Kedua kakaknya Nanan dan Tatam yang memang sudah terbiasa tentu saja sangat lihai ketika memanjat. Dengan maksud untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa, bersusah-payah Puan kecil ikut-ikutan memanjat dan berhasil. Namun, Tatam dan Nanan segera turun. Dengan cekatan dan cepat keduanya turun meninggalkan Puan yang masih bergelantungan di atas pohon sendirian. Puan pun menyadari bahwa dirinya hanya bisa naik namun bingung turun. Puan pun kebingungan.

Langkah cerdik pun segera diambil. Puan nekad melompat dari atas pohon sambil menggulingkan badannya ke tubuh kedua kakanya itu. Tatam dan Nananpun tertimpa tubuh Puan. Dengan begitu, sekalipun melompat namun Puan tidak merasakan sakit karena ada “matras” yakni tubuh kedua kakaknya itu. Itulah salah satu bentuk keakraban mereka dalam suka maupun duka.

Puan juga mengakui bahwa bukannya tak ada kendala ketika ditinggal Mega dan Taufik. Ia sering sakit-sakitan. Tentu Megawati sangat khawatir mendapati anak bungsunya sakit ketika hendak ditinggalkan. Megapun segera sadar kalau sakitnya Puan membutuhkan semacam penanganan

khusus. Terapi psikologis karena sakitnya sering disebabkan oleh karena kedua orang tuanya bepergian. Sebelum pergi ke daerah, biasanya Megawati menyuruh suaminya memakai kaos oblong seharian penuh. Nah, kaos oblong tersebut nantinya akan ditinggalkan di rumah untuk dipegang dan dipeluk Puan sebagai obat rindu ketika ditinggalkan pergi ayah ibunya. Dan ajaib. Ternyata benar kaos oblong bercitarasa keringat Taufik Kiemas pun menjadi obat mujarab ala Megawati untuk menyembuhkan “sakit” rindu anaknya. Sejak saat itu, metode pengobatan kaos oblong terus digunakan.

Selain itu, Puan juga sering meminta kepada ibunya untuk tidak pergi ketika hendak melaksanakan ujian sekolah. Dia ingin ketika menghadapi ujian ada sosok ibu yang senantiasa memberikannya kehangatan dan spirit sebagai bahan bakar untuk menjawab soal-soal ujian yang sulit. Mega pun bersedia menuruti kemauan si anak bungsunya itu dengan menolak undangan kampanye atau aktifitas politik lainnya ketika waktunya bersamaan dengan ujian Puan.

Penolakan Mega kepada pengundangnya seperti tertuang dalam kalimat: *“kita tak bisa pergi sampai mbak Puan selesai ujian”*. Sikap Megawati yang secara halus menolak undangan dari daerah tentu sangat membahagiakannya.

Lama kelamaan Puan makin paham bahwa ibunya adalah tokoh yang hebat. Puan mulai berusaha untuk tidak memberontak. Ia sangat memahami dan memaklumi kegiatan kedua orang terkasihnya.

Detik demi detik kehidupannya terus dilalui. Puan pun telah beranjak memasuki usia sekolah dasar (SD). Sekalipun anak seorang proklamator besar yang dikagumi banyak tokoh dunia, kehidupannya normal saja. Meskipun begitu, Puan sangat mafhum sebagai cucu seorang Bapak Bangsa dirinya harus bisa menjaga nama baik keluarga, terutama nama Bung Karno.

Persinggungan pertama dengan dunia politik praktis terjadi ketika usianya belasan tahun. Waktu itu, ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (*id. wikipedia.org*, 2013). Ketika itu, Megawati sering berkeliling ke daerah-dearah di Indonesia untuk menemui konsituennya. Banyak waktunya dihabiskan di basis-basis Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang

menjadi rumah perjuangannya. Kondisi tersebut membuka jalan bagi Puan untuk juga ikut berkeliling nusantara mengamati segala pelik kebangsaan yang terkadang menyayat nurani.

Puan yang saat itu baru SMP sudah dikenalkan dengan dunia politik yang penuh intrik. Namun Puan merasa *enjoy* menjalani segala aktifitasnya mendampingi ibunda sekalipun melelahkan. Dengan banyak berkeliling itu, Puan dapat melihat secara langsung bagaimana seorang politisi bekerja. Harinya tak pernah libur. Meja kerjanya sangat luas yakni seluruh negeri yang mendesak untuk dikunjungi. Usianya semakin beranjak, yang tentu saja semakin mendewasakan cara berfikirnya. Kerja-kerja politik yang sebelumnya hanya dianggap pertemuan lumrah antara ibunya dengan masyarakat banyak tanpa tahu makna sebenarnya.

Baru ketika sekolah menengah atas (SMA) saat dirinya mampu menangkapi hal-hal substansial, ia baru mengerti bahwa ibunya memiliki tujuan tertentu dengan berangkat ke daerah atau ketika melakukan kerja politik lainnya.

Memasuki masa kuliah, Puan mendaftar di Jurusan Komunikasi Massa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok. Masa-masa kuliah merupakan masa pembentukan intelektualitasnya sebagai dasarnya berjuang. Sebagai seorang politisi, memiliki kemampuan berbicara di depan khalayak merupakan keharusan. Semasa kuliah, Puan juga sempat menjadi karyawan magang di Majalah Forum Keadilan. Pengalamannya menjadi wartawan meskipun tidak lama tentu saja menjadi bekal berharga untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang mengharuskannya senantiasa berdekatan dengan para kuli tinta.

Setelah lulus kuliah Komunikasi Massa di UI, Puan pun semakin aktif terlibat di berbagai kegiatan politik bersama ibunya. Puan terus menyaksikan kegiatan demi kegiatan yang dilakukan Megawati. Bukan hanya memperhatikan, Puan juga belajar banyak bagaimana menjadi politisi handal yang mengedepankan perjuangan untuk rakyat, bukan kepentingan golongan semata. Semakin hari dan semakin intens pergulatannya dengan politik Puan pun semakin mengerti makna dan tujuan berpolitik.

Meskipun begitu, Puan belum mau terjun ke dunia politik. Selama itu dia membatasi dirinya untuk tidak terlebih dulu bersentuhan dengan po-

litik. Dia lebih nyaman mengakui dirinya sebagai duta Bu Mega, sang ibu, ketika diutus untuk mengirimkan bantuan ke berbagai pelosok nusantara. Beberapa kali, Mega memang mengutusnya untuk menyerahkan bantuan seperti sembako khususnya ke daerah-daerah yang terkena bencana. Secara langsung maupun tidak, hal tersebut telah mendorong sang puteri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan rakyat.

Pendampingan Puan pun semakin kentara ketika Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima menggantikan Gusdur. Kemana-pun Mega bertugas, ke berbagai daerah maupun ke luar negeri hampir dipastikan Puan selalu membuntuti. Foto dirinya pun semakin tersebar di media. Meskipun belum ada pernyataan langsung bahwa dirinya seorang politisi namun banyak pihak menduga kuat bahwa sosok Puan memang sengaja dipersiapkan Megawati untuk meneruskan trah Soekarno. Sepertinya Megawati lebih nyaman didampingi Puan ketika tampil di depan publik.

Puan aktif dalam kemenangan ibundanya sebagai presiden di Pemilu 2004 lalu. Waktu itu, Megawati berpasangan dengan KH. Hasyim Muzadi, ulama NU yang sangat moderat. Puan bergerak di Mega Centre, sebuah lembaga kemenangan Mega – Hasyim yang menampung berbagai keluhan masyarakat. Secara intens, Puan bersentuhan dengan berbagai kalangan rakyat termasuk juga melakukan lobi-lobi politik. Dari situ, pengalaman politiknya semakin kokoh.

Masuk Gelanggang

Beranjak ke tahun 2006, isteri Happy Hapsoro ini mulai bersentuhan dengan aktifitas politik praktis dengan menjadi anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Bidang Luar Negeri. KNPI ibarat kawah candradimuka baginya untuk mengimplementasikan ilmu politik warisan ibunya dan juga ilmu komunikasi yang diperolehnya dari UI. KNPI merupakan lahan pembuktian bakat dan kiprah politiknya sebelum masuk menjadi anggota partai besutan ibunya, PDI Perjuangan (*id. wikipedia. org*, 2013).



www.republika.co.id

Sampai akhirnya, di tahun 2009 lalu Puan pun mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Solo, Klaten, Sukahardjo dan Boyolali. Dengan berbagai pendekatan dan kampanye yang solutif, Puan pun berhasil memenangkan salah satu jatah kursi DPR karena memperoleh suara terbanyak kedua tingkat nasional yakni 242.504 suara.

Pencapaian tersebut tentulah tidak instan. Bertahun-tahun sebelumnya ia telah banyak menanamkan investasi sosial ketika mendampingi sang ibunda bergerak ke daerah-daerah termasuk daerah pemilihan yang menjadi lumbung suaranya. Kerja sosial dan politiknya yang konsisten memang sudah sepantasnya diganjar dengan keterpilihannya menjadi anggota DPR Periode 2009–2014. Sedangkan di internal partai, namanya juga tercantum sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga.

Di DPR kiprahnya cukup menjanjikan sebagai politisi muda perempuan yang bisa merefresentasikan kepentingan kaum minoritas. Kini Puan duduk

di Komisi 1 DPR RI yang membidani masalah pertahanan dan luar negeri. Rakyat yang diwakilinya tentu saja menggantungkan ekspektasi tinggi supaya Indonesia memiliki sistem pertahanan tangguh sehingga tidak mudah dilecehkan negara lain.

Kiprahnya di DPR yang beberapa kali menyedot perhatian media dan masyarakat berimbas pada tingkat popularitasnya. Seringnya tampil di televisi dan menjadi pembicara di pertemuan-pertemuan intelektual, menempatkannya sebagai politisi DPR yang cukup populer. Bahkan dibandingkan para artis yang cukup banyak wakilnya duduk di Senayan, Puan lebih unggul.

Hal tersebut menandakan bahwa publik luas telah mengenal sosok Puan sebagai politisi muda. Gaya bicaranya yang halus dan sistematis menjadi pembawaannya yang mudah diingat. Jika dilihat dari jawaban-jawaban yang dilontarkannya ketika diwawancarai, publik bisa menilai kalau sosok Puan bisa dikatakan lengkap menjadi seorang politisi: cerdas, konsisten dan bersih. Tak ada satu kasuspun yang membawa namanya dalam pusara korupsi sehingga publik pantas mengapresiasinya.

Pemikiran Kepemudaan

Sebagai bagian dari kaum muda yang identik dengan pemikiran revolusioner dan kekayaan, Puan tentu sangat mendorong peran-peran kaum muda untuk berkarya sesuai bidangnya masing-masing. Dalam kacamata, jumlah pemuda yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai angka 168 juta jiwa memiliki tantangan yang tak kalah beratnya dibandingkan kaum muda di masa sebelum kemerdekaan. Jika dulu lawan utamanya berupa imperialisme fisik, kini para pemuda bangsa memiliki paling tidak tiga tantangan berupa penjajahan ekonomi, sosial dan budaya.

Pertama, dalam konteks penjajahan ekonomi. Indonesia yang dulunya sangat berwibawa karena tidak menggantungkan hidupnya kepada bangsa lain kini menjadi pasar besar untuk bergelimangnya produk-produk asing. Lebih parah lagi, bukan hanya impor barang tapi juga impor pemikiran dan kebudayaan.

Kemudian dari sisi pemikiran, kata Puan, publik dapat melihat dan me-

nilai betapa banyaknya intelektual muda yang lebih bangga mencuplik kearifan dan buah fikir tokoh-tokoh dunia ketimbang tokoh lokal. Barangkali gelora intelektualitasnya lebih membahana ketika ruang-ruang pemikiran dipenuhi oleh kutipan-kutipan pemikiran sang tokoh Barat yang menjadi idola. Padahal bangsa ini begitu kaya dengan sosok-sosok lokal yang buah fikirnya diakui dunia seperti Soekarno-Hatta, Gus Dur, Buya Hamka, dan seterusnya.

Bahkan dalam tataran praktis, menurut Puan, gaya berdemokrasi Indonesia selalu didoyong-doyongkan ke Barat yang dalam beberapa segi tentu tidaklah sama dengan kondisi di negeri ini. Puan menyayangkan mengapa demokrasi kita tidak berazaskan nilai-nilai luhur kebangsaan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai satu kesimpulan tertentu. Ada perbedaan pendapat sedikit saja, daripada menggelar debat yang berkepanjangan untuk mufakat, penyelesaiannya lebih cenderung menggunakan mekanisme *voting* atau pemungutan suara.

Kedua, dari sisi sosial. Kehidupan muda-mudi kita lebih bangga mengadopsi cara bersosialisasi yang menekankan pada aspek individualistik dan materialistik khas Barat. Padahal kita punya ciri hidup sosial yang bergotong-royong, saling membantu untuk meringankan beban masing-masing. Di desa-desa memang sikap kegotong-royongan masih sangat terasa namun sayangnya hal tersebut pudar seketika dalam tempo hitungan jam ketika mobil yang ditumpangi sudah sampai di teras perkotaan.

Nuansa hidup yang lebih menekankan kepentingan individu menjadi ciri khas kaum perkotaan selain kemacetan parah dan ketimpangan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Relasi antar-manusia hanya terjadi pada sebatas kesamaan kepentingan: hobi, bisnis, dan seterusnya yang bermuara pada keuntungan individu bukan lebih ditekankan untuk membantu sesama. Sudah sejak lama, kaum yang hidup di perkotaan asosial. Tidak simpatik dan mendegradasi nilai-nilai kebajikan: gotong-royong.

Terakhir, dari sisi kebudayaan sudah jelas bangsa kita terjajah. Arus budaya impor begitu deras sampai-sampai memudahkan simpati dan kecintaan kaum muda terhadap warisan budaya dan seni nenek moyang. Seni wayang, tari-tarian daerah maupun seni sastra yang sangat kaya kalau digali

merupakan bentuk kekayaan budaya yang sejatinya mesti dibudidayakan. Bukankah banyak orang asing yang malah belajar kesenian daerah negeri kita? Kenapa pemuda kita malah terjebak dalam pembaratan kebudayaan?

Bagi Puan, bangsa besar ini bisa sangat maju jika saja kaum mudanya yang identik dengan kekuatan dan pemikiran besar tadi lebih peduli dalam menggali nilai-nilai yang ada di dalam diri dan bangsanya. Jika pemuda-pemuda yang berjumlah banyak dan berpemikiran dahsyat itu diberdayakan maka bangsa ini akan maju pesat menyalip bangsa-bangsa maju lainnya. Silakan lihat prestasi anak-anak muda Indonesia yang pernah menjuarai olimpiade fisika, matematika, biologi dan seterusnya.

Hal tersebut merupakan bukti bahwa jika saja ada kemauan—tentu saja pemerintah harus mengakomodasi dan memberdayakan mereka—untuk menggelorakan berbagai kemampuan dan produk pemikiran bangsa sendiri maka Indonesia bukan hal sulit untuk menjadi macan Asia. Dengan jumlah pemuda yang begitu melimpah tentu menjadi energi luar biasa untuk membangun dan memajukan Indonesia.

Kunci untuk menggerakkan para kaum muda itu sebenarnya sangat sederhana: mengkontekstualisasikan patriotisme Sumpah Pemuda yang pada Oktober 1928 didengungkan sebagai langkah praksis untuk menyatukan kaum muda. Spiritnya harus sama, yaitu membebaskan Indonesia dari



keterkungkungan bangsa asing. Serta mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia untuk menyokong kemajuan dan kebesaran negara.

Kaum muda harus menjalankan apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa *Karmane Vadni Adikaraste Maphalellu Kada Chana*. Artinya: laksanakan kewajibanmu dengan ikhlas dan rela tanpa bertimbang, sebab jika bukan engkau yang memetik buahnya maka anakmu yang akan memetik, jika bukan anakmu pastilah cucumu yang akan memetikanya.

Puan: Teruskan Perjuangan!

Sebagai seorang anak seorang politisi dan mantan Presiden, Puan tampaknya belajar banyak dari sang orang tua. Apalagi, sang ibu, Megawati seringkali mengajaknya bersafari politik, mendengar berbagai keluhan rakyat di berbagai penjuru negeri sehingga Puan juga ikut belajar untuk memahami permasalahan bangsa ini. Selain itu, kedekatan dengan orang tuanya memberi efek pemikiran politik yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Inilah kawah candradimuka yang membentuk karakter Puan dalam mengarungi dunia politik.

Dalam riwayat akademisnya, Puan berhasil menyelesaikan studi bidang komunikasi massa di Universitas Indonesia. Bidang tersebut tentu saja menjadi bekal tersendiri bagi Puan hingga nanti memutuskan untuk terjun di dunia politik. Belum lagi, Puan juga memiliki latar belakang organisasi yang kuat. Meski tidak begitu aktif, di organisasi internal kampus, tetapi Puan mulai belajar politik praktis di KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), dan pada tahun 2006, Puan menjabat sebagai anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Bidang Luar Negeri. Berbagai pengalaman tersebut, menjadi modalitas tersendiri, hingga akhirnya Puan memutuskan untuk terjun di dunia politik. Karir pertamanya bergelut di Mega Center yang saat itu berkonsentrasi pada pemenangan Mega-Hasyim.

Pada Pemilu 2009, menjadi panggung pembuktian Puan terjun di dunia politik. Puan ikut serta dalam perebutan kursi legislatif. Hasilnya, Puan yang maju dari daerah pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi Solo, Klaten, Sukaharjo dan Boyolali berhasil meraih suara 242. 504 suara, sehingga gerbang DPR RI terbuka lebar baginya.

Hingga kini beberapa jabatan strategis pernah menjadi tanggung jawabnya, seperti Anggota Panja Komisi VI Bidang Investasi dan UKM tahun 2009, Anggota BKSAP/Badan Kerjasama Antarparlemen (periode 2009-2014), Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRRI (periode 2009-2014), Ketua DPP PDI Perjuangan Politik dan Hubungan Antarlembaga (2010-2015).

Salah satu keberhasilan Puan, adalah saat menjadi Ketua Pemenangan pada pilgub Jateng tahun 2013 yang lalu. Puan membawa misi berat karena harus menjadi kepanjangan tangan Megawati untuk mengkonsolidasikan berbagai kader sekaligus menyusun berbagai strategi untuk mensukseskan kemenangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko.

Kontestasi semakin menarik karena Gubernur Jateng sebelumnya, Bibit Waluyo yang didukung PDIP ternyata menyebrang ke kapal lain, yakni Partai Demokrat. Dengan demikian, voters yang dulu mendukung Bibit di-uj, apakah dahulu memilih karena Bibit atau PDIP? Hal inilah yang menjadi tantangan Puan saat itu. Namun, dibalik hal tersebut, kontestasi tersebut menjadi pembuktian Puan dalam kapasitasnya menjadi politisi.

Akhirnya, dengan kerja keras yang tak kenal padam. Ganjar pun menang telak dalam pilgub Jateng dengan memperoleh 6. 962. 417 suara atau sebesar 48,82%. Unggul jauh dari perolehan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo sebanyak 4. 314. 813 suara atau 30,26% dan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono yang memperoleh 2. 982. 715 suara atau 20,92 persen.

Kemenangan tersebut membuktikan bahwa Puan adalah politisi yang punya kapasitas dan juga punya kompetensi di bidang politik. Sekaligus menepis anggapan bahwa Puan menjadi politisi hanya bermodal dinasti.

Meskipun begitu, kedekatan Puan dengan keluarganya sangat berpengaruh pada pandangan politiknya. Dalam tulisannya di *Kompas* (25 Oktober 2012), Puan menawarkan perlunya perspektif baru tentang patriotisme pemuda Indonesia.

Pemuda yang dianggap *agent of change* dapat menjadi modal besar dalam pembangunan bangsa ini. Apalagi, kuantitas pemuda di Indonesia sangat besar. Catatan sejarah menjadi bukti bagaimana peran pemuda menciptakan semangat patriotisme dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Namun, tantangan pemuda saat ini berbeda dengan masa penjajahan dulu. Jika dulu berhadapan dengan penjajahan fisik, sekarang pemuda berhadapan dengan krisis multidimensi, yang menempatkan Indonesia terjajah dalam bentuk yang baru.

Beberapa bidang telah menjadi lahan penjajahan bangsa lain. Di bidang ekonomi misalnya, produksi dalam negeri sudah kalah bersaing dengan produk luar negeri. Implikasinya, banyak pengusaha dalam negeri yang gulung tikar karena impor yang begitu melimpah.

Di bidang pemikiran, pemikiran tokoh bangsa lain lebih dipilih menjadi referensi dibanding pemikiran tokoh –tokoh bangsa sendiri. Bahkan, dalam tataran praktis, gaya demokrasi sekarang ini lebih berorientasi pada demokrasi ala Bara. Bukan demokrasi yang berjiwa nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Perbedaan pendapat cenderung diselesaikan dengan mekanisme *voting* (pemungutan suara) daripada musyawarah untuk mufakat.

Melihat fakta demikian, bangsa ini memerlukan pemimpin yang mampu memberikan keteladanan untuk menguatkan berbagai elemen bangsa untuk menjadi pionir pembangunan bangsa. Namun, jika pemimpin tak kunjung hadir, semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi refleksi bagaimana pemuda dapat bersatu, berjuang demi tanah air.

Bila pemuda bangsa tahun 1928 menjawab tantangan penjajahan dengan persatuan, maka pemuda Indonesia masa kini bisa menjawab tantangan krisis multidimensi dengan tampil sebagai pionir-pionir penuh prestasi di bidang keahlian dan bidang kecakapannya masing-masing (*Puan Maharani, Kompas, 5 oktober 2012*).

Setiap tunas bangsa hendaknya menekuni profesinya secara utuh, tulus, dan ikhlas demi kemajuan bangsa dan negara. Puan pun mengambil petuah Bung Karno, *Karmane Vadni Adikaraste Maphalessu Kada Chana* (laksanakan kewajibanmu dengan ikhlas dan rela tanpa bertimbang, sebab jika bukan engkau yang memetik buahnya maka anakmu yang akan memetik, jika bukan anakmu pastilah cucumu yang akan memetiknya).

Pernyataan Puan tersebut, menjadi benang merah akan pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa. Puan melihat potensi yang sangat besar jika para pemuda di Indonesia dapat mengimplementasikan

redefinisi sikap patriotisme tersebut. Pemikiran ini mungkin juga terilhami dari nasehat sang kakek yang pernah berucap, “Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia”.

Dalam berbagai kesempatan Puan juga menyinggung perjalanan demokrasi di Indonesia yang saat menurut pandangannya ajustru semakin jauh dari cita-cita bangsa. Baginya, demokrasi tak boleh hanya mengabdikan pada kepentingan sekelompok orang saja. “*Demokrasi kita harus mengabdikan kepada kepentingan seluruh masyarakat,*” tegasnya. (jpnn.com, 2012)

Puan prihatin dengan kondisipara pemimpin saat ini yang melupakan ajaran Pancasila dan Trisakti Soekarno. Nilai-nilai pancasila semakin terkikis, karena semakin minimnya kesadaran akan nilai-nilai pancasila tersebut. Sedangkan Trisakti sebagai ajaran Bung Karno yang berisi, berdaulat dalam bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian yang berkebudayaan Indonesia juga belum terealisasi secara optimal. Hal ini pula yang menjadi agenda perjuangan politik PDIP yang di implementasikan dalam berbagai program partai.

Hal lain yang juga diperhatikannya adalah persoalan keberagaman. Menurutnya, saat ini keberagaman justru semakin menjadi akar konflik. “Apa kata dunia bila bangsa yang salah satu pilarnya sudah jelas Bhinneka Tunggal Ika malah sering mempermasalahkan keragamannya sendiri?” cetus Puan (detik.com, 2014). Oleh karena itu, menurutnya upaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak perlu di optimalkan dan kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan sehingga tidak mudah terbawa konflik.

Baginya, apa yang diperjuangkan selama ini di ranah politik hanya untuk rakyat. Apa pun untuk kepentingan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. “Kita tak boleh menghambat apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Kita akan teriak ketika hak rakyat tidak disampaikan, apalagi jika ada kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat,” ulasnya. (indonesia-2014.com, 2012)

Tampilnya sosok Puan dalam panggung politik, menunjukkan bahwa masih ada perempuan-perempuan hebat yang dengan kapasitasnya dapat mengarungi dunia politik. Bahkan, dalam beberapa kesempatan Puan tetap menyuarakan keadilan gender.

Puan masuk ke dunia politik tidak hanya bermodal nama keluarga, te-

tapi juga dengan kapasitas, pengalaman dan juga aksi nyata. Hidup dalam keluarga politisi, bukan membuat Puan lupa diri, melainkan belajar untuk mengabdikan.

Di tengah dinamika politik saat ini, akankah Puan didorong untuk bertarung dalam pilpres 2014? Tentusaja, pertanyaan akan menunggu keputusan Megawati, sebagai ketua partai. Namun, apapun keputusannya nanti, Puan telah bertransformasi menjadi politisi yang cukup diperhitungkan. Sebagai politisi yang masih tergolong muda, Puan berpeluang untuk meneruskan perjuangan keluarga. Setidaknya, elektabilitas, pengalaman, dan posisi strukturalnya di partai, member jawaban akan masa depannya. Sambil menungguucapan, "Puan, Teruskan Perjuangan !"

Menunggu Keputusan

Dalam berbagai kesempatan, Puan agaknya masih belum mau terbuka jika disinggung soal kansnya bertarung dalam pilpres 2014. "Saat ini, saya dan partai focus pada kemenangan pileg nanti." Tegasnya (*Youtube* dalam acara Satu Indonesia, Net TV).

Ungkapan tersebut dapat dipahami karena memang saat ini, PDIP telah menetapkan target suara yang tidak main-main, sebesar 27,02% atau 152 kursi parlemen. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Puan sebagai Ketua Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP. Namun, sebagai salah satu tokoh yang diprediksi masuk dalam bursa capres PDIP, Puan juga memiliki modalitas politik yang cukup kuat. Pertama, Puan adalah anak biologis dan ideologis dari Megawati sekaligus mempunyai darah keturunan Soekarno yang lebih sering muncul di media dibandingkan saudaranya yang lain.

Kedua, Puan seorang politisi yang mempunyai kapasitas yang berpengalaman. Sebagai wanita, Puan juga hadir di tengah minimnya politisi perempuan yang tangguh. Ketiga, di internal partai dan DPR Puan menduduki posisi strategis yang memungkinkannya untuk lebih banyak tampil di media baik cetak, elektronik maupun *online*. Hal ini tentu saja akan menaikkan elektabilitasnya.



Meskipun begitu, Puan juga memiliki tantangan jika ingin maju dalam pilpres 2014. Pertama, tentu ihwal elektabilitasnya yang masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi elektabilitas Puan belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional yang disurvei.

Sebagai keturunan Soekarno, mungkin saja kelak Puan bisa mengantongi elektabilitas yang tinggi. Tentu saja, Puan masih butuh panggung yang lebih besar untuk membuktikannya.

Kedua, meskipun karir politiknya berjalan mulus. Puan belum pernah menduduki jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, mungkin publik masih meragukan kapasitasnya jika menjadi pemimpin negeri ini. Hal ini tentu menjadi tantangan Puan jika tidak ingin menjadi blunder jika maju dalam pilpres nanti.

Ketiga, tentu keputusan partai pengusungnya. Memang saat ini, PDIP belum mau tergesa-gesa menetapkan siapa jagoannya nanti. Di berbagai kesempatan, Puan menegaskan akan menaati semua keputusan partai.

Tetapi, melihat kemunculan berbagai kader potensial, bisa jadi akan menjadi batu sandungan Puan untuk dipertimbangkan oleh Sang Ketua Umum.

Meskipun begitu, posisinya sebagai Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) akan menjadi panggung pembuktiannya dalam kancah politik. Apabila target partai terpenuhi, tidak bisa dipungkiri akan meningkatkan *trust* para kader partai terhadap kinerja Puan. Sehingga, bisa jadi akan muncul dorongan para kader untuk mengusung Puan dalam pilpres 2014.

Sebagai sarjana komunikasi massa tentu Puan tidak mau sesumbar dahulu. Meskipun dalam beberapa kesempatan Puan menegaskan akan mengikuti keputusan partai, tetapi Puan juga memiliki kalkulasi sendiri terkait kansnya maju dalam pilpres 2014 nanti. Apalagi dengan banyaknya hasil survey yang melejitkan beberapa kader partainya. Namun, tentu saja, soal pilpres masih menunggu keputusan sang bunda.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Peluang Puan untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014 cukup tinggi. *Pertama*, ia merupakan satu-satunya anak ideologis Megawati dan cucu Bung Karno yang kerap tampil di publik dibandingkan kedua kakaknya yang lain. Sebagai anak kandung Megawati yang notabene cucu sang proklamator dan ketua umum partai besar, hal tersebut tentu saja dapat dijadikan senjata oleh Puan untuk mengatrol elektabilitasnya dengan membawa nama besar kakek dan ibunya sebagai simbol politik dan ideologisnya. Pemilih di negeri ini masih banyak yang mendasarkan pilihannya pada alibi kesukaan, kekaguman terhadap sosok atau bahkan romantisme sejarah. Tak bisa ditampik ketokohan Megawati banyak didukung oleh ketokohan Soekarno yang memang banyak pengagumnya. Hal demikian tentu saja dapat ditularkan kepada sang puteri mahkota Puan Maharani.

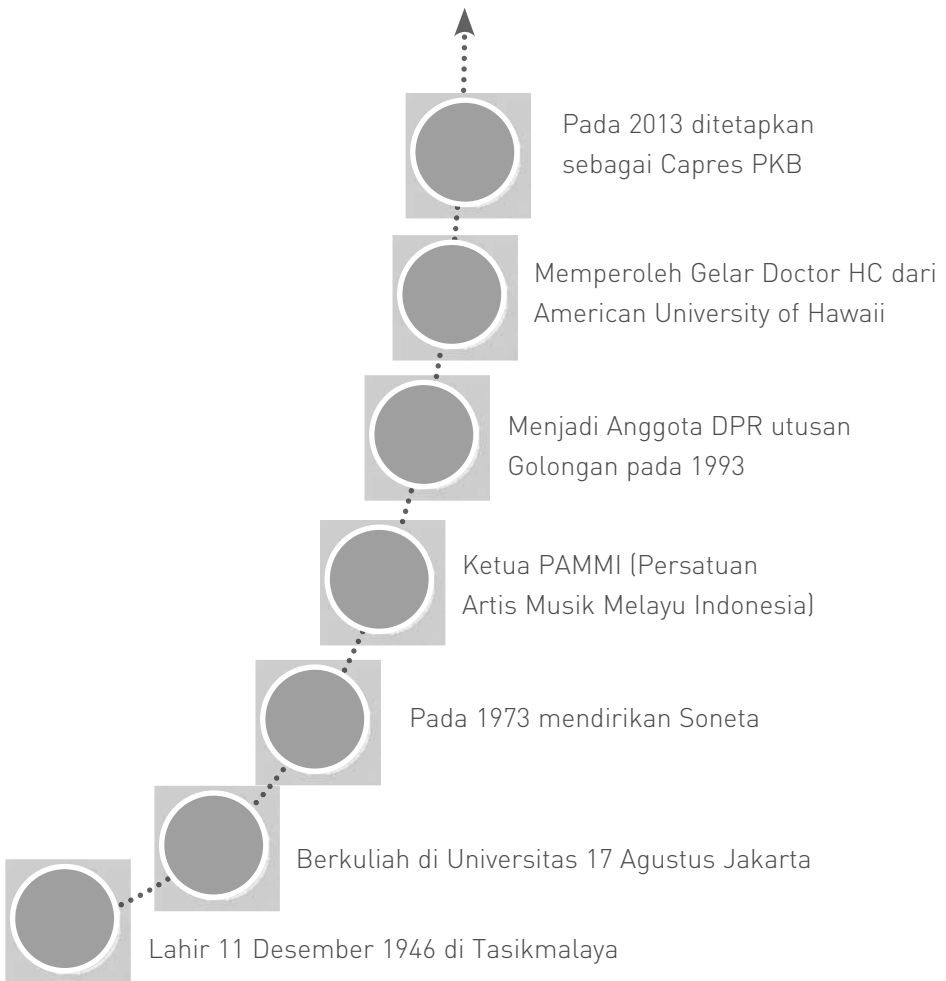
Kedua, Puan juga dianggap tokoh perempuan yang punya minat tinggi terhadap politik. Pada titik tertentu, ini bisa menjadi peluang baginya di tengah minimnya kaum hawa yang terjun di politik praktis. *Ketiga*, di internal partai dan DPR Puan menduduki posisi strategis yang memungkinkannya

untuk lebih banyak tampil di media baik cetak, elektronik maupun *online*. Dengan begitu maka popularitasnya akan menanjak.

Meski demikian, tantangan Puan tentu ihwal elektabilitas yang masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi elektabilitas Puan belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional yang disurvei.

RHOMA IRAMA

Pemimpin Potensial





merdeka.com

Ia dikenal sebagai “Raja Dangdut”, tak lain disebabkan lagu-lagunya yang begitu membumi mengangkat realitas kemasyarakatan dan kebangsaan secara konsisten lewat lirik-lirik yang bersahaja. Rhoma memang bukan orang baru dalam gelanggang politik nasional. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting PPP, setelah terus dimusuhi oleh Pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Rhoma juga pernah terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan yakni mewakili seniman dan artis pada 1993. Sosok yang penah mencanangkan semboyan “*Voice of Moslem*” (Suara Muslim) dan berhasil menjadi pembaharu dengan memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu. Majalah TEMPO (30 Juli 1984) misalnya pernah menyebut bahwa penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta orang atau 10 persen penduduk Indonesia. Pada bulan Februari 2005, ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut.

Rhoma Irama adalah legenda hidup dalam musik dangdut di negeri ini. Soal kemampuan bermusiknya tak ada yang meragukan. Karya-karyanya sangat dicintai dan dikagumi berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri. Banyak musisi Tanah Air yang mengatakan bahwa tak mungkin dalam sebuah konser dangdut tidak membawakan karya-karya ciptaannya. Hal itu menandakan kalau buah ciptanya sangat diapresiasi, bahkan dikultuskan.

Rhoma Irama atau nama bekennya Bang Haji lahir dengan nama asli Oma Irama di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 11 Desember 1946. Dia dilahirkan dari keturunan ningrat pasangan Raden Burdah Anggawirya yang merupakan seorang gerilyawan Garuda Putih. Ibunya seorang yang mengasihi anak-anaknya dengan penuh ketulusan. Rhoma sendiri merupakan anak kedua dari empat belas saudara—delapan saudara kandung, empat saudara seibu, dan dua saudara yang dibawa oleh ayah tirinya.

Raden Burdah merupakan sosok pejuang tulen yang memiliki nasionalisme menyala-nyala. Tak hanya pejuang, ia juga sangat menyukai musik sehingga suatu ketika dengan maksud menghibur pasukannya ia mengundang sebuah grup sandiwara yang didatangkan dari Jakarta bernama Irama Baru. Lantas saking terkagum-kagumnya dengan grup sandiwara tersebut membuat hatinya tergerak untuk menyisipkan kata “Irama” pada nama anak keduanya itu. Sehingga jadilah Oma Irama yang kelak menjadi Rhoma Irama yang merupakan kesatuan dari Raden Haji Oma Irama (shofan, 2014)

Bakat seni seorang Rhoma sejatinya sudah terlihat sedari kecil. Kedua orang tuanya sangat mafhum dengan bakat seni anaknya itu. Seperti halnya bocah yang lain, Rhoma cilik juga sering nangis karena suatu hal. Dan anehnya, tangisannya baru akan berhenti ketika sang ibunda sudah menyanyikannya lagu-lagu. Hal tersebut terus berulang sampai ia masuk sekolah.

Minatnya terhadap seni musik semakin menjadi ketika masuk ke sekolah dasar (SD). Naluri dan kebahagiaannya seolah ada di musik. Apapun yang ia lakukan, asalkan berkaitan dengan musik maka ia akan tertawa dan senang bukan kepalang. Bahkan baru saja kelas 2 SD, Rhoma kecil sudah fasih menyanyikan lagu-lagu barat dan India. Beberapa lagu seperti *No Other Love*, *Mera Bilye Buchariajaya* dan lainnya sudah hafal di luar kepala dalam usianya yang masih dini.

Rhoma memang menurunkan bakat bermusiknya dari sang ayah yang jago memainkan alat musik seruling. Lagu-lagu Cianjuran merupakan de-retan musik yang sangat digemari sang ayah. Tak hanya itu, sang paman Arifin Ganda juga turut serta dalam membentuk jiwa bermusik dan kelihaiannya dalam mengolah nada. Lagu-lagu Jepang karena memang waktu itu Indonesia baru saja terlepas dari cengkeraman Negeri Sakura tersebut, kerap diajarkan kepada Rhoma kecil oleh pamannya itu.

Seiring berjalannya waktu, kegemarannya dalam membawakan lagu-lagu barat, India dan juga Jepang beralih ke musik yang bernuansakan Melayu. Hal itu terjadi pada tahun 1960-an. Tentu ada alasan pemilihan lagu-lagu Melayu untuk semakin ditekuninya secara mendalam yakni karena menurutnya, musik-musik Melayu terdengar lebih indah, melodis dan inspiratif. Terlebih kalau musik-musik Melayu diolah dengan pendekatan rasa dan hati seperti yang kemudian dilakukannya kelak.

Musik telah mendarah daging dengan dirinya. Keberaniannya untuk tampil di depan kelas sudah dilakukannya sejak menduduki bangku sekolah dasar. Ia murid yang paling antusias untuk manggung di depan kelas dengan suara lepas bahkan sampai terdengar ke ruangan kelas yang lain. Dan biasanya kalau Rhoma kecil sedang berdendang dengan suara merdunya, murid-murid yang lain memperhatikan dengan serius seolah tengah menyaksikan konser bintang besar. Rhoma memang calon bintang besar.

Sampai akhirnya, bakat bermusiknya ditemukan oleh seniman senior Bing Slamet ketika Rhoma sedang mempertontonkan kebolehannya dalam bermusik di sebuah acara sekolah. Semenjak itu, dirinya terus dipantau Bing Slamet untuk melihat perkembangan bermusiknya. Dan sejarahpun tercipta. Untuk pertama kalinya, Rhoma tampil di Gedung Serikat Buruh Kereta Api (ABKA) di Manggarai, Jakarta. Itulah kebanggaan ia dan keluarganya (tokohtokoh.com, 2012)

Sejak saat itu, hidupnya seolah tak terpisahkan dari musik. Meskipun Rhoma kecil belum benar-benar faham apakah musik akan menjadi jalan hidupnya, namun setidaknya *passionnya* sudah berhasil ia raih: bermusik. Ia pun terus berlatih bernyanyi. Tak hanya itu, keinginannya untuk belajar salah satu instrumen musik yakni bermain gitar semakin menggebu. Rhoma pun mulai belajar gitar secara otodidak dan tak dibimbing. Sehingga mulai saat itu, selain bernyanyi, hidupnya juga tak pernah berjauhan dari gitar.

Kegemarannya dalam bermain gitar sudah mendarah daging. Kemana-kemana selalu membawa gitar. Bermain atau sekadar disuruh ibunya untuk menjaga adiknya tidur, ia malah asyik bermain gitar. Karena itu, tak mengherankan kalau ibunya sering jengkel dan memarahinya. Bahkan saking tak tertahankannya dengan kegemaran anaknya bermain gitar yang seolah tak

kenal waktu, suatu ketika, ibunya membanting gitarnya ke sebuah pohon.

Tahun 1958, ketika Rhoma menginjak kelas V SD keluarganya kehilangan seorang yang menjadi tulang punggung keluarga. Rhoma terkulai dalam kesedihan mendalam karena ayahnya dipanggil Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Meski masih kecil untuk menerima kenyataan pahit tersebut, ia sudah bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang menjadi tumpuan hidup.

Tak hendak larut dalam kesedihan setelah ditinggal suami tercintanya, ibunda Rhoma kemudian memilih menikah lagi dengan pria yang kebetulan masih dalam satu garis keluarga. Raden Soma Wijaya, seorang perwira ABRI yang kemudian menjadi belahan dan tumpuan hidup ibunya sekaligus juga menjadi ayah tiri Rhoma. Soma Wijaya sendiri membawa dua anak dari pernikahannya dengan isteri sebelumnya sehingga anggota keluarganya makin banyak.

Hadirnya sang ayah tiri tentu tak membuat suasana yang sebelumnya sudah terbangun, kembali lagi. Hadirnya Soma Wijaya, kesan feodal mulai terelakkan. Bahkan seolah telah menjadi jalan Tuhan untuk memberikan ruang kepada Rhoma untuk menggali sedalam-dalamnya bakat bermusik dan bernyanyinya. Tak dinyana, ayah tirinya ternyata begitu mendukung karier bermusik Rhoma. Soma membelikannya berbagai peralatan bermusik seperti gitar, bongo, dan lainnya. Dengan fakta tersebut tentu saja semakin membuat Rhoma keasyikan dengan dunianya.

Lantas, apakah hidupnya hanya dihabiskan untuk musik? Ada warna lain yang ikut dalam membangun sejarah hidupnya. Dengan badan kekaranya, Rhoma memanfaatkannya untuk beradu jotos. Menjelang usianya remaja, selain bermusik hobinya yang lain ialah berkelahi dengan anak-anak lain. Lingkungannya memang keras. Anak-anak di sekitar rumahnya saling membuat geng atau kelompok yang bermusuhan dengan geng-geng lainnya. Termasuk juga Rhoma yang memiliki geng dan dia didaulat sebagai ketuanya.

Konsekuensi sebagai ketua geng menjadikannya selalu berada di garda terdepan untuk berkelahi. Sesekali menang namun beberapa kali juga ia menderita kekalahan. Bahkan pernah suatu ketika ia terluka parah karena dikeroyok oleh 15 orang musuhnya dari geng sebelah di kawasan Megaria,

Jakarta—sebelum hijrah ke Tasikmalaya, keluarga Rhoma memang hidup berpindah di Jakarta.

Masuk di sekolah menengah pertama (SMP) membuat nyalinya semakin besar. Intensitas berkelahinyapun kian sering. Ketika itu sudah banyak dibuka perguruan-perguruan pencak silat atau bela diri. Bagi Rhoma, bela diri tentu bukanlah hal asing karena sudah sejak kecil ia dilatih dan digodok oleh sang ayah. Bahkan ia juga pernah belajar silat di Perguruan Cingkrik, Silat Sigundel, dan melalui beberapa bimbingan khusus dari guru-guru lainnya, sehingga bagi kakaknya, Oma bisa dianggap guru (showbiz. liputan6.com, 2013)

Tentu saja ilmu silatnya juga sangat bermanfaat baginya kelak ketika ia mencoba menjajal di dunia film. Selain mengandalkan musikalitasnya yang khas, film-filmnya juga mengandalkan ketangkasan seni bela diri. Barangkali tak banyak yang tahu kalau kebandelannya semasa di SMP menyebabkan beberapa kali tidak naik kelas. Ia sering bolos sekolah dan lebih mementingkan bermain musik atau berkelahi.

Memasuki bangku SMA rupanya tak sedikitpun merubah kebiasaan bolos dan berkelahnya. Karena itu Rhoma sering sekali untuk berpindah sekolah. Menariknya, dia bukan hanya berpindah sekolah di sekitar Jakarta saja melainkan juga pernah ia bersekolah di Solo. *Kok bisa?* Suatu waktu, Rhoma, Benny Muharram sang kakak dan tiga orang temannya berniat belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur dengan menaiki kereta. Namun karena bocah-bocah itu tidak membeli tiket akhirnya mereka harus kucing-kucingan dengan petugas supaya tiketnya tidak ditagih.

Karena lelah main petak umpat dengan sang kondektur akhirnya mereka memutuskan untuk turun di Stasiun Tugu Yogyakarta. Dari stasiun tersebut mereka kemudian naik kereta lagi menuju ke Solo. Di kota itu merekapun terpaksa menjalani masa-masa sulit karena memang tidak banyak membawa uang. Untuk menyambung hidupnya, remaja-remaja ini harus mengamen dan hidup menggelandang.

Beruntung ada Mas Gito yang kemudian membawa mereka ke rumahnya sehingga tidak menjadi “santapan” preman jalanan yang bengis dan tak berkemanusiaan. Yang menarik, sekalipun mereka sedang bermusafir

namun keinginan untuk bersekolah ternyata masih ada. Rhoma dkk pun mendaftarkan diri di SMA St. Joseph Solo walaupun tidak sampai tamat. Untuk membiayai sekolahnya itu ia kumpulkan dari uang ngamen dan hasil menjual beberapa helai baju yang dibawanya dari Jakarta.

Sampai akhirnya, sekolahnya di Solo tak juga lulus ia pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan melanjutkan sekolah di SMA 17 Agustus sampai lulus pada tahun 1964. Pengalaman hidupnya yang banyak dihabiskan di jalanan dan juga sekolah yang berpindah-pindah secara tidak langsung telah membentuk mentalnya. Setelah lulus bangku SMA Rhoma kemudian melanjutkan studinya di Universitas 17 Agustus Jakarta mengambil jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sudah bisa tebak karena memang hobinya bermain musik sehingga berdiam di kelas untuk sekadar mendengarkan ceramah dosen dirasakannya begitu membosankan. Ia pun segera keluar dari kuliahnya dan lebih serius menggeluti minatnya: bermain musik. Kali itu ia sudah yakin kalau musik ialah jalan hidupnya. Ia bisa sukses dengan bermain musik. Ia bisa menghibur orang dan membahagiakan keluarganya dengan bermain musik. Maka asanya pun mulai ditancapkan dalam-dalam supaya tak mudah tercerabut. Rhoma telah menunjuk satu bintangnya untuk dikejar: menjadi musisi.

Rhoma mulai bermain musik lebih serius. Ia jatuh bangun membentuk band musik untuk masuk ke industri musik tanah air. Pertama kali ia mendirikan band Gayhand pada tahun 1963-an namun kurang sukses. Ia pun beralih ke Orkes Chandra Leka. Tak berapa lama bermain di band barunya itu, kemudian dengan mantap ia mendirikan band sendiri yang melegenda dan masih ada hingga sekarang (kumpulansejarah.com, 2012)

Mendandang Bangsa

Rhoma Irama pun melesat. Nama dan bandnya kian terkenal sampai ke seantero negeri setelah manggung disana-sini. Dia lantas menjelma menjadi seorang panutan. Kapasitas bermusik Melayunya diakui dan diapresiasi bukan hanya di kalangan pecinta musik tanah air namun juga sampai ke mancanegara, minimal Asia Tenggara.

Di tahun 1984, Majalah TEMPO menulis kalau penggemar Rhoma sudah mencapai 15-an juta yang berarti 10 persennya dari total penduduk Indonesia waktu itu. Hal itu didasarkan pada data penjualan kaset dan orang-orang yang menonton filmnya. Sungguh pencapaian luar biasa yang agak musykil disama oleh musisi lainnya.

Seringkali dalam kesempatan manggungnya ke berbagai daerah di Indonesia atau di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya, pengunjuknya berdesak-desakan. Diluar itu, Rhoma juga sosok pemusik yang unik karena bukan semata bermusik yang diusungnya namun juga kental dengan aspek religius. Meskipun tak pernah mondok di Pesantren Tebu Ireng Jombang namun dirinya lekat dengan nuansa ketuhanan yang mendalam. Sehingga pada Oktober 1973 ia mencanangkan “Suara Muslim” (*Voice of Moslem*) yang bertujuan melakukan pembaruan musik Melayu muslim dengan segala bentuk improvisasinya.

Rhoma dianggap berhasil dalam mengawinkan musik Melayu dan *rock* yang ketika itu tengah hits-hitsnya. Lagu-lagu hasil improvisasinya menjadi lebih melodis, kaya makna dan bertenaga sehingga banyak dijadikan sebagai bukan hanya hiburan namun juga inspirasi. Citarasa bermusiknya semakin berbeda ketika dia mampu memadukan musik Melayu dengan beberapa warna musik lain seperti pop, India, dan juga orkestra. Total sudah 650-an lebih lagu yang diciptakannya hingga kini sehingga menempatkannya bukan hanya sebagai pemusik papan atas namun juga legenda hidup dalam bermusik Melayu.

Lagu-lagu yang diciptakannya beraneka suasana mulai dari religi, cinta, kritik sosial yang sebagian besarnya mewakili kondisi riil di zamannya. Tak cukup sampai disitu, Rhoma juga terbilang sukses dalam bermain film. Hampir semua film yang dimainkannya laku di pasaran. Satria Bergitar dirilis 1984 misalnya, yang merupakan salah satu film tersuksesnya, mencetak rekor penjualan fantastis. Bahkan baru rampung saja pembuatan filmnya sudah memperoleh keuntungan sebesar Rp 400 juta. Jumlah yang sangat banyak ketika itu.

Kepopuleran dan begitu banyaknya tawaran untuk bermain film atau manggung tidak lantas menjadikannya lupa diri Rhoma bukan tipikal artis semacam itu. Sebaliknya, semakin banyak diguyur berkah semakin banyak berbelas kasih kepada sesamanya yang kurang beruntung.



news. detik.com

Karenanya, menurut sang kakak Benny Muharram yang juga sebagai produser PT Rhoma Film mengatakan bahwa adiknya itu tidak pernah mengandalkan hidup dari uang film. Untuk kehidupan pribadinya, Rhoma lebih mengandalkan penjualan kaset-kasetnya. Lalu, kemana hasil penjualan filmnya? Rhoma banyak menyumbangkannya buat masjid, yayasan yatim piatu, berbagai kegiatan remaja dan juga perbaikan kampung (anneahira.com). Sampai di titik ini, terbukti kalau seruan-seruannya tak hanya sebatas di lagu, tetapi secara nyata ia lakukan

Merapat ke Dunia Politik

Dengan berjuta-juta penggemarnya masuk akal kalau ia dilirik oleh partai politik. Mereka, para politikus itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dirinya supaya ikut bergabung dalam aktivitas partai karena Rhoma dianggap mampu mengerek perolehan suara partai. Kapasitasnya sebagai pemusik andal dengan banyak penggemar membuatnya semakin menyilaukan mata partai-partai politik untuk mengajaknya bergabung sebagai salah satu *vote getters* nya.

Kemanakah Rhoma memantapkan hatinya untuk berlabuh? Sesuai dengan nurani dan kesamaan visinya dengan platform partai ia pun memutuskan untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan salah satu dari tiga partai yang eksis di era Orde Baru. PPP lebih berhaluan islamis dibandingkan dua partai lainnya Golkar dan PDI yang lebih condong ke nasionalis. Ia pun aktif di PPP dan menjadi maskotnya. Rhoma sering tampil dalam banyak kampanye partai berlabang kakkah tersebut (merdeka.com, 2014)

Golkar sebetulnya menaruh hati kepada Rhoma sudah sejak jauh-jauh hari. Namun pinangannya selalu ditolak sang Raja Dangdut. Golkar saat itu *meradang* dan lantas berbalik memusuhi Rhoma sampai akhirnya ia berhenti dari dunia politik. Bertahun-tahun aktivitas Rhoma hanya dihabiskan di atas panggung untuk bermusik. Ia menepi dulu dari hiruk pikuk politik yang dirasanya telah begitu jauh ia geluti sampai dimusuhi rezim. Walaupun pada tahun 1997 ia bergabung ke Partai Golkar.

Hanya sebentar ia rehat, sebelum akhirnya terjun lagi ke aras politik dengan menjadi anggota DPR RI mewakili utusan golongan yakni artis dan

seniman di tahun 1993. Selama menjadi anggota legislatif iapun mengecap banyak pengalaman, paling tidak menambah warna atau dimensi lain selain bermusik. Selama menjadi anggota DPR ia merasakan perjuangan yang sebenarnya untuk membela kepentingan para musisi dan seniman yang diwakilinya. Sejak saat itu hidupnya tak pernah lagi berjauhan dengan politik. Meskipun tidak secara intens bergelut di ranah politik namun pengalamannya yang panjang telah memberikan pemahaman penting soal kebangsaan. Rhoma merasa berjuang dengan lirik lagu ternyata tak cukup karena nirkeputusan politik.

Rhoma harus berjuang lagi di ranah politik. Pada tahun 2004 ia aktif menjadi juru kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun karena mungkin kurang kerasan, ia pun memutuskan untuk tidak terlalu aktif di politik. Sampai akhirnya menjelang Pemilu 2014 namanya ramai digadagadag untuk menjadi salah satu kandidat capres yang akan bertarung dengan modal popularitasnya.

Beberapa partai berhaluan Islam seperti PPP yang memang memiliki sejarah dengannya dan PKB getol menyambangnya. Beberapa kali diisukan



akan menjadi capresnya PPP mengingat kedekatannya dengan sang ketua umum Suryadharma Ali yang juga berkolaborasi dengan Dai Sejuta Umat KH Zainuddin MZ. Akhir-akhir ini, si Raja Dangdut itu begitu mesra dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB dan nampaknya sudah terjalin komunikasi intens untuk mengusungnya menjadi capres bersama dengan Mahfud MD. Komentar-komentar pujian dari Cak Imin kepada Rhoma seakan memberikan isyarat pasti bahwa Bang Haji akan mendapatkan tiket dukungan dari partai hijau yang didirikan Alm. Gus Dur itu.

Rhoma Irama: Nasionalis dan Religius

Hanya sedikit orang Indonesia yang mendunia seperti Rhoma. Kehadirannya sebagai seniman cukup fenomenal. Sampai saat ini, Rhoma telah memiliki ribuan penggemar fanatik yang membanjiri panggung setiap kali Rhoma sedang *performing*. Tidak hanya itu, ratusan lagu karya Rhoma, masih menjadi magnet tersendiri bagi penikmat musik dangdut melayu. Membuminya karya Rhoma terjadi karena lagu-lagu yang diciptakannya selain berirama indah juga dihiasi lirik-lirik yang ringan namun sarat akan makna. Mulai dari bertema cinta, kritik sosial, religi, budaya, nasionalisme, dan lainnya.

Kharisma sang maestro dangdut tersebut, kini membawanya sebagai musisi yang mungkin memiliki penggemar terbanyak di negeri ini. Setidaknya, hanya segelintir seniman seangkatan Rhoma yang masih tetap eksis hingga sekarang. Kepopuleran yang dimiliki, ternyata membawa daya tarik tersendiri bagi kontestan politik (parpol) yang ingin mendapatkan jasanya sebagai “duta partai”. Menarik, karena memang dalam setiap aksi panggung Rhoma selalu didatangi oleh ribuan massa penggemarnya. Tercatat beberapa partai telah mendapatkan service Rhoma sebagai juru kampanye, seperti PPP, PKS, dan Golkar.

Kesepakatan terjun ke dalam dunia politik saat itu, sebenarnya lebih didorong oleh dilema terhadap fenomena politik yang ada. Dengan harapan mampu memberikan koreksi dan kontribusi terhadap kemajuan

bangsa, maka Rhoma bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam politik praktis. Partisipasi politik pertama Rhoma, pada masa Orde Baru diberikan kepada PPP. Alasannya, pada waktu itu hanya PPP sebagai partai Islam. Dan pilihan tersebut yang menjadikan Rhoma menjadi satu-satunya artis yang mendukung partai Islam. Selain PPP, beberapa partai juga sempat disinggahi untuk mendapatkan jasanya, seperti PKS dan Golkar.

Rhoma juga pernah menduduki kursi legislatif tahun 1993 mewakili artis dan seniman. Partisipasinya tersebut membentuk semangat kepeduliannya untuk berpartisipasi memikirkan kondisi sosial masyarakat saat itu.

Perlu diingat pula bahwa Rhoma juga seorang yang religius. Bahkan, kedekatannya dengan KH. Zaenunddin MZ membawanya aktif dalam aktivitas kepartaian berlambang kabah tersebut.

Dari sudut pandang di atas, penulis menilai bahwa Rhoma adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi nilai religius dan nasionalis. Sikap religiusnya sebenarnya sudah nampak ketika Rhoma menetapkan “The Voice of Islam” sebagai karakter Soneta group musik melayu pimpinannya. Konsep tersebut menegaskan bahwa Rhoma dengan sonetanya ingin menyiarkan nilai-nilai agama melalui musik. Hingga terkenal konsep “nada dan dakwah”. Bahkan, pernah beberapa kali saat mengisi acara di daerah, ketika adzan berkumandang, Rhoma memberhentikan performance-nya sementara dan mengajak semua pengunjung untuk sholat berjamaah. Sebuah sikap yang sulit ditemukan pada musisi-musisi lainnya.

Dengan karakter performance tersebut, tidak berimplikasi pada penurunan popularitas Rhoma, justru Rhoma semakin populer dan seringkali juga diundang berdakwah di beberapa majlis pengajian. Kedekatannya dengan beberapa ulama menjadikannya sebagai musisi yang sangat religius. Hal tersebut, berimplikasi pula pada pilihan partisipasi politik Rhoma, pada masa orde baru, Rhoma memilih menjadi juru kampanye di PPP, yang dianggapnya sebagai satu-satunya partai Islam pada waktu itu. Kemudian, PKS juga sempat disinggahinya karena tertarik dengan sisi religiusitas kader partainya.

Konsistensi dalam pertimbangan nilai islam dalam politik menunjukkan bahwa Rhoma adalah karakter yang memegang teguh prinsip religius

Islam. Dan tetap menjaga karakter politik bersih dengan bertumpu pada nilai-nilai Islam tersebut. Saat ini pun, ketika Rhoma sudah mantab untuk maju dalam kompetisi Pilpres 2014, Rhoma mempertimbangkan untuk diusung oleh parpol Islam. Komitmen religiusnya ini dikuatkan dengan gagasan politik Rhoma yang akan mengambil semangat dari nilai-nilai Islami ke dalam aspek kehidupan bernegara jika terpilih menjadi RI 1 pada pilpres 2014 nanti.

Selain religius, Rhoma adalah sosok yang nasionalis. Terlahir sebagai anak seorang pejuang, tentu saja membawa implikasi tersendiri pada kehidupannya. Termasuk, saat mendapatkan ayah tiri yang berprofesi sebagai anggota TNI.

Rhoma yang juga ketua Persatuan Artis Musik Melayu –Dangdut Indonesia (PAMMI) juga pernah menjalin kerjasama dengan MPR. Waktu itu, MPR masih diketuai oleh Taufiq Kiemas. Kerjasama tersebut berupa MoU dan komitmen bersama untuk mendukung dan menjaga program empat pilar yang digagas oleh MPR tersebut. Langkah ini mengikis anggapan bahwa Rhoma sangat fanatik dengan Islam dan antipati terhadap perbedaan. Rhoma sendiri sadar betul bahwa Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga harmoni keIndonesiaan agar persatuan dan kesatuan bangsa juga tetap terjalin kuat.

Parameter terhadap sikap nasionalismenya juga terlihat pada karya-karya Rhoma yang lebih banyak bertemakan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, dan kecintaan pada negara, seperti pada lagu Rupiah, Hak Asasi, dan 200 Juta. Dalam lagu “Hak Asasi” misalnya, Rhoma ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Dengan demokrasi Pancasila ini tentu saja diperlukan sikap untuk menerima perbedaan, kompromi, toleransi, dan lainnya. Oleh karena itu, sikap menolak terhadap pluralisme di Indonesia, yang memang menjadi fitrah di Indonesia, akan menimbulkan pengekangan terhadap hak asasi warga negara. Dan tentu saja akan menciptakan anarki. Oleh karena itu, sikap toleransi dan menjaga kerukunan harus terus diserukan.

Dalam beberapa kesempatan, seperti saat menghadiri Seminar Guru Besar di UI, Rhoma menjelaskan bahwa baginya musik, dakwah, dan politik adalah “3 in 1”. Oleh karena itu, dalam proses pencapresannya saat

ini dia tidak perlu bertransformasi menjadi politisi, karena sebenarnya dengan dunia “3 in 1” tersebut Rhoma telah menjadi seniman, tokoh agama sekaligus juga politisi.

Setidaknya, gambaran sikap religius dan nasionalisme Rhoma ini telah memberikan optimisme tersendiri bagi masih ada sosok alternatif yang layak dipertimbangkan sebagai kontestan pilpres 2014 nanti.

Rhoma *for President*: Bukan Sekedar Popularitas

Affan Gaffar (2008), menjelaskan tentang perilaku pemilih dari aspek sosiologis. Menurutnya, perilaku pemilih akan dipengaruhi oleh jenis kelamin, status sosial juga kepercayaan seseorang. Perspektif inilah yang menjadi salah satu pijakan dalam melihat *bargaining position* kontestasi calon pemimpin.

Apalagi sekarang ini, fenomena sosok populer, seperti seniman, artis, budayawan, hingga tokoh agama yang sangat populer di masyarakat menjadi daya pikat tersendiri bagi partai untuk meraih suara pemilih. Strategi tersebut sebenarnya juga tidak salah karena memang dengan mengusung calon populer maka partai tidak perlu repot-repot mencitrakan kontestan politik yang diusung dengan susah payah. Apalagi dengan modal popularitas tersebut juga menghemat dana kampanye bagi calon yang diusung. Setidaknya inilah alternatif tersendiri yang dilakukan hampir semua parpol kontestan pemilu 2014 nanti.

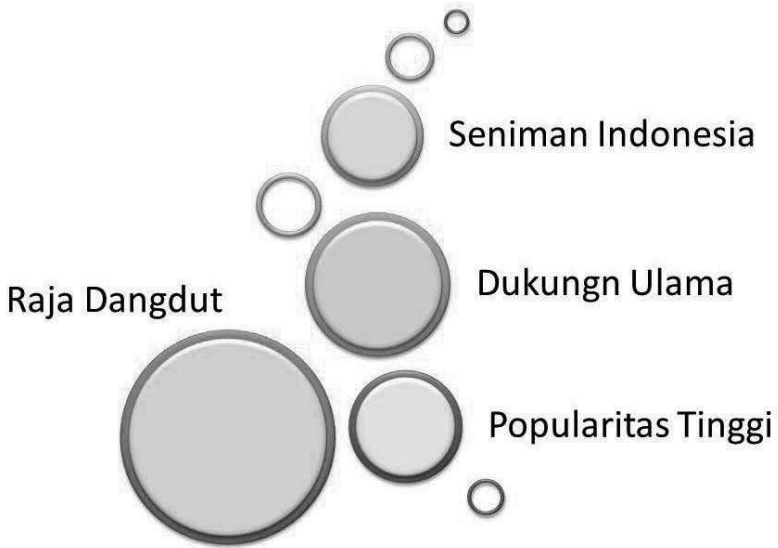
Pro dan kontra terhadap calon yang tidak berasal dari background politisi juga menguat di kalangan masyarakat. Ada yang meragukan, tetapi ada pula yang optimis karena mereka dianggap masih bersih dari relasi oknum-oknum politik yang berkepentingan sendiri. Tentu saja, analisa ini masih perlu dibuktikan dengan kapasitas kinerja para aktor politik ketika terpilih nantinya. Dalam catatan perjalanan pemilu, tidak sedikit sosok populer, terutama yang berlakang belakang artis ternyata mampu mengemban tugasnya sebagai politisi dengan baik. Seperti Nurul Arifin (Golkar), Rieke Dyah Pitaloka (PDI-P), dan beberapa tokoh lain yang memang berhasil mengemban amanah dengan baik. Bahkan, dalam kacamata dunia, ada beberapa pemimpin dunia yang terpilih bukan dari latar belakang politisi.

Salah satunya adalah Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40. Sebelum terjun ke dunia politik, Reagan adalah seorang aktor terkemuka di Amerika. Salah satu film yang pernah dimainkannya adalah *Bedtime for Bonzi* (1951).

Perjalanan karir Reagan berlanjut ketika terpilih menjadi juru bicara perusahaan General Electric (GE). Dari sinilah, Reagan memutuskan untuk terjun dalam dunia politik, sebagai anggota Partai Demokrat. Setelah itu, Reagan termasuk dalam radar bursa presiden partai demokrat dan akhirnya berhasil mengalahkan Jimmy Carter pada pemilu 1980. Sosok Reagan ini menggambarkan bahwa masih ada tokoh yang tidak berasal dari dunia politik mampu menjalankan tugasnya dalam jabatan politis secara profesional. Contoh lain adalah Joseph Estrada, Presiden Filipina yang sebelum terjun ke dunia politik berasal dari dunia perfilman.

Setidaknya, sosok-sosok yang muncul bukan dari latar belakang politisi masih bersih dari virus-virus politik kotor yang kerap menghinggapi oknum-oknum politisi di negeri ini. Perspektif ini juga melemahkan teori kepemimpinan Genetis yang meyakini bahwa *"a leader is born, not made"* (Kartono, 1998). Uraian di atas menggarisbawahi bahwa tidak selamanya politisi sukses berlatar belakang politisi juga. Hadirnya, sosok Rhoma yang juga telah mendeklarasikan akan ikut dalam kontestasi pilpres 2014 juga setidaknya membawa alternatif pilihan tersendiri bagi para voters nantinya. Meskipun begitu, dalam kalkulasi politik setidaknya Rhoma bukan hanya figur yang mengandalkan popularitas semata. Dengan track recordnya, Rhoma juga pernah berkontribusi menjadi jurkam parpol serta pernah menduduki jabatan parlemen memberikan point tersendiri bagi Raja Dangdut tersebut.

Apabila maju dalam pilpres 2014 nanti, Rhoma memiliki modal politik yang cukup kuat. Pertama, Rhoma yang berlatar belakang seniman masih menjadi magnet tersendiri bagi ribuan fans panatiknya yang tersebar di berbagai daerah. Kedua, Rhoma juga dikenal sebagai tokoh agama dan dekat dengan para ulama, terutama ulama NU. Setidaknya, potensi ini dapat menjadi point tersendiri untuk meraih basis pemilih dari kalangan kaum muslim. Bahkan, apabila PKB yang santer akan mengusung Rhoma sebagai capres, tentu saja akan mampu menampung voters dari kalangan kaum Nahdliyin.



Ketiga, Rhoma masih terbilang bersih dari relasi-relasi politik kotor dengan para politisi. Karena selama ini, Rhoma menjalin relasi dengan para politisi hanya sebatas menjalin ukhuwah dan bertukar pandangan politik. Keempat, Rhoma terbilang mampu secara finansial apabila maju dalam Pilpres 2014. Sebagai seniman yang cukup lama malang melintang, kendala finansial tentunya tidak menjadi masalah yang signifikan. Apalagi Rhoma termasuk seniman yang cukup eksis hingga saat ini.

Kelima, adalah background sebagai ketua PAMMI, menjadi motor penggerak untuk meraih dukungan dari para seniman dangdut di Indonesia. Termasuk, keikutsertaan Rhoma dalam berbagai jam'iyah dan organisasi lain juga menjadi peluang tersendiri meraih basis massa pendukung. Meskipun begitu, tentu saja Rhoma memiliki tantangan terkait pencapresannya. Pertama, Rhoma belum pernah menduduki jabatan pemerintahan. Meskipun, pernah menduduki kursi parlemen pada masa Orde Baru, namun itu belum cukup untuk meyakinkan publik akan kompetensi Rhoma dalam bidang politik.

Kedua, Rhoma pernah tersandung isu poligami dan SARA. Oleh karena itu, isu ini setidaknya direspon dengan positif sehingga tidak menjadi blunder bagi elektabilitasnya ke depan. Ketiga, pengalaman Rhoma yang per-

nah pindah-pindah parpol, meskipun hanya menjadi jurkam bisa jadi akan menurunkan elektabilitasnya jika tidak disampaikan secara komprehensif oleh Rhoma. Karena penangkapan yang salah, akan mencitrakan Rhoma sebagai tokoh yang pragmatis dan oportunis.

Keempat, terkait elektabilitasnya yang masih rendah dibanding tokoh nasional lainnya. Terbukti dari survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013, Rhoma masih berada di bawah 10 besar teratas calon lainnya. Survei ini perlu mendapat perhatian tersendiri sehingga peluang Rhoma dalam kompetisi capres nanti terbuka lebar.

Kelima, tentu saja terkait kendaraan pengusungnya. Saat ini memang santer terdengar bahwa Rhoma adalah capres yang diusung oleh PKB. Bahkan, Muhamin dalam beberapa kesempatan telah mengamini hal tersebut. Namun, belum adanya pernyataan resmi dari partai masih menjadi pertanyaan tersendiri, apakah pernyataan Muhaimin tersebut adalah keputusan final. Bahkan, pertanyaan lain adalah terkait proses penentuan capres PKB yang belum jelas disampaikan ke publik.

Apalagi beberapa pengurus PKB di daerah juga mengusung nama lain untuk dijadikan kandidat capresnya, seperti Mahfud MD dan Jusuf Kalla (JK). Pertimbangannya, Mahfud MD adalah kader PKB dan secara historis memang lebih dekat dengan PKB. Sedangkan, JK adalah mantan wapres yang mendapat dukungan dari para pengurus PKB di luar Jawa. Kondisi ini, tentu saja menarik untuk diperhatikan. Namun, bisa menjadi keruh dan berujung pada konflik internal (perpecahan) jika tidak ditanggapi dengan baik.

Bola sekarang ada di pihak internal partai, terkait siapa yang nanti terpilih menjadi capres dari PKB. Selain perlu adanya komunikasi intensif di internal partai, komunikasi politik calon yang diusung dengan para pengurus PKB juga cukup berpengaruh. Setidaknya inilah yang harus dilakukan Rhoma dengan komunikasi politik secara intensif dengan para pengurus internal PKB. Jangan sampai menjadi blunder tersendiri bagi dirinya. Apalagi pasti Rhoma telah memiliki kalkulasi politik, mengapa memilih PKB dibandingkan partai Islam lainnya.

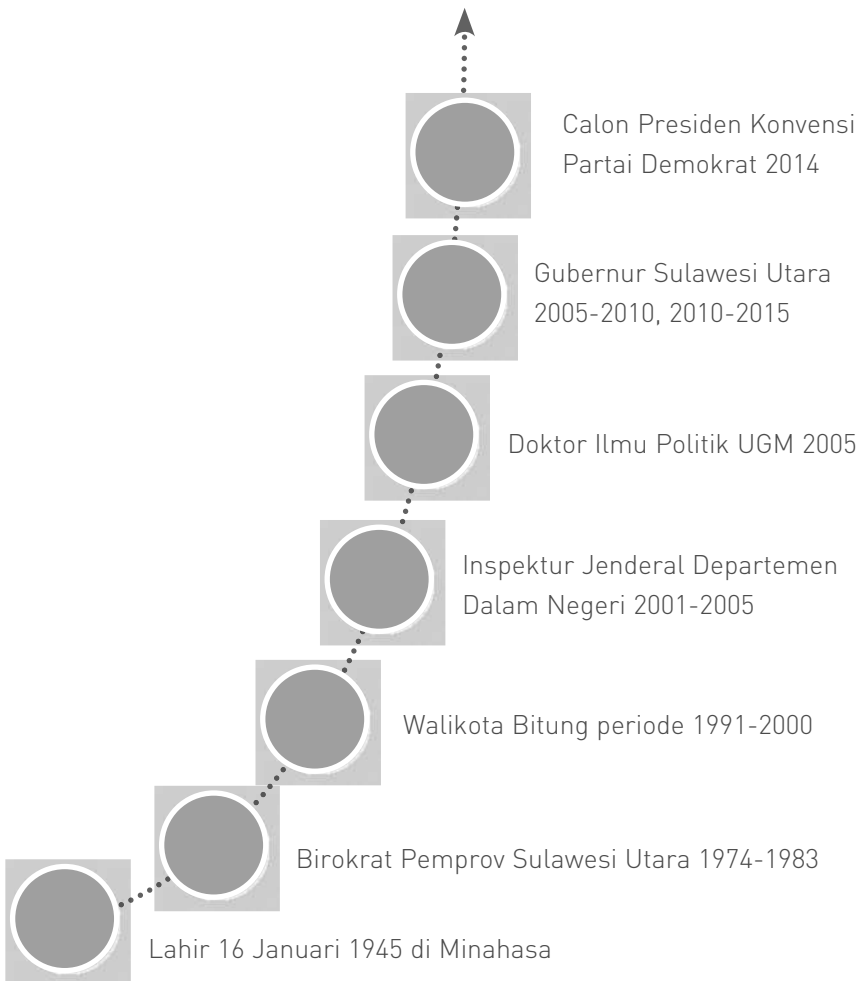
Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Rhoma berpeluang maju sebagai capres di Pilpres 2014. *Pertama*, ia memiliki popularitas yang tinggi. Majalah *TEMPO* (30 Juli 1984) misalnya pernah menyebut bahwa penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta orang atau 10 persen penduduk Indonesia. *Kedua*, Rhoma memiliki kekuatan finansial yang baik sebagai seorang musisi. Ketiga, selain memiliki kepercayaan yang tinggi, ia juga didukung oleh PKB. Bahkan—sebagaimana sering diungkapkan di media—pencalonan dirinya adalah atas desakan para ulama. Tentu hal itu menjadi peluang tersendiri bagi Rhoma.

Meski demikian, tantangan bagi Rhoma tentu soal elektabilitasnya. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi elektabilitas Rhoma belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Selain itu, karena dianggap seorang musisi, Rhoma juga dianggap kurang menguasai bidang pemerintahan. Terbukti pada saat *talkshow* di Mata Najwa masih kebingungan ketika ditanya soal BBM dan Migas. Tantangan lainnya soal dirinya yang dikenal poligami dan masih bermain dengan isu SARA. Jika tak mampu dikeleola dengan baik, isu ini bisa menjadi blunder bagi pencapresan dirinya kedepan.

SINYO HARRY SARUNDAJANG

Pemimpin Potensial





shs1234.wordpress.com

Sarundajang Si Anak Minahasa

Sinyo Harry Sarundajang, lahir di Desa Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, pada 16 Januari 1945. Sarundajang adalah anak sulung dari tiga orang bersaudara. Ayahnya bernama Youtje Sarundajang dan ibunya bernama Yulian Liow.

Sarundajang kecil tak pernah merasa menjadi anak pantai. Tak seperti Manado yang dikelilingi lautan, Kawangkoan adalah daerah yang berlokasi di area perbukitan. Sarundajang pun lebih banyak menghabiskan masa kecil dengan berpetualang di dataran tinggi. Kecamatan Kawangkoan terkenal karena objek-objek wisatanya, yaitu Bukit Kasih Kanonang, Gua Jepang yang terletak di Kiawa dan Sendangan, pemandian air panas Kinali, air terjun di Kiawa dan Kayuuwi.

Di Kawangkoan, terdapat Bukit Kasih yang memiliki 5 rumah ibadah di puncak bukit. Bukit ini dibangun pada tahun 1999 untuk melambangkan penghargaan masyarakat Sulawesi Utara tentang perdamaian. Sebuah budaya yang diajarkan oleh Sinyo Harry Sarundajang saat dia diutus menjadi Penguasa Darurat Sipil di Maluku untuk menyelesaikan konflik antaragama yang berdarah.

Sarundajang menyelesaikan SMA tahun 1964. Masa sekolah Sinyo dihabiskan di Sulawesi Utara. Dia masuk ke Sekolah Rakyat Tomohon pada

1957. Kemudian, meneruskan pendidikannya ke SMA Kristen Kawangkoan lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Sarundajang lulus sebagai sarjana pada tahun 1968. Harry muda pun ingin menjajal pendidikan di Jakarta. Sebelum berangkat, dia menikah terlebih dahulu dengan, Deetje Adeline Laoh Tambuwun pada 17 Juni 1969. Pernikahan mereka pun dikaruniai lima orang anak. Pada 1970, dia pun kuliah di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Universitas 17 Agustus, Jakarta.

Setelah lulus, Sarundajang masuk ke lingkungan birokrasi dengan bekerja di Departemen Dalam Negeri. Kecerdasan Sarundajang mengundang perhatian para atasannya. Dia pun mendapat kepercayaan belajar ke luar negeri dari Departemen Dalam Negeri untuk mendalami Administrasi Teritorial di Institute International Administration Publique Francaise, Prancis. Di tahun yang sama ia juga menerima Certificate Asseduite Cours de Perfectionnement du Francais Universite de Nice.

Sarundajang meraih berbagai sertifikat pendidikan seperti Development Administration, Group School of Public Policy Birmingham University, Inggris pada tahun 1994. Selain itu juga berbagai sertifikat pendidikan seperti: Sertifikat Institute for Housing and Urban Development Studies Rotterdam, Nederland, tahun 1994, Sertifikat Executive Program in Health Finance and Managed Care, di University of California, Amerika Serikat tahun 1996.

Selesai kuliah di luar negeri, Sarundajang balik kampung membangun Sulawesi Utara. Dia pun dipercaya untuk memegang Jabatan-jabatan sebagai Kepala Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur Sulawesi Utara tahun 1977-1978. Kariernya terus menanjak. Dia kemudian dipromosikan menjadi Sekwilda Kabupaten Minahasa tahun 1978-1986 Kemudian, Mendagri memilih Sarundajang sebagai Wali Kota Bitung tahun 1986-2000, serta Ketua Kapet (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) Manado-Bitung.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Sarundajang ditarik ke Jakarta setelah masa jabatannya sebagai wali kota selesai untuk menjadi staf ahli Mendagri. Sarundajang kemudian dilantik sebagai inspektur jenderal Depdagri pada 2001. Di tahun ke-2 dia bertugas sebagai

irjen, presiden pun memberi tugas berat kepada Sarundajang untuk menyelesaikan konflik di Maluku. Dia pun diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur di Maluku Utara (2002) dan Maluku (2003).

Di sela kesibukannya di pemerintahan, Sarundajang sering menghabiskan waktu sebagai guru dan dosen. Pada tahun 1971, Sarundajang menjadi Dosen Luar Biasa pada Fakultas Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, dengan mata kuliah Ilmu Politik, dan tahun 1974 Dosen Luar Biasa pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Manado dengan mata kuliah Administrasi Negara.

Kemampuan akademis Sarundajang juga terlihat dengan produktifitasnya dalam menulis. Sarundajang pun telah menghasilkan empat buah buku berjudul: 1) Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, 2) Arus Balik Pemerintahan Pusat ke Daerah, diterbitkan oleh Sinar Harapan, 3) Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya, serta Buku Sistem Pemerintahan Daerah.

Khalifah dan Duta Perdamaian

Malam di Maluku. Tak seperti biasa, sudah ada warga hilir mudik di bumi rempah-rempah itu. Suasana tegang pun sedikit mencair pascakerusuhan bernuansa suku agama dan ras (SARA) yang memakan korban ribuan jiwa. Penguasa Darurat Sipil (PDS) Maluku, Sinyo Harry Sarundajang memang mencabut pemberlakuan jam malam di Maluku. Keputusan itu diambil karena situasi dan kondisi Maluku, khususnya Ambon yang semakin kondusif. Usul dari badan pembantu PDS Maluku juga menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu.

Pencabutan jam malam itu dituangkan dalam sebuah pengumuman resmi PDS Maluku No: PENG-13/PDSDM/IX/2003 tertanggal 10 September 2003. "Dengan dikeluarkannya pengumuman ini maka pemberlakuan jam malam dinyatakan tidak berlaku lagi," kata Sarundajang di Ambon.

Pemberlakuan jam malam ditetapkan sejak tanggal 21 April 2002. Keputusan itu dikeluarkan oleh Saleh Latuconsina, Gubernur dan PDS Maluku saat itu. Jam malam diberlakukan dari pukul 22. 00 hingga 06. 00 WIT. Menurut Sarundajang, langkah yang diambilnya itu dimaksudkan agar PDS Pusat di Jakarta, dapat secepatnya mencabut pemberlakuan darurat sipil

di Maluku. "Pengumuman ini akan kita kirim ke pusat, agar mereka tahu kalau Maluku benar-benar kondusif," katanya. Ia mengungkapkan bahwa pencabutan jam malam itu sebagai bentuk pengakuan dari masyarakat bahwa Maluku sudah kondusif.

Selain itu, lanjutnya, agar masyarakat di luar tahu kalau Maluku adalah daerah terbuka. PDS menjelaskan, dengan dicabutnya jam malam itu, maka pemerintah kabupaten atau kota di Maluku, harus bertanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya masing-masing. "Itu berarti, pengamanan di lingkungan masyarakat ditangani warga dalam bentuk siskamling," katanya.

Alkisah, Presiden Megawati Soekarnoputri mengutus Sarundajang ke dua daerah itu menjadi pelaksana tugas gubernur dengan status penguasa darurat sipil. Tugasnya berat. Sarundajang harus meredam konflik berdarah antaragama dan mempersiapkan pemilihan gubernur definitif.

Hasilnya, di luar dugaan. Sarundajang sukses meredakan konflik horizontal yang sudah berlangsung sekitar empat tahun di Maluku dan Maluku Utara yang memakan korban ribuan rakyat. Sarundajang mampu memimpin penyelenggaraan pemilihan gubernur di dua provinsi yang sensitif itu.

Perjalanan tugasnya di Maluku Utara dan Maluku tidaklah gampang. Pada awalnya, Sarundajang ditolak habis-habisan oleh berbagai kalangan yang terlibat konflik. Beberapa jam di hari pertama setelah tiba di Kota Ternate, sebuah bom meledak di dekat tempat penginapannya di Kota Ternate. Sejumlah utusan menemui Sarundajang dan menyatakan penolakan. Sarundajang tidak gentar, dengan keyakinan dia maju melangkah membawa amanat perdamaian yang diamanatkan negara. "Ini tugas Negara, saya tak akan mundur dan harus sukses. Mati sekalipun saya siap," ujar Sarundajang menjawab penolakan sejumlah tokoh masyarakat Maluku Utara.

Hanya dalam hitungan minggu, Sarundajang terjun melakukan perjalanan membuka simpul-simpul konflik di Maluku Utara. Sarundajang mendatangi tokoh-tokoh masyarakat garis keras Maluku Utara di rumah masing-masing. Dia bahkan berani masuk hingga ke dapur rumah dan duduk makan bersama dengan beberapa tokoh garis keras. "Mereka terperangah, dia ditolak tetapi mau datang bersilaturahmi hingga ke dapur rumah," kata Fais, wartawan di Kota Ternate. (www.shs1234.wordpress.com)

Hasil akhirnya, selain dia bisa menyelesaikan tugas-tugas pokoknya meredakan konflik dan menghasilkan gubernur terpilih, Sarundajang dinobatkan sebagai “Khalifah” oleh tokoh-tokoh Muslim Maluku Utara. Sedangkan tokoh-tokoh Kristen menjuluki Sarundajang sebagai “Duta Perdamaian”.

Di Ambon, Maluku, Sarundajang juga harus melewati ujian adat untuk bisa memimpin Maluku sebagai gubernur. Setiba di Bandara Patimura Ambon, Sarundajang berlutut dan mencium bumi Ambon Manise. Lantas, dia pun diminta langsung mengikuti upacara uji kemampuan sebagai pemimpin. Di sebuah desa di Ambon, Sarundajang harus mencambuk dengan tiga ujung lidi seorang lelaki kebal yang telanjang dada.

Apabila bekas cambukan pada tubuh lelaki kebal itu mengeluarkan darah, maka Sarundajang memenuhi syarat adat memimpin Maluku. Jika tidak berdarah, Sarundajang akan ditolak sebagai Gubernur Maluku.

“Waktu itu saya berdoa, agar dapat kekuatan. Puji Tuhan, cambukan yang saya ayunkan tiga kali itu ternyata mengeluarkan darah di tubuh lelaki kebal itu,” kata Sarundajang mengenang suasana tegang itu. Dijelaskan, sesungguhnya dia bukan orang kuat. “Saya bukan Goliat tetapi saya datang dengan hati nurani untuk menyelesaikan konflik,” tambahnya.

Akhirnya, Sarundajang secara perlahan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik horisontal di Maluku. Dia membagi waktu mengunjungi semua tokoh garis keras yang terlibat konflik dengan pendekatan “*hati nurani*”. Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat yang terlibat konflik, Sarundajang beberapa kali dikecam dan ditentang secara tajam. Kecaman yang tajam dan cenderung kasar itu dimaksudkan untuk memancing emosi Sarundajang. Tetapi Sarundajang tetap tampil tenang dan konsisten dengan pendekatan nurani.

Ketulusan Sarundajang pun membuat tokoh terkemuka umat Muslim Maluku terperangah. Panglima Laskar Jihad Maluku, Mohammad Atamimi, yang semula selalu bermaksud membangkitkan emosi Sarundajang, sikapnya justru berbalik. Dia pun menerima dan mendukung kehadiran Sarundajang di Maluku.

“Sarundajang bisa menjadi sahabat Atamimi, itu luar biasa. Sebelumnya Gubernur Latuconsina dan tokoh-tokoh nasional lainnya sulit memasuki wilayah Kebun Cengkeh Markas Laskar Jihad yang dipimpin Atamimi. Tetapi Sarundajang bisa melakukan itu dengan pendekatan Hati Nurani,” kata Kutni, tokoh muda Muslim yang juga fungsionaris PPP Maluku.



www.manadotoday.com

“Saya dulu sangat menentang Sarundajang, tetapi sekarang saya orang yang sangat mendukung Sarundajang di manapun dia berada. Dia itu “Malaikat Kecil” yang hadir di Maluku,” kata Atamimi di depan ribuan umat Muslim di Manado. Pernyataan Panglima Laskar Jihad ini disampaikan sebagai bentuk dukungan moral pada Sarundajang dalam pencalonan Gubernur Sulut 2005–2010.

Keberhasilan Sarundajang menyelesaikan konflik menjadi modal bagi dia untuk memimpin Sulawesi Utara selama dua periode (2005-2010 dan 2010-2015). Selama memimpin Maluku, Maluku, Utara dan Sulawesi Utara, Sarundajang memperoleh beragam penghargaan baik nasional, maupun internasional. Sarundajang memperoleh Bintang Jasa Utama dari Presiden Megawati. Sementara, Presiden SBY menganugerahinya dengan Bintang Maha Putra.

Sarundajang pun pernah meraih penghargaan ‘People of The Year’ dari Harian Seputar Indonesia serta Gubernur Paling Visioner dari Majalah Birokrat Profesional dan Penghargaan The Best Management dari Menteri Keuangan. Kepemimpinannya mengelola akuntabilitas anggaran di Sulawesi Utara pun mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan: “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Sarundajang merupakan gubernur pertama di Indonesia yang mendapat predikat tersebut. Untuk level dunia, Sarundajang meraih Penghargaan: Who's Who in The World Twentieth Edition 2003 sebagai Outstanding Government Official in Indonesia. Dia juga mendapat penghargaan dari American Biographical Institute (ABI) The Governor's Award.

Blue Economy

Bakal Calon Presiden RI dari konvensi Partai Demokrat, Sinyo Harry Sarundajang, semakin getol menyosialisasikan konsep-konsep cemerlangnya untuk Indonesia menuju perubahan. Kali ini, salah satu konsep utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yakni *Blue Economy* diangkat oleh Sarundajang yang kini duduk menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Dialog interaktif yang adalah program acara rutin yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) tersebut, mengambil tema “Pembangunan Ekonomi dalam Konstitusi”, hadir sebagai narasumber, yakni Ketua DPR RI Marzuki Ali, mantan Pemred Majalah Tempo Bambang Harimukti, pakar ekonomi makro Kristianto Wibisono, dan Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulawesi Utara.

Mencermati tema yang diangkat dalam diskusi tersebut oleh moderator Soegeng Sarjadi, Marzuki Ali langsung menyatakan, untuk mencapai

pembangunan ekonomi Indonesia yang sehat, pihak pemerintah, baik itu pemerintah pusat hingga ke tingkat pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* perekonomian yang ada, harus memiliki tujuan yang sama.

“Kita harus mempunyai mimpi yang sama dulu dalam membangun ekonomi kita. Ini harus sama, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ini akan menjadi fundamen kita dalam mencapai ekonomi yang kuat,” katanya.

Sarundajang memberi tanggapan. Menurutnya, saat ini memang pemerintah cenderung memiliki visi dan misi yang berbeda dalam pembangunan ekonomi di era reformasi ini. “Saya lebih setuju, ketika kita dalam pembangunan ekonomi kedepan kembali berpegang pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, program pembangunan yang ada di GBHN membuat kita memiliki nafas pembangunan yang sama,” kata tokoh yang memiliki motto “Cinta Kasih Menembus Perbedaan”.

Maka dari itu, jelas Sarundajang, pembangunan ekonomi saat ini harus beralih dengan mengandalkan semua potensi yang ada di wilayah kelautan. Sebab, Indonesia memiliki luas wilayah kelautan lebih besar, yakni mencapai 75 persen, dari wilayah daratan yang hanya mencapai 25 persen. Selain itu, mayoritas kemiskinan ada di wilayah pesisir laut dan di pulau-pulau kecil.

Konsep *Blue Economy* Sarundajang bukan isapan jempol. Dia sudah mempraktikkan ekonomi berbasis bahari tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Terbukti, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Pada 2012, produk domestik bruto (PDB) Sulut mencapai 7,8 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di angka 6 persen.

Menurutnya, sekitar 80 persen luas wilayah Indonesia terdiri atas lautan, termasuk kondisi geografis Sulut yang juga didominasi sumber daya kelautan. Kondisi tersebut selama ini belum memanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, usulnya, harus dikembangkan secara berkelanjutan atau dengan tetap mengedepankan sisi pelestariannya.

Sarundajang yang juga penerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang mengatakan, konsep *Blue Economy* bisa melengkapi konsep *Green Economy* (ekonomi hijau) yang mengedepankan pelestarian. Sarundajang menjelaskan konsep *Blue Economy* mampu memaksimalkan potensi hasil laut bukan sekadar me-

nangkap ikan, tetapi bagaimana membawa industri kelautan, termasuk sektor pariwisata dan pertambangan.

Blue Economy gagasan Gubernur Sarundajang pun merambah dunia internasional. Dengan dalil krisis pangan dunia yang bisa diselesaikan dengan optimalisasi peran laut, Sarundajang menggelar hajatan akbar berkelas internasional di Sulawesi Utara, yaitu World Ocean Conference (WOC) dan CTI Summit.

WOC berlangsung tanggal 11-15 Mei 2009 di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Konferensi ini dihadiri oleh kepala-kepala negara/pemerintahan, para menteri, dan para pejabat senior dari negara-negara yang memiliki laut di dunia. Konferensi ini juga diikuti oleh para ilmuwan, pegiat lingkungan dan masalah-masalah kelautan, pengusaha, industriawan, kelompok hobi, pers, para pengamat, dan pemerhati masa depan keselamatan dunia.

Lembaga-lembaga dunia di bawah PPB seperti UNDP, UN-Habitat, UNEP, Global Forum on Oceans, Coasts and Islands, UNICPOLOS, UNESCO, dan lembaga-lembaga internasional seperti WWF, WCS, TNC, CI, NOAA, dan IPCC mendukung dan terlibat secara aktif menyukseskan konferensi ini.

Gagasan konferensi tersebut lahir dari Sarundajang. WOC bertujuan, Pertama mengoptimalkan, mengembangkan dan melestarikan sumberdaya laut sebagai *mega carbon sink* dunia. Kedua, mengidentifikasi tindakan-tindakan dalam menghadapi perubahan iklim global. Ketiga, meningkatkan kerjasama internasional bagi pemanfaatan sumberdaya laut secara lestari dan berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut dan semua komitmen dunia terhadap laut akan dituangkan dalam Manado Ocean Declaration, yang akan dimaklumkan pada akhir konferensi ini di Manado, Sulawesi Utara. Puncak kegiatan WOC itu diisi dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reef, Fisheries, and Food Security.

Keberhasilan Sarundajang menggelar hajatan International tak hanya sampai disitu, karena pada tahun 2011 Sarundajang kembali sukses menggelar hajatan International bertitel Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DIREX) atau Latihan Gabungan Bersama Penanggulangan Bencana Negara-Negara Asia dan Pacific yang dilaksanakan di Manado 14-20 Maret 2011.

Sarundajang pun berhasil menggelar hajatan akbar Sail Bunaken. Even tersebut mampu memunculkan parade kapal-kapal dari banyak negara, termasuk kehadiran kapal induk USS Washington yang melakukan *sailing pass* di Teluk Manado.

Gubernur Sekaligus Ilmuwan Otonomi Daerah

Sinyo adalah pemimpin daerah yang memahami hakikat otonomi daerah dan isu-isu desentralisasi daerah. Tidak hanya banyak membuat buku-buku ilmiah populer yang akademis soal isu terkait, tetapi turun langsung dalam memahami dan menangani semua persoalannya. Tidak tanggung-tanggung, setelah 1998 dimana otonomi daerah dan desentralisasi mulai digalakkan beserta semua dampak positif dan negatifnya, pada era Presiden Megawati, Sinyo ditunjuk sebagai penguasa daruat sipil di daerah konflik di Maluku dan Maluku Utara. Sinyo berhasil membuat daerah yang dipimpinnya kondusif dan menyelenggarakan pemilihan umum daerah (pemilukada) dengan lancar.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa pemerintahan di seluruh dunia termasuk Indonesia telah melakukan kebijakan desentralisasi dan otonomi



daerah. Hasil empiris menunjukkan bahwa kesuksesan desentralisasi dan otonomi daerah telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sektor publik, dan telah berhasil mengakomodasi dari tekanan kekuatan-kekuatan politik. Sebaliknya, ketidaksuksesan desentralisasi dan otonomi daerah telah mengancam stabilitas ekonomi dan politik serta mengganggu penyediaan pelayanan publik (Bird and Vaillancourt, 1998; Ter-Minassian, 1997; World Bank, 2000; Shah, 2003).

Permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah yang tengah bergulir berusaha dipecahkan oleh Sinyo dalam memimpin Sulawesi Utara. Dengan kebijakan *blue economy*-nya, Sinyo berusaha meningkatkan pendapatan provinsi. Oleh sebab itu, perlu ada pendekatan yang lebih memperhatikan keunggulan daerah masing-masing. Menurut Sinyo, keunggulan Sulawesi Utara adalah pantai dan laut, sehingga konsep *blue economy*-nya adalah konsep prinsip yang paling tepat sasaran.

Menurut Prof. Wihana (2010), guru besar ilmu ekonomi UGM, kendala ekonomi pembangunan di daerah terdapat pada perspektif teori ekonomi mikro, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi, seperti skala ekonomi, cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jejaring matriks kelembagaan. Belanja publik dan belanja modal masih belum menunjukkan skala ekonomis (*economic of scale*). Atau dengan kata lain belanja rata-rata jangka panjang meningkat terus yang tidak diikuti dengan kenaikan output pelayanan publik (*diseconomies of scale*). Selain itu pemerintah daerah belum memanfaatkan kerjasama antardaerah dengan prinsip kerjasama biaya (*economic of scope*) dan prinsip saling melengkapi (*complementarity*) guna menciptakan pelayanan publik yang efisien dan akibat penanggulangan dampak eksternalitas negatif. Cara pandang (*mindset*) pelaku desentralisasi masih sangat terbatas dan dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang turun temurun (*path dependent*).

Semua masalah tersebut dapat dimulai dengan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang diarahkan pada terciptanya organisasi pemerintah daerah yang antisipatif, yaitu yang berorientasi ke depan; inovatif, yaitu yang berorientasi perubahan dan pembaruan; dan *excellence* atau prima/unggul jika berkompetisi dengan organisasi-organisasi lainnya.

Karena itu organisasi pemerintah daerah masa depan harus mempunyai visi dan misi yang jelas yang tercermin dari program pembangunan daerahnya. Dalam hal ini dibutuhkan visioner yang mampu berpikir jauh ke depan dan dapat membawa daerahnya ke arah perkembangan yang lebih baik.

Permasalahan tersebut dijawab oleh Sinyo dalam bukunya “Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah”. Sinyo mengatakan bahwa organisasi pemerintah daerah harus diarahkan pada terbentuknya organisasi flat atau mendatar (*flat organization*) yang dapat mempercepat proses pelaksanaan tugas-tugas organisasi, organisasi yang kecil dan ramping (*small organization*) yang mampu bergerak dengan cepat dan efisien, organisasi pembelajar (*learning organization*), dan organisasi jejaring (*network organization*).

Sinyo memiliki mimpi tentang pemerintah daerah di Indonesia. Ia memimpikan bahwa pemerintah daerah masa depan paling tidak akan dicirikan oleh pertama, pemerintahan daerah yang bercorak wirausaha, yaitu suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen sumber daya, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Kedua, pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD. Ketiga, pemerintah daerah yang bercirikan good governance, yaitu pengelolaan pemerintahan yang dilakukan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, transparansi dalam pemerintahan daerah.

Beberapa alternatif perubahan yang Sinyo tawarkan dalam bukunya merupakan tuntutan arus balik kekuasaan pusat ke daerah, dimana perubahan-perubahan tersebut akan membentuk organisasi pemerintah daerah yang kompetitif di masa yang akan datang.

Sarundajang dalam Konvensi Demokrat

Pada 8 Januari 2014, Sinyo Harry Sarundajang hadir sebagai peserta ketiga Konvensi Capres Partai Demokrat yang memaparkan gagasannya dalam Meet The Press Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat

di sekretariat konvensi, Jalan Dipatiunus, Kebayoran, Jakarta. Gubernur Sulawesi utara tersebut membahas visi misi terwujudnya negara kepulauan Indonesia yang bersatu padu, tangguh, dan sejahtera.

Sinyo menegaskan, Indonesia memiliki peran sangat besar di Asia Pasifik karena secara geografis terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Hindia serta Benua Asia dan Australia. Titik pertemuan ini menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju yang menjadikan Indonesia berada di titik pembangunan ekonomi pasar dunia.

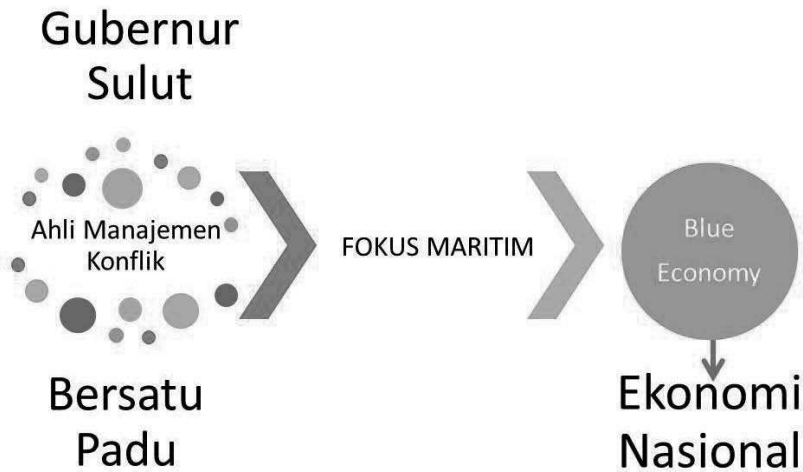
“Untuk mewujudkannya diperlukan multigate sistem dengan cara membuka pintu baru atau pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dengan pelabuhan dan bandara internasional serta pengembangan infrastruktur sebagai penunjang”, terangnya.

Sinyo menjelaskan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik dibutuhkan kebijakan seperti perlunya reorientasi perencanaan pembangunan berbasis geopolitik dan geostrategi, membangun pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dengan pintu-pintu baru ekonomi dan perdagangan yang saling terkoneksi untuk menghadapi arus ekonomi global.

Sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang berada di Indonesi Bagian Timur maka pembangunan di kawasan akan diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Pembangunan konektivitas di kawasan timur Indonesia sangat penting untuk menghubungkan dengan daerah yang masih terisolir, daerah kepulauan dan daerah perbatasan dengan cara pembangunan infrastruktur multimoda seperti jalan jembatan,dermaga, dan pelabuhan udara.

“Konektivitas antar kawasan timur dan barat akan mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam,” papar Sinyo.

Sinyo menambahkan, Indonesia terlahir sebagai negara maritim dengan potensi kekuatan laut. Pengembangan blue ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan, industri perikanan dan lingkungan. Oleh karena itu teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan sangat diperlukan karena dengan teknologi akan menghasilkan produk yang efisien.



“Program blue ekonomi akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional sebab sumber inspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan tersebut tidak lain adalah laut selain daratan”, ungkap Sinyo.

Fokus Sinyo dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu padu, tangguh, dan sejahtera sesuai dengan visi nya adalah lewat pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dengan lokus pada sisi maritim. Kekhasan Sinyo yang berasal dari daerah timur Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan kaya akan hasil laut menjadi pendorongnya dalam mengimplementasikan gagasan dan ide-idenya.

Sinyo sangat siap untuk maju sebagai calon presiden, oleh sebab itu ia berkeputusan untuk ikut dalam kompetisi konvensi calon presiden Partai Demokrat. Tetapi, walau begitu, Sinyo mengatakan bahwa menjadi presiden itu adalah hal yang tidak mudah.

Sinyo mengatakan dirinya siap berpasangan dengan siapa saja termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Jika saya terpilih sebagai pemenang konvensi dan Partai Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka saya siap berpasangan dengan calon dari PDI Perjuangan,” kata Sinyo di sela-sela konvensi Partai Demokrat.

Menurut Sinyo, soal siapa dari Partai Demokrat akan berpasangan dengan siapa, hal itu merupakan kebijakan partai melalui Majelis Tinggi Partai Demokrat, setelah pemilu legislatif. Saat ini, kata dia, Partai Demokrat masih menjaring siapa figur terbaik untuk diusung sebagai calon

presiden menghadapi pemilu presiden 2014. “Kalau saya mendapat amanah memenangkan konvensi, secara pribadi saya siap berpasangan dengan siapa saja,” katanya.

Ketika ditanya, bagaimana jika dirinya diusung sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo dari PDI Perjuangan, ia menegaskan belum berpikir untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Sinyo yang pernah diusung oleh PDI Perjuangan ketika menjadi calon Gubernur Sulawesi Utara pada periode pertama menyatakan, cukup dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Namun, saya belum berpikir menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo,” katanya. (kompas.com, 2014)

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Dari sisi modalitas kemepimpinan, kapabilitas Sinyo sangat baik. Menjadi pemimpin dimana konflik adalah soal keseharian merupakan tantangan yang sangat tidak muda, tetapi Sinyo telah membuktikan bahwa ia mampu menjadi pemimpin di tengah konflik. Sinyo adalah seorang tokoh dari daerah yang memiliki banyak penghargaan, baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Sinyo pun merupakan tokoh daerah yang dapat diterima, minimal di daerah yang pernah dan sedang dipimpinya, sebagai seorang pemersatu yang cerdas dan dipercaya.

Dari sisi modalitas material sumber daya, Sinyo merupakan tokoh yang didukung oleh orang-orang yang tadinya tidak suka dan menolak kehadirannya, menjadi orang yang paling didukung ide dan kebijakannya. Ia seorang pemersatu yang berintegritas dalam memimpin. Modalitas sumber daya massa akan segera ia dapatkan, terutama di daerah-daerah di timur Indonesia.

Dari sisi moral dan akademik, Sinyo pernah mendapatkan pendidikan yang baik di dalam dan luar negeri yang sangat bergengsi. Secara moral, kepemimpinan Sinyo bersih, bertanggung jawab, dan dipercaya masyarakat. Pengalamannya menjadi gubernur dan penguasa darurat sipil adalah pengalaman yang dibutuhkan pemimpin Indonesia, negara dengan multi-dimensi etnis dan suku, serta kepercayaan ini. Sinyo di daerahnya, yang

tadinya bukan daerah yang kondusif bahkan, mampu membuktikan kepada Indonesia bahwa ia mampu.

Peluang Sinyo untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014 mendatang cukup tinggi. Pertama, ia saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara 2005-sekarang, tentu dari sisi pengalaman “asam-garam eksekutif” ia sudah cukup kenyang. Hal itu bisa menjadi modal baginya. Kedua, Sinyo merupakan tokoh muda yang mungkin bisa menjadi figur alternatif. Hal itu terlihat dari hasil survei *opinion makers* dan pakar oleh Pol-Tracking Institute 2012 lalu. Riset tersebut menempatkan nama Sinyo cukup diperhitungkan.

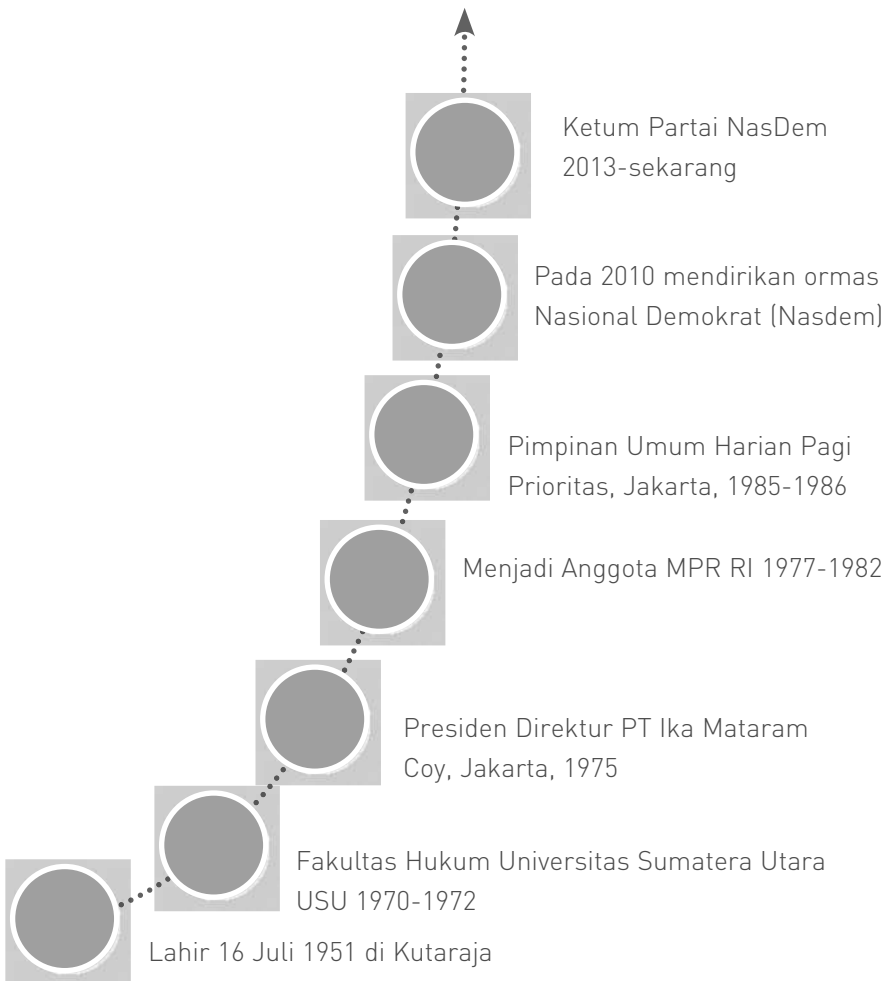
Dari 10 aspek yang dinilai, ada beberapa aspek yang menonjol dari seorang Sinyo, salah satunya adalah komunikasi publik, yakni (71. 74). Jika dianalisis, tingginya skor tersebut dipengaruhi oleh kiprahnya yang sangat pelangi di dunia pemerintahan. Sinyo bahkan pernah dijuluki sebagai bapak pluralisme Indonesia, sama seperti mendiang Gus Dur.

Ketiga, Sinyo saat ini juga menjabat Ketua APKASI (2011-2014), Ketua Dewan pembina DPP Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (2012-2017), Ketua Umum Perhimpunan Penyuluh Pertanian Seluruh Indonesia (Perhiptani) (2012-2017), dan sangat konsen di bidang pertanian. Bahkan hingga saat ini ia tercatat telah mendapat 51 penghargaan bergengsi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Meski demikian, tantangan Sinyo tentu soal elektabilitas. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Sinyo belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Itulah tantangan yang harus segera dijawab Sinyo.

SURYA PALOH

Pemimpin Potensial





pemilu.tempo.co

Menjadi pengusaha media papan atas tak membuat Surya Paloh puas. Keinginannya yang kuat untuk terjun ke dunia politik membuat dirinya bergabung dengan sejumlah partai politik, sebelum memutuskan untuk mendirikan partai sendiri bernama: Nasional Demokrat (NasDem).

Surya Dharma Paloh lahir di Kutaraja, Banda Aceh, Aceh pada 16 Juli 1951 dari pasangan Daud Paloh yang seorang perwira polisi dan Nursiah Paloh. Dia besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejak kecil Surya terkenal dengan anak yang rajin dan pekerja keras.

Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja. Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari dua orang sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha. Barang-barang tersebut dijualnya ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan.

Dari Katering hingga Media

Kemampuan dagang terus diasahnya hingga beranjak dewasa dan tinggal di Medan. Di kota ini, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil. Meskipun sibuk dengan bisnisnya, Surya Paloh tak mau berhenti menuntut ilmu. Dia bahkan menekuni dua kuliah

sekaligus yaitu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Sosial Politik Universitas Islam Sumatera Utara.

Di Jakarta, pria yang menikahi Rosita Barack pada 1984 ini, kemudian mendirikan perusahaan jasa boga yang belakangan dikenal sebagai perusahaan katering terbesar di Indonesia. Namun sebagai pebisnis ia tidak pernah puas dan selalu mencari peluang serta tantangan di sektor bisnis lainnya. Pilihannya jatuh pada usaha penerbitan pers. Padahal, bisnis pers adalah dunia yang sebelumnya tidak ia ketahui. Jurnalistik juga bukan profesinya. Lagipula kondisi pasar pers saat itu begitu ramai dengan persaingan.

Namun dia yakin dengan pilihannya. Pada umurnya yang ke-33 tahun, Surya Paloh memutuskan untuk mempercayakan bisnis kateringnya pada manajer yang memang disiapkannya dan mulai fokus pada bisnis media. Dia bahkan berani mempertaruhkan modal dalam jumlah relatif besar. Ia berani menghadapi risiko rugi atau bangkrut (*id. wikipedia.org, 2013*).

Surya Paloh kemudian mendirikan media pertamanya pada 2 Mei 1986 bernama Surat Kabar Harian Prioritas. Koran ini bermarkas di Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat. Tadinya koran ini akan diberi nama Jurnal Indonesia, namun karena dianggap tendensius, nama tersebut tak disetujui oleh Departemen Penerangan. Surya pun menggantinya menjadi Prioritas karena nama tersebut cukup sederhana dan memiliki arti yang lebih luas. Penggantian nama tersebut memuluskan jalan Surya untuk memiliki sebuah media cetak.

Prioritas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media lainnya. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir di cetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketiga, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius.

Koran ini laku keras dan menyebar luas sampai ke daerah-daerah. Prioritas berhasil mencapai sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar. Tidak sampai setahun, Surya Paloh pun sudah balik modal. Sayangnya, surat kabar tersebut tidak berumur panjang. Pemerintah mencabut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dan dibredel pada 29 Juni 1987.

Koran itu dianggap kurang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Pemberitaannya dinilai kasar dan telanjang. Inilah risiko terberat yang pernah dialami Surya Paloh. Ia tidak hanya kehilangan sumber uang, tetapi ia juga harus memikirkan pembayaran utang investasi.

Ketika itu pers memang sangat tidak bebas. Hal itu karena hampir tidak terlihat satu pun perlawanan yang bisa diberikan masyarakat pers terhadap pemerintah. Surya menyebutkan, kebijakan institusi pers, dari SPS, Dewan Pers, hingga PWI semuanya berada dalam satu irama dengan penguasa tanpa pernah memperjuangkan fungsi pers yang sesungguhnya sebagai pilar keempat dalam demokrasi.

Momentum pembredelan itu justru menjadi titik tonggak perjuangan Surya Paloh untuk mewujudkan hakiki sebuah pers yang bebas merdeka. Sebab, menurutnya, mustahil kehidupan berbangsa bisa demokratis jika tidak ada kebebasan pers. Perjuangan strategis kebebasan pers dimaksudkannya pula sebagai perjuangan untuk menegakkan demokrasi di sebuah bangsa besar bernama Indonesia.

Dalam suasana yang sangat sulit itu, ia tidak putus asa. Ia berusaha membayar gaji semua karyawan Prioritas, sambil menyusun permohonan SIUPP baru dari pemerintah. Namun permohonan itu tidak dikabulkan pemerintah. Beberapa wartawan yang masih sabar dan tidak mau pindah ke tempat lain, akhirnya dikirim Surya Paloh ke berbagai lembaga manajemen untuk belajar.

Setelah dua tahun SIUPP itu tak juga keluar, Surya pun memutar otak agar tetap berada di bisnis media. Ia pun bekerja sama dengan Achmad Taufik untuk menghidupkan kembali *Majalah Vista*. Selanjutnya, pada 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan T Yously Syah mengelola koran *Media Indonesia*.

Di tangan Surya, penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti “almarhum” surat kabar Prioritas. Koran ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan membuat Surya semakin bersemangat melakukan ekspansi media di berbagai daerah. Disamping *Media Indonesia* dan *Vista* yang terbit di Jakarta, Surya Paloh pun bekerja sama menerbitkan surat kabar di daerah.

Sudah sejak lama Surya Paloh memiliki gagasan untuk membangun sebuah surat kabar komunitas di daerah-daerah supaya masyarakat bisa melek terhadap demokrasi. Sehingga bangsa ini hidup dalam kebebasan pers untuk membawa negara ini tiba pada sebuah perubahan yang lebih baik.

Surya lalu membentuk perusahaan PT Surya Persindo yang bertugas melakukan kerja sama kepemilikan saham dan pengelolaan media

terhadap sepuluh surat kabar daerah dan sebuah surat kabar mingguan. Perusahaan ini juga mengelola sebuah tabloid berita Detik di Jakarta.

Kesepuluh media tersebut adalah Harian Atjeh Post dan Mingguan Peristiwa di Banda Aceh, Harian Mimbar Umum di Medan, Harian Sumatra Ekspres di Palembang, Harian Lampung Pos di Bandar Lampung, Harian Gala di Bandung, Harian Yoga Pos di Yogyakarta, Harian Nusa Tenggara dan Bali News di Denpasar, Harian Dinamika Berita di Banjarmasin, serta Harian Cahaya Siang di Menado.

Surya Paloh juga membidani pembentukan televisi nasional Metro TV yang diresmikan pada 18 November 2000. Metro TV adalah sebuah stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Lambang kepala burung rajawali putih mulai muncul pada dua entitas media yang berpengaruh miliknya koran Media Indonesia dan stasiun televisi Metro TV.

Seminggu kemudian tepatnya pada 25 November 2000 Metro TV mulai mengudara pertama kali, menyajikan siaran berita selama 18 jam setiap hari. Pada 1 April 2001 Metro TV siaran non stop selama 24 jam setiap hari. Kehadiran Metro TV menjadi sebuah terobosan terbesar dalam dunia per-televisian nasional.

Kemunculan Metro TV dalam jagat pertelevisian Indonesia disambut baik sebagai antitesis media nasional lainnya yang banyak dikritik karena kerap menampilkan program yang kurang berkualitas. Sementara Metro TV hadir dengan konsep televisi berita yang sebelumnya dianggap tak cukup komersil dan menguntungkan oleh pengusaha media lain. Metro TV kemudian menjadi acuan bagi masyarakat yang menginginkan tayangan berita yang faktual dan lengkap.

Terjun ke Politik

Prestasi terbesar Surya Paloh adalah mampu memadukan antara dunia bisnis dan dunia politik. Itulah mengapa ia disebut tokoh politik yang “sudah selesai dengan dirinya”. Melalui MetroTV, Surya Paloh terus memberikan pencerahan kritis bagi masyarakat Indonesia. Melalui dunia pers, ia selalu menjadi oposisi bagi pemerintah dan memberikan kritik terhadap segala kebijakan pemerintah yang kurang memihak rakyat.

Surya Paloh sebenarnya bukan nama baru dalam jagat ketokohan

nasional. Ia sudah melanglang buana di berbagai organisasi kepemudaan dan ikut menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Pada 1965, Surya Paloh dan teman-temannya mendirikan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). KAPPI adalah organisasi yang melawan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan antek-anteknya yang memberontak kepada negara melalui Gerakan 30 September.

Setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan Pelajar pada Sekretariat Bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Pimpinan PP-ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).

Selain itu, Surya Paloh juga aktif di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Paloh juga pernah tercatat sebagai anggota MPR pada tahun 1977-1982 dan kembali menjadi Anggota MPR tahun 1982-1987 dari Partai Golkar.

Surya Paloh keluar dari Partai Golkar pada September 2011 setelah selama 43 tahun berbakti di dalamnya. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena dia merasa kecewa dengan partai politik tersebut. Idealisme yang digalang Partai Golkar menjadi berseberangan dengan cita-cita awal.



Partai berlambang pohon beringin tersebut diklaim memiliki pendekatan politik yang tak rasional, tak memakai akal sehat, dan tak mendasarkan pada hati nurani.

Keputusan untuk henggang semakin kuat, setelah Golkar menjatuhkan ultimatum pada kadernya yang aktif di dalam organisasi masyarakat Nasional Demokrat. Ormas yang dicetuskan Surya Paloh bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X ini diduga terbentuk pasca-terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar pada Oktober 2009 (*Tempo.co*, 2013).

Ormas Nasdem kemudian dideklarasikan secara resmi oleh Paloh bersama 45 tokoh nasional pada 1 Februari 2010 di Istora Senayan. Ormas ini menjadi cikal bakal Partai Nasdem yang diresmikan keberadaannya pada 26 Juli 2011.

Belajar dari pengalamannya di Golkar, Surya paloh mewajibkan tiap kader Partai Nasdem untuk tak meninggalkan bahasa hati, moralitas, dan semangat kemanusiaan dalam menjalankan politik. Setiap kader ditekan untuk memiliki kejujuran hati dan totalitas dalam mengusung gerakan perubahan atau restorasi.

Melalui Nasdem, dia pun ingin mengajarkan dan mensosialisasikan budaya malu, asas kepatutan, dan kepantasan sebagai bagian dari penghormatan atas ideologi partai. Bukan karena pendekatan pragmatisme dan transaksional. Dia ingin Nasdem bisa menjadi partai alternatif yang memiliki moralitas, manajerial, visi, misi, dan program yang berbeda dari partai-partai yang telah ada saat ini.

Pada Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual dan menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elite partai.

Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pada Kongres Partai Nasdem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Dan mundurnya Hary Tanoesudibjo dari Partai NasDem.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem pada 3 Desember

2013, Partai NasDem menghasilkan sikap politik partai terhadap situasi nasional dan kondisi politik menjelang 2014. Terdapat enam poin penting yang disampaikan mencakup soal keamanan di Papua, perlindungan TKI, dan penegakan hukum dan korupsi.

Poin pertama, Partai Nasdem mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga dan mengawasi Pemilu 2014 agar dapat berlangsung secara jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin politik dan pejabat publik yang amanat. Selanjutnya, mendesak KPU dan Pemerintah untuk segera merampungkan kekacauan DPT dan menyiapkan Pemilu 2014 sebaik-baiknya sebagai perwujudan amanat rakyat.

Pemerintahan SBY-Boediono pun diharapkan mengambil langkah-langkah tegas dan signifikan dalam mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang sudah muncul gejalanya. Tahun 2013 ditutup oleh perlambatan ekonomi yang berpotensi berujung pada krisis ekonomi. Kurs rupiah terus melemah, devisa terkuras oleh subsidi dan impor, serta dominasi asing terhadap sumber-sumber penghidupan kita, merupakan langit mendung yang akan membayangi pelaksanaan Pemilu 2014.

Partai Nasdem juga mendesak pemerintah untuk melindungi dan menegakkan harkat kemanusiaan petani, nelayan, dan buruh sebagai ujung tombak bergulirnya roda perekonomian nasional dan menghentikan liberalisasi sektor pangan. Selain itu, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang besar, seperti Century dan Hambalang.

Kasus ini harus segera dituntaskan oleh KPK untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Pemerintah pun diminta menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun dibarengi dengan peningkatan mutu dan kompetensi guru.

Pidato dan Orasi *ala* Bung Karno

Dalam aktivitas sosial dan politiknya, Surya Paloh juga dikenal dengan pidato dan orasinya yang dinilai terinspirasi dan menyerupai Bung Karno. Surya Paloh sendiri mengklaim dirinya adalah seorang Soekarno. Klaim tersebut datang bukan tiba-tiba, tetapi ada faktor historis yang memben-

tuknya. Sang ayah, Daud Paloh-lah yang membantu membentuk diri Surya sebagai seorang Soekarno. Melalui peringatan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Daud Paloh mempunyai tradisi seperti melakukan upacara bendera, mengadakan hajatan dirumahnya dengan mengundang tetangga dan teman sejawat serta yang terpenting pada hajatan tersebut, Daud Paloh senantiasa mengumandangkan Pidato kenegaraan Bung Karno melalui radio transistor ukuran besar yang diberi penguat suara.

Surya Paloh sudah akrab dengan Pidato Bung Karno sejak berumur 12 tahun. Surya selalu serius menyimak pidato-pidato Bung Karno yang tanpa teks itu. Keseriusannya terbukti dengan kemampuan Surya Paloh menghafalkan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Bung Karno.

Keahlian pidato dan orasi Surya ini, dimanfaatkannya juga untuk mengkritik dan melakukan perubahan. Untuk mengkritik, tak tanggung-tanggung, Surya Paloh melakukannya kepada wakil presiden (wapres) Adam Malik pada saat Orde Baru yang menjadi tamu undangan pada acara HIPMI.

Sebelum acara berlangsung, Surya Paloh meminta naskah pidato Adam Malik yang akan dibacakan pada acara HIPMI tersebut. Setelah mendapatkannya, Surya Paloh pun mempelajarinya dan membuat pidato tandangnya dalam waktu yang singkat.



Keesokan harinya, Surya Paloh sebagai perwakilan Ketua Umum HIPMI menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Dalam pidatonya, ia memperjuangkan agar pengusaha pribumi mendapatkan prioritas dari pemerintah. “Ini waktunya pengusaha pribumi berada di depan. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sayang kebijakan pemerintah tidak memberikan ruang gerak dunia usaha yang lebih berarti. Terutama bagi kita kelompok pribumi. Berbeda dengan era Bung Karno dulu. Saat itu muncul Benteng Grup. Ada hak-hak khusus untuk pengusaha pribumi. Tapi pada era sekarang hal itu sama sekali tak tampak”.

Pidato dari Surya Paloh tersebut membuat wapres Adam Malik marah. Pidato Surya Paloh dianggap bernuansa provokasi. Malam harinya pun beredar kabar bahwa aparat keamanan akan menangkap Surya. Dan kenyataannya tidak ada penangkapan itu.

Setelah menjadi Pendiri dan Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat (OND) dan menjadi Ketua Umum Partai NasDem, masyarakat mulai semakin akrab dengan pidato dan orasi Surya Paloh yang disampaikan melalui beberapa media. Pidato tersebut sebagian besar menggambarkan visi dan misi baik OND maupun Partai NasDem dalam melakukan perubahan dengan gagasan Restorasi Indonesia.

Disinilah kemampuan seorang pemimpin dapat diukur melalui keahliannya berorasi, berpidato didepan pengikut dan khalayak umum yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. Pemimpin tersebut dalam menyampaikan pidato dan orasinya menurut Aristoteles dan Plato haruslah mengandung kebenaran, tidak boleh bohong atau memanipulasi khalayak (audiences). Karena pidato dan orasi tidak sekedar ritual dalam proses komunikasi, maka ia tidak terlepas dari identitas penyampai pesan.

Berkaca dari apa yang dikatakan oleh Aristoteles dan Plato, maka terbitlah buku “Mari Bung Rebut Kembali: Pidato Inspirasi Sang Penggagas Restorasi”. Buku tersebut terdiri dari 12 bab yang berisi tentang kumpulan pidato dan orasi Surya Paloh secara tematik. Buku yang di edit oleh Willy Aditya ini dipilih secara selektif guna menggambarkan secara utuh perihal gagasan Restorasi Indonesia.

Dalam buku tersebut dikatakan bahwa pidato dan orasi Surya Paloh termasuk dalam kategori “impromptuer”. Yang berarti Surya Paloh jarang menggunakan naskah dalam pidato-pidatonya, penyampaiannya natural,

orisinil dan keluar dari dalam hati dan pengetahuan si pembicara. Bagi yang mendengarkan, model pidato dan orasi ini terasa lebih dekat secara psikologis. Dengan model pidato seperti ini, tak jarang dalam setiap pidato dan orasinya, Surya Paloh mengatakan “Restorasi Indonesia adalah Perubahan Pola Pikir Masyarakat Indonesia Dari Kepura-puraan Menjadi Keterusterangan”. Penggalan kalimat ini, biasa disampaikan Surya Paloh untuk mengkritik kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang penuh kepura-puraan dan hipokrit. Namun, didepan kader dan simpatisan Nas-Dem, untuk menyentuh psikologi dan semangat perubahan, dan akhirnya ini menjadi akrab ditelinga khalayak adalah penggalan kalimat dari Surya Paloh yang berbunyi “Izinkan Ya Allah, Ambil Saja Nyawa-Ku, Jika Kami Tidak Berbuat Apa-apa dan Menjadikan Negeri Ini Gagal.” (*Willy Adity (ed), Indonesia di Jalan Restorasi, 2013*).

Restorasi, Sebuah Gagasan Nasional

Dalam karier politiknya, Surya Paloh kerap menggaungkan visinya yaitu menghadirkan restorasi nasional. Istilah restorasi pernah digunakan pascakudeta Martinez Campos pada 14 April 1931. Republik Spanyol Pertama pun berakhir dengan pemulihan monarki di bawah Alfonso XII, melalui proklamasi Republik Spanyol Kedua. Istilah ini semakin populer dan menjadi lebih dekat dengan perspektif politik kebangsaan ketika Restorasi Meiji berkumandang di Jepang pada 1866-1905. Restorasi Meiji adalah pengembalian kekuasaan pada kaisar walau dalam format monarki terbatas.

Sementara restorasi nasional gagasan Surya Paloh berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi umum Indonesia pascareformasi 1998. Menurut, penataan dan pengelolaan pemerintahan usai reformasi justru sangat membebani negara dan memprihatinkan masyarakat karena cita-cita kesejahteraan rakyat yang diharapkan tidak menjadi lebih baik bilamana dibandingkan dengan masa Orde Baru.

Indonesia pun kian jauh dari cita-cita Proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Bahkan, Pancasila seperti tak lagi dijunjung tinggi. Kondisi itu dapat mengakibatkan Indonesia berada di jalur ideologi pragmatis, liberalistik, dan transisional. Dari aspek politik, perebutan kekuatan

dilakukan dengan cara-cara tidak sehat. Sehingga politik uang, suap, dan koalisi pun mewarnai kekuasaan.

Oleh karena itu, Surya Paloh menilai harus ada langkah nyata yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Surya, Indonesia memerlukan restorasi. Sebab bangsa ini sudah terdistorsi pada sistem ketatanegaraan. Terdapat empat kata kunci dalam gagasan restorasi Surya adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan.

Restorasi lanjutnya merupakan upaya pengembalian Pancasila sebagai jati diri negara bangsa dan dasar kehidupan bersama. Restorasi menurutnya bukan jalan pintas. Syarat utama adalah perubahan mendasar, menyeluruh, dan terpadu yang melibatkan populasi besar dengan pengalihan energi berpikir yang kuat, terarah, dan berjangka waktu panjang.

Menurutnya, agar restorasi tersebut berhasil, Indonesia harus memiliki otoritas penuh dan didukung rakyat. Otoritas tertinggi itu ada di tangan seorang presiden sebagai pemimpin nasional. Sebab, menurutnya, maju atau mundurnya sebuah bangsa lebih 50 persen disumbangkan oleh faktor kepemimpinan seorang pimpinan nasional. "Saya percaya bahwa jalan restorasi Indonesia dapat membawa titik terang benderang bagi republik Indonesia dalam mencapai mimpi-mimpi para pendiri bangsa, mimpi kita bersama!"

Gagasannya tentang restorasi nasional disampaikannya dalam bukunya "Indonesia di Jalan Restorasi" setebal 187 halaman. Dia juga menyematkan cita-cita tersebut di sebuah Sekolah Dasar (SD) Restorasi berkapasitas 12 kelas. Sekolah itu dibangun di wilayah yang sebelumnya bernama Kampung Maradan Weser dan Way Weser, Raja Ampat, Papua Barat yang kini sudah berganti nama menjadi Kampung Surya Paloh Tunduwe.

Surya berharap, dengan keberadaan SD Restorasi nantinya anak-anak di pulau ini maupun pulau-pulau lain di sekitarnya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Dengan begitu, kehidupan masyarakat setempat bisa lebih maju dan berkembang," ujarnya.

Selain membangun SD, Surya juga mendirikan sejumlah rumah tradisional setempat lengkap dengan sarana kamar mandi (MCK) serta sumur pompa air bersih yang memadai. Rumah tersebut bisa dimanfaatkan warga setempat untuk disewakan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hasil sewa rumah-rumah tradisional itu akan menjadi

kas kampung yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama warga di daerah itu.

Tidak hanya itu saja, di kampung yang dihuni 73 kepala keluarga atau sekitar 550 jiwa ini, ia juga mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam. Menurutnya, keberadaan koperasi ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Surya Paloh pun akan memberikan bantuan sebagai modal awalnya.

Selain restorasi secara nasional, Surya Paloh juga menuntut revolusi kemandirian bangsa. Indonesia menurutnya, harus bisa mencapai kemandirian di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dengan tercapainya kemandirian, maka ke depannya Indonesia dapat menjadi bangsa besar yang tidak bergantung pada bangsa lain.

Menurutnya, pembentukan karakter bangsa sudah dilakukan sejak kepemimpinan Sukarno. Semangat meraih kemerdekaan ditunjukkan Sukarno hingga era mengisi kemerdekaan. “Bung karno tidak memobilisasi partisipasi masyarakat. Bung Karno sudah mulai menanamkan karakter bangsa melalui kepemimpinannya,” ujar Surya seperti dikutip *Rakyat Merdeka*, 28/11/2013. Sebaliknya, ketika memasuki era Orde Baru (orba), pemerintahnya sudah mulai memerlukan upaya memobilisasi massa. Partai politik kala itu seluruhnya diatur oleh pemerintah, termasuk persentase jumlah dukungan yang harus didapat.

Meskipun demikian, zaman Orde Lama dan Orde Baru memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi masing-masing menurutnya memiliki kelebihan untuk pembangunan bangsa. Orde Lama, kata Surya, melahirkan gagasan bernama Trisakti atau kemandirian bangsa. Orde Baru melahirkan Trilogi Pembangunan yang mengedepankan ekonomi.

Sementara, reformasi melahirkan rezim “Trio Macan”. Istilah tersebut merujuk pada sebuah akun anonim di media sosial yang kerap menyampaikan kabar tentang dunia politik Tanah Air. Rezim lanjutnya sesuka hati dan dipenuhi fitnah serta politik pencitraan.

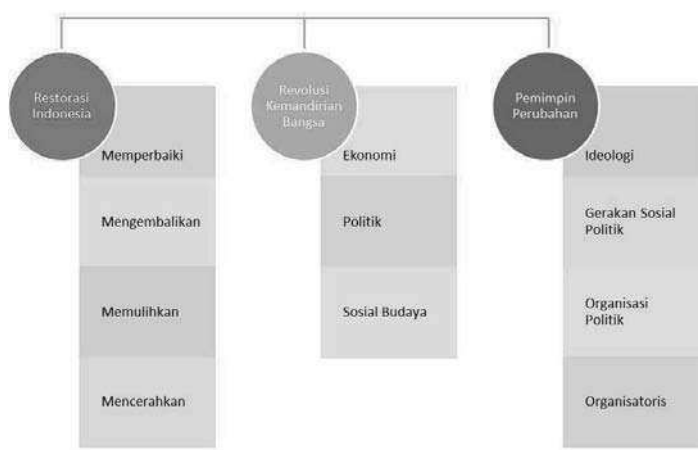
Paloh menambahkan, fenomena reformasi yang seharusnya membawa bangsa ke arah yang lebih baik malah menunjukkan negara tidak punya visi berpolitik. Negeri yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme hanya slogan reformasi saja. Tapi malah intrik, skeptisme, patrialisme yang terlihat.

Rezim ini kini sudah berlangsung selama 15 tahun dan cukup mempengaruhi karakter perjalanan bangsa. Di rezim ini, lanjut Paloh, birokrasi sudah mulai gemuk dan bermunculan banyak komisi-komisi. Pada era ini juga, setiap harinya Indonesia tidak pernah terlepas dari urusan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Akibatnya, sangat banyak energi dan pikiran yang tersita hanya untuk mengurus Pilkada. Pembangunan manusia, infrastruktur, moralitas pun menjadi terabaikan. Ia pun pesimistis Indonesia mampu berkompetisi dengan negara lain dalam kemajuan politik. Kecuali bila pada Pemilu 2014 mendatang muncul pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi kepentingan nasional dan mampu mengakhiri rezim tersebut.

Maka dari itu, yang diperlukan untuk melakukan perubahan atau Restorasi Indonesia bukanlah pemimpin kosmetik, tetapi pemimpin yang otentik. Pemimpin seperti ini ialah pemimpin yang berkarakter negarawan. Pemimpin yang lahir dari sebuah proses pembentukan yang panjang. Bukan yang datang “ujug-ujug” dan dipilih karena mobilisasi masyarakat semata.

Menurut John Maxwell seorang pemimpin dalam kepemimpinannya ibarat pemimpin orkestra. Dia tidak menghadapkan wajahnya pada penonton, ketika kebanyakan orang diatas panggung menghadap penonton dan mengharapkan sorak sorai sebelum beraksi. Baginya, bakti hidup dan perhatian tercurah untuk yang dipimpinnya, dan tepuk tangan penonton hanyalah soal finalisasi pelengkap, penting tapi bukan tujuan utama.



Pemimpin yang dimaksud John Maxwell adalah pemimpin yang berkualifikasi *the follower leadership* yakni pemimpin yang memiliki pengikut untuk pemikiran dan gagasannya. Pemimpin seperti ini memiliki beberapa kriteria, Pertama, adanya ideologi yang mendasari sebuah perjuangan, dan pengikutnya sepakat dengan ideologi bersama tersebut. Kedua, adanya gerakan atau movement yang dilakukan olehnya dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, adanya organisasi yang menjadi instrumen gerakannya. Keempat, dia adalah seorang organisatoris.

Dengan mengingat aktivitas politik Surya Paloh yang telah dijajaki mulai dari dirinya remaja. Dimulai dengan menjadi anggota KAPPI, membentuk FKPPi, menjadi Ketua HIPMI sampai dengan menjadi Inisiator OND dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dapat dinilai telah memenuhi kriteria *the follower leadership* tersebut.

Surya Paloh telah memiliki ideologi yang dibawanya, yakni Restorasi Indonesia. OND dan Partai NasDem juga telah dibentuk dan terus dibangun sebagai instrumen dari ideologinya. Sedangkan pergerakan atau movement yang dibawahnya adalah Gerakan perubahan.

Namun, melihat hasil survey, Surya Paloh dapat dianggap bukanlah sosok yang terkenal atau populer. Ia dinilai bukan jenis pemimpin yang rindu sorak sorai dan tepuk tangan. Pilihan atau sikap politiknya tidak mengundang popularitas. Program politiknya juga bukanlah yang bombastis, tetapi realistis, layak dan sesuai dengan kebutuhan mendesak rakyat dan tindakannya dilapangan dinilai lebih banyak terlihat. Yang lebih menarik adalah elektabilitas dan popularitas Surya Paloh bukanlah dari iklan, karena iklan-iklan politik dari OND dan Partai NasDem adalah sosialisasi gagasan Restorasi Indonesia, bukan sosialisasi diri pribadi Surya Paloh semata.

Tantangan dan Peluang di Pilpres 2014

Sampai dengan sekarang Surya Paloh ataupun Partai NasDem belum mendeklarasikan tokoh atau siapa yang akan dicalonkan sebagai capres. Paloh menegaskan, NasDem tidak akan mengajukan capres apabila NasDem hanya berada di posisi ketiga, dan NasDem akan mengajukan capresnya apabila berada di posisi pertama. Maka Surya Paloh memutuskan agar se-

mua kader NasDem fokus untuk memenangkan pileg. Surya Paloh menargetkan Nasdem dapat meraih 100 kursi di legislatif.

Untuk mendapatkan 100 kursi dilegislatif, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bagi NasDem. NasDem sebagai partai baru, juga memberikan harapan baru. Sampai dengan sekarang, keanggotaannya hampir merata di tiap provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai tingkat desa. NasDem menargetkan terus menambah jumlah anggotanya, dengan memanfaatkan sayap-sayap partai yang banyak digerakan oleh kaum muda, seperti Garda Pemuda NasDem, Liga Mahasiswa NasDem, Garnita Malahayati NasDem, Gerakan Massa Buruh NasDem dan lain-lain.

Dengan tingkat pemilih pemula muda yang jumlahnya diatas 50% dari jumlah total pemilih pada pemilu 2014 nanti. Sebagai partai baru yang menaungi anak muda, inilah yang dapat diharapkan Surya Paloh dan Partai NasDem untuk memenangi pileg. Dalam pileg nanti, Surya Paloh mengatakan caleg yang berada di Partai NasDem, lebih dari 75% adalah pemuda. Ditambah mereka juga adalah pemuda yang fresh atau belum berpartai selain di NasDem sekarang ini. Surya Paloh berharap caleg muda ini, dapat meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih pemula muda.

Selain dengan faktor kemenangan pileg, Surya Paloh juga mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014. *Pertama*, Surya Paloh memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik sebagai politisi dan penguasa, ia juga memiliki jejaring media yang cukup luas sebagai mesin untuk mengangkat popularitas. *Kedua*, Surya Paloh juga dianggap tokoh nasionalis yang negarawan, memiliki idealisme tinggi dan rela mendermakan dirinya untuk kepentingan bangsa. Sosok Surya Paloh pun merepresentasikan pemimpin yang tegas dan berpihak.

Ketiga, sebagai pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem, ia tentu bisa melakukan konsolidasi partai secara utuh, sehingga minim gangguan internal dan cukup solid mendukung langkahnya sebagai capres. Apalagi partai yang didirikannya saat ini mulai tampil sebagai kuda hitam dalam berbagai hasil temuan lembaga survei menjelang Pemilu 2014.

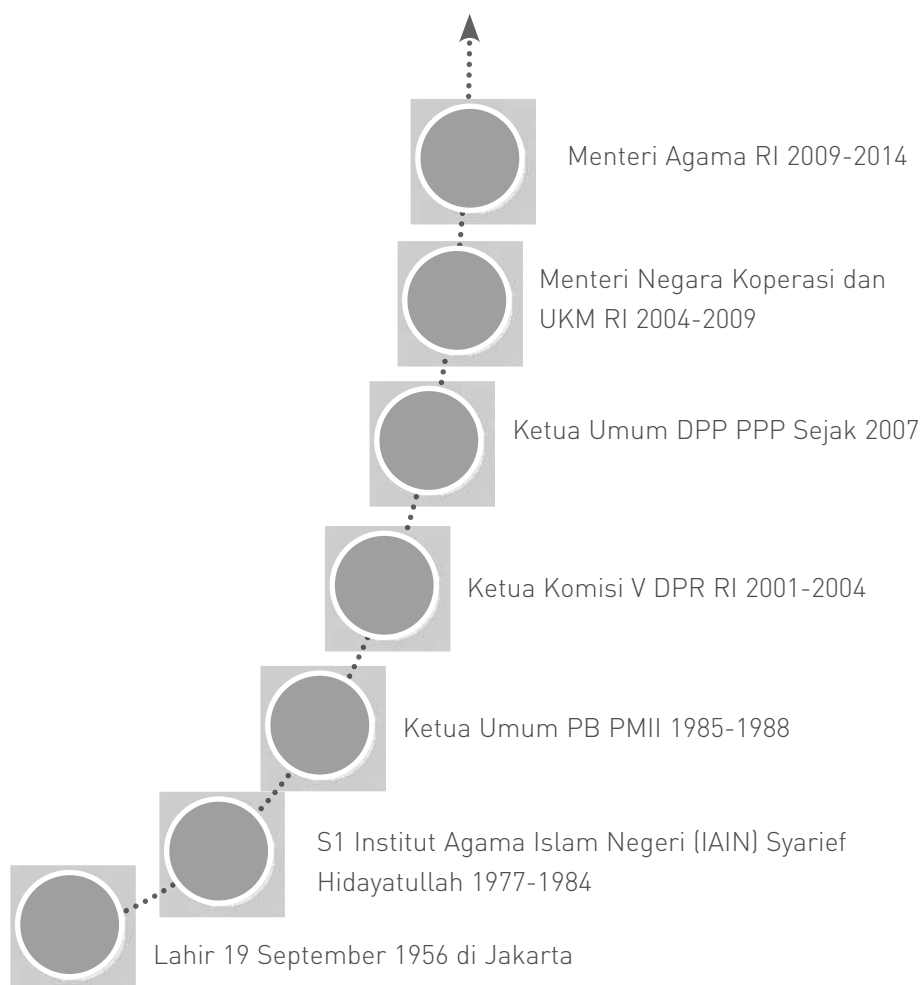
Keempat, Surya Paloh juga dianggap memiliki gagasan yang jelas terkait pembangunan Indonesia. Slogan “Restorasi Indonesia” dan “Gerakan Per-

ubahan” merupakan angin segar bagi publik Indonesia. Ini terbukti dengan begitu gampangya orang-orang berbondong-bondong bergabung ke Partai NasDem.

Meski demikian, tantangan terpenting yang dihadapi Surya Paloh saat ini adalah ihwal elaktabilitasnya yang masih rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Surya Paloh masih di urutan ke-9 di antara tokoh nasional lainnya yang disurvei.

SURYADHARMA ALI

Pemimpin Potensial





sulteng.kemenag.go.id

Suryadharma Ali lahir di Jakarta, 19 September 1956. Dia melakoni hidupnya sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang, kampus yang terletak di pinggir Jalan Raya Ciputat, Tangerang Selatan itu sudah berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Pria berkacamata ini mulai merasakan bangku kuliah pada 1977. Dia mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah. Enam tahun kemudian pada 1984, ia berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana lengkap. Selama menjadi mahasiswa, Surya tidak pernah puas hanya menjadi mahasiswa di dalam kampus.

Surya muda begitu penasaran mencari apa yang tak ia dapatkan di bangku kuliah. Ia pun memutuskan untuk bergelut di organisasi kemahasiswaan. Saat berorganisasi, Surya sering mendapatkan pembelajaran dan pengalaman. Surya muda telah dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi serta berdiskusi di berbagai forum kajian, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Meski sibuk berorganisasi dan berdiskusi, Surya tak pernah mengabaikan tujuan utamanya datang ke Ciputat, yakni menuntut ilmu. Alhasil, meski seorang aktivis, prestasi akademik yang diraihny di atas rata-rata.

Surya dari Ciputat

Di keorganisasian intrakurikuler, Surya pernah menjadi salah satu pengurus Senat Mahasiswa Fakultas. Sedangkan di ekstrakurikuler, ia memilih bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama. Kemampuannya dalam memimpin ditunjukkan saat dia menjadi Ketua Umum PMII, Cabang Ciputat. Kariernya di salah satu organisasi ekstra ini tak berhenti di tingkat cabang, tetapi terus meningkat hingga ke pengurus besar.

Pada Kongres VIII PMII yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Surya mencalonkan diri maju sebagai orang nomor satu dan akhirnya dia pun terpilih menjadi Ketua Umum PB PMII periode 1985-1988 (*tokohindonesia.com*, 2013).

Setelah meraih gelar sarjana, pada 1985, Surya memilih jalur profesional dengan berkarier di PT Hero Supermarket Tbk. Kariernya di usaha ritel ini berlangsung hingga tahun 1999 dengan jabatan terakhir sebagai deputy direktur. Surya juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Jendral Asosiasi Pedagang, Pengecer dan Pertokoan Indonesia (AP3I).

Surya menikah dengan Wardatul Asriyah. Pernikahan mereka dikaruniai empat orang anak. Yakni Kartika Yudistira, Sherlita Nabila, Abdurrahman Sagara Prakasa dan Nadia Jesica Nurul Wardani.

Perempuan yang akrab disapa mbak Indah ini kini aktif di dunia politik. Dia tergabung dalam Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini menjadi anggota DPR RI masa bakti 2009-2014. Sebelumnya, mbak Indah menduduki Komisi VII DPRD Kabupaten Bekasi yang mengurus bidang ESDM, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

Sama seperti suaminya, karir politik Wardatul Asriyah telah dimulai sejak di bangku kuliah dengan menjadi anggota aktif PMII. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi salah seorang pengurus puncak di WPP (Wanita Persatuan Pembangunan).

Menata Partai Ka'bah

Hasil Muktamar partai berlambang Ka'bah telah usai ditunaikan. Para peserta menandungkan shalawat badar tak henti-henti. Di antar mereka ada yang berpelukan dan tidak sedikit yang menyeka air mata. Pendukung la-

wan memeluk sembari mendukung sang pemenang, begitupun sebaliknya. Mereka larut dalam suasana ukhuwah. Gembira karena baru saja mempunyai pemimpin baru.

Ketua Pimpinan Harian Pusat DPP PPP—demisioner—Hasrul Azwar yang memimpin sidang kala itu melanjutkan acara. Dia lantas membacakan nama Suryadharma Ali sebagai pemenang menjadi Ketua Umum DPP PPP yang baru 2007-2012, menggantikan Hamzah Haz.

Suryadharma Ali mendapatkan perolehan suara terbanyak. Dia terpilih dengan meraup 365 suara dari 1.165 peserta muktamar yang berhak bersuara. Dia menang hanya dengan sekali putaran dengan ketentuan peraih suara terbanyak menjadi ketua umum. Pemungutan suara dilakukan pada 2 Februari 2007 dari malam hingga dini hari.

Dalam kepengurusan periode kepemimpinannya, Surya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chairul Mahfudz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).

Kemenangan Surya yang menjabat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI saat itu makin memastikan partai berlambang Ka'bah itu tak akan menjadi oposisi pemerintah, tetapi tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Sebagai Ketua Umum Surya kerap mengobarkan optimisme kepada



para kadernya. Dia meyakinkan seluruh jajaran partai jika PPP memiliki kekuatan luar biasa. Menurutnya, PPP dari dulu tetap hidup mesti diintimidasi, dicurangi dan suaranya dirampok di tempat pemungutan suara pada beberapa pemilu sebelumnya. Dia tetap yakin, PPP akan tetap eksis sebagai partai berbasis Islam yang berorientasi kebangsaan.

Menjelang Pemilu 2009, Surya menargetkan PPP akan mendapatkan 15% suara. Target yang dimaksudkan untuk mendongkrak optimisme di tengah merosotnya perolehan suara PPP dari tahun ke tahun. Walaupun perolehan suara PPP di pemilu 2009 memang tak seperti ditargetkan, tetapi PPP masih tetap menjadi partai yang diperhitungkan dalam koalisi di parlemen dan pemerintahan. Partai ini pun kembali masuk ke barisan koalisi. PPP menjadi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. Sedangkan Surya kembali diminta masuk mengisi pos di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Dia lantas menjadi Menteri Agama.

Dua tahun usai pemilu, Surya mendorong dan mendukung percepatan Muktamar PPP delapan bulan lebih awal, dari yang seharusnya (sesuai periode) dilakukan pada Februari 2012, dipercepat menjadi 3-6 Juli 2011 di Bandung. Muktamar VII PPP itu akan diikuti oleh 488 DPC dan 33 DPW PPP se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menjelaskan, percepatan tersebut dengan pertimbangan teknis persiapan menjelang Pemilu 2012. Partai harus menyiapkan pemenuhan syarat verifikasi keikutsertaan dalam pemilu. Peraturan perundangan yang baru memerintahkan verifikasi partai harus dilakukan maksimal hingga Agustus 2011.

Surya menegaskan maksud percepatan muktamar, agar siapa pun yang memimpin DPP PPP yang terpilih dalam muktamar akan memiliki waktu untuk mempersiapkan Pemilu 2014. Dia menjelaskan kebijakan mempercepat siklus muktamar belajar dari pengalaman muktamar pada 2003 yang hanya setahun sebelum perhelatan Pemilu 2004 digelar. Percepatan muktamar yang juga berarti mempercepat pergantian ketua umum itu direspon baik para kader PPP. Beberapa kandidat ketua umum pun mencuat. Surya masih merupakan calon terkuat di antara kader-kader lain.

Beberapa kali, Surya menegaskan bahwa pada muktamar yang digelar di Bandung pada 3 hingga 6 Juli 2011, akan tetap meneguhkan bahwa PPP menjadi partai yang memegang Islam sebagai asasnya. Dia menyatakan bahwa dewasa ini banyak pihak yang menginginkan partai berlambang Ka'bah yang dipimpinnya itu menanggalkan Islam sebagai asas. Namun dia

menegaskan, Islam tetap menjadi pegangan PPP, meski banyak pandangan yang menginginkan agar PPP menanggalkan Islam sebagai asas partai.

Dia menegaskan, partai berlambang Ka'bah itu tidak akan goyah dengan berbagai pandangan dari pengamat dan lembaga survei yang menyatakan partai yang berasaskan agama tidak akan dipilih dalam Pemilu 2014. Menurut Surya, pandangan itu adalah “sesat”. Dia menjelaskan, jika pun terjadi penurunan dalam perolehan suara PPP di Pemilu 2009, hal itu karena para pemimpin partai berwarna hijau tua itu belum mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan.

Lebih jauh, Surya menjelaskan bahwa dengan sikap konsisten atas asas Islam itu, puluhan kiai dari pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur beberapa waktu lalu telah beralih ke PPP dan langkah itu diikuti kiai dari pondok pesantren di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi lain.

Surya punya visi bahwa PPP ke depan bisa menjadi partai dakwah yang berperan mengisi kekosongan informasi agama Islam di tengah masyarakat dan bersama menuju kondisi beragama yang lebih baik lagi. Dia menyebutkan berkembangnya aliran sesat di tengah masyarakat dewasa ini, karena adanya kekosongan informasi mengenai ajaran Islam. Karena itu PPP juga harus menjadi bagian dari Partai Dakwah.

Sebagai kandidat petahana, Surya merasa optimistis dapat kembali memimpin PPP. Terlebih, dukungan suara dari Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang terus mengalir untuk dirinya. Banyak DPW yang menyampaikan dukungan bulat kepada Surya. Sebagian dukungan itu dibacakan dan disampaikan secara langsung kepada Surya. Hingga akhir Mei 2011, sudah 18 DPW dan 271 DPC yang mendukung Surya dipilih kembali menjadi Ketua Umum. Bahkan sebagian besar DPC meminta perlunya aklamasi penetapan Surya menjabat kembali Ketua Umum, untuk mengawali konsolidasi nasional pada muktamar nanti.

Menapak ke Pemerintahan

Suryadharma Ali pernah terpilih menjadi Anggota DPR dan bahkan menjadi Ketua Komisi V DPR RI tahun 2001 hingga 2004. Surya masuk ke parlemen dalam masa kepemimpinan Hamzah Haz sebagai Ketua Umum DPP PPP yang juga menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Surya juga telah menjabat posisi penting di partai sebagai salah seorang Ketua DPP PPP. Pada Pemilu 2004, dia pun terpilih kembali menjadi Anggota DPR dan sempat menjabat Bendahara Fraksi PPP MPR RI.

Lalu, setelah Pilpres 2004 yang dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK), sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mengalahkan pasangan Megawati dan Hasjim Muzadi, Suryadharma Ali diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu sebagai Menteri Koperasi dan UKM 2004-2009. Dia menggantikan Alimarwan Hanan, yang juga kader PPP dan saat itu menjabat Wakil Ketua Umum DPP PPP. Selain Surya, kader PPP lain yang diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu I oleh Presiden SBY adalah Bachtiar Chamsyah, yang tetap menjabat Menteri Sosial untuk kedua kalinya.

Selama menjabat Menteri koperasi dan UKM, dia berhasil memainkan peran signifikan dalam memberdayakan ekonomi rakyat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Membangkitkan koperasi Indonesia adalah gagasan utamanya. Gagasan itu diimplementasikan dengan menggelontorkan alokasi anggaran triliunan rupiah untuk program pemberdayaan koperasi dan UKM. Paling tidak dia merevitalisasi koperasi untuk mulai mengakar dan menjadi sandaran hidup masyarakat kecil. Sedikitnya 28 juta orang, telah bergabung di 133 ribu koperasi yang tersebar di berbagai kegiatan sektor ekonomi di seluruh pelosok tanah air.

Amirul Haj

Penyelenggaraan haji ketika Surya menjabat sebagai Menteri Agama memang dinilai lebih baik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 4.200 responden jamaah haji Indonesia di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Satop Armina, diketahui bahwa indeks kepuasan jamaah terhadap mutu dan pelayanan panitia penyelenggaraan ibadah haji 2010 di Arab Saudi berada pada angka memuaskan atau di atas standar dengan angka sebesar 81,45 persen (*Antaranews.com*, 2013).

Survei yang dilakukan oleh BPS ini mencakup aspek penilaian, mulai pelayanan petugas haji (petugas kloter dan non kloter), pelayanan ibadah, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi/ pemondokan, pelayanan kate ring, pelayanan kesehatan, pelayanan umum lainnya (informasi, administrasi, barang bawaan dan dokumen).

“Aspek pelayanan dengan pemenuhan harapan tertinggi terdapat pada pelayanan petugas kloter 88,88 persen dan terendah terdapat pada pelayanan katering di Armina (Arafah-Mina) 75,68 persen,” ungkap Kepala BPS, Rusman Heriawan.

Untuk indeks pelayanan petugas kloter, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada sikap, keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan (93,49 persen). Sementara indeks kepuasan terendah adalah kesempatan dalam menanggapi/merespon setiap permasalahan/pengaduan jamaah (86,89 persen).

Untuk pelayanan petugas non kloter, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada penampilan petugas, kerapihan berpakaian, dan fasilitas yang digunakan petugas dalam pelayanan (88,39 persen). Sedangkan indeks kepuasan terendah adalah ketepatan waktu dan kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji (81,57 persen).

Sementara dalam pelayanan ibadah, kepuasan jamaah tertinggi terdapat pada kemampuan pengendalian emosi dalam menghadapi jamaah (88,2 persen) dan indeks kepuasan terendah adalah pelayanan khusus dalam menyelenggarakan ibadah untuk jamaah sakit (84,02 persen).

Lain hal dengan pelayanan akomodasi/ pemondokan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan petugas dalam menyambut dan melepas jamaah (83,85 persen) dan terendah adalah kesesuaian ukuran/kapasitas kamar dengan jumlah jamaah haji per kamar (75,57 persen).

Untuk sisi pelayanan katering jamaah memiliki kepuasan tertinggi pada ketersediaan dan kecukupan jumlah katering (83,56 persen) dan terendah adalah layanan penyediaan termos makanan bagi jamaah yang melakukan lontar jumrah tapi belum sempat mengambil makanan (65,14 persen).

Dalam pelayanan transportasi, menurut jamaah kepuasan tertinggi pada tampilan fisik kesediaan dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji (79 persen) dan terendah adalah ketersediaan dan kecukupan jumlah transportasi yang melayani jamaah haji (72,5 persen).

Dan untuk indeks kepuasan pada pelayanan umum lainnya, kepuasan tertinggi jamaah pada pelayanan, bantuan dan pengurusan terhadap jamaah haji yang sakit (88,24 persen) dan terendah adalah ketersediaan pos petugas dalam menerima, mencatat, dan menyelesaikan keluhan jamaah haji (80,86 persen).

Dari data-data tersebut, pelayanan dari panitia penyelenggara haji yang memiliki indeks kepuasan tertinggi dari para jamaah adalah keramahan

dan kesopanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan, ke rapiian petugas dalam berpakaian dan fasilitas yang digunakan, serta kemampuan pengendalian emosi.

“Juga kemudahan dalam men dapatkan layanan petugas kloter dan kepedulian serta rasa empati petugas dalam memberikan layanan kepada jamaah haji,” ujarnya. Sementara itu, pelayanan yang memiliki indeks kepuasan terendah adalah tampilan penyajian dan kebersihan jasa katering, ketepatan waktu kedatangan sarana transportasi, dan kelengkapan serta ketersediaan fasilitas juga perlengkapan katering.

Berdasarkan daerah kerja, indeks kepuasan tertinggi ada di daker Madinah (87,33 persen) dan terendah di daker Armina (79,41 persen). Sementara untuk wilayah Jeddah (83,79 persen) dan Makkah (81,27 persen). Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku telah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan haji. Surya menilai, perlu ada indikator dan ukuran tingkat pemenuhan kebutuhan dan harapan jamaah haji. Sehingga, kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada berbagai aspek dan dimensi, indeks kepuasan, tingkat kepuasan, dan tingkat harapan sesungguhnya yang dirasakan jamaah haji dapat terukur.

Objek survei meliputi berbagai aspek pelayanan, di antaranya Pelayanan Petugas Haji pada Daerah Kerja Madinah, Makkah, Jeddah dan Armina, pelayanan Petugas Kloter maupun non Kloter, Pelayanan Transportasi, Pelayanan Akomodasi/Pemondokan, Pelayanan Catering dan Pelayanan Umum yang meliputi informasi, administrasi, barang bawaan, dan dokumen serta pelayanan lainnya.

Antara Pendidikan, Islam, dan Pancasila

Suryadharma Ali merupakan salah satu tokoh politik yang mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam pengetahuan islam. Tercatat sebagai mahasiswa IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah tahun 1977, Surya mempelajari bidang Pendidikan Agama Islam.

Soft skill nya pun tumbuh ketika Surya bergabung ke dalam aktivitas organisasi mahasiswa, seperti Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan PMII. Melalui PMII ini pula, Surya menapaki karir aktivisnya lebih mendalam. Dimulai dalam PMII di lingkungan komisariat kampus, Surya mendaki karir

hingga Pengurus Pusat. Hingga Surya tercatat sebagai Ketua Umum PB PMII periode 1985-1988.

Dengan pengalamannya sebagai aktivis ini pula, Surya melabuhkan pilihan politiknya kepada PPP. Melalui Partai berlambang ka'bah ini pula, Surya hingga kini sukses menjajaki karir politiknya.

Sukses menjabat sebagai Ketua Partai, Surya juga berhasil menduduki jabatan publik beberapa kali. Dalam kursi legislatif, Surya pernah menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PPP dan Ketua Komisi V DPR RI periode 2001-2004. Surya juga sempat menjabat sebagai Bendahara Fraksi PPP MPR RI periode 2004-2009.

Selain itu, Surya juga tercatat sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM tahun 2004-2009. Dan terakhir, dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Surya diberi amanah sebagai Menteri Agama.

Dalam posisinya sebagai Menteri Agama ini pula, Surya mampu mengimplementasikan pemikirannya terkait posisi agama dalam negara. Surya sangat memahami bahwa Indonesia adalah negara yang sangat heterogen. Meskipun muslim adalah mayoritas, tetapi Indonesia tidak bisa menjadi negara islam. Disinilah letak semangat kebangsaan yang dijunjung tinggi oleh Surya.

Selama menjadi Menteri Agama ini pula, Surya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pendidikan islam di Indonesia. Argumen ini pula yang menjadi dasar bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikannya gelar *Doktor Honoris Causa* bidang Epistimologi Kajian Islam.

Menurut Prof. Imam Suprayogo (*Republika.com*, 22 Februari 2013), pemberian gelar tersebut tidak lepas dari peranan Surya untuk mengajak para santri belajar ilmu sains. Surya juga dianggap dapat menerapkan islam modern secara aplikatif.

Imam menambahkan, (*Antaranews.com*, 23 Februari 2013) Surya tidak mendikotomikan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum. Surya justru mendorong terjadinya integrasi dua bidang ilmu tersebut. Santri di pondok pesantren, misalnya, didorong untuk belajar ilmu fisika dan kedokteran.

Surya sendiri berpandangan bahwa pendidikan harus diawali dengan kajian Al Quran. Tidak sekedar membaca, tapi kajian Al Quran itu dimaksudkan untuk digali makna filosofis epistimologi keilmuan.

Sehingga bukan mencari ilmu untuk membenarkan isi Al Quran, tetapi mengkaji filosofi Al Quran untuk dasar dan alat melakukan observasi dan kajian. Dengan demikian tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama.



kemenag.go.id

ura juga berpandangan bahwa islam harus menjadi dasar dalam membangun negara. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia harus menjadi negara islam karena Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik. Di sinilah letak semangat kebangsaan Surya.

Dalam sejarah islam, Nabi Muhammad pernah mengeluarkan Piagam Madinah untuk masyarakat Madinah. Saat itu, Madinah adalah wilayah yang terdiri dari berbagai kelompok suku. Sekat perbedaan ini pula yang menyebabkan mereka sering bertikai satu sama lain.

Dengan kondisi tersebut, Nabi Muhammad hadir sebagai mediator untuk menjembatani permasalahan tersebut. Keputusan Nabi Muhammad mengeluarkan Piagam Madinah merupakan apresiasi bagi semua suku dan golongan yang ada di Madinah.

Piagam ini adalah sebuah hukum bagi penduduk Madinah, baik muslim atau Non-muslim yang terdiri dari kaum musyrik dan yahudi. Dan lewat Piagam Madinah ini pula, Nabi Muhammad menunjukkan betapa pentingnya nilai toleransi, partisipasi, kebebasan dan persamaan (equality) dalam bidang apapun. Kerukunan dan persatuan menjadi message penting dalam Piagam tersebut.

Peristiwa tersebut juga tercermin di Indonesia. Di masa proses pembentukan negara, terjadi pertengahan yang sengit dan cukup lama antar tokoh

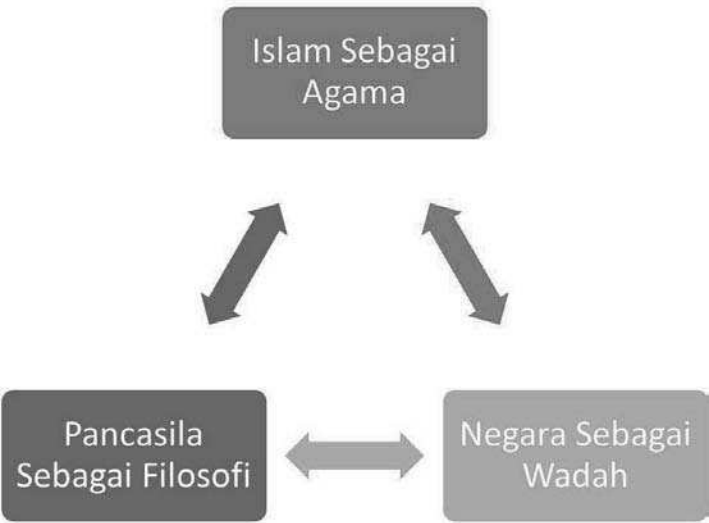
bangsa terkait ideologi negara. Bagi kelompok islam, mereka sangat menolak jika Indonesia menjadi negara yang sekuler dan berjuang agar islam menjadi fondasi negara. Pendapat bertentangan juga muncul dari kelompok nasionalis, ataupun sekuler. Walhasil, perdebatan panjang pun terjadi.

Namun, dengan kearifan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa maka terjadilah kompromi dengan diambilnya Pancasila sebagai koridor perjuangan negara. Pancasila bukan mendorong rakyat untuk sekuler, justru Pancasila lah yang mendorong rakyat untuk tetap beriman kepada Tuhan.

Pancasila merupakan ideologi yang tepat bagi Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara yang heterogen, baik Suku, agama, ras, budaya dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tali yang mengikat perbedaan-perbedaan tersebut dan mengubahnya menjadi kesatuan yang kuat.

Kedua, Pancasila lahir dari kompromi dan kesepakatan para pendiri bangsa. Hal ini juga dilakukan Nabi Muhammad ketika mendeklarasikan Piagam Madinah sebagai tali pemersatu masyarakat madinah. Pancasila tidak jauh beda dengan semangat tersebut.

Meskipun, Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim, tetapi Indonesia juga masih memiliki kepercayaan lain. Ini yang sangat diperhatikan Surya, sehingga persatuan bangsa dan negara dapat terlaksana dengan baik.



Dari pandangan di atas, menggambarkan bahwa Surya adalah seorang tokoh islamis yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Hal ini pula yang nampak dalam perilaku politiknya.

Saat menurunnya kharisma partai islam, Surya justru dengan tegas meyakinkan bahwa PPP, partai yang dipimpinnya akan tetap menjadi partai dakwah yang tetap menyebarkan nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman yang damai dan penuh rahmat sehingga dapat mengisi kekosongan informasi terhadap nilai-nilai islam yang sesungguhnya.

Menduduki jabatan Menteri Agama, Surya juga mampu mengambil beberapa keputusan berdasarkan wawasan keislamannya. Misalnya, kasus kerusuhan FPI. Surya tidak mudah terbawa arus. Beberapa pihak menyuarakan untuk membubarkan FPI. Namun Surya berpendapat kerusuhan yang dilakukan FPI hanya kerusuhan massa saja. Dan Membubarkan bukan jalan keluar terbaik bagi masalah tersebut.

Kemudian, ketika meruaknya isu NII yang menempa Ponpes Az Zaitun. Banyak yang menginginkan pesantren itu ditutup. Namun, Surya tidak ingin gegabah. Surya bersama tim melakukan kajian dan melihat aktivitas di pesantren tersebut. Kesimpulannya, tidak ada indikasi kuat bahwa Az Zaitun adalah gerbong penyebar NII. Kebijakan ini setidaknya menunjukkan bahwa Surya mampu menjalankan amanah sebagai Menteri Agama dengan baik.

Sebagai sosok yang islami dan nasionalis ini, Surya mampu menjadi salah satu alternatif dalam pilpres 2014 nantinya. Apalagi dengan kapasitas dan track recodnya yang cukup bersih, Surya membuktikan bahwa posisi yang didapatkannya, bukan sekedar kado politik partai koalisi semata, melainkan jabatan publik tersebut dapat diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Suryadharma Ali cukup memiliki peluang untuk maju sebagai capres di Pilpres 2014 mendatang. *Pertama*, ia saat ini adalah Ketua Umum PPP. Dengan posisinya seperti itu, peluangnya sangat besar—apalagi jika PPP di pemilu Legislatif nanti bisa mendapatkan kursi yang cukup. *Kedua*, Suryadharma Ali dikenal sosok yang bersih dan merepresentasikan tokoh Muslim. Ia juga punya basis Nahdhiyin yang cukup mengakar. Dukungan

para “kiai khos” juga banyak terhadap Suryadharma. Tentu hal itu bisa menjadi model penting baginya.

Tentu tantangan terbesar Suryadharma ihwal kost politik dan popularitasnya yang masih rendah. Selain itu, gagasan keindonesiaan Suryadharma juga belum terlihat. Dalam survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu misalnya menyebutkan bahwa posisi elektabilitas Suryadharma Ali belum masuk 10 besar di antara tokoh-tokoh nasional lainnya.

Surya adalah tokoh yang sangat kuat di PPP. Terbukti dengan kepercayaan yang diterimanya untuk menduduki kursi nomor 1 di partai ber lambang ka'bah tersebut sejak tahun 2007.

Saat ini, Surya sebenarnya telah memiliki modal yang cukup kuat untuk bertarung dalam pilpres 2014. Pertama, Surya adalah Ketua Umum Partai. Fakta ini menunjukkan bahwa Surya sudah memiliki gerbong menuju pilpres 2014. Tentu saja posisi sebagai orang nomor 1 dalam partai, Surya lebih mudah jika mengendalikan kemana arah kemudi partai.

Kedua, Surya memiliki kedekatan dengan kaum nahdliyin. Bargaining positon yang cukup kuat untuk meraih voters di pilpres nantinya. Apalagi nahdliyin adalah ormas islam terbesar di Indonesia saat ini.

Ketiga, Surya pernah beberapa kali menduduki jabatan publik. Dan dalam kepemimpinannya, tidak sedikit prestasi yang diraihny. Dengan kapasitasnya sebagai Menteri Agama saat ini, sebenarnya juga mampu menjadi kunci menaikkan elektabilitasnya, asalkan Surya mampu menunjukkan kapasitasnya mengemban jabatan publik.

Selain itu, Surya termasuk politisi yang bersih. Belum ada kasus penyalahgunaan kekuasaan yang terbukti kepadanya.

Meskipun begitu, Surya belum mendapatkan restu penuh dari internal PPP. Dalam Mukernas II PPP yang digelar 7-8 Februari 2014 ternyata belum sepenuhnya memberi restu penuh kepada Surya untuk melenggang pada pilpres 2014.

Pasalnya, hasil mukernas tersebut tidak hanya menetapkan Surya sebagai bakal capres, melainkan ada enam tokoh dari luar PPP, yang juga dilirik untuk diberi restu oleh PPP. Mereka adalah Jusuf Kalla, Joko Widodo, Din Syamsudin, Khofifah Indar Parawangsa, Isran Noor, dan Jimmly Asshiddiqie.

Keputusan ini menurut Ketua DPW PPP, Jawa Barat, Rahmat Yasin (Kompas, 11 Februari 2014) adalah sikap PPP yang membuka diri terhadap

tokoh-tokoh nasional dari luar PPP. Rahmat juga menambahkan bahwa DPW-DPW juga bersikap realistis terhadap elektabilitas Surya yang masih diragukan dalam mendongkrak suara partai dalam pileg nantinya.

Kenyataan ini, menunjukkan bahwa PPP masih setengah hati merestui Surya. Dinamika internal partai inilah yang perlu disikapi dengan baik oleh Surya. Jika tidak, maka peluang untuk maju dalam pilpres nanti bisa tersandung oleh calon lain yang lebih direstui pengurus internal PPP.

Surya juga harus membuktikan bahwa dalam kendali kemudinya, PPP dapat meraih elektabilitas yang lebih baik seperti sejarahnya dulu. Apabila PR ini dapat diselesaikan dengan strategi jitu Surya, maka mampu menarik hati pengurus internal partai, bahwa Surya juga layak maju dalam pilpres. Tantangan inilah yang perlu dijawab Surya.

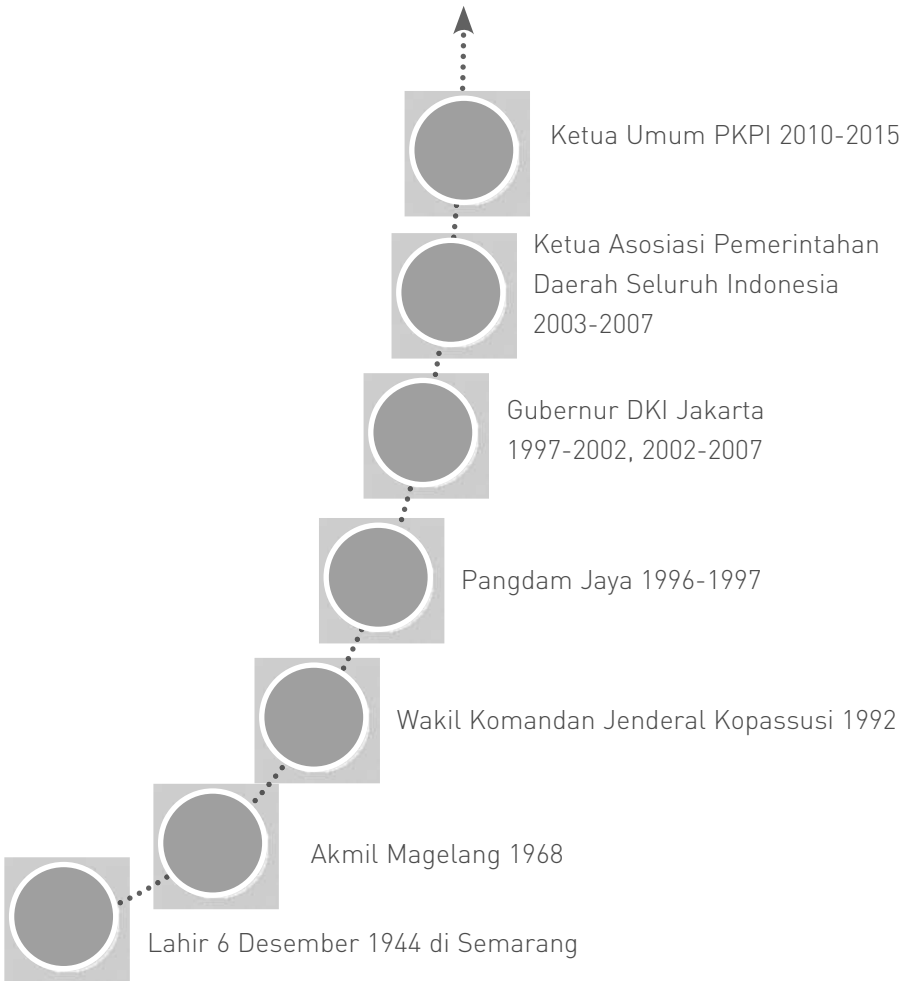
Meskipun begitu, Surya yang tidak berasal dari pengusaha, bisa jadi akan terkendala dalam segi financial jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Berdasarkan hasil Mukernas, PPP masih memiliki beberapa alternatif calon yang memiliki modal financial yang lebih tinggi dibandingkan Surya. Inilah tantangan Surya yang perlu dijawab dengan komunikasi intensif dengan internal partai.

Terakhir, tentu saja persoalan elektabilitas Surya. Dalam survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu misalnya menyebutkan bahwa posisi elektabilitas Suryadharma Ali belum masuk 10 besar di antara tokoh-tokoh nasional lainnya.

Sebagai pejabat eksekutif, harusnya menjadi kesempatan Surya untuk menaikkan elektabilitasnya tentu saja dengan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Dengan demikian, apabila faktor internal (partai) dan eksternal (elektabilitas) tersebut dapat diperbaiki Surya dengan baik. Tidak mustahil, Surya akan menjadi momok tersendiri bagi para kompetitor capres lainnya.

SUTIYOSO

Pemimpin Potensial





pkpi-nasional.blogspot.com

Sutiyoso Muda

Saat mengingat nama Sutiyoso, maka memori kita mungkin akan kembali ke era 1997-2007 yang merupakan masa kepemimpinan jenderal bintang tiga itu di Ibukota Jakarta. Sutiyoso identik dengan Kota Metropolitan Jakarta karena pernah menjadi gubernurnya selama dua periode. Namanya juga lekat dengan sejumlah kebijakan kontroversial seperti proyek pengerjaan *Busway*, pembangunan pagar di sekeliling Monumen Nasional (Monas), dan sejumlah kebijakan lainnya.

Barangkali mayoritas orang lebih mengenalnya sebagai gubernur, bukan tokoh militer pensiunan jendral bintang tiga. Sama halnya dengan Wiranto, Sutiyoso juga merupakan anak desa yang sukses menjadi petinggi militer bahkan kariernya berlanjut sebagai pejabat publik yang disegani. Namanya sendiri identik dengan ketegasan, kedisiplinan, konsistensi, dan mahal senyum. Soal yang terakhir, bukannya ia sombong atau tinggi hati, tapi memang sudah menjadi pembawaannya sedari kecil.

Semarang merupakan daerah yang tak asing bagi dirinya. Di sebuah perbukitan yang dingin dan hijau di Semarang, Sutiyoso dilahirkan pada 6 Desember 1944. Semilir angin dan hijaunya dedaunan yang enak dipandang menjadi penyerta kelahiran seorang anak yang kelak akan menjadi kebanggaan keluarga. Ayahnya Tjitrohardjo dan sang bunda Sumini mem-

berikannya nama yang mengandung kata “Yoso” yang bermakna memiliki atau kaya.

Nama adalah doa yang tersembul dari lubuk hati. Sebagaimana namanya, tersembul secercah harapan kedua orang tuanya supaya anaknya menjadi orang *sugih* nan sukses. Beruntung Sutyoso dilahirkan dari keluarga yang tergolong berada dan dihormati sehingga hidupnya tak terlampaui sulit sekalipun keadaan republik saat itu sedang transisi dari kemerdekaan.

Sutyoso ialah anak keenam dari delapan bersaudara. Namanya identik dengan watak yang keras, tegas, dan penuh kedisiplinan. Segala tabiatnya itu sesungguhnya diturunkan dari ayahnya yang memang menginginkan anak-anaknya mandiri sejak dini untuk menggapai kesuksesan masa depannya. Profesi ayahnya yang seorang kepala sekolah membuatnya sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Barangkali ia tak mau nama baiknya tercoreng oleh nilai minim atau kelakuan buruk anak-anaknya.

Kalau saja ada di antara anak-anaknya yang mendapatkan nilai rapor merah, maka sang ayah tak segan untuk menghukumnya dengan harapan menciptakan efek jera. Namun, dasarnya Sutyoso bandel, maka segala titah orang tuanya itu seolah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ia berlaku semaunya. Seolah yang paling benar dirinya. Dampaknya, berbagai hukumanpun kerap diberlakukan mulai dari pengurangan jatah makan, dikurung di dalam kamar, dipukul atau diikat di pohon besar.

Bukan Sutyoso namanya kalau jera oleh penghukuman. Naluri kebegalannya makin menjadi-jadi. Makin bertambah usianya, kenakalannya semakin merajalela. Tak terhitung perkelahian yang pernah dilakukannya. Hobinya menantang orang untuk duel. Nyalinya memang besar dan sekalipun kalah tak ada kapok-kapoknya. Bahkan, bak petinju profesional untuk memenangi setiap duel dengan lawan tandingnya, ia kerap mengasah kemampuan kelahnya dengan memukul-mukul samsak yang ia buatnya sendiri menggunakan karung yang diisi penuh pasir.

Saking bandelnya, kakaknya menjulukinya Bendol. Nama Bendol konon lebih terkenal ketimbang nama aslinya sendiri ketika ia masih berdinasi di pasukan elite militer, Kopassus. Sifatnya yang suka berkelahi dan nyalinya yang besar menopang kariernya di kemiliteran yang memang membutuhkan segala hal yang dipunyai seorang Sutyoso. Karenanya, mungkin Tuhan sudah menyiapkan skenario jitu untuk kegemilangan kariernya yang sejatinya membutuhkan mental dan fisik yang kuat.

Masa kecilnya dilalui dengan aneka kebandelan yang diciptakannya. Segala penghukuman yang diterimanya tak lantas membuatnya jera. Masih untung pendidikannya tak terganggu. Dari sekolah dasar sampai lulus sekolah menengah atas (SMA) ia selesaikan dengan nilai lumayan baik sehingga dapat menjadi bekalnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, seperti harapan ibunya. Sumini memang sangat mengharapkan anak kesayangannya itu menjadi insinyur atau dokter, dua profesi yang dianggap mentereng sepanjang zaman.

Semakin beranjak remaja, ada sedikit perubahan pola tingkah laku dan pemikirannya. Sutiyoso berusaha menyenangkan hati dan harapan ibundanya. Setelah lulus SMA, di tahun 1964 ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Tujuh Belas Agustus di Semarang dengan mengambil Fakultas Teknik. Dia mencoba untuk menggeluti segala hal yang berkaitan dengan teknik sebagai risiko pilihannya. Namun, karena memang dasarnya tak punya hati di teknik sehingga kuliahnya pun tak serius (*Sandjojo*, 2008)

Minat yang sesungguhnya ialah berkarier di militer sebagaimana kakaknya yang juga menjadi anggota TNI. Kebengalan dan nyalinya yang besar memang membuatnya pantas masuk ke jajaran pasukan pembela tanah air. Asanya berbaju loreng-loreng, pakaian kebesaran pasukan bersenjata yang memiliki tanggung jawab mempertahankan negara. Ia merasa bahwa dunianya memang di militer, bukan di kampus sebagai mahasiswa teknik.

Sayangnya, cita-citanya tak sejalan dengan keinginan bundanya. Sumini khawatir jika terlalu banyak anak-anaknya yang masuk dunia militer, pengurangan jumlah anggota keluarganya akan cepat. Betatapun, hati seorang ibu menginginkan anak-anaknya menjalani kehidupan normal yang berjauhan dari maut, bukan sebaliknya malah mendekatinya. Dalam pikiran Sumini, terlebih setelah mengetahui banyak pejuang Indonesia yang disiksa pasukan Belanda dan Jepang di masa perjuangan, menjadi seorang tentara ialah profesi yang akrab dengan siksaan dan kematian.

Kondisi yang membuatnya terombang-ambing di antara cita-cita masa kecilnya yang bentrok dengan keinginan ibunya membuat rasa frustrasinya menggelora. Bukannya sibuk belajar sebagaimana mahasiswa lainnya di tahun awal perkuliahan, sebaliknya, waktunya banyak dihabiskan untuk mengekspresikan kegalauan jiwanya. Sutiyoso pun sering terlibat dalam perkelahian.

Karier Kemiliteran

Sampai akhirnya, menyadari kalau lingkungannya bukan di Universitas 17 Agustus Semarang, setahun pascamendaftar sebagai anak kuliah ia pun nekad mendaftar di Akademi Militer Nasional (AMN) yang berpusat di Lembah Tidar, Magelang (*id. wikipedia. org*, 2013). Dengan serius, ia menjalani serangkaian tes masuk angkatan bersenjata. Bahkan dia harus pergi ke Lembang, Bandung, untuk mengikuti tes lanjutan yang memang ketat. Semua rangkaian tes tersebut tanpa sepengetahuan kedua orang tua, terutama ibunya.

Tuhan akhirnya mengabulkan keinginannya. Sutyoso dinyatakan lulus dalam serangkaian tes tersebut dan diterima menjadi Prajurit Taruna (Pratar). Dia segera memberitahukan kelulusannya tersebut kepada ayah dan ibunya. Keduanya hadir dalam pelantikannya sebagai Taruna. Tak kuasa dengan si bedol yang ternyata memiliki misi lain dibalik kebangalan dan “perlawanannya” selama ini, Sumini lantas menitikkan air mata. Air matanya menandakan keridhoan seorang ibu kepada anaknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kehidupan baru sebagai prajurit militer berada di depan mata. Sutyoso mengisi hari-harinya dengan latihan dan latihan. Ia begitu semangat mengikuti kurikulum kemiliteran karena memang sesuai dengan bakat dan keinginannya. Hidupnya ada di militer. Hatinya ada di korps pembela tanah air. Dan kebanggaannya ialah ketika berseragam loreng sambil mukanya diolesi tinta hijau yang warnanya serupa dengan dedaunan untuk mengaburkannya dari musuh.

AMN ibarat kawah candradimuka untuk membentuk jiwa dan pikirannya. Rasa nasionalismenya digembleng supaya menjadikannya prajurit terbaik dan memiliki kecintaan terhadap tanah airnya yang menyala-nyala. Empat tahun dia habiskan untuk menempa diri dengan segala bentuk latihan. Sampai akhirnya di tahun 1968 ia berhasil lulus menjadi Perwira Muda TNI AD dengan pangkatnya Letnan Dua (Letda). Setelah kelulusannya, ia diberikan beberapa alternatif kesatuan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sutyoso pun memilih masuk dalam kesatuan tempur yang notabene selalu berada di garis terdepan dalam menghalau musuh. Pilihan kesatuan tersebut tentu saja membuktikan kalau dirinya memang benar-benar

bernyali dan selalu siap tempur. Tak ada ketakutan sedikitpun untuk berhadap-hadapan dengan musuh. Setahun berada di pasukan Infanteri, kemudian ia masuk ke dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang merupakan pasukan elite di Angkatan Darat.

Di Kopassus keahlian tempurnya semakin terlatih. Bahkan ia menonjol sebagai perwira operasi militer sehingga menjadikannya sering dikirim ke berbagai daerah operasi. Ditambah lagi dengan statusnya yang masih lajang menjadikan atasan-atasannya favorit menempatkannya dalam jajaran terdepan untuk segera dikirim ke medan tempur. Beberapa operasi militer yang pernah diikutinya seperti Operasi PGRS (1969), Operasi Flamboyan (1975), Operasi Seroja di Tim-Tim (1975) dan Operasi Aceh Merdeka (1978).

Banyaknya operasi militer yang pernah diikutinya membuat pengalaman perangnya semakin berlipat. Kariernya semakin mantap. Pada 1974 ketika usianya 30 tahun pangkatnya sudah Kapten. Usia yang relatif muda untuk mendapatkan pangkat yang mentereng. Kebetulan momen pengangkatannya sebagai Kapten tak berjauhan dengan pernikahannya dengan seorang gadis Jawa asli. Namanya Setyorini, seorang gadis sederhana yang telah meluluhkan hatinya. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai dua orang puteri, yakni Yessy Riana Diliyanti dan Renny Yosnita Ariyanti.



Sutiyoso kian terpacu untuk bekerja secara profesional menunjukkan kemampuan terbaik bagi kebanggaan keluarga dan negara. Tak heran kariernya terus melesat bak roket. 25 tahun berada di pasukan, baik itu ketika di Kopassus maupun di Kostrad, Sutiyoso kemudian dipindahkan ke bagian teritorial. Tahun 1993 ia menjabat sebagai Komandan Korem 061/Suryakencana Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana ketika sedang berkarier di pasukan, di tugasnya yang baru Sutiyoso kembali menunjukkan performanya.

Ia dianggap sukses dalam menjalankan tugas. Tahun 1994, Istana Bogor menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin dunia yang tergabung dalam Forum APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik). Jabatannya sebagai Komandan Korem membuat tanggung jawab keamanan penyelenggaraan acara tersebut berada di pundaknya. Dan Sutiyoso berhasil menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Forum tersebut berhasil digelar dengan tanpa adanya gangguan yang berarti berkat kesigapan ABRI di bawah komandonya.

Capaian prestasinya berlanjut ketika ia berhasil menyelesaikan konflik pertanahan di Rancamaya Bogor. Siapapun tentu sepakat kalau konflik tanah selalu mengurus energi dan pikiran karena rumitnya mempersatukan pihak-pihak yang bertikai. Konflik di Rancamaya yang telah terjadi sejak tahun 1989 silam melibatkan banyak pihak sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Namun dengan tangan dingin Sutiyoso atau si Bendol, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan konstruktif tanpa konflik berkepanjangan.

Karena itulah, ditambah dengan beberapa catatan prestasi lainnya, Sutiyoso kemudian mendapatkan kenaikan jabatan menjadi Kepala Staf Kodam Jaya dengan pangkat di pundaknya Brigadir Jenderal (Brigjen). Setahun kemudian jabatan yang lebih tinggi menanti, namun sejalan dengan itu jelas tantangannya juga semakin kompleks. Tahun 1996 ia mendapatkan amanat untuk menjadi Pangdam Jaya. Jabatan yang prestisius namun sarat dengan ujian yang tak ringan.

Tahun 1996 ketika ia menjabat Pangdam Jaya ialah menjelang tahun politik yang hiruk-pikuk. Meskipun Pemilu kala itu hanya diikuti tiga partai saja—Golkar, PDI, dan PPP—namun potensi konflik sangat terbuka. Misalnya saja, di masa kepemimpinannya pernah terjadi benturan antara massa

Golkar dan PPP yang hampir saja meluas menjadi konflik berbau SARA. Ketika itu, kejadiannya di Cawang, Jakarta Timur. Dengan sigap, Sutiyoso segera menengahi dan berhasil meredam konflik yang berpotensi meluas dan tajam.

Dengan berbagai pendekatan hangat yang dilakukannya untuk menengahi konflik membuat sosoknya banyak disorot media. Sutiyoso memang jarang senyum sehingga mengukuhkan pandangan bahwa dirinya angkuh. Namun, sekali lagi, itu hanya “kemasan” luarnya saja karena sesungguhnya hatinya lembut. Ia tipikal petinggi militer yang suka mengakomodasi banyak kepentingan pelbagai pihak. Sutiyoso juga termasuk negosiator ulung yang mampu meramu benih-benih kebencian menjadi cinta.

Tak jarang semasa menjadi Pangdam Jaya, dirinya mengundang berbagai kalangan dari LSM, tokoh muda, tokoh betawi, ulama, dan lainnya untuk bertandang ke rumahnya sekadar mengakrabkan diri. Dengan penuh kehangatan dan keakraban dia tampak rileks membicarakan pelbagai hal yang terjadi. Sebuah sikap yang pada akhirnya menjadi modal penting untuknya dalam mengabdikan di luar jalur kemiliteran.

Dari Pemimpin Militer ke Pemimpin Sipil

Di dalam buku biografi Sutiyoso, *The Field General*, diceritakan bahwa suatu hari, sekitar Agustus 1997, kurang dari tiga bulan setelah Pemilu 1997, Pangdam Jaya mendapat panggilan dari Panglima ABRI, Jenreal TNI Feisal Tanjung. Sutiyoso dipanggil menghadap pagi hari esoknya, pukul 06.30 tepat. “Harap datang tepat waktu, tak boleh terlambat karena jam 07.00, Pangab akan menerima tamu Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan”, kata Ajudan Pangab mengingatkan.

Bagi Sutiyoso, panggilan itu terasa amat mendadak. Lagi pula tidak ada kejelasan untuk apa dia dipanggil. Sepanjang malam, dia mencoba merenungkan sendiri. Apakah ada masalah? Dijawabnya sendiri, rasanya tidak ada. Sebagai Pangdam, dia merasa telah bekerja secara total. Untuk apa Pangab memanggilnya?

Sutiyoso pun mencoba merenungkan dengan berpikir positif. Barangkali, ada penugasan baru. Apabila memang dalam rangka penugasan baru, sebagai seorang perwira tinggi yang berasal dan berpengalaman dalam

pasukan khusus (elit) Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI, Sutyoso masih berharap mendapat penugasan promosi dalam jenjang karir militernya. Tetapi, ia membatin: Jabatan apa? Sebab semua jabatan militer berpangkat Letnan Jenderal (bintang tiga) seperti Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sudah terisi semua. Tetapi mungkin, ada sedikit perubahan pikir Sutyoso.

Pagi harinyam sebelum pukul 06.30, Sutyoso sudah tiba di Mabes TNI ABRI di Jl. Medan Merdeka Barat. Kemudian, tepat pukul 06.30, Sutyoso dipersilakan masuk ke ruang kerja Pangab. “Sudah tahu kenapa kamu dipanggil?” tanya Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, setelah Sutyoso dipersilakan duduk. “Belum tahu, Pak”, jawab Sutyoso.

“Ya sudah, kamu ditugaskan menggantikan Soerjadi”, kata Pengab tanpa penjelasan. Sejenak Sutyoso diam. Sutyoso agak ragu dan bimbang. Rasa ragu dan bimbang itu muncul karena Sutyoso belum paham siapa Soerjadi yang dimaksud Feisal Tanjung. Orang yang bernama Soerjadi ada banyak. Ada Soerjadi Soedirdja, Gubernur DKI Jakarta. Ada juga Soerjadi Ketua Umum PDI, dan lain sebagainya. Tidak mau larut dalam kebimbangan, Sutyoso pun bertanya: “Seorjadi siapa, Pak?”.

“Itu, Soerjadi Soedirdja, Gubernur DKI Jakarta”, jawab Fesial Tanjung. Sutyoso tertegun sejenak. Rasa kecewa di lubuk hati terdalamnya muncul refleksi. Sebab, sebelumnya sama sekali dia tidak pernah terpikir dan tertarik menjadi gubernur, walau Gubernur DKI Jakarta sekalipun yang merupakan jabatan gubernur paling “bergengsi” di Indonesia.

Akhirnya, kedekatannya dengan berbagai pihak membuat jalannya lempang untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Setelah menuntaskan kariernya di kemiliteran dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen) bintang tiga, ia mantap untuk menjadi Gubernur DKI Jaya. Sebagian besar rakyat Jakarta memercayakan kotanya kepada Sutyoso untuk menggantikan Soerjadi Soedirja. Pada periode pertamanya, Sutyoso menjabat dari 6 Oktober 1997 sampai tahun 2002.

Sutyoso pulalah yang tercatat dalam sejarah, seorang Gubernur DKI Jakarta yang selama menjabat mengalami lima kali pergantian presiden, mulai dari Presiden Soeharto, B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden SBY.

Berkarier menjadi pemimpin publik bukanlah perkara gampang. Terlebih di masa jabatan pertamanya, Sutiyoso sudah dihadapkan pada beragam masalah menjelang lengsernya Orde Baru. Tentu menjadi pejabat publik sangatlah berbeda dengan ketika dirinya berada di dalam tubuh militer yang satu komando. Menjadi gubernur yang mengatur jutaan warga Jakarta memerlukan pemikiran dan sikap yang lebih terukur dan sistematis. Salah dalam melangkah maka akan mengorbankan masyarakatnya.

Tahun 1998 merupakan puncak kerusuhan yang pada akhirnya menumbangkan rezim otoriter. Posisinya sebagai Gubernur Ibukota di mana segala perangkat kenegaraan berada di wilayahnya, menjadikannya harus memeras otak untuk penyelesaian yang kondusif. Jakarta yang ru-suh ditambah dengan krisis moneter yang tengah melanda sehingga kehidupan rakyat berada di tubir kehancuran menjadi beban terberatnya dalam memimpin ibukota. Kerusuhan masif yang kala itu terjadi konon menimbulkan kerugian yang mencapai Rp 15 Triliun sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta waktu itu hanya Rp 1 Triliun.

Ketimpangan tersebut membuatnya berada dalam posisi sulit. Namun, bukan Sutiyoso namanya kalau mengalah pada keadaan. Ia sadar bahwa poin utamanya ialah masalah keamanan. Kondisi ibukota yang kacau ba-lau tentu akan berdampak pada segala sektor, terutama perekonomian. Maka pemulihan keamanan merupakan kunci utamanya. Sutiyoso pun segera menciptakan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keamanan di Jakarta.

Salah satu cara untuk menciptakan keamanan ialah dengan menerapkan *law enforcement* atau penegakan hukum yang konkrit. Orang-orang yang disangka terlibat, provokator, dan lainnya ditangkap dan diberikan penghukuman yang setimpal. Pasukan keamanan disiagakan untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi tindakan anarkisme susulan. Dengan begitu, secara berangsur-angsur keamanan dan ketertiban di Jakarta kembali ke sedia kala. Terlebih ketika Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dihadapan anggota DPR/ MPR, para demonstiran yang menjadi kekuatan ekstraparlementer bersorak kegirangan tanda mereka puas.

Persembahan untuk Megapolitan Jakarta

Setelah keamanan mulai pulih, maka geliat perekonomian dan perdaganganpun mulai terlihat. Secara bertahap PAD Jakarta berhasil digenjut. Peningkatan PAD tersebut tentu saja dianggap sebagai prestasi gemilang karena pendapatan daerah merupakan salah satu barometer untuk mengukur kesuksesan seorang kepala daerah. Dengan peningkatan PAD tersebut memungkinkan baginya untuk membuat banyak terobosan guna menjadikan Jakarta yang lebih maju.

Dan yang mungkin paling diingat publik di masa akhir pemerintahannya di periode yang pertama ialah ketika ia berniat untuk memagari Monumen Nasional (Monas). Pro dan kontra berkembang di masyarakat namun Bang Yos—sapaannya—bergeming dengan keputusannya. Alasannya sederhana, Monas harus dipagari untuk melindunginya dari oknum-oknum pedagang kaki lima (PKL) tidak bertanggungjawab yang selalu mengotori kawasan tersebut sehingga mengurangi keindahannya sebagai peninggalan bersejarah.

Bukan hanya melindunginya dari para PKL yang kerap mengotori sekitar kawasannya, pun di malam hari sering terjadi tindakan kriminal. Banyak preman yang menguasai blok-blok di sekitar Monas dan seringkali memalak para pengunjung. Alasan yang rasional dan tentu saja wajib didukung. Namun di era demokrasi yang ketika itu masyarakat masih diliputi euforia reformasi setelah terbebas dari rezim totalitarianisme Orde Baru wajar kalau setiap kebijakan yang dikeluarkan pemimpin daerah atau nasional dikritisi.

Alasan mereka yang menolak bahwa kalau Monas dipagari maka akan membuatnya ada jarak dengan rakyatnya. Seharusnya sebuah monumen bersejarah dan dijunjung sakralitasnya tidak berjarak dengan masyarakat. Namun keputusan pemagaran tersebut telah bulat. APBD DKI Jakarta akhirnya digelontorkan untuk mendukung proses pemagaran. Uang sebesar Rp 9 miliar digelontorkan.

Bang Yos sekali lagi terpilih untuk periode yang keduanya. Ia kembali memegang tampuk kepemimpinan di DKI Jakarta era 2002 – 2007. Tentu saja masih banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang digulirkannya. Pada tahun 2004 misalnya, Bang Yos mengimplementasikan mimpinya untuk menjalankan Bus TransJakarta. Menurutnya, untuk mengurai kema-



politik.news.viva.co.id

cetan di Jakarta, seperti halnya digunakan di negara-negara maju, moda transportasi massal harus dikedepankan. Seperti sudah ditebak, pro dan kontrapun kembali terjadi.

Pihak yang pro mengatakan bahwa dengan adanya TransJakarta maka orang-orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi karena faktor kenyamanan dan keamanan yang telah menyebabkan kemacetan akan beralih ke TransJakarta. Kemacetan karena berkurangnya moda transportasi individual di jalanan, secara perlahan akan sedikit teratasi.

Sedangkan bagi mereka yang menolak terutama datang dari kalangan pengguna kendaraan pribadi yang merasa jalanan akan semakin sempit karena ruas jalan yang sudah ada harus dibagi dengan jalan khusus (*busway*). Namun, lagi-lagi Bang Yos tak bergeming. Iapun tetap melanjutkan proyek TransJakarta di tengah pro dan kontra yang dihadapinya. Setelah sukses dengan pembangunan Busway Koridor I, koridor-koridor yang lain juga segera dikembangkan.

Di jamannya juga terjadi pelarangan merokok di tempat-tempat umum. Tepatnya terjadi pada awal tahun 2006. Dasar pemikirannya bahwa perokok aktif yang melakukannya di tempat umum dapat merugikan orang lain (perokok pasif) yang dapat mengancam kesehatannya. Larangan merokok

tersebut diberlakukan di beberapa tempat seperti terminal, halte, dan mall. Sayangnya peringatan hanyalah peringatan yang bak macan ompong. Karena pada praksisnya masih banyak orang yang merokok di tempat umum tanpa mengindahkan peraturan super jelas tersebut.

Bang Yos seakan tak pernah kehabisan ide untuk memajukan Jakarta dan mengatur perilaku publiknya. Sadar bahwa kemacetan yang semakin parah juga disebabkan oleh perilaku pengendara roda dua, dirinya segera memberlakukan yang mengatur para pengendara motor supaya menjalan-kan kendaraannya di ruas sebelah kiri jalan. Tidak boleh ada pengendara motor yang mengambil lajur di tengah atau sebelah kanan. Dasar hukum-nya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 51 Ayat 1 Tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Melaju Sebelah Kiri.

Sanksi tilang pun tak segan diberlakukan kepada setiap pengendara motor yang menentang kebijakan tersebut. Dan setelah diujicobakan di beberapa lajur di ruas Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan, Jalan S. Parman, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Letjen Suprapro, angka kecelakaan pun menurun.

Bang Yos juga termasuk gubernur yang sangat *concern* dalam memer-hatikan sektor pendidikan. Ia sangat sadar bahwa kunci utama pemben-tukan manusia di Jakarta pada khususnya, dan Indonesia secara umum, ialah pendidikan. Pendidikan merupakan modal terpenting untuk mem-bentuk karakter dan sisi intelektualitas seseorang sehingga mudah ber-adaptasi dengan zaman. Selain itu, seseorang yang mendapatkan pendidik-an bagus akan sangat mudah untuk diajaknya maju.

Berangkat dari kesadaran itulah, Bang Yos mencetuskan program wajib belajar 9 tahun sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Yang patut diapresiasi dari sikapnya, bahwa bukan hanya mewajibkan namun juga menggratiskan sehingga setiap anak entah mampu atau miskin tetap bisa bersekolah sampai tingkat SMP. Di samping itu, Bang Yos juga yang menggagas pembangunan area Jakarta Islamic Centre di bekas tempat pelacuran Kramat Tunggak di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dimasa kepemimpinannya, untuk mempercantik ibukota, Bang Yos berinisatif untuk membangun beberapa taman terbuka hijau dan monu-men. Taman Menteng dan patung Jenderal Sudirman yang berdiri gagah menghadap ke Istana Presiden atau Patung Diponegoro yang berada di

depan Gedung Bappenas merupakan salah satu bukti Sutiyoso menyukai keindahan kota dengan segala detilnya. Tak heran kalau dengan penataan yang sedemikian rupa membuat beberapa kali DKI Jakarta menyabet penghargaan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Di luar itu, Bang Yos juga peduli dengan perkembangan dunia olahraga. Karenanya banyak posisi di organisasi keolahragaan yang pernah didudukinya. Misalnya saja ia pernah menjadi Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin), Ketua Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI), Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi), dan juga menjadi pembina sebuah klub sepakbola ternama, Persija Jakarta.

Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, yang paling dikenal bersamaan dengan Sutiyoso dan Joko Widodo saat ini, mengatakan bahwa, "Sutiyoso mewujudkan impian saya". Wajah kota Jakarta yang kita lihat dan saksikan saat ini tentu bukan lagi wajah yang hadir di masa kepemimpinan Ali Sadikin. Berbagai persoalan hadir sebagai dampak perkembangan masyarakat yang semakin majemuk dan masalahnya semakin kompleks. Hal tersebut juga ditopang oleh dinamika globalisasi yang melanda dunia pada umumnya, dan sedikit banyak turut mempengaruhi dinamika Kota Jakarta.

"Kesetiaanya untuk memperjuangkan konsep megapolitan membuktikan bahwa ia adalah seorang pelayan bagi rakyatnya", ungkap Ali Sadikin. Megapolitan memerlukan public service yang prima untuk menata Jakarta sejajar dengan kota megapolitan dunia dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, gagasan megapolitan bukanlah sebuah arogansi kekuasaan ibu kota negara, yang hendak 'mencaplok' daerah lain di sekitarnya. Masing-masing pemerintah daerah di wilayahnya tetap berjalan sendiri-sendiri, namun masterplan pembangunan harus menyatu dengan wilayah Jabodetabek. Sutiyoso sebagai gubernur sudah membuktikan bahwa peran Jabodetabek sebagai megapolitan haruslah saling terhubung satu sama lain.

Begitulah berbagai kebijakan Bang Yos yang ia jalankannya untuk menata dan memperbaiki keadaan dan citra ibukota yang selama ini identik dengan banjir, kemacetan, kumuh dan seterusnya. Ia pun berjanji—meskipun sampai digantikan oleh wakilnya Fauzi Bowo tak jua terlaksana—akan menuntaskan persoalan macet dan banjir di ibukota. Namun apapun

hasilnya, bukti kesungguhan dan ketegasannya dalam menuntaskan segala persoalan di ibukota telah ia lakukan dengan penuh profesionalitas dan kesigapan.

Dari kerja kerasnya tersebut, beberapa penghargaanpun pernah diraihnya. Diantaranya 2006 *Asian Air Quality Management Champion Award* dari lembaga Internasional Clear Air Initiative for Asian Cities (CAI) yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI. Penghargaan tersebut bukanlah tanpa sebab. Ia dinilai berhasil dalam gagasannya membangun *Bus Rapid Transit* (BRT) terbesar di Asia melalui Penerbitan Perda No 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (*id. wikipedia.org*, 2013).

Bang Yos juga pernah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk *School of Honour Award* karena dianggap telah berhasil dalam mengembangkan permukiman kumuh dan membangun infrastruktur kota kosmopolitan. Penghargaan tersebut diterimanya pada Oktober 2005.

Indonesia: Garapan Pengabdian Berikutnya

Pada Pemilu 2009, Sutiyoso banyak diberitakan media sebagai calon alternatif yang akan maju sebagai calon presiden RI. Bersama dengan Presiden SBY, nama Sutiyoso muncul dalam bursa calon presiden dari kalangan militer. Sutiyoso dinilai memiliki kapabilitas sebagai pemimpin yang tegas. Rakyat Indonesia membutuhkan presiden yang tegas. Rakyat sudah lelah dengan pemimpin yang “lembek”. Sosok tegas melekat pada pribadi Sutiyoso.

Menurut Mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno, Sutiyoso memnuhi syarat sebagai pemimpin. Sutiyoso adalah orang yang mampu menerapkan kepemimpinannya. Banyak karya yang telah diukir Sutiyoso selama memimpin DKI Jakarta. Hal tersebut dirasakan masyarakat kecil. Apabila selama Sutiyoso memimpin terdapat banyak kontroversi yang mneyertainya, hal itu merupakan hal yang wajar. Tidak semua kebijakan Pemda DKI Jakarta diterima semua orang. Selalu ada pro dan kontra. Sehingga apabila dalam setiap kebijakan kemdian terdapat kontroversi di masyarakat, hal itu menjadi hal biasa. Siapa pun orangnya tidak akan mampu memuaskan semuanya.



Beberapa prestasinya bisa kita lihat. Di bidang pendidikan, Sutiyoso bukan saja menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan guru. Di bidang kesehatan, asuransi kesehatan untuk keluarga miskin di Jakarta tidak pernah luput dari perhatiannya. Begitu pula dengan sektor transportasi, busway adalah terobosan untuk menjawab kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Selepas menuntaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tak lama berselang ia mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2009. Baginya, pengabdianya masih terasa kurang dengan hanya terbatas pada lokus Jakarta saja. Pengabdianya ingin diperluas (nasionasional) sehingga mampu mengimplementasikan segala gagasan dan pemikirannya tentang Indonesia yang lebih berkemajuan. Intinya, Bang Yos ingin memperpanjang tangan pengabdianya menjangkau ke berbagai wilayah di tanah air dengan menjadi RI-1.

Ia sadar bahwa memasuki arena kontestasi di Pilpres 2009 mengharuskannya menceburkan diri dalam dunia politik praktis yang penuh intrik. Bagi banyak orang, politik itu licik dan picik. Dalam politik tak ada romantisme atau pertemanan abadi namun yang ada kepentingan abadi. Logika berpolitik, sesungguhnya, bertentangan dengan filosofi hidupnya yang tak tegaan dan merangkul sebanyak mungkin orang. Namun apa boleh buat, demi rakyat, sekalipun filosofi hidupnya bertentangan dengan logika politik tetap harus ia tempuh.

Sayang karena satu dua hal Bang Yos gagal mencalonkan diri pada Pemilu 2009 silam. Iapun harus mengubur impiannya untuk melenggang ke Istana paling tidak untuk sementara waktu.

Kini menjelang Pemilu 2014, dirinya kembali bersiap untuk mencoba peruntungan menjadi presiden lewat kontestasi konstitusional. Dengan kapal politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Bang Yos siap tempur untuk dicalonkan menjadi capres. Berbekal segudang pengalaman yang dimilikinya, baik ketika menjadi tentara yang banyak ditugasi di medan tempur maupun sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode membuatnya percaya diri bisa bersaing dengan calon lainnya yang berkualifikasi tak kalah hebatnya.

Namun tentu, modal pengalaman dan dukungan partai saja belum lah cukup untuk memenangkan pertarungan di Pemilu 2014. Dalam konteks demokrasi elektoral, faktor yang paling menentukan ialah elektabilitas seorang tokoh bukan yang lain. Pertanyaannya, seberapa besarkah peluang Bang Yos untuk memenangi pertarungan kursi kepresidenan?

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Berani sejak kecil. Hal itulah yang membuat Sutiyo so sangat cocok masuk dunia militer. Tidak heran ketika karirnya moncer di militer karena passion yang kuat. Tahap demi tahap proses kepangkatan diraihnya, hingga menjadi Pangdam Jaya, yang tepat berada di ibukota negara yang sentralistik di masa-masa akhir rezim Orde Baru.

Soerang pemimpin militer pada hakikatnya pasti tegas. Itulah yang nampak dari pribadi Sutiyo so yang jarang senyum. Ada pepatah yang mengatakan, “jangan lihat buku dari covernya”. Pepatah itu cocok bagi Sutiyo so yang mampu mengelola berbagai konflik yang pernah ia tangani. Kepemimpinan dalam arus konflik membutuhkan cinta, kasih, kecerdasan, dan kreatifitas dalam pengelolaanya. Sutiyo so berhasil mengelola konflik, sebut saja konflik tanah di Rancamaya, Bogor, dan konflik-konflik yang berbau SARA dan pengerahan massa politik menjelang turunya Presiden Soeharto. Sutiyo so bukan orang main-main saat konflik meletus, ia adalah pemimpin militer di daerah tempat konflik berlangsung. Begitupun dengan

konflik menjelang runtuhnya rezim Orde Baru, Sutiyoso adalah pemimpin militer yang kemudian dilanjutkan sebagai gubernur sipil.

Apa sebenarnya yang membuat Sutiyoso dapat melewati konflik dan mengelolanya dengan baik? Resepnya adalah kemampuan Sutiyoso yang mau mendengar. Dalam bahasa teori ilmu politik adalah memiliki nilai humanisme dan partisipatif. Dua nilai ini adalah fondasi dasar dari demokrasi, yang memang telah bergulir sejak akhir 1990-an hingga hari ini.

Tantangan Sutiyoso sebagai gubernur pada waktu itu tidaklah mudah. Sebagai gubernur di daerah paling sentral, bukan hanya sebagai ibukota, tetapi juga paham sentralisme itu sendiri, menjadi penting dalam penegakan hukum di tengah kerusuhan politik yang dibumbui isu SARA yang mengerikan. Kemampuan mau mendengar, sekaligus tegas adalah keunggulan Sutiyoso dalam memimpin DKI Jakarta selama dua periode. Sisi modalitas personal yang dimilikinya tersebut sangat berarti bagi dirinya untuk maju sebagai capres pada 2014 ini.

Dari sisi modalitas sumber daya massa, Sutiyoso yang aktif di berbagai organisasi ini memiliki peluang yang signifikan dalam menggerakkan massa pendukung. Apalagi ia pernah menjabat di dinas kemiliteran, sesungguhnya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Sedangkan dari sisi jejaring, kedekatan Sutiyoso dalam gelanggang politik DKI Jakarta, yang juga mau tidak mau membawanya masuk dalam gelanggang politik nasional, menjadikannya seorang yang mempunyai jaringan yang luas di kalangan elit masyarakat Indonesia.

Lolosnya PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, menjadi momentum positif bagi posisi politik Sutiyoso. Artinya, keinginan untuk berkontribusi lebih bagi negeri ini bukan lagi sekedar hasrat tanpa syarat. Ada dua hal yang menjadi modal awalsekaligus momentum politik yang dapat membuka jalan bagi Sutiyoso menapaki Pemilu 2014. *Pertama*, terpilihnya Sutiyoso sebagai Ketua Umum PKPI menggantikan Meutia Hatta untuk periode 2010-2015, merupakan sebetulnya kepercayaan para kader partai dengan kemampuan dan kualitas kepemimpinan yang dimiliki Sutiyoso.

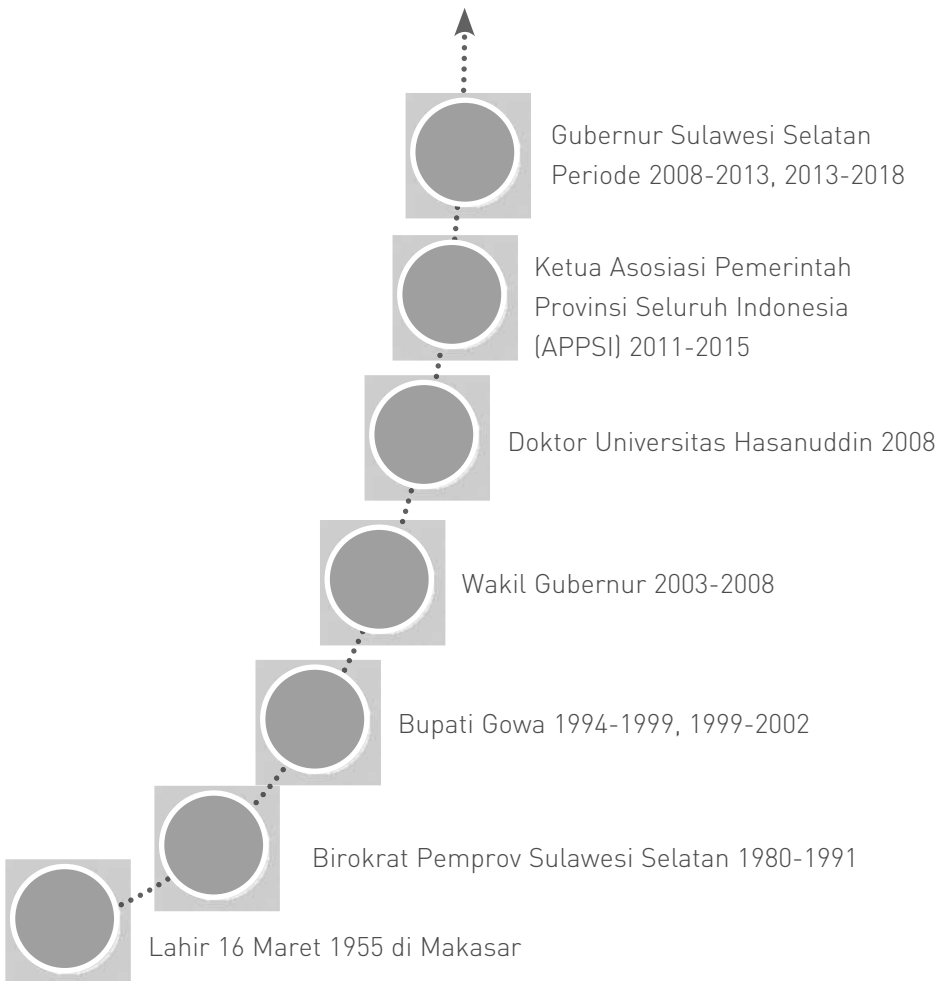
Kedua, rekam jejak (*track record*) kepemimpinan Sutiyoso selama ini di militer, bidang olahraga maupun masyarakat, hingga akhirnya menjadi gubernur selama dua periode, menjadi kekuatan terbaik untuk meraih

dukungan publik. Keterlibatan secara moril dalam menyikapi problem-problem yang dihadapi oleh bangsa dan negara secara konsisten dapat memberikan pembelajaran yang baik bagi kehidupan berpolitik di Tanah Air.

Meski demikian, dibanding para calon presiden lainnya, tingkat elektabilitas Sutiyoso masih cukup rendah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Sutiyoso belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Selain itu, visi keindonesiaan Sutiyoso juga belum terlihat dan terdengar di masyarakat. Itulah tantangan yang harus segera dijawab Sutiyoso.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Pemimpin Potensial





luwuraya.net

Rekam jejak kepemimpinannya cukup panjang di birokrasi Pemerintah Sulawesi Selatan. Mulai dari lurah, camat, bupati, KaBiro, Sekwilkab, wakil gubernur, hingga akhirnya sekarang terpilih untuk kedua kalinya sebagai Gubernur periode 2012-2018. Selama ia memimpin di tingkat kelurahan maupun kecamatan, ia diberi penghargaan oleh pemerintah sebagai lurah dan camat teladan nasional. Konsistensinya berprestasi ini berlanjut selama menjadi gubernur, sudah ratusan penghargaan ia peroleh, di antaranya, bintang “Mahaputra Utama”, “Pataka Parasarnya Purna Karya Nugraha” selama tiga tahun berturut-turut yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, termasuk realisasi pendidika dan kesehatan gratis dan untuk pertama kalinya juga selama tiga tahun berturut-turut pula meraih “Adikarya Pangan Nusantara”, yakni penghargaan yang didedikasikan kepada pemerintah yang memiliki manajemen ketahanan pangan yang baik. Saat ini, ia juga diberi tanggung jawab sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia periode 2011-2015.

Nama Syahrul Yasin Limpo—selanjutnya disebut Syahrul—mencuat belakangan ini terutama setelah memenangkan Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) 2013 lalu. Gubernur Sulsel yang gemar mendulang prestasi ini terus dipantau media dan diberitakan. Namanya juga kerap mengisi hasil survei

meskipun tidak menjadi yang teratas. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak yang menggadang-gadangnya sebagai pemimpin nasional. Syahrul sering disejajarkan dengan Joko Widodo dan Tri Risma Harini yang dianggap sebagai pemimpin daerah panutan saat *city mayor foundation* tahun 2012 menyebutnya sebagai salah satu kandidat kepala daerah terbaik dunia (kompas.com, 2012)

Banyak penghargaan yang telah diraihnyanya dalam rangka memajukan dan mensejahterakan Sulsel. Salah satu yang paling prestisius adalah anugerah Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2013 (koran-sindo.com, 2013). Penghargaan APN dari pemerintah pusat tersebut sudah diraihnyanya 3 tahun berturut-turut. Supremasi tertinggi di bidang pangan ini memang laik untuk didapatkan Syahrul mengingat dedikasi dan pemikirannya dalam mengembangkan pertanian di daerahnya dan menjadikan Sulselsl sebagai salah satu daerah lumbung nasional.

Dalam rangka pengembangan wilayah pertanian hanya mengandalkan semangat petani saja tidaklah cukup melainkan juga harus dibarengi dengan mengimplementasikan teknologi pertanian yang tepat guna sehingga mendapatkan hasil maksimal. ide bernas yang dibarengi tindakan nyata tersebutpun membuahkan hasil dan ganjaran penghargaan APN yang aspek penilaiannya sangatlah luas: kelembagaan ketahanan pangan, ketersediaan pangan, pembangunan sistem, realisasi program-program pangan dan lainnya.

Keberhasilan-keberhasilannya dalam memajukan daerahnya membuat nama Syahrul makin dicintai rakyatnya. Bahkan namanya sudah disejajarkan dengan tokoh-tokoh Sulsel yang sukses berkarier di tingkat nasional seperti BJ. Habibie, Jusuf Kalla dan Abraham Samad. Syahrulpun patut berbangga karena kerja kerasnya selama ini diapresiasi sehingga disebut-sebut pantas untuk tampil di panggung politik nasional.

Bertumbuh Sebagai Anak Nakal

Dilahirkan dari lingkungan keluarga tentara membuat Syahrul harus hidup berpindah mengikuti tempat tugas ayahnya, Yasin Limpo. Sebagai anak seorang prajurit yang tidak menetap di suatu tempat, Syahrul kecil dan saudara-saudaranya yang lain harus mafhum dengan kondisi nomaden.



syahrulyasinlimpo.com

Beruntung meskipun Syahrul kecil sering ditinggalkan ayahnya bertugas, ia masih memiliki ibunda yang sangat telaten mengurus anak-anaknya. Ibunya Nurhayati Yasin Limpo merupakan perempuan luar biasa yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anaknya. Kesabaran dan ketelatenannya begitu luhung. Nuraninya sebagai seorang ibu lebih diutamakan dalam hal ihwal mendidik anak-anaknya termasuk Syahrul, yang notabene berkemauan keras dan membandel.

Seorang ibu ibarat berada di pagar pembatas antara nilai hidup negatif yang termanifestasi dalam bentuk kenakalan ala Syahrul dengan nilai kebaikan. Ketika sang anak sedang asyik dengan segala kenakalannya maka petuah sang ibu akan senantiasa menjadi alarm untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi sifat nakal dan membandel Syahrul.

Kebandelan dan kesenangannya dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ekstrem sudah dimulai sejak Syahrul memasuki sekolah menengah pertama (SMP). Semua tetangga dan teman-temannya tahu kalau Syahrul siswa badung. Di antara mereka ada yang berusaha menjauh ka-

rena takut tertular kebandelannya namun tak sedikit pula yang berkawan akrab dan sama-sama menikmati fantasi kebandelan masa remaja.

Hidup Syahrul memang penuh dengan tantangan. Tantangan berikutnya yang paling digilainya ialah mendaki gunung. Syahrul ternyata sangat gemar mendaki gunung bersama teman-temannya. Mendaki ketinggian memberikannya warna hidup tersendiri yang membuat imajinya meluap-luap. Menggapai puncak gunung dianggapnya sebagai tantangan yang wajib ditaklukkan.

Banyak puncak gunung yang telah didakinya seperti puncak Gunung Bawakaraeng yang terkenal dengan bunga edelweisnya, Gunung Lompo Battang, Pangrango dan Gunung Gede di Jawa Barat. Sejatinya kegiatan menaklukkan puncak gunung memiliki filosofi sangat mendalam. Kegemarannya dalam melakukan hal-hal ekstrem yang memacu adrenalin juga membawa Syahrul untuk menaklukkan berbagai halang-rintang yang biasa digunakan oleh anggota TNI. Ayahnya yang seorang prajurit tentu memberikan kesempatan yang luas baginya untuk juga menjajal berbagai halang rintang yang dijadikan instrumen latihan TNI. Semuanya dia coba sampai tak ada yang terlewat satupun.

Lahan garapan pemacu adrenalin lainnya yang juga digemari Syahrul ialah olahraga otomotif yang kemudian mengantarkannya sebagai raja jalanan. Kegemarannya pada olahraga otomotif bahkan bertahan sampai sekarang ketika ia telah menjadi orang nomor satu di Sulsel. Berbagai lintasan telah dia taklukan untuk balapan mobil, motor sampai gokart. Dari Racing Centre Makassar sampai Penang Malaysia pernah dijajalnya dengan antusias. Hampir setiap balapan yang diikutinya menempatkannya pada podium juara.

Keinginannya yang kuat dan kemudian menyatu dengan daya tahan fisiknya yang tahan banting merupakan perpaduan hebat yang ada di diri Syahrul. Pencapaian dalam satu bidang tak membuatnya cepat merasakan kepuasan. Namun akan dicarinya lahan tantangan lainnya yang lebih berat dan sukar ditaklukan. Sehingga dalam konteks ini, kebandelannya tersebut jika dipandang secara positif merupakan jati diri sesungguhnya yang sangat bermanfaat untuk menunjang karier politiknya yang memang membutuhkan mental membaja dan nyali besar.

Beruntungnya, segala kenakalan masa remajanya itu tak disikapi dengan keantipatian orang tua terutama ibunya. Sebandel apapun Syahrul, ibunya senantiasa menghadapi penuh kesabaran dan senyuman. Jarang sekali ibunya marah dengan pelbagai tingkah laku sang anak. Hanya petuah-petuah manis berbau surgawi yang kerap meluncur dari mulutnya. Menentramkan dan membuat hati Syahrul adem.

Sudah tentu citarasa bandelnya tak hanya dilakukannya di pergaulan luar sekolah. Di dalam sekolahpun, Syahrul kerap membuat ulah. Dan konon yang paling membuatnya berkesan ialah ketika tubuhnya dipukul oleh penggaris panjang yang terbuat dari bilah papan. Ketika itu, ia masih ber-seragam SMP 6 Makassar. Syahrul dianggap membuat keributan didalam kelas ketika jam pelaran aljabar atau matematika.

Guru aljabarnya yang bernama Alwi Rum kemudian menghukumnya. Sang guru memukul tubuhnya dengan penggaris panjang. Namun yang terjadi bukannya kesakitan, malah mistar panjang yang digunakannya sebagai pemukul yang patah. Kenangan tersebut terus saja diingatnya. Sampai suatu ketika ia telah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel, ternyata sang guru aljabar yang pernah memukulnya itu ialah Asisten 1 Pemprov Sulsel.

Kenakalannya pun semakin menjadi-jadi ketika Syahrul masuk ke sekolah menengah atas (SMA). Namanya sudah terkenal di kalangan guru karena kenakalannya. Rekam jejak kenakalan yang ditinggalkannya semasa SMP tentu saja didengar oleh guru-guru SMA-nya yang langsung menerapkan status siaga terhadapnya. Setiap guru yang akan memasuki kelasnya harus terlebih dahulu mempersiapkan mentalnya. Tak hanya itu, hukuman pun sudah difikirkan mereka untuk membuat jera si anak bandel Syahrul kalau membuat ulah lagi.

Sifat bandel dan membangkangnya tentu saja berimbas pada prestasi akademiknya. Alih-alih mendapatkan nilai terbaik dan menyapu juara kelas bahkan juara umum, untuk berada di peringkat menengah saja rasanya sulit. Sejatinya bukan kapasitas otaknya yang membuatnya tak mendapatkan nilai-nilai bagus melainkan karena tingkah lakunya yang tidak membuat simpati guru. Masa belajarnya yang banyak dihabiskan untuk bermain dan melancarkan hobi-hobi menantangannya merupakan alasan logis kenapa seorang Syahrul tidak memiliki prestasi gilang-gemilang.

Ditambah lagi dengan kondisi hidupnya yang harus berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya membuatnya harus banyak beradaptasi. Masa beradaptasi tentu saja membutuhkan waktu untuk mengenal lingkungan kelas dan teman-temannya. Sehingga dengan begitu, kombinasi antara kebandelan dan sekolah yang berpindah-pindah merupakan alibi pas untuk menjelaskan mengapa nilai individual akademiknya jauh dari kata “berprestasi”.

Karier Pemerintahan

Barangkali tak ada yang menyangka, termasuk keluarganya, orang bandel seperti Syahrul akan sukses di kancah politik. Politik yang identik dengan kepemimpinan tentu dianggap tak cocok dengan karakter dan kepribadian seorang yang sukanya membuat ricuh di kelas dan senang berulah. Masa depan Syahrul diprediksi akan suram dilihat dari rekam jejaknya semasa sekolah yang identik dengan kebengalan dan prestasi akademik yang kurang mendukung. Namun Syahrul segera membalikkan segala prediksi tersebut. Kebengalan dan kebandelannya perlahan sirna seiring dengan makin bertambahnya usia. Cara berfikirnya yang lebih dewasa membawanya pada makna bahwa hidup tak mungkin selamanya bergelora dengan amarah dan kenekatan namun juga harus dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain. Petuah-petuah ibunya mulai banyak diingat dan diimplementasikan. Sampai akhirnya, Syahrulpun mantap meniti karier di pemerintahan.

Kariernya dimulai dari bawah. Jiwa kepemimpinannya mulai terbentuk karena sejatinya sudah diterapkan sejak usia sekolah oleh kedua orang tuanya. Ayahnya yang seorang tentara tentu lekat dengan keprihatinan dan kepemimpinan, yang tentu saja ditularkan juga kepada anak-anaknya termasuk Syahrul. Dari segi pengalaman pemerintahan, Syahrul menuturkan, ia memulai karier dari bawah. Saat menjadi Kepala Desa di Bontolangkasa ia menjadi kepala desa teladan. Begitupun saat menjadi lurah dan camat di Bontonompo. Ketika menjadi Bupati selama dua periode di Kabupaten Gowa, daerah tersebut menjadi daerah percontohan otonomi daerah pertama di Indonesia.

Syahrul memang memiliki keinginan untuk mengabdikan bagi bangsanya seperti sang ayah. Meskipun pengabdianannya berbeda dengan lahan pengabdian ayahnya, namun secara hakikat pengabdianannya satu jua: ber-pengabdian untuk rakyat. Ayahnya mengabdikan dengan cara mengangkat senjata, sedangkan dirinya ber-pengabdian dengan membuat pelbagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Syahrul pun mulai menapaki karier sebagai birokrat.

Sampai akhirnya tangga untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Gowa diraihnya selama dua periode. Karena karakter kepemimpinan yang mengayomi dan ketulusannya membantu rakyatnya, Syahrul pun semakin mahsyur. Segala kemampuannya baik tenaga maupun fikiran benar-benar dieksplorasi untuk memberikan kebaikan bagi rakyatnya. Jabatannya dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan masyarakatnya yang lebih berkemajuan.

Kesuksesannya di Gowa rupanya membuka peluangnya untuk menduduki jabatan yang semakin tinggi. Karena sejatinya kesuksesan kecil merupakan tahapan awal untuk menuju kesuksesan berikutnya yang lebih besar. Dorongan untuk menata provinsi pun tak bisa ditolaknya. Syahrulnya pun menjadi Wakil Gubernur Sulsel mendampingi Amin Syam selama satu periode.

Posisinya sebagai wakil tentu saja membuatnya kurang leluasa dalam mengambil tindakan karena yang paling berhak mengambil keputusan ialah seorang gubernur. Sedangkan ada banyak fikiran pokok Syahrul yang kurang terealisasi dengan baik ketika menjadi seorang wakil. Sehingga pada Pemilu Sulsel tahun 2007 lalu, Syahrul Yasin Limpo yang berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang maju sebagai Cagub/ Cawagub Provinsi Sulsel. Yang menarik Amin Syam yang notabene gubernurnya juga maju dalam pemilihan tersebut.

Agus Nu'mang sendiri merupakan Ketua DPRD Sulsel yang juga menjabat sebagai petinggi DPD Golkar. Menariknya, pasangan yang memiliki slogan SAYANG sebagai akronim dari "Syahrul Yasin – Nu'mang" ini tidak didukung oleh Partai Golkar yang lebih memilih untuk menyokong pencalonan *incumbent* Amin Syam yang memang menjabat Ketua DPD Sulsel. Pasangan Syahrul – Nu'mang ini malah didukung oleh koalisi PDI-P, PAN, PDK dan PDS. Sedangkan rivalnya sendiri disokong oleh partai-partai

besar yang bergabung dalam koalisi Partai Golkar, PKB, PKS dan Demokrat. Pasangan SAYANG yang tidak diusung partai induknya yakni Golkar berhasil memenangkan Pilkada dan berhak untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2007–2012. Kemenangan pasangan Syahrul Yasin – Nu'mang merupakan pertanda bahwa figuritas seorang kandidat sangat menentukan keterpilihan. Rakyat tidak melihat pasangan yang diusung banyak partai tapi melihat keseriusan kerja dan orientasi jabatannya hanya untuk rakyat.

Barangkali rakyat Sulsel lebih melihat kalau Syahrul Yasin dan pasangannya memiliki nilai empati yang tinggi terhadap rakyat dilihat dari *track recordnya* ketika menjadi Bupati Goa maupun Wakil Gubernur Sulsel. Pun dengan tawaran politiknya yang akan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat Sulsel, dinilai banyak pihak merupakan kunci kemenangan pasangan SAYANG.

Melihat antusiasme masyarakat Sulsel terhadap janji kampanyenya terkait pendidikan dan kesehatan gratis, Syahrul Yasin – Nu'mang pun segera merealisasikan janji-janjinya selama kampanye. Dia memberikan perhatian besar terhadap pendidikan karena dianggap sebagai dasar untuk mensejahterakan masyarakat. Daerah yang penduduknya memiliki tingkat pendidikan laik maka memiliki daya tawar ekonomi yang kuat sehingga keterpenuhan kebutuhannya semakin besar.

Pendek kata, pendidikan merupakan basis penilaian terhadap seseorang untuk menentukan nilai upah atau pendapatannya. Disamping itu, selain sebagai penilaian basis upah pendidikan juga akan memperbaiki paradigma seseorang untuk berubah dan berusaha supaya hidupnya berhasil. Dengan pendidikan, seseorang bekerja bukan hanya dengan otaknya tapi lebih banyak menggunakan akal sehingga dia bukan hanya bekerja keras namun juga bekerja cerdas.

Begitu juga halnya dengan kesehatan yang menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. logiknya, bagaimana seseorang akan bekerja dan mendapatkan penghasilan maksimal kalau kesehatannya terganggu. Maka dengan adanya kesehatan yang digratiskan khususnya bagi kaum miskin tentunya sangat membantu mengurangi beban hidupnya. Penghasilan mereka yang tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lagi dipotong untuk biaya berobat.



syahrulyaslinlimpo.com

Dan realisasi pendidikan dan kesehatan murah yang menjadi kebijakan prioritas Syahrul dan wakilnya. Realisasi yang dimulai sejak tahun 2008 tersebut dan telah menghabiskan dana Rp 800 miliar untuk sektor pendidikan. Dampaknya sangat terasa pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulsel karena semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah dan penurunan buta huruf. Penurunan angka putus sekolah untuk SD dan sederajat dari yang tadinya 2,38 persen di 2008 turun menjadi 1,85 persen pada tahun 2010. Sedangkan untuk tingkat SMP dan sederajat yang tadinya sebesar 1,85 persen di tahun 2008 turun menjadi 1,55 persen di 2009 dan 1,45 persen di tahun 2010. Dengan adanya penurunan angka putus sekolah tentu saja berdampak pada naiknya angka anak usia sekolah yang melek huruf. Angka melek huruf Provinsi Sulsel di tahun 2008 mencapai 86,55 persen, lalu naik menjadi 87,55 persen dan di tahun 2010 naik lagi menjadi 88,98 persen. Berarti hanya 11 persen lebih orang Sulsel yang berusia diatas 15 tahun yang tidak bisa membaca-menulis (kompas.com, 2011)

Meskipun begitu tentu tak ada gading yang tak retak, begitu juga halnya dengan implementasi program tersebut. Salah satunya ialah penganggaran dana *sharing* atau patungan belum maksimal dijalankan oleh pemerintah-

an kabupaten/ kota dibawah Provinsi Sulsel. Baru ada sekitar 7 kabupaten/ kota yang berkomitmen dalam mengalokasikan anggarannya untuk membiayai pendidikan gratis warganya. Beberapa daerah yang sudah menjalankan instruksi gubernur seperti Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pangkep, Barru dan Paloppo.

Padahal tentu saja program pemberian akses pendidikan gratis khususnya bagi kalangan tidak mampu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saja namun juga tanggungjawab pemerintah daerah yang berada di bawah naungan Pemprov. Kebijakan Pemprov sejatinya harus diikuti oleh kabupaten/ kota dibawahnya sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sama halnya dengan layanan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis yang diberlakukan sejak Juli 2008 lalu telah banyak membantu masyarakat papa. Untuk mendukung program tersebut dana segar dari APBD yang lebih dari 10 persen (melebihi target yang diharapkan sesuai UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009) dialokasikan. Dengan begitu diharapkan supaya masyarakat miskin tidak lagi ditolak oleh instansi kesehatan karena ketiadaan biaya karena sudah ditanggung oleh Pemprov (www.sulsel.go.id, 2011)

Pemberian layanan kesehatan terlepas dari masih banyaknya hambatan yang terjadi merupakan momentum yang sangat tepat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya bisa mengakses layanan kesehatan ketika mereka membutuhkan. Manfaatnya juga sangat besar dalam rangka terwujudnya percepatan indikator pembangunan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Penjaminan kesehatan oleh pemerintahan provinsi secara langsung telah berkontribusi dalam mencapai indikator-indikator pelayanan kesehatan seperti menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya akan kemarin bayi dan meningkatnya umur harapan hidup warga Sulsel.

Di luar pendidikan dan kesehatan gratis, sang gubernur juga sangat memperhatikan pola pertanian dan perikanan di daerahnya. Syahrul menginginkan para petani dan nelayan Sulsel hidup sejahtera dari hasil tani dan tangkapan ikannya. Syahrul pun sangat menekankan pola pertanian yang mengandalkan teknologi canggih sehingga hasil produksinya bisa digenjut. Syahrul juga sangat responsif terhadap segala keluhan rakyatnya yang

menjadi petani. Seperti ketika ada daerah pertanian yang mengeluhkan kurangnya pupuk karena terkendala distribusi, sang gubernur sendiri yang langsung turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Begitu juga ketika harga jagung turun, Gubernur Syahrul langsung bergerak cepat untuk menormalkan kembali harga jagung sehingga nasib petani jagung terselamatkan. Pun secara tegas Syahrul menolak masuknya beras impor yang tentu saja akan merugikan nasib petani lokal padahal Sulsel bukanlah daerah yang defisit beras. Sulsel merupakan salah satu lumbung beras republik yang setiap tahunnya mengalami surplus.

Komitmennya untuk memperbaiki kehidupan para petani Sulsel sangat nyata. Para petani dan masyarakat bawah lainnya pun merasakan bahwa Syahrul memiliki pendekatan yang akomodatif untuk kepentingan petani. Syahrul bukan tipe politisi yang hanya pandai pidato di atas podium melainkan merealisasikan setiap janji politik yang telah diumbarnya ketika kampanye. Rakyat kecilpun benar-benar merasakan manfaatnya. Tak heran ketika menjelang Pilkada Sulsel Januari 2013 lalu banyak kalangan petani yang menyatakan dukungannya secara terbuka kepada gubernurnya tersebut.

Kemudian kebijakan lainnya yang juga mengundang decak kagum ialah pernyataannya untuk menjadikan Sulsel sebagai Provinsi Koperasi Indonesia (rakyatsulsel.com, 2012) Syahrul mengajak segenap warga Sulsel untuk membangun semangat berkoperasi untuk membuktikan bahwa koperasi dapat bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Koperasi, dalam alam fikiran Syahrul merupakan institusi ekonomi yang dapat memperbaiki perekonomian Sulsel, dan Indonesia pada umumnya.

Dan seperti janjinya pada bidang yang lain, Syahrul Yasin juga benar-benar mengimplementasikan wacananya tersebut ke dalam tataran praksis. Iapun membuat terobosan-terobosan untuk menjadikan koperasi dapat berperan secara aktif dan signifikan dalam pertumbuhan perekonomian di Sulsel. Iklim koperasi di Sulsel harus terus dikembangkan dan digelorakan sehingga cita-cita menjadi Provinsi Koperasi di Indonesia dapat terwujud.

Dalam perkembangannya memang semakin banyak saja koperasi-koperasi yang dibentuk dan tersebar di banyak kecamatan. Di tahun 2012 lalu, ada sekitar 418 kecamatan di seluruh provinsi yang sudah memiliki koperasi percontohan dimana koperasi-koperasi tersebut sebelumnya telah

diberikan pembinaan khusus baik dari sisi operator yang menjalankannya, regulasi maupun dukungan perbankan.

Secara khusus, Syahrul memang meminta pihak perbankan untuk menyokong pendanaan koperasi supaya dapat leluasa dalam menjalankan ekspansi bisnisnya. Dengan ketersediaan modal yang cukup memungkinkan koperasi-koperasi yang sudah ada tersebut berkembang dan berinovasi. Banyak pihak menduga kalau Sulsel bisa menjadi pusat koperasi di Indonesia karena sesuai dengan kultur masyarakatnya yang senang berwirausaha. Koperasi akan mudah tumbuh dalam kultur masyarakat yang mayoritasnya berkegiatan sebagai wirausaha.

Sehingga tak mengherankan dengan banyak kebijakan pro-rakyat yang telah dibuat Gubernur Syahrul Yasin dan wakilnya Nu'mang membuat banyak masyarakat tak keberatan untuk kembali memilihnya. Pada Pilkada Sulsel tahun 2013 silam yang diikuti 3 pasangan calon, Syahrul Yasin – Nu'mang kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyat Sulsel setelah berhasil mengalahkan dua pasangan lainnya. Mantan Walikota Makassar Ilham Arief Siradjuddin dan pasangannya merupakan lawan terberatnya. Hal tersebut bisa dilihat dari raupan suara masing-masing yang tak berbeda jauh.

Pasangan Syahrul Yasin – Nu'mang mendapatkan suara 2. 251. 407 suara (52. 42 persen) sedangkan Ilham Arief – Abdul Azis meraup 1. 785. 580 suara (41. 57 persen). Dengan begitu, maka KPU setempat kembali menetapkan pasangan *incumbent* sebagai pemenang Pilkada. Meskipun kemenangannya diwarnai oleh protes pasangan Ilham Arief dan sempat membawanya ke sidang MK, namun majelis yang waktu itu masih diketuai Akil Mochtar tetap mengesahkan kemenangan Syahrul Yasin dan menolak keberatan pemohon secara penuh (koran-sindo.com, 2013).

Mendorong Inovasi Daerah

Syahrul terus menerus mendorong Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah yang maju. Berkat kepemimpinannya, saat ini Sulawesi Selatan tumbuh besar menjadi pusat pendidikan, pusat perdagangan, dan berbagai kegiatan investasi tumbuh cepat di sana. Kepemimpinan Syahrul membawa Visi yang tegas dan jelas yaitu “Sulawesi Selatan sebagai

Provinsi 10 terbaik dalam hal pemenuhan hak dasar”(*skalanews.net*, 2014). Untuk mencapai visi tersebut, berbagai terobosan kebijakan dan inovasi ia upayakan. Dalam setiap kesempatan, Syahrul selalu menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk mencapai prestasi pemerintahan di segala bidang.

Dorongan inovasi yang dilakukan Syahrul menghasilkan prestasi yang membanggakan masyarakat Sulawesi Selatan. Tahun 2010, Sulsel menerima penghargaan dari Menristek RI atas prestasi “102 Inovasi Paling Prospektif”, Peringkat 10 terbaik Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional, Penghargaan 4 besar Pengelola Investasi Terbaik di Seluruh Indonesia, Sulsel sebagai Provinsi Pengelola Investasi Terbaik, dan sederet prestasi besar lainnya. Kebijakan yang menekankan inovasi terbukti menghasilkan prestasi di berbagai bidang bagi Provinsi Sulsel. Syahrul mendorong agar tiap-tiap SKPD di Provinsi Sulsel menunjukkan kinerja dan prestasi riil nya bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa perbaikan yang berkesinambungan (inovasi) dalam mengelola kebijakan pemerintah akan membawa Sulsel maju, dan ia membuktikannya saat ini.

Syahrul juga menggalakkan inovasi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ia mendorong perkembangan agrobisnis di Sulsel menjadi agroindustri. Sekali lagi Syahrul menekankan inovasi dalam bidang agro industry yang merupakan sektor andalan di Sulsel. Ia mendorong penanaman kakao lestari, pengelolaan Kopi Toraja, dan komoditas pertanian unggul lainnya. Atas dedikasi dan prestasi ini, tahun 2011 Menteri Pertanian Suswono, menganugerahkan penghargaan Inovasi Perkebunan kepada Gubernur Sulsel ini (*bumn.go.id*, 2014). Prestasi ini tidak saja mengangkat gengsi Gubernur Syahrul atau Provinsi Sulsel saja namun yang terpenting adalah meningkatnya kesejahteraan para petani di Sulsel. Terbukti sepanjang 2008 sampai 2011 produksi Kakao dan berbagai komoditas unggulan perkebunan di Sulsel meningkat. Petani juga makin diuntungkan karena Syahrul juga mengundang investor untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan kakao dan pabrik pengolahan komoditas perkebunan lainnya. Investasi dan nilai tambah yang dihasilkan produk perkebunan akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Aksi-aksi inovatif Syahrul juga didorong oleh Komite Inovasi Nasional (KIN). KIN mendorong inovasi di daerah-daerah dengan memanfaatkan forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dipimpin oleh Syahrul. Syahrul pun menyatakan apresiasi atas dukungan KIN ini, ia berujar “Insya Allah, tadi saya sependapat (usulan KIN), berupa inovasi-inovasi terapan teknologi pedesaan, lebih khusus akan dibawa pada rapat kerja para gubernur,” ujarnya (*tribunnews.com*, 2014). Gagasan melibatkan KIN ini adalah langkah maju bagi pembangunan daerah agar riset-riset teknologi tepat guna yang telah banyak dilakukan dan dihasilkan oleh institusi seperti KIN bisa diaplikasikan di masyarakat serta mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan riil masyarakat. Syahrul juga sangat mendorong riset dan inovasi di perguruan tinggi untuk memecahkan problem-problem riil yang dihadapi masyarakat petani, nelayan, usaha kecil, atau yang lainnya. Tahun 2012, Syahrul menerima penghargaan Anugerah Iptek Kategori Budipura dari Kemenristek RI Gusti Muhammad Hatta. Penghargaan Budipura merupakan penghargaan tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang mendorong inovasi-inovasi akademis. Selain Budipura, untuk tahun 2012, Sulsel juga mendapat 5 penghargaan inovasi produk dari total 104 karya inovasi terbaik di seluruh Indonesia (*sulsel.go.id*, 2014). Penghargaan itu mencakup pengembangan varietas jagung unggul pada bidang pertanian dan peternakan, kedua adalah inovasi kentang *aeroponic* untuk bidang pertanian dan perkebunan, ketiga adalah inovasi untuk budidaya kepiting untuk bidang perikanan dan kelautan, keempat adalah inovasi batu bata polimer sebagai bahan bangunan, dan kelima adalah inovasi mikro hidro untuk bidang energi masyarakat. Produk-produk inovasi tersebut merupakan hasil kerjasama antara Balitbang Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Universitas yang ada di Sulsel yaitu : Universitas Hassanudin, Makasar dan Universitas Negeri Makasar (UNM). Syahrul memang mendorong universitas untuk menjadi motor bagi riset dan inovasi bagi pembangunan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan.

Syahrul juga mendorong inovasi terciptanya mobil Moko di Makasar. Mobil itu dikerjakan oleh siswa-siswa di Makasar didukung oleh PT. INKA. Dorongan inovasi ini merupakan langkah positif bagi pelajar dan mahasiswa untuk memiliki mentalitas berkarya dan membangun kebanggaan

terhadap produk dalam negeri. Mobil yang dibanderol harga 45 juta rupiah per unit ini memang masih memiliki beberapa kekurangan, namun Syahrul yakin bahwa perbaikan-perbaikan terhadap Moko akan menjadikan mobil ini makin bagus ke depannya (*okezone.com*, 2014). Kepemimpinan Syahrul seperti menunjukkan pesan bahwa terobosan-terobosan dan inovasi dalam pemerintahan di segala bidang yang diimbangi dengan kerja keras semua pihak dalam pemerintahan akan memberikan dampak riil bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Layak pula ia disebut sebagai gubernur inovatif.

Kepala Daerah Berkualitas Kepala Negara

Berbagai prestasi yang telah diraih oleh Syahrul tak membuat dirinya puas dan terlena. Karena, justru memicu munculnya berbagai raihan positif bagi perkembangan Sulawesi Selatan pada tahap berikutnya. Hal ini bisa terlihat ketika untuk kali pertama dalam sejarah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh sebuah gelar prestisius yang membanggakan yakni Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha pada 25 April 2014 yang lalu. Sekadar diketahui, penghargaan tersebut tergolong jarang didapatkan kepala daerah. Karena variabel penilaian yang sangat kompleks dengan ribuan indikator yang harus dipenuhi. Tak hanya itu, untuk mendapatkan Pataka Samkarya Nugraha, maka pemerintah dan kepala daerah bersangkutan juga harus konsisten menjadi provinsi terbaik selama tiga tahun berturut-turut. Dalam pidato yang dibacakan langsung oleh Presiden Yudhoyono, Syahrul diapresiasi atas kinerja dengan dedikasi tinggi selama enam tahun terakhir dalam membangun daerah. “Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan yang berdedikasi tinggi dalam membangun bangsa (*koran-sindo.com*, 2014).

Setelah meraih prestasi membanggakan tersebut, pada 28 April 2014, Syahrul langsung mengumpulkan Kepala SKPD untuk merancang program kerja dan rencana strategis di masing-masing bidang dengan tenggat waktu selama sebulan (*fajar.co.id*, 2014). Setelah itu ia langsung berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP), terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/

daerah, termasuk dalam menciptakan Wilayah Tertib Administrasi, Wilayah Bebas Korupsi dan implementasi dari hasil rapat koordinasi dalam rangka “Membangun Komitmen Bersama untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi se-Sulawesi” (*bpkp.go.id*, 2014).



Dari pencapaian tersebut, tentu terbayang bagaimana sosok Syahrul sesungguhnya. Apalagi capaian yang ia raih selama ini bukan sekedar prestasi karena konsistensinya untuk selalu memberikan yang terbaik. Di luar kerja-kerja publik tersebut, secara politik, pada Pemilu Legislatif kemarin, Golkar kembali berjaya di Sulawesi Selatan. Dan Syahrul berhasil membuktikan ucapannya kepada Aburizal Bakrie (ARB), bahwa Sulsel masih menjadi lumbung suara Partai Golkar (*viva.co.id*, 2014).

Di luar berbagai pembuktiannya tersebut, ia secara berkesinambungan terus mengingatkan kepada para calon presiden dan wakil presiden, untuk segera mengumumkan tim kabinet yang mendukung gagasan mereka. Karena hal ini penting, untuk menjamin efektivitas dan produktivitas pemerintahan di masa-masa mendatang. “Saya senang jika ada capres yang berani mengumumkan kursi kabinetnya sebelum rakyat mencoblos. Rakyat akan tahu bahwa ini kabinet para pekerja dan bukan kabinet sekedar bagi-bagi kekuasaan (*makassar.bisnis.com*, 2014). Kondisi ini semakin relevan,

karena Syahrul melihat kondisi daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang butuh percepatan pembangunan infrastruktur.

Bila melihat rekam jejak kepemimpinannya, baik secara publik maupun politik, kapasitas Syahrul sebenarnya setara dengan seorang kepala negara. Karena tanggung jawab kepemimpinannya yang begitu luas dan menyeluruh. Dan hal ini bukan sekedar formalitas, karena secara substantif, ia mewarnai secara keseluruhan lewat kontribusi, prestasi dan dedikasi tiada henti. Tak banyak figur yang mampu memainkan peran dengan profesional dan proporsional sekaligus diikuti apresiasi oleh berbagai pihak secara konsisten. Syahrul mampu melakukannya dan oleh sebab itu, sudah sepatutnya, figur berkualitas seperti dirinya dilibatkan lebih jauh dalam membangun bangsa pada masa-masa mendatang, baik sebagai calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon menteri, karena ini sebenarnya hanya soal waktu dan kesempatan saja.

Peluang dan Tantangan Jelang Pemilu

Kandidat merupakan salah satu figur potensial yang layak memimpin negeri ini. Pernyataan ini menjadi relevan mengingat rekam jejak kepemimpinan (*track record*) yang selama ini telah dilalui. Sebagai birokrat karir, syahrul meretasnya mulai dari lurah, camat, bupati, wakil gubernur hingga akhirnya terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) selama dua periode berturut-turut. Malah, selama menjadi lurah dan camat, Syahrul terpilih sebagai yang terbaik di tingkat nasional.

Selama menjadi gubernur pun, begitu banyak penghargaan dan apresiasi baik dari dalam maupun luar negeri. Puncaknya ketika pada tahun 2012, namanya masuk dalam nominasi kepala daerah berprestasi tingkat dunia oleh *City of Mayor Foundation* bersama Joko Widodo dan Tri Rismaharini.

Apa yang dilakukan oleh Syahrul selama memimpin Sulsel telah terbukti cukup signifikan memberi manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Namun, publik secara nasional, belum banyak mengetahui. Dalam rilis survei yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute, 7 Oktober 2012, Syahrul Yasin Limpo termasuk dalam 10 figur potensial dari daerah terseleksi. Nama-nama ini hadir setelah melewati tahapan metaanalisis, *Focus Group Discussion* (FGD),

dan penjurian oleh 100 pembuat opini publik dan para pakar dari berbagai bidang dengan memasukkan beberapa kriteria,

1. bahwa figur muda ini berusia antara 35 tahun (sesuai syarat usia minimum pada UU Pilpres No. 42 Tahun 2008, pasal 5 huruf (o))
2. memiliki peluang politik di partai dan berpengalaman pada jabatan-jabatan strategis publik,
3. cukup terpublikasi dengan baik oleh media maupun lembaga survei.

Berikut uraian singkatnya, beserta 13 aspek kepemimpinan yang diuji sebagai variabel penilaian figur, skor yang diterima, dan peringkat yang diperoleh di antara 10 figur potensial dari daerah terseleksi :

Tabel 1.1
Uraian Penilaian Kualitas Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo
(Poltracking, 5 Mei 2013)

No.	Aspek Kepemimpinan	Skor	Peringkat di antara 10 Kepala Daerah
1.	Integritas	69.18	5
2.	Intelektualitas	74.38	3
3.	Visioner	69.76	7
4.	Leadership skills	69.02	8
5.	Pengalaman prestatif	69.18	8
6.	Keberanian mengambil keputusan	69.94	9
7.	Komunikasi Publik	74.16	3
8.	Empati/Aspiratif	69.96	6
9.	Akseptabilitas Publik	68.3	6

10.	Akseptabilitas Partai	69.18	4
	Nilai Akhir (Rerata Nilai)	70.31	4

Bila standar kecukupan 60.0 dan baik bernilai 70.0 dijadikan indikator penilaian di atas, maka kandidat termasuk salah satu sosok kepala daerah yang berkualitas. Hal ini dapat terlihat dari peringkat 4 dari 14 kepala daerah yang telah dinilai. Dan diperoleh juga, beberapa aspek yang meraih nilai baik, seperti, intelektualitas dan komunikasi publik.

Aspek intelektualitas dapat terlihat dari beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh kandidat sebagai Gubernur Sulsel. Pertama, keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pendapatan perkapita masyarakat dari tahun ke tahun. Kedua, visinya untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyedia 10 layanan dasar terbaik di Indonesia turut mendorong serta mendukung daya saing nasional. Karena hal didukung dengan layanan pendidikan gratis dari SD-SMA serta beasiswa S1-S3 untuk para putra-putri terbaik Sulsel dan implementasi layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Ketiga, ketahanan pangan Sulsel cukup baik sehingga mampu menjelma sebagai salah satu daerah lumbung beras nasional yang menyangga 17 provinsi di tanah air.

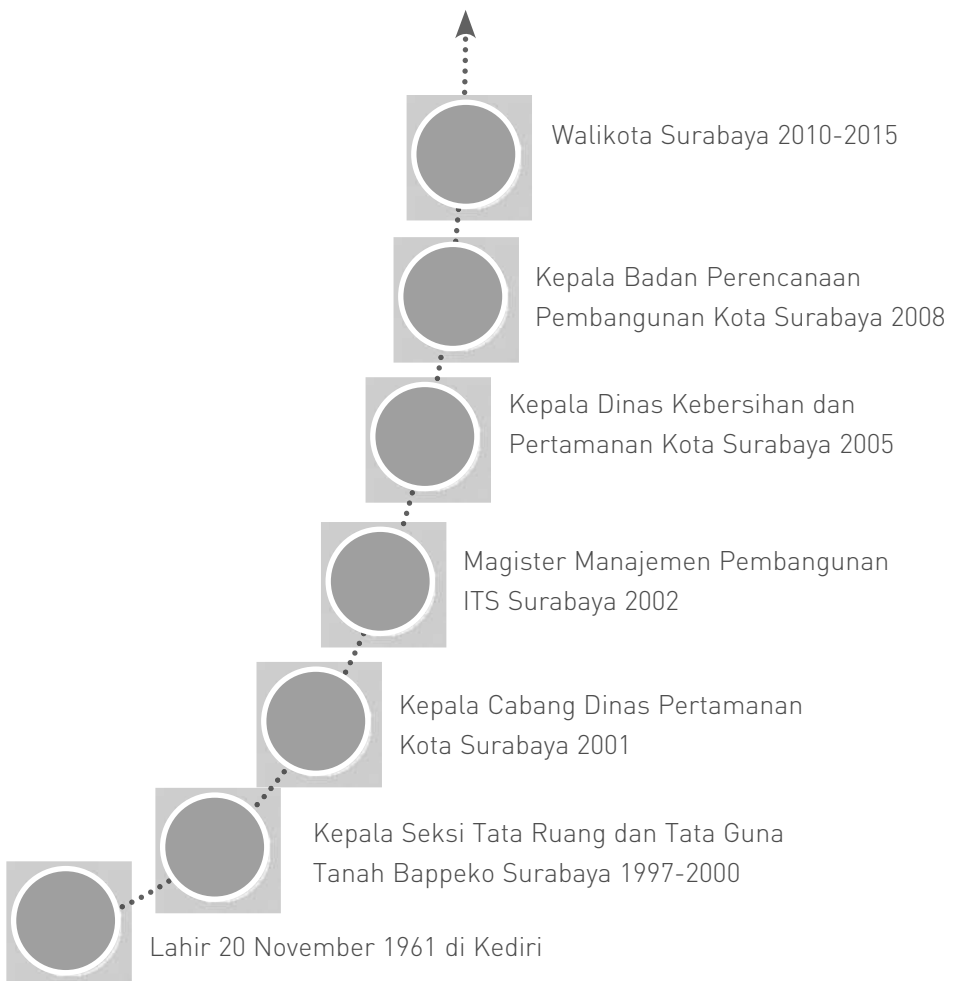
Selain aspek intelektualitas, komunikasi publik yang dibangun kandidat cukup baik. Kandidat secara rutin membangun dan merawat komunikasi kepada elit melalui aktivitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan DPD Golkar Sulawesi Selatan. Selain itu, kemampuan kandidat menyampaikan pesan secara artikulatif, mempermudah para pihak memahami kandidat. Ini belum ditambah dengan sosialisasi dan publikasi kinerja kandidat di media cetak maupun elektronik nasional.

Bila fokus kepada para kepala daerah, kualitas personal Syahrul cukup positif di mata para pembuat opini publik. Di samping itu, saat ini dorongan figur lokal tampil dalam pentas nasional terus digaungkan dalam rangka mencari pemimpin alternatif. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas

(29/7/2013) misalnya, publik luas sudah mulai merespons positif tokoh lokal yang diajukan dari daerah. Survei tersebut memperlihatkan ada sekitar 76 persen responden yang setuju bila pada Pilpres mendatang terbuka pintu bagi pemimpin lokal yang sukses dalam memimpin daerahnya. Namun, bila melibatkan suara publik, belum secara merata apresiasi publik ini diterima oleh semua kepala daerah termasuk kepada Syahrul. Oleh karenanya, perlu upaya sistematis agar tantangan ini bisa diatasi dan dapat bertemu dengan momentum politik.

TRI RISMAHARINI

Pemimpin Potensial





tribunnews.com

Walikota Taman

Wajahnya keibuan, namun perangainya tegas. Dia dikenal berani bahkan tak segan memarahi warganya yang salah. Dialah Tri Rismaharini, wanita tangguh yang memiliki keyakinan yang sangat besar untuk mengubah hal yang menurutnya salah. Tanpa banyak cakap, Tri mengubah Surabaya yang belakangan terkenal gersang dan terkesan semerawut menjadi kota yang nyaman dan sangat layak huni. Tri pun tak segan mengambil keputusan kontroversial seperti menutup lokalisasi yang sudah lama ada di kota tersebut.

Tri lahir di Kediri, Jawa Timur pada 20 Oktober 1961. Dia adalah Wali Kota Surabaya pertama yang menjabat sejak 28 September 2010. Sebelum terpilih menjadi walikota, Risma pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya hingga 2010.

Dalam menjalankan tugasnya, Risma selalu menggunakan pendekatan perempuan. Dia juga memanfaatkan betul pengetahuannya tentang arsitektur dan tata kota untuk mempercantik Surabaya. Risma membangun taman-taman kota baru dan memperbaiki taman-taman yang sebelumnya tak terurus. Menurut Risma, upaya untuk memperbaiki dan mempercantik kota agar Surabaya bisa menjadi kota metropolitan tanpa meninggal-

kan konsep “rumah.” Surabaya harus menjadi tempat nyaman, aman, dan disayangi penghuninya. Lagipula menurutnya, taman-taman hijau itu berkontribusi pada terciptanya kerukunan di kota itu.

Salah satu karya yang paling dikenal masyarakat di daerah tersebut adalah taman Bungkul di Jalan Raya Darmo. Risma memugarnya dengan konsep *all-in-one* entertainment park. Taman seluas 900 meter persegi itu dilengkapi arena skateboard, sepeda BMX track, jogging track, amfiteater, taman bermain anak-anak, kolam air mancur, dan pujasera.

Taman ini bahkan memiliki jalur penyandang cacat, akses internet Wifi, telepon umum, dan pujasera. Tak heran bila Bungkul dinobatkan menjadi taman terbaik se-Asia, yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 26 November 2013 lalu di Jepang. Penghargaan itu diberikan oleh UN Habitat Regional Office for Asia and the Pasific, Asia Habitat Society, Asia Townscape Design Society, dan Fukuoka Asian Urban Research Center. Ada pula taman di Bundaran Dolog, taman Undaan, serta taman di Bawean, dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Taman-taman itu dilengkapi fasilitas olahraga, serta arena bermain anak.

Pemerintah Kota juga berencana membuat beberapa taman lagi di bagian barat, utara dan timur. Seperti taman bunga di bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah Keputih, serta hutan buah di kawasan Surabaya barat. Risma juga akan menyiapkan hutan di daerah barat seluas 15 hektar. Hutan ini akan memiliki beragam tanaman buah-buahan. Dia berharap keberadaan hutan tersebut bisa membuat anak-anak mengenal macam-macam buah hingga buah-buahan langka yang tidak mudah mereka lihat di tempat lain.

Tak hanya taman, Risma juga menata kawasan kumuh Surabaya. Sejumlah kampung yang dahulu terkenal kumuh dan tidak tertata seperti Banyu Urip, Gundih, dan Dukuh Setro, kini pun tampak lebih nyaman, bersih, dan cantik, karena penghijauan yang dilakukan warga. Dalam menata kota, menurut Risma kuncinya ada pada membangkitkan partisipasi warga untuk ikut peduli dan bertanggung jawab memelihara lingkungan mereka sendiri. Itu pula yang ia lakukan ketika menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kayoon. Jalan Kayoon yang sebelumnya kumuh sampai tak bisa dilalui warga, kini sudah lebih tertata. Meski demikian, Risma mengaku penataan

dan pemberdayaan PKL yang ia lakukan belum tuntas karena banyaknya kendala yang dihadapi. Apapun, ia yakin semua persoalan lambat-laun bisa teratasi melalui edukasi dan ajakan bekerja sama kepada masyarakat terus-menerus.

Selain itu Risma juga berjasa membangun trotoar bagi pejalan kaki dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Risma pun telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi semakin parahnyanya kemacetan di Surabaya dalam tiga tahun ke depan. Ia pun membuat transportasi massal untuk mengurangi volume kendaraan. Rencananya Risma akan menyediakan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan monorel bagi warga kota. Sebenarnya, ia telah mengupayakan untuk menambah panjang jalan namun itu dirasa belum cukup.

Tender untuk proyek MRT dan monorel sudah mulai dilaksanakan. Dia berharap dalam 1,5 tahun, transportasi massal tersebut telah tersedia di Surabaya. Dia juga akan menyediakan fasilitas feeder untuk menjangkau masyarakat yang hendak menggunakan MRT atau monorel. Feeder tersebut berupa angkot. Para pemilik angkot dan supirnya sudah setuju bila mereka dijadikan transportasi pendukung MRT dan monorel.

Risma mengungkapkan, saat ini ada tujuh koperasi angkot yang akan menjadi *feeder*. Nantinya, angkot tersebut akan diberikan jadwal keberangkatan yang telah diatur. Menurut Risma, angkot tersebut dilarang ngetem supaya tidak terjadi penumpukkan. Untuk itu, supir angkot akan digaji pemerintah. Sebagai fasilitas penunjang, pihaknya juga akan membangun park and ride di sekitar stasiun MRT atau monorel. Selain itu, fasilitas eskalator atau lift untuk menjangkau stasiun.

Kemampuannya dalam menata kota, membuat Surabaya meraih tiga kali piala adipura yaitu pada 2011, 2012, dan 2013 kategori kota metropolitan. Selain itu, kepemimpinannya juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Selanjutnya penghargaan Kota Sehat tingkat nasional, penghargaan E-Procurement, Perpustakaan Terbaik Nasional, serta Kearsipan Terbaik Nasional.

Pada Oktober 2013, Surabaya pun memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu kategori Data Center melalui Media Center Pemerintah Kota Surabaya dan *Digital Inclusion* melalui *Broadband Learning Center* (BLC). *Broadband Learning Center* (BLC) merupakan fasilitas pembelajaran Teknologi Informasi (TI) yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis. Tujuannya agar warga Kota Pahlawan itu melek TI. Ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju Surabaya Cyber City. Surabaya mengalahkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik di antaranya Singapura, Australia, China, Hong Kong, dan India.

Tak hanya untuk warga, Risma juga membenahi situs internet resmi milik Pemerintah Kota Surabaya dengan menambah fitur-fitur yang komprehensif dan selalu diperbaharui. Laman beralamat www.surabaya.go.id itu memuat berita tentang kegiatan pemerintah kota, informasi tentang tempat-tempat wisata lokal, pelayanan publik yang memfasilitasi keluhan warga Surabaya, hingga pengurusan perizinan secara online. Terhitung sejak Februari 2013, Surabaya resmi menjalankan *e-Government* ini.

Terkenal hingga Mancanegara

Sepak terjang Risma juga pernah diabadikan media online asal Amerika Serikat. The Huffington Post dalam tulisan berjudul 'Surabaya's Mrs. Mayor: Indonesia's Best-Kept Secret'. Tulisan tersebut ditulis Stanley Weiss, mantan petinggi di sebuah perusahaan tambang sekaligus pendiri Business Executives for National Security.

Risma disebut sebagai pahlawan dari generasi baru karena mampu menghadirkan nafas segar bagi Surabaya yang cukup sumpek. Di dalam artikel tersebut diceritakan bagaimana Risma kerap memungut sampah di sepanjang pinggir jalan pada pagi hari. Lain lagi, pada sore hari bermain bola dengan anak-anak kampung di taman sambil mengingatkan mereka untuk belajar keras.

Lalu saat malam hari dia sering keluyuran ke taman yang ada di Surabaya dan memarahi pemuda di bawah umur yang masih nongkrong. Stanley juga menulis Risma sering keluar dari mobilnya dan langsung mengatur

sendiri arus lalu lintas yang macet. “Ide-ide kreatifnya membuat pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat lebih dari 7,5 persen sejak memimpin pada 2010 silam. Ia pun dianjar penghargaan bergengsi, 2012 Women Leader Award dari Globe Asia,” tulis Stanley.

Namanya juga disebut-sebut dalam sebuah artikel di media Amerika ternama, Wall Street Journal (WSJ) bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil. WSJ menyebut mereka sebagai ‘*new breed*’ atau ‘*rising star*’--Republik Indonesia (RI). Mereka adalah tokoh baru yang dapat memberikan harapan bagi Indonesia. “Selama 15 tahun setelah pemerintahan Orde Baru yang kuat, yang dipimpin Soeharto dan kurang dari 1 tahun sebelum Indonesia mengalami transisi kepemimpinan, muncul pemimpin dengan tampilan beda yang didambakan oleh lebih dari 240 juta penduduk Indonesia,” tulis Wall Street Journal lewat artikel berjudul ‘In Indonesia, a New Breed of Politician Is on the Rise’, 8 Oktober 2013, seperti dikutip Liputan6.com(liputan6.com, 2013).

Ada walikota, gubernur dan teknokrat yang reputasinya telah diakui. Para politisi tersebut semakin populer padahal hanya memiliki modal yang sedikit dan minimnya relasi dalam dunia politik yang selama ini dipimpin oleh pemimpin dari militer dan dinasti keluarga.

Pengamat politik internasional Douglas Ramage yang dikutip WSJ menyatakan, apa yang saat ini terjadi dalam dunia politik Indonesia sangat



menarik untuk dikaji. Menurutny, tokoh-tokoh yang bersih dan transparan kini sedang meroket.

Selama memimpin Risma dinilai WSJ punya banyak musuh karena keputusannya menentang proyek tol dalam kota. Risma pun memilih untuk memindahkan proyek itu ke pinggiran kota. Saat Gubernur Jawa Timur memerintahkan untuk menutup kegiatan malam, Risma punya pandangan lain. Ia memilih membenahi PSK secara bertahap dan memberikan mereka keterampilan baru.

Memanusiakan Manusia

Risma sangat menaruh perhatian yang besar terhadap warganya. Menurutny perhatian yang dicurahkannya kepada penduduk Surabaya tidak per kepala keluarga, tapi per jiwa. Risma juga memperlakukan para gelandangan dan pengamen dengan baik. Risma tidak lekas memburu mereka. Melainkan, membimbing warga negara yang tak beruntung tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Risma, bertutur, saat dirinya menyusuri jalanan di lingkungan rumahnya di suatu pagi, dia berpapasan dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Risma langsung tahu kalau anak itu dibuang keluarganya, dari tas berisi baju yang dibawanya. Risma pun mengajaknya berbincang lalu memasukkan anak tersebut ke rumah penampungan yang dibangunnya khusus untuk anak jalanan dan putus sekolah. Di penampungan anak itu, mereka dimbing oleh seorang guru dan psikolog. Di sana juga, anak-anak memang ditanyai cita-cita dan keinginannya. Kemudian, mereka diberi keterampilan dan dilatih sesuai dengan keinginan si anak, bahkan bela diri sekali pun.

Risma bahkan mengirim sejumlah anak yang ditampungnya ke sasana tinju terkemuka di daerah itu. Menurutny, mereka lebih baik mereka diajari tinju daripada berkelahi di jalanan. Kini, sang anak tengah berlatih di. Ada pula yang dilatih bersepeda. Surabaya patut berbangga karena anak-anak nakal kini menjadi sosok yang membanggakan karena berhasil memboyong medali perak pada lomba bersepeda pada SEA Games yang dihelat di Indonesia, 2011 lalu. Risma juga percaya, keberhasilan pembangunan suatu daerah juga mengandung peran aktif warganya. Atas ke-

percayaannya itu, dia sangat jarang memberi bantuan uang atau logistik secara cuma-cuma bagi warganya.

Kisah unik lain, yang pernah dia lakukan pada seorang perempuan penjual gorengan. Perempuan itu menyambangi Risma pada sebuah kunjungan ke sekolah. Risma kemudian tahu, perempuan tersebut sudah dua hari tidak berdagang yang tentu membuat penghasilan keluarganya menurun. Risma memang memberi perempuan tersebut sejumlah uang untuk makan. Namun, dia juga memberikannya keterampilan membuat dan mendesain baju. Tidak tanggung-tanggung, perempuan itu kini telah mengekspor baju-bajunya hingga ke Amerika dan Eropa.

Ia pun sangat memperhatikan anak dari warganya yang miskin apalagi kalau anak itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Risma akan memastikan mereka agar tidak sampai putus sekolah. Berbagai fasilitas pun ia sediakan, mulai dari buku pelajaran, tas sekolah, hingga sepeda bagi mereka yang rumahnya jauh dari sekolah. Di Surabaya, kata Risma memang tidak ada penarikan uang sekolah kepada siswa. Siswa dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) semuanya gratis.

Risma juga berkomitmen untuk menutup lokalisasi yang ada di Surabaya. Menurutnya, di Surabaya memiliki lima lokalisasi dan tiga di antaranya telah ditutup. Pada 2014 giliran lokalisasi Dolly yang akan ditutup. Menurutnya, penutupan lokalisasi itu bertujuan menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam area prostitusi tersebut.

Risma tak menampik kalau para pekerja seks dan mucikari membutuhkan uang untuk makan. Karena itulah, mereka akan dibekali keterampilan lain agar mereka tetap bisa menghasilkan uang meskipun telah meninggalkan pekerjaan lamanya. Mereka pun akan diberikan uang sebagai modal untuk memulai hidup baru. Sejauh ini menurutnya, lokalisasi yang sudah ditutup memberikan pemasukan cukup besar yakni Rp 10 juta - Rp 15 juta dalam sebulan hasil dari pembinaan dan pelatihan tersebut.

Dia turun langsung untuk mengajak para pekerja seks tersebut meninggalkan pekerjaannya. Pada awal Agustus 2012, Risma sengaja menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama warga lokalisasi Dolly di rumah dinas. Acara itu dihadiri 200 lebih penghuni lokalisasi tersebut.

Meski sampai saat ini rayuan itu belum sepenuhnya berhasil, namun lambat laun suasana Gang Dolly tidak seramai dahulu. Pada 2010, ada sekitar 3.000 PSK beroperasi di gang itu. Angka tersebut terus turun dan pada 2011 menjadi 2.500 PSK. Pada 2012 hanya tersisa 580 PSK. Niatnya untuk menutup lokalisasi ini banyak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari Jakarta. Namun Risma enggan mengurungkan langkah tersebut. Dia bahkan menyatakan rela mati demi mengakhiri prostitusi di Surabaya.

Keteguhan itu tidak terlepas dari alasan awal keinginannya menutup lokalisasi. Risma bercerita bahwa dulu saat banyak kalangan, terutama kiai, yang memintanya menutup kawasan prostitusi, dialah yang justru tidak yakin mampu. “Kalau saya tutup saat itu, saya belum bisa kasih makan,” kisahnya. Bila demikian, dia meyakini penutupan justru akan menimbulkan masalah baru karena para pekerja seks komersial boleh jadi justru membuka kawasan prostitusi di mana-mana (*lampost.co*, 2013).

Namun kemudian pandangan itu berangsur berubah sejak dia menyadari bahwa banyak korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjerumus ke lokalisasi prostitusi itu. Keberadaan para korban itu di sana, tentu saja bukan karena kehendak mereka sendiri. Tetapi kalau berbicara puncak munculnya keyakinan memberangus lokalisasi prostitusi, Risma mengungkap itu tidak terlepas dari perkenalannya dengan seorang pekerja seks komersial yang masih menjajakan tubuhnya walaupun sudah berusia 62 tahun. Suatu kali saat berkeliling ke lokalisasi dan menemui perempuan itu, Risma mengaku heran mengapa nenek itu masih menjadi PSK.

Dia lantas bertanya, memang siapa yang sih yang mau menggunakan jasanya yang sudah tua. Jawaban perempuan itu kemudian membuatnya tercengang. “Anak SMP atau SMA yang cuma punya seribu dua ribu juga saya layani,” katanya. Bagi Risma bergetar seolah tak percaya, akhirnya dia mengamini bahwa masalah ini merupakan persoalan besar. Dia tidak rela membiarkan lebih banyak ada anak-anak muda di kotanya menjadi korban karena menikmati prostitusi di lokalisasi.

Batu Sandungan

Langkah Risma sebagai Walikota Surabaya tak selalu mulus. Batu sandungan bahkan sudah menghadang di tahun pertama ia menjabat. Pada 31

Januari 2011, DPRD Surabaya mencoba melengserkan Risma. Itu gara-gara dia menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perwali Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas di Kawasan Khusus Kota Surabaya.

Kedua Perwali itu mengatur kenaikan pajak reklame ukuran besar dan sedang sebesar 25 persen, serta menurunkan pajak reklame ukuran kecil. Risma punya tujuan spesifik menerbitkan kedua Perwali itu, yakni untuk menekan pertumbuhan reklame ukuran besar yang kerap roboh terkena angin kencang apabila cuaca buruk. Selain itu, juga mempermudah pelaku usaha kecil menengah yang ingin memasang reklame kecil untuk mempromosikan usaha mereka. Risma juga menilai, pajak di kawasan khusus Surabaya sudah sewajarnya dinaikkan agar pengusaha tak seenaknya memasang iklan di jalan umum. Pemasangan iklan terlalu banyak, dan amburadul, menurut Risma, akan menjadikan Surabaya tidak rapi. Maka dengan meninggikan pajak reklame ukuran besar, ia berharap pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota.

Penerbitan Perwali Nilai Sewa Reklame oleh Risma itu tidak berjalan mulus, malah mendapat tentangan sejumlah pengusaha reklame besar. Mereka mengajukan surat keberatan melalui DPRD Kota Surabaya. DPRD Surabaya menganggap Risma melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah, karena sang Wali Kota tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Perwali. DPRD Surabaya juga berasalan, aturan tersebut dapat mematikan pengusaha reklame dan biro iklan. Risma juga dicurigai bertujuan untuk menguntungkan perusahaan reklame tertentu. Tuduhan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Risma. Akhirnya, DPRD Surabaya pun merekomendasikan pemberhentian Risma. Keputusan itu didukung oleh enam dari tujuh fraksi politik yang ada di DPRD Surabaya, termasuk PDIP yang mengusungnya sebagai walikota pada Pilkada. Hanya satu fraksi yang menolak pemberhentian resmi Risma yaitu PKS.

Pada akhirnya, Menteri Dalam Negeri Gawan Fauzi menyatakan, tak ada cukup alasan untuk memecat Risma. Gawan menyatakan, Peraturan Walikota tidak bisa dijadikan alasan pemecatan. Kesalahan administrasi dalam proses penerbitan Perwali Nilai Sewa Reklame, yaitu tak dilibatkannya SKPD dalam penyusunan Perwali, masih manusiawi. Ia menambahkan, pemberhentian kepala daerah hanya dilakukan apabila kepala daerah melanggar sumpah dan tidak mampu melaksanakan tugas.

Risma sendiri tidak peduli dengan ancaman tersebut. “Sekian puluh tahun saya jadi bikokrat, saya pegang prinsip itu. Nah, kemudian kalau saya menjabat wali kota ini paling lama lima tahun, apakah saya harus mengubah sikap, saya kira tidak,” ujarnya (www.bbc.co.uk/Indonesia, 2011). Dia tetap berpedoman, kepentingan masyarakat itu yang utama. Dia yakin suara rakyat itu suara Tuhan. Dia tidak akan bergeming karena keputusannya yang diambilnya bukan atas nama pribadi atau kelompok.

Sikap menolak kompromi juga ditunjukkan Risma, ketika dia matimatian menolak pembangunan jalan tol tengah Kota Surabaya. Padahal, rencana membangun jalan tol sepanjang 23,8 kilometer senilai Rp 8 triliun



ini sudah disetujui pemerintah pusat dan didukung DPRD kota itu sejak lama. Jalan tol dari kawasan Waru-Sidoarjo ke Tanjung Perak itu dinilai akan dapat mengurangi kemacetan. Namun menurut Risma, jalan tol itu tak akan menyelesaikan kemacetan di Surabaya, justru di masa depan akan memperparah kemacetan (www.bbc.co.uk/indonesia, 2011). Pembangunan jalan tol ini juga akan mengorbankan ribuan warga yang harus digusur. Dia kemudian mengusulkan agar meneruskan pembangunan jalan lingkar timur untuk mengurangi kemacetan. Jawaban ini pun menimbulkan gelombang reaksi kemarahan politisi DPRD Surabaya. Tuduhan keras kepala pun diarahkan kepada ibu dua anak ini.

Sikap Risma tersebut mungkin menjadi hulu dari tekanan politik yang didapatnya akhir-akhir ini. Di berbagai media, Risma menceritakan bahwa dalam posisinya saat ini mendapatkan tekanan politik yang kuat. Bahkan, tekanan politik ini membuat Risma ingin mengakhiri kepemimpinannya sebagai Walikota Surabaya.

Banyak pihak yang menduga bahwa Risma saat ini telah mengalami depresi politik karena tidak adanya dukungan dari legislatif terkait kebijakan-kebijakannya. Setelah kabar ini mengemuka, PDIP pun dengan cepat mengambil respon. Tak tanggung-tanggung, komunikasi internal pun dilakukan antara Risma dengan para elit partai berlogo banteng tersebut.

Hasilnya, pihak partai menjelaskan bahwa permasalahan Risma telah selesai. Dan tidak ada yang akan menggoyang Risma hingga akhir masa jabatannya. Pernyataan ini, masih menjadi tanda tanya publik, karena tidak ada asap tanpa percikan api. Pasti ada sesuatu hal yang mengakibatkan Risma begitu “galau”.

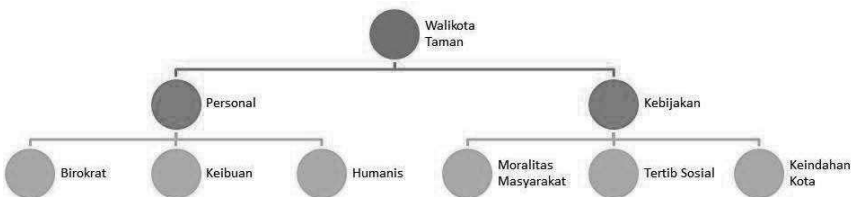
Mendapatkan tekanan, Risma mengadu ke berbagai media. Hal ini justru mendapatkan apresiasi dari publik. Bahkan sempat muncul gerakan #saverisma. Popularitas Risma pun naik, dan menambah keyakinan publik akan sosok Risma yang tulus mengabdikan.

Gagasan Politik: Pemimpin Progresif dan Humanis

Hadirnya sosok Risma memberikan optimisme bahwa masih ada pemimpin perempuan yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang mumpuni. Terbukti dengan *leadership* dan kompetensi yang dimiliki, Risma mampu menyulap Surabaya menjadi kota metropolis yang asri. Keberhasilannya tersebut, membuat Surabaya meraih berbagai *reward* dari berbagai pihak. Bahkan, Risma masuk sebagai salah satu Walikota terbaik versi Wall Street Journal.

Kepemimpinan Risma yang berani mengambil berbagai terobosan, termasuk berani menghadapi represi politik dari parlemen, mengingatkan pada sosok Margareth Thatcher. Sebagai pejabat politik perempuan, Margareth adalah pemimpin yang tanpa kompromi bahkan seringkali bertindak tegas jika apa yang dilakukannya dianggap benar (*single minded*). Sebagai walikota Surabaya, Risma telah membuktikan bahwa dia sangat memahami secara detail daerah kepemimpinannya sehingga dia berhasil melakukan berbagai terobosan untuk Ibukota Jawa Timur tersebut. Pengalamannya berkarir di birokrasi Surabaya, dari Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya menuju Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya membuatnya sangat mumpuni terkait perencanaan tata ruang Ibukota Jawa Timur tersebut. Pengalaman tersebut didukung dengan kompetensinya sebagai sarjana arsitektur.

Kemampuan menguasai lapangan tersebut adalah salah satu modal yang harus dimiliki oleh pemimpin progressif. Manasse (1999) menyatakan bahwa dengan kemampuan menganalisis lapangan yang kuat, maka pemimpin transformatif akan mampu mengimplementasikan visi misinya secara tepat.



Dengan kepemimpinan progresif ini pula, Risma berhasil mendapatkan legitimasi yang kuat dari konstituennya. Bahkan, ketika Risma dijunjalkan oleh parlemen terkait kasus pajak reklame. Dukungan dari berbagai pihak atas kebijakan yang diambilnya menjadikannya semakin yakin akan langkah yang diambilnya. Legitimasi konstituen inilah yang juga meyakinkan Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri yang akhirnya menilai tidak ada alasan untuk melengserkan Risma.

Risma juga mampu menghadirkan nuansa baru bagi Kota Surabaya, sehingga Surabaya menjadi kota yang nyaman dan aman sesuai visinya. MRT dan Monorel adalah progres lainnya yang juga akan dirasakan oleh masyarakat urabaya ke depan.

Dengan pendekatan humanisnya, Risma tampil sebagai pemimpin yang memberi harapan dengan berbagai kebijakan produktifnya. Pendekatan *public hearing* menjadi salah satu cara untuk menjalin komunikasi dengan konstituennya (Nouman, 2000).

Penertiban PKL, pelatihan tinju bagi anak jalanan, pemberdayaan kaum gepeng, hingga penertiban lokalisasi dilakukannya secara bertahap dengan pendekatan tersebut. Kepemimpinan inilah yang cukup efektif dalam mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Hasilnya, berbagai kebijakan di atas dapat diimplementasikan dengan efektif tanpa ada represi keras dari massa. Setidaknya inilah bukti humanisme yang terpancar dalam implementasi kepemimpinan Risma.

Pembuktian Risma

Jika maju dalam kompetisi pilpres 2014, Risma memiliki modal politik yang cukup kuat. Pertama, Risma tampil sebagai salah alternatif dari minimnya sosok pemimpin perempuan yang berhasil. Selain kompeten, Risma adalah sosok pemimpin yang bersih. Belum pernah terbukti melakukan korupsi ataupun kolusi.

Ketiga, Risma telah membuktikan diri sebagai sosok pemimpin yang berhasil mengimplementasikan visi dan misi kepemimpinannya di Surabaya. Dalam kepemimpinan Risma tata ruang kota Surabaya, dianggap berhasil. Di tangannya, kota Surabaya berhasil meraih kembali pengharg-

gaan Adipura 2011 untuk kategori kota metropolitan, setelah lima tahun berturut-turut tidak pernah memperolehnya.

Keempat, ia pernah dijuluki pejabat yang “gila taman” karena dikenal sangat memperhatikan kebersihan dan keindahan kota Surabaya. Dia berhasil membuat taman terbesar dan terkenal di kota Surabaya, Taman Bungkul, menjadi taman yang asri, padahal dulunya taman yang terletak di tengah kota Surabaya itu, tak layak disebut taman.

Kelima, ia dianggap berjasa membangun pelestarian bagi pejalan kaki dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Keempat, ia masuk nominasi wali kota terbaik dunia versi The City Mayors Foundation bersandingan dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Solo Joko Widodo.

Keenam, Tri Risma dianggap walikota yang pemberani (punya nyali besar). Hal itu terlihat dari survei *opinion makers* dan pakar oleh Pol-Tracking Institute 2012 lalu. Riset tersebut menempatkan nama Tri Risma cukup diperhitungkan karena skornya tinggi. Bahkan dari 10 aspek yang dinilai, ada satu aspek yang paling menonjol, yakni aspek kebenaran mengambil keputusan dengan skor (78.78). Jika dianalisis, tingginya skor tersebut tak lepas dari berbagai kebijakannya selama ini yang terbilang berani melawan arus. Saking beraninya, banyak pihak yang tak suka khususnya DPRD Surabaya yang sempat hendak mengeluarkan hak angket untuk dirinya.

Keberhasilannya memimpin Kota Surabaya, membuat Risma menjadi salah satu pemimpin daerah yang berhasil. Apalagi dengan apresiasi yang didapatkannya sebagai salah satu walikota terbaik, membuat Risma menjadi politisi yang cukup populer di negeri ini. Dengan modal politik tersebut diatas, Risma selayaknya diperhitungkan oleh parpol peserta pemilu 2014, terutama PDI-P sebagai partai yang berhasil mengusungnya menjadi walikota surabaya.

Meskipun begitu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Risma jika berkompetisi dalam pilpres 2014. Pertama, sebagai politisi yang memulai karir di daerah, Risma masih membutuhkan panggung yang lebih besar untuk membuktikan kompetensinya. Dengan bercermin, dari salah satu koleganya di PDI-P, Jokowi telah merealisasikan hal tersebut. Jokowi

yang dianggap berhasil memimpin kota Solo, berhasil memberi harapan baru bagi kota Jakarta, sehingga berhasil menang dalam pilgub DKI tahun 2012 yang lalu.

Dengan berkompetisi di level yang lebih tinggi akan berimplikasi pula dengan popularitas dan basis pendukung yang didapatnya. Apalagi jika mampu membuktikan bahwa Risma telah berhasil memimpin di level yang lebih tinggi, seperti Gubernur, atau pun jabatan politis lainnya.

Hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Risma belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya menjadi bukti bahwa Risma masih perlu membuktikan diri bahwa dia mampu menjadi salah satu alternatif dalam pilpres 2014.

Kedua, adalah terkait relasi politik dengan parpol. Sebagai orang yang meniti karir dari birokrasi, Risma masih perlu meyakinkan parpol-parpol peserta pemilu bahwa dia juga layak bertarung dalam pilpres 2014. Nah, disinilah peran komunikasi politik harus dimainkan oleh Risma. Bahkan, apabila PDI-P sebagai parpol pengusungnya tidak memiliki tempat untuknya.

Meskipun sampai sekarang PDI-P belum menentukan pilihan terkait siapa yang akan diusung dalam pilpres 2014, namun Risma harus bersaing dengan kader-kader unggulan PDI-P lainnya, seperti Jokowi yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Tentu saja restu dari Megawati sebagai ketua umum menjadi lampu hijau bagi siapa nantinya yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut.

Di berbagai media, Risma sering mengeluh karena mendapat tekanan dari relasi politiknya. Bahkan, sempat berniat mundur karena tidak sanggup menghadapi tekanan politik tersebut. Hal ini membuktikan ada “sesuatu” yang tidak harmonis antara Risma dengan internal partai.

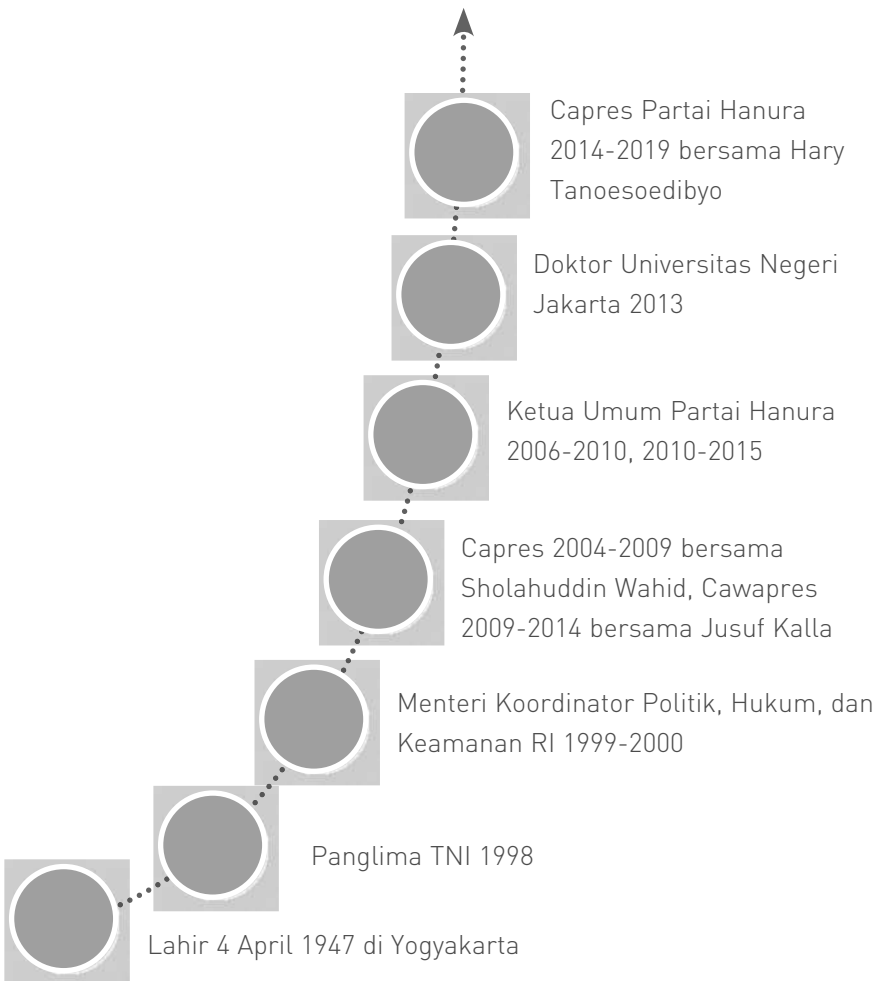
Seharusnya tekanan tersebut bisa mereda jika Risma mendapat dukungan dari internal partai. Namun, justru sikap-sikap kader PDIP di legislatif yang sering berbeda haluan menunjukkan bagaimana Risma memang mendayung sendirian di masa kepemimpinannya. Inilah yang tentu bisa menjadi batu sandungan jika Risma tidak dapat menjaga komunikasi politik yang baik dengan elit maupun internal partai.

Dengan kondisi tersebut, setidaknya ada dua pilihan yang bisa dilakukan Risma, antara melakukan komunikasi intensif dengan Megawati, atau pun menjalin komunikasi dengan partai lain apabila memang ada ruang untuknya menjadi capres.

Analisa ini masih perlu didukung dengan biaya politik yang juga harus diperhatikan oleh Risma. Karena sebagai aktor politik yang tidak hadir dari latar belakang pengusaha, biaya politik pilpres 2014 yang besar, akan menjadi tantangan tersendiri untuk menaikkan posisi tawar Risma kepada parpol pengusung.

WIRANTO

Pemimpin Potensial





kaskus.co.id

Wiranto Kecil di Solo

Wiranto ialah anak kampung yang bernasib mujur. Kemiskinan dan kepapaan keluarganya tak menjadi penghambat untuk mengejar cita-citanya. Ia pria berdisiplin, keras mengatur diri, dan prihatin demi masa depannya. Wiranto bukan tipikal cengeng, mudah rapuh, atau gampang meledak-ledak ketika mendapati suatu persoalan. Pribadinya kalem, bahkan cenderung pendiam, jauh dari kesan ekspresif.

Nama “Wiranto” berasal dari dua kata penuh makna, “Wira” dan “Anto”. Keduanya kemudian diartikan secara paralel sebagai anak yang berani (Kompas, 2004). Tentu ada harapan dibalik pemberian namanya oleh sang ayah RS Wirowijoto dan ibunya Suwarsijah. Harapan bahwa kelak sang anak akan menjadi pribadi unggul yang tak takut mengemukakan kebenaran dengan segala risikonya.

Wiranto lahir dari keluarga biasa-biasa saja, di kota yang selalu diidentikkan dengan intelektualitas dan perjuangan, Yogyakarta, 4 April 1947. Ayahnya hanya guru SMP dengan penghasilan pas-pasan bahkan cenderung kekurangan untuk membiayai kesembilan anak-anaknya. Wiranto sendiri merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara sehingga harus merelakan kasih sayang orang tuanya terbagi sembilan.

Tahun kelahirannya bertepatan dengan agresi militer Belanda ke Yogyakarta sehingga masa paska kelahirannya sudah akrab dengan suara ledakan bom atau desingan peluru. Suatu kondisi yang tentunya tak aman bagi bayi seusianya. Maka kedua orang tuanya, dalam usianya yang kala itu menginjak hitungan bulan, mengungsikannya ke Solo yang jaraknya tak seberapa jauh dari Kota Gudeg—salah satu julukan Kota Yogyakarta (merdeka.com, 2014). Kala itu, Solo dianggap relatif aman untuk hidup karena tidak secara langsung menjadi episentrum agresi militer.

Dia begitu menikmati kehidupan masa kanak-anak dan remajanya dengan penuh pengkhayatan, kesantunan dengan mengamalkan moral-etik Jawa yang begitu luhung. Sosoknya yang pendiam dan menuruti setiap perkataan orang tua dan saudara-saudaranya yang lebih tua, menjadikannya sebagai panutan didalam keluarga.

Wiranto menempuh pendidikan formalnya, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas (SMA) di Solo. Kehidupan keluarganya sederhana namun penuh kehangatan. Kesulitan hidup yang penuh derita baik karena persoalan ekonomi maupun perang, disikapi dengan kesabaran dan penuh syukur. Setidaknya, karena keserba-sulitan tersebut merupakan pelajaran tak terhingga nilainya, baginya dan saudara-saudaranya yang lain untuk terus hidup berdampingan dan saling memberi dukungan.

Keadaan seperti ini membuatnya berlatih untuk memiliki kesabaran yang tak berkesudahan, menyingkirkan egoisme, dan mengutamakan toleransi dan gotong royong supaya kebersamaan di dalam keluarga tidak retak. Sebagaimana diketahui, memiliki banyak saudara terkadang menempatkannya pada jurang keterpecahan. Bagaimanapun, satu keluarga dengan banyak kepala dan masing-masingnya memiliki keinginan yang beragam, tentunya sangat sulit dipersatukan tanpa didasari oleh rasa kasih dan keikhlasan untuk berbagi. Beruntung keluarga Wiranto telah sedari awal menanamkan landasan bajik semacam itu.

Satu hal yang paling menonjol dari sosok Wiranto kecil ialah kedisiplinannya. Ia sangat disiplin dalam mengatur ritme hidup. Kebiasaan yang tentu saja menjadi modal penting untuk dirinya ketika menapak jejak di dunia kemiliteran yang mewajibkan para anggotanya, salah satunya, biasa hidup berdisiplin. Kedisiplinannya tersebut diturunkan dari ayahnya yang

seorang pendidik. Wirowijoto memang begitu *concern* untuk mendidik anak-anaknya dengan pola hidup yang menerapkan disiplin tinggi, selain juga nilai-nilai moral lainnya.

Salah satu bentuk kedisiplinannya, Wiranto tak pernah absen untuk bangun sepagi mungkin disaat orang lain masih terlelap dengan mimpi indah. Sebelum berangkat ke sekolah, ia selalu sigap membantu segala pekerjaan rumah yang sanggup dikerjakannya. Selain disiplin, bakat kepemimpinan juga sudah menonjol sedari kecil sehingga kedua modal itu sangat dirasakan manfaatnya ketika harus berjauhan dengan keluarga karena beraktifitas di dunia militer, maupun politik seperti yang sekarang ia lakukan.

Wiranto kecil juga sudah terbiasa hidup mandiri. Terbukti sejak masa di taman kanak-kanak ia jarang diantarkan ke sekolahnya. Sejak di SD dan SMP ia berjalan kaki dalam jarak yang cukup jauh untuk menjangkau sekolahnya. Ia lakukan semuanya dengan senandung keceriaan dan membebaskan dirinya dari kesulitan hidup yang menerpanya. Ketidakmanjaannya sejak kecil pada akhirnya menempa dan mendidik sosok Wiranto untuk bertahan dalam keadaan yang serba tak tentu setelah agresi militer Belanda, Orde Lama, Orde Baru yang kemudian ia berdiri di dalamnya sampai masa menjelang reformasi yang penuh dengan gejolak.

Meskipun pendiam, dalam kacamata teman-temannya Wiranto tergolong anak yang cerdas dan berkepribadian menarik. Hanya sesekali saja bicara, itupun kalau dirasanya perlu. Selebihnya, ia mengekspresikan segala fikirannya dengan tindakan bukan sekedar *omdo* alias “omong doank”. Satu hal yang paling membekas diingatan teman-temannya ialah sekalipun pendiam, namun Wiranto begitu energik dan inovatif. Daya kreatifitasnya tinggi.

Sudah sedari kecil, Wiranto bercita-cita menjadi seorang tentara. Dalam bayangannya, tentara merupakan penjaga republik dari invasi bangsa asing. Ia melihat semangat yang berkobar dan darah merah yang mengalir dalam setiap syahidnya seorang tentara. Sekalipun mati, namun kematian seorang tentara ialah untuk negara dan bangsanya. Kematian yang agung dan merupakan kemewahan tersendiri kalau sampai mati di medan pertempuran demi memperjuangkan republik.

Keinginannya menjadi tentara yang sudah sedari kecil ia tanamkan dalam hatinya, tentu tak bisa dilepaskan dari kondisi di masa itu. Masa kecilnya yang penuh dengan teror ledakan dan intimidasi kaum imperialis bukan malah menjadikannya ciut atau bernyali tipis. Namun, di dalam batinnya tertanam gelora kebangsaan yang begitu kuat untuk membantu perlawanan para pejuang guna membebaskan dari jeruji ekspansionisme bangsa asing supaya republik tidak terus-menerus menjadi bangsa *inlander*.

Berkarier di Militer

Menjadi tentara ialah asa hidupnya yang harus diperjuangkan. Meskipun ketika remaja ia pernah beralih untuk menjadi arsitek—karena ketiadaan biaya, keinginannya tersebut harus tertunda—namun jalan hidupnya tetap “menyeretnya” menjadi seorang tentara. Akhirnya, setelah lulus sekolahnya dari SMAN 4 Solo, ia melanjutkan ke Akademi Militer Nasional (AMN) yang dibiayai oleh negara.

Di AMN, Wiranto menemukan dunia baru yang sebetulnya sesuai dengan gambaran tentang masa depannya, ketika ia merajut cita-cita sewaktu masa kecilnya. Ia belajar dengan sangat tekun dan berlatih tak kenal lelah untuk menjadi prajurit sejati yang membanggakan bukan hanya bagi keluarga, namun juga bangsa. Nilai-nilai etik yang ditanamkan keluarganya sedari kecil: kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, dan kegigihan dipegangnya erat-erat dengan penuh dedikasi.

Seusai menyelesaikan pendidikannya di AMN Magelang, pada tahun 1968, Wiranto memulai penugasan pertamanya di lingkungan militer sebagai Perwira Pertama di Korps Kecabangan Infanteri. Pada tugasnya yang pertama, Wiranto bekerja secara profesional. Ia nikmati dan serapi pengalaman kerjanya dengan hati sehingga hasilnya memuaskan. Kerajinan dan ketekunannya banyak dipuji atasan.

Beberapa tahun berselang, tugas baru sudah menunggu. Ia ditugaskan menjadi Komandan Peleton Yonif 713 Gorontalo. Di kesatuannya tersebut ia bertugas selama 7 tahun. Ketika bertugas itu pula, Wiranto muda bertemu dengan gadis asli Gorontalo yang kelak memberikannya dua puteri dan satu

orang putera. Nama perempuan yang telah memikat hati Wiranto itu ialah Rugaiya Usman. Uga Wiranto—begitulah ia disapa dalam keseharian—mantap dinikahi oleh pemuda gagah dengan karier cemerlang. Pernikahan mereka berlangsung pada 22 Februari 1975.

Banyak yang sudah menduga kalau karier Wiranto akan menanjak. Kecerdasan dan kesigapannya dalam menjalankan tugas ditambah dengan kedisiplinan dan kejujurannya membuat setiap yang dikerjakannya berhasil dituntaskan dengan maksimal. Ketika bekerja, Wiranto seolah memiliki energi berlebih karena memang menjadi tentara sudah dicita-citakannya sedari bocah. Makanya ketika semua yang dicitakannya terwujud, ia seolah mendapatkan hadiah bunga cantik yang memikat hati. Setiap hari akan disirami dan dijaganya dengan ketulusan, bukan keterpaksaan.

Tak heran kalau jabatannya semakin mengkilap. Selepas menjabat sebagai Komandan Peleton 713 Gorontalo, ia kemudian diberikan tugas untuk menjadi Komandan Yonif 712 di tahun 1982, kemudian setahun kemudian menjadi Karo Teknik Dirbang, Kadep Minik Pusif (1984) dan juga menjadi Kepala Staf Brigade Infanteri IX, Jawa Timur pada tahun 1985. Lompatan kariernya begitu cepat. Ia tak pernah lama berdiam dalam satu kedudukan karena kursi lain sudah menantinya untuk diduduki dengan pangkat yang terus menaik tentu saja.

Dua tahun kemudian, 1987, pria pendiam itu dipanggil untuk menjabat Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, Jakarta. Dan setahun kemudian, 1988, dipindahkan ke Jawa Timur dengan kedudukan sebagai Asisten Operasi Divisi II Kostrad. Lompatan-lompatan karier yang ditapakinya seolah membuktikan bahwa suatu pekerjaan yang sesuai dengan *passion* akan memberikan hasil yang kadang tak pernah diduga. Beruntung ketika keinginannya untuk menjadi arsitek tidak lantas terkabul karena soal biaya, jalan lain yang telah dipersiapkan Tuhan diraihnya.

Jalan yang pada akhirnya mengantarkannya menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di tubuh ABRI, beberapa posisi menteri bahkan menjurus menjadi RI 1. Sebuah pencapaian yang barangkali di usia kanak-kanaknya tak pernah terlintas di pikirannya.

Wiranto tak hanya berpuas dengan aneka jabatan yang diraihnya, ia juga mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan pelatihan untuk mengem-

bangkan karakter dan kualitasnya. Beberapa diantaranya seperti Sussar Para di tahun 1968, Sussarcab Infanteri (1969), Susjur Dasar Perwira Intelijen (1972), Suslapa Infanteri (1976), Suspa Binsatlat (1977), Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (1984), dan juga mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1995 dimana ia terpilih sebagai peserta terbaik.

Menapak Jejak *The Smiling General*

Jalan panjang kemiliterannya terus ditapaki dengan penuh dedikasi. Prestasi demi prestasi terus dibuatnya sebagai implikasi dari sikap kerjanya yang tak kenal lelah dan penuh kobaran semangat. Kecemerlangannya kemudian mampu mengantarkannya sebagai ajudan Presiden Soeharto di tahun 1989-1993. Kala itu, pangkatnya sudah kolonel. Konon untuk menduduki jabatan sebagai “orang tanpa sekat” dengan tokoh besar rezim itu, ia harus menyisihkan sebanyak 14 calon lainnya dari seluruh TNI-AD.

Bisa dikatakan pengalamannya sebagai ajudan sang presiden merupakan warna lain dalam hidupnya. Ia beruntung pernah menjadi ajudan penguasa rezim yang kala itu sudah bertahta selama 24 tahun. Tentu bukan waktu sebentar bagi seorang pemimpin negara yang mempertahankan kekuasaannya menjelang seperempat abad (ketika ia pertama kali diangkat sebagai ajudan) dan karenanya Wiranto memiliki kesempatan yang luas untuk “mencuri” ilmu dan pengalaman dari *The Smiling General* berkaitan dengan pengurusan negara dan pemerintahan.

Sebagai ajudan sang presiden, posisi Wiranto tentu sangat intens dengan Soeharto. Secara intens dan detil Wiranto mengetahui beban dan fungsi seorang presiden, watak dan karakter serta tata-kerja seorang pemimpin negara. Relasi Soeharto-Wiranto, seiring dengan berjalannya waktu sudah tak sebatas atasan dan bawahan, namun sudah seperti keluarga. Di luar tugas kenegaraan, tak jarang Soeharto juga mengandalkan Wiranto untuk menyelesaikannya.

Sebagaimana dalam buku “7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pa Harto”, Wiranto berusaha mengkaji dan menggali segala tindak-tanduk yang pernah dilakukan mantan atasannya tersebut selama memerintah. Ia mencoba menarik pandang subjektifitas—meskipun sulit—dalam melihat

Soeharto. Sampai kemudian ia lantas berkesimpulan bahwa Soeharto ialah orang baik dan sejatinya tak pantas diabaikan segala perihalnya.

Menarik untuk membahas lebih jauh hubungan Wiranto-Soeharto yang disebut-sebut sebagai anak emasnya jenderal murah senyum itu. Mengapa? Banyak tuduhan bahwa posisinya yang sedang menuju ke Istana Negara merupakan upayanya untuk menghidupkan kembali gaya atau corak kepemimpinan ala Orde Baru.

Banyak pihak menuding kedekatan Wiranto dengan Soeharto yang bahkan melebihi keintiman relasi Soeharto-Prabowo, menantunya sendiri yang dianggapnya berkhianat, sedikit banyak akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya ketika kelak menjadi presiden. Intinya, orang-orang yang paranoid tersebut mengkhawatirkan Wiranto yang merupakan produk Orde Baru akan memunculkan gaya kepemimpinan yang identik dengan Soeharto, sebagai seniornya di militer dan salah satu tokoh yang dikaguminya.

Ketika itu, Wiranto memang begitu dekat bahkan seolah tanpa sekat dengan Soeharto yang tentu saja sangat membekas di hatinya. Wiranto bukan hanya beruntung karena setelah itu dia dipercaya menduduki kursi orang nomor satu di ABRI, bahkan diangkat menjadi menteri. Namun, secara langsung dan tidak langsung, ia juga mendapatkan “kursus eksklusif” tata-cara pengelolaan negara dari seorang pemimpin besar yang sangat panjang pengalamannya. Bekal tersebut tentu saja begitu berharga baginya yang berniat untuk menduduki kursi kekuasaan dan mempraktikannya kemudian.

Sehingga dengan kedekatannya itu, ia sebagaimana pandangannya yang dituangkan dalam bukunya tersebut, terlampaui banyak kebaikan dan sumbangsih yang telah diberikan Soeharto untuk bangsanya dalam pelbagai dimensinya. Sumbangsih tersebut misalnya, dalam pandangan Wiranto, dalam konteks pembangunan politik, ekonomi, kerjasama internasional, pengembangan industri dan penguasaan teknologi serta yang terpenting membangun pertanian yang terkenal dengan swasembada berasnya. Sampai pada tahapan itu, Wiranto memandang positif segala kebijakan yang telah ditempuh oleh atasannya itu.

Namun kemudian dia menyadari bahwa tak semua hal yang dilakukan

mantan atasannya itu baik. Ada sejumlah persoalan yang sebaiknya dikritis maupun dihakimi terkait pelanggaran HAM, demokrasi yang diberangus, kebebasan pers yang terkungkung, dan lainnya. Itu semua merupakan kesalahan rezim dan bukti sejarah.

Makanya ia memandang bahwa hanya hal-hal yang baiknya saja yang sebaiknya dicontoh—sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan yang buruknya ditinggalkan. Namun, dalam pandangannya, tidak baik memandang segala yang dilakukan Orde Baru itu buruk semua karena *toh* ada prasasti kebaikan yang pernah ditinggalkannya.

Empat tahun menjadi Ajudan Soeharto telah membuatnya lebih matang. Ia pun mantap untuk melesatkan kariernya ke angkasa jauh. Selepas tak menjadi ajudan, Wiranto diangkat menjadi Kasdam Jaya dari 1993-1994. Jabatannya naik menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen). 18 bulan menduduki jabatan tersebut, di periode 1994-1996 ia kemudian menduduki Pangdam Jaya dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen). Ketika memangku jabatan tersebut, Wiranto melakukan gebrakan dengan menggalakkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).

Dua tahun menjadi Pangdam Jaya membuat Wiranto semakin kaya pengalaman. Dirinya semakin matang dan bersiap untuk memegang komando jabatan-jabatan berikutnya. Kesatuan Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) merupakan lahan pengabdian yang lainnya. Ia menduduki orang nomor satu di lingkungan Kostrad dengan jabatannya kala itu Letnan Jenderal (Letjen). Menjabat sebagai Pangkostrad tentu memberikannya pengalaman istimewa yang tak dimiliki oleh prajurit yang lain.

Kala itu, sebuah penghormatan mampir di pundaknya. Dia dipercaya sebagai direktur latihan dalam rangka Latihan Gabungan ABRI III/ 1996 yang dilangsungkan di Pulau Natuna. Tak main-main acara tersebut melibatkan sebanyak 19.000 personil, 32 pesawat terbang militer, dan 52 kapal perang. Acara tersebut berhasil ditunaikan dengan baik sehingga mampu mengantarkannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menggantikan seniornya Jenderal TNI R. Hartono. Pangkatnya pun dinaikkan menjadi Jenderal bintang empat.

Bintang terang kemiliterannya semakin bersinar. Ibarat busur panah yang diarahkan ke sasaran, lajunya cepat menysar tujuan. Tak ada hal yang

sanggup menghalangi lajunya busur panah tersebut. Hanya kurang dari setahun ia menduduki KSAD, Presiden Soeharto kemudian mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) pada 16 Februari 1998. Hal tersebut membuktikan kalau pilihan Wiranto untuk menjadi seorang prajurit tidaklah salah. Ia berhasil mengejawantahkan segala mimpinya untuk mengambil bintang yang paling terang dan paling tinggi di langit jauh.

Kewenangannya semakin kuat ketika Presiden Soeharto memandatkan penjagaan keamanan dan keselamatan nasional. Mandat tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 16/ 1998 tertanggal 18 Mei 1998 yang membuatnya memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan tingkat nasional, menetralsir sumber kerusuhan, dan mewajibkan semua menteri dan pejabat daerah untuk membantu tugasnya. Kondisi yang lebih kurang sama ketika Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) di tahun 1966 silam.

Menimba Pelajaran dari Tiga Presiden

Karier kemiliteran dan politik Wiranto bukan hanya cemerlang, namun juga sangat lengkap. Tak banyak tokoh yang bisa mengikutinya. Ia termasuk tokoh yang beruntung karena bukan hanya dapat menimba dan menyerap ilmu dari tiga presiden, namun juga memperpanjang masa pengabdianya. Di masa Orde Baru, Wiranto dikenal sebagai anak emas Soeharto yang karenanya namanya dilekatkan dengan rezim bahkan hingga kini. Ia sendiri tak menampik begitu dekat dengan rezim, namun baginya tidak ada yang salah dengan kedekatannya tersebut.

Menurutnya, seseorang tak bisa mengelak dengan takdir yang mengharuskannya dilahirkan di masa suatu rezim tertentu. Sepertinya yang diberikan kesempatan mengabdikan di masa Orde Baru, bukanlah kesalahan dan memang tidak ada yang salah karena mau itu Orde Lama, Orde Baru, sampai rezim pasca-Orde Baru merupakan bagian dari penggalan sejarah republik dimana setiap orang tampil dengan perannya masing-masing. Dirinya yang kebetulan berada di jalur militer. Begitu juga dengan orang lain, yang tentu saja berpengabdian sesuai dengan bidangnya sendiri (PustakaVittrione, 2013)

Pengalamannya yang semakin intens dengan Presiden Soeharto terutama sejak menjadi ajudan beliau telah memberikannya banyak pelajaran penting ihwal tata pengaturan sebuah negara yang super-besar seperti Indonesia secara lengkap baik teori maupun praktiknya. Fakta sejarah yang bisa saja diolah oleh lawan politiknya sebagai blunder politik, namun baginya justru hal tersebut telah memberikannya pelajaran dan pengalaman dari seorang yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Beranjak ke masa B. J. Habibie pascalengsernya Soeharto, posisinya masih dipertahankan sebagai Menhankam/Pangab. BJ Habibie dalam buku “Detik-detik yang Menentukan” menyebut Wiranto sebagai jenderal yang baik dan jujur sehingga karenanya patut dipertahankan sekalipun dirinya pernah diberikan masukan oleh Prabowo untuk membatasi kewenangan Wiranto. B. J. Habibie nampaknya lebih memercayai Wiranto ketimbang Prabowo, sepercaya Soeharto kepada Wiranto dibandingkan ke Prabowo.

Pengabdian Wiranto pun berlanjut di masa Habibie yang tengah sibuk meletakkan dasar-dasar demokratisasi sesuai tuntutan zaman. Selama 22 bulan sebagai Menhankam/Pangab tentu bukan waktu yang sebentar untuk memberikan tenaga dan fikirannya dalam mengawal reformasi bersama-sama dengan Habibie. Ia juga yang masuk dalam tim yang meletakkan dasar-dasar reformasi secara konseptual dan konstitusional. Posisinya sebagai Menhankam/Pangab tentu untuk menjamin keamanan dan keselamatan nasional dari kelompok-kelompok yang berusaha memancing keriuhan dalam suasana yang sudah berangsur kondusif, kala itu.

Peranan ABRI yang dipucuki oleh Wiranto ketika itu berhasil dalam menjaga kemandirian Sidang Istimewa 1999. Begitu juga ketika momen Pemilu tahun 1999 yang juga dapat berlangsung secara jujur dan adil, tidak akan tercipta tanpa netralitas TNI/Polri yang memang sudah menjadi keharusannya dalam iklim negara berdemokrasi. Begitu juga ketika berlangsungnya Sidang Umum MPR 1999 yang berjalan baik dan konstruktif berkat kelapang-dadaan Wiranto untuk mengundurkan diri dari rivalitas dalam memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden.

Beranjak dari pemerintahan B. J. Habibie, estafet kepemimpinan republik berikutnya dipegang oleh K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang

merupakan tokoh ikonik Nahdlatul Ulama (NU). Ketika Gus Dur berkuasa, Wiranto juga masih dipertahankan posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Dalam masa transisi tersebut, Wiranto juga ikut terlibat dalam menyusun kabinet Pemerintahan Presiden Gus Dur. Seperti ketika mendampingi dua presiden sebelumnya, bersama Gus Dur, Wiranto juga mencoba mengambil pelajaran dan pengalaman.

Namun Gus Dur yang dikenal eksentrik dan terkadang sulit untuk memahami alur berfikirnya, membuat dirinya sering *deadlock* dengan presiden. Seringkali dia berbeda pendapat dengan Gus Dur terkait dengan hal politik dan keamanan yang menjadi kewenangan sang jenderal. Perbedaan pendapat tersebut tentu saja bukan untuk membantah kewenangan Gus Dur sebagai presiden, namun lebih kepada memberikan masukan-masukan konstruktif didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika mendampingi dua presiden, yakni Soeharto dan B. J. Habibie.

Puncaknya, ia hanya bertahan selama 3 bulan saja sebelum akhirnya diberhentikan. Gus Dur tak menjelaskan alasan penonaktifannya. Posisinya sebagai Menko Polkam saat itu, seperti digantung begitu saja tanpa diberikan kejelasan status. Atau kalau dalam istilah anak muda sekarang, kondisinya ketika itu seperti “hubungan tanpa status” (HTS) yang pada akhirnya membuatnya galau.

Sampai akhirnya, karena tak mau mengganggu kinerja kabinet yang lain sebab penonaktifan dirinya yang tak kunjung mendapatkan kejelasan, dengan pertimbangan matang, Wiranto kemudian mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Menko Polkam. Keputusan yang tentu saja harus diapresiasi banyak pihak karena jarang pejabat dengan berbesar hati mau meninggalkan jabatannya terlebih karena alasannya tidak jelas. Baginya, lebih baik mengundurkan diri secara terhormat ketimbang harus terkungkung oleh jabatan yang hanya formalistik saja tanpa ada substansinya. Namun demikian, tak ada sedikitpun perasaan dendam di hatinya karena bagaimana pun menyoal jabatan menteri merupakan hak prerogatifnya presiden.



hanura.com

Mengayuh Idealisme di Kancah Politik

Dalam kondisinya yang tengah “digantung” oleh atasannya, Presiden Gus Dur, Wiranto tak mau membuang waktunya secara percuma. Dia kemudian berinisiatif untuk berkeliling Indonesia guna mendengarkan berbagai keluhan dan kesah rakyat. Ia mengunjungi banyak pelosok negeri untuk mencerap segala aspirasi *demos*. Dia datang bukan dalam kapasitas sebagai petinggi militer atau menteri, tapi sebagai rakyat yang beritikad baik untuk mendengar, merasakan, dan menyerapnya sebagai bahan bakar untuknya bergerak.

Hasil dari pergumulannya dengan rakyat, hati nuraninya bicara bahwa ia harus berbuat untuk menolong kondisi faktual rakyat. Ia harus sanggup memenuhi segala keinginan masyarakat yang sebetulnya sederhana, yakni ketercukupan sandang, pangan, aman, dan tentram. Tapi dalam kapasitasnya sebagai pribadi tentu musykil menolong begitu banyak orang susah yang terkandung di dalam republik. Ia harus punya kuasa. Ia harus punya kekuatan. Opsinya hanya satu: politik. Iya, ia harus memenangkan pertarungan politik untuk membuatnya punya energi sehingga bisa membantu banyak rakyat.

Maka tekadnya pun bulat untuk berpolitik. Ketika itu, ia belum memiliki

kendaraan. Namun, kedekatannya dengan rezim Orde Baru membuatnya memiliki koneksi dengan mesin politiknya, Golkar. Wiranto mencoba peruntungan dengan mengikuti Konvensi Partai Golkar di tahun 2004. Dalam konvensi tersebut, Wiranto berhasil mengalahkan peserta konvensi lain, yaitu Akbar Tandjung yang notabene politikus berpengalaman. Wiranto pun berpasangan dengan Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), adik Gusdur, yang dianggap memiliki basis elektoral khususnya dari kalangan NU.

Majunya Wiranto sebagai calon presiden (capres) tentu saja bukannya tanpa hambatan. Beban sejarah masa lalunya menjadi ganjalan signifikan dalam merengkuh asanya menjadi orang nomor satu di seantero republik. Wiranto dibayang-bayangi oleh tragedi Semanggi I dan II dan Trisakti yang terjadi pada medio 1998 silam menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, dan tragedi di Timor Timur. Namun dirinya tak gentar menghadapi serangan-serangan tajam lawan politiknya yang senantiasanya menyeret-nyeretnya ke -masa lalu karena merasa tidak salah.

Dan terbukti, segala tuduhan miring terkait pelanggaran HAM yang mencoba menahan lajunya sebagai capres tak berisi fakta hukum. Dengan kata lain, segala tuduhan tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang kuat keterlibatannya. Bahkan tim Ad Hoc yang sengaja dibentuk untuk menyelidiki kasus di Timor Timur yang juga dibantu oleh tim dari luar (internasional) tidak berhasil menemukan bukti keterlibatannya.

Wiranto – Gus Sholah pun percaya diri melenggang ke bursa kontestasi yang ketika itu diikuti oleh lima pasangan calon—satu calon yakni K. H. Abdurrahman Wahid – Marwah Daud Ibrahim tidak dinyatakan lolos karena terganjal masalah kesehatan. Pada Pemilu putaran pertama pasangan Wiranto–Gus Sholah hanya berada di urutan ketiga di bawah pasangan SBY–Jusuf Kalla (SBY-JK) dan Megawati Soekarnoputeri–Hasyim Muzadi. Dia tak patah arang. Kapal politik baru dia segera dipersiapkan untuk mengarungi gelombang pemilihan umum tahun 2009.

Bersama sejumlah koleganya ia membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 2006. Ia berharap dengan partainya, segala idealismenya dapat ditunaikan dengan baik. bersama Jusuf Kalla yang tak lagi menjadi cawapres SBY, ia melaju. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar menjadi logis kalau JK yang menjadi capres sedangkan Wiranto dari partai

yang masih *gurem* menjadi cawapresnya. Tahun 2009 merupakan momen peruntungannya yang kedua setelah gagal di Pemilu 2004 silam.

Dan untuk kali keduanya, Wiranto harus menelan pil pahit pasca keklahannya dari rival yang sejatinya koleganya ketika di jajaran kemiliteran. Pemilu 2009, pasangan SBY – Boediono berhasil memenangkan pertarungan.

Wiranto dan Hanura

Dalam pidato yang disampaikan Wiranto saat mendeklarasikan Partai Hanura, ia mengatakan, *“kita berhimpun bersama dalam wadah pergerakan politik yang akan merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan”*(indonesia-2014.com, 2012) Sebuah nilai-nilai untuk Hanura yang juga melekat pada paradigma berpikir pribadi Wiranto.

Pada Dialog Kebangsaan yang diadakan di Kampus UGM Yogyakarta pada November 2013, Wiranto mengatakan bahwa Indonesia harus bersatu.



Apabila kita bisa dijajah oleh Belanda, sebuah negara kecil di Eropa, mampu menjajah Indonesia, itu karena mereka bersatu. Kita dapat merdeka pada 1945 itu juga karena bersatu. Oleh karena itu, apabila Indonesia saat ini ingin maju sebagai sebuah negara, maka kita harus bersatu.

Wiranto menyatakan bahwa alasan pencalonannya dirinya sebagai Capres pada Pemilu 2014 mendatang adalah karena ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang hingga hari ini masih mencengkeram Indonesia. Saat ini Wiranto mencari otoritas untuk membuat pemerintahan yang bersih dan tegas.

Wiranto bersama Hanura menegaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia bersih dari KKN, dirinya mengaku mempunyai resep khusus. Resep itu adalah membersihkan diri yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga partai politik. Untuk itu, ia mengharamkan dinasti politik di Partai Hanura, sehingga tidak satupun keluarganya menjabat sebagai pengurus partai, atau sebagai calon legislatif yang diusung Hanura pada pemilu 2014. Karena mengharamkan dinasti politik keluarga di Hanura, Wiranto tidak akan khawatir jika partai yang dibangunnya ini ke depan dipimpin oleh kader yang bukan berasal dari keluarganya. Menurutnya, dinasti politik akan memicu terciptanya KKN.

"Dengan hati nurani, kita telah membawa perubahan politik", pungkas Wiranto. Partai tidak harus dimilikinya, atau pun pihak keluarga. Seratus persen ia legowo. Wiranto tidak akan menjadikan partai Hanura sebagai miliki keluarga dan dinasti.

Secara alamiah, tiap manusia pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia bisa memberikan penilaian moral terhadap segala tindakannya, minimal dalam melakukan sebuah tindakan, manusia memperhitungkan aspek moralnya, aspek baik dan buruknya.

Aspek dasar yang menyentuh inti moralitas adalah penghargaan dan penghormatan terhadap pribadi manusia. Seorang pemimpin harus bertindak dalam tataran penghormatan terhadap pribadi manusia sebab hal itu merupakan hak dasarnya atau hak asasi. Wiranto dan Partai Hanura sangat menjunjung tinggi humanisme universal dalam praktek politik dan pemerintahan Indonesia.

Hati nurani dapat dipandang sebagai inti dari pribadi manusia. Orang yang hatinya jujur akan tercermin dalam tingkah lakunya. Paradigma berpikir Wiranto yang mengedepankan etika dalam berpolitik dan berpemerintahan tersebut bukan hanya isapan jempol semata. Wiranto sudah membuktikannya saat proses reformasi bergulir, jauh sebelum Partai Hanura yang ia bangun mengadopsi pola pikirnya.



Pada saat detik-detik terakhir Presiden Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya, pada 16 Mei 1998, sehari sepulangnya presiden dari Mesir, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban kala itu, presiden membentuk Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKKN) yang berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban yang terjadi di kota-kota besar, khususnya Jakarta, dan seluruh daerah di Indonesia.

Presiden Soeharto menerbitkan Inpres Nomor 16 yang mendasari keputusan tersebut. Perlu diketahui bahwa isi Inpres Nomor 16 tersebut sangat memungkinkan Wiranto, yang saat itu merupakan Menpangab/Panglima ABRI untuk mengambil alih kekuasaan. Mirip seperti Mayor Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan setelah mendapat Surat Perintah 11 maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Sukarno.

Tetapi terbukti bahwa Wiranto tidak melakukan hal tersebut. dengan cerdas Wiranto berpikir tentang moralitas dan etika dalam politik. Apabila

Wiranto mengambil alih, akan diumumkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat dengan pengendalian militer. Wiranto memaparkan hitung-hitungannya, “bila saya mengambil alih negara berdasarkan sepucuk surat saja, berarti rakyat merasa belum ada reformasi”, ungkapnya (lensaIndonesia.com, 2012)

Pada 1998 tersebut, sepanjang yang bisa dicatat oleh sejarah, ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya cukup meluas, dan banyak yang menginginkan perubahan mendasar. Apa yang terjadi apabila Wiranto menggunakan Inpres Nomor 16 Tahun 1998 dengan cara ala Supersemar? Wiranto semestinya bisa melanjutkan rezim Orde Baru dalam menghadapi rakyat yang tidak puas. Ia bisa menggunakan angkatan bersenjata yang memang jelas-jelas ada dibawah kendalinya, yang berarti mengadu rakyat dengan tentara. Tetapi, sejarah mencatat bahwa Wiranto tidak pernah melakukan itu, yang dianggapnya merupakan sebuah perbuatan yang jahat sekali. Hal inilah yang menjadi bukti dalam historiografi Indonesia, bahwa Jenderal Wiranto merupakan seorang pemimpin militer yang menyelamatkan demokrasi.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Dari sisi rekam jejak kepemimpinan, Wiranto sangat baik memimpin militer dan pemerintahan. Prestasinya dalam mengawal era transisi dari otoritarianisme ke demokrasi adalah bukti konkrit bahwa Wiranto adalah seorang jenderal yang demokrat. Selain itu, Wiranto memiliki jaringan massa yang solid, terbukti Pemilu 2014 ini merupakan kali ketiga ia maju sebagai kandidat. Setelah sebelumnya menjadi Capres (2004) bersama Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) dan Cawapres (2009) mendampingi Jusuf Kalla (JK). Baik Gus Sholah maupun JK merupakan sosok yang sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Mereka juga didukung oleh basis massa Islam maupun kalangan dunia usaha yang kuat.

Dari sisi pribadi, Wiranto adalah seorang yang berintegritas. Hal ini tercermin dalam karakter maupun slogan Partai Hanura yang didirikannya, yakni bersih, peduli, dan tegas. Partai Hanura menjadi modal Wiranto be-

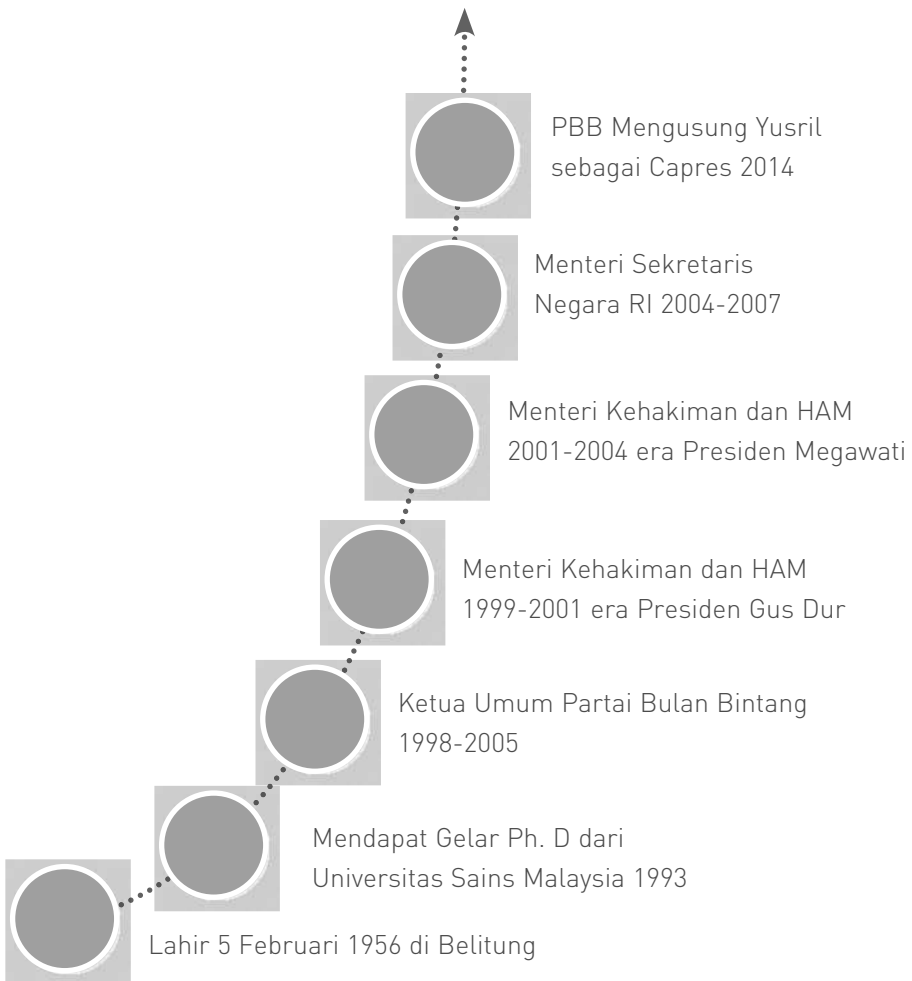
rikutnya, karena dengan memiliki kendaraan sendiri, Wiranto dapat menentukan dan memastikan langkah politiknya dengan leluasa.

Dengan empat modal tersebut, langkah Wiranto kembali mengajukan diri sebagai Capres bersama Hary Tanoesudibyo (Hari Tanoe), menjadi wajar. karena Hary Tanoe juga memiliki modal personal yang baik sebagai merupakan pengusaha sukses maupun pemimpin Ormas. Keduanya menjadi paket ideal sebagaimana banyak orang mengidentikkan mereka dengan pasangan Jokowi-Ahok di Jakarta.

Meski demikian, tantangan Wiranto bersama Hary Tanoe cukup besar. Hal ini terkait dengan elektabilitas Wiranto yang moderat. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode Oktober 2013, Desember 2013, dan April 2014, yang menyebutkan posisi Wiranto masih berada di peringkat ke-4 setelah Jokowi, Prabowo, dan Aburizal Bakrie.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pemimpin Potensial





siaga.co

Yusril Ihza Mahendra ditakdirkan lahir sebagai anak yang berada di urutan tengah. Di antara sebelas bersaudara, Yusril berada pada urutan ke-enam. Yusril lahir di Kampung Lalang, Kecamatan Langgar, Kabupaten Belitung Timur, Selasa, 5 Februari 1956.

Yusril kecil tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, Idris, hanya seorang penghulu kampung. Sementara ibunya Nursiha adalah ibu rumah tangga. Keluarga Yusril tinggal di rumah berkerangka kayu, dengan dinding yang juga berbahan kulit kayu. Atapnya sebagian terbuat dari sirap kayu bulian. Sebagian lainnya dari daun nipah.

Saat Yusril berusia dua tahun, mereka pindah ke Kampung Parit, Tanjung Pandan. Ayah Yusril, yang semula menjadi penghulu diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama di kota itu. Mereka pun harus pindah dan tinggal di rumah kontrakan. Rumah yang disewa ayahnya tak memiliki penerangan listrik. Jika ingin belajar, mereka harus menggunakan lampu dari minyak tanah. Ketika tidur, mereka harus menggunakan tikar yang terbuat dari daun pandan.

Kendaraan satu-satunya di rumah itu adalah sebuah sepeda. Ayah Yusril selalu menggunakan sepeda itu untuk mengajar di madrasah dan pergi berdakwah di masjid dan mushola. Yusril sering diajak. Sementara ayahnya berdakwah, Yusril bermain di masjid.

Tidak jauh dari rumah sewaan ayahnya, ada sebuah surau yang terletak

dekat jembatan di tepi jalan. Setiap maghrib, ayahnya selalu shalat di surau itu. Semua anak ikut sembahyang sambil bermain dengan teman-teman. Kadang-kadang, Yusril menyaksikan kakak tertuanya, Yuslim, melantunkan azan maghrib di surau itu setelah beduk ditabuh.

Orang tua Yusril tidak pernah mampu membelikan mainan. Jangankan mainan, untuk makan saja sudah sangat susah. Gaji ayah Yusril sebagai pegawai negeri sangat kecil. Untuk makan pun hanya sekadarnya, bahkan membeli gula pasir saja tidak mampu. Yusril sering melihat ayahnya minum kopi dengan gula aren yang murah harganya. Terpenting, bagi keluarga Yusril, beras tersedia di rumah.

Dalam keadaan prihatin seperti itu, Yusril dan kakak-kakaknya bermain apa adanya. Karena kakak di atas Yusril perempuan, maka dia sering main masak-masakan menggunakan kulit timung. Kulit timung itu diletakkan di atas tungku yang apinya dinyalakan dari kayu. Yang dimasak hanya tanah dan daun-daunan.

Yusril juga membuat kuda-kudaan dari pelepah pisang atau membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk bali. Mobil-mobilan itu ditarik ke sana kemari menggunakan tali terbuat dari daun purun atau pelepah pisang. Perkenalan Yusril kepada dunia bacaan terjadi pada usia lima tahun. Ketika itu, dia selalu menyaksikan ayahnya membaca buku, Koran, dan majalah. Yusril sering menerima paket kiriman dari Jakarta. Isinya ternyata buku pesanan ayah, atau majalah yang dikirim melalui pos.

Meski belum duduk di bangku sekolah, Yusril kecil senang melihat gambar-gambar yang ada di buku, koran dan majalah. Sesekali, Yusril bertanya kepada ayahnya tentang makna di balik gambar-gambar itu.

Dari kebiasaannya menemani sang ayah membaca buku, Yusril pelan-pelan mengenal huruf. Dia pun akhirnya bisa membaca meski belum masuk sekolah. Dari situ, Yusril dapat membedakan buku yang dibaca ayahnya ternyata tidak hanya dalam bahasa Indonesia. Idris ternyata juga membaca buku berbahasa Belanda dan Inggris.

Di antara buku-buku dan majalah yang dibaca ayah, Yusril dilarang untuk membaca buku-buku tertentu. Belakangan, ketika Yusril sudah agak besar, dia baru mengerti kalau bacaan itu ternyata publikasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Yusril pun sadar meski ayahnya seorang aktivis Masyumi dan seorang

Muslim yang agak keras dalam menjalankan agama, dia menelaah literatur-literatur komunis dengan seksama. Tak hanya komunis, Idris pun membaca buku-buku kalangan nasionalis, terutama tulisan-tulisan Soekarno, Sjahrir dan Tan Malaka.

Idris tak hanya hobi membaca literatur berat macam komunis dan nasionalis. Seringkali Yusril melihat ayahnya tampak khusyuk dengan se-tumpukan koleksi naskah kesusasteraan Melayu lama, berisi berbagai syair dan hikayat. Bacaan itu ditulis menggunakan huruf Arab Melayu.

Idris membaca syair itu seperti orang menyanyi. "Suara beliau melantunkan berbagai syair itu terkadang membuat saya merasa sedih dan pilu, "ujarnya. Yusril masih mengingat, ketika ayahnya membaca syair Burung Bayang, Syair Siti Zubaidah dan syair Singapura di makan api. Yang terakhir ini, mungkin ditulis oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Idris membaca buku itu, sampai beliau wafat.

Hobi ayahnya untuk membeli bahan bacaan membuat ibu Yusril tak senang. Dia kesal karena uang belanja keluarga yang sangat minim itu, ternyata masih dibelanjakan untuk membeli buku.

Kebiasaan beliau membaca buku berlama-lama itu juga membuat ibu Yusril jengkel. Ibu Yusril setiap hari sibuk mengurus anak-anak, yang ketika itu sudah delapan orang jumlahnya. Nursiha hanya berpikir bagaimana memasak, memandikan anak-anak dan mencuci pakaian. Adakalanya Idris mengerjakan semua itu setelah istrinya mengomel di dapur.

Akademis dan Organisatoris

Yusril memperoleh pengalaman dalam dunia keorganisasian ketika bersekolah di sekolah menengah pertama (SMP). Yusril terpilih menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Dia kembali memegang jabatan yang sama sewaktu duduk di bangku SMA. Sementara di KAPPI tingkat Rayon, Yusril juga menjadi ketua. Dia juga pernah menjadi anggota Pemuda Muslimin, sebuah organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Indonesia (UI). Yusril Juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Badan Komukasi Pemuda

Masjid Indonesia (BKPMI) serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tidak sampai di situ saja, ia juga pernah masuk dalam kepengurusan Muhammadiyah dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Pada kancah internasional, Yusril pernah mencatatkan dirinya menjadi Vice President dan President dari Asian-African Legal Consultative Organization, yang berpusat di New Delhi. Di Kuala Lumpur juga pernah aktif di Regional Islamic Dakwah Council of Southeast Asia and the Pasific. Kemudian, sebagai anggota dan Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam berbagai perundingan dan persidangan internasional termasuk sidang ASEAN, Organisasi Konferensi Islam dan APEC. Selain itu juga ikut dalam kepanitiaan konferensi internasional seperti Sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika.

Selain menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan spesialisasi Hukum Tata Negara, tahun 1982. Yusril juga kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan spesialisasi di bidang filsafat, tahun 1983.

Sebagai seorang perantau di Jakarta. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, sempat tidur dari masjid ke masjid lain untuk menyambung hidup. Demi menambah penghasilan, Yusril pernah menjadi guru Taman Baca Al Quran (TPA) dan guru mengaji serta sempat juga berlatih ilmu bela diri.

Seusai menempuh pendidikan di UI, Yusril menjadi Dosen di almamaternya dan mendapat kesempatan untuk S2 di India. kemudian pada tahun 1984 Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 di University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master dan disusul dengan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik, dengan spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim, di Universiti Sains Malaysia, tahun 1993.

Yusril Izha Mahendra dikenal sebagai Professor dan Pakar Hukum Tata negara. Namanya juga tercatat sebagai dosen di beberapa universitas seperti Akademi Ilmu Pemasarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983 dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Kemudian, Yusril diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di UI dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat

Hukum pada program pascasarjana.

Setelah mengalami berbagai pengalaman dalam dunia organisasi dan dunia akademis. Akhirnya Yusril merambah ranah politik dan ketika di Era Reformasi, Yusril dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sejak 1998 hingga 2005.

Yusril Ihza mahendra menikah dengan Rika Tolentino Kato yaitu seorang wanita keturunan Jepang, dari pernikahannya ia dikarunia empat orang anak bernama Yuri, Kenia, Meilan, dan Ali Reza. Sebelumnya Yusril pernah menikah dengan Kessy Sukaesih, namun berujung pada perceraian.

Trah Masyumi

“Sesuatu yang wajib dikerjakan tetapi ia tidak bisa dikerjakan tanpa adanya suatu alat untuk mewujudkan yang wajib tadi, maka menciptakan alat itu adalah suatu kewajiban pula”

Kaidah ushul fiqih ini kerap diungkapkan Yusril Ihza Mahendra saat mengungkapkan alasan di balik pendirian (PBB). Menurut Yusril, pendirian partai itu tergantung kepada keperluannya. Jika merasa perlu mendirikan partai untuk mencapai suatu tujuan, maka partai itu dibuat. Tapi jika tujuan itu bisa didapat tanpa menggunakan partai, ya tak usah membuat partai.

Dalam sejarah pendiriannya, PBB bertujuan mengembalikan khittah bangsa yang termaktub di dalam Piagam Jakarta. PBB ingin meluruskan bangsa ini kembali ke akar sejarahnya yang ada di dalam naskah calon pembukaan UUD 1945 tersebut. Kalimat di Piagam Jakarta yang notabene menghasilkan kesepakatan “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” harus dicoret karena dituduh bertentangan dengan semangat kemajemukan.

Tujuan PBB pun terlihat saat deklarasinya pada Jumat 17 Juli 1998. “Mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berhikmad dan bertanggungjawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya dengan penuh ampunan dan ridha Allah Subhahu wa ta’ala. .” (bulan-bintang.org, 2014).



politik. news. viva.co.id

Yusril memiliki trah masyumi. Kedua orangtuanya, merupakan masyumi. Syahdan, Muhammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pernah datang ke tanah kelahiran Yusril di Belitung menjelang Pemilu 1955. Ketika itu, ayah Yusril menjadi panitia menyambut mereka. Pidato Natsir di Gedung Nasional Tanjung Pandan, sangat berkesan bagi ayahnya.

Sjafruddin malah datang ke Manggar, kediaman keluarga mereka. Nursiha pun menyediakan makanan untuk menjamunya. Waktu itu, ibu Yusril menjadi Ketua Muslimat Masyumi tingkat kecamatan. Yusril menyaksikan ketika ayahnya, Idris si penghulu kampung, menurunkan papan nama Masyumi saat dinyatakan bubar oleh rezim Soekarno pada akhir tahun 1960.

Presiden Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960 untuk membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasannya, dua partai itu dinilai sebagai anti-Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) yang kerap digembar-gemborkan Bung Karno sebagai penyangga revolusi. Sakit terasa saat pelaksanaan pembubaran itu harus

dilakukan sendiri oleh Masyumi dan PSI. Jika dalam tempo seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Ketua Umum Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik untuk membubarkan Masyumi, mulai pusat sampai ke daerah-daerah. Ketika itu, orang-orang Masyumi menganggap Soekarno mulai menjadi diktator dan negara makin bergerak ke arah kiri.

Rezim orde lama pimpinan Bung Karno akhirnya goyah usai G 30 S PKI. Tongkat kekuasaan berpindah ke Letjen Suharto yang namanya menanjak karena dielu-elukan sebagai pembersih komunisme dari Indonesia. Gerakan Suharto mendapat dukungan dari rakyat, khususnya aktivis Islam yang ada di bawah naungan Nahdhatul Ulama dan Masyumi.

Hanya, setelah dilantik sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPR 1968, Suharto enggan melegalkan Masyumi sebagai organisasi politik. Meski demikian, Suharto memberi kompromi. Kekuatan Islam diberi wadah Permusi yang didalamnya juga terdapat Masyumi.

Sekulerisasi zaman Orde Baru kian menjadi. Ajaran 'Melaksanakan Pancasila Secara Murni dan Konsekuen' tak memberi tempat kepada aktivis Islam untuk berkembang. Jika pada masa Orde Lama Bung Karno mengelompokkan politik kepada Nasakom, maka Pak Harto mengelompokkan kepada Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.

Demi menyusun kekuatan melawan orde baru, aktivis Muslim mulai bergerak. Kegiatan dakwah makin gencar dilaksanakan, terutama di kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintah untuk mengimbangi kecenderungan anti Islam dalam kebijakan Orde Baru. Rezim Suharto kerap menggunakan istilah Ekstrim Kanan (Islam ideologis) dan Ekstrim Kiri (komunis) untuk melabeli gerakan penentang kekuasaanya.

Dakwah yang massif perlahan mulai menunjukkan perubahan. Menurut Yusril, secara politik Islam dikalahkan, namun kesadaran keislaman di masyarakat terasa kian menguat. Kesempatan pendidikan yang luas yang diberikan oleh Orde Baru telah membuka peluang anak-anak Muslim. Lebih khusus lagi, anak-anak orang Masyumi untuk menempuh pendidikan. Tanpa disadari jumlah mereka sangat besar. Mereka mulai mengisi jajaran

birokrasi, militer dan kekuatan politik yang secara resminya sebenarnya was-was dengan Islam Ideologis dan gerakan politik Islam.

Anak-anak orang Masyumi seperti Faisal Tanjung dan Syarwan Hamid karier militernya melesat. Akbar Tanjung dan Abdul Gafur menjadi tokoh muda Golkar dan Ridwan Saidi menjadi muda tokoh PPP. Di kampus-kampus muncul kaum intelektual yang berasal dari anak-anak orang Masyumi. Yusril lantas bergabung bersama mereka. Pada dekade 80-an, Yusril memang sedang sibuk menjadi warga kampus. Dia tercatat sebagai pengajar hukum tata negara di Universitas Indonesia. Yusril kemudian malah direkrut Suharto untuk menjadi penulis pidato kepresidenan. Permintaan itu datang seiring sikap Suharto yang melunak kepada gerakan Islam.

Hingga setelah Suharto lengser, Yusril pun kembali kepada khittahnya sebagai putra masyumi. Bersama tokoh-tokoh eks masyumi, dia melahirkan Partai Bulan Bintang sebagai alat perjuangan hingga sekarang.

Menyiapkan Pak Harto Lengser

Ketegangan terjadi di Istana Negara. Susunan Komite Reformasi yang akan diumumkan Presiden Suharto, 20 Mei 1998 berantakan. 45 tokoh yang ditawarkan Pak Harto untuk duduk dalam komite menolak. Nurcholis Madjid, Amien Rais, hingga orang Golkar macam Fahmi Idris enggan masuk komite darurat itu. Sementara, suasana gedung DPR RI kian memanas. Warga dan mahasiswa menuntuk Pak Harto mundur dari kursi presiden.

Di istana, Pak Harto sudah bilang kepada para pembantunya bahwa dia akan mundur. Tetapi, Jendral besar itu ingin mundur dengan cepat, tepat dan tanpa kerusuhan. Sebagai staf kepresidenan, Yusril harus memutar otak. Bersama Saadilah Mursyid, sekretaris negara, malam itu mereka begadang untuk membicarakan cara yang damai lengsernya Pak Harto.

Yusril berpikir keras agar Pak Harto tak digulingkan lewat Sidang Istimewa MPR. Jika *impeachment* terjadi, prosesnya lama dan bakal membuat keadaan semakin kacau. Jika sudah kacau, maka militer yang akan mengambil alih.

Alhasil, penulis pidato presiden ini harus kembali ke konstitusi. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 5 Ketetapan MPR Nomor 3 tahun

1978 mengatur soal pengunduran diri presiden. “Majelis dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya karena (a) atas permintaan sendiri (b) berhalangan tetap (c) sungguh-sungguh melanggar haluan Negara”.

Buat Yusril, harus ada inovasi untuk mundurnya Pak Harto di luar tiga opsi tersebut. Jika Pak Harto mundur atas permintaan sendiri, maka presiden harus mengirimkan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyatakan berhenti. MPR punya dua pilihan, ditolak atau dikabulkan. Dampaknya, harus ada sidang istimewa yang bisa memberi efek konflik berkepanjangan.

Untuk berhalangan tetap, tidak bisa masuk kategori ini karena Pak Harto masih segar bugar. Sedangkan, jika dikatakan secara sungguh-sungguh melanggar haluan negara, secara resmi tidak ada teguran apa pun secara resmi dari parlemen untuk Pak Harto. “Jadi atas pilihan inilah mengapa kalimat presiden itu menjadi pernyataan berhenti,” ujar Yusril. Menjelang Subuh, tubuh Yusril pun sempoyongan. Sementara Saadilah Mursyid harus disuntik karena kelelahan. Dia tidur di ruang ajudan sementara Yusril dibopong ke ruang pelayanan presiden.

Kamis 21 Mei 1998 bertepatan dengan peringatan hari Kenaikan Isa Almasih. Hari ini menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sekitar pukul 09. 00 WIB, Presiden Suharto menyatakan mundur dari jabatan presiden. Dalam pidato pengunduran dirinya Suharto membacakan surat yang ditulis Yusril, “Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998,” kata Suharto ketika membacakan pernyataan itu di Istana Merdeka, Jakarta. Ikut menyaksikan acara penting yang disiarkan langsung TVRI dan RRI itu, antara lain, Wakil Presiden (Wapres) BJ Habibie, Pimpinan MPR/DPR, para Ketua Mahkamah Agung, Menhankam Pangab, dan puluhan wartawan luar dan dalam negeri.

Setelah pernyataan berhenti Pak Harto, Mahkamah Agung langsung mengambil sumpah jabatan BJ Habibie sebagai Presiden RI yang ketiga. Pertimbangannya untuk menghindari kekosongan pimpinan RI. Lima menit kemudian Wapres BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI ke-3.

“Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan

pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” kata Pak Harto.

Menurut Pak Harto, keputusan berhenti dari jabatan sebagai presiden diambil setelah mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menteri di Tiga Presiden

Yusril pernah tiga kali menjadi menteri pada masa pemerintahan tiga presiden yang berbeda. Saat era Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur, Yusril pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril didapuk sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terakhir, Yusril menjadi Menteri Sekretaris Negara di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum jabatannya digantikan oleh Hatta Radjasa.

Hanya, karier Yusril di pemerintahan Gus Dur dan SBY tidaklah mulus. Yusril didaulat menjadi menteri pada era Gus Dur usai proses pemilihan presiden saat Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999. Saat pemilihan presiden, Yusril sebenarnya berpeluang besar untuk menjadi calon alternatif. Perolehan 232 suara berada persis di belakang Megawati yang memperoleh 305 suara. Dia mampu mengonsolidasikan partai politik Islam yang berkoalisi di poros tengah yang disutradarai Amien Rais.

Hanya, hitung-hitungan politik poros tengah berkata lain. Atas nama kepentingan bangsa, Yusril pun harus legowo mempersilakan Gus Dur yang pada voting pertama berada di peringkat tiga dengan perolehan 185 suara maju sebagai calon presiden. Alhasil, tokoh sentral Nahdhatul Ulama ini pun bisa mendulang suara untuk menjadi presiden. Gus Dur mengalahkan Megawati yang partainya notabene memenangkan pemilu.

Dalam pembentukan Kabinet Gus Dur, Yusril terpilih menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Hanya, keharmonisan poros tengah

dengan Gus Dur tidak berlangsung lama. Berbagai manuver politik Gus Dur membuat kabinet seringkali di *reshuffle*. Ketegangan pun kian memanas saat Gus Dur berencana mencabut larangan Marxisme dan Komunisme sebagai ideologi. Yusril menolak dan menyarankan Gus Dur untuk mundur. Presiden akhirnya membalas Yusril dengan memecat menteri asal PBB itu.

Tak lama berselang, Gus Dur tidak mampu lagi memegang tampuk kekuasaannya dengan lebih lama. Gus Dur dimakzulkan oleh kekuatan utama yang mendorongnya maju sebagai presiden, poros tengah. Pada Juli 2001, Gus Dur pun dilengserkan dengan mosi tidak percaya. Alhasil, Megawati Soekarnoputri maju sebagai presiden dengan tokoh NU lain menjabat sebagai wakil presiden, Hamzah Haz.

Selama masa pemerintahan Presiden Megawati, posisi Yusril sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berjalan mulus. Dia mampu menjalankan tugas hingga akhir Kabinet Gotong Royong. Memasuki Pemilu 2004, Yusril maju kembali sebagai calon presiden. Dia didukung partai yang diketuainya, PBB. Hanya, perolehan suara PBB ternyata tak besar. Yusril pun terpaksa harus bergabung dalam barisan calon pasangan SBY-Jusuf Kalla yang kemudian memenangkan pemilihan presiden 2004.

Yusril kembali menjabat sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I pimpinan SBY. Kali ini, Yusril memimpin pos yang berbeda. Dia dipercaya untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara. Hanya, rupanya SBY melakukan *reshuffle* pada Mei 2007. Posisi Yusril pun digantikan oleh Hatta Radjasa.

‘Pemberontakan Yusril’

Yusril mencatat sejarah atas perlawanan hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) saat dia menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di era Megawati Soekarnoputri. Surat penyidikan yang keluar ada tanggal 24 Juni 2010, menuduh Yusril melanggar Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 2009 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang kasus tersebut.

Yusril dituduh dan dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung atas perintah Jaksa Agung Hendarman Supandji. Diseret dalam kasus hukum, Yusril tak kehilangan akal. Pengalamannya sebagai ‘juru masak’ perundang-

undangan negara membuatnya tahu seluk beluk administrasi negara.

Dia pun melawan dengan mengajukan uji materi terhadap pasal 22 ayat 1 Huruf d UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI. Beleid tentang pemberhentian Jaksa Agung tersebut dinilai absurd. Pasalnya, tidak ada ketentuan jika presiden dapat memberhentikan Jaksa Agung meski jabatan tersebut bukan merupakan jabatan karier.

Hendarman Supandji menggantikan Abdul Rachman Saleh pada 7 Mei 2007 dengan Keputusan Presiden No. 31/P Tahun 2007. Akan tetapi, Hendarman masih tetap menjabat usai pergantian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 ke Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dengan SBY-Boediono sebagai kepala pemerintahan.

Padahal Keppres yang mendasari pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, yakni Keppres 187 Tahun 2004, mengatakan kalau presiden membentuk kabinet untuk membantu tugas kenegaraan hingga masa jabatannya habis. Oleh karena itu, dengan sendirinya masa jabatan semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 seharusnya berakhir pada 20 Oktober 2009. Waktu dimana SBY-JK menyelesaikan jabatannya. Termasuk jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Sementara, Hendarman tak pernah dilantik kembali sebagai Jaksa Agung saat SBY membentuk KIB Jilid 2. SBY pun tak pernah mengeluarkan keputusan presiden yang menjadi dasar jabatan Hendarman.

Dalam pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril menilai negara, dalam hal ini Jaksa Agung, telah melanggar hak-hak konstitusinya karena telah menetapkan dia sebagai tersangka. Padahal, di mata Yusril, Hendarman tak berhak menyidik kasus apa pun karena jabatannya sebagai Jaksa Agung illegal.

Alhasil, majelis hakim konstitusi memenangkan gugatan Yusril. Presiden SBY lantas segera mencopot jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Posisi Hendarman kemudian digantikan oleh Darmono, Wakil Jaksa Agung yang menjabat sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung. Kasus Sismimbakum akhirnya dihentikan setelah para terdakwa divonis bebas. Yusril kemudian bisa menanggalkan status tersangkanya.

Pengalaman lain, Yusril pernah berhadapan dengan pemerintah kembali saat membahas kekeliruan Kementerian Hukum dan HAM, yang digawangi Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana, terkait moratorium

pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan terorisme.

Langkah yang diambil Kemenkumham tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum dan HAM, karena telah menghilangkan hak-hak narapidana yang telah dijamin dalam UU. Akhirnya PTUN pun membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, dan tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Langkah lain yang cukup fenomenal, adalah saat memperjuangkan PBB untuk dapat lolos pada Pemilihan Umum 2014 melalui jalur hukum. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Yusril mampu menunjukkan kesewenang-wenangan KPU. Hasilnya pengadilan pun menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses verifikasi faktual terhadap PBB, sehingga hasil verifikasi faktual itu dinyatakan cacat hukum. Putusan ini juga telah memaksa KPU selaku pihak Tergugat, untuk merevisi Surat Keputusan KPU Nomor 5/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014, dan menambahkan PBB sebagai partai peserta Pemilu.

Satu lagi permohonan Yusril yang dikabulkan oleh MK adalah saat mengajukan uji materi UU Nomor 42/2008 yang menghasilkan pelaksanaan pemilu serentak. Artinya, pelaksanaan pileg dan pilpres akan berjalan serentak. Meskipun pelaksanaan keputusan tersebut baru bisa dilaksanakan pada pemilu berikutnya. Namun, keputusan tersebut menjadi bukti betapa tajamnya Yusril dalam memperjuangkan persoalan hukum.

Yusril menjadi sosok yang berani mengkritik dengan cara yang tidak melanggar hukum. Namun, mengikuti tatanan hukum yang berlaku secara konstitusional dan legal. Bahkan dengan jalan tersebut, Yusril memberikan arah yang benar sesuai aturan undang-undang. Inilah etika politik santun yang ditunjukkan Yusril.

Menata Negara: Mewujudkan Keadilan dan Negara Hukum

“Saya menerima amanah ini, karena saya tahu betul apa yang harus saya lakukan. ” Demikianlah penegasan Yusril saat dideklarasikan menjadi capres 2014 oleh PBB di Surabaya beberapa waktu lalu. Ungkapan tersebut memang tidak perlu diragukan. Pasalnya, Yusril memiliki kompetensi yang

mumpuni, terutama di bidang hukum serta kapasitas dan pengalaman di pentas politik cukup lama. Oleh karena itu, Yusril tampil percaya diri untuk maju memperebutkan kursi presiden 2014 nanti.

Sepak terjangnya dalam membela konstitusi sebenarnya juga berkorelasi dengan cita-citanya sebagai tokoh modernis islam. Modernisme islam sendiri merupakan suatu fenomena pembaruan keagamaan, sosial, budaya dan politik, dengan penyesuaian pemikiran dan penerapannya memadukan antara al qur'an dan hadis dengan kekuatan intelektualitas manusia secara harmonis. Inilah yang tercermin dalam PBB, sebagai partai pengusungnya.



bulan-bintang. org

Sebagai partai Islam, PBB merupakan partai yang paling getol menyuarakan dimasukkannya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam UUD 1945. Meskipun begitu, Yusril pun menghimbau bahwa mentransformasikan syariat Islam menjadi kaidah hukum positif di Indonesia memerlukan proses politik yang konstitusional dan demokratis. Oleh karena itu, PBB tidak ingin memaksakan penerapan syariat Islam dengan cara pemaksaan dan kekerasan (Syam, 2004)

Menurut Yusril, permasalahan fundamental Indonesia saat ini adalah persoalan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini berdampak besar sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di negeri ini. Misalnya, dalam pembangunan ekonomi tidak akan berjalan tanpa adanya kepastian hukum. "Tidak ada investor yang mau masuk ke Indonesia, jika tidak ada kepastian hukum. Yang terjadi, roda pembangunan tidak berjalan dengan baik," tegasnya. Yusril menambahkan, sistem yang berjalan selama ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi. Apalagi hukum tidak diterapkan secara adil sehingga keputusan hukum seringkali terintervensi oleh politik.

Dalam bukunya 'Rekonsiliasi Tanpa Mengkhianati Refomasi' (2004), Yusril mengungkapkan bahwa sekarang ini banyak orang yang menafsirkan dunia, tapi tidak banyak orang yang berfikir bagaimana mengubah dunia. Terlalu banyak pula orang yang berpikir tentang korupsi, tapi tidak ada orang yang berpikir bagaimana membasminya. Oleh karena itu, Yusril berjuang membenahi sistem, salah satunya untuk membasmi korupsi tersebut.

Dengan melihat kenyataan tersebut, Yusril berpandangan bahwa kriteria presiden yang dibutuhkan saat ini, setidaknya memiliki pemahaman terhadap hukum. Apalagi presiden memiliki setengah kewenangan legislasi, yakni membuat undang-undang, perpres, dan ketetapan lainnya. Oleh karena itu, presiden harus memahami secara betul persoalan hukum.

Menurut Yusril, presiden selama ini tidak memiliki kapasitas pemahaman terhadap hukum. Sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi antar pejabat negara terhadap suatu persoalan hukum yang tentu saja akan menimbulkan tumpang tindih arah kebijakan yang diambil.

Seorang presiden juga tidak boleh cukup tahu yang global saja, tetapi tidak mengerti yang detail (Mahendra, 2004) Begitu pula dalam persoalan hukum. Disinilah penekanan Yusril urgensi dari kebutuhan sosok pemimpin yang mengerti akan konstitusional.

Selain itu, kriteria presiden yang dibutuhkan saat ini adalah yang mempunyai arah kebijakan penegakan hukum. Kriteria ini berkorelasi dengan kriteria sebelumnya. Dengan arah kebijakan hukum yang tepat dan tegas maka keadilan dan kepastian hukum akan terlaksana.

Oleh karena itu, jika terpilih menjadi presiden, Yusril menjanjikan akan melakukan kajian hukum terhadap seluruh peraturan – peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang dianggap tidak adil, akan diperbaiki. Sedangkan, peraturan yang menimbulkan ketidakpastian akan diformulasikan kembali. Perbaikan sistem ketatanegaraan inilah yang menjadi agenda utama Yusril jika terpilih menjadi presiden.

Tantangan untuk Yusril

Yusril memang telah mendeklarasikan maju dalam pilpres 2014. Sepak terjangnya, terutama di bidang hukum menjadi magnet tersendiri bagi partai berlogo bulan bintang sebagai partai pengusungnya. Jika dianalisis menurut lensa politik, Yusril memiliki modalitas yang cukup kuat. Pertama, Yusril merupakan tokoh politik yang masih terbilang muda. Kedua, Yusril memiliki pengalaman yang berlimpah. Di bidang pejabat publik, Yusril pernah beberapa kali menduduki posisi kementerian. Di partai politik, Yusril juga menduduki jabatan elit partai.

Selain itu, Yusril juga memiliki kompetensi unggul. Hukum tata negara sebagai spesialisasinya sudah menyandingkan gelar profesor di depan namanya. Oleh karena itu, gagasannya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tidak hanya *lipsing* semata. Gagasan untuk mereformasi hukum di Indonesia telah mendapat respon positif dari masyarakat.

Tantangan Yusril, pertama terletak di elektabilitasnya. Dalam beberapa survei, posisi elektabilitas Yusril selalu moderat dan bahkan tak jarang di posisi bawah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Yusril belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya. Oleh karena itu, Yusril perlu memperhatikan persoalan ini dengan matang. Apalagi, perjuangannya agar pileg dan pilpres dilaksanakan serentak masih diagendakan pada pemilu selanjutnya.



Tentu saja ini menjadi pembuktian tantangan Yusril yang telah dideklarasikan sebagai capres yang diusung oleh PBB. Karena jika Yusril mengabaikan ini, maka bisa jadi blunder tersendiri bagi pencapresannya.

Apakah Yusril cukup kuat menjadi senjata unggulan untuk menaikkan elektabilitas partai? Ada dua skema yang bisa terjadi, Yusril akan mencoba menggali berbagai strategi agar partainya lolos ambang batas parlemen atau mengintip peluang untuk berkoalisi dengan parpol lain sedini mungkin. Tentu saja, Yusril akan memerlukan musyawarah dengan dewan syuro partai untuk memutuskan hal tersebut.

Peluang dan Tantangan di Pilpres 2014

Sebagai tokoh nomor satu di PBB, Yusril memiliki peluang besar untuk maju sebagai capres. Apalagi berbicara pengalaman di pemerintahan, semua orang sudah tidak akan ragu terhadap sosok Yusril. Ia telah banyak makan “asam-garam” pemerintahan, mulai dari Orde Baru hingga Reformasi. Terhitung, ia sudah tiga kali menjabat sebagai menteri di tiga periode

pemerintahan Indonesia. Lebih dari itu, Yusril juga seorang akademisi yang disegani. Gagasan-gagasannya tentang reformasi hukum di Indonesia selalu mendapat sambutan positif oleh masyarakat.

Meski demikian, tantangan Yusril tentu tentang elektabilitasnya yang masih rendah. Dalam beberapa survei, posisi elektabilitas Yusril selalu moderat dan bahkan tak jarang di posisi bawah. Hal itu terlihat dari hasil survei Pol-Tracking Institute periode 13 September-11 Oktober 2013 lalu yang menyebutkan posisi Yusril belum masuk 10 besar di antara tokoh nasional lainnya.

Selain itu, Yusril juga didukung partai yang masih cukup kecil, sulit untuk bisa mencapai ambang batas presiden kecuali melakukan koalisi. Partai Bulan Bintang tentu berbeda dengan partai semisal NasDem. Meskipun sama-sama partai baru, tapi NasDem memiliki jejaring media yang kuat dan kost politik yang melimpah. Sementara posisi Partai Bulan Bintang bisa dikatakan partai yang sangat kurang amunisi politiknya. Itulah tantangan yang harus segera dijawab dan diselesaikan oleh Yusril.

EPILOG

Menapak Jejak Para Ksatria Politik

Salah satu keunggulan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi adalah Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Tentu sistem pemilihan langsung yang telah berjalan saat ini memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat untuk menentukan siapa calon presiden (capres). Karena itu, Pemilu 2014 mendatang menjadi momentum penting bagi siapapun anak bangsa yang ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini, di mana presiden *incumbent* secara konstitusional tak bisa lagi mencalonkan diri.

Meski demikian, jika berbicara sirkulasi kepemimpinan di negeri ini, selalu saja menemukan model yang monoton. Kepemimpinan nasional selalu lahir dari empat rahim: dari kalangan militer, organisasi massa (aktivis), jalur pendidikan (intelektual), dan pasar/dunia bisnis (Jaweng, 2013). Keempat jalur kepemimpinan itulah yang kini berlangsung silih berganti. Padahal, ada dua ceruk kepemimpinan yang tak kalah penting diikutsertakan, yakni sirkulasi kepemimpinan lokal (daerah) dan kepemimpinan muda.

Jalur kepemimpinan lokal tak boleh diremehkan karena dalam banyak aspek, para pemimpin daerah—seperti gubernur, walikota/bupati—justru lebih mumpuni daripada elite partai yang sama sekali belum pernah mencecap asam-garamnya zona eksekutif. Sebab, keberhasilan figur daerah di level lokal adalah eksperimentasi jabatan eksekutif paling riil dalam

mengelola negara dalam ruang lingkup demografi yang lebih kecil dengan karakter khusus di masing-masing daerah. Ketangkasan mereka dalam menjalankan roda eksekutif telah teruji sehingga dalam hal transformasi kepemimpinan, figur daerah dianggap tak terlalu gagap.

Sementara kepemimpinan dari jalur muda juga tak kalah penting. Isu kepemimpinan kaum muda selalu menarik dan menyedot perhatian publik. Sebut saja Soekarno yang saat menjabat presiden masih berumur 44 tahun. Begitu pula Soeharto masih dipandang muda ketika ditunjuk lembaga MPRS menjadi presiden kedua dengan usia 46 tahun.

Harapan kepemimpinan muda ini tentu bukan pada persoalan umur, tapi pada semangatnya. Kaum muda dianggap memiliki semangat luar biasa yang bisa menjadi daya dobrak untuk melakukan perubahan cepat bagi bangsa. Memang, tokoh yang berusia tua bukan berarti tidak punya “semangat muda” dan tokoh muda bukan tidak mungkin semangatnya justru “semangat tua”.

Tidak ada dikotomi antara pemimpin muda dan pemimpin tua di sini. Sebab, bicara soal kepemimpinan tentu bicara soal nilai kepantasan. Siapapun orangnya, asalkan memiliki *track record* yang baik, integritas tinggi, kemampuan manajerial teruji, dan komitmen besar untuk membawa Indonesia ke dalam cita-cita kemerdekaan—yakni keadilan dan kesejahteraan—maka ia layak ikut berkontestasi.

Landasan itulah yang menjadi latar kenapa buku ini disusun. Kumpulan *success story* 35 tokoh ini bermaksud untuk mengupas seluk-beluk dan sisik-melik perjalanan sang tokoh, mulai dari zero hingga menjadi hero. Tentu tujuannya tidak lain hendak memunculkan figur-figur alternatif supaya “menu prasmanan” kadidasi Pilpres 2014 mendatang lebih banyak. Hal itu penting karena semakin banyak “menu capres” maka masyarakat akan disugahi banyak pilihan.

Selain akan terjadi seleksi yang ketat, banyaknya “menu capres” juga mendatangkan kompetisi yang sehat. Mereka yang benar-benar unggul dari berbagai aspeklah yang akan terpilih nantinya. Tentu tidak sedikit anak bangsa yang memiliki potensi besar untuk memimpin negeri ini tapi masih belum mendapat publisitas yang memadai. Di sinilah relevansinya kenapa buku ini hadir. Sebab, tujuan disusunnya buku ini tak lepas dari dua alasan penting.

Pertama, melalui buku ini, Pol-Tracking Institute hendak melakukan publisitas terkait figur-figur potensial anak bangsa yang sebagian masih sepi dari pemberitaan media. Sebab, kita khawatir masih banyak orang-orang yang sebenarnya sangat layak memimpin negeri ini tapi karena minus publisitas, peluang untuk menjadi R-1 menjadi sulit.

Hal itu masuk akal karena pertimbangan (*judgment*) pemilih salah satunya dipengaruhi oleh media massa (Firmanzah, 2012: 115). Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi merupakan kekuatan untuk membentuk opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika pemberitaan media massa tentang suatu tokoh bersifat positif, masyarakat cenderung melihat keberadaan tokoh tersebut sebagai sesuatu yang positif. Begitu sebaliknya, ketika media massa ramai-ramai memberitakan memburuknya tokoh, masyarakat cenderung menilainya negatif.

Kedua, buku ini menjadi sumbangan bagi Pol-Tracking Institute untuk ikut serta melakukan edukasi politik, membuka secara terang benderang siapa tokoh-tokoh negeri ini yang berpuang menjadi presiden. Dengan menyuguhkan deretan kisah sukses dari sang tokoh, Pol-Tracking Institute ingin mengingatkan kepada publik untuk benar-benar tidak salah dalam memilih pemimpin.

Di atas itu semua, harapan besar dari penulisan buku ini tak lain ingin menyemai partisipasi publik sebagai upaya penguatan demokratisasi. Dengan banyaknya menu capres, diharapkan antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2014 mendatang semakin tinggi. Sebab, dalam konteks partisipasi publik, ada grafik menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 misalnya, partisipasi publik sebesar 92,7 persen, tahun 2004 sebesar 84,07, dan tahun 2009 sebesar 71 persen. Sementara untuk Pilkada, tingkat partisipasi publik antara 50-70 persen saja. Akhirnya, semoga buku ini bisa menjadi bagian penting dari upaya mencari pemimpin terbaik bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husain; Herbawati, Neneng dan Suruji, Andi. 1996. *JK Ensiklopedia*. Jakarta: Idea Group Indonesia.
- Aditya, Willy. 2012. *Mari Bung Rebut Kembali*. Jakarta: MI Publishing.
- Adu Susilo, Taufik. 2009. *Inilah Capres 2009*. Jakarta: Kelompok Penerbit Ar-Ruzz Media.
- Alie, Marzuki. 2013. *Pemasaran Politik di Era Multipartai*. Jakarta: Expose.
- Bakrie, Aburizal. 2012. *Langit Biru Padi, Makin Menguning*. Jakarta.
- Basah, Ranting, dkk, Aher Undercover, KhazanahIntelktual, Bandung, 2013
- Basri, Syafiq. 2014. *Melampaui Mimpi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Bird, R. M dan F. Vaillancourt (Editor). 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bubalo, Anthony, Greg Fealy, dan Whit Mason. *PKS & Kembaranya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, dan Turki*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Budiarti, Rita Triana. 2010. *On The Record: Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaniago, Hasri. 2012. *Irman Gusman: Jiwa yang Merajut Nusantara*. Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.
- Chaniago, Hasril dan Tim Penyusun. 2013. *Irman Gusman: Demi Satu Indonesia*. Jakarta: PT Hafa Quadrant Indonesia.
- Daniel S, Tumpal. 2005. *Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang*. Jakarta: Tudiskalam.

- Davaro, Tim, dan Yugha E. 2014. *Petarung Politik: Profil Capres-Cawapres RI Potensial*. Jakarta: Erlangga.
- De Fretes, Yvonne & Sri Hastuti, Rita. 2012. *Megawati Anak Putra Sang Fajar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djalal, Dino Patti. 2008. *Harus Bisa : Seni Memimpin ala SBY*. Red and White Publishing
- Djalal, Dino Patti. 2013. *Nasionalisme Unggul : Bukan Hanya Slogan*. Red and White Publishing
- Dwi Riyanto, Guruh, dan Ariefana, Pebriyansyah. 2014. *Rapor Capres: Analisa dan Prediksi Menuju RI-1*. Jakarta: Galang Pustaka.
- Endah, Alberthiene. 2012. *Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta*. Solo: Metagraf.
- Food Agriculture Organization (FAO). 1995. *World Agriculture: Toward 2010*. John Wiley & Sons.
- Gaffar, Affan. 1992. *Javanese Voters*. Yogyakarta: UGM Press.
- Gunawan, Markus. 2013. *Ahok: Kobo Jakarta Baru*. Jakarta: Visi Media.
- Habibie, BJ. 2006. *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Menuju Demokrasi*. Jakarta: The Habibie Centre.
- Hafidz, Abdullah dkk (ed). 1997. *HMI dan Kahmi Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.
- Heryadi, Ecep, dkk. 2013. *Dahlan Iskan: Sang Pendobrak Kebekuan Birokrasi*. Jakarta: Biografi Sukses Indonesia.
- Hisyam, Usamah, dkk. 2001. *Editorial Kehidupan Surya Paloh*. Jakarta: Yayasan Dharmapada Nusantara.
- Husnil, Muhammad. 2014. *Melunasi Janji Kemerdekaan: Biografi Anies Rasyid Baswedan*. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Iskan, Dahlan. 2011. *Dua Tangis dan Ribuan Tawa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Iskandar, Muhaimin. 2010. *Gus Dur: Pemikiran dan Perjuangan*. Yogyakarta: LKIS.
- Kamil, Faisal Arief. 2013. *Kegagalan Perluasan Basis Politik Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik: Kajian Semiotika Terhadap Iklan Politik Televisi dan Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Potongan Iklan Politik "PKS Itu. . ."*. Skripsi S1 pada Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta PT: Raja Grafindo Persada.

- Kumoro, Bawono. 2012. *Hatta Kerja dan Kinerja*. Jakarta: DCSC Publishing.
- Lugina, Wenny Artha. 2013. *Matahari Kutai Timur*. Yogyakarta: JB Publisher.
- Ma'ruf, Ade. 2013. *Megawati Soekarnoputri, Riwayat Pribadi dan Politik Bung Karno*. Yogyakarta: Arruz Media
- Mahendra, Yusril Ihza. 2004. *Rekonsiliasi Tanpa Mengkhianati Reformasi*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Mahfud MD, Muhammad. 2003. *Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Muhammad. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Muhammad. 2006. *Potret Akedemisi dan Politisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud MD, Muhammad. 2010. *Gus Dur: Politik, Islam, dan Kebangsaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Marzuki Alie. *Pidato Debat Capres Konvensi Partai Demokrat II*.
- Matta, Anis. 2014. *Momentum Kebangkitan*. Jakarta: Bidang Arsip dan Sejarah Sekretariat Jenderal DPP PKS.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Patti Djalal, Dino. 2013. *Nasionalisme Unggul: Bukan Hanya Slogan*. Jakarta: Red and White Publishing.
- Pohan, Syarifuddin. 2011. *Achmad Bakrie : Sebuah Potret Kerja Keras, Kejujuran, dan Keberhasilan*. Jakarta : Bakrie and Brothers.
- Pol-Tracking Institute. *Kecenderungan Sikap & Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014: Survei Nasional Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Pemilu 2014 (Oktober 2013)*
- Pramono, SB. 2013. *Rhoma Irama untuk Indonesia*. Jakarta: Grafindo Litera Media.
- Prasodjo, Charles Adi. 2012. *Matahariku Indonesia*. Yogyakarta: Diva Press.
- Puspitorini, Ira. 2013. *True Spirit Hary Tanoesoedibjo*. Jakarta: Indo Literasi.
- Rachmanto. 2012. *Dahlan Iskan: Pemimpin yang Happy*. Makasar: Arus Timur.
- Rahmat, M Arief. 2013. *Hary Tanoesoedibjo: Apa Lagi yang Dicari*. Jakarta: Media Pressindo.
- Reeve, David. 2013. *Golkar: Sejarah Yang Hilang*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ridwan, M. Deden dan M. Muhadjirin. 2003. *Membangun Konsensus*:

- Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rif'an, Ali, dan Hidayat, Gufron. 2013. *Mahfud MD: Sang Penjaga Konstitusi*. Jakarta: Biografi Sukses Indonesia.
- Rini, Ira Puspito. 2013. *Tru Spirit Gita Witjawan*. Jakarta: Indo literasi.
- Ripangi, Arip. 2014. *Sisi Lain Ahok*. Jakarta: Glosari Media.
- Robinson, Richard. 2013. *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sandjojo, Hari dan Friman Yusak. 2008. *Sutiyoso dalam Catatan Media Masa*. Jakarta: Next Reign Media.
- Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004*. 2004. Jakarta: Kompas.
- Sarundajang, Sinyo Harry. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Shah, A. 1998. *Balance Accountability and Responsiveness: Lesson about Decentralization*. Washington: World Bank.
- Shofan, Moh. 2014. *Rhoma Irama : Politik Dakwah dalam Nada*. Bandung: Penerbit Imania.
- Simanullang, Robin Ch. 2013. *Sutiyoso The Field General: Totalitas Prajurit Para Komando*. Jakarta: Pustaka Tokoh Indonesia.
- Soedarmanta, JB. 2013. *Prabowo Subianto: Tegas Memihak Rakyat*. Jakarta: Literatur Media Sukses.
- Subroto, Hendro. 2009. *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsono. 2012. *Isran Noor: Jaga Integritas Indonesia*. Jakarta: BI Press.
- Suharsono. 2013. *Indonesia Negara Maritim Terbesar di Asia*. Jakarta: Bangun Indonesia Press.
- Suwiknyo, Dwi. 2012. *Jokowi Pemimpin yang Rendah Hati*. Makasar: Arus Timur.
- Terhadap Cita-Cita Ketahanan dan Kedaulatan Pangan' dalam Menatap Indonesia dari Kampus Bulaksumur*. 2013. Yogyakarta: BEM KM UGM.
- Ter-Minassian, T. 1997. *Intergovernmental Fiscal Relations in a Macroeconomic Perspective: An Overview*. Washington: International Monetary Fund.
- Thayrun, Yon. 2012. *Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker*. Jakarta: Noura Books.

- Weber, Max. 1974. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: The Free Press.
- Widodo, Sri. 2001. *Ketahanan Pangan Pada Era Globalisasi dan Otonomisasi*. Universitas Gadjah Mada: Jurnal Agro Ekonomi.
- Wihana Kirana Jaya. 2010. *Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi UGM.
- Wiranto. 2011. *7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda.
- Wiranto: *Pengalaman, Gagasan, dan Tindakan*. 2013. Pustaka Vittrione.
- World Bank. 2002. *World Development Report 2002: Building Institutions for Market*. New York: Oxford University Press.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati : Dari Dilema ke Kompromi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Yursak, Firman. 2007. *Kepemimpinan Sutiyoso di Mata Publik*. Jakarta: Next Reign Media.

MEDIA CETAK DAN INTERNET

- Akbar Tandjung [online]. http://id.wikipedia.org/wiki/Akbar_Tanjung (Diakses 12 Desember 2013).
- Akbar Tandjung [online]. <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/akbar-tanjung/> (Diakses 12 Desember 2013).
- Alasan Hary Tanoe Mundur dari Partai NasDem, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/25/078463493/Alasan-Hary-Tanoe-Keluar-NasDem-dan-Pilih-Hanura>, Diakses tanggal 21 Januari 2013.
- Ali Masykur Mundur BPK Jika Menang Konvensi [online]. <http://www.suarapembaruan.com/home/ali-masykur-mundur-bpk-jika-menang-konvensi/42518> (Diakses Desember 2013).
- Ali Masykur Musa [online]. <http://www.tokohindonesia.com/tokoh/article/282-ensiklopedi/615-ali-masykur-musa> (Diakses Desember 2013).
- Alimasykurmus.com: <http://alimasykurmus.com/wacana/> (Diakses Desember 2013).
- Amanahme. 2012. *Infrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia*. <http://amanahtp.wordpress.com/2012/01/28/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik->

di-indonesia/. Diakses 20 Maret 2014

Anies Baswedan [online]. http://id.wikipedia.org/wiki/Anies_Baswedan (Diakses 17 Desember 2013).

Anies Baswedan Capres 2014 [online]. <http://aniesbaswedan.com/anies-baswedan-capres-2014> (Diakses 17 Desember 2013).

Anies Baswedan Luncurkan Situs Sukarelawan (online). <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/12/078553629/Anies-Baswedan-Luncurkan-Situs-Sukarelawan>. Diakses 20 Maret 2014.

Anies Baswedan, Tokoh Intelektual Peduli Bangsa [online]. <http://djarumbeasiswaplus.org/artikel/content/100/Tokoh-Kita:-Anies-Baswedan,-Intelektual-Muda-Peduli-Bangsa/> (Diakses 17 Desember 2013).

Anies Rasyid Baswedan [online]. <http://news.detik.com/tokoh/195/0/anies-rasyid-baswedan-ph-d>. (Diakses 17 Desember 2013).

Anis Matta Masih Capres PKS Terkuat hasil Polling, (online), <http://www.hidayatullah.com/read/2013/11/29/7548/anis-matta-masih-capres-pks-terkuat-hasil-polling.html>, Diakses tanggal 29 November 2013

Anis Matta: Masa Sulit PKS Sudah Teratasi, (online), <http://www.antaranews.com/berita/406333/anis-matta-masa-sulit-pks-sudah-teratasi>, 23 November 2013

Anis Matta: Pemimpin 45 Tahun Akan Bermunculan", (online) , <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/14/mw97n6-anis-matta-pemimpin-45-tahun-akan-bermunculan> Diakses tanggal 14 November 2013.

Anis Matta: Tidak Sulit Memimpin Indonesia, (online), "http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/10/mwotes-anis-matta-tidak-sulit-memimpin-indonesia, Diakses tanggal 10 November 2013

Bergerak demi Kepentingan Orang Banyak [online]. <http://majalahbisnisglobal.co/bergerak-kepentingan-orang-banyak-959.html> (Diakses Desember 2013).

Biografi Akbar Tandjung [online]. <http://biografi.rumus.web.id/biografi-akbar-tanjung/>. (Diakses 12 Desember 2013).

Biografi Rhoma Irama Sang Raja Dangdut [online]. <http://kolom-biografi.blogspot.com/2011/09/biografi-rhoma-irama-sang-raja-dangdut.html>. (Diakses 19 Desember 2013).

- Buletin Universitas Islam Negeri Jakarta
- Cara Tri Rismaharini Memimpin Surabaya, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/30/0830542/Cara.Tri.Rismaharini.Memimpin.Surabaya> Diakses tanggal 30 November 2013.
- Daftar Pesantren di Kabupaten Tulungagung [online]. http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_Kabupaten_Tulungagung (Diakses Desember 2013).
- Dahlan Iskan Bela Gita Wirjawan Soal Impor, (online), <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/1640491/Dahlan.Iskan.Bela.Gita.Wirjawan.soal.Impor> Diakses tanggal 27 November 2013.
- Data dan Fakta Sosok Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto [online]. <http://forum.viva.co.id/pemilu/1314843-data-dan-fakta-sosok-jenderal-purn-endriartono-sutarto.html>. (Diakses 24 Desember 2013).
- Di Bali, Anis Matta Ungguli HNW untuk Capres PKS, (online), <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/463889-di-bali--anis-matta-ungguli-hnw-untuk-capres-pks> Diakses tanggal 4 Desember 2013
- Djonharro, H. M. 2011. Mengutip dari Website KOSGORO 1957 : KOSGORO 1957, Merambah Langkah Sejarah. <http://solidaritas57sumut.blogspot.com/2012/02/kosgoro-1957-merambah-langkah-sejarah.html>
- Dongkrak Elektabilitas, Marzuki Alie Minta Bantuan Wartawan, (online), <http://www.suarapembaruan.com/home/dongkrak-elektabilitas-marzuki-alie-minta-bantuan-wartawan/40860> Diakses tanggal 28 Agustus 2013
- Dua Dunia Gita Wirjawan, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2009/02/08/004159012/Dua-Dunia-Gita-Wirjawan-bagian-ke-1-dari-2-tulisan>, Diakses tanggal 8 Februari 2009
- Elektabilitas Rendah, Marzuki Alie Tetap Percaya Diri, (online), <http://politik.news.viva.co.id/news/read/442058-elektabilitas-rendah--marzuki-alie-tetap-percaya-diri>
- Gita Wirjawan Besar dari Keluarga Santri, (online), <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2033837/gita-wirjawan-besar-dari-keluarga-santri>, Diakses tanggal 30 September 2013
- Gita Wirjawan: Impor Kedelai Kini Bebas, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/04/090510153/Gita-Wirjawan-Impor-Kedelai-Kini-Bebas>, Diakses tanggal 4 September 2013

- Golkar Sulsel Siap Menangkan Pemilu <http://m.news.viva.co.id/news/read/493277-golkar-sulsel-siap-menangkan-pemilu>, diakses April 2014
- Gubernur Tagih Program SKPD, http://www.fajar.co.id/metromakassar/3227467_5662.html diakses April 2014
- Gubernursarundajang.blogspot.com: <http://gubernursarundajang.blogspot.com/> (Diakses Desember 2013).
- Harian Kompas, Rabu 16 Oktober 2013.
- Harian Republika, 28 Maret 2008.
- Harian Republika, 12 September 2003
- Harian Republika, 22 Mei 1998
- Harian Republika, Edisi Ahad 9 Juni 2013. "Selamat Jalan Pak Taufiq".
- Harian Republika, Jumat 2 Mei 2008
- Harian Republika, Jumat 7 Januari 1994
- Harian Republika, Sabtu 24 Oktober 2009
- Harian Republika, Sabtu 31 Agustus 2013.
- Harian Republika, Selasa 28 Agustus 2001
- Harian Republika, Selasa 28 Oktober 1997
- Harian Republika, Selasa 4 Januari 1994
- Harian Republika, Senin 23 Desember 1996
- Hary Tanoe Tularkan Ilmu Bisnis - "Hidup Tidak Seperti Perhitungan Matematika" <http://m.koran-sindo.com/node/309409>
- Hary Tanoe Tularkan Ilmu Bisnis, (online), <http://www.koran-sindo.com/node/309409>, Diakses tanggal 8 September 2013.
- Hary Tanoe: Generasi Muda Jadi Tulang Punggung Negara, (online), <http://kampus.okezone.com/read/2013/04/16/373/792381/hary-tanoe-generasi-muda-jadi-tulang-punggung-negara>, Diakses tanggal 16 April 2013.
- Hary Tanoesoedibjo Dibebani Tanggung Jawab Besarkan NasDem, (online), <http://news.okezone.com/read/2011/11/09/339/527114/hary-tanoesoedibjo-dibebani-tanggung-jawab-besarkan-nasdem>, Diakses tanggal 9 November 2011.
- Hayono Isman Dinilai Sosok yang Berpengalaman [online]. <http://www.rmol.co/read/2013/11/23/134255/Hayono-Isman-Dinilai-Sosok-yang-Berpengalaman-> (Diakses Desember 2013).
- Hidayat Nur Wahid menang telak di DIY, (online), <http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/07/12/814344/hidayat-nur-wahid-menang->

telak-di-diy, 7 Desember 2013.

Hidayat Nurwahid Unggul di Pemira PKS Kepri, (online), <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/12/02/mx62r7-hidayat-nurwahid-unggul-di-pemira-pks-kepri> Diakses tanggal 2 Desember 2013
<http://hasbihtc.com/profil-syahrul-yasin-limpo.html> (Diakses 26 Desember 2013)

<http://ahok.org/berita/news/jokowi-ahok-banyak-sama-sedikit-beda/>

<http://ahok.org/berita/news/jokowi-ahok-banyak-sama-sedikit-beda/>

<http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/>

<http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/>

<http://ahzami.wordpress.com/2013/02/22/asep-penjual-gorengan-aher-undercover/>

<http://antikorupsi.org/en/content/kado-uang-hidayat-rp-191-juta-kpk-teliti-apakah-ada-gratifikasi>

<http://aryafatta.wordpress.com/2009/04/20/mengorek-masa-kecil-gubernur-sulsel/>. Diakses pada 26 Desember 2013.

<http://bakrie-brothers.com/uploads/files/ACHMAD%20BAKRIE.pdf>.
 diakses 20 Maret 2014

<http://catatansikecil.blogdetik.com/tag/ahmad-heryawan/>

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/21/09465045/Program>.

Pendidikan. Gratis. Habiskan. Rp. 800. Miliar. Diakses pada 26 Desember 2013.

<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1754472/URLTEENAGE#.UwaAymKSyvU>

<http://endriartonosutarto.web.id/profil>. (Diakses 24 Desember 2013).

<http://female.kompas.com/read/2013/04/02/09175779/Sejarah.Berulang.di.Bulan.Maret>

<http://gudang-biografi.blogspot.com/2010/01/biografi-wiranto.html>
 (Diakses 15 Desember 2013)

<http://hatta-rajasa.info>

<http://icalbakrie.com/?p=1374> diakses Mei 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Anis_Matta

http://id.wikipedia.org/wiki/Dino_Patti_Djalal

http://id.wikipedia.org/wiki/Endriartono_Sutarto. (Diakses 24 Desember 2013).

http://id.wikipedia.org/wiki/Cita_Wirjawan

http://id.wikipedia.org/wiki/Hatta_Rajasa

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidayat_Nur_Wahid

http://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Alie

http://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto (Diakses 9 Desember 2013).

http://id.wikipedia.org/wiki/Rhoma_Irama. (Diakses 19 Desember 2013).

http://id.wikipedia.org/wiki/Surya_Paloh

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sutiyoso>(Diakses 16 Desember 2013).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sutiyoso>. Diakses pada 16 Desember 2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Syahrul_Yasin_Limpo(Diakses 26 Desember 2013)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wiranto> (Diakses 15 Desember 2013)

<http://isrannoor-otoda.com/profil-isran/diakses> 20 Maret 2014, Pkl. 02. 43 WIB

http://isrannoor-otoda.com/versiz/wp-content/uploads/2013/09/Rajut_Otonomi.pdf, 20 Maret 2014, diakses Pkl. 09. 15 WIB

<http://koran-sindo.com/node/296935>, diakses 26 Maret 2014, Pkl. 11:42

<http://koran-sindo.com/node/347925>(Diakses 26 Desember 2013)

<http://lingkarstudyrumput.blogspot.com/2013/12/nurhayati-yasin-limpo-tokoh-ibu-dan.html>. (Diakses 26 Desember 2013)

<http://lingkarstudyrumput.blogspot.com/2013/12/nurhayati-yasin-limpo-tokoh-ibu-dan.html>. Diakses pada 26 Desember 2013.

<http://marzukialie.com/?show=profile>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/16/0909044/Kenakalan>.

Masa. Kecil. Ahok. dari. Penangkal. Guna-guna. sampai. Salah. Tembak

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/16/0909044/Kenakalan>.

Masa. Kecil. Ahok. dari. Penangkal. Guna-guna. sampai. Salah. Tembak

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0814229/Kisah_Ahok.

Pernah. Hidup. Susah. di. Jakarta

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/17/0814229/Kisah_Ahok.

Pernah. Hidup. Susah. di. Jakarta

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/298840-dianggap-tak-kenal-jakarta--ini-kisah-ahok> . diakses pada Desember 2013

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/298840-dianggap-tak-kenal-jakarta--ini-kisah-ahok> . diakses pada Desember 2013

- <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/17/2236504/Akbar.Tandjung.Ingin.Evaluasi.lcal.Sampaikan.di.Rapimnas> diakses 20 Maret 2014, Pkl. 7:59 WIB
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/22/1754112/Anis.Matta.dan.Hidayat.Tokoh.PKS.dengan.Elektabilitas.Tertinggi>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/08/1855472/Sarundajang.Ingin.Jokowi.Jadi.Cawapresnya>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/17/2250501/Ahok.Masuk.Tiga.Besar.Kandidat.Cawapres.Versi.Survei.PDB> diakses Desember 2013
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/08/1501270/Inilah.9.Nama.Bakal.Capres.PPP> diakses 20 Maret 2014, Pkl. 21. 50 WIB
- <http://news.detik.com/read/2012/07/19/105224/1969282/10/kisah-dino-patti-djalal-dari-pencuci-piring-hingga-dubes-ri> diakses 27/3/20124, Pkl. 3:01
- <http://news.detik.com/read/2014/01/27/115034/2479073/10/masyarakat-ingin-jokowi-jadi-presiden-ahok-tetap-di-dki?9922032> , diakses januari 2014
- <http://news.detik.com/read/2014/01/27/115034/2479073/10/masyarakat-ingin-jokowi-jadi-presiden-ahok-tetap-di-dki?9922032> , diakses januari 2014
- <http://news.detik.com/read/2014/02/20/182721/2503986/10/pramono-edhie-kapal-singapura-juga-tak-boleh-berlayar-di-laut-indonesia?n992204fksberitadsfdfsdiakses> 28 Maret 2014, Pkl 22:35
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/486046-ditemui-senator--arb-bilang--hati-saya-papua-> diakses Mei 2014
- <http://portal.hatta-rajasa.info/read/1385/pidato-hatta-rajasa-pada-acara-temu-kader-dan-konsolidasi-pan>
- <http://pramonoedhiewibowo.com/>diakses 28 Maret 2014, Pkl. 10. 30 WIB
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/ahmad-heryawan/>diakses 27 Maret 2014, Pkl. 11:51
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/ahmad-heryawandi>diakses 27 Maret 2014, Pkl. 11:51
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/akbar-tanjung/> diakses 19 Maret, Pkl. 02. 30 WIB
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/d/dino-patti-djalal/> diakses

27/3/2014, Pkl 7:46

<http://profil.merdeka.com/indonesia/p/pramono-edhie-wibowo/>. (Diakses 20 Desember 2013)

<http://profil.merdeka.com/indonesia/p/pramono-edhie-wibowo/> diakses 28 Maret 2014, Pkl. 22:25 WIB

<http://profil.merdeka.com/indonesia/p/puan-maharani/>. (Diakses 25 Desember 2013).

<http://profil.merdeka.com/indonesia/s/sutiyoso>. Diakses pada 16 Desember 2013.

<http://profil.merdeka.com/indonesia/s/sutiyoso/> (Diakses 16 Desember 2013).

<http://profil.merdeka.com/indonesia/w/wiranto/> (Diakses 15 Desember 2013)

<http://rakyatsulsel.com/gubernur-canangkan-sulsel-provinsi-koperasi.html> diakses 26 Maret 2014, diakses 26 Maret 2014 Pkl. 11:45

<http://regional.kompas.com/read/2012/04/03/09434228/Syahrul.Yasin.Limpo.Yang.Penting.Kerja.Keras> diakses 26 Maret 2014, Pkl 2:25

<http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/16/mgovtm-ini-dia-panggilan-sutiyoso-di-kopasus> . Diakses pada 16 Desember 2013.

<http://showbiz.liputan6.com/read/735833/rhoma-irama-kecil-yang-hobinya-berkelahi> diakses 29 Maret 2014

<http://shs1234.wordpress.com/2010/03/13/jejak-langkah-dan-karya-sinyo-harry-sarundjang-dalam-rekaman-waktu/> Diakses pada 5 Maret 2014

<http://skalanews.net/daerah-355-dr-h-syahrul-yasin-limpo-sh-mh-msi--pemimpin-masa-depan-tegas-berani-dan-teruji.html> , diakses April 2014

<http://sosok.kompasiana.com/2013/09/16/kue-pembangunan-dan-dendam-masa-kecil-ahmad-heryawan--590132.html>

<http://tempo.co.id/harian/profil/prof-sutarto.html>. (Diakses 24 Desember 2013).

<http://tempo.co/topik/tokoh/93/Pramono-Edhie-Wibowo>. (Diakses 20 Desember 2013)

<http://tokoh.blogspot.com/2005/07/akbar-tandjung-dunia-politik-sudah.html>. Diakses pada 12 Desember 2013.

[www.bacaan-indo.blogspot.com](http://tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/339-mengasah-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- mutiara-dalam-dirinya . Diakses pada 16 Desember 2013.
<http://www.anismatta.wordpress.com>
<http://www.ahmadheryawan.com/home/ahmad-heryawan> profil diakses
 27 Maret 2014, Pkl. 11:56
<http://www.anneahira.com/film-roma-irama.htm> diakses 29 Maret 2014
<http://www.antaraneews.com/berita/184905/anies-baswedan-masuk-20-tokoh-dunia-20-tahun-mendatang> diakses 21 Maret 2014, Pkl. 17:43 WIB
<http://www.ayogitabisa.com>
<http://www.beritasatu.com/hukum/165191-kirim-sekoci-imigran-ke-ri-australia-dinilai-dorong-kematian-massal.html> diakses 28 Maret 2014,
 Pkl. 22:37
<http://www.demokrat.or.id/2014/01/sarundajang-bahas-terwujudnya-negara-kepulauan-yang-sejahtera/>
<http://www.diasporaindonesia.org/> diakses 27/3/2014, Pkl. 11:16
<http://www.hayonoisman.com/profil/>
<http://www.hidayatnurwahid.com>
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2f8c2bb7e45/kepala-daerah-gugat-uu-minerba>, diakses 20 Maret 2014, Pkl. 22. 18 WIB
http://www.indonesia-2014.com/read/2012/11/25/tentara-yang-menyelamatkan-demokrasi#.UoK660o_Sosdi diakses 7 April 2014, 21:51
<http://www.jpnn.com/read/2013/05/25/173707/index.php?mib=berita.detail&id=172290>, diakses 20 Maret 2014, Pkl. 22. 12 WIB
<http://www.jurnalparlemen.com/view/3824/3-rahasia-marzuki-alie-menghemat-biaya-kampanye.html>
<http://www.konvensirakyat.com/artikel.php>, diakses 20 Maret 2014, Pkl. 21. 43 WIB
<http://www.koran-sindo.com/node/347925>, diakses 26 Maret 2014, Pkl. 2:34
<http://www.kumpulansejarah.com/2012/11/sejarah-singkat-kehidupan-rhoma-irama.html> diakses 29 Maret 2014
<http://www.kutaitimurkab.go.id/visimisi/>, diakses 20 Maret 2014, Pkl. 08. 30 WIB
<http://www.leadership-park.com/new/The-park/hisran-noormsi-magnetic-leader.html>, diakses 20 Maret 2014, Pkl. 08. 42 WIB
<http://www.lensaIndonesia.com/2012/03/04/bagi-wiranto-jadi-presiden-ri-itu-sangat-mudah.html> diakses 7 April 2014, 22: 09
<http://www.marzukiAlie.com>
http://www.marzukialie.com/upload/arsip/199_Debat%20Capres%2011.

pdf diakses mei 2014

[http://www.merdeka.com/peristiwa/7-cerita-kontroversi-rhoma-irama.](http://www.merdeka.com/peristiwa/7-cerita-kontroversi-rhoma-irama)

html diakses 29 Maret 2014

<http://www.merdeka.com/politik/cerita-ahok-gelontorkan-uang-untuk-jadi-bupati-dan-anggota-dpr>.html

<http://www.merdeka.com/politik/cerita-ahok-gelontorkan-uang-untuk-jadi-bupati-dan-anggota-dpr>.html

<http://www.merdeka.com/politik/survei-cawapres-elektabilitas-ahok-melejit-salip-dahlan-iskan>.html

<http://www.merdeka.com/politik/survei-cawapres-elektabilitas-ahok-melejit-salip-dahlan-iskan>.html

<http://www.modernisator.org/manifesto> diakses 27/3/2014 Pkl. 11:14

<http://www.partainasdem.org>

<http://www.pemilu.com/berita/2013/09/biografi-dino-patti-djalal/> diakses 27/3/2014, Pkl. 8:02

<http://www.pemiluindonesia.com/profile/ir-akbar-tandjung>.html diakses 20 Maret 02. 15

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/09/02/mshg91-mengapa-menolak-miss-world> Diakses tanggal 2 September 2013

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/10/mw2ojs-megawati-bocorkan-proses-pencalonan-jokowiahok-di-pilkada-jakarta>, diakses Desember 2013

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/10/mw2ojs-megawati-bocorkan-proses-pencalonan-jokowiahok-di-pilkada-jakarta>, diakses Desember 2013

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/12/29/myk55e-hnw-menangi-pemira-pks>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/30/msbpsq-habibie-jelaskan-pencopotan-prabowo-dari-pangkostrad>. (Diakses 9 Desember 2013).

<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/02/10/norxig-kirim-surat-anies-baswedan-kritik-konvensi-demokrat> diakses 21 Maret 2014, Pkl. 14. 43 WIB

<http://www.suarapembaruan.com/home/pramono-edhi-wibowo-dinilai>

- pantas-jadi- kasad/8456 diakses 28 Maret 2014, Pkl. 22:23 WIB
<http://www.suarapembaruan.com/home/sinyo-sarundajang-siap-berpasangan-dengan-siapa-saja-termasuk-jokowi/47663>
<http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2013/09/04/files/assets/basic-html/page16.html>
<http://www.sulsel.go.id/content/visi-dan-misi-provinsi-sulawesi-selatan>
 diakses 26 Maret 2014, Pkl. 11:53
<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/309-kedepankan-moral-dan-dakwah>
<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3562-calon-panglima-tni-2013-dan-capres-2014>diakses 28 Maret 2014, Pkl. 22:42
<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3810-bersahaja-dan-berani-antikorupsi>
<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3810-bersahaja-dan-berani-antikorupsi>
<http://www.tokohindonesia.com/tokoh/article/282-ensiklopedi/185-wiranto> (Diakses 15 Desember 2013).
<http://www.tokohindonesia.com/tokoh/article/282-ensiklopedi/314-surya-paloh>
<http://www.tokohtokoh.com/rhoma-irama.html> diakses 29 Maret 2014
<http://www.vemale.com/inspiring/people-we-love/20396-kesederhanaan-dalam-kisah-cinta-pak-ahok-dan-ibu-veronika.html>
<http://www.vemale.com/inspiring/people-we-love/20396-kesederhanaan-dalam-kisah-cinta-pak-ahok-dan-ibu-veronika.html>
<http://yogajustice313.wordpress.com/2012/11/14/ahmad-heryawan-gubernur-yang-kaya-akan-prestasi/>
 Hukumonline.com: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2f8c2bb7e45/kepala-daerah-gugat-uu-minerba> (Diakses Desember 2013).
id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_X
id.wikipedia.org/wiki/Hary_Tanoesoedibjo
id.wikipedia.org/wiki/Hidayat_Nur_Wahid
 Ini Alasan Endriartono Tinggalkan NasDem untuk Demokrat [online].
<http://nasional.kompas.com/read/2013/08/27/1828595/Ini.Alasan>.

Endriartono. Tinggalkan. Nasdem. untuk. Demokrat. (Diakses 24 Desember 2013).

Ini Alasan Hayono Isman Ingin Jadi Presiden [online]. Kompas.com:[http://nasional.kompas.com/read/2013/08/27/2203532/Ini. Alasan. Hayono. Isman. Ingin. Jadi. Presiden](http://nasional.kompas.com/read/2013/08/27/2203532/Ini_Alasan_Hayono_Isman_Ingin_Jadi_Presiden) (Diakses Desember 2013).

Ini Alasan Surya Paloh Henggang dari Golkar, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/02/078533852/Ini-Alasan-Surya-Paloh-Henggang-dari-Golkar> Diakses tanggal 2 Desember 2013

Ini Cara Tri Rismaharini Antisipasi Kemacetan di Surabaya, (online), <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/29/ini-cara-tri-rismaharini-antisipasi-kemacetan-di-surabaya>, Diakses tanggal 29 November 2013

Ini Dia Panggilan Sutiyoso di Kopasusu [online]. <http://republika.co.id/berita/nasional/umum/13/01/16/mgovtm-ini-dia-panggilan-sutiyoso-di-kopasus> (Diakses 16 Desember 2013).

Irman Gusman Yakini Menangkan Konvensi Demokrat [online]. [http://nasional.kompas.com/read/2013/09/11/1911184/Irman. Gusman. Yakini. Menangkan. Konvensi. Demokrat](http://nasional.kompas.com/read/2013/09/11/1911184/Irman.Gusman.Yakin.Menangkan.Konvensi.Demokrat) (Diakses Desember 2013).

Isran Noor dari Kabupaten untuk Negeri [online] <http://www.antaranews.com/berita/298189/isran-noor-dari-kabupaten-untuk-nkri> (Diakses Desember 2013).

Isran Noor Yakini Manangi Atas Gugatan Churchill [online]. <http://www.antaranews.com/berita/335247/isran-noor-yakin-menangi-atas-gugatan-churchill> (Diakses Desember 2013).

Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto Reformis Siap Pimpin Indonesia [online]. <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/jenderal-purn-endriartono-sutarto-jenderal-reformis-siap-pimpin-indonesia-110320.html> (Diakses 24 Desember 2013).

Jika Anis Matta Jadi Presiden Indonesia, (online), <http://www.islamtimes.org/vdcg379wxak9xw4.1ira.html> Diakses tanggal 10 November 2013

Jika Menang Konvensi Irman Gusman Siap Jadi Kader Demokrat [online]. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/08/31/mse1w3-jika-menang-konvensi-irman-gusman-siap-jadi-kader-demokrat> (Diakses Desember 2013).

Jokowi dan Surya Paloh, Tokoh Politik Paling Pluralis – Nasional, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/10/1252246/LPI.Jokowi>.

- dan. Surya. Paloh. Tokoh. Politik. Paling. Pluralis, Diakses tanggal 10 November 2013
- Kabupaten Tulungagung [online] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung (Diakses Desember 2013).
- Karier Militer Pramono Edhie [online]. <http://jeffriegeovanie.com/index.php/artikel/figur/151-karir-militer-pramono-edhie-wibowo>. (Diakses 20 Desember 2013)
- Kawangkoa Minahasa [online] http://id.wikipedia.org/wiki/Kawangkoa,_Minahasa (Diakses Desember 2013).
- Kekayaan Hary Tanoe Melonjak Menjadi Rp 15 Triliun, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/22/090531577/Kekayaan-Hary-Tanoe-Melonjak-Menjadi-Rp-15-Triliun>, Diakses tanggal 22 November 2013
- Ketika Puan Mengenang Masa Kecil Bersama Tatam dan Nanan [online]. <http://politik.kompasiana.com/2013/10/19/ketika-puan-mengenang-masa-kecil-bersama-tatam-dan-nanan-tulisan-lama-601923.html>. (Diakses 25 Desember 2013).
- Kisah Dino Patti Djalal, dari Pencuci Piring Hingga Dubes RI, (online), <http://news.detik.com/read/2012/07/19/105224/1969282/10/kisah-dino-patti-djalal-dari-pencuci-piring-hingga-dubes-ri>, Diakses tanggal 19 Juli 2012
- Kisah Pribadi Hatta Rajasa soal Energi Kedekatan Ibu dan Anak, (online), <http://www.beritasatu.com/gayahidup-keluarga/144034-kisah-pribadi-hatta-rajasa-soal-energi-kedekatan-ibu-dan-anak.html>, Diakses tanggal 12 Oktober 2013
- Komite Inovasi Nasional Minta Dilibatkan dalam Rakor Gubernur <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/03/komite-inovasi-nasional-minta-dilibatkan-dalam-rakor-gubernur>, diakses April 2014
- Konvensi Capres Demokrat “Gerbang Emas” untuk Sri Mulyani, (online), <http://www.beritasatu.com/nasional/124822-konvensi-capres-demokrat-gerbang-emas-untuk-sri-mulyani.html>, Diakses tanggal 10 Juli 2013
- Kosgoro1957.net: <http://www.kosgoro1957.net/deklarasi-kosgoro-1957/> (Diakses Desember 2013).
- KPK Selesaikan Pemeriksaan Angpao Pernikahan Hidayat Nurwahid Rp 191 Juta, (online), <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews>.

- htm?id=500921 Diakses tanggal 4 Mei 2008
- Laporan Wawancara Asiaweek. 2000.
- Lembaga Survei Sarankan Golkar Cari Capres Lain [online]. <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/17/078530319/Lembaga-Survei-Sarankan-Golkar-Cari-Capres-Lain> (Diakses 12 Desember 2013).
- Mahfud MD Putuskan Tahun 2013 Soal Cawapres. [online]. <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.BeritaDetail&id=844>. Diakses tanggal 3 Desember 2012.
- Mahfud MD. *Politik-Hukum Kancil Pilek*. Jawa Pos, 13 Juni 2007.
- Marzuki Alie Mantap Jadi Calon Presiden 2014, (online), <http://www.antarane.ws.com/berita/385898/marzuki-alie-mantap-jadi-calon-presiden-2014>
- Masyarakat Ingin Jokowi Jadi Presiden, Ahok Tetap di DKI, (online).
- Membumikan Gagasan Restorasi Surya Paloh, (online), <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/05/1/192637/-Membumikan-Gagasan-Restorasi-Surya-Paloh> Diakses tanggal 5 November 2013
- Mengasuh Mutiara dalam Dirinya [online]. <http://tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/339-mengasah-mutiara-dalam-dirinya>(Diakses 16 Desember 2013).
- Mengorek Masa Kecil Gubernur Sulsel [online]. <http://aryafatta.wordpress.com/2009/04/20/mengorek-masa-kecil-gubernur-sulsel/> (Diakses 26 Desember 2013)
- Moko Mobil Produksi Pemprov Sulsel Seharga Rp. 45 Juta <http://news.okezone.com/read/2012/01/12/340/556008/moko-mobil-produksi-pemprov-sulsel-seharga-rp45-juta> , diakses April 2014
- PAN Resmi Tetapkan Hatta Rajasa Menjadi Capres, (online), <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/11/18534653/PAN.Resmi.Tetapkan.Hatta.Rajasa.Menjadi.Capres>, Diakses tanggal 11 Desember 2011
- Peduli Keluarga, Hatta Luncurkan Buku Cerita Anak, (online), <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/12/mujoth-peduli-keluarga-hatta-luncurkan-buku-cerita-anak> Diakses tanggal 12 Oktober 2013.
- Pemira PKS, Hidayat Nur Wahid Unggul di Jateng, (online), <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/03/181903/Pemira-PKS-Hidayat-Nur-Wahid-Unggul-di-Jateng>, Diakses tanggal 3 Desember 2013

- Pemira PKS, Hidayat Nurwahid Ungguli Anis Matta di Kendal, (online), <http://regional.kompas.com/read/2013/12/02/0402323/Pemira.PKS.Hidayat.Nurwahid.Ungguli.Anis.Matta.di.Kendal>, Diakses tanggal 2 Desember 2013.
- Pemprov Sulsel Terima Penghargaan IPTEK Budipura, <http://www.sulsel.go.id/content/pemprov-sulsel-terima-penghargaan-iptek-budipura>, diakses April 2014
- Populerkan Batik dan Gamelan, Sultan HB X Diundang ke AS, (online), <http://travel.kompas.com/read/2013/10/10/1413396/Populerkan.Batik.dan.Gamelan.Sultan.HB.X.Diundang.ke.AS> Diakses tanggal 10 Oktober 2013
- Prabowo Edhie Wibowo [online]. http://id.wikipedia.org/wiki/Pramono_Edhie_Wibowo. (Diakses 20 Desember 2013)
- Prabowo Edhie Wibowo [online]. <https://facebook.com/PramonoEdhieWibowo>. (Diakses 20 Desember 2013)
- Profil The Indonesia Insitutute (online). <http://theindonesianinstitute.com/profil-the-indonesian-institute>. Diakses 20 Maret 2014.
- Program Pendidikan Gratis Habiskan Rp800 Miliar [online]. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/21/09465045/Program.Pendidikan.Gratis.Habiskan.Rp.800.Miliar> (Diakses 26 Desember 2013).
- Puan Maharani [online]. http://id.wikipedia.org/wiki/Puan_Maharani. (Diakses 25 Desember 2013).
- Puan Maharani. *Patriotisme Pemuda*. Harian Kompas, 25 Oktober 2012.
- Republika, EdisiAhad 8 Februri 2004
- Republika, EdisiKamis, 22 April 2004
- Rhoma Irama yang Hibinya Berkelahi [online]. <http://showbiz.liputan6.com/read/735833/rhoma-irama-kecil-yang-hobinya-berkelahi> (Diakses 19 Desember 2013).
- Risma Tak Tertarik Berlabuh ke Partai Demokrat, (online), <http://news.detik.com/surabaya/read/2012/05/15/135127/1917485/466/risma-tak-tertarik-berlabuh-ke-partai-demokrat> Diakses tanggal 15 Mei 2012
- Rismaharini, Walikota Anti Kompromi, (online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110131_tokohbbctrirismaharini.shtml Diakses tanggal 31 Januari 2011
- Sarundajang Bahas Terwujudnya Negara Kepulauan yang Sejahtera, (online). <http://www.demokrat.or.id/2014/01/sarundajang-bahas->

- terwujudnya-negara-kepulauan-yang-sejahtera /
 Sarundajang Tokoh Pluralisme Calon Alternatif Wapres 2014 [online].
<http://www.antarasulut.com/print/19490/sarundajang-tokoh-pluralisme-calon-alternatif-wapres-2014> (Diakses Desember 2013).
 SBY Apresiasi Kinerja Syahrul, <http://koran-sindo.com/node/384861>, diakses April 2014
- Sejarah Singkat Kehidupan Rhoma Irama [online] <http://www.kumpulansejarah.com/2012/11/sejarah-singkat-kehidupan-rhoma-irama.html>. (Diakses 19 Desember 2013).
- Sinyo Harry Sarundajang [online] <http://apadansiapaorangsulut.com/dr-sinyo-harry-sarundajang/> (Diakses Desember 2013).
- Sinyo Harry Sarundajang [online] http://id.wikipedia.org/wiki/Sinyo_Harry_Sarundajang (Diakses Desember 2013).
- Sinyo Sang Mutiara dari Timur [online] Seputarsulut.com: <http://www.seputarsulut.com/dr-sinyo-harry-sarundajang-sang-mutiara-dari-timur/> (Diakses Desember 2013).
- Sinyo Sarundajang Siap Berpasangan Dengan Siapa Saja, Termasuk Jokowi, (online),
- Sulsel Raih Pataka Samkarya Nugraha, <http://www.bpkp.go.id/berita/read/12304/o/Sulsel-Raih-Pataka-Samkarya-Nugraha>. bpkp, diakses April 2014
- Sulsel sukses inovasi kakao <http://www.bumn.go.id/ptpn12/publikasi/sulsel-sukses-inovasi-kakao/>, diakses April 2014
- Survei BPS Pijakan Perbaikan Penyelenggaraan Haji [online]. <http://www.antaranews.com/berita/270905/survei-bps-pijakan-perbaikan-penyelenggaraan-haji> (Diakses Desember 2013).
- Surya Paloh Bangun SD Restorasi di Raja Ampat, (online), <http://nasional.inilah.com/read/detail/2043313/surya-paloh-bangun-sd-restorasi-di-raja-ampat#>. UsAc09IW134 Diakses tanggal 31 Oktober 2013
- Suryadharma Ali: Menteri Agama RI (2009-sekarang) [online]. <http://www.tokohindonesia.com/tokoh/article/282-ensiklopedi/2198-suryadharma-ali> (Diakses Desember 2013)
- Syahrul Yasin Limpo Pemimpin Masa Depan Tegas Berani dan Teruji Tahu Diri, Surya Paloh Tak Tentukan Capres, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/03/078534139/Tahu-Diri-Surya-Paloh-Tak-Tentukan>

- Capres, Diakses tanggal 3 Desember 2013
- Tahun Depan Tri Rismaharini Tutup Lokalisasi Dolly, (online), <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/29/tahun-depan-tri-rismaharini-tutup-lokalisasi-dolly>, Diakses tanggal 29 November 2013
- Tak Boleh Berpartai, Sultan Masih Bisa Jadi Capres, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/30/078426329/Tak-Boleh-Berpartai-Sultan-Masih-Bisa-Jadi-Capres>, Diakses tanggal 30 Agustus 2012
- Tak Mau Terakhir Masuk Surga, Tri Rismaharini Tolak Jadi Capres, (online), <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2013/11/30/tak-mau-terakhir-masuk-surga-tri-rismaharini-tolak-jadi-capres>, Diakses tanggal 30 November 2013.
- Tentang Pramono Edhie Wibowo [online]. <http://pramonoedhiewibowo.com/page/tentang-pramono-edhie-wibowo>. (Diakses 20 Desember 2013)
- Tokohindonesia.com: <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/1702-ketua-umum-tanfidz-dpp-pkb-2005-2010> (Diakses Desember 2013).
- Tokohindonesia.com: <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/282-arsitek-pemulihan-ekonomi> (Diakses Desember 2013).
- Tokoh-tokoh.com: <http://www.tokohtokoh.com/yusril-ihza-mahendra.html> (Diakses Desember 2013).
- Tri Rismaharini Menolak Dicalonkan Sebagai Gubernur Jatim, (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/27/078464062/Tri-Rismaharini-Menolak-Dicalonkan-Sebagai-Gubernur-Jatim>, Diakses tanggal 27 Februari 2013
- Tri Rismaharini, Dari Taman Sampai E-Government, <http://www.themarketeers.com/archives/tri-rismaharini-dari-taman-sampai-egovernment.html>, Diakses tanggal 12 Desember 2013
- Tri Rismaharini: Sepenuh Hati Menata Surabaya, (online), <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/362464-tri-rismaharini--sepenuh-hati-menata-surabaya>, Diakses tanggal 25 Oktober 2012
- Tutup Rakernas, Surya Paloh Bacakan 6 Sikap Politik Partai NasDem, (online), <http://news.detik.com/read/2013/12/03/192955/2431633/10/tutup-rakernas-surya-paloh-bacakan-6-sikap-politik-partai-nasdem> Diakses tanggal 3 Desember 2013

Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Isran_Noor (Diakses Desember 2013).

www.bulan-bintang.org

[www.dw.de. 2014. Jokowi. http://www.dw.de/jokowi/a-16988813](http://www.dw.de/2014/03/20/jokowi) . Diakses 20 Maret 2014

www.kopassus.mil.id/page.php?lang=id&menu=page_view&page_id=86. (Diakses 9 Desember 2013).

www.merdeka.com/peristiwa/kata-jenderal-kepercayaan-prabowo-soal-kerusuhan-dan-kudeta-98-isu-kudeta-prabowo-7.html. (Diakses 9 Desember 2013).

Yusril. ihzamahendra.com: <http://yusril.ihzamahendra.com/>(Diakses Desember 2013).

JEJAK PARA PEMIMPIN

“Jejak Para Pemimpin”, berawal dari gagasan yang paling pokok, bahwa dalam memilih pemimpin tak cukup hanya karena populer, tetapi perlu sejenak membuka rekam jejak (*track record*) dan visi-misi pemikiran seorang kandidat. Sejatinya rakyat membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan paripurna, yang tak hanya mampu mensinergikan antara kata dan perbuatan (berintegritas), tetapi juga mampu mendiagnosa, menawarkan solusi sekaligus menggerakkan rakyat untuk bersama menyelesaikan segala problem kebangsaan. Karena itulah, mengupas perjalanan dan pengalaman para pemimpin mulai dari *zero* hingga *hero* menjadi relevan dan penting agar publik memiliki referensi yang cukup sebelum menentukan pilihan.

Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, mereka muncul dari serangkaian proses seleksi (formal atau informal), berinteraksi dengan masalah, konsistensi terhadap tanggung jawab, serta kematangan dalam mengambil keputusan. Karena itu, diperlukan kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan.

Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin, karena esensi kepemimpinan adalah proses saling memberi dan menerima. Di dalam buku ini, ada begitu banyak pelajaran hidup dan kisah sukses (*success story*) inspiratif para pemimpin yang layak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.



poltracking didirikan oleh Hanta Yuda AR pada 14 Agustus 2012 di Jakarta. Bersama sekelompok anak muda Indonesia dengan latar belakang berbeda: mantan aktivis mahasiswa, akademisi serta praktisi profesional, mereka bergabung dalam sebuah lembaga riset dengan struktur organisasi yang ramping. Poltracking merupakan lembaga penyelenggara jasa riset/survei (survei opini publik, survei opini media, dan survei opini elite/pakar), serta memproduksi analisa dan strategi politik yang inovatif, kompeten, dan profesional. Fokus aktivitas poltracking didorong oleh sebuah pengertian bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan riset dan survei yang kredibel dan dapat diandalkan, karena itu poltracking berusaha dengan keras membangun, mempertahankan dan mempersembahkan karya-karya akademis berkualitas tinggi dalam semua aspek kegiatannya.



www.poltracking.com



[pol-tracking](https://www.facebook.com/pol-tracking)



[@poltracking](https://twitter.com/poltracking)



[poltracking](https://www.youtube.com/poltracking)



Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I Lantai 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270
www.gramediapustakautama.com

ISBN: 978-602-03-0548-6



9 786020 305486
GM 20701140006